PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021-2026

"Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman"

WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Balikpapan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RPJMD

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh PD disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra PD, dan rencana kerja PD.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

(1) Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
   a. BAB I PENDAHULUAN;
   b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
   c. BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
   d. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH;
   e. BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN;
   f. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;
   g. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
   h. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; dan
   i. BAB IX PENUTUP

(2) Rincian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJMD dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.

(2) Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

(3) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota.

(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN

Pasal 5

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup:
      1. bencana alam;
      2. goncangan politik;
      3. krisis ekonomi;
      4. konflik sosial budaya;
      5. gangguan keamanan;
      6. pemekaran Daerah; atau
      7. perubahan kebijakan nasional.

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra PD.

(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Wali Kota dan wakil Wali Kota menyusun RKPD pada tahun terakhir pemerintahannya.

(2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah periode tahun 2005-2025 dan target kinerja RPJMD yang belum tercapai, sebelum rencana pembangunan jangka menengah Daerah periode berikutnya ditetapkan.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Wali Kota dan wakil Wali Kota terpilih berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 25 November 2021

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Keberhasilan penyelenggaraan program-program pembangunan Daerah tidak terlepas dari perencanaan pembangunan Daerah yang telah dilakukan dan ditetapkan sebelumnya. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/Daerah dalam jangka waktu tertentu. Tahapan perencanaan Daerah tersebut meliputi tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Salah satu bentuk perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Sesuai amanat ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Wali Kota dilantik.

RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh PD disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Selanjutnya RPJMD menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) bagi PD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 60

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 26 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (64.71/II/49/6/2021);

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L. TORUAN

DAFTAR ISI

COVER ..... - i -

DAFTAR ISI ..... - ii -

DAFTAR TABEL ..... - iv -

DAFTAR GAMBAR ..... - ix -

BAB I

PENDAHULUAN ..... - 1 -

1.1. Latar Belakang ..... - 1 -

1.2. Dasar Hukum Penyusunan ..... - 2 -

1.3. Hubungan Antar-Dokumen ..... - 5 -

1.3.1. RPJMN 2020-2024 ..... - 5 -

1.3.2. RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 ..... - 6 -

1.3.3. RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 ..... - 8 -

1.3.4. RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023 ..... - 9 -

1.3.5. RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 ..... - 10 -

1.4. Maksud dan Tujuan ..... - 11 -

1.5. Sistematika Penulisan ..... - 11 -

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..... - 14 -

2.1. Aspek Geografi dan Demografi ..... - 14 -

2.1.1. Aspek Geografi ..... - 14 -

2.1.2. Aspek Demografi ..... - 33 -

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... - 34 -

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ..... - 34 -

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial ..... - 43 -

2.3. Aspek Pelayanan Umum ..... - 50 -

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar ..... - 50 -

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar ..... - 78 -

2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan ..... - 118 -

2.4. Aspek Daya Saing Daerah ..... - 130 -

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ..... - 130 -

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur ..... - 130 -

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi ..... - 134 -

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia ..... - 136 -

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH ..... - 148 -

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu (2016-2020) ..... - 149 -

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ..... - 159 -

3.3. Kerangka Pendanaan ..... - 162 -

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH ..... - 172 -
4.1 Permasalahan Pembangunan ..... - 172 -
4.1.1 Permasalahan Daerah ..... - 172 -
4.1.2. Permasalahan Pembangunan Kota Balikpapan ..... - 192 -
4.2 Isu-Isu Strategis ..... - 200 -
4.2.1 Isu Strategis Internasional ..... - 200 -
4.2.2 Isu Strategis Nasional ..... - 206 -
4.2.3 Isu Strategis Provinsi Kalimantan Timur ..... - 212 -
4.2.4 Isu Strategis Kabupaten/Kota Berbatasan ..... - 214 -
4.3 Perumusan Isu Strategis ..... - 237 -
BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ..... - 243 -
5.1. Visi ..... - 243 -
5.2. Misi ..... - 244 -
5.3. Tujuan dan Sasaran ..... - 246 -
BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ..... - 261 -
6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 ..... - 261 -
6.2. Arah Kebijakan Kewilayahan ..... - 274 -
6.3. Program Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 ..... - 277 -
BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH ..... - 297 -
BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ..... - 323 -
8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Balikpapan ..... - 325 -
8.2. Penetapan Indikator Kinerja Kunci Pemerintah Kota Balikpapan ..... - 327 -
BAB IX
PENUTUP ..... - 345 -
9.1 Kaidah Pelaksanaan ..... - 345 -
9.2 Pedoman Transisi ..... - 345 -

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan Kota Balikpapan ..... - 15 -
Tabel 2.2 Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Topografi (Ketinggian) ..... - 18 -
Tabel 2.3 Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Topografi (Ketinggian) ..... - 19 -
Tabel 2.4 Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Kelerengan ..... - 19 -
Tabel 2.5 Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Kelerengan ..... - 20 -
Tabel 2.6 Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW Kota Balikpapan 2012-2032 ..... - 22 -
Tabel 2.7 Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Kota Balikpapan ..... - 28 -
Tabel 2.8 Jumlah Bencana yang Terjadi di Kota Balikpapan Menurut Jenis Bencana Tahun 2016-2020 ..... - 31 -
Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2020 ..... - 33 -
Tabel 2.10 Produk Domestik Regional Bruto Kota Balikpapan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 ..... - 34 -
Tabel 2.11 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Balikpapan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Persen) .... - 35 -
Tabel 2.12 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 ..... - 36 -
Tabel 2.13 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2016-2020 ..... - 37 -
Tabel 2.14 Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2016 – 2020 ..... - 42 -
Tabel 2.15 Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru di Kota Balikpapan Tahun 2020 .. - 51 -
Tabel 2.16 Rasio Guru terhadap Murid di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020.... - 51 -
Tabel 2.17 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut KecamatanTahun 2020 ..... - 56 -
Tabel 2.18 Angka Kematian Ibu Tahun 2016-2020 ..... - 59 -
Tabel 2.19 Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBA) di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 ..... - 60 -
Tabel 2.20 Angka Penderita Penyakit HIV dan AIDS, Demam Berdarah, dan TBC Tahun 2016-2020 ..... - 62 -
Tabel 2.21 Cakupan Kelurahan Siaga dan UKBM Aktif Di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 ..... - 62 -
Tabel 2.22 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalandi Kota Balikpapan (km) Tahun 2016-2020 ..... - 64 -
Tabel 2.23 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kota Balikpapan (km) Tahun 2016-2020 ..... - 64 -
Tabel 2.24 Tingkat Kualitas Trotoar dan Jalan di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 ..... - 64 -
Tabel 2.25 Indeks Aksesibilitas Kawasan Perkotaan di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 ..... - 64 -
Tabel 2.26 Luas Genangan Banjir di Kota Balikpapan Tahun 2018-2020 ..... - 66 -
Tabel 2.27 Sumber Air Baku Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 ..... - 66 -
Tabel 2.28 Perkembangan Pelayanan Air Minum Perpipaan PDAM Tahun 2016-2020 ..... - 66 -
Tabel 2.29 Layanan Jaringan Air Minum Perpipaan di Kota Balikpapan ..... - 67 -
Tabel 2.30 Capaian Akses Aman dan Akses Layak Air Minum Tahun 2020-2021 ..... - 67 -
Tabel 2.31 Sarana Prasarana Pengelolaan Air Limbah Di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 ..... - 67 -
Tabel 2.32 Sarana dan Prasarana Persampahan Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 ..... - 68 -
Tabel 2.33 Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang Kota Balikpapan 2016 – 2020 ..... - 69 -
Tabel 2.34 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Tahun 2016-2020 ..... - 69 -
Tabel 2.35 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kota Balikpapan Tahun 2020 ..... - 70 -
Tabel 2.36 Capaian Penurunan Backlog Perumahan ..... - 70 -
Tabel 2.37 Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Baseline Tahun 2014 ... - 71 -
Tabel 2.38 Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Baseline Tahun 2020 ... - 71 -
Tabel 2.39 Banyaknya Peristiwa Kejahatan dan Pelanggaran yang Dilaporkan di Kota Balikpapan Menurut Jenisnya, 2016-2020 ..... - 72 -
Tabel 2.40 Angka Kriminalitas dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2020 ..... - 73 -
Tabel 2.41 Cakupan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 ..... - 74 -
Tabel 2.42 Cakupan Penegakan Perda dan Perkada dan Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan Di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 ..... - 75 -
Tabel 2.43 Capaian Kinerja Layanan SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas Kota Balikpapan Tahun 2016 - 2020 ..... - 75 -
Tabel 2.44 Capaian Kinerja Layanan SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2016 - 2020 ..... - 77 -
Tabel 2.45 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Tahun 2016-2020 ..... - 78 -
Tabel 2.46 Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar dan Belum Ditempatkan Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2020 ..... - 79 -
Tabel 2.47 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kota Balikpapan 2016 – 2020 ..... - 81 -
Tabel 2.48 Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kota Balikpapan dan .... - 82 -
Tabel 2.49 Indikator IDG Kota Balikpapan tahun 2016-2020 ..... - 83 -
Tabel 2.50 Jumlah Kasus Penyelesaian Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan ..... - 83 -
Tabel 2.51 Laporan Jenis Kasus Kekerasan Terhadap Anak ..... - 85 -
Tabel 2.52 Capaian Kinerja Layanan SPM Bidang Urusan Pangan Kota Balikpapan Tahun 2016 - 2020 ..... - 86 -
Tabel 2.53 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2020 ..... - 87 -
Tabel 2.54 Kebutuhan Lahan Pembangunan Waduk Teritib, Embung Aji Raden dan ITK ..... - 88 -
Tabel 2.55 Persentase Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga Tahun 2016-2020 ..... - 95 -
Tabel 2.56 Jumlah Penduduk Wajib KTP dan Memiliki e-KTP Tahun 2016 – 2020 ..... - 96 -
Tabel 2.57 Data Kepemilikan Akta Kelahiran Untuk Penduduk Usia Anak Tahun 2016 – 2020 ..... - 97 -
Tabel 2.58 Cakupan Penerbitan Akta Kematian dan Kartu Identitas Anak di Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2020 ..... - 98 -
Tabel 2.59 Data Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Balikpapan Tahun 2020 ..... - 98 -
Tabel 2.60 Dana Swadaya Masyarakat Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 ..... - 99 -
Tabel 2.61 Jumlah Akseptor KB Aktif Menurut Kecamatan di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 ..... - 100 -
Tabel 2.62 Persentase Pasangan Usia Subur dan Akseptor Keluarga Berencana Tahun 2016 - 2020 ..... - 101 -
Tabel 2.63 Capaian Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 ..... - 102 -
Tabel 2.64 Banyaknya Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (Unit) Di Kota Balikpapan Tahun 2020 ..... - 103 -
Tabel 2.65 Perbandingan Angkutan Kota terhadap Jumlah Kendaraan ..... - 104 -
Tabel 2.66 Jumlah Fasilitas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2016-2020 ..... - 104 -
Tabel 2.67 Data Menara Telekomunikasi Kota Balikpapan Tahun 2017-2020 ... - 105 -

Tabel 2.68 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020 ..... - 106 -
Tabel 2.69 Jumlah Koperasi Aktif Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 ..... - 106 -
Tabel 2.70 Jumlah UMKM di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 ..... - 107 -
Tabel 2.71 Perkembangan UMKM Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 ..... - 107 -
Tabel 2.72 Capaian Kinerja Urusan Koperasi UMKM 2016-2020 ..... - 108 -
Tabel 2.73 Realisasi Investasi Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 ..... - 109 -
Tabel 2.74 Realisasi Investasi Menurut Sektor Usaha Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 (juta rupiah) ..... - 109 -
Tabel 2.75 Capaian Kinerja Pengelolaan Perizinan Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 ..... - 110 -
Tabel 2.76 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga 2016-2020 ... - 112 -
Tabel 2.77 Ketersediaan Dokumen Statistik di Kota Balikpapan 2016–2020 ..... - 112 -
Tabel 2.78 Capaian Kinerja Urusan Persandian Tahun 2016-2020 ..... - 113 -
Tabel 2.79 Prestasi di Bidang Seni, Budaya, dan Keagamaan ..... - 115 -
Tabel 2.80 Jumlah Cagar Budaya yang Dilindungi ..... - 115 -
Tabel 2.81 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2016-2020 ..... - 117 -
Tabel 2.82 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan 2016-2020 ..... - 117 -
Tabel 2.83 Capaian Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 – 2020 ..... - 118 -
Tabel 2.84 Objek dan Nama Tempat Wisata di Kota Balikpapan ..... - 119 -
Tabel 2.85 Arah Strategi Pengembangan Pariwisata Berdasarkan SDG's ..... - 121 -
Tabel 2.86 Capaian Kinerja Sektor Pariwisata Tahun 2016 – 2020 ..... - 121 -
Tabel 2.87 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB ..... - 122 -
Tabel 2.88 Luas Panen Padi dan Palawija (Ha) di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 ..... - 123 -
Tabel 2.89 Produksi Panen Padi dan Palawija (Ton) di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 ..... - 123 -
Tabel 2.90 Luas Tanam, Panen dan Produksi Tahun 2016 – 2020 ..... - 123 -
Tabel 2.91 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2016 – 2020 ..... - 124 -
Tabel 2.92 Sarana Perdagangan di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 ..... - 125 -
Tabel 2.93 Jumlah Kios dan Pedagang Kaki Lima di Kota Balikpapan Tahun 2020 ..... - 125 -
Tabel 2.94 Realisasi Ekspor dan Impor Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 ..... - 126 -
Tabel 2.95 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kota Balikpapan 2016 – 2020 ..... - 126 -
Tabel 2.96 Jumlah Usaha Kecil yang Mendapat Sertifikasi Kompetensi di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 ..... - 127 -
Tabel 2.97 Jumlah Usaha Non-Kecil yang Mendapat Sertifikasi Kompetensi di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 ..... - 127 -
Tabel 2.98 Perkembangan Sektor Perindustrian Kota Balikpapan ..... - 127 -
Tabel 2.99 Perkembangan Kelompok Industri Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 ..... - 129 -
Tabel 2.100 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian 2016-2020 ..... - 129 -
Tabel 2.101 Proyeksi Kebutuhan Lahan dan Jumlah Kawasan Industri Baru Tahun 2015-2035 ..... - 130 -
Tabel 2.102 Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita ..... - 130 -
Tabel 2.103 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2016-2020 ..... - 131 -
Tabel 2.104 Pertumbuhan Penumpang Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan Tahun 2016-2020 ..... - 131 -
Tabel 2.105 Arus Penumpang Turun dan Naik Angkutan Laut di Pelabuhan .... - 132 -
Tabel 2.106 Penilaian Kesesuaian Rencana Pola Ruang dan Tutupan Lahan .... - 132 -
Tabel 2.107 Infrastruktur Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 ..... - 133 -
Tabel 2.108 Konsumen Air Bersih di Kota Balikpapan Tahun 2020 ..... - 133 -
Tabel 2.109 Jumlah Pelanggan Listrik Berdasarkan Kelompok Tarif Tahun 2016-2020 ..... - 134 -
Tabel 2.110 Kondisi Penyediaan Listrik di Kota Balikpapan

Tahun 2016-2020 ..... - 134 -
Tabel 2.111 Realisasi Investasi Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 ..... - 134 -
Tabel 2.112 Banyaknya Peristiwa Kejahatan dan Pelanggaran yang Dilaporkan Menurut Jenisnya Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2020 ..... - 135 -
Tabel 2.113 Jumlah Tempat Usaha, Tempat Tinggal, dan Lain-lain yang Mengurus Izin di DPMPT Kota Balikpapan Tahun 2016-2020..... - 136 -
Tabel 2.114 Capaian Tingkat Pengembangan ASN Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 ..... - 138 -
Tabel 2.115 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi DaerahTerhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Balikpapan 139
Tabel 3.1 Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 ..... - 149 -
Tabel 3.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 ..... - 150 -
Tabel 3.3 Realisasi Pajak Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 ..... - 151 -
Tabel 3.4 Realisasi Retribusi Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 ..... - 151 -
Tabel 3.5 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 ..... - 153 -
Tabel 3.6 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 ..... - 156 -
Tabel 3.7 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Balikpapan ..... - 157 -
Tabel 3.8 Analisis Rasio Likuiditas Kota Balikpapan Tahun 2020 ..... - 158 -
Tabel 3.9 Rasio Solvabilitas Kota Balikpapan Tahun 2020 ..... - 158 -
Tabel 3.10 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Balikpapan ..... - 160 -
Tabel 3.11 Defisit Riil Anggaran Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 ..... - 160 -
Tabel 3.12 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Balikpapan Tahun 2016 - 2020 ..... - 161 -
Tabel 3.13 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2020 ..... - 161 -
Tabel 3.14 Sumber Pendapatan Daerah Lainnya Sementara ..... - 164 -
Tabel 3.15 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi ..... - 166 -
Tabel 3.16 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021 - 2026 Kota Balikpapan ..... - 168 -
Tabel 3.17 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Balikpapan ..... - 169 -
Tabel 3.18 Rencana Pembangunan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah ..... - 170 -
Tabel 3.19 Program Pembangunan Daerah atau Program Unggulan (dedicated) Kepala Daerah ..... - 170 -
Tabel 4.1 Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Kota Balikpapan (Tabel T-B. 36) ..... - 173 -
Tabel 4.2 Indeks Pembangunan Manusia ..... - 194 -
Tabel 4.3 Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Kewilayahan Kota Balikpapan ..... - 214 -
Tabel 4.4 Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 ..... - 218 -
Tabel 4.5 Keterkaitan KHLS RPJMD Kota Balikpapan dan RPJMD Kota Balikpapan ..... - 229 -
Tabel 5.1 Keterkaitan Isu Strategis, Tujuan, Sasaran dan Indikator ..... - 253 -
Tabel 5.2 Target Indikator Tujuan dan Sasaran Kinerja RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026 ..... - 258 -
Tabel 6.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kota Balikpapan ..... - 268 -
Tabel 6. 2 Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif di Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 ..... - 278 -
Tabel 7.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan

Pendanaan Kota Balikpapan .....- 298 -
Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Penunjang yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Balikpapan .....- 321 -
Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.....- 326 -
Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Kunci Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.....- 328 -

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Posisi Strategis Kota Balikpapan Sebagai Penyangga IKN.....- 14 -
Gambar 2.2 Peta Wilayah Kota Balikpapan Per Kecamatan dan Kelurahan.....- 15 -
Gambar 2.3 Peta Curah Hujan Kota Balikpapan Tahunan Historikal 1991-2020 .....- 16 -
Gambar 2.4 Peta Curah Hujan Kota Balikpapan Tahunan Model CSIRO RCP452021-2050 .....- 16 -
Gambar 2.5 Peta Curah Hujan Kota Balikpapan Tahunan Model MIROC RCP45 Periode 2021-2050 .....- 16 -
Gambar 2.6 Peta Curah Hujan Kota Balikpapan Musiman Historikal 1991-2020 .....- 16 -
Gambar 2.7 Peta Suhu Kota Balikpapan Tahunan Historikal 1991-2020.....- 17 -
Gambar 2.8 Peta Suhu Kota Balikpapan Tahunan Model CSIRO RCP45 2021-2050 .....- 17 -
Gambar 2.9 Peta Suhu Kota Balikpapan Tahunan Model MIROC RCP45 2021-2050 .....- 17 -
Gambar 2.10 Peta DAS Kota Balikpapan .....- 18 -
Gambar 2.11 Peta Ketinggian Kota Balikpapan.....- 19 -
Gambar 2.12 Peta Ketinggian Kota Balikpapan.....- 19 -
Gambar 2.13 Peta Kelerengan Kota Balikpapan .....- 20 -
Gambar 2.14 Peta Jenis Tanah Kota Balikpapan .....- 21 -
Gambar 2.15 Peta Penggunaan Lahan Kota Balikpapan.....- 23 -
Gambar 2.16 Peta Pengembangan Wilayah Sektor Industri Kota Balikpapan .....- 28 -
Gambar 2.17 Peta Pengembangan Wilayah Sektor Pariwisata Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Utara.....- 30 -
Gambar 2.18 Peta Pengembangan Wilayah Sektor Pariwisata Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Timur .....- 30 -
Gambar 2.19 Peta Pengembangan Wilayah Sektor Pariwisata Kota Balikpapan Kecamatan BalikpapanSelatan.....- 30 -
Gambar 2.20 Peta Pengembangan Wilayah Sektor Pariwisata Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Barat.....- 30 -
Gambar 2.21 Peta Pengembangan Wilayah Sektor Pariwisata Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Tengah .....- 30 -
Gambar 2.22 Peta Pengembangan Wilayah Sektor Pariwisata Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Kota .....- 30 -
Gambar 2.23 Peta Indeks Bahaya Banjir Kota Balikpapan(Baseline 1991-2020 dan Proyeksi 2021-2050) .....- 32 -
Gambar 2.24 Peta Indeks Bahaya Tanah Longsor Kota Balikpapan (Baseline 1991-2020 dan Proyeksi 2021-2050) .....- 32 -
Gambar 2.25 Peta Indeks Bahaya Kekeringan Kota Balikpapan .....- 33 -
Gambar 2.26 Diagram Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2020.....- 34 -
Gambar 2.27 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 (%) .....- 36 -
Gambar 2.28 PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah).....- 36 -
Gambar 2.29 Distribusi Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap Provinsi Kalimantan Timur .....- 37 -
Gambar 2.30 Perbandingan Inflasi Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, danNasional .....- 38 -
Gambar 2.31 Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) dan Persentase Penduduk Miskin (%) Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 .....- 39 -
Gambar 2.32 Perbandingan Jumlah &Persentase Penduduk Miskin (P0) menurut Kota di Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Banjarmasin Tahun 2020.....- 40 -
Gambar 2.33 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Indeks dan Keparahan

Kemiskinan (P2) Tahun 2016-2020 ..... - 41 -
Gambar 2.34 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 ..... - 41 -
Gambar 2.35 Peta Sebaran Penduduk Miskin Kota Balikpapan..... - 41 -
Gambar 2.36 Perbandingan Indeks Gini Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional ..... - 43 -
Gambar 2.37 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan IPM (%) Kota Balikpapan Tahun 2016-2020..... - 43 -
Gambar 2.38 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 ..... - 44 -
Gambar 2.39 Perbandingan IPM Kota Balikpapan dengan Kota di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Makassar, Banjarmasin, Semarang dan Nasional Tahun 2016-2020..... - 44 -
Gambar 2.40 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Balikpapan Tahun 2016-2020..... - 45 -
Gambar 2.41 RLS Kota Balikpapan Menurut Gender Tahun 2016-2020..... - 45 -
Gambar 2.42 RLSKabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, 2020 ..... - 46 -
Gambar 2.43 Harapan Lama Sekolah Kota Balikpapan Tahun 2016-2020..... - 46 -
Gambar 2.44 HLS Kota Balikpapan Menurut Gender Tahun 2016-2020..... - 47 -
Gambar 2.45 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur ..... - 47 -
Gambar 2.46 Angka Harapan Hidup (Tahun) Kota Balikpapan Tahun 2016-2020..... - 48 -
Gambar 2.47 Angka Harapan Hidup Kota Balikpapan Menurut Gender Tahun 2016-2020..... - 49 -
Gambar 2.48 Angka Harapan Hidup (Tahun) se-Kalimantan Timur Tahun 2020 - 49 -
Gambar 2.49 Pengeluaran Per Kapita Kota Balikpapan Tahun 2016 - 2020..... - 50 -
Gambar 2.50 Pengeluaran Per Kapita Kota Balikpapan Menurut Gender Tahun 2016-2020..... - 50 -
Gambar 2.51 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 ..... - 50 -
Gambar 2.52 Angka Partisipasi Kasar Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2020..... - 51 -
Gambar 2.53 Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2020 ..... - 53 -
Gambar 2.54 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2020 ..... - 53 -
Gambar 2.55 Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2020 ..... - 54 -
Gambar 2.56 Angka Putus Sekolah Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2020 ..... - 54 -
Gambar 2.57 Persentase Sekolah Pendidikan dengan Kondisi Bangunan Baik Di Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2020 ..... - 55 -
Gambar 2.58 Rasio Ketersediaan Sekolah Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2020 .- 55 -
Gambar 2.59 Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit yang Terakreditasi Nasional Di Kota Balikpapan tahun 2016-2020 ..... - 56 -
Gambar 2.60 Persentase Akreditasi Puskesmas Kota Balikpapan..... - 56 -
Gambar 2.61 Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Rumah Sakit Di Kota Balikpapan tahun 2016-2020..... - 57 -
Gambar 2.62 Persentase Ketersediaan SDM Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Kota Balikpapan tahun 2016-2020..... - 59 -
Gambar 2.63 Indeks Kepuasan Infrastruktur Dasar (IKLI) tahun 2016 - 2020 .... - 63 -
Gambar 2.64 Persentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik dan Titik Banjir di Kota Balikpapan tahun 2016-2020 ..... - 65 -
Gambar 2.65 Peta Sebaran Titik Banjir Kota Balikpapan Tahun 2020..... - 65 -
Gambar 2.66 Rata-Rata Volume Sampah Harian Ke TPAS Manggar Kota Balikpapan Tahun 2016-2020..... - 68 -
Gambar 2.67 Indeks Pembangunan Gender Kota Balikpapan

Tahun 2016 – 2020 ..... - 81 -
Gambar 2.68 Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dan Indonesia Tahun 2016 – 2020 ..... - 83 -
Gambar 2.69 Capaian Persentase Penyelesaian Penanganan Korban Kekerasan terhadap Anak ..... - 84 -
Gambar 2.70 Indeks IKA, IKLH, ITH dan IKU Tahun 2016-2020 ..... - 92 -
Gambar 2.71 Persentase Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 ..... - 95 -
Gambar 2.72 Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 ..... - 96 -
Gambar 2.73 Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 ..... - 97 -
Gambar 2.74 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Urusan Penanaman Modal di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 ..... - 111 -
Gambar 2.75 Jumlah Objek Wisata di Kota Balikpapan Menurut Jenisnya Tahun 2020 ..... - 119 -
Gambar 2.76 Sub Sektor Ekonomi Kreatif Kota Balikpapan ..... - 122 -
Gambar 2.77 Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Tanaman Perkebunan dan Ternak (Ribu Ton) di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 ..... - 124 -
Gambar 2.78 Mini Market dan Toko Tradisional yang Belum Memiliki Izin Tahun 2020 ..... - 125 -
Gambar 3.1 Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 ..... - 150 -
Gambar 3.2 Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 ..... - 153 -
Gambar 3.3 Proporsi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 ..... - 154 -
Gambar 3.4 Rata-Rata Inflasi Kota Balikpapan tahun 2016-2020 ..... - 163 -
Gambar 3.5 Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan 2016-2020 ..... - 163 -
Gambar 4.1 Kerangka Logis Permasalahan Daerah dan Perangkat Daerah ..... - 172 -
Gambar 5.1 Misi RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026 ..... - 244 -
Gambar 5.2 Tujuan dan Sasaran Misi 1 ..... - 248 -
Gambar 5.3 Tujuan dan Sasaran Misi 2 ..... - 249 -
Gambar 5.4 Tujuan dan Sasaran Misi 3 ..... - 250 -
Gambar 5.5 Tujuan dan Sasaran Misi 4 ..... - 251 -
Gambar 5.6 Tujuan dan Sasaran Misi 5 ..... - 252 -
Gambar 5.7 (Sembilan) prioritas pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 ..... - 255 -
Gambar 6.1 Analisa Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal Kota Balikpapan ..... - 262 -
Gambar 6.2 Tahap Tema Pembangunan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026 ..... - 266 -
Gambar 6.3 Peta Rencana Kawasan Strategis Kota Balikpapan ..... - 274 -
Gambar 6.4 Rencana Keterpaduan Program DAS Ampal ..... - 276 -
Gambar 6.5 Arahan Pengembangan Sub Sektor dan Kewilayahan Ekonomi Kreatif Balikpapan ..... - 277 -

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah menjadi aspek strategis dalam menentukan arah kebijakan dan program daerah kedepannya. Melalui serangkaian metode dan analisis data yang tepat sasaran, dokumen perencanaan diharapkan dapat menjadi *guideline* bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Upaya percepatan pertumbuhan ekonomi, penanganan kesenjangan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah isu yang terus menjadi fokus dari setiap perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah sudah sepatutnya mengacu pada aspek-aspek seperti transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel. Disamping itu substansi perencanaannya-pun menekankan pada nilai-nilai yaitu holistik, tematik, integratif, dan spasial.

Kota Balikpapan merupakan salah satu kota yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada Serentak) tahun 2020. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, periodesasi RPJMD berdasarkan kepada masa jabatan bukan berdasarkan kepada waktu menjabat sehingga periodesasi RPJMD bagi daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2020 adalah tahun 2021-2026. Selanjutnya dalam rangka efektifitas penyusunan RKPD tahun 2022 bagi daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2020, penyusunan RKPD tahun 2022 berpedoman pada RPJPD 2005-2025, mempertimbangkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak tahun 2020, serta memperhatikan RKP Tahun 2022.

Adapun tahapan yang dilakukan dalam penyusunan RPJMD meliputi tahap perumusan kajian teknokratik, perumusan rancangan awal RPJMD, penyusunan rancangan RPJMD, pelaksanaan musrenbang RPJMD, perumusan rancangan akhir RPJMD, dan penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Karena posisinya yang cukup strategis sebagai dokumen induk perencanaan menengah, RPJMD menjadi acuan untuk semua OPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra)-nya masing-masing.

RPJMD Tahun 2021–2026 memperhatikan implementasi tahapan IV (2020-2025) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan Tahun 2005-2025, dengan tema berorientasi pada upaya mempertahankan dan memantapkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang. Tema tersebut fokus guna mewujudkan visi jangka panjang Kota Balikpapan sebagai Kota Jasa, Industri, Perdagangan, Pariwisata, Pendidikan dan Budaya dalam bingkai Madinatul Iman. Selain itu, RPJMD ini juga memperhatikan hasil evaluasi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 dan masukan dari seluruh para pemangku, serta mempertimbangkan dinamika geostrategis dan analisis atas berbagai tantangan utama dalam pembangunan daerah yang akan dihadapi Kota Balikpapan Tahun 2021-2026. RPJMD Tahun 2021–2026 menjadi sangat penting terutama mempersiapkan Kota Balikpapan sebagai beranda Ibu Kota Negara (IKN) sesuai arahan Pemerintah Pusat yang akan memindahkan ke Provinsi Kalimantan Timur. RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang disusun ini, akan diintegrasikan dengan visi dan misi Wali Kota Balikpapan yang terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

10. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

(COVID- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;

25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
27. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
28. Peraturan Menteri Dalam Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
36. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan Tahun 2005-2025;
37. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032;
38. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021-2041; dan

39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Hubungan Antar-Dokumen

Sebagai sebuah dokumen perencanaan pembangunan yang terintegrasi, RPJMD Kota Balikpapan perlu untuk mengacu dan mempertimbangkan substansi dari dokumen perencanaan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar proses perumusan pembangunan sesuai dengan keseluruhan perencanaan pembangunan baik di tingkat, daerah, provinsi, dan nasional.

Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, maka perlu melihat keterkaitan RPJMD Kota Balikpapan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti RPJMN Tahun 2020-2026, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032, serta dokumen perencanaan dari kabupaten yang bersebelahan dengan Kota Balikpapan. Berikut adalah alur hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya secara lebih spesifik:

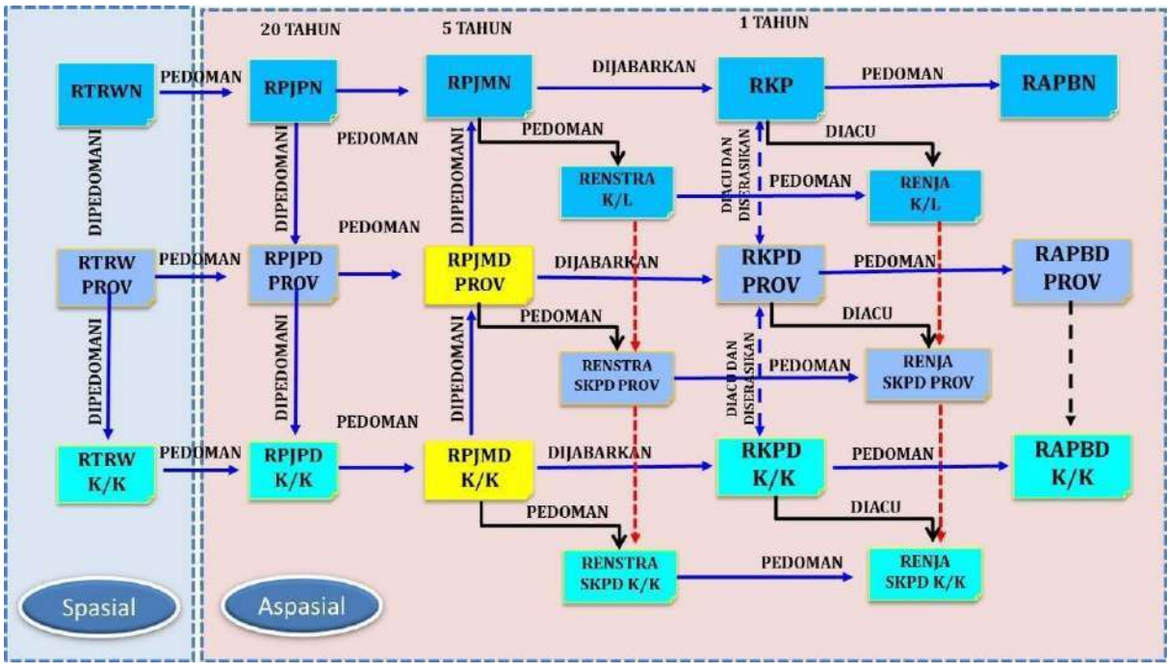

Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

1.3.1. RPJMN 2020-2024

Penyusunan RPJMD Kota Balikpapan mengacu pada RPJMN sebagai upaya untuk melakukan penyelarasan integrasi pembangunan nasional. Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, terdapat 6 arah kebijakan utama yaitu kesetaraan gender, tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan, kerentanan bencana dan perubahan iklim, modal sosial dan budaya, serta transformasi digital. Jika dijabarkan lebih spesifik, Pulau Kalimantan diarahkan

untuk mempercepat pertumbuhan wilayah dan memantapkan perannya sebagai lumbung energi nasional sekaligus sebagai salah satu paru-paru dunia.

Beberapa strategi yang dirancang adalah pengembangan komoditas unggulan: tanaman perkebunan; industri manufaktur antara lain: industri batubara dan pengilangan migas, industri kayu, barang dari kayu, gabus dll; pertambangan batu bara dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan utama, yang diprioritaskan untuk: pengembangan Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Kota Balikpapan sendiri memang diarahkan untuk mendukung program strategis nasional yaitu mendukung kedaulatan energi nasional. Salah satu *Major Project* yang direncanakan adalah proyek revitalisasi kilang minyak di Kota Balikpapan dengan durasi pengerjaan selama 3 (tiga) tahun. Diharapkan dengan pelaksanaan proyek ini akan meningkatkan penyediaan minyak mentah dan bahan bakar di Indonesia sehingga menurunkan ketergantungan pada impor.

1.3.2. RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Selain mengacu pada dokumen perencanaan nasional, RPJMD Kota Balikpapan juga harus mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini juga berkaitan dengan tingkat hierarki pemerintahan, dimana Kota Balikpapan terintegrasi dengan pembangunan dalam Provinsi Kalimantan Timur. Integrasi antara dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan kota adalah wujud dari upaya untuk menicptakan keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Adapun arah kebijakan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur fokus pada:

1. Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia dan tenaga kerja;
2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah;
3. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, penataan perizinan, dan pengendalian investasi;
4. Penguatan konektivitas dan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang; dan
6. Peningkatan kinerja tata kelola pemerintah daerah dan kualitas pelayanan publik.

Dalam prosesnya, keenam arah kebijakan ini diimplementasikan dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Pada tahun 2020 misalnya fokus pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin massif. Peningkatan SDM

menjadi kebijakan strategis karena dapat meningkatkan perekonomian khususnya di era yang semakin mengandalkan teknologi dalam aktivitas sehari-hari. Berlanjut pada tahun berikutnya, arah kebijakan Provinsi Kalimantan Timur fokus pada peningkatan perekonomian melalui perbaikan daya saing komoditi pada beberapa industri potensial seperti sektor energi dan sumber daya alam.

Kota Balikpapan sendiri juga diarahkan untuk mendukung tumbuhnya iklim usaha yang semakin baik. Hal ini diwujudkan melalui pengembangan kawasan industri. Kota Balikpapan memiliki komoditas produk unggulan berupa kayu lapis (*plywood*), udang beku, pengolahan kayu, galangan kapal, *moulding*, pengolahan rotan, kulit buaya dan garmen. Banyaknya keunggulan komoditi yang dimiliki Kota Balikpapan menjadikannya sebagai salah satu wilayah penopang utama perekonomian Provinsi Kalimantan Timur. Kemajuan pembangunan di kawasan pesisir terutama Balikpapan, Samarinda dan Bontang relatif lebih cepat dibanding wilayah lainnya, sementara sebagian masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang tinggal di kawasan perbatasan, perdesaan, daerah pedalaman, daerah tertinggal, dan pulau terdepan, masih menghadapi permasalahan dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat termasuk pangan dan gizi, layanan kesehatan dan pendidikan, kemiskinan, air bersih dan sanitasi, keterbatasan akses terhadap pengelolaan sumber daya alam, kerusakan lingkungan, dan keterbatasan infrastruktur.

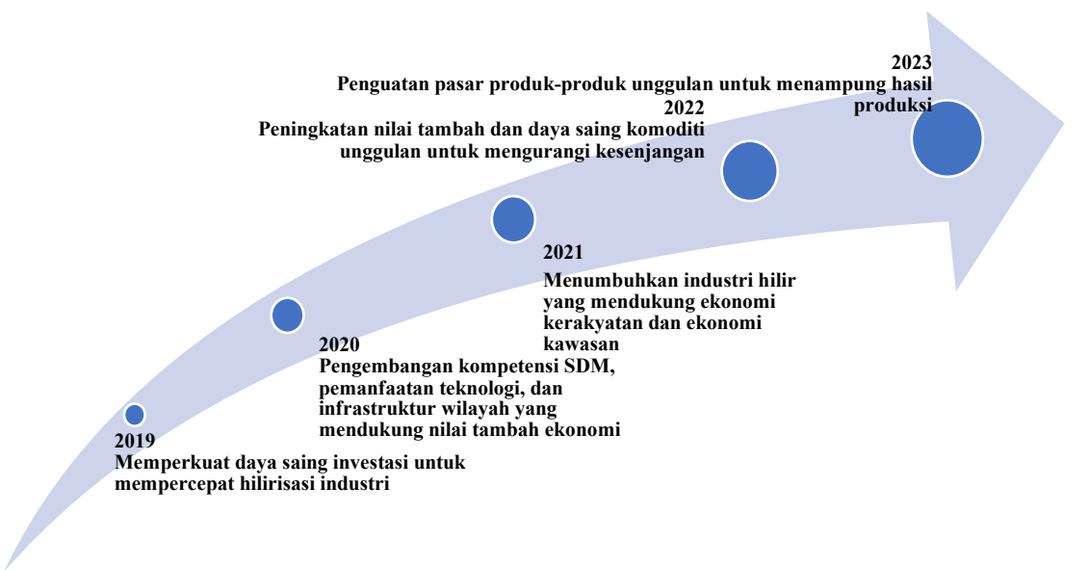

Gambar 1. 2 Fokus/Tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur

Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023

Kota Balikpapan diarahkan untuk menjadi penopang dalam beberapa kawasan industri yang berpotensi untuk mengakselerasi perekonomian. Penguatan Kawasan Strategis Provinsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah perlu dilakukan melalui peningkatan akses dan konektivitas antar kawasan untuk mendukung percepatan realisasi investasi industri pengolahan produk unggulan daerah pada masing-masing kawasan.

1.3.3. RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi salah satu acuan dalam RPJMD sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012. Dijelaskan dalam Pasal 3 bahwa RTRW Kota Balikpapan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Konsep penataan ruang di Kota Balikpapan berorientasi pada beberapa sektor yaitu industri, perdagangan, pariwisata, pendidikan dan budaya, dan perdagangan. Adapun implementasi dari pencapaian penataan ruang dilaksanakan melalui penguatan fungsi-fungsi pelayanan, peningkatan aksesibilitas antar-kawasan, peningkatan pelayanan sistem jaringan prasarana yang terpadu, peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pengembangan kawasan budidaya, serta pengembangan kawasan strategis kota.

Peruntukan pola ruang di Kota Balikpapan didominasi oleh peruntukan kawasan lindung. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 dimana luas lahan untuk kawasan lindung sebesar 52,28% atau sekitar 26.316,28 Ha. Sedangkan untuk lahan untuk kawasan budidaya sebesar 47,41% atau sekitar 24.041,14 Ha. Khusus untuk kawasan budidaya, jika dijabarkan lebih detail, peruntukan terbesarnya diarahkan untuk kawasan perumahan yaitu sebesar 10.779,86 Ha atau sekitar 21,42%. Lalu untuk kawasan industri yaitu seluas 4.736,99 Ha atau sekitar 9,41% dari total luas lahan. Selain itu peruntukan lainnya yang juga membutuhkan luas lahan cukup banyak adalah kawasan hutan lindung dengan proyeksi sebesar 14.781,46 Ha atau sekitar 29,37%.

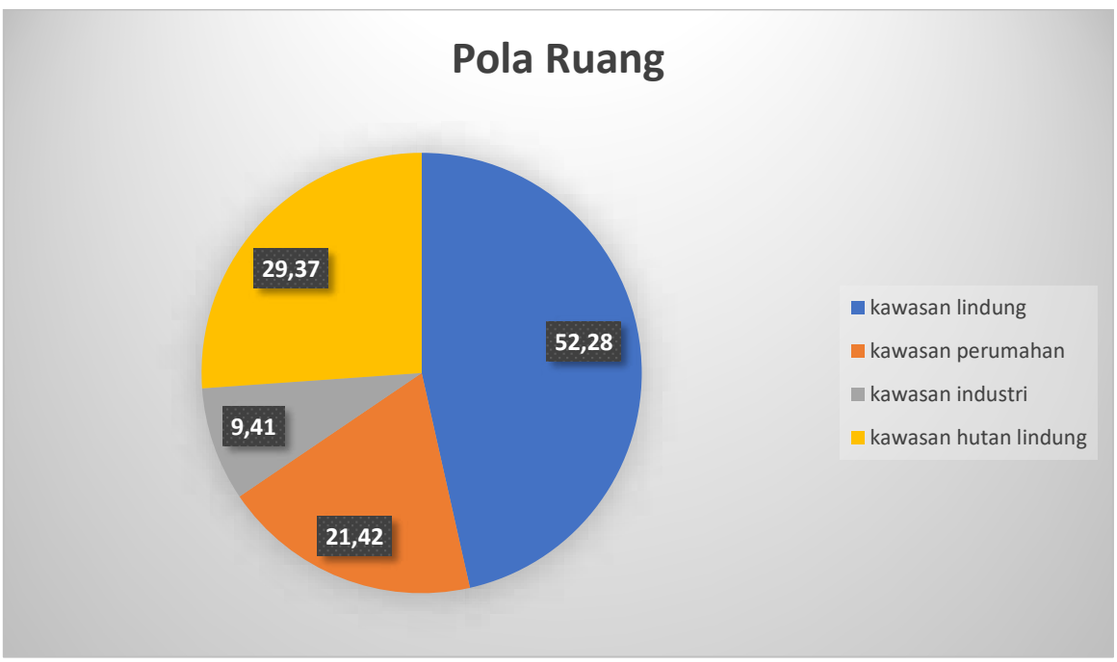

Gambar 1. 3 Luas Pola Ruang Kota Balikpapan Berdasarkan RTRW 2012-2032
Sumber: RTRW Kota Balikpapan Tahun 2019-2032

Besarnya peruntukan untuk kawasan industri di Kota Balikpapan sesuai dengan arah kebijakan dari dua dokumen perencanaan sebelumnya yaitu RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Aktivitas-aktivitas yang ada di Kota Balikpapan diarahkan mempunyai skala pelayanan tingkat nasional serta diarahkan untuk dapat menjadi wilayah maju dan mempunyai peran dominan terhadap perkembangan perekonomian Negara Indonesia. Beberapa kegiatan yang mempunyai skala pelayanan tingkat nasional adalah status Balikpapan yang merupakan produsen komoditi industri pengolahan minyak (1,3 juta ton) dalam lingkup nasional. Produsen dan konsumen komoditi industri pengolahan non migas (852 ribu dan 679 ribu ton) dengan lingkup antar-pulau dan nasional. Dalam RTRW Provinsi disebutkan pula bahwa Kota Balikpapan diarahkan sebagai Pusat Pelayanan Orde I, sehingga Balikpapan berfungsi sebagai pusat yang melayani seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Wilayah Nasional/Internasional.

1.3.4. RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023

Penyusunan RPJMD Kota Balikpapan selain memperhatikan vertikalitas dokumen perencanaan pemerintahan diatasnya, perlu untuk memperhatikan arah pembangunan dari daerah yang berbatasan dengannya. Oleh karenanya, Kota Balikpapan perlu untuk meninjau arah kebijakan pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara. Hal ini dimaksudkan agar terjadi keselarasan pembangunan antar-kedua daerah dalam menggarap sektor-sektor potensial.

Hubungan antara Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara berorientasi pada pengembangan infrastruktur, dan kawasan industri. Untuk infrastruktur, Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi jalur alternatif dalam menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Selain itu, pengembangan kawasan sekitar jembatan penyeberangan Penajam-Balikpapan diproyeksikan menjadi pintu gerbang dengan Kota Balikpapan dengan aktivitas lalu lintas yang pesat apabila jembatan Penyeberangan Penajam Balikpapan telah berdiri. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara akan menghubungkan akses Jembatan Tol Teluk Balikpapan dengan pembangunan jalan *Coastal Road* sehingga akses jalan tersebut dapat menyatu dengan jalan pada Kawasan *Coastal Area* yang akan dibangun oleh Kota Balikpapan.

Selain itu, berdasarkan RTRW Nasional, Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan Kawasan Andalan dari Kawasan Bontang–Samarinda–Tenggarong, Balikpapan-Penajam dan Sekitarnya (Bonsamtebajam), dengan sektor unggulan berupa industri, perkebunan, pertambangan, kehutanan, perikanan, dan pariwisata. Untuk menghubungkan wilayah Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan akan dibangun pembangunan jembatan Pulau Balang, rencana pembangunan jembatan Nipah-Nipah–Melawai merupakan salah satu cara menghubungkan antar-wilayah yang dipisahkan oleh teluk. Saat ini transportasi

laut menuju dari dan ke Kota Balikpapan dilakukan dengan menggunakan kapal ferry, *speed boat* dan perahu kelotok.

Proyek lainnya adalah pembangunan *Crude Central Terminal* (CCT) di Kelurahan Lawe-laweuntuk pengembangan industri kelapa sawit. Pembangunan CCT Lawe-lawe ini dapat mendistribusikan hasil minyak dari dua kilang yang berdekatan, yakni pengembangan kilang "*Refinery Development Master Plan*" (RDMP) Balikpapan dan kilang baru "*Grass Root Refinery*" (GRR) Bontang melalui pipanisasi. Belanja modal (*capital expenditure/capex*) RDMP Balikpapan senilai 5,4 miliar dolar AS bisa dikurangi melalui pembangunan CCT Lawelawe. Kawasan CCT Lawe-lawe berada pada lahan seluas 1.100 hektare milik Pertamina.

1.3.5. RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

Selain Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), daerah lainnya yang juga memiliki pengaruh terhadap Kota Balikpapan karena berbatasan langsung adalah Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun arah kebijakan Kabupaten Kutai Kartanegara berfokus pada reformasi birokrasi, penguatan kapasitas fiskal daerah, transformasi struktur ekonomi daerah, pembangunan dan pemerataan infrastruktur pelayanan publik, pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan, daya saing sumberdaya manusia, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Perencanaan pembangunan Kutai Kartanegara yang berkaitan dengan Kota Balikpapan adalah sektor perhubungan. Aktivitas distribusi barang dan penumpang antar pulau maupun untuk ekspor dan impor masih melalui pelabuhan-pelabuhan yang ada di Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Konektivitas perdagangan antara Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sektor potensial yang dapat dioptimalkan oleh kedua daerah. Apalagi Kabupaten Kutai Kartanegara telah menjadikan konektivitas perdagangan sebagai salah satu fokus pembangunan. Hal ini tercantum dalam Misi 4 Tujuan 3 dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu: mewujudkan ekonomi perdesaan berbasis kelompok dan kewirausahaan yang didukung industri dan perdagangan potensial daerah berbasis keterkaitan dan keterpaduan potensi antar wilayah (*Integrated Territorial Development*). Adapun salah satu sasaran untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah meningkatkan akses, tata niaga, dan infrastruktur perdagangan antar wilayah dan antar-daerah.

Sama halnya dengan fokus perencanaan pembangunan Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara juga fokus untuk mengembangkan sektor industri dan perdagangan berbasis keunggulan komparatif komoditinya. Untuk mendukung rencana ini, Kabupaten Kutai Kartanegara merumuskan arah kebijakan yaitu penyusunan kajian, kebijakan, dan regulasi kerjasama perdagangan antar-daerah, *mapping* potensi produk unggulan daerah untuk

kegiatan perdagangan lintas daerah, serta pengendalian, pengawasan, dan monitoring kegiatan keluar masuk produk di sektor perdagangan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman pembangunan Kota Balikpapan selama lima tahun kedepan bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha guna mewujudkan visi dan misi Pemerintahan Kota Balikpapan secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah:

1. Menjabarkan visi, misi, dan program pembangunan daerah jangka menengah;
2. Pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan RAPBD;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional dan provinsi serta kabupaten/kota lain yang berbatasan;
4. Memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi kinerja;
5. Sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah periode 2021-2026;
6. Sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan kepala SKPD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Wali Kota Balikpapan;
7. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kota Balikpapan;
8. Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan rincian sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kota Balikpapan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kota Balikpapan secara komprehensif sebagai basis pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas adalah aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah untuk menghasilkan gambaran kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, yang dibahas pada bab ini adalah kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, kerangka pendanaan, dan arah kebijakan keuangan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam dokumen RPJMD karena merupakan dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang, memuat permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang disertai dengan tujuan dan sasaran.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dengan menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

BAB IX PENUTUP

Bab ini menjelaskan pedoman transisi implementasi RPJMD sebelum dan sesudahnya untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Aspek Geografi

2.1.1.1. Luas, Batas Wilayah, Letak dan Kondisi Geografis

Secara administratif luas keseluruhan Kota Balikpapan adalah 51.101,24 Ha. Secara geografis, Kota Balikpapan terletak pada posisi 116,5º Bujur Timur dan 117,0º Bujur Timur serta diantara 1,0º Lintang Selatan dan 1,5º Lintang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Posisi Kota Balikpapan yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar menjadi nilai lebih tersendiri kaitannya dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Kota Balikpapan sendiri disiapkan sebagai *Buffer Zone* (Zona Penyangga) bagi IKN baru yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara karena berbatasan secara langsung.

Gambar 2. 1 Peta Posisi Strategis Kota Balikpapan Sebagai Penyangga IKN

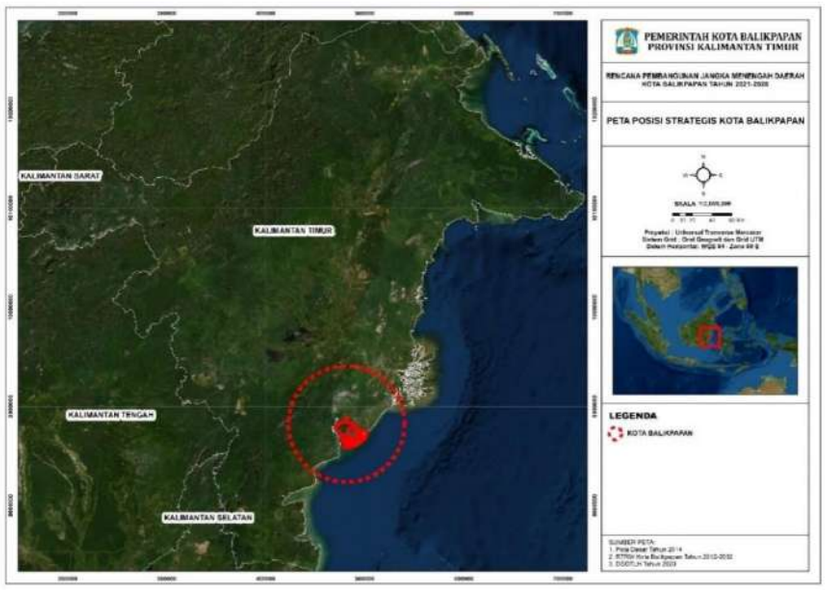

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996, Kota Balikpapan terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan. Namun sejak dikeluarkannya Perubahan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan 7 (tujuh) Kelurahan Dalam Wilayah Kota Balikpapan dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Wilayah Kota Balikpapan, kini Kota Balikpapan terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) Kelurahan, yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.2 Peta Wilayah Kota Balikpapan Per Kecamatan dan Kelurahan

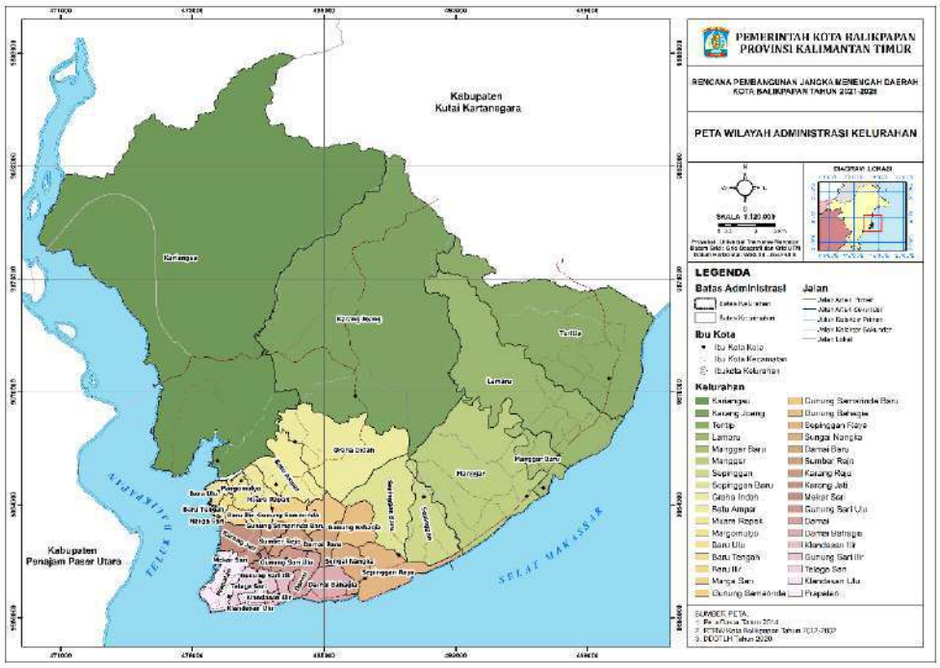

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032

Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan Kota Balikpapan

No	Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)
Kecamatan Balikpapan Selatan		3.880,97
1	Damai Baru	215,53
2	Damai Bahagia	375,63
3	Sepinggan Baru	1.063,70
4	Sungai Nangka	319,95
5	Sepinggan Raya	662,58
6	Gunung Bahagia	373,86
7	Sepinggan	869,72
Kecamatan Balikpapan Kota		1.109,82
1	Prapatan	442,47
2	Telaga Sari	176,39
3	Klandasan Ulu	106,97
4	Klandasan Ilir	161,67
5	Damai	222,31
Kecamatan Balikpapan Timur		11.915,52
1	Manggar	3.303,73
2	Manggar Baru	521,35
3	Lamaru	3.607,02
4	Teritip	4.483,42
Kecamatan Balikpapan Tengah		1.082,58
1	Gunung Sari Ilir	108,51
2	Gunung Sari Ulu	205,61
3	Mekar Sari	72,37
4	Karang Rejo	121,90
5	Sumber Rejo	216,10
6	Karang Jati	358,10
Kecamatan Balikpapan Barat		19.288,02
1	Baru Ilir	71,31
2	Margo Mulyo	197,07
3	Marga Sari	56,94
4	Baru Tengah	91,25
5	Baru Ulu	121,21
6	Kariangau	18.750,25
Kecamatan Balikpapan Utara		13.824,34
1	Gunung Samarinda	266,42
2	Muara Rapak	316,71
3	Batu Ampar	780,04
4	Karang Joang	10.232,37
5	Gunung Samarinda Baru	266,42
6	Graha Indah	1.924,59
Total Luas		51.101,24

Sumber: Rencana Detail Tata RuangKota Balikpapan Tahun 2021-2041

2.1.1.2. Iklim

1. Curah Hujan Kota Balikpapan

Curah hujan tahunan Kota Balikpapan historikal 1991-2020 memiliki rentang dari 2200 mm hingga 2400 mm yang ditunjukkan dengan sebaran warna kuning hingga merah. Pola sebaran curah hujan tahunan historikal tersebut dari hulu ke hilir menunjukkan peningkatan. Hal ini ditandai dengan sebaran warna kuning berada pada daerah pesisir dan sebaran warna jingga hingga merah berada di daerah perbukitan Kota Balikpapan (Balikpapan Barat dan Balikpapan Utara). Curah hujan Kota Balikpapan diproyeksikan mengalami peningkatan secara merata dimasa depan dalam rentang 2500-2800 mm dengan sebaran pola tinggi hujan tetap.

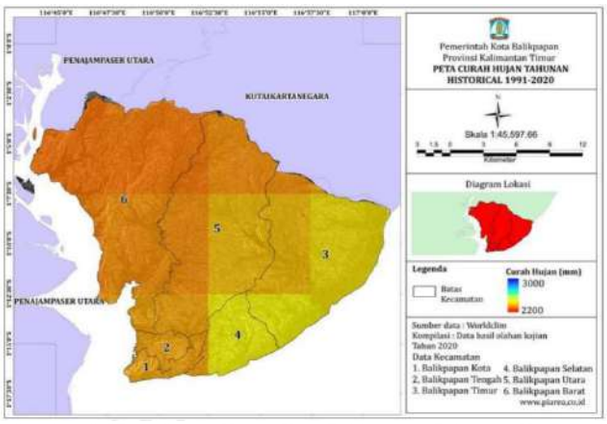

Gambar 2.3Peta Curah Hujan Kota Balikpapan Tahunan Historikal 1991-2020
Sumber: DLH Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan, 2019.

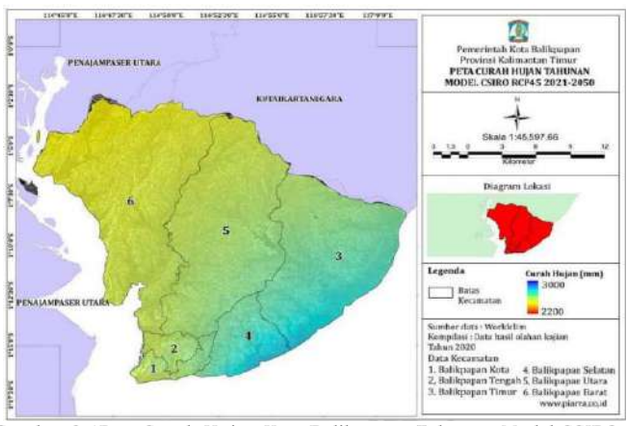

Gambar 2.4Peta Curah Hujan Kota Balikpapan Tahunan Model CSIRO RCP452021-2050
Sumber: DLH Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan, 2019.

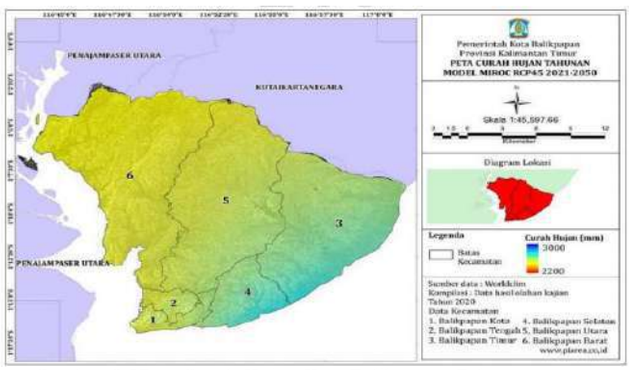

Gambar 2.5Peta Curah Hujan Kota Balikpapan Tahunan
Model MIROC RCP45 Periode 2021-2050
Sumber: DLH Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan, 2019.

Curah hujan musiman Kota Balikpapan berada dikisaran 750 – 450 mm. Curah hujan tertinggi historikal tahun 1991- 2020 terdapat pada bulan MAM (Maret, April dan Mei) yang ditunjukkan dengan warna yang lebih biru dibandingkan dengan bulannya lainnya.

Gambar 2.6 Peta Curah Hujan Kota Balikpapan Musiman Historikal 1991-2020

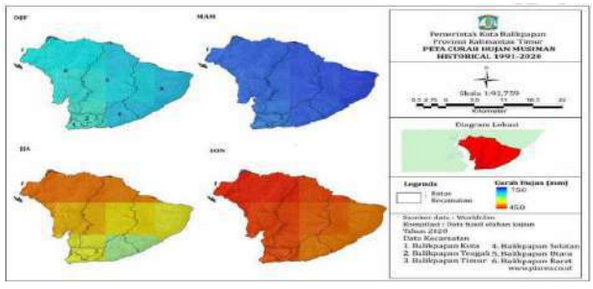

Sumber: DLH Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan, 2019.

Curah hujan musiman pada bulan SON (September, Oktober, dan November) lebih rendah dibandingkan dengan bulan lainnya ditunjukkan dengan warna yang semakin merah. Hal ini menunjukkan puncak musim hujan Kota Balikpapan berada pada musim MAM dan puncak musim kemarau pada musim SON.

2. Suhu Kota Balikpapan

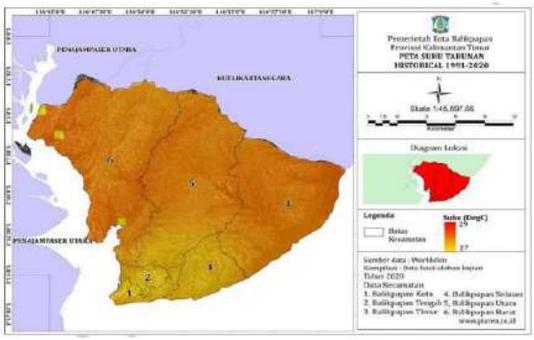

Sebaran suhu Kota Balikpapan berada dikisaran 27°C hingga 29°C, warna semakin merah menunjukkan suhu yang semakin tinggi, sedangkan warna kuning menunjukkan suhu yang semakin rendah

Gambar 2.7 Peta Suhu Kota Balikpapan Tahunan Historikal 1991-2020
Sumber: DLH Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan, 2019.

Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Balikpapan Tengah, dan Kecamatan Balikpapan Selatan memiliki suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

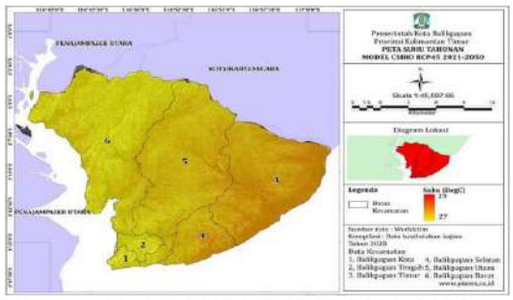

Gambar 2.8 Peta Suhu Kota Balikpapan Tahunan Model CSIRO RCP45 2021-2050
Sumber: DLH Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan, 2019.

Sebaran suhu udara dengan model CSIRO (*Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization*) menunjukkan pada tahun 2021-2050 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan sebaran suhu 1991- 2020. Sedangkan, sebaran suhu udara model MIROC (*Model for Interdisciplinary Research on Climate*) tahun 2021-2050 tidak terdapat perubahan yang signifikan jika dibandingkan dengan sebaran suhu 1991-2020.

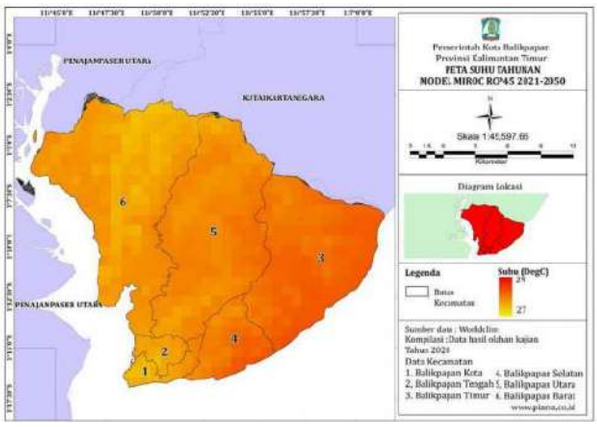

Gambar 2.9Peta Suhu Kota Balikpapan Tahunan Model MIROC RCP45 2021-2050
Sumber: DLH Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan, 2019.

2.1.1.3. Hidrologi

Balikpapan termasuk dalam WS strategis nasional Mahakam mencakup 32 Daerah Aliran Sungai (DAS). Potensi hidrologi yang terdapat di Kota Balikpapan meliputi air tanah dan air permukaan (sungai). Potensi air tanah di Kota Balikpapan termasuk dalam klasifikasi cukup baik. Sesuai dengan kondisi topografi dan fisiografi wilayah yang berbukit, menyebabkan pola aliran air tanah yang terbentuk mengalir dari arah wilayah bagian utara menuju ke arah wilayah

bagian selatan kota. Adanya keterbatasan penyediaan air bersih PDAM meyebabkan banyak penduduk yang memanfaatkan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Berikut dibawah ini DAS di Kota Balikpapan sebagai berikut.

Tabel 2.2 Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Topografi (Ketinggian)

No.	Nama DAS	Grand Total
1	Gunungdubbs	42.05
2	Klandasan Besar/Ampal	4894.65
3	Klandasan Kecil	1328.52
4	Pandansari	1795.77
5	Saluran I	245.83
6	Telagasari	210.75
7	Baru	221.12
8	Beranga	2064.17
9	Beruang	634.21
10	Getah	887.38
11	Kemantis	641.42
12	Keminting	2171.84
13	Sanrumukti	160.81
14	Seluk Pudak	374.54
15	Somber	8619.13
16	Tanjungbatu	236.02
17	Teluk Waru	479.71
18	Tempadung	6571.97
19	Tengah	657.52
20	Wain	25349.31
21	Ajiraden	2806.05
22	Batakan	1866.75
23	Batakan Kecil	623.73
24	Lamaru	1075.14
25	Manggar Besar	19752.86
26	Manggar Kecil	3998.02
27	Selok Api	3209.32
28	Sepinggan	3801.39
29	Teritip	3649.82
30	Teritip Tengah	1061.29
31	Saluran II	251.97
32	Sepinggan Kecil	494.57

Sumber: DPPR Kota Balikpapan, 2021

Berikut merupakan visualisasi dari kondisi ketinggian Kota Balikpapan dalam bentuk peta ketinggian.

Gambar 2.10 Peta DAS Kota Balikpapan

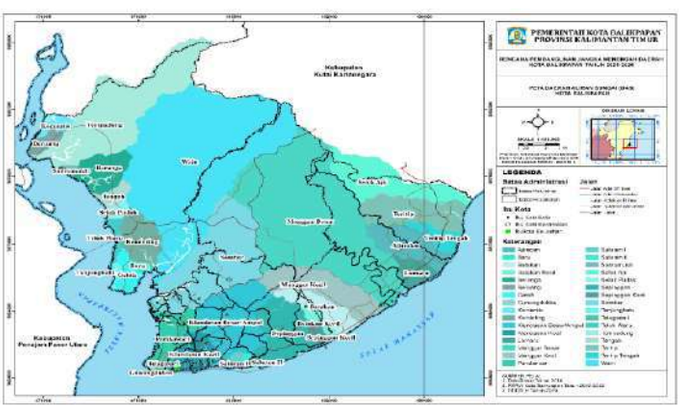

Sumber: DDDTLH, Tahun 2020

2.1.1.4. Topografi

Secara umum Kota Balikpapan berada pada ketinggian 0 sampai 100 meter di atas permukaan laut. Klasifikasi terbesar yaitu berada pada ketinggian 20-100

mdpl dengan luas 26.090,57 ha atau 51,06 % dari luas wilayah, ketinggian >10-20 mdpl seluas 18.030,67 ha atau 35,28 % dari luas wilayah dan ketinggian 0-10 mdpl seluas 6.980 Ha atau 13,66 % dari luas wilayah. Berikut tabel luas wilayah Kota Balikpapan dirinci menurut topografi (ketinggian).

Tabel 2.3 Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Topografi (Ketinggian)

No	Ketinggian (mdpl)	Luas Wilayah	
		(Ha)	(%)
1.	0-10	6.980,00	13,66
2.	>10-20	18.030,67	35,28
3.	>20-100	26.090,57	51,06
Jumlah		51.101,24	100

Sumber: DPPR Kota Balikpapan, 2021

Untuk mengetahui kondisi ketinggian Kota Balikpapan berikut merupakan visualisasi dari kondisi ketinggian Kota Balikpapan dalam bentuk peta ketinggian.

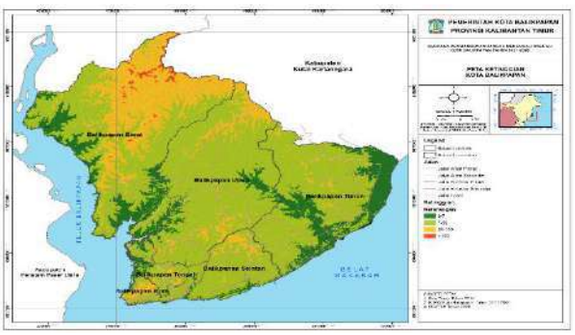

Gambar 2.11Peta Ketinggian Kota Balikpapan
Sumber: RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032

Secara morfologis Kota Balikpapan terdiri dari 85% kawasan perbukitan dengan jenis tanah podsolik merah kuning yang memiliki karakter topsoil tipis, struktur tanah mudah tererosi. Sedangkan 15% lainnya merupakan daerah dataran yang terletak di sepanjang pantai timur dan selatan wilayah Kota Balikpapan dengan jenis tanah umumnya adalah alluvial.

Dari sisi topografis sebagian besar wilayah Kota Balikpapan berada pada kemiringan lereng antara 15-40% yaitu seluas seluas 21.305,57 Ha atau 41,69% dari luas wilayah keseluruhan. Tabel 2.4 berikut ini menunjukkan rincian luas wilayah Kota Balikpapan berdasarkan kelerengan.

Tabel 2.4 Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Kelerengan

No	**Kelas Lereng**	**Luas Wilayah**	
	(%)	**(Ha)**	**(%)**
1	0-2	7.050,00	13,80
2	> 2-15	3.325,00	6.51
3	> 15-40	21.305,57	41,69
4	> 40	19.420,67	38
Jumlah		51.101,24	100

Sumber:DPPR Kota Balikpapan, 2021

Untuk mengetahui kondisi ketinggian Kota Balikpapan berikut merupakan visualisasi dari kondisi ketinggian Kota Balikpapan dalam bentuk peta ketinggian.

Gambar 2.12 Peta Ketinggian Kota Balikpapan
Sumber: RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032

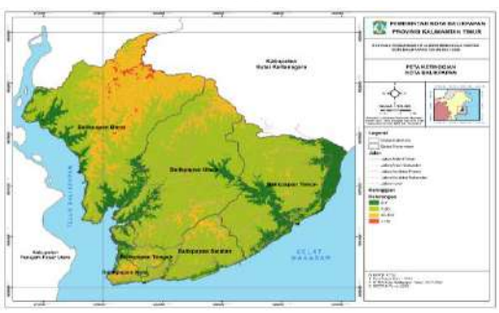

Secara morfologis Kota Balikpapan terdiri dari 85% kawasan perbukitan dengan jenis tanah podsolik merah kuning yang memiliki karakter topsoil tipis, struktur tanah mudah tererosi. Sedangkan 15% lainnya merupakan daerah dataran yang terletak di sepanjang pantai timur

dan selatan wilayah Kota Balikpapan dengan jenis tanah umumnya adalah alluvial.

Untuk mengetahui kondisi kelerengan Kota Balikpapan berikut merupakan visualisasi dari kondisi kelerengan Kota Balikpapan dalam bentuk peta kelerengan.

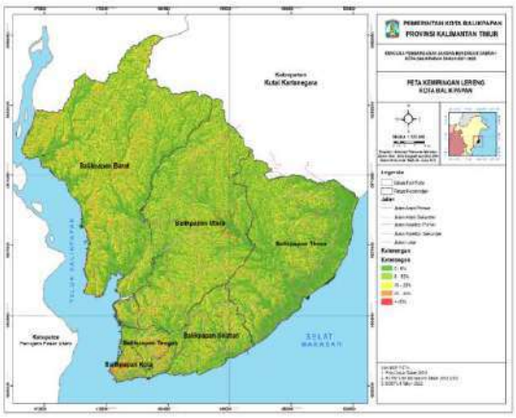

Gambar 2.13 Peta Kelerengan Kota Balikpapan
Sumber: RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032

Dari sisi topografis sebagian besar wilayah Kota Balikpapan berada pada kemiringan lereng antara 15-40% yaitu seluas seluas 21.305,57 Ha atau 41,69% dari luas wilayah keseluruhan. Tabel 2.5 berikut ini menunjukkan rincian luas wilayah Kota Balikpapan berdasarkan kelerengan.

Tabel 2.5 Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Kelerengan

No	Kelas Lereng	Luas Wilayah	
	(%)	(Ha)	(%)
1	0-2	7.050,00	13,80
2	> 2-15	3.325,00	6.51
3	> 15-40	21.305,57	41,69
4	> 40	19.420,67	38
Jumlah		51.101,24	100

Sumber: DPPR Kota Balikpapan, 2021

a. Geologi

Jenis tanah yang ada di Kota Balikpapan terbagi menjadi 5 (lima) jenis yang diantaranya adalah aluvial, marin, fluvio marin, volkan, tektonik/ struktural. Adapun di bawah ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai masing-masing jenis tanah yang ada di Kota Balikpapan.

- Tanah pada *Group Aluvial*

  Berdasarkan bentuk tanah, satuan tanah ini merupakan dataran aluvial yang dominan (50-75%), terjadi pada kelerengan 1-3% dengan bahan induk "Aluvium".

- Tanah pada Group Marin

  Bentukan lahannya berupa dataran pasang surut lumpur, mempunyai kelerengan < 1% dengan bahan induk aluvium. Jenis tanah ini umumnya terdapat disekitar Sungai Wain Besar dan Somber.

- Tanah pada Group Fluvio Marin

  Ada 2 (jenis tanah) pada group ini yaitu:

  1. Bentukan lahannya berupa dataran estuarin sepanjang muara sungai/pantai dengan kelerengan < 1% dan bahan induk aluvium. Tanah ini umumnya terdapat di kanan kiri sepanjang Sungai Manggar Besar.

2. Bentukan lahannya berupa dataran fluvio marin dengan kelerengan <1% dan bahan induknya adalah aluvium. Jenis tanah ini terdapat di sepanjang pantai yang menghadap Selat Makassar.

- Tanah pada Group Volkan

  Bentukan lahannya berupa bahan induk volkan. Tanah pada group volkan setara dengan regosol. Tanah ini berada di pantai di Balikpapan Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara.

- Tanah pada Group Tektonik/ Struktural

  Pada tanah group tektonik, jenis tanah di bagi menjadi menjadi 5 jenis, yaitu:

  1. Bentukan lahannya berupa dataran tektonik berombak agak tertoreh dengan bentuk relief berombak berkisar antara 3-8% dan bahan induknya batu liat dan batu pasir. Lokasi penyebarannya adalah di pusat kota tepatnya Kecamatan Balikpapan Selatan, Tengah dan Barat yang berbatasan langsung dengan Teluk Balikpapan.
  2. Bentukan lahannya berupa dataran tektonik bergelombang, agak tertoreh dan relief bergelombang berkisar antara 8-15%. Bahan induk batu liat dan batu gamping. Penyebarannya meliputi Kecamatan Balikpapan Utara seperti di Kelurahan Muara Rapak, Kelurahan Gunung Samarinda, Kelurahan Batu Ampar dan Kelurahan Karang Joang.
  3. Bentukan lahannya berupa dataran bergelombang cukup tertoreh dengan relief bergelombang 15-30% dan bahan induknya berupa batuliat dan batupasir. Penyebarannya disekitar Bangun Reksa, Karang Joang dan Manggar.
  4. Bentukan lahannya berupa dataran tektonik bergelombang cukup tertoreh dengan relief berbukit kecil (15-30%) dengan bahan induk batuliat dan batupasir. Penyebarannya terutama di Kecamatan Balikpapan Barat dan sebagian kecil di Balikpapan Utara.

Bentukan lahannya berupa perbukitan paralel lipatan, sangat tertoreh dengan relief berbukit 15-30% dan bahan induknya berupa batu liat, batu pasir dan batu gamping. Penyebarannya di Karang Joang Km 15. Karena bahan induknya, adalah batu liat dan batu gamping maupun batupasir yang dominan, maka jenis tanah ini setara dengan jenis tanah Podsolik Merah Kuning.

Gambar 2.14 Peta Jenis Tanah Kota Balikpapan
Sumber: RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032

2.1.1.5. Penggunaan Lahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012–2032, rencana komposisi penggunaan lahan (darat dan laut) dengan total keseluruhan kawasan seluas 84.686,84 ha, meliputi kawasan lindung seluas 33.940,07 ha dan kawasan budidaya seluas 50.746,76 ha. Jika dirinci lebih lanjut, peruntukan kawasan lindung diarahkan untuk tersedianya kawasan hutan lindung yang terdiri dari kawasan hutang lindung, perluasan HLSW, dan *Buffer Zone* Hutan Lindung. Total luas lahan untuk kawasan lindung sebesar 19.194,08 ha atau 22,66% dari keseluruhan lahan di Kota Balikpapan. Adapun untuk kawasan budidaya peruntukan terbesarnya diarahkan untuk kawasan perikanan. Total luas lahan untuk kawasan perikanan sebesar 16.663,55 ha atau sekitar 19,68% dari keseluruhan lahan di Kota Balikpapan.

Salah satu peruntukan ruang pada kawasan perikanan adalah pengembangan kawasan minapolitan dengan luas sebesar 190,6 ha. Berdasarkan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 10345-03/2012 ditetapkan bahwa Kawasan Minapolitan Kota Balikpapan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terletak di Kelurahan Manggar dan Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur. Adapun pusat minapolitan Kota Balikpapan berada pada PPI/TPI Manggar dan pembagian kawasannya ada 3 yaitu:

1. Kawasan Wisata Pantai Segara Sari, Manggar;
2. Perumahan Nelayan;
3. Kawasan Budidaya Tambak.

Tabel 2.6 Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW Kota Balikpapan 2012-2032

No	PEMANFAATAN LAHAN	2012-2032		KETERANGAN
		LUAS (Ha)	%	
I. KAWASAN LINDUNG				
A.	Kawasan Hutan Lindung	19,194.08	22.66	
1	Kawasan Hutan Lindung	14781.80		
2	Perluasan HLSW	1402.39		
3	Buffer Zone Hutan Lindung	3009.89		
B.	Kawasan Perlindungan Bawahan	920.25	1.09	
1	Kawasan Resepan Air			
C.	Kawasan Perlindungan Setempat	6,531.18	7.71	
1	Kawasan Waduk dan Embung	1914.22		
2	Kawasan Sempadan Waduk dan Embung	1254.59		
3	Kawasan Sungai	672.39		
4	Kawasan Sempadan Sungai	144.48		
5	Kawasan Sempadan Pantai	317.76		
6	Kawasan Sempadan Jalan Tol	229.69		
7	Kawasan Hutan Bakau	1871.67		
8	Kawasan Buffer Zone (Peternakan, TPA, Sub Pusat Kota 2, KIKS)	126.40		
D.	Kawasan RTH Kota	529.78	0.63	
1	Kawasan Hutan Kota	226.53		
2	Kawasan RTH Kota (Makam, Lapangan, Taman)	303.26		
E.	Kawasan Suaka Alam, Pedestrian Alam dan Cagar Budaya	345.98	0.41	
1	Kawasan Agro Wisata	67.84		
2	Kawasan Kebun Raya	254.76		
3	Kawasan Wanawisata	19.16		
4	Kawasan Penangkaran Buaya	4.22		
F.	Kawasan Jalur Migrasi Satwa	196.50	0.23	

No	PEMANFAATAN LAHAN	2012-2032		KETERANGAN
		LUAS (Ha)	%	
1	Kawasan Jalur Migrasi Satwa	196.5		
G.	Kawasan Konservasi Pesisir dan Laut	6,222.30	7.35	Wil. Pesisir dan Laut
1	Konservasi Pulau – Pulau Kecil	303.19		Wil. Pesisir dan Laut
2	Daerah Perlindungan Mangrove & Laut (DPML)	61.04		Wil. Pesisir dan Laut
3	Daerah Rawan Ranjau	5727.25		Wil. Pesisir dan Laut
4	Zona Terlarang	114.82		Wil. Pesisir dan Laut
5	Terumbu Karang dan Padang Lamun	16		Wil. Pesisir dan Laut
TOTAL KAWASAN LINDUNG		33,940.07	40.08	
II. KAWASAN BUDIDAYA				
A.	Kawasan Peruntukan Pertanian	3,531.36	4.17	
1	Kawasan Pertanian Tanaman Hortikultura	1.251.67		
2	Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	145.45		
3	Kawasan Perkebunan	2076.17		
4	Kawasan Peternakan	58.06		
B.	Kawasan Peruntukan Perikanan	16,663.55	19.68	
1	Kawasan Perikanan Darat	582.19		
2	Kawasan Minapolitan	190.56		
3	Kawasan Perikanan Budidaya Laut	3178.48		Wil. Pesisir dan Laut
4	Kawasan Perikanan Tangkap	12712.32		Wil. Pesisir dan Laut
C.	Kawasan Peruntukan Perumahan		12.87	
	Kawasan Perumahan	10902.02		
D.	Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa	2,523.58	2.98	
1	Kawasan Perdagangan dan Jasa	2523.58		
E.	Kawasan Peruntukan Perkantoran	56.14	0.07	
1	Kawasan Perkantoran	56.14		
F.	Kawasan Peruntukan Industri	5,107.86	6.03	
1	Industri Besar	4705.33		
2	Industri Sedang	379.33		
3	Industri Kecil	23.21		
G.	Kawasan Peruntukan Pariwisata	449.40	0.53	
1	Kawasan Pariwisata	449.4		
H.	Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan	264.47	0.31	
1	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	264.47		
I.	Kawasan Peruntukan Pelayanan Umum	10,821.83	12.78	
1	Kawasan Bandara	372.05		
2	Kawasan Pelabuhan	31.45		
3	Kawasan Terminal	9.40		
4	Kawasan Alur Kapal	10142.87		Wil. Pesisir dan Laut
5	Kawasan Fasilitas Pemerintah	215.49		
6	Kawasan TPA	18.17		
7	RSUD	0.93		
8	Kawasan Masjid Agung Balikpapan	0.94		
9	Kawasan Gereja	1.22		
10	Kawasan Dome	4.87		
11	Kawasan Stadion Olahraga	24.45		
J.	Kawasan Pendidikan	426.56	0.5	
1	Kawasan ITK	340.73		
2	Kawasan PONPES Syarif Hidayatullah	85.83		
Total Kawasan Budidaya		50,746.76	59.92	
Total Keseluruhan Kawasan		84,686.84	100	

Sumber: RTRW Kota Balikpapan 2012-2032

Berikut merupakan visualisasi dari kondisi penggunaan lahan Kota Balikpapan dalam bentuk peta penggunaan lahan.

Gambar 2.15 Peta Penggunaan Lahan Kota Balikpapan

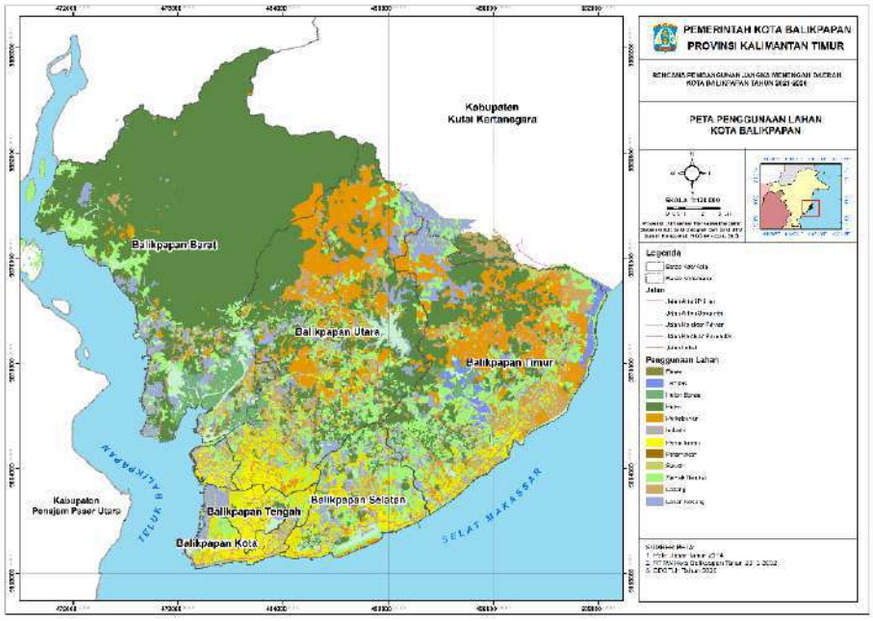

Sumber: RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032

2.1.1.6. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kota Balikpapan dilakukan melalui teknik kebijakan perwilayahan yang didasarkan atas efektivitas pembangunan di masing-masing wilayah untuk menyinkronkan pembangunan berbagai sektor andalan yang akan dikembangkan di Kota Balikpapan. Hal ini dimaksudkan agar pengembangan masing-masing wilayah kota tidak saling tumpang tindih satu sama lain, sehingga potensi yang dimiliki masing-masing daerah dapat berkembang secara optimal dan terintegrasi. Pengembangan potensi secara spasial dilakukan melalui kebijakan pengembangan kawasan strategis kota. Kawasan strategis wilayah kota terdiri atas:

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi

   Berupa kawasan strategis yang mendukung aktivitas perekonomian kota dan terletak di pusat kota. Kawasan Strategis untuk Kepentingan Ekonomi terdiri atas:

   1. Kawasan Kota Baru Karang Joang;
   2. Kawasan Industri Kariangau;
   3. Kawasan Minapolitan Manggar dan Manggar Baru;
   4. Kawasan Reklamasi Pantai; dan
   5. Kawasan Kota Baru Teritip.

b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya

   Berupa kawasan yang dinilai strategis untuk mengembangkan potensi kegiatan budaya dan pariwisata. Kawasan Strategis untuk Kepentingan Sosial Budaya terdiri atas:

   1. Kawasan permukiman nelayan Margasari di Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat; dan
   2. Kawasan pendidikan di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara.

c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan

Berupa kawasan strategis untuk kepentingan penyelamatan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup sebagai daya dukung lingkungan. Kawasan Strategis untuk Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan terdiri atas:

1. Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat dan Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara; dan
2. Kawasan hutan lindung Sungai Manggar di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara dan Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032, tujuan dan kebijakan ruang di Kota Balikpapan adalah pengembangan pusat pelayanan. Guna mewujudkan penataan ruang Kota Balikpapan, maka diusahakan komoditi unggulan yang dihasilkan oleh masing-masing wilayah, antara lain sebagai berikut:

1) Perikanan

Wilayah pesisir laut Kota Balikpapan menyimpan potensi sumber daya yang terbaharui *(renewable resources)*, khususnya potensi sumber daya perikanan. Selain itu, Kawasan pesisir dan laut juga memiliki potensi yang cukup besar untuk memainkan peran strategis dalam menopang dan membangun pondasi ekonomi kota yang kuat, antara lain sebagai investasi yang memiliki efisiensi dan daya serap tenaga kerja, serta sumber daya laut yang besar baik kuantitas maupun diversitas, bukan hanya di perairan Balikpapan, tetapi juga di perairan Selat Makasar. Produk perikanan dan kelautan juga memiliki prospek pasar yang baik dengan pangsa pasar yang terus meningkat dan memiliki daya saing yang tinggi sebagaimana dicerminkan dari bahan baku yang dimilikinya serta produksi yang dihasilkannya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kalimantan Timur 2021-2041, kebijakan dan strategi untuk mewujudkan tujuan RZWP3K terdiri atas kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Konservasi, kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Pemanfaatan Umum, kebijakan dan strategi pengembangan Alur Laut, serta kebijakan dan strategi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), yang dibagi menjadi Zona Inti, Zona Pemanfaatan Terbatas Dan Zona Lainnya yang Sesuai Dengan Peruntukan Kawasan. Kebijakan dan strategis rencana zonasi adalah sebagai berikut:

a. Pengembangan Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi ini terdiri dari Kawasan Konservasi Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil, Kawasan Konservasi Perairan, dan Kawasan Konservasi Maritim. Konservasi Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil yang dikelola berdasarkan rencana pengelolaan zonasi diantaranya, zona inti, zona pemanfaatan terbatas dan zona lainnya yang menyesuaikan dengan pentukan kawasan, Konservasi Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil (KKP3K) ini salah satunya adalah KKP3K Teluk Balikpapan-Kabupaten Penajam Paser Utara.

b. Pengembangan Kawasan Pemanfaatan Umum

Kawasan Pemanfaatan Umum meliputi sub zona Wisata Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KPU-2-P3KP) terdiri atas Pantai Manggar dan Pantai Lamaru. Adapun DLKr dan DLKp yang terdiri atas pelabuhan umum, Tersus dan STS (KPU-PL-DLK) melputi Pelabuhan Balikpapan dan Teluk Balikpapan. KPU-PL-WKO di perairan terdiri atas PPI Manggar Baru, PPI Filial Klandasan dan PPI Kampung Baru Tengah. Sub Zona Minyak dan Gas Bumi (KPU-TB-MGB) ada pada Blok East Kalimantan di perairan Teluk Balikpapan sampai Selat Makassar Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan dan Blok Mahakam di perairan Teluk Balikpapan sampai Selat Makassar Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan. Pada zona perikanan budaya dalam sub zona Budidaya Laut (KPU-BD-BL) ada pada Teluk Balikpapan di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara serta Pantai Manggar dan Pantai Lamaru di Kecamatan Balikpapan Timur. Sedangkan pada zona perikanan tangkap dalam sub zona pelagis (KPU-PT0-P) meliputi Selat Makassar-Kota Balikpapan. Untuk zona bandar udara yaitu Bandar Udara Sepinggan yang terletak di Kecamatan Balikpapan Selatan. Zona jasa/perdagangan terdiri atas Coastal Road berada pada Kecamatan Balikpapan Selatan dan Kecamatan Balikpapan Kota.

c. Pengembangan Kawasan Alur Laut

Alokasi Ruang WP-3-K untuk kawasan Alur Laut terdiri atas migrasi biota yang selanjutnya disebut dengan AL-AMB, pipa/kabel bawah laut yang selanjutnya disebut dengan AL-APK, dan alur pelayaran yang selanjutnya disebut dengan AL-AP. Kawasan migrasi biota terdiri dari kawasan Migrasi penyu yang selanjutnya disebut dengan AL-AMB-MP dan kawasan Migrasi mamalia laut yang selanjutnya disebut dengan AL-AMB-MM. Selanjutnya pipa/kabel bawah laut yang terdiri atas kabel telekomunikasi yang selanjutnya di sebut dengan AL-APK-KT dan pipa gas dan minyak yang selanjutnya disebut dengan AL-APK-GM. Adapun alur pelayaran terdiri dari alur pelayaran dan perlintasan Internasional yang selanjutnya disebut dengan AL-AP-PI, alur pelayaran dan perlintasan Nasional yang selanjutnya disebut dengan AL-AP-PN, alur

pelayaran dan perlintasan Regional yang selanjutnya disebut dengan AL-AP-PR, dan alur pelayaran dan perlintasan Khusus yang selanjutnya disebut dengan AL-AP-PK.

d. Pengembangan KSNT

Di Kota Balikpapan tidak terdapat alokasi ruang WP-3-K untuk kawasan KSNT, alokasi ini berada di perairan Pulau Sambit dan sekitarnya di Kabupaten Berau dengan kode KSNT PPKT-01 serta Pulau Maratua dan sekitarnya di Kabupaten Berau dengan kode KSNT PPKT-02.

2) Industri

Posisi strategis dan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh Kota Balikpapan menjadikan visi pembangunan kota kedepan sebagai sentra jasa, perdagangan dan industri, sehingga pengembangan kota diarahkan kepada sektor-sektor ekonomi yang potensial dan mempunyai unggulan, termasuk industri kecil/rumah tangga yang tersebar di beberapa wilayah Kota Balikpapan melalui pembangunan sarana dan prasarana pengadaan rumah produksi dan rumah tinggal. Selain itu, potensi kawasan industri Kota Balikpapan didukung oleh letak strategis yang berada pada ALKI II dan merupakan pintu gerbang Provinsi Kalimantan Timur serta wilayah Indonesia Bagian Timur. Dengan posisi tersebut Kota Balikpapan memiliki keunggulan kompetitif yakni sebagai alur lalu lintas kapal laut yang cukup padat sehingga potensial untuk mengembangkan industri maritim seperti *shipdocking* (dok perbaikan kapal), *sparepart* dibidang *marine, supply base* dan sebagainya.

Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Kota Balikpapan terdiri atas:

1. Subzona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
2. Subzona Kawasan Industri (KI); dan
3. Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM).

Subzona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri, dengan luas kurang lebih 294,47 Ha terdapat di Kecamatan Balikpapan Barat (Kelurahan Baru Ilir, Kelurahan Margomulyo dan Kelurahan Kariangau), serta di Kecamatan Balikpapan Utara (Kelurahan Karang Joang). Subzona Kawasan Industri (KI) MERUPAKAN zona pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang, dengan luas kurang lebih 3740,46 Ha terdapat di Kecamatan Balikpapan Barat (Kelurahan Kariangau,Kelurahan Karang Jati dan Kelurahan Prapatan). Sedangkan untuk Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM) dengan luas kurang lebih 660,74 Ha terdapat di Kecamatan Balikpapan Barat (Kelurahan Margomulyo) Kecamatan Balikpapan Utara (Kelurahan Karang Joang), Kecamatan Balikpapan Selatan (Kelurahan Sepinggan, kelurahan Sepinggan Raya) serta Kecamatan Balikpapan Timur (Kelurahan Manggar,Kelurahan Manggar Baru dan Kelurahan Teritip).

Tabel 2.7 Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Kota Balikpapan

BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN (BWP)	RDTR KOTA BALIKPAPAN; ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)		
	SUBZONA KPI (Kawasan Peruntukan Industri) (Ha)	SUBZONA KI (Kawasan Peruntukan Industri) (Ha)	SUBZONA SIKM (Kawasan Peruntukan Industri) (Ha)
BWP I Balikpapan Barat	67,09 a. subzona Baru Ilir (I.A) terdapat di Blok I.A.2; b. subzona Kariangau (I.D) terdapat di Blok I.D.3; dan c. subzona Margomulyo (I.E) terdapat di Blok I.E.2.	3.337,76 (Sub BWP Kariangau)	300,04 a. sub BWP Kariangau (I.D) tersebar di Blok I.D.3. b. sub BWP Margomulyo (I.E) tersebar di blok I.E.5.
BWP II Balikpapan Utara	235,92 a. sub BWP Batu Ampra (II.A) Blok II.A.1 b. sub BWP Graha Indah (II.B) Blok II.B.1. c. sub BWP Karang Joang (II.E) Blok II.E.6	---	44,7 a. Sub BWP Karang Joang Blok II.E.6, b. sub BWP Muara Rapak (II.F) Blok II.F.1.
BWP III Balikpapan Tengah	---	248,98 Sub BWP Karang Jati (III.C), yaitu pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.	---
BWP IV Balikpapan Kota	---	193,91 sub BWP Prapatan (IV.D), meliputi Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3;	0,82 sub BWP Telaga Sari (IV.E), , Blok IV.E.2
BWP V Balikpapan Selatan	---	---	34,89 a. Sub BWP Sepinggan (V.D), berada di Blok V.D.2; dan b. Sub BWP Sepinggan Raya (V.F), berada di Blok V.F.2.
BWP VI Balikpapan Timur	---	---	287,47 a. Sub BWP Manggar (VI.B), berada di Blok VI.B.3 dan Blok VI.B.4; dan b. Sub Blok Manggar Baru (VI.C), berada di Blok VI.C.1. c. Sub Blok Teritip (VI.D), berada di Blok VI.D.1.
Total Luas @Subzona	303,01	3.780,65	667,92
TOTAL LUAS ZONA KPI	4.751,58		

Sumber:Rencana Detail Tata Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021-2041

Berikut adalah peta Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Kota Balikpapan :

Gambar 2.16 Peta Pengembangan Wilayah Sektor Industri Kota Balikpapan

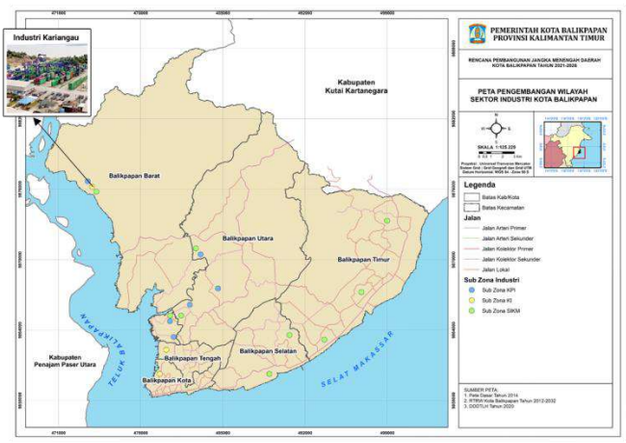

Sumber: Rencana Detail Tata Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021-2041

3) Pertambangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 maka potensi bahan galian yang ada di Kota Balikpapan dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu

potensi mineral non logam dan potensi batubara. Potensi mineral non logam yang ada di Balikpapan adalah batupasir kuarsa dan batulempung. Lokasi keterdapatan potensi mineral non logam terdapat di 4 (empat) wilayah kecamatan di Kota Balikpapan (Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan Timur, Balikpapan Utara dan Balikpapan Barat) memiliki pola sebagai berikut:

1) Berada pada lahan dengan bentuk relief/morfologi berupa perbukitan;
2) Jenis bahan galian batulempung meliputi Kecamatan Balikpapan Utara (Kelurahan Batu Ampar) dan Kecamatan Balikpapan Timur (Kelurahan Lamaru);
3) Jenis bahan galian pasir kuarsa meliputi Kecamatan Balikpapan Timur (Kelurahan Lamaru).

4) Pariwisata

Dalam pengembangan sektor pariwisata Kota Balikpapan mempunyai cukup banyak potensi, mengingat topografi Kota Balikpapan yang didominasi oleh perbukitan dengan hutan yang cukup luas, menjadikan Kota Balikpapan sebagai tempat wisata hutan lindung dan kawasan cagar alam. Selain itu, Kota Balikpapan yang dikelilingi laut, juga menjadi objek yang menyajikan suguhan berbagai wisata pantai dan wilayah lainnya sebagian besar merupakan wisata alam buatan dan peninggalan sejarah. Berikut destinasi wisata di Kota Balikpapan pada setiap Kecamatan:

Gambar 2.17 Peta Pengembangan Wilayah Sektor Pariwisata Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Utara
Sumber: DPOP Kota Balikpapan, 2021

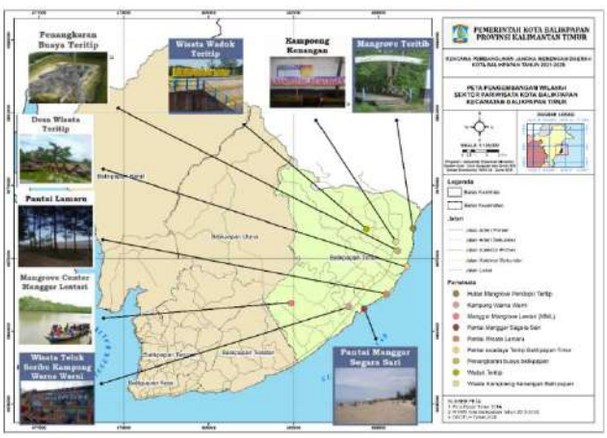

Gambar 2.18 Peta Pengembangan Wilayah Sektor Pariwisata Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Timur
Sumber: DPOP Kota Balikpapan, 2021

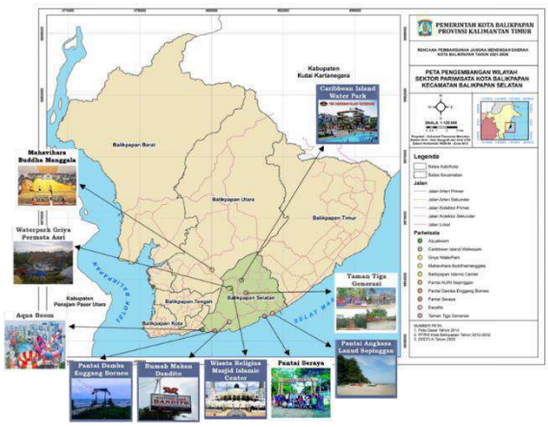

Gambar 2.19 Peta Pengembangan Wilayah Sektor Pariwisata Kota Balikpapan Kecamatan BalikpapanSelatan
Sumber: DPOP Kota Balikpapan, 2021

Gambar 2.20 Peta Pengembangan Wilayah Sektor Pariwisata Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Barat
Sumber: DPOP Kota Balikpapan, 2021

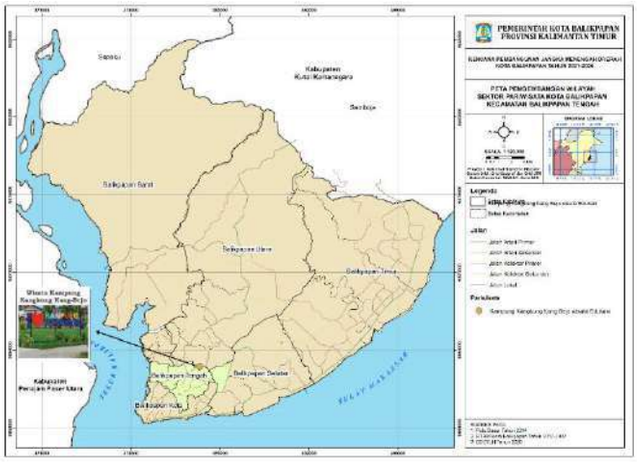

Gambar 2.21 Peta Pengembangan Wilayah Sektor Pariwisata Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Tengah
Sumber: DPOP Kota Balikpapan, 2021

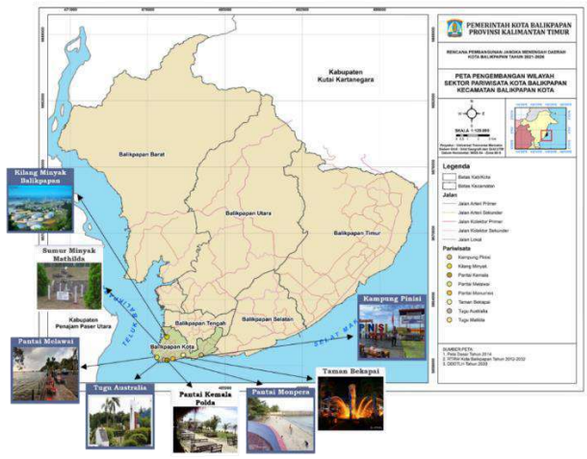

Gambar 2.22 Peta Pengembangan Wilayah Sektor Pariwisata Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Kota
Sumber: DPOP Kota Balikpapan, 2021

2.1.1.7. Wilayah Rawan Bencana

Tahun 2019 menjadi tahun tertinggi angka bencana di Kota Balikpapan. Bencana yang paling sering terjadi pada tahun 2019 adalah kebakaran hutan& lahan yaitu sebanyak 125 kali. Angka ini melonjak drastis jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya terjadi 70 kali. Tingginya angka bencana kebakaran hutan & lahan ini tentu saja mengancam produktivitas lahan di Kota Balikpapan. Berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, tertulis bahwa kebakaran hutan/lahan termasuk dalam bencana alam dan non alam yang ditulis secara serangkai, sehingga kebakaran hutan dan lahan merupakan satu istilah yang tidak dipisahkan. Jenis bencana lainnya yang juga kerap terjadi adalah kebakaran pemukiman/gedung. Dari data BPBD, kejadian kebakaran pemukiman/gedung terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 tercatat sebanyak 39 kali terjadi kebakaran pemukiman/gedung, lalu meningkat tahun 2016 menjadi 44 kali. Hingga tahun 2019, kebakaran pemukiman/gedung di Kota Balikpapan sebanyak 51 kali. Adapun jumlah bencana yang terjadi di Kota Balikpapan sebagai berikut:

Tabel 2.8 Jumlah Bencana yang Terjadi di Kota Balikpapan Menurut Jenis Bencana Tahun 2016-2020

No	Jenis Bencana	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kebakaran hutan dan lahan	98	14	70	125	29
2	Kebakaran pemukiman/gedung	39	44	45	51	23
3	Banjir	88	89	13	24	83
4	Pergerakan tanah/longsor	22	70	46	29	38
5	Angin puting beliung	2	6	0	0	2
6	Gelombang pasang	0	0	0	0	1
7	Abrasi pantai	0	0	0	0	0
8	Orang tenggelam	16	25	24	19	10
9	Pohon tumbang	49	81	18	28	46
10	Semburan lumpur/gas	3	3	1	7	8
11	Penanganan gangguan hewan	62	84	72	194	151
Total		379	416	289	477	391

Sumber: BPBD Kota Balikpapan, 2021

Berdasarkan data tersebut di atas dan berdasarkan hasil identifikasi kawasan rawan bencana, Wilayah Kota Balikpapan memiliki kerentanan terhadap bencana, diantaranya yaitu banjir, pergerakan tanah/longsor dan kekeringan dengan deskripsi sebagai berikut:

1. Banjir

Berdasarkan dokumen DIKPLHD Kota Balikpapan 2019, Kota Balikpapan memiliki rentang indeks bahaya banjir berkisar 0,23–0,76. Adapun daerah dengan indeks bahaya banjir yang relatif tinggi adalah kawasan yang berada pada wilayah pesisir dan daerah aliran sungai serta tingkat okupansi lahan cukup tinggi yaitu daerah Balikpapan Tengah, Balikpapan Kota, Balikpapan Selatan dan Balikpapan Timur.

Selanjutnya di masa depan, berdasarkan model CSIRO menunjukkan tidak terjadi perubahan. Pada model MIROC terjadi peningkatan potensi bahaya di seluruh wilayah Kota Balikpapan terutama wilayah utara Kota Balikpapan. Faktor yang meningkatkan bahaya banjir di masa depan dikarenakan intensitas curah hujan tinggi pada bulan tertentu, yaitu bulan Desember, Januari, Maret dan April.

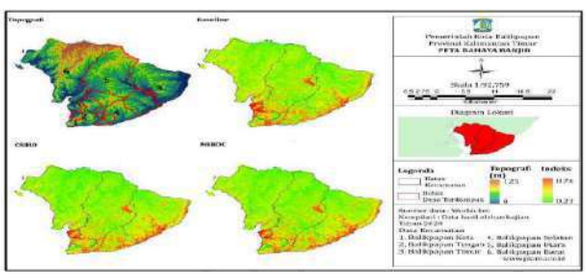

Gambar 2.23 Peta Indeks Bahaya Banjir Kota Balikpapan(Baseline 1991-2020 dan Proyeksi 2021-2050)
Sumber: DLH Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan 2019.

2. Pergerakan tanah/longsor

Struktur tanah di kota Balikpapan terdiri atas podsolik merah kuning, tanah alluvial, dan pasir kwarsa. Diantara ketiga jenis yang paling banyak terdapat di wilayah Kota Balikpapan adalah jenis tanah podsolik merah kuning yang mempunyai tingkat kesuburan yang rendah disebabkan karena lapisan topsoilnya yang tipis dan batuannya muda sehingga tanahnya bersifat labil dan terdapat pada daerah perbukitan yang mempunyai kemiringan di atas 15%.

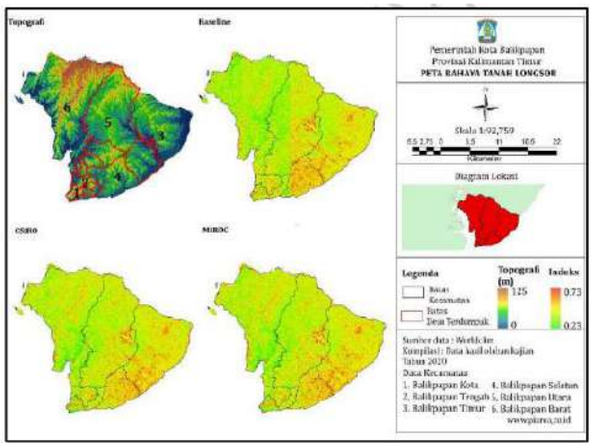

Apabila curah hujannyatinggi akan mengakibatkan tanah tersebut merosot dan terkikis karena erosi. Dengan kondisi ini wilayah Balikpapan sangat rawan terhadap terjadinya longsor.

Gambar 2.24Peta Indeks Bahaya Tanah Longsor Kota Balikpapan(Baseline 1991-2020 dan Proyeksi 2021-2050)

Sumber: DLH Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan 2019.

Jika dilakukan pemetaan bahaya tanah longsor menggunakan simulasi pemodelan CSIRO dan MIROC menunjukkan bahaya tanah longsor di wilayah Kota Balikpapan memiliki rentang indeks bahaya tanah longsor berkisar 0,23 – 0,73. Nilai bahaya tinggi berada di wilayah Balikpapan Timur dan Balikpapan Selatan. Kejadian bencana tanah longsor sangat rawan terjadi di Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Balikpapan Tengah dan Kecamatan Balikpapan Utara mengingat kepadatan penduduk yang ada pada wilayah ini. Pemetaanbahaya di masa depan tidak mengalami perubahan yang signifikan, namun perlu menjadi perhatian terkait pembukaan lahan perumahan di daerah rawan tanah longsor yang berpotensi mengalami bahaya tanah longsor dengan nilai indeks tinggi.

3. Kekeringan

Berdasarkan dokumen hasil analisis wilayah Kota Balikpapan memiliki rentang indeks bahaya kekeringan berkisar 0,25–0,61 (DIKPLHD, 2019). Wilayah-wilayah yang memiliki tingkat risiko sebagian besar menyebar di Balikpapan Kota, Balikpapan Tengah, Balikpapan Selatan dan Balikpapan Utara. Indeks kategori tinggi mengalami peningkatan luasan wilayah di masa depan jika menggunakan model CSIRO namun mengalami penurunan pada model MIROC. Hal tersebut dipengaruhi oleh peningkatan suhu udara yang berimplikasi pada naiknya nilai evapotranspirasi sehingga kondisi neraca air menjadi defisit terutama pada bulan dimusim kemarau (Juli, Agustus, dan September). Pengelolaan sumber daya air

menjadi prioritas utama merespon informasi dampak perubahan iklim dimasa mendatang khususnya dalam rangka memenuhi ketersediaan air baku yang menjadi salah satu keterbatasan di Kota Balikpapan. Aksi adaptasi perlu dilakukan untuk mengurangi risiko dampak perubahan iklim terkait kekeringan.

Gambar 2.25 Peta Indeks Bahaya Kekeringan Kota Balikpapan

Sumber: DLH Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan 2019

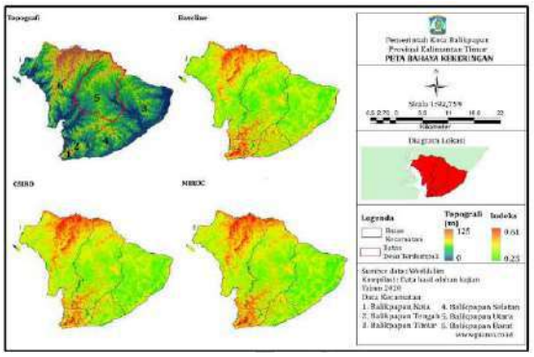

2.1.2. Aspek Demografi

1. Struktur Umur Demografi

Jumlah penduduk seringkali terjadi perubahan baik berkurang maupun bertambah dengan jenis kelamin laki laki atau perempuan, hal tersebut biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah kelahiran, kematian, sertanya adanya perpindahan penduduk baik yang datang maupun yang pergi ke luar wilayah, serta dari adanya jumlah penduduk pada dasarnya dapat digunakan sebagai estimasi jumlah penduduk dimasa yang akan datang. Berikut merupakan table data dari jumlah penduduk Kota Balikpapan berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin pada tahun 2020.

Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2020

Kelompok Usia	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki Laki	Perempuan	
0-4	30.494	29.059	59.553
5-9	28.050	26.797	54.847
10-14	29.740	27.401	57.141
15-19	29.547	26.938	56.485
20-24	30.980	28.243	59.223
25-29	30.428	28.963	59.391
30-34	29.895	28.659	58.554
35-39	28.552	27.546	56.098
40-44	26.946	26.034	52.980
45-49	23.315	22.450	45.765
50-54	18.941	18.616	37.557
55-59	15.824	15.742	31.566
60-64	12.093	11.562	23.655
65-69	8.816	8.303	17.119
70-74	5.306	4.941	10.247
75+	3.875	4.262	8.137
Jumlah	**352.802**	**335.516**	**688.318**

Sumber: BPS, Kota Balikpapan Dalam Angka, 2021

Berdasarkan tabel tersebut menunjukan pada tahun 2020 jumlah penduduk di Kota Balikpapan berdasarkan umur dan jenis kelamin, di dominasi oleh kelompok usia produktif dibandingkan dengan kelompok usia balita dan lansia, yaitu sebesar 88% dari jumlah total penduduk kota Balikpapan di tahun 2020, lalu pada jenis kelamin sendiri Kota Balikpapan didominasi oleh jenis kelamin laki laki dibandingkan dengan perempuan. Kemudian berdasarkan dari

tabel data jumlah penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin jika dilihat berdasarkan piramida penduduk adalah sebagai berikut.

Gambar 2.26 Diagram Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2020

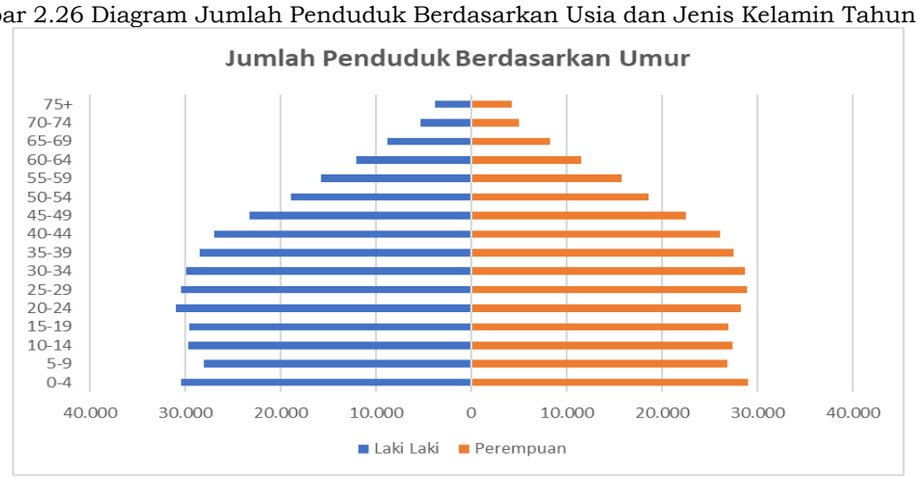

Sumber: BPS, Kota Balikpapan Dalam Angka, 2021

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Selama kurun waktu 2016 hingga 2019, Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kota Balikpapan mengalami trend peningkatan. Pada tahun 2016 sebesar Rp 73.221,46 Miliar menjadi Rp 83.678,77 Miliar pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020, angka PDRB ADHK Kota Balikpapan mengalami penurunan menjadi Rp 83.097,89 Miliar. Kondisi ini dipengaruhi oleh produksi kinerja 10 sektor lapangan usaha yang mengalami penurunan, termasuk lapangan usaha dominan yakni Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sedangkan, hanya 7 lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif, termasuk salah satunya lapangan usaha dominan yaitu Konstruksi.

Tabel 2.10 Produk Domestik Regional Bruto Kota Balikpapan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020

No	Sektor	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	700.989,75	693.061,54	745.962,47	780.094,57	750.317,42
2	Pertambangan dan Penggalian	35.052,10	35.262,92	35.529,86	35.934,21	35.326,73
3	Industri pengolahan	42.157.062,34	43.657.280,78	45.450.065,10	47.482.416,79	47.129.972,91
4	Pengadaan Listrik dan Gas	66.074,72	66.169,71	69.496,29	76.027,20	81.902,24
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	50.085,98	54.639,53	55.725,57	58.994,44	62.796,17
6	Konstruksi	8.665.558,76	8.943.483,43	9.510.131,46	10.281.792,05	10.685.554,10
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.848.553,56	6.155.721,31	6.561.791,70	6.946.740,64	6.907.783,53
8	Transportasi dan Pergudangan	5.618.657,51	5.978.044,83	6.277.041,97	6.308.754,17	5.551.428,71
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.018.543,64	1.108.885,61	1.240.280,35	1.343.770,79	1.201.373,92
10	Informasi dan Komunikasi	2.449.620,40	2.644.528,85	2.780.444,93	2.974.061,27	3.199.783,36
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.399.325,61	2.394.776,19	2.517.790,53	2.612.608,15	2.670.178,53
12	Real Estate	1.261.177,47	1.321.553,37	1.382.661,68	1.410.669,50	1.398.220,18
13	Jasa Perusahaan	192.714,75	198.591,38	207.531,05	214.752,26	206.620,02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	995.910,71	894.679,33	940.397,44	1.000.206,72	940.656,75
15	Jasa Pendidikan	942.006,30	1.008.511,95	1.087.881,84	1.137.683,76	1.195.361,44
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	361.390,33	385.003,42	409.277,58	431.695,63	537.249,81

No	Sektor	2016	2017	2018	2019	2020
17	Jasa Lainnya	458.738,15	491.884,98	535.098,89	582.565,49	543.364,84
PDRB		73.221.462,06	76.032.079,12	79.807.108,74	83.678.767,65	83.097.890,66

Sumber: BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2021

Kinerja laju pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan mengalami fluktuasi mengikuti siklus maintenance industri pengolahan minyak. Pada tahun 2016 tumbuh pada 4,92%, kemudian mengalami pertumbuhan melambat menjadi 3,84% pada tahun 2017. Kemudian tumbuh kembali menjadi 4,97% pada tahun 2018 dan mengalami pertumbuhan melambat kembali pada tahun 2019 menjadi 4,85% seiring dengan siklusnya. Namun, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan mengalami kontraksi yang cukup dalam hingga mencapai -0,69% akibat dampak pandemi Covid-19 yang dialami secara global. Kinerja laju pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi per kategori lapangan usaha disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.11 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Balikpapan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Persen)

Kategori/Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,66	-1,13	7,63	4,58	-3,82
B. Pertambangan dan Penggalian	1,31	0,60	0,76	1,14	-1,69
C. Industri Pengolahan	6,36	3,56	4,11	4,47	-0,74
D. Pengadaan Listrik dan Gas	9,73	0,14	5,03	9,40	7,73
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,17	9,09	1,99	5,87	6,44
F. Konstruksi	0,17	3,21	6,34	8,11	3,93
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,13	5,25	6,60	5,87	-0,56
H. Transportasi dan Pergudangan	5,66	6,40	5,00	0,51	-12,00
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,42	8,87	11,85	8,34	-10,60
J. Informasi dan Komunikasi	4,88	7,96	5,14	6,96	7,59
K. Jasa Keuangan	1,73	-0,19	5,14	3,77	2,20
L. Real Estate	5,41	4,79	4,62	2,03	-0,88
M,N. Jasa Perusahaan	-3,85	3,05	4,50	3,48	-3,79
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,54	-10,16	5,11	6,36	-5,95
P. Jasa Pendidikan	7,22	7,06	7,87	4,58	5,07
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,64	6,53	6,30	5,48	24,45
R,S,T,U. Jasa Lainnya	7,36	7,23	8,79	8,87	-6,73
Produk Domestik Regional Bruto	4,92	3,84	4,97	4,85	-0,69

Sumber: BPS, Kota Balikpapan Dalam Angka, 2021

Pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mampu tumbuh positif di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur. Namun masih dibawah pertumbuhan ekonomi nasional kecuali pada tahun 2020. Hal ini terutama didorong oleh penyelesaian proyek-proyek strategis nasional seperti proyek RDMP, pembangunan Jalan Tol Balikpapan–Samarinda, serta pembangunan Waduk Teritip.

Gambar 2.27 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 (%)

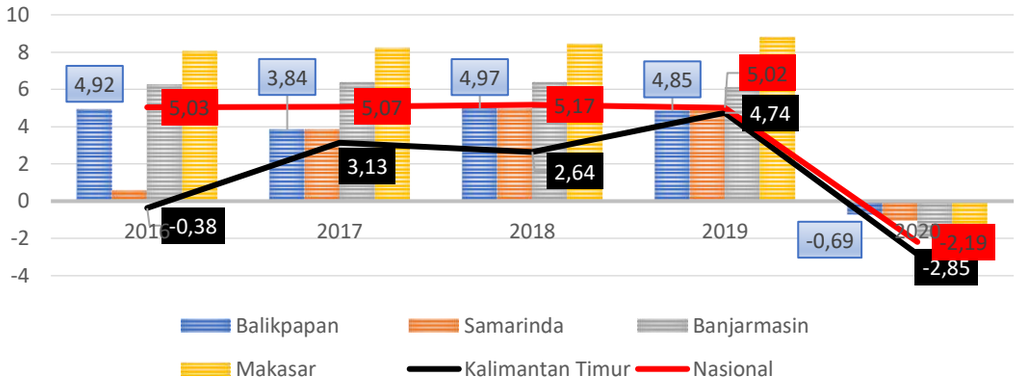

Sumber: BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2021

2.2.1.2. PDRB per Kapita

PDRB per kapita ADHB Kota Balikpapan senantiasa mengalami trend kenaikan dari Rp 128,12 juta pada tahun 2016 menjadi Rp 159,91 juta pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 155,98 juta atau sebesar -2,45% apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 2.12 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB ADHB (Triliun Rupiah)	80,2	87,72	97,70	104,77	103,60
Nilai PDRB ADHK (Triliun Rupiah)	73,22	76,03	79,81	83,68	83,10
PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	128,12	137,92	151,30	159,91	155,98
PDRB Per Kapita ADHK (Juta Rupiah)	116,97	119,55	123,59	127,72	125,11
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 (%)	4,92	3,84	4,97	4,85	-0,69
Jumlah Penduduk (Orang)	625.968	636.012	645.727	655.178	664.201

Sumber: BPS, Kota Balikpapan Dalam Angka, 2021

PDRB Per Kapita ADHB Kota Balikpapan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun masih lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Kota Banjarmasin, Kota Samarinda dan Nasional, namun masih dibawah capaian provinsi Kalimantan Timur yang digambarkan pada grafik di bawah ini.

Gambar 2.28 PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah)

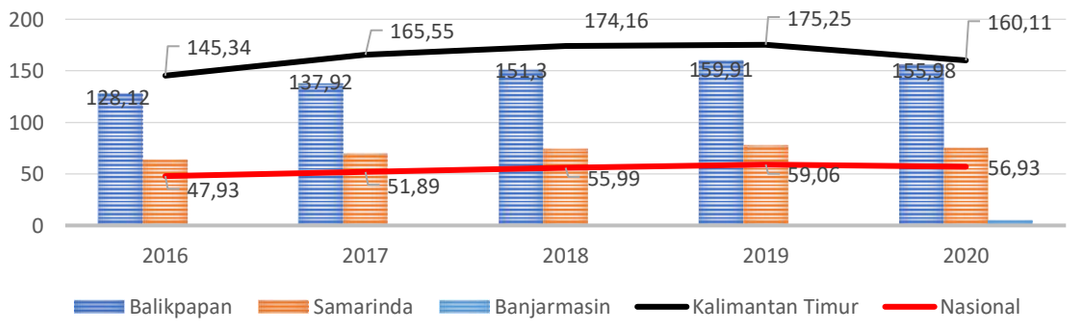

Sumber : BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2021

2.2.1.3. Struktur Perekonomian

Struktur Perekonomian Kota Balikpapan didominasi oleh sektor industri pengolahan sebesar 47,53% pada tahun 2016. Kemudian mengalami penurunan menjadi sebesar 47,10% pada tahun 2017 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2018 menjadi 47,51%. Pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi sebesar 47,18% dan meningkat kembali pada tahun 2020 mejadi sebesar 47,28%.

Selain sektor industri pengolahan, struktur perekonomian Kota Balikpapan didorong oleh sektor konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan, dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sisanya disumbang oleh lapangan usaha lainnya sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.13 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2016-2020

No.	Sektor	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,98%	0,93%	0,94%	0,97%	0,97%
2	Pertambangan dan Penggalian	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
3	Industri Pengolahan	47,53%	47,10%	47,51%	47,18%	47,28%
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,10%
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,09%
6	Konstruksi	14,96%	14,95%	15,27%	15,72%	16,53%
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,83%	8,91%	8,94%	9,13%	9,22%
8	Transportasi dan Pergudangan	11,95%	12,53%	11,97%	11,54%	9,85%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,77%	1,83%	1,88%	1,94%	1,81%
10	Informasi dan Komunikasi	3,19%	3,25%	3,13%	3,18%	3,48%
11	Jasa Keuangan	3,92%	3,76%	3,67%	3,63%	3,75%
12	Real Estate	2,02%	2,05%	2,00%	1,91%	1,92%
13	Jasa Perusahaan	0,32%	0,31%	0,30%	0,30%	0,29%
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,36%	1,15%	1,10%	1,14%	1,11%
15	Jasa Pendidikan	1,55%	1,57%	1,61%	1,64%	1,85%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,65%	0,65%	0,63%	0,63%	0,82%
17	Jasa Lainnya	0,76%	0,79%	0,82%	0,88%	0,87%
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2021

Jika dilihat berdasarkan kontribusi terhadap Perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur, menunjukkan bahwa Kota Balikpapan berkontribusi 17% kepada perekonomian Provinsi Kalimantan Timur, terbesar ketiga setelah Kutai Kartanegara (24%) dan Kutai Timur (19%).

Gambar 2.29 Distribusi Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap Provinsi Kalimantan Timur

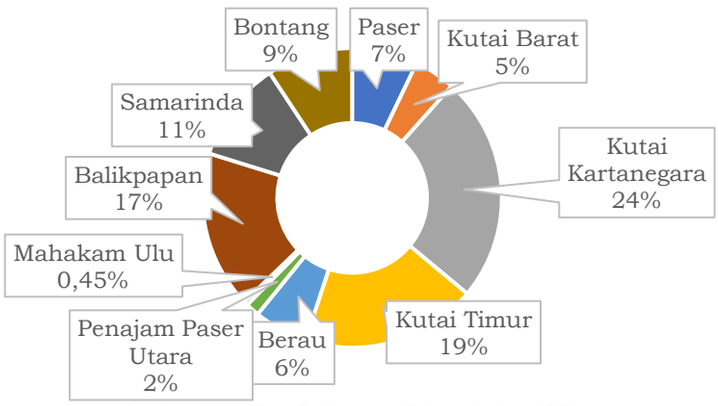

Sumber: BPS, Kota Balikpapan Dalam Angka, 2021

2.2.1.4. Laju Inflasi

Inflasi Kota Balikpapan pada tahun 2020 sebesar 0,65% lebih rendah apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019 yang sebesar 1,88%. Sementara pada tahun 2018 inflasi Kota Balikpapan sebesar 3,13%. Pada tahun

2017 inflasi Kota Balikpapan tercatat pada 2,45% cenderung menurun apabila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 4,13%. Secara keseluruhan mengalami kecenderungan penurunan namun masih terkendali oleh kinerja TPID Kota Balikpapan. Jika dibandingkan dengan inflasi Nasional sebesar 2,72% laju inflasi Kota Balikpapan lebih rendah. Namun, jika dibandingkan dengan laju inflasi Provinsi Kalimantan sebesar 1,66%, maka Kota Balikpapan lebih tinggi. Kelompok bahan makanan, perumahan dan transportasi masih menjadi penyumbang terbesar inflasi Kota Balikpapan.

Dalam waktu 5 tahun terakhir, angka inflasi Kota Balikpapan semakin menunjukkan pergerakan yang lebih stabil. Inflasi Kota Balikpapan lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional pada level 2,72%, tetapi lebih tinggi sebesar 0,22% dibandingkan nilai inflasi Provinsi Kalimantan Timur. Dinamika inflasi di Kota Balikpapan sendiri menunjukkan grafik yang cukup baik.

Jika dibandingkan grafik capaian Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional, capaian Kota Balikpapan menjadi yang terbaik. Hal ini dikarenakan keberhasilan pemerintah dalam menekan angka inflasi dari 4,13% pada tahun 2016 menjadi 0,65% pada tahun 2020. Capaian tingkat inflasi Kota Balikpapan tahun 2020, memang masih dibawah Provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi jika dilihat berdasarkan penurunannya, Kota Balikpapan yang paling baik penurunannya.

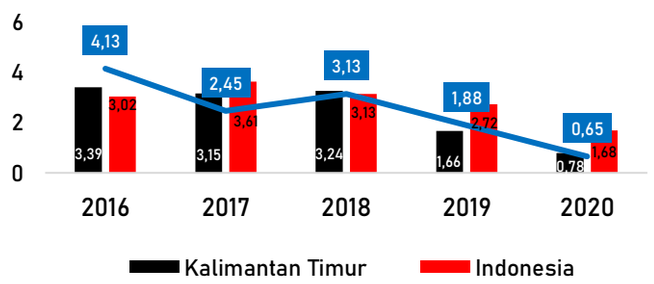

Gambar 2.30 Perbandingan Inflasi Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, danNasional
Sumber: BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2021

2.2.1.5. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kota Balikpapan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung menurun. Pada tahun 2017 terdapat 2,82% atau sebanyak 17,86 ribu jiwa penduduk miskin dan mengalami penurunan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Namun pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 0,15% menjadi 17,02 ribu jiwa. Jika dirata-rata pada tahun 2017-2020, persentase penduduk miskin di Kota Balikpapan sebesar 2,61%.

Untuk kedepan, usaha menurunkan angka kemiskinan daerah ini relatif lebih berat sebab kondisi perekonomian mengalami penurunan sebagai dampak pandemi Covid -19. Oleh karena itu, program program perlindungan sosial dan upaya peningkatan pendapatan masyarakat miskin tetap menjadi program prioritas untuk masyarakat miskin mampu bertahan ditengah pandemi Covid-19 dan pengentasan kemiskinan kedepan lebih mengarah kepada bantuan modal dan pembinaan yang mengarah pada peningkatan pendapatan rumah tangga miskin tersebut sesuai kondisi kegiatan ekonominya.

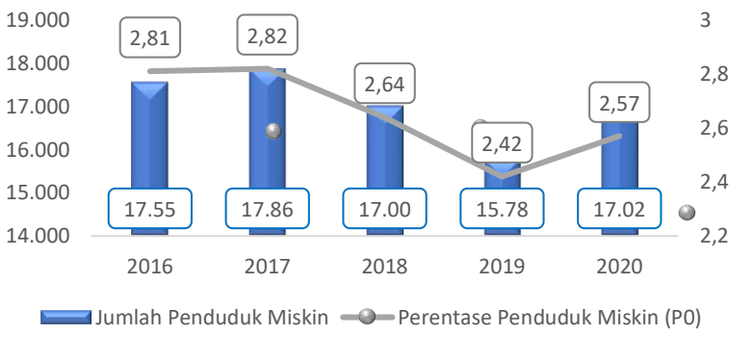

Gambar 2.31 Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) dan Persentase Penduduk Miskin (%) Kota Balikpapan Tahun 2016-2020
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2021

Pada tahun 2020, jika dibandingkan dengan seluruh Kota di Provinsi Kalimantan Timur, persentase penduduk miskin Kota Balikpapan merupakan yang terkecil dan di bawah angka provinsi sebesar 2,57%. Sedangkan Kota Bontang dan Kota Samarinda memiliki tingkat kemiskinan cukup rendah setelah Kota Balikpapan masing-masing sebesar 4,38% dan 4,76%. Jika dibandingkan dengan Kota Banjarmasin yang memiliki persentase penduduk miskin sebesar 4,39%, dapat dikatakan bahwa Kota Balikpapan dapat menanggulangi kemiskinan lebih baik dari pada kota tersebut.

Jika dilihat dari jumlah, penduduk miskin Kota Balikpapan masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kota Bontang, yakni penduduk miskin di Kota Balikpapan sebesar 17,02 ribu jiwa sedangkan Kota Bontang adalah 7,91 ribu jiwa. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Kota Samarinda, Kota Banjarmasin dan Kota Makassar masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kota Balikpapan, yaitu masing-masing sebesar 41,91 ribu jiwa, 31,31 ribu jiwa dan 69,98 ribu jiwa.

Berdasarkan grafik dibawah juga diketahui bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin Kota Balikpapan dan dibandingkan dengan Kota disekitarnya, berfluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2016, jumlah penduduk miskin Kota Balikpapan mencapai 17,55 ribu jiwa dengan persentase 2,81%, angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 17,86 ribu jiwa dengan persentase 2,82%. Pada tahun 2018 hingga 2019, jumlah penduduk miskin Kota Balikpapan mengalami penurunan menjadi 15,78 ribu jiwa dengan persentase 2,42%. Namun pada tahun 2020, angka ini kembali mengalami peningkatan menjadi 17,02 ribu jiwa dengan persentase 2,57%. Adapun sebaran kemiskinan per kecamatan pada Tahun 2020, Kecamatan Balikpapan Timur 2,14 ribu jiwa, Kecamatan Balikpapan Barat 2,35 ribu jiwa, Kecamatan Balikpapan Utara 4,11

ribu jiwa, Kecamatan Balikpapan Tengah 2,69 ribu jiwa, Kecamatan Balikpapan Selatan 3,56 ribu jiwa dan Kecamatan Balikpapan Kota 2,17 ribu jiwa.

Gambar 2.32 Perbandingan Jumlah &Persentase Penduduk Miskin (P0) menurut Kota di Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Banjarmasih Tahun 2020

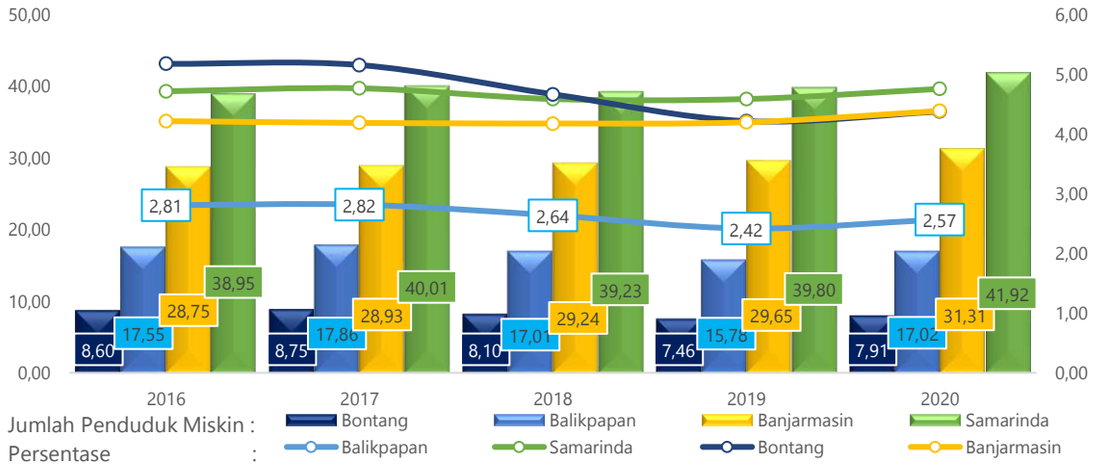

Sumber: BPS, Kota Balikpapan Dalam Angka, 2021

Indikator selanjutnya yang digunakan untuk mengukur kemiskinan yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) berfungsi untuk mengukur kesenjangan antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilainya maka semakin jauh di bawah rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sebaliknya, jika angka indeks kemiskinannya semakin rendah maka semakin dekat rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Sementara itu, Indeks keparahan kemiskinan (P2) adalah indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Nilai P1 dan P2 Kota Balikpapan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung berfluktuasi. Tahun 2016 nilai P1 sebesar 0,30, menurun di tahun 2017 menjadi 0,23, di tahun 2018 naik cukup tinggi di angka 0,67, menurun di tahun 2019 menjadi 0,26, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 0,38. Rata-rata nilai P1 selama 5 tahun terakhir adalah 0,37. Meningkatnya nilai P1 di tahun 2020 menunjukkan semakin dekat rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Pola yang sama juga terlihat pada nilai P2, kenaikan nilai terjadi di tahun 2018 dan 2020. Sedangkan di tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 0,02 dari tahun 2016. Kemudian pada tahun 2019 penurunan nilai P2 cukup tinggi dari tahun 2018 sebesar 0,20 menjadi 0,06. Pada tahun 2020, terjadi kenaikan sebesar 0,06 menjadi 0,12. Rata-rata nilai P2 dari tahun 2016-2020 sebesar 0,10, rendahnya nilai P2 di Kota Balikpapan menunjukkan rendahnya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

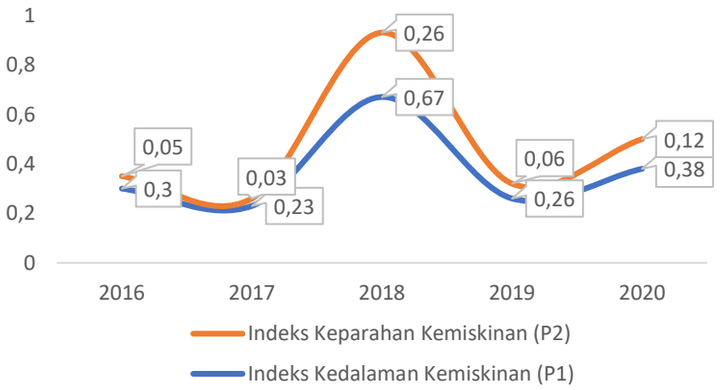

Gambar 2.33 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Indeks dan Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2016-2020
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2021

Nilai P1 dan P2 Kota Balikpapan jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain keduanya memiliki nilai terkecil dan dibawah nilai Provinsi Kalimantan Timur. Di atasnya ada Kota Bontang dan Samarinda dengan masing-masing nilai P1 sebesar 0,54 dan 0,09, serta 0,72 dan 0,21 untuk nilai P2. Sementara itu Kabupaten Kutai Timur menjadi daerah dengan nilai P1 dan P2 tertinggi yang menunjukkan tingginya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin dan jauh di bawah rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.

Gambar 2.34 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

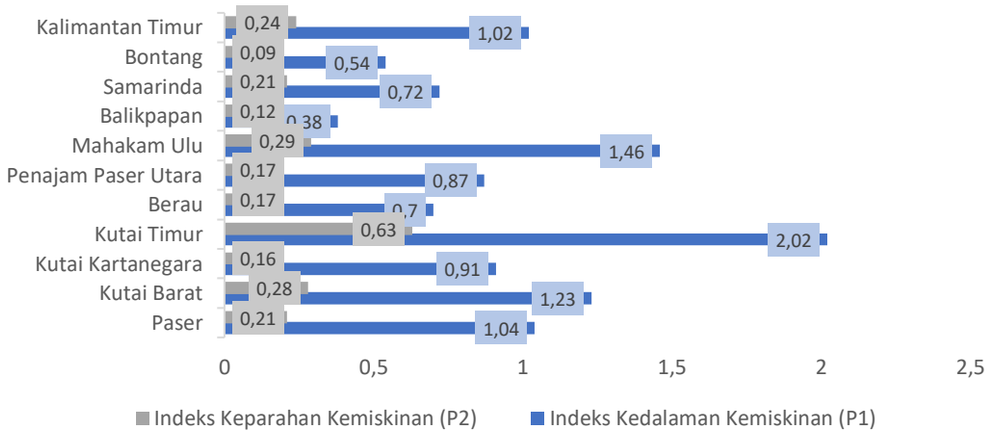

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2021

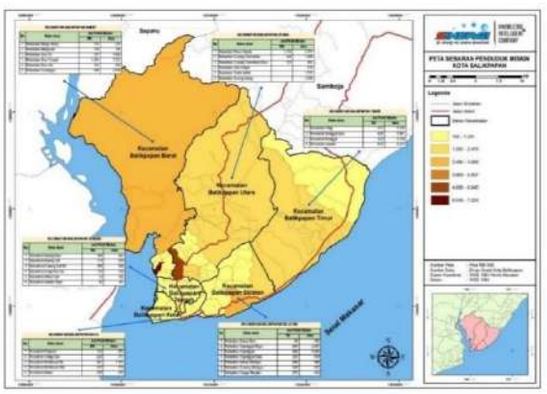

Adapun sebaran jumlah penduduk miskin di Kota Balikpapan pada setiap Kecamatan/Kelurahan ditampilkan pada Gambar 2.35. Jumlah penduduk miskin tinggi terlihat pada warna yang lebih gelap dibandingkan daerah lainnya.

Gambar 2.35 Peta Sebaran Penduduk Miskin Kota Balikpapan
Sumber: Dokumen Evaluasi Program Kemiskinan Kota Balikpapan, 2020

Dalam upaya penanggulangan selama ini, beberapa karakteristik dan permasalahan kemiskinan di Kota Balikpapan, diantaranya adalah: (a) rata-rata pendidikan penduduk miskin Kota Balikpapan hanya tamatan SD/SLTP sebesar

69,66%; (b) dari sisi tempat kelahiran, sebagian besar penduduk miskin berasal dari luar Kota Balikpapan yaitu sebesar 55,27%; (c) pemberdayaan masyarakat miskin belum dilakukan secara tuntas; (d) Permasalahan data penduduk miskin, termasuk permasalahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Program Keluarga Harapan (PKH); (e) penanganan kemiskinan belum dilakukan secara terintegrasi; dan (f) belum optimalnya monitoring dan evaluasi pihak terkait terhadap bantuan yang telah disalurkan.

Permasalahan tersebut perlu ditangani secara konsisten dan terintegrasi dengan melibatkan segenap pemangku kemiskinan, apalagi tantangan penanggulangan kemiskinan saat ini dan kedepan semakin berat. Adanya pandemi covid-19 berdampak pada meningkatnya penduduk miskin, di sisi lain adanya rencana Kota Balikpapan sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) jika tidak diantisipasi secara bijak akan memunculkan kantong-kantong kemiskinan baru seiring meningkatnya jumlah penduduk ke daerah ini.

Menurunnya jumlah institusi ataupun lembaga sosial yang berfungsi untuk membantu Dinas Sosial berpengaruh terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Balikpapan. Berdasarkan data dari Dinas Sosial, penyaluran jaminan sosial seperti akses kesehatan, pangan, dan lain-lain mengalami tren peningkatan. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan yang ditanggung Kota Balikpapan mengalami peningkatan cukup signifikan. Pada tahun 2016 jumlahnya sebanyak 10.403 jiwa, angka ini meningkat menjadi 17.854 jiwa pada tahun 2020. Hal yang sama juga terjadi pada Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengalami peningkatan dua kali lipat. Pada tahun 2016, jumlah PKH sebanyak 2.012, angka ini meningkat menjadi 5.678 PKH pada tahun 2020.

Dengan adanya tren peningkatan penerima bantuan sosial, akan tetapi disisi lain jumlah lembaga sosial yang mengalami tren penurunan, akan berpengaruh terhadap kinerja Dinas Sosial untuk menyalurkan berbagai jenis program bantuan untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Balikpapan. Oleh Karenanya diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas institusi/lembaga sosial untuk membantu kinerja Dinas Sosial. Beberapa capaian kinerja program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan di Kota Balikpapan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah :

Tabel 2.14Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	PBI Jamkesda (Jiwa)	10.403	13.493	16.166	16.405	17.854
2	PBI APBN (Jiwa)	98.249	97.221	97.839	93.147	89.186
3	Program Keluarga Harapan (Keluarga Sangat Miskin)	2.012	3.630	6.919	5.089	5.678
4	Raskin/Rastra/BPNT	10.625	9.563	9.563	10.047	9.877

Sumber : Dinas Sosial Kota Balikpapan, 2021

2.2.1.6. Ketimpangan/Indeks Gini

Pada tahun 2017 dan 2018, indeks gini Kota Balikpapan sebesar 0,32 yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan tergolong rendah. Selanjutnya pada tahun 2019, indeks gini mengalami penurunan menjadi 0,302. Namun,

kembali mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 0,3111. Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional, indeks gini Kota Balikpapan masih berada dibawah indeks Provinsi dan Nasional. Seperti pada tahun 2020, indeks gini Provinsi sebesar 0,328 dan Nasional sebesar 0,381, dimana keduanya berada diatas angka indeks gini Kota Balikpapan.

Gambar 2.36 Perbandingan Indeks Gini Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional

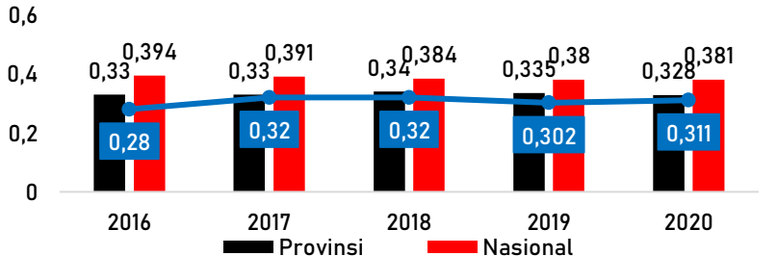

Sumber: BPS, Kota Balikpapan Dalam Angka, diolah

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Secara umum, indeks pembangunan manusia Kota Balikpapan mengalami kemajuan selama periode 2016 hingga 2019. Pada tahun 2020, sebagai dampak dari pandemi covid-19, IPM Kota Balikpapan mengalami penurunan sebesar 0,10 persen, menjadi 80,01. Penurunan tersebut tidak merubah status indeks pembangunan manusia Kota Balikpapan yang berstatus "Sangat Tinggi", bersama dengan 36 kabupaten/kota lainnya di seluruh Indonesia.

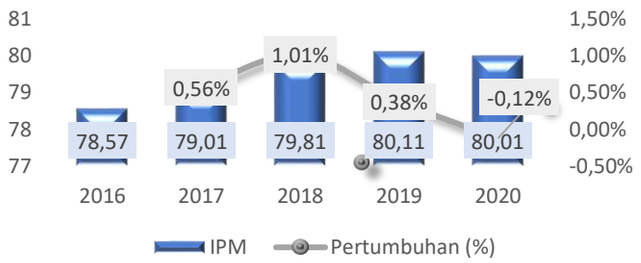

Gambar 2.37 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan IPM (%) Kota Balikpapan Tahun 2016-2020
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2021

IPM Kota Balikpapan pada Tahun 2020 menempati urutan ke-3 tertinggi di bawah Kota Samarinda dengan IPM sebesar 80,11 dan Kota Bontang sebesar 80,02 serta berada di atas angka provinsi sebesar 76,24. Kabupaten Mahakam Ulu menjadi daerah dengan IPM terendah sebesar 67,09. Berdasarkan hal tersebut, tiga kota di Provinsi Kalimantan Timur memiliki kategori IPM tinggi, kemudian yang berada pada kategori menengah atas terdapat 6 Kabupaten. Sementara itu, Kabupaten Mahakam Ulu menjadi satu-satunya daerah dengan kategori IPM menengah bawah. Sehingga jika dilihat nilai IPM Provinsi Kalimantan Timur memiliki kategori menengah atas.

Gambar 2.38 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

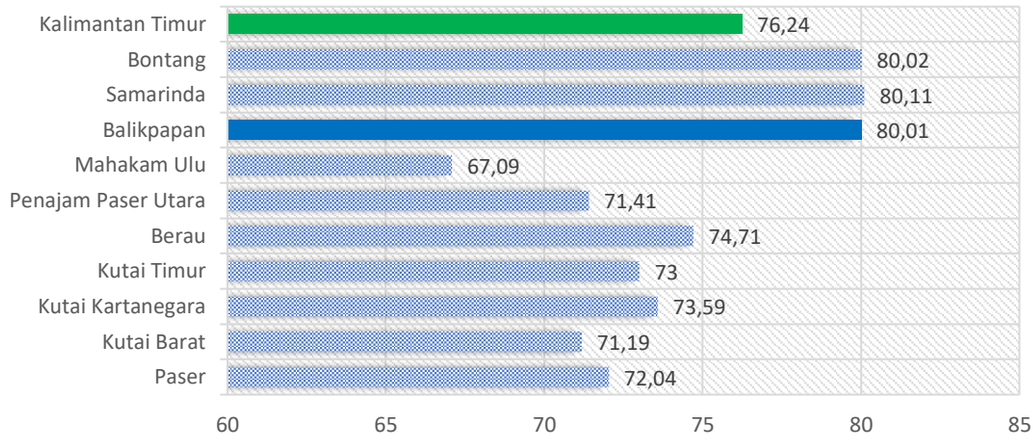

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2021

Berdasarkan skala pencapaian derajat pembangunan manusia, pada tahun 2020 ada tiga Kabupaten/Kota yang tahun ini memasuki kategori sangat tinggi yaitu Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kota Bontang. Selebihnya untuk kabupaten di Kalimantan Timur berada pada kategori sedang.

Jika dibandingkan dengan IPM Nasional, capaian IPM Kota Balikpapan melampaui capaian IPM Nasional. Pada tahun 2017 misalnya, capaian IPM Nasional sebesar 70,81 sedangkan IPM Kota Balikpapan sebesar 79,01. Kedua capaian IPM baik Kota Balikpapan dan Nasional meningkat secara konsisten hingga tahun 2019. Tercatat pada tahun 2019, IPM Kota Balikpapan sebesar 80,11 sedangkan IPM Nasional sebesar 76,61. Walaupun IPM Kota Balikpapan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 80,01, namun masih melampaui capaian IPM Nasional sebesar 71,94. Namun jika dilihat dari grafik, capaian IPM Kota Balikpapan masih berada dibawah capaian IPM Kota Semarang dan Kota Makassar.

Gambar 2.39 Perbandingan IPM Kota Balikpapan dengan Kota di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Makassar, Banjarmasin, Semarang dan Nasional Tahun 2016-2020

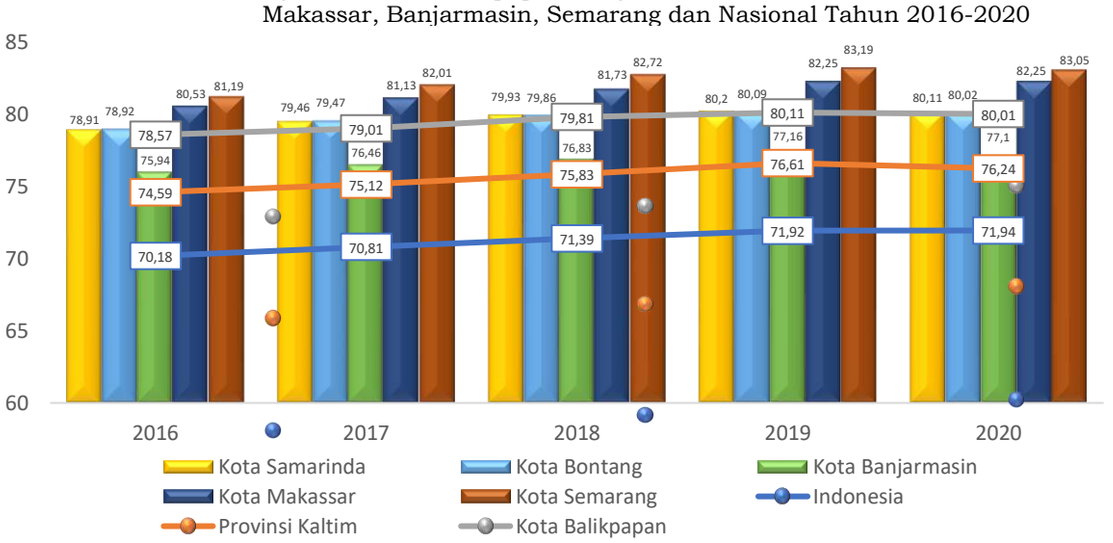

Sumber: BPS, Kota Balikpapan Dalam Angka, 2021

2.2.2.1 Pendidikan

a) Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Capaian rata-rata lama sekolah terjadi peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2019 sebesar 10,67 naik 0,01 poin pada tahun 2020 menjadi 10,68. Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan yang positif dan merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia di Kota Balikpapan. Secara rata-rata penduduk di Kota Balikpapan telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas 2 SMA/sederajat.

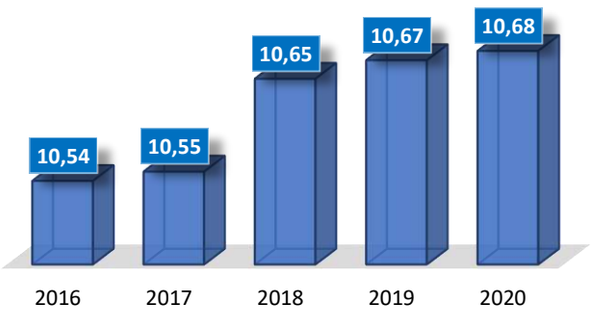

Gambar 2.40 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Balikpapan Tahun 2016-2020
Sumber: BPS, Kota Balikpapan Dalam Angka, 2021

Berdasarkan gender, rata-rata lama sekolah laki-laki dan rata-rata lama sekolah perempuan mencapai angka masing-masing sebesar 11,19 tahun dan 10,35 tahun. Sejak tahun 2017, rata-rata lama sekolah laki-laki lebih lama daripada rata-rata lama sekolah perempuan. Pada tahun 2020, rata-rata lama pendidikan laki-laki lebih lama 0,84 tahun (sekitar 10 sampai 11 bulan) dibandingkan rata-rata lama pendidikan perempuan. Diharapkan pada periode selanjutnya lama sekolah perempuan semakin ditingkatkan sehingga perbedaan dengan lama sekolah laki-laki semakin berkurang dan setara.

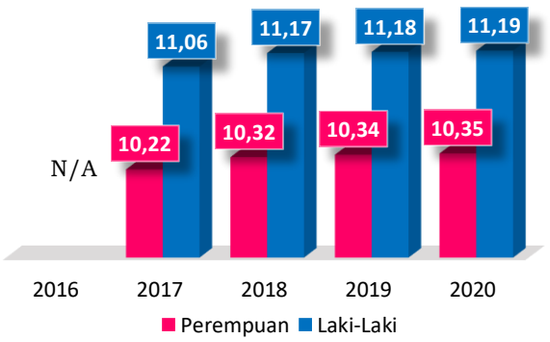

Gambar 2.41 RLS Kota Balikpapan Menurut Gender Tahun 2016-2020
Sumber: BPS, Kota Balikpapan Dalam Angka, 2021

Bila dilihat keadaan pada setiap kabupaten/kota, posisi rata-rata lama sekolah tertinggi tetap diraih oleh tiga kota. Peringkat pertama dicapai oleh Kota Bontang dengan rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas sebesar 10,79 tahun, posisi kedua Kota Balikpapan dengan rata-rata lama sekolah 10,68 tahun, dan urutan ketiga adalah Kota Samarinda dengan rata-rata lama sekolah 10,48 tahun. Perbedaan rata-rata lama sekolah antara wilayah kota dan wilayah kabupaten cukup berarti. Seperti yang terlihat pada penduduk di Kabupaten Mahakam Ulu, tercatat rata-rata lama sekolah daerah ini yang terendah dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar 7,97 tahun atau tertinggal sekitar tiga tahun dari penduduk di wilayah kota. Hal ini disebabkan sarana dan prasarana di daerah kota lebih memadai dibandingkan dengan wilayah kabupaten, dan akses untuk mencapai tempat pendidikan juga lebih mudah.

Gambar 2.42 RLSKabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, 2020

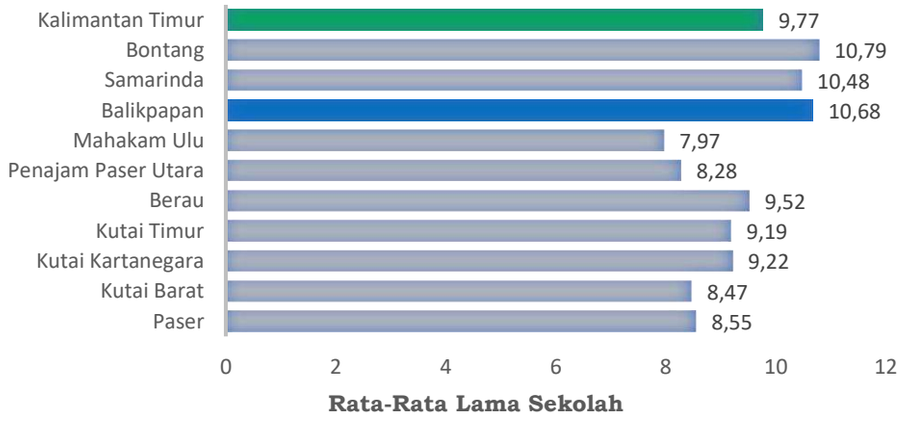

Sumber: BPS, Kota Balikpapan Dalam Angka, 2021

Capaian angka pendidikan Kota Balikpapan pada tahun 2020 adalah 10,68 tahun. Artinya, rata-rata penduduk Kota Balikpapan menamatkan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan tidak tamat Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal ini patut diperhatikan oleh Pemerintah Kota Balikpapan, sebab dengan perkembangan teknologi dan semakin ketatnya persaingan kerja maka penyiapan sumber daya mumpuni mutlak diperlukan. Salah satu ruang untuk dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas tersebut adalah pendidikan formal.

b) Harapan Lama Sekolah (HLS)

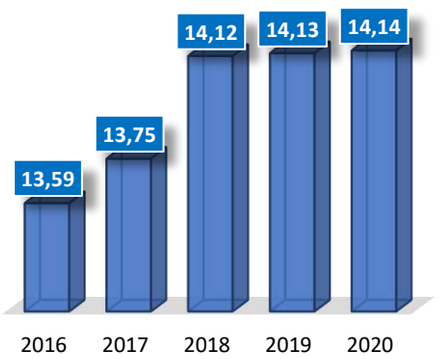

Angka harapan lama (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Data harapan lama sekolah di Kota Balikpapan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebagaimana gambar berikut.

Gambar 2.43 Harapan Lama Sekolah Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

Sumber: BPS, Kota Balikpapan Dalam Angka, 2021

Berdasarkan gambar capaian harapan lama sekolah Kota Balikpapan tersebut, bahwa angka harapan sekolah penduduk Kota Balikpapan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 berada pada angka 14,13 mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 0,01 menjadi 14,14. Melihat angka harapan lama sekolah penduduk Kota Balikpapan sejak tahun 2016–2020 selalu diatas 12 tahun. Artinya, terdapat keinginan kuat anak-anak di Kota Balikpapan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi di tingkat D3/S1.

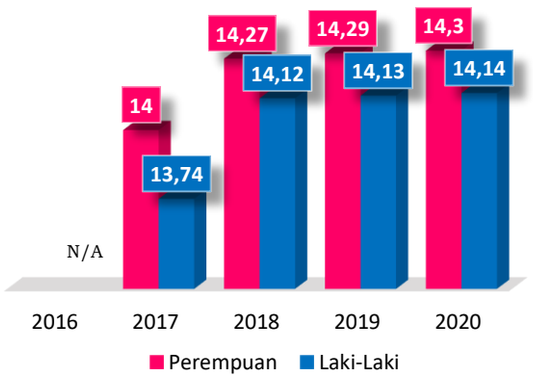

Jika dilihat berdasar gender, harapan lama sekolah perempuan adalah 14,30 tahun dan laki-laki adalah 14,14 tahun. Angka ini dapat diartikan bahwa penduduk usia 7 tahun keatas baik laki-laki maupun perempuan memiliki harapan lama sekolah sebesar 14 tahun.

Gambar 2.44 HLS Kota Balikpapan Menurut Gender Tahun 2016-2020
Sumber: BPS, Kota Balikpapan Dalam Angka, 2021

Capaian angka harapan lama sekolah di Balikpapan menempati urutan ke-2 se Provinsi Kalimantan Timur setelah Kota Samarinda sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2.45 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

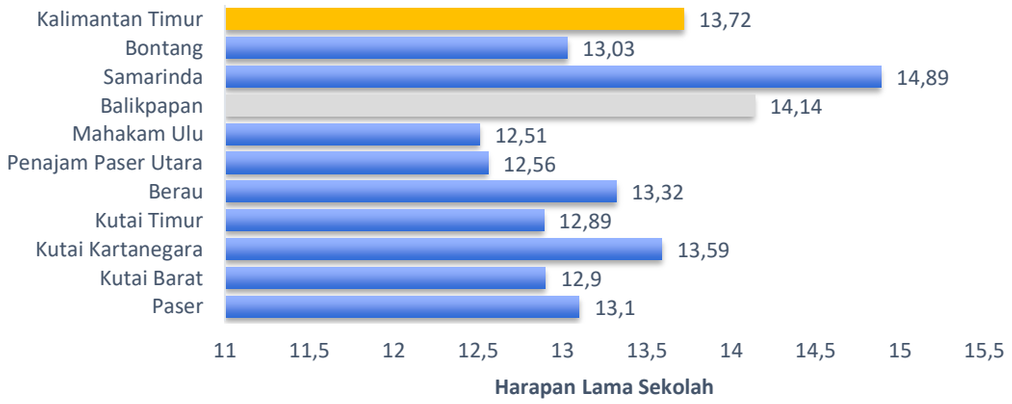

Sumber: BPS, Provinsi Kalimantan Timur dalam Angka, 2021

Saat mengaitkan antara rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, terdapat perbedaan kurang lebih 4 tahun antara angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Pada tahun 2020, rata-rata lama sekolah penduduk Kota Balikpapan adalah 10,68 tahun sedangkan harapan lama sekolah sebesar 14,14 tahun. Hal ini penting diperhatikan oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk menentukan berbagai kebijakan dan program pembangunan sumber daya manusia ke depan, khususnya dalam bidang pendidikan.

Salah satu tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Pada target 4b, dinyatakan bahwa memastikan semua anak perempuan dan anak laki-laki memiliki akses ke pengembangan anak usia dini yang setara, perawatan, dan pendidikan anak usia dini sehingga mereka siap untuk pendidikan dasar. Pada target ini, diharapkan angka kelulusan baik SD, SMP, maupun SMA ditingkatkan. Secara langsung, ketika target ini dicapai maka angka HLS dan RLS yang merupakan dua indikator penghitungan IPM akan ikut meningkat.

2.2.2.2 Kesehatan

a) Angka Harapan Hidup

Indikator Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Balikpapan yang merepresentasikan aspek kesehatan terus meningkat sejak tahun 2017. Semakin meningkatnya AHH di Kota Balikpapan mengindikasikan bahwa derajat kesehatan masyarakat di Balikpapan semakin membaik, karena AHH merupakan salah satu tolok ukur untuk menilai derajat kesehatan masyarakat.

Realisasi capaian AHH Kota Balikpapan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hingga tahun 2020 AHH Kota Balikpapan mencapai 74,49. Hal ini menunjukkan bahwa harapan bayi yang baru lahir pada tahun 2020 dapat bertahan hidup hingga usia 74,49 tahun. Seseorang yang dapat menikmati umur panjang selain dari upaya dari pribadi yang bersangkutan, juga diukur dari seberapa jauh upaya masyarakat atau pemerintah dengan penggunaan sumber daya yang tersedia mampu untuk memperpanjang umur penduduknya. Oleh karena itu pemanfaatan sumber daya masyarakat perlu diarahkan pada pembinaan kesehatan agar warganya senantiasa berperilaku hidup sehat sehingga dapat menikmati umur panjang dan sehat.

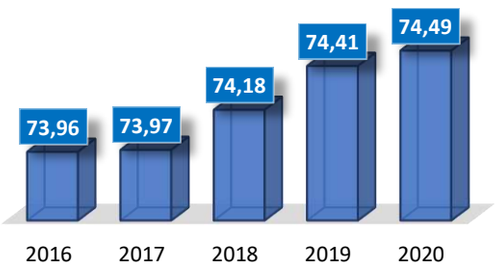

Gambar 2.46 Angka Harapan Hidup (Tahun) Kota Balikpapan Tahun 2016-2020
Sumber: BPS, Kota Balikpapan Dalam Angka, 2021

Dalam pengukuran IPM, indikator kesehatan dipengaruhi oleh nilai minimum dan maksimum yang bisa dicapai. Nilai maksimum AHH laki-laki adalah 82,5 tahun sedangkan bagi perempuan 87,5 tahun. Adapun untuk nilai minimum AHH laki-laki dan perempuan masing-masing adalah 17,5 dan 22,5 tahun. Angka ini mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh UNDP. Pada tahun 2020, angka AHH laki-laki adalah 72,62 dan AHH perempuan adalah sebesar 76,33. Sejak tahun 2017, nilai AHH perempuan dan laki-laki mengalami peningkatan setiap tahunnya yang berarti bahwa tingkat kesejahteraan dan pembangunan perempuan dan laki-laki mengalami perbaikan. Pada tahun 2017 AHH laki-laki sebesar 72,05 sedangkan perempuan 75,88. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2018 yaitu AHH laki-laki meningkat menjadi 72,26 dan AHH perempuan menjadi 76,09. Hingga tahun 2020, AHH laki-laki berada diangka 72,62 sedangkan AHH perempuan meningkat menjadi 76,33. Peningkatan secara konsisten tiap tahunnya mengindikasikan bahwa sistem dan kebijakan kesehatan yang selama ini diterapkan memiliki korelasi yang positif terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Di sisi lain, selisih AHH perempuan dan laki-laki di Kota Balikpapan setiap tahunnya mengalami penurunan yang mengindikasikan bahwa suatu saat nanti fenomena *female advantages* bisa jadi berkurang atau bahkan tidak muncul di Kota Balikpapan.

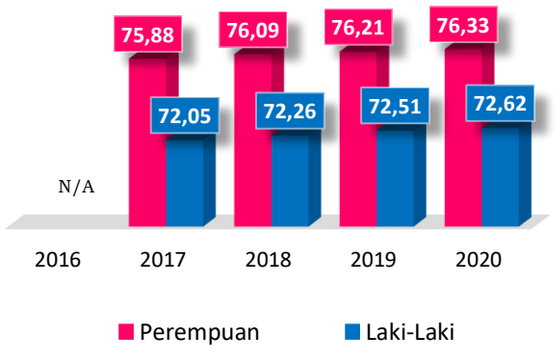

Gambar 2.47 Angka Harapan Hidup Kota Balikpapan Menurut Gender Tahun 2016-2020

Sumber: BPS, Kota Balikpapan Dalam Angka, 2021

Angka harapan hidup saat lahir adalah salah satu indikator gambaran kesehatan masyarakat di suatu wilayah tertentu. AHH Kota Balikpapan masih lebih tinggi dari AHH provinsi Kalimantan Timur dengan selisih 0,16 poin. Tingginya AHH Kota Balikpapan disebabkan fasilitas kesehatan dan persentase penolong persalinan medis, jumlah dokter, persentase angka kesakitan, keadaan lingkungan perumahan dan penyediaan air bersih sudah semakin baik.

Gambar 2.48 Angka Harapan Hidup (Tahun) se-Kalimantan Timur Tahun 2020

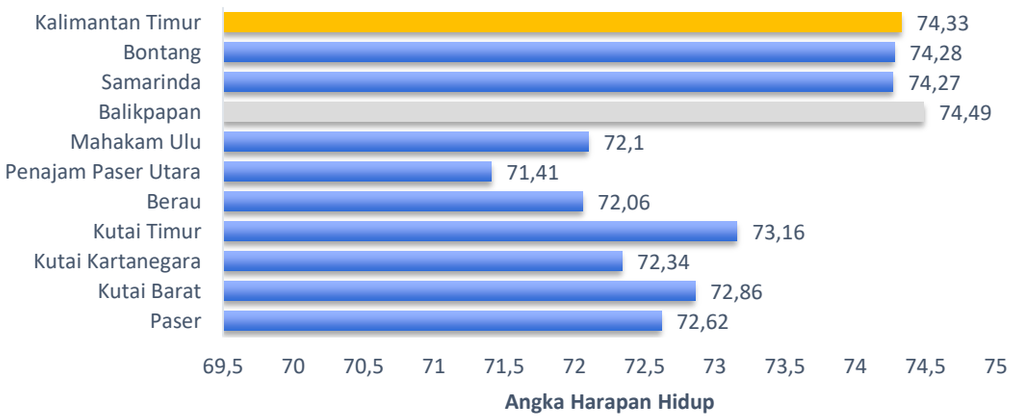

Sumber: BPS, Kota Balikpapan Dalam Angka, 2021

Dari aspek kesehatan, Angka Harapan Hidup (AHH) di Kota Balikpapan pada tahun 2020 mencapai 74,49 tahun, mengalami peningkatan sebesar 0,08 bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 74,41 tahun.

2.2.2.3 Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita Kota Balikpapan terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan 2019, yaitu sebesar Rp14,254 juta pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp 14,791 juta pada 2019. Pada tahun 2020, terjadi penurunan menjadi sebesar Rp14,549 juta. Walaupun mengalami penurunan, pengeluaran perkapita Kota Balikpapan masih berada diatas pengeluaran per kapita Provinsi Kalimantan Timur, seperti pada tahun 2020 pengeluaran perkapita Provinsi sebesar Rp11,728 juta. Hal ini berarti, rata-rata pengeluaran penduduk di Kota Balikpapan selama setahun lebih tinggi jika dibandingkan dengan penduduk di seluruh Provinsi Kalimantan Timur.

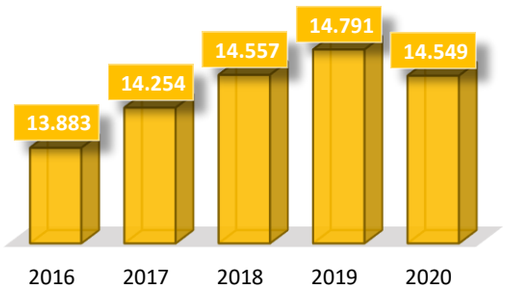

Gambar 2.49 Pengeluaran Per Kapita Kota Balikpapan Tahun 2016 - 2020
Sumber: BPS diolah, 2021

Berdasarkan gender, dari tahun 2017 hingga 2020 pengeluaran per kapita laki-laki selama setahun lebih besar jika dibandingkan dengan perempuan. Seperti pada tahun 2020, pengeluaran perkapita laki-laki sebesar Rp 22,602 juta per tahun, sedangkan untuk perempuan hanya sebesar Rp 10,756 juta per tahun.

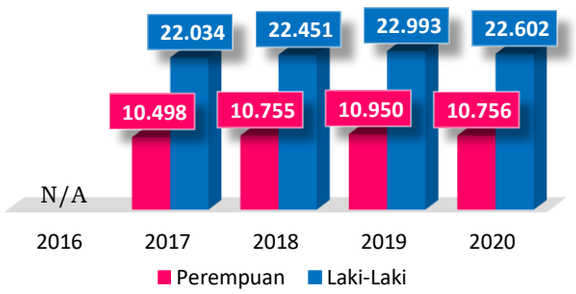

Gambar 2.50 Pengeluaran Per Kapita Kota Balikpapan Menurut GenderTahun 2016-2020
Sumber: BPS diolah,2021

Pada tahun 2020, jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, pengeluaran per kapita Kota Balikpapan berada di peringkat kedua setelah Kota Bontang dengan pengeluaran per kapita sebesar Rp 16,278 juta. Sedangkan, Kabupaten Mahakam Ulu memiliki pengeluaran per kapita terendah yaitu sebesar Rp 7,524 juta.

Gambar 2.51 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

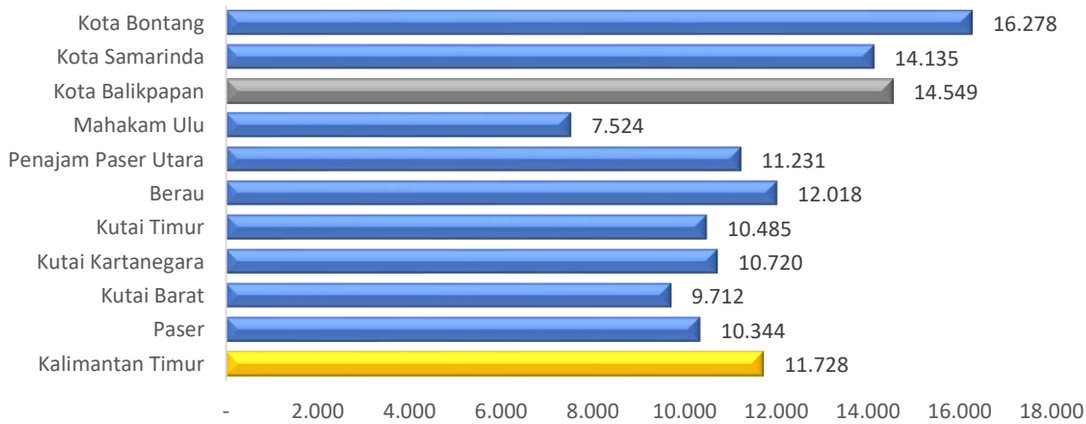

Sumber: BPS diolah

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.3.1.1. Pendidikan

a. Rasio Guru Murid

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota/Kabupaten mengelola memiliki kewenangan atas pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan usia dini, dan pendidikan non formal.

Adapun kewenangan atas pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan kejuruan merupakan Pemerintah Provinsi. Pendidikan memegang perang penting dalam membentuk kualitas SDM. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dapat menjadi salah satu tolak ukur dalam melihat kesungguhan pemerintah dalam upaya peningkatan SDM. Pada tahun 2020, Kota Balikpapan tercatat telah memiliki 210 Sekolah Dasar baik negeri dan swasta dengan jumlah murid dan jumlah guru masing-masing sebanyak 71.279 murid dan 3.310 guru. Jumlah Sekolah Menengah Pertama baik negeri dan swasta di Kota Balikpapan sebanyak 91, dengan 32.962 murid dan 1.563 guru. Dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 2.15 Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru di Kota Balikpapan Tahun 2020

Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
Sekolah Dasar (SD)	210	71.279	3.310
Negeri	136	52.497	2.307
Swasta	50	12.341	670
MI	24	6.441	333
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	91	32.962	1.563
Negeri	23	19.982	833
Swasta	54	9.742	527
MTs	14	3.238	203

Sumber: BPS, Kota Balikpapan Dalam Angka, 2021

Rasio guru baik guru PNS maupun non PNS terhadap murid adalah jumlah guru per 10.000 jumlah murid sesuai jenjang pendidikan. Rasio guru terhadap murid di Kota Balikpapan pada tahun 2016 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.16 Rasio Guru terhadap Murid di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

Jenjang Pendidikan	Rasio Guru terhadap Murid				
	2016	2017	2018	2019	2020
Paud	N/A	01:11	01:11	01:10	01:11
Sekolah Dasar	01:26	01:22	01:26	01:23	01:23
Sekolah Menengah Pertama	01:24	01:21	01:24	01:21	01:20

Sumber : Disdikbud Kota Balikpapan, 2021

b. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

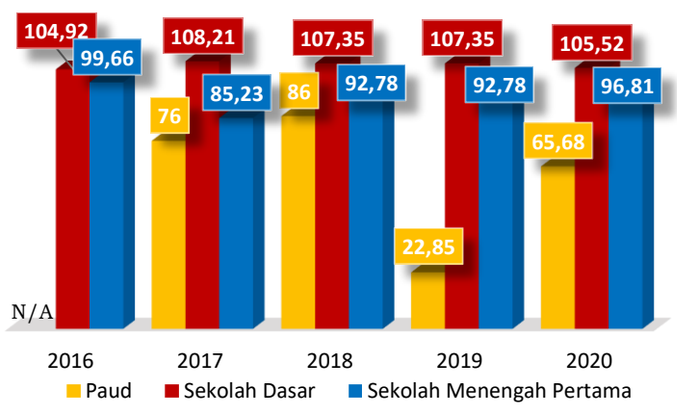

Gambar 2.52 Angka Partisipasi Kasar Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2020
Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2021

Pada tujuan ke 4 SDGs tentang pendidikan berkualitas, terdapat target Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. Pada tahun 2016, APK tingkat PAUD belum dilakukan penghitungan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dan belum menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, sehingga belum terdapat data APK PAUD pada tahun 2016. Capaian APK tingkat PAUD Kota Balikpapan menunjukkan tingkat yang fluktuatif. Sempat menyentuh angka 76 pada tahun 2017 dan mengalami peningkatan menjadi 86 pada tahun 2018, namun mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 22,85. Hingga tahun 2020, APK PAUD kembali mengalami peningkatan menjadi 65,58.

Sedangkan untuk capaian APK tingkat Sekolah Dasar Kota Balikpapan pada tahun 2016 angka partisipasi kasar tingkat SD sebesar 104,9 ,kemudian mengalami kenaikan menjadi 108,21 pada tahun 2017, selanjutnya kembali mengalami penurunan menjadi 107,35 pada tahun 2018 dan tahun 2019, kemudian mengalami penurunan kembali menjadi 105,52 pada tahun 2020. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi APK adalah jumlah rasio guru terhadap murid dan ketersediaan ruang kelas pada jenjang SD terhadap jumlah penduduk jenjang usia SD.

Capaian angka partisipasi kasar tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Balikpapan menunjukkan tingkat yang fluktuatif. Pada tahun 2016, angka partisipasi kasar tingkat SMP sebesar 99,66. Kemudian mengalami penurunan menjadi 85,23 pada tahun 2017, selanjutnya mengalami peningkatan menjadi 92,78 pada tahun 2018 dan tahun 2019. Hingga pada tahun 2020, angka ini kembali mengalami peningkatan menjadi 96,81.

c. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni adalah Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Seperti halnya dengan APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar.

Gambar 2.53 Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2020

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2021

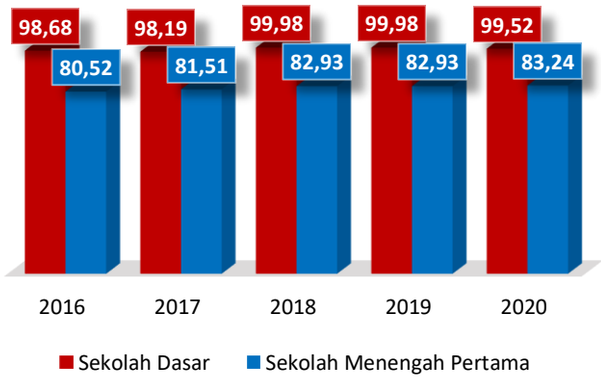

Berdasarkan Gambar diatas, Angka partisipasi murni (APM) untuk tingkat SD pada tahun 2016 adalah 98,68, menurun pada tahun 2017 menjadi 98,19. Pada tahun 2018, angka ini mengalami kenaikan menjadi 99,98 dan tidak mengalami perubahan hingga tahun 2020. Pada tahun 2020, angka ini kembali mengalami penurunan menjadi 99,52. APM SD lebih dipengaruhi oleh usia siswa baru yang mendaftar masih berusia dibawah 7 tahun dan jumlah siswa yang usianya di atas 12 tahun, sehingga mempengaruhi ketercapaian APM SD.

Pada jenjang SMP, angka partisipasi murni mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2016 sebesar 80,52 dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 83,24 pada tahun 2020. Belum tercapainya APM SMP dikarenakan masih terdapat siswa yang berusia di bawah 13 tahun dan siswa berusia 15 tahun telah mengenyam pendidikan SMA/Sederajat.

d. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian). Capaian APS Kota Balikpapan untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2016 sampai tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut.

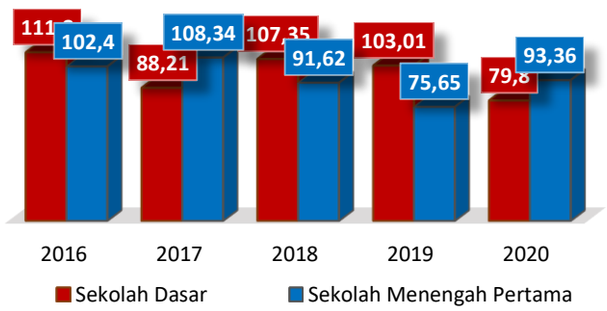

Gambar 2.54 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2020
Sumber: Disdikbud Kota Balikpapan, 2021

Berdasarkan Gambar diatas, Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk tingkat SD pada tahun 2016 adalah 111,8, menurun pada tahun 2017 menjadi 88,21. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 107,35 dan mengalami penurunan 103,35 pada tahun 2019 dan 79,8 pada tahun 2020. Penurunan disebabkan berbagai faktor antara lain sebagai berikut:

1. Pendapatan per kapita (kesejahteraan rumah tangga);
2. Tingkat melek huruf usia dewasa (pendidikan orang tua);
3. Jumlah sekolah yang tersedia dan tingkat urbanisasi penduduk.

e. Angka Pendidikan yang Ditamatkan dan Angka Putus Sekolah

Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan.APT Kota Balikpapan untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2016 sampai tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut.

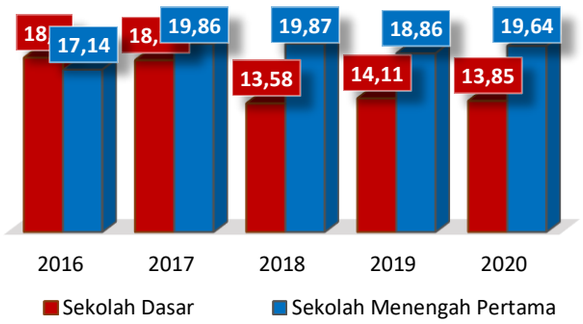

Gambar 2.55 Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2020

Sumber: Disdikbud Kota Balikpapan, 2021

Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen. Angka putus sekolah di Kota Balikpapan untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2016 sampai tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.56 Angka Putus Sekolah Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2020
Sumber: Disdikbud Kota Balikpapan, 2021

f. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Kondisi bangunan pada sekolah negeri baik pada tingkat SD atau SMP dengan kondisi bangunan baik mengalami penurunan setiap tahunnya, mengingat usia sekolah di kota Balikpapan rata-rata ± 20 Tahun, Pemerintah kota terus berupaya melakukan pemeliharaan dan melakukan penambahan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi anggaran baik dari APBD maupun APBN. Persentase sekolah pendidikan dengan kondisi bangunan baik di Kota Balikpapan pada tahun 2017 sampai tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.57 Persentase Sekolah Pendidikan dengan Kondisi Bangunan BaikDi Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2020

Sumber: Disdikbud Kota Balikpapan, 2021

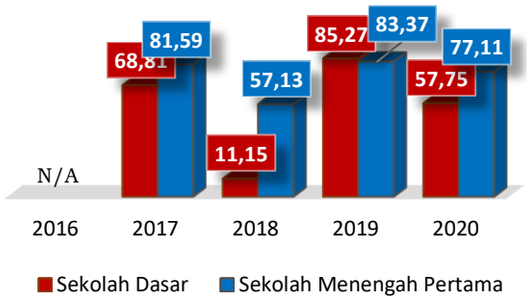

Terkait dengan rasio daya tampung sekolah, khususnya pada sekolah negeri baik pada jenjang SD dan SMP setiap tahunnya terus mengalami permasalah tentang kemampuan untuk menampung semua penduduk usia SD dan SMP, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah kota setiap tahun baik melalui penambahan ruang kegiatan belajar dan rencana pembangunan sekolah baru, akan tetapi laju urbanisasi penduduk ke Kota Balikpapan yang setiap tahun mencapai ± 4% menjadi tantangan tersediri bagi Pemerintah Kota dalam menyediakan sarana pendidikan bagi masyarakat kota balikpapan.

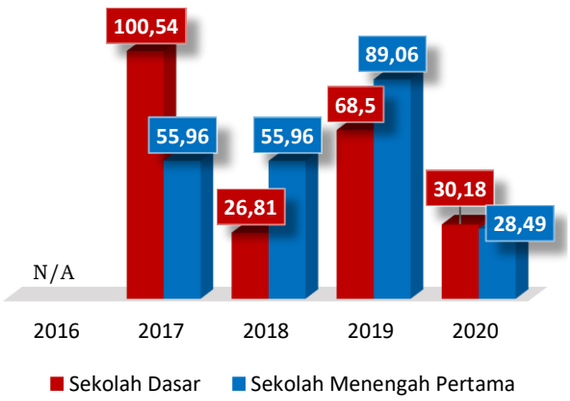

Gambar 2.58 Rasio Ketersediaan Sekolah Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2020
Sumber: Disdikbud Kota Balikpapan, 2021

2.3.1.2. Kesehatan

a. Sarana pelayanan kesehatan

Dalam pembangunan bidang kesehatan di Kota Balikpapan telah tersedia layanan kesehatan mulai tingkat dasar dilaksanakan oleh Puskesmas sampai dengan Rumah Sakit. Namun demikian, kendala infrastruktur dan sarana prasarana penunjang pembangunan kesehatan tersebut masih belum maksimal sehingga terjadi disparitas derajat kesehatan antar wilayah di Kota Balikpapan. Keberadaan rumah sakit di Kota Balikpapan terus ditopang dengan sarana kesehatan yang sudah lazim dikenal masyarakat, yaitu puskesmas dan puskesmas pembantu. Tercatat pada tahun 2020, di Kota Balikpapan terdapat 13 rumah sakit umum, 2 rumah sakit bersalin, dan 45 poliklinik yang ditunjang dengan 27 puskesmas yang tersebar di tiap kecamatan. Selain itu masih terdapat beberapa kecamatan yang masih di luar cakupan layanan khususnya pelayanan Kesehatan rujukan.

Selain dilihat dari kuantitasnya, penting juga untuk melihat kualitas sarana kesehatan. Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kualitas sarana kesehatan adalah persentase puskesmas dan rumah sakit yang terakreditasi sesuai standarisasi yang ditetapkan secara nasional. Dilihat berdasarkan persentasenya, jumlah rumah sakit dan puskesmas yang telah

terakreditasi terus mengalami grafik peningkatan setiap tahunnya, bahkan peningkatan persentasenya cukup signifikan.

Tabel 2.17Jumlah Sarana Kesehatan Menurut KecamatanTahun 2020

Fasilitas Kesehatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Kecamatan Balikpapan Kota	Kecamatan Balikpapan Timur	Kecamatan Balikpapan Utara	Kecamatan Balikpapan Tengah	Kecamatan Balikpapan Barat	Total
Rumah Sakit	6	4	0	1	2	0	13
Rumah Sakit Bersalin	0	0	0	0	1	1	2
Poliklinik	16	12	1	9	5	2	45
Puskesmas	2	4	4	5	6	6	27
Puskesmas Pembantu	2	0	3	6	0	2	13
Apotek	41	15	14	28	22	8	128

Sumber: BPS, Kota Balikpapan Dalam Angka, 2021

Pada tahun 2017 persentase puskesmas yang terakreditasi sebesar 81,81% dan rumah sakit dengan persentase sebesar 53,33%. Angka ini mengalami peningkatan untuk puskesmas menjadi sebesar 96,30% sedangkan untuk rumah sakit mengalami penurunan menjadi sebesar 36,37%. Pada tahun 2019, persentase puskesmas dan rumah sakit yang terakreditasi mengalami peningkatan masing-masing menjadi sebesar 96,30% dan 86,67%. Hingga tahun 2020, angka ini masih sama dengan tahun 2020

Secara keseluruhan, grafik peningkatan ini menunjukkan bahwa ada upaya perbaikan kualitas sarana layanan kesehatan yang berkorelasi baik dengan hasil penilaian akreditasi. Akan tetapi memang masih perlu diupayakan setiap sarana layanan kesehatan tersebut memiliki nilai akreditasi yang juga meningkat setiap tahunnya.

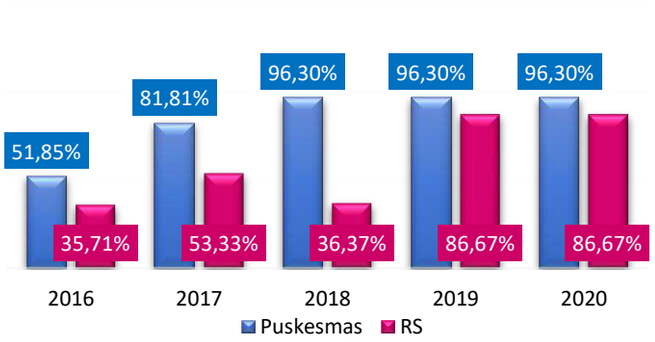

Gambar 2.59 Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit yang Terakreditasi NasionalDi Kota Balikpapan tahun 2016-2020
Sumber: Dinkes Kota Balikpapan, 2021

Adapun tingkatan akreditasi di Kota Balikpapan didominasi oleh puskesmas dengan tingkat akreditasi madya yaitu sebanyak 9 puskesmas atau sekitar 33%. Lalu diikuti oleh tingkat akreditasi dasar yaitu sebanyak 30%. Sedangkan puskesmas dengan akreditasi tertinggi yaitu paripurna hanya berjumlah dua puskesmas atau sekitar 7%. Untuk tingkat utama sebanyak 7 puskesmas atau sekitar 26%.

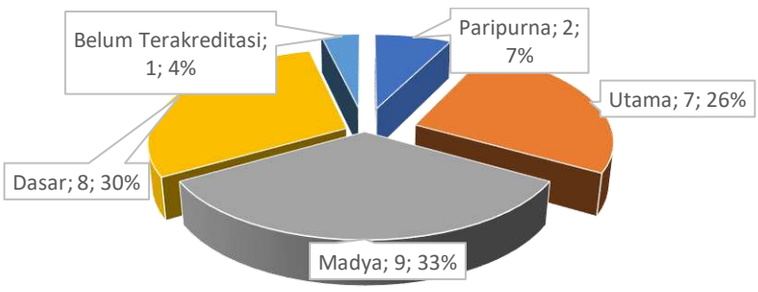

Gambar 2.60 Persentase Akreditasi Puskesmas Kota Balikpapan
Sumber: Dinkes Kota Balikpapan, 2021

Berdasarkan sarana dan prasarananya, indikator yang digunakan adalah persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang sudah mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2020 untuk puskesmas dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 tahun 2014 untuk rumah sakit. Akan tetapi seiring dengan perkembangan dan peningkatan pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2021 yang mengatur standar rumah sakit mulai dari pengelompokan kelas Rumah Sakit berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, sarana penunjang, dan sumber daya manusia. Sehingga pada tahun 2023 seluruh rumah sakit diminta melakukan redesign terkait dengan kondisi sarana dan prasarananya

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan rumah sakit di Kota Balikpapan mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Pada tahun 2017, baik rumah sakit maupun puskesmas memiliki persentase ketersediaan sarana dan prasarana sebesar 65%. Angka ini meningkat pada tahun 2018 menjadi 70% baik untuk rumah sakit maupun puskesmas. Hingga tahun 2020, persentase untuk rumah sakit lebih tinggi dibandingkan dengan persentase dari puskesmas. Untuk rumah sakit persentase ketersediaannya mencapai 98,15% sedangkan untuk puskesmas masih di angka 72,24%.

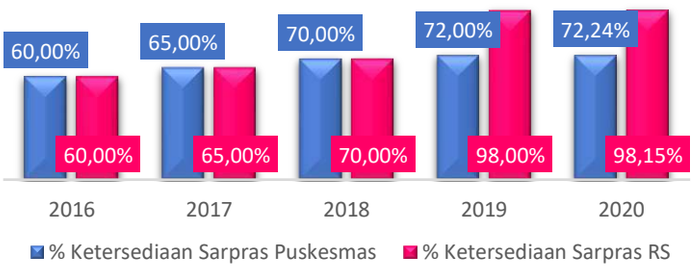

Gambar 2.61 Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Rumah SakitDi Kota Balikpapan tahun 2016-2020
Sumber: Dinkes Kota Balikpapan, 2021

Walaupun secara grafik kualitas dan kuantitas sarana layanan kesehatan Kota Balikpapan mengalami peningkatan yang cukup baik akan tetapi masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan. Salah satunya kendalanya adalah masih kurangnya upaya untuk menyesuaikan standar dan kebutuhan fasilitas kesehatan sesuai dengan regulasi terbaru. Beberapa Sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan belum sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan. Biasanya yang terjadi di Puskesmas adalah masih bergabung ruang perawatan dengan ruang administrasi, sehingga belum memenuhi standar akreditasi. Permasalahan lainnya adalah alat kesehatan di fasilitas kesehatan masih belum memadai, Persentase ASPAK (Aplikasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan) masih dibawah 60% di setiap puskesmas. Terkait dengan jangkauan operasional juga masih belum memadai untuk melayani seluruh wilayah di Kota Balikpapan. Kendaraan operasional untuk petugas di fasilitas kesehatan belum terpenuhi secara maksimal, misalnya kendaraan dinas operasional petugas. Hal ini menyulitkan ketika memberikan pelayanan kesehatan di lapangan.

Selain itu, masih belum optimalnya kualitas sarana layanan kesehatan juga terlihat dari masih rendahnya penerapan teknologi untuk memudahkan pelayanan dan pengelolaan urusan kesehatan. Salah satu penghambatnya adalah keterbatasan pemenuhan fasilitas pendukung fasilitas kesehatan seperti kapasitas listrik dan jaringan internet menyulitkan beberapa fasilitas kesehatan ketika menggunakan beberapa aplikasi seperti pengisian di aplikasi Rainboot 4.0 untuk penyusunan perencanaan kebutuhan kesehatan.

Disamping keterbatasan fasilitas dasar yang disebutkan diatas, kendala lainnya adalah masih kurangnya fasilitas infrastruktur jaringan untuk penerapan teknologi seperti ketersediaan database kesehatan, server, dan lain-lain. Terkait SDM juga menjadi salah satu yang menjadi hambatan. Keterbatasan pengetahuan petugas dalam penggunaan aplikasi teknologi yang menyebabkan pemanfaatan IT menjadi tidak merata di beberapa fasilitas kesehatan yang ada. Ketiga hal ini menjadi kendala terbesar bagi Dinas Kesehatan untuk menerapkan sistem kesehatan yang berbasis teknologi.

b. Tenaga Kesehatan

Peningkatan kualitas kesehatan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan SDM kesehatan. Untuk melihat tingkat ketersediaan SDM tenaga kesehatan di puskesmas mengacu pada regulasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014. Sumber Daya Manusia Puskesmas terdiri atas tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang dihitung berdasarkan analisis beban kerja, dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk dan persebarannya, karakteristik wilayah kerja, luas wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat I lainnya di wilayah kerja, dan pembagian waktu kerja. Pada tahun 2017, realisasi ketersediaan tenaga kesehatan di puskesmas dan rumah sakit sebesar 70%. Realisasi tenaga kesehatan di rumah sakit mengalami stagnansi pada tahun 2018, namun pada puskesmas mengalami peningkatan menjadi 75%. Pada tahun 2019, realisasi tenaga kesehatan pada puskesmas terus mengalami peningkatan menjadi 83%, namun mengalami penurunan menjadi 82,72% pada tahun 2020. Sedangkan untuk ketersediaan tenaga kesehatan di rumah sakit mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 52% dan mengalami peningkatan menjadi 97,32% pada tahun 2020.Secara keseluruhan dilihat berdasarkan tenaga kesehatannya, Kota Balikpapan memiliki jumlah yang sudah cukup baik akan tetapi memang perlu untuk ditingkatkan khususnya untuk SDM kesehatan di rumah sakit.

Selain itu masalah lain yang dihadapi adalah jumlah SDM untuk puskesmas masih belum ideal karena terbitnya regulasi baru yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019.

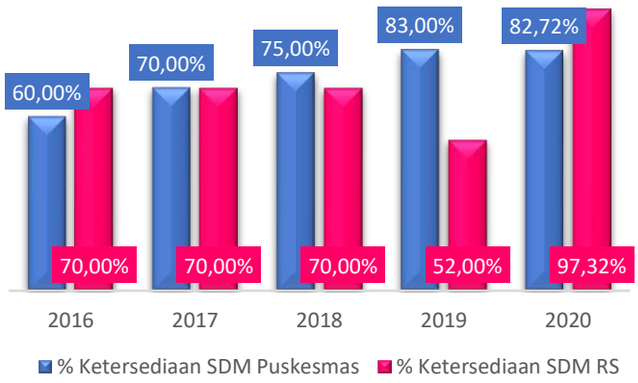

Gambar 2.62 Persentase Ketersediaan SDM Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Kota Balikpapan tahun 2016-2020
Sumber: Dinkes Kota Balikpapan, 2021

Pada regulasi tersebut dijelaskan bahwa standar SDM untuk Puskesmas kawasan perkotaan non rawat inap persyaratan SDMnya bahwa jumlah minimal perawat 5 orang dan bidan 4 orang. Masih terdapat beberapa puskesmas hanya memiliki 2 bidan. Selain itu belum semua puskesmas memiliki apoteker. Tercatat baru 15 puskesmas yang memiliki apoteker. Persyaratan lainnya dari kementerian kesehatan adalah harus ada 2 tenaga Promosi Kesehatan (Promkes) setiap puskesmas. Kondisi saat ini hampir puskesmas belum memiliki promkes. Puskesmas di Balikpapan juga belum ada yang memiliki tenaga kesehatan lingkungan.

Keterbatasan jumlah tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan primer ini mengakibatkan petugas melakukan rangkap jabatan yang berdampak pada kurang optimalnya kinerja Dinas Kesehatan. Selain itu, adanya rencana pembangunan Rumah Sakit di wilayah timur Kota Balikpapan masih perlu dikaji lagi terkait dengan kebutuhan SDM nya. Hal ini mengingat kondisi saat ini Kota Balikpapan masih kekurangan SDM khususnya di bidang kesehatan.

c. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Keberhasilan pelayanan kesehatan ibu ditunjukkan melalui indikator kunjungan pelayanan antenatal ibu hamil. Upaya kesehatan juga menyasar pada pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak dapat terlihat dari proporsi persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan serta pemeriksaan pada saat hamil. Pemeriksaan ibu hamil bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu melalui deteksi dini permasalahan kehamilan untuk mencegah komplikasi kehamilan dan kelahiran.Angka Kematian Ibu tahun 2020 sebesar 73 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH). Angka ini mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 64 per 100.000 KH. Capaian pada tahun 2020 juga menunjukkan bahwa pemerintah Kota Balikpapan belum berhasil menekan angka kematian ibu hamil setiap tahunnya. Hal tersebut disebabkan karena kesadaran ibu dalam pemeriksaan kehamilan pada fasilitas kesehatan mengalami penurunan akibat terjadinya pandemi covid-19.

Tabel 2.18 Angka Kematian Ibu Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Sasaran Ibu Hamil	Jumlah Kematian	
		Kematian	Per 100.000 KH
2016	13.721	10	76/100.000 KH
2017	13.812	10	78/100.000 KH

Tahun	Jumlah Sasaran Ibu Hamil	Jumlah Kematian	
		Kematian	Per 100.000 KH
2018	13.675	9	72/100.000 KH
2019	13.575	8	64/100.000 KH
2020	13.461	9	73/100.000 KH

Sumber: Dinkes Kota Balikpapan, 2021

Angka kematian ibu mengalami kenaikan, akan tetapi upaya penanganan terkait kesehatan ibu hamil Salah satu penyebabnya adalah pengetahuan dan informasi terkait penanganan kondisi darurat terhadap ibu hamil yang masih rendah. Salah satu penyebabnya adalah Ibu hamil belum semua mendapatkan ANC (*Antenatal Care*) terpadu. Kualitas dari ANC juga belum sesuai dengan standar sehingga informasi dan pengetahuan di dalamnya masih perlu ditingkatkan. Terkadang ibu hamil baru datang saat usia kandungan 6 bulan ke fasilitas Kesehatan dan terjadinya pandemic covid-19 menjadi salah satu penghambat bagi ibu hamil untuk dating ke fasilitas kesehatan.

Selain kesehatan ibu, aspek lainnya yang diperhitungkan derajat kesehatan anak yang diukur melalui indikator Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBA). Realisasi capaian AKB di Kota Balikpapan mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 7/1.000 KH. Sedangkan untuk AKBA masih mengalami fluktuasi angka. Pada tahun 2018, angka ini mengalami peningkatan menjadi 8/1.000 KH. Lalu pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 7/1.000 KH, hingga tahun 2020 masih berada pada angka yang sama.

Indikator ini berkaitan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tujuan 3 sasaran 2 terkait dengan upaya menurunkan angka kematian neonatal setidaknya 12/1.000 KH. Realisasi AKB Kota Balikpapan jika dikaitkan dengan SDGs sudah menunjukkan hasil yang baik. Akan tetapi untuk mengoptimalkan penurunan AKB, perlu untuk memperhatikan sasaran lainnya yaitu pemenuhan persentase imunisasi dasar lengkap sebanyak 80%.

Tabel 2.19 Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBA) di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kematian Bayi (AKB)	6/1.000 KH	6/1.000 KH	7/1.000 KH	7/1.000 KH	7/1.000 KH
Angka Kematian Balita (AKBA)	7/1.000 KH	6/1.000 KH	8/1.000 KH	7/1.000 KH	7/1.000 KH

Sumber: Dinkes Kota Balikpapan, 2021

Fluktuatifnya kondisi kedua indikator diatas, diakibatkan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi, salah satunya terkait kelengkapan peralatan medis yang terbatas sehingga menyulitkan tenaga kesehatan ketika akan melakukan pertolongan medis terhadap bayi yang mengalami gangguan kesehatan. Masih minimnya kelengkapan tersebut ditambah dengan kapasitas SDM tenaga kesehatan yang belum sepenuhnya baik dalam hal penanganan persalinan. Permasalahan lainnya adalah masih kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga terkait penanganan kondisi darurat, salah satu penyebabnya adalah penyusunan buku kesehatan ibu dan anak tidak

terisi dengan lengkap. Pemberian edukasi secara rutin juga belum dilaksanakan dengan baik

Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan, Buku KIA wajib memuat pencatatan kesehatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun. Selain itu setiap bayi (usia maksimal 28 hari) wajib mendapatkan vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1, Imunisasi hepatitis B, serta penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.

d. Derajat Kesehatan Masyarakat

Pada aspek ini, penilaian terhadap kesehatan masyarakat dinilai dari tingkat penanganan terhadap penyakit baik yang menular maupun tidak menular. Beberapa jenis penyakit yang rawan terjadi pada masyarakat seperti *tuberculossis*, demam berdarah (DBD), HIV dan AIDS, serta angka gizi buruk.

Angka prevalensi HIV dan AIDS di Kota Balikpapan cenderung mengalami kenaikan. Dari tahun 2018 ke tahun 2019 angka prevalensinya mengalami peningkatan menjadi 2,26. Namun, pada tahun 2020, angka ini mengalami penurunan menjadi 0,43. Tingginya angka peningkatan pada tahun 2019 disebabkan oleh rendahnya deteksi kasus penemuan pada HIV. Hal ini diperburuk dengan kurangnya pemantauan terhadap pasien-pasien HIV. Jika mengacu pada SPM bidang kesehatan terkait pelayanan kesehatan bagi orang berisiko HIV, pelayanan kesehatan berupa deteksi HIV diberikan kepada kelompok yang rentan seperti ibu hamil, pasien TBC, pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), pengguna NAPZA suntik, warga binaan pemasyarakatan, dan penjaja seks. Adapun skrining dilakukan minimal 1 kali dalam setahun.

Sedangkan untuk demam berdarah dengue (DBD) kondisinya cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 dan 2018menyentuh angka 78,3/100.000. Pada tahun 2019 angka ini kembali mengalami kenaikan menjadi 240,65/100.000, hingga pada tahun 2020 angka ini mengalami penurunan menjadi 112,46/100.000.

Hal yang sama juga terjadi pada penanganan penyakit *tuberculosis* (TBC) yang mengalami fluktuasi angka. Pada tahun 2017 dan 2018, prevalensi TBC adalah 199,5/100.000. angka ini mengalami lonjakan yang signifikan menjadi 272,29/100.000 penduduk pada tahun 2019. Hingga terjadi penurunan angka pada tahun 2020 menjadi 123,90/100.000 penduduk, disebabkan karena tingginya *undetective case* di kelompok berisiko, ketidakpatuhan berobat, *missing case* di Rumah Sakit dan Klinik, serta *nett* nya *Multi Drug Resistant Tuberculosis* (MDR-TB).

Sedangkan untuk prevalensi gizi buruk dan gizi kurang menunjukkan grafik yang cukup optimal pada tahun 2017 indikator masih di angka 2,53%. Sempat terjadi penurunan menjadi 2,22% di tahun 2018, angka ini kembali

mengalami peningkatan menjadi 2,7% pada tahun 2019. Hingga akhirnya angka ini kembali mengalami penurunan menjadi 2,20% pada tahun 2020.

Tabel 2.20 Angka Penderita Penyakit HIV dan AIDS, Demam Berdarah, dan TBC Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Prevalensi HIV dan AIDS	0,03	0,05	0,05	2,26	0,43
Angka Kejadian DBD per 100.000 penduduk	657,06/100.000 penduduk	78,3 / 100.000 penduduk	78,3 / 100.000 penduduk	240,65/100.000 penduduk	112,46/100.000 penduduk
Prevalensi TBC	300,00/100.000 penduduk	199,5/100.000 penduduk	199,50/100.000 penduduk	272,29/100.000 penduduk	123,90/100.000 penduduk
Prevalensi Gizi Buruk & Gizi Kurang	0,46%	2,53%	2,22 %	2,7%	2,20%

Sumber: Dinkes Kota Balikpapan, 2021

Upaya penanganan kesehatan masyarakat ini sudah diupayakan penanganannya dengan meningkatkan program kelurahan siaga aktif dan Unit Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM). Cakupan kelurahan siaga aktif adalah cakupan kelurahan siaga aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveilance berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang dibentuk. Capaian indikator ini tiap tahunnya konsisten berada diangka 100%.

Adapun cakupan UKBM aktif adalah Jumlah seluruh posyandu, polindes dan desa siaga aktif yang digunakan oleh masyarakat. Capaian indikator ini mengalami peningkatan walaupun peningkatannya baru terjadi di tahun 2017 yaitu dari 50% menjadi 50,74%. Hingga tahun 2020, capaian indikator ini adalah 80%. Belum Optimalnya realisasi keaktifan UKBM ini dapat menjadi salah satu penyebab terkait masih rendahnya pemantauan kualitas kesehatan masyarakat. Peningkatan kesehatan masyarakat juga dapat dilakukan dengan mengoptimalkan UKBM (Unit Kesehatan Berbasis Masyarakat seperti posyandu, polindes, dan desa siaga). Persentase Cakupan UKBM yang aktif pada tahun 2019 masih di angka 75%. Berdasarkan data saat ini, jumlah posyandu yang aktif sebanyak 711 posyandu dan 119 Posbindu PTM (Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular).

Tabel 2.21 Cakupan Kelurahan Siaga dan UKBM Aktif Di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Kelurahan Siaga Aktif	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan UKBM Aktif	50%	50,74%	60%	75%	80%

Sumber: Dinkes Kota Balikpapan, 2021

Penyebab lainnya yang juga kerap dihadapi adalah perilaku hidup masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung untuk mencegah penyakit. Perilaku masyarakat dalam menjalankan pola hidup sehat masih kurang. Untuk kasus PTM, permasalahannya adalah faktor perilaku dari masyarakat yang belum sepenuhnya berperilaku hidup sehat seperti dari diet tidak sehat, merokok, kurang aktivitas. Selain itu terkait sanitasi juga masih banyak masyarakat yang

BAB sembarangan yang menyebabkan kualitas lingkungan menjadi menurun. Upaya penanganan penyakit ini juga kerap kali dihadapkan oleh rendahnya kesadaran terhadap konsumsi obat. Penggunaan obat secara rasional masih rendah yang disebabkan karena kepercayaan tenaga kesehatan dan masyarakat terhadap produk dalam negeri masih kurang. Khususnya terhadap obat generik yang dianggap kurang bagus. Selain sosialisasi yang belum optimal terkait dengan produk obat produk dalam negeri juga menjadi penyebab lainnya. Proses perencanaan obat juga masih mengalami beberapa kendala seperti Sistem Rencana Kebutuhan Obat (RKO) masih belum mewakili kebutuhan obat di fasilitas kesehatan karena belum semua fasilitas kesehatan dan stakeholder terkait mengisi daftar kebutuhan obat, pedoman perencanaan obat belum mengakomodir kesesuaian kebutuhan obat, kurang sinkronnya antara kebutuhan dan perencanaan obat berdampak ketidaksesuaian harga obat yang beredar di masyarakat, dan penyediaan obat secara mandiri oleh bidang kesehatan terhambat oleh ketersediaan bahan baku masih banyak kendala. Upaya pemenuhan obat ini juga terkendala oleh adanya regulasi impor bahan baku obat yang menyulitkan.

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pengukuran tingkat pengelolaan infrastruktur menggunakan indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar. Berdasarkan hasil survei Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (IKLI) kota Balikpapan dari tahun 2017 sampai dengan 2020 yang diukur dari pendapat warga Kota Balikpapan tentang kepuasan layanan infrastruktur dari berbagai aspek seperti infrastruktur jalan, jembatan, moda transportasi, jaringan air bersih, irigasi dan perumahan. Pada tahun 2015, realisasi indikator ini sebesar 73,4 lalu meningkat signifikan menjadi 80,40 pada tahun 2017 dan terakhir menjadi 82,03 pada tahun 2020. Hal yang perlu dicermati mengingat indeks ini dihitung berdasarkan persepsi kepuasan masyarakat, maka capainnya dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi.

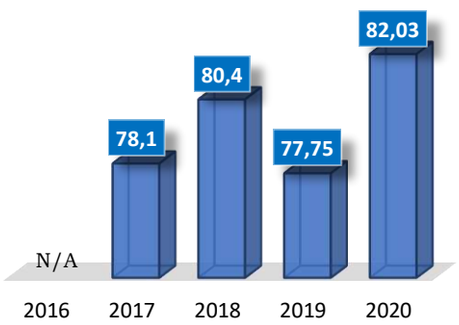

Gambar 2.63 Indeks Kepuasan Infrastruktur Dasar (IKLI) tahun 2016 - 2020
Sumber: Bappeda Litbang, 2021

Berdasarkan kinerja penyelenggaraan jalan, sesuai Keputusan Walikota Balikpapan Nomor: 188.45-415/2016 tentang Penetapan Ruas Jalan Sebagai Jalan Kota Balikpapan maka total panjang jalan kota adalah sepanjang 501,18 km, dimana kondisi jalan dan jembatan Kota Balikpapan yang dilakukan berdasarkan survey oleh DPU Kota Balikpapan dari tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.22 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalandi Kota Balikpapan (km)Tahun 2016-2020

Kualitas	2016		2017		2018		2019		2020	
	km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Baik	396,58	79,13	95,39	19,04	288,95	57,65	268,99	53,67	365,31	72,89

Kualitas	2016		2017		2018		2019		2020	
	km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Sedang	85,93	17,15	295,56	58,97	133,24	26,58	150,13	29,96	96,59	19,27
Rusak	18,66	3,72	58,60	11,69	30,55	6,10	54,44	10,86	38,91	7,76
Rusak Berat	-	0,00	51,63	10,30	48,44	9,66	27.61	5,51	0,38	0,08
Jumlah	501,18	100,00	501,18	100,00	501,18	100,00	501,18	100,00	501,18	100,00

Sumber: DPU, 2021

Berdasarkan data tersebut di atas maka persentase kemantapan jalan yang dihitung dari jalan baik dan sedang dibandingkan total panjang jalan, pada tahun tahun 2020 adalah sebesar 92,16% atau turun jika dibandingkan capaian pada tahun 2016 sebesar 96,28%. Hal ini seiiring dengan perbaikan data dan perencanaan kondisi jalan melalui pemanfaatan sistem sistem informasi jalan dan jembatan.

Tabel 2.23 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kota Balikpapan (km)Tahun 2016-2020

Jenis Permukaan	2016		2017		2018		2019		2020	
	km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Aspal	454,18	90	454,18	90	374,141	75	374,141	75	412,474	82
Kerikil	10,85	2	10,85	2	16,305	3	16,305	3	9,970	2
Tanah	24,45	5	24,45	5	43,398	9	43,398	9	23,693	5
Tidak Dirinci	15,85	3	15,85	3	67,335	13	67,336	13	55,043	11
Jumlah	505,33	100	505,33	100	501,180	100	501,180	100	501,180	100

Sumber: DPU, 2021 & BPS Kota Balikpapan

Berdasarkan tabel tersebut di atas kondisi jalan yang telah beraspal pada tahun 2020 sebanyak 82%, mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2016 yang mencapai 90%.

Indikator lainnya yang digunakan adalah persentase panjang trotoar yang telah memenuhi standar dimana menunjukkan grafik peningkatan yang cukup baik. Pada tahun 2016, indikator ini berada diangka 7,29%. Mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2017 menjadi 10,58%. Hingga tahun 2020, persentase panjang trotoar yang telah memenuhi standar mencapai 14,98%.

Tabel 2.24 Tingkat Kualitas Trotoar dan Jalan di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase panjang trotoar yang telah memenuhi standar	7,29	10,58	12,73	14,98	14,98
Persentase kemantapan jalan	96,28	96,86	83,76	84,06	86,79

Sumber: DPU Kota Balikpapan, 2021

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa perhitungan kondisi jalan di Kota Balikpapan didasarkan pada baseline ruas jalan sesuai dengan SK Wali Kota Balikpapan tentang Penetapan Status Jalan Kota. Adapun kinerja untuk penambahan ruas jalan baru diluar Jalan Kota, diukur dengan indeks aksesibilitas kawasan perkotaan yang dihitung berdasarkan panjang jalan terhadap luas kawasan perkotaan. Indeks aksesibilitas Kota Balikpapan pada tahun 2017 adalah sebesar 1,415 dan mengalami peningkatan hingga akhir 2020 yaitu sebesar 1,475.

Tabel 2.25 Indeks Aksesibilitas Kawasan Perkotaan di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

Tahun	Indeks Aksesibilitas Kawasan Perkotaan
2016	-
2017	1,415
2018	1,427
2019	1,430
2020	1,475

Sumber: Dinas PU, 2021

Berdasarkan kinerja pengelolaan sumber daya air, terdapat beberapa indikator sehubungan dengan fokus penyelenggaran urusan pemerintahan di Kota Balikpapan yaitu pengendalian banjir, pegelolana saluran irigasi dan penyediaan sumber air baku. Sehubungan dengan pengendalian banjir, penyelenggaran drainase di Kota Balikpapa selama ini mengacu pada Masterplan Drainase yang telah disusun dengan pengaturan rencana dimensi drainase dan rencana pembangunan bendungan pengendali (bendali) banjir di beberapa titik. Jika dilihat berdasarkan kondisi drainase, menunjukkan adanya peningkatan pemeliharaan yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya persentase drainase yang berfungsi baik. Pada tahun 2017, persentase indikator ini masih diangka 44,97% dan meningkat hingga 50,09% pada tahun 2020.

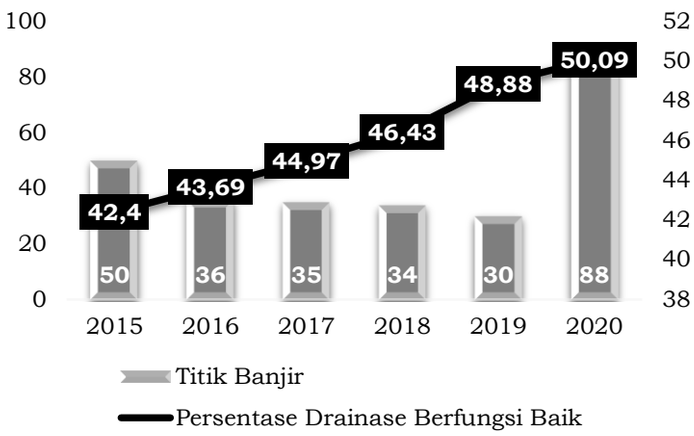

Gambar 2.64 Persentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik dan Titik Banjir di Kota Balikpapan tahun 2016-2020
Sumber: DPU Kota Balikpapan, 2021

Adapun titik banjir sesuai dengan baseline pada tahun 2015 yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, titik banjir pada tahun 2015 adalah sebanyak 50 titik dan menurun menjadi 30 titik pada tahun 2019. Sedangkan berdasarkan baseline titik banjir yang disusun pada tahun 2020, titik banjir mengalami peningkatan menjadi 88 titik yang tersebar pada DAS Somber sebanyak 12 Titik, DAS Wain 1 Titik, DAS Pandansari 4 Titik, DAS Klandasan Kecil 9 Titik, DAS Ampal 32 Titik, DAS Lamaru – Solok Api 3 Titik, DAS Batakan – Manggar 14 Titik dan DAS Sepinggan 12 Titik.

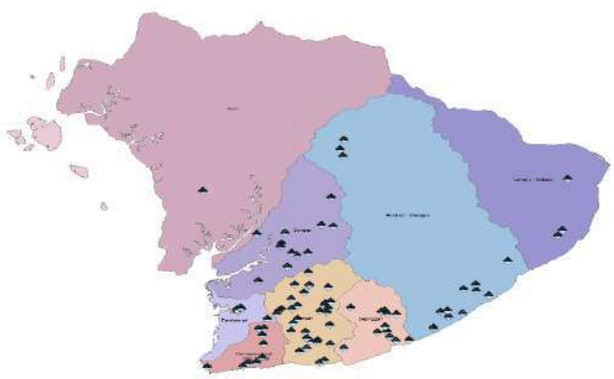

Gambar 2.65 Peta Sebaran Titik Banjir Kota Balikpapan Tahun 2020
Sumber: DPU Kota balikpapan, 2021

Berdasarkan luas genangan banjir yang terjadi di Kota Balikpapan dari tahun 2018 hingga tahun 2020, terjadi trend penurunan luasan genangan terutama pada DAS Ampal. Sementara untuk DAS Klandasan dan DAS Sepinggan tidak mengalami perubahan luasan genangan.

Tabel 2.26 Luas Genangan Banjir di Kota Balikpapan Tahun 2018-2020

No.	Kabupaten/Kota	DAS	Luas Genangan Banjir (Ha)

			2018	2019	2020
1	Kota Balikpapan	Sungai Ampal	130	110	82
		Klandasan	50	50	50
		Sepinggan	50	50	50
TOTAL			230	210	182

Sumber: DPU Kota Balikpapan, 2021

Untuk penyelenggaraan irigasi di Kota Balikpapan saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, dimana Daerah Irigasi Yang Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten/Kota di Kota Balikpapan terdapat 2 (dua) daerah irigasi yaitu daerah irigasi Balikpapan Utara seluas 25 Ha dan daerah irigasi Gunung Binjai seluas 325 Ha. Khusus daerah irigasi Gunung Binjai memiliki luas area tanam seluas 150 Ha dengan indeks pertanaman 100% serta produksi 3,5 ton/Ha/panen.

Selanjutnya mengenai penyediaan air baku yang saat ini menjadi salah satu permasalahan utama di Kota Balikpapan, berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan air minum pada dokumen Rencana Induk Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kota Balikpapan, total penyediaan air baku Kota Balikpapan pada tahun 2020 adalah sebesar 1.570 liter/detik dari total kebutuhan sebesar 2.248 liter/detik sehingga masih terdapat kekurangan air baku sebesar 678 liter/detik dengan rincian sumber air baku sebagai berikut:

Tabel 2.27 Sumber Air Baku Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

No	Sumber Air Baku	2016 (Lt/dtk)	2017 (Lt/dtk)	2018 (Lt/dtk)	2019 (Lt/dtk)	2020 (Lt/dtk)
1	Waduk Manggar	1100	1100	1100	1100	1100
2	Sungai Selok Api	20	20	-	-	-
3	Sungai Jembatan Besi	20	20	-	-	-
4	Sumur Dalam	250	250	250	250	250
5	Waduk Teritip	-	-	220	220	220
	Jumlah	1390	1390	1570	1570	1570

Sumber: PDAM Kota Balikpapan,2021

Untuk penyediaan air minum terbagi menjadi jaringan perpipaan dan jaringan bukan perpipaan. Untuk jaringan perpipaan terbagi menjadi dua yaitu PDAM dan Non PDAM. Pengelolaan air minum di Kota Balikpapan yang saat ini sebagian besar dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Balikpapan, dimana hingga akhir tahun 2020 cakupan pelayanan PDAM Kota Balikpapan telah mencapai 81,37%. Adapun perkembangan pelayanan air bersih jaringan perpipaan Kota Balikpapan sebagai berikut:

Tabel 2.28 Perkembangan Pelayanan Air Minum Perpipaan PDAMTahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk (Jiwa)	762.492	769.919	644.315	667.188	697.079
2	Jumlah pelanggan (SR)	95.781	98.111	100.199	103.144	108.161
3	Cakupan pelayanan (%)	76,50	76,56	79,05	79,6	81,37
4	Kapasitas produksi (l/det)	1.147	1.215	1.276	1.305	1.408
5	Panjang perpipaan (m)	1.308.767	1.335.998	1.359.110	1.375.944	1.375.944
6	Persentase Kehilangan Air (%)	30,46	34,36	33,23	31,55	30,40

Sumber: PDAM Kota Balikpapan Tahun 2020

Sementara untuk jaringan air minum non perpipaan di Kota Balikpapan, terdapat 2,83% penduduk yang terlayani air minum non perpipaan yang dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.29 Layanan Jaringan Air Minum Perpipaan di Kota Balikpapan

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Jiwa Terlayani Jaringan Perpipaan PDAM (JP PDAM)	Jumlah Jiwa Terlayani Jaringan Perpipaan Non PDAM (JP Non PDAM)	Jumlah Jiwa Terlayani Jaringan Perpipaan (BJP)	Total Jumlah Jiwa Terlayani Air Minum (JP dan BJP)	% Akses Air Minum Layak	% Akses Air Minum Perpipaan	% Akses Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan
		(g) = (c) x (f)	(h) = (d) x (f)	(i) = (e) x 100SR x (f)	(e)	(f)	(g)	(h)
1	Balikpapan	540.805	113.995	19.000	673.800	100,49%	97,66%	2,83%

Sumber : PDAM Kota Balikpapan, 2021

Capaian akses aman dan akses layak air minum Kota Balikpapan telah dilakukan perhitungan sejak tahun 2020 dan mengalami peningkatan pada tahun berikutnya seperti tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.30 Capaian Akses Aman dan Akses Layak Air Minum Tahun 2020-2021

Uraian	2020	2021
Akses Aman	81,59%	81,76%
Akses Layak	97,98%	98,21%

Sumber : DPU Kota Balikpapan, 2021

Selanjutnya untuk pengelolaan air limbah, sarana dan prasarana air limbah di Kota Balikpapan terbagi menjadi beberapa sistem yaitu sistem terpusat dan sistem setempat. Fasilitas pengelolaan air limbah terpusat yang ada di Kota Balikpapan adalah IPAL skala kawasan di Kelurahan Margasari yang melayani 2.076 Sambungan Rumah (SR). Hal ini mengalami peningkatan dari 1.308 Sambungan Rumah setelah dilaksanakan pengembangan jaringan yang bersumber dari pendanaan Hibah Air Limbah SAIIG pada tahun 2016-2018.

Selain IPAL Kawasan, pengelolaan limbah terpusat juga dilakukan melalui sistem IPAL Komunal dengan jumlah yang telah terbangun sejak tahun 2006 sampai dengan 2020 sebanyak 53 unit atau 2.603 Sambungan Rumah (SR) dan sumber pendanaan berasal dari Program Sanimas, SLBM maupun DAK Sanitasi yang dilakukan pengelolaan secara swadaya oleh masyarakat. Sedangkan untuk sistem setempat, Pemerintah Kota Balikpapan telah membangun tangki septik individu sebanyak 450 unit pada tahun 2018 dengan sumber pendanaan berasal dari Hibah Air Limbah Setempat (Sanitasi) APBN TA 2018 dan DAK serta 42 unit pada tahun 2020 melalui APBD Kota Balikpapan.

Tabel 2.31 Sarana Prasarana Pengelolaan Air Limbah Di Kota BalikpapanTahun 2016-2020

No	Tahun		Sarana Prasarana Pengelolaan Air Limbah		
		Sambungan Rumah (SR) IPAL Terpusat	IPAL Komunal (Unit)	Sambungan Rumah (SR) IPAL Komunal (SR)	Tangki Septik yang sesuai dengan SNI
1	2016	500	2	100	-
2	2017	-	5	250	-
3	2018	-	10	500	450
4	2019	-	7	350	-
5	2020	-	-	-	42
Jumlah		2.076	53	1.200	492

Sumber: Disperkim dan PDAM Kota Balikpapan Tahun 2021

Keterangan : (-) Tidak dilakukan pemasangan

Terkait dengan sarana dan prasarana persampahan yang berkaitan dengan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, hingga tahun 2020 jumlah dan kondisi sarana dan prasarana persampahan di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.32 Sarana dan Prasarana Persampahan Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

No	Infrastruktur	2016		2017		2018		2019		2020	
		Baik	Rusak	Baik	Rusak	Baik	Rusak	Baik	Rusak	Baik	Rusak
1	Truk	48	5	54	5	54	5	54	6	71	8
2	TPS	566		410		410		410		73	291
3	TPS 3R	3		6		3	3	3	3	4	3
4	Bank Sampah	105		125		69	56	69	56	69	56
5	MRF	1		1		1		1		1	
Jumlah		723	5	596	5	537	64	537	65	218	358

Sumber: DLH Kota Balikpapan 2021

Berdasarkan tabel tersebut di atas, hingga tahun 2020 jumlah sarana dan prasarana persampahan sebanyak 576 dengan rincian 218 dalam kondisi baik dan 358 dalam kondisi rusak. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) menjadi sarana dan prasarana yang memiliki jumlah kerusakan terbanyak yaitu 291 TPS. Penyelenggaran sarana dan prasarana persampahan ditujukan untuk menunjang kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah yaitu dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Menindaklanjuti kebijakan dan strategi pengeolaan sampah sesuai dengan Peraturan Walikota No 38 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Menjadi Sampah Sejenis Rumah Tangga, pengelolaan sampah dimaksudkan untuk mewujudkan zero waste to landfill. Hingga pada tahun 2020, rata-rata volume sampah harian yang masuk ke TPA Sampah Manggar adalah sebesar 308,56 ton/hari, dimana hal ini menurun dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 358 ton/hari.

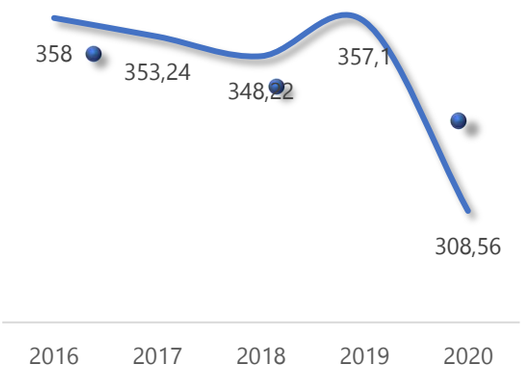

Gambar 2.66 Rata-Rata Volume Sampah Harian Ke TPAS Manggar Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

Sumber: TPA Manggar Kota Balikpapan 2021

Terkait kinerja penataan ruang ditunjukkan melalui penyusunan dokumen rencana tata ruang dan upaya pengendalian pemanfaatan ruang. Hingga tahun 2020 rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan adalah RTRW Kota Balikpapan melalui Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032. Adapun rencana rinci tata ruang telah disusun pada tahun 2020 yang meliputi 6 Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) yaitu BWP Balikpapan Utara, BWP Balikpapan Selatan, BWP Balikpapan Timur, BWP Balikpapan Barat, BWP Balikpapan Tengah dan BWP Balikpapan Kota saat ini sedang dalam tahap penetapan melalui Peraturan Walikota.

Tabel 2.33 Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang Kota Balikpapan 2016 – 2020

Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Perda tata ruang (1 RTRW, 1 RDTR, 1 Insentif dan Disinsentif)	Dokumen		0	-	0	2
Persentase penerbitan pemanfaatan ruang	%	98	98,1	98,24	98,4	98,58
Persentase rencana tata ruangyang disusun	%	-	40	45	88	100
Jumlah rencana rinci tata ruang/kota	Dokumen	-	0	0	0	2
Jumlah kesediaan petunjukpelaksanaan pemanfaatanruang	Dokumen	1.227	1.809	3.538	4.999	6.248

Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase kasus mediasipemanfaatan ruang yang tidaksesuai dengan rencana tataruang	%	98	98,1	98,24	98,4	98,58

Sumber: DPPR Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah persentase penerbitan pemanfaatan ruang pada tahun 2020 adalah mencapai 98,58%, jumlah kesediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan ruang atau advice planning hingga tahun 2020 adalah sebanyak 6.248 dokumen dan persentase kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang adalah 98,58%.

2.3.1.4. Perumahan dan Permukiman

Pokok penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman selain penyediaan SPM adalah penyediaan rumah layak huni dan pengurangan kawasan perumahan dan permukiman kumuh. Sesuai dengan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah penyediaan dan rehabilitas rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota serta fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Penurunan backlog perumahan sendiri mendukung tujuan 11 sasaran 1 pada SDGs yaitu terkait menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan.

Untuk indikator yang berkaitan dengan SPM hingga tahun 2020 belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Perumahan dan Permukiman dikarenakan hasil identifikasi awal tidak terdapat permukiman yang signifikan berada di atas kawasan rawan bencana. Untuk menindaklanjuti akan dilaksanakan identifikasi yang lebih detail pada tahun 2021 terhadap permukiman yang berada di kawasan rawan bencana serta yang terkena relokasi program Pemerintah Kota Balikpapan.

Tabel 2.34 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2016-2020

Tahun	APBN	APBD Provinsi	APBD Kota	Jumlah
2016	-	15	0	15
2017	200	0	105	305
2018	0	0	97	97
2019	235	50	77	362
2020	0	60	109	169
Jumlah	435	125	388	948

Sumber: DISPERKIM Kota Balikpapan 2021

Rumah layak huni di Kota Balikpapan yang telah dilakukan peningkatan kualitas pada tahun 2016-2020 adalah sebanyak 948 unit terdiri dari 435 unit dari pembiayaan APBN Pusat, 110 unit dari pembiayaan APBD Provinsi Kalimantan Timur dan 388 unit dari pembiayaan APBD Kota Balikpapan. Berdasarkan hasil pendataan Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2020, jumlah rumah tidak layak huni di Kota Balikpapan sebanyak 5.580 Unit jumlah terbanyak berada di Kecamatan Balikpapan Barat dan Balikpapan Utara. Adapun rincian persebaran per kecamatan sebagai berikut:

Tabel 2.35 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kota Balikpapan Tahun 2020

No	Kecamatan	2020	
		Jumlah RTLH (unit)	Persentase (%)
1	Balikpapan Barat	1263	22,63%
2	Balikpapan Kota	419	7,51%
3	Balikpapan Selatan	798	14,30%
4	Balikpapan Tengah	704	12,62%
5	Balikpapan Timur	856	15,34%
6	Balikpapan Utara	1540	27,60%
Total		5580	100%

Sumber: DISPERKIM Kota Balikpapan 2021

Masalah yang kerap dihadapi terkait peningkatan kualitas RTLH adalah kian meningkatnya jumlah populasi penduduk dan kemampuan masyarakat untuk membangun dan menjangkau rumah yang layak huni. Selain itu, rumah tidak layak huni tidak dapat diintervensi karena tidak masuk dalam kriteria RTLH yang salah satu penyebabnya adalah masalah legalitas kepemilikan tanah. Indikator lain yang digunakan untuk urusan perumahan dan kawasan permukiman adalah backlog perumahan. Backlog rumah dapat diukur dari dua perspektif yaitu dari sisi kepenghunian maupun dari sisi kepemilikan dengan capaian Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 2.36 Capaian Penurunan Backlog Perumahan

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kepala Keluarga	161.892	161.892	257.259	229.916	236.293
Jumlah (Unit Rumah)	154.707	142.568	142.568	204.717	208.811
Backlog KEPEMILIKAN (Unit Rumah)	(33.849)	(49.806)	(49.806)	(87.782)	(92.556)
Backlog HUNIAN (Unit Rumah)	(84.543)	19.324	114.691	25.199	24.931
Presentase Backlog Kepemilikan (Jumlah Backlog / Jumlah Rumah)	21,88%	34,93%	34,93%	42,88%	44,33%

Sumber: Disperkim Kota Balikpapan 2020

Berdasarkan data tersebut di atas, maka backlog perumahan yang terjadi di Kota Balikpapan adalah backlog kepemilikan yang meningkat dari 33.849 unit pada tahun 2016 menjadi 92.556 pada tahun 2020 atau meningkat dari 21,88% menjadi 44,33 terhadap rumah yang tersedia. Hal ini bertolak belakang dengan backlog hunian dimana terjadi surplus atau dengan kata lain sebanyak 24.931 kepala keluarga tinggal dengan menumpang atau menyewa rumah. Tingginya backlog kepemilikan mengindikasikan masih rendahnya jangkauan masyarakat terhadap penyediaan rumah. Tingginya backlog juga dipengaruhi oleh tingginya migrasi yang masuk ke Kota Balikpapan.

Sedangkan untuk bidang permukiman, sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-667/2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Balikpapan, luas kawasan kumuh di Kota Balikpapan adalah seluas 282, 20 Ha dan telah dilakukan penanganan dari tahun 2017-2020 sehingga pada akhir tahun 2020 luas kawasan kumuh di Kota Balikpapan sesuai baseline tahun 2014 adalah 0 Ha.

Tabel 2.37 Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Baseline Tahun 2014

No	Lokasi		Luas Kawasan (Ha)				
	Kecamatan	Kelurahan	2015	2017	2018	2019	2020
1.	Balikpapan Utara	Muara Rapak	27,88	36,98	27,28	0	0
2.	Balikpapan Barat	Baru Ulu	17,73	16,27	7,03	0	0
		Baru Tengah	22,51	32,26	0	0	0
		Margomulyo	40,89	15,65	0	0	0
		Margasari	22,06	19,02	0	0	0

No	Lokasi		Luas Kawasan (Ha)				
	Kecamatan	Kelurahan	2015	2017	2018	2019	2020
3.	Balikpapan Selatan	Sepinggan Raya	37,38	15,42	6,3	0	0
4.	Balikpapan Tengah	Karang Jati	12,52	4,53	10,67	0	0
5.	Balikpapan Kota	Klandasan Ulu	4,52	3,53	4,52	0	0
		Damai	9,36	11,32	0,4	0	0
		Telagasari	8,66	8,73	0	0	0
6.	Balikpapan Timur	Manggar	28,05	21,17	0	0	0
		Manggar Baru	50,64	29,75	2,45	0	0
Jumlah			282,20	224,86	58,65	0	0

Sumber: SK Walikota Nomor 188.45 – 336/2018

Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Balikpapan melakukan perhitungan ulang kondisi perumahan dan permukiman di Kota Balikpapan sesuai dengan kriteria kumuh yang terdiri atas 7 indikator yaitu Kondisi Bangunan Gedung, Kondisi Jalan Lingkungan, Kondisi Penyediaan Air Minum, Kondisi Drainase Lingkungan, Kondisi Pengelolaan Air Limbah, Kondisi Pengelolaan Persampahan dan Kondisi Proteksi Kebakaran, maka sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor: 188.45-326/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Balikpapan, terdapat perumahan dan permukiman kumuh di Kota Balikpapan seluas 153,3 Ha yang terdapat di 6 (enam) kelurahan yaitu:

Tabel 2.38 Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Baseline Tahun 2020

No	Lokasi		Luas Kawasan (Ha)
	Kecamatan	Kelurahan	2020
1.	Balikpapan Barat	Baru Ilir	24,57
2.	Balikpapan Tengah	Karang Jati	32,03
		Karang Rejo	23,98
		Gunung Sari Ulu	56,93
3.	Balikpapan Kota	Damai	5.40
		Klandasan Ilir	10,39
Jumlah			153,3

Sumber: Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2021

2.3.1.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Secara umum kondisi keamanan dan ketertiban sampai dengan tahun 2020 relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan kejahatan kriminalitas, unjuk rasa dan mogok kerja yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap baik aparatur pemerintah dan aparatur keamanan. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya. Hal ini terliat dari jumlah kasus kejahatan yang semakin menurun dari tahun ke tahun.

Tabel 2.39 Banyaknya Peristiwa Kejahatan dan Pelanggaran yang Dilaporkan di Kota Balikpapan Menurut Jenisnya, 2016-2020

No	Jenis Kejahatan/Pelanggaran	2016	2017	2018	2019	2020
1	Politik	-	-	-	-	-

No	Jenis Kejahatan/Pelanggaran	2016	2017	2018	2019	2020
2	Terhadap Kepala Negara	-	-	-	-	-
3	Terhadap Ketertiban Umum	-	-	-	-	-
4	Kebakaran	11	12	9	5	2
5	Pembakaran	-	-	-	-	-
6	Memberi Suap	-	-	-	-	-
7	Mata Uang	-	-	1	-	-
8	Pemalsuan Surat	5	3	3	3	1
9	Perzinahan	7	9	8	8	2
10	Perkosaan	-	-	-	-	-
11	Melanggar Kesopanan/Cabul	44	34	36	36	24
12	Perjudian	23	27	17	7	5
13	Penculikan	-	-	-	-	-
14	Pembunuhan	4	5	7	2	2
15	Penganiayaan Berat	131	122	109	58	46
16	Penganiayaan Ringan	47	47	34	25	6
17	Pencurian dengan Pemberatan	229	224	255	114	108
18	Pencurian Biasa	90	87	92	50	53
19	Pencurian dengan Kekerasan	11	48	42	22	17
20	Pemerasan	1	4	-	-	-
21	Penggelapan	91	53	48	39	36
22	Penipuan	67	65	56	35	20
23	Perusakan	21	14	15	6	4
24	Penadahan	-	-	-	-	-
25	Ekonomi	-	-	-	-	-
26	Curanmor R2	229	271	141	100	81
27	Curanmor R4	13	12	8	6	3
28	Kejahatan Langgar Sopan	-	-	-	-	-
29	Lain-Lain	770	693	634	183	102
Total		1794	1730	1515	699	512

Sumber: BPS, Kota Balikpapan Dalam Angka, 2021

Upaya penurunan peristiwa kejahatan dan pelanggaran ini memang terus diupayakan. Berdasarkan data yang ada, penurunan angka kriminalitas saat ini masih belum optimal. Pada tahun 2017, persentase penurunan angka kriminalitas sebesar 18%. Angka ini mengalami kenaikan menjadi 20% pada tahun 2018. Barulah pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 18,5%, hingga mencapai 18% pada tahun 2020.

Masih belum optimalnya penurunan angka kriminalitas disebabkan karena pelaksanaan fungsi perlindungan masyarakat juga kurang. Berdasarkan indikator persentase poskamling aktif, pada tahun 2016, jumlahnya hanya sebesar 63,21%. Angka ini hanya mengalami peningkatan menjadi 64,01% pada tahun 2020. Sedangkan untuk indikator rasio petugas linmas juga masih belum menunjukkan perkembangan yang maksimal. Pada tahun 2016, realisasi indikator ini sebesar 2,43%. Lalu meningkat menjadi 4% pada tahun 2018. Penurunan realisasi terjadi pada tahun 2019 menjadi 3,5%. Hingga pada tahun 2020, terjadi peningkatan rasio petugas linmas menjadi 4,50%.

Masih belum optimalnya upaya penurunan angka kriminalitas dan penguatan poskamling dan petugas linmas menunjukkan bahwa masih terdapat

beberapa kendala yang dihadapi. Salah satu kendala yang dihadapi adalah masih kurangnya jumlah petugas linmas sehingga mempengaruhi fungi linmas. Rasio petugas linmas menurun pada tahun 2019 menjadi 3,5. Sedangkan realisasi tahun 2017 dan 2018 adalah 4. Saat ini total jumlah petugas linmas adalah 40 orang. Idealnya setiap pos kamling dijaga minimal 2 orang dengan asumsi penjagaannya selama 24 jam bukan hanya pada malam hari saja. Hal ini sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020. Karena keterbatasan tersebut, satlinmas diorientasikan untuk membantu pelaksanaan pengawasan pilkada.

Kurangnya jumlah petugas linmas ini karena aturan terdahulu belum memberikan insentif kepada petugas linmas yang berasal dari anggaran dinas. Mengikuti aturan terbaru dari permendagri, program satlinmas ini nantinya berhak mendapatkan biaya operasional dari pemerintah. Diharapkan dengan adanya pemberian insentif tersebut dapat meningkatkan motivasi kerja bagi para petugas linmas.

Tabel 2.40 Angka Kriminalitas dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Penurunan angka kriminalitas	21%	18%	20%	18,50%	18%
Persentase poskamling aktif	63,21%	63,41%	63,61%	63,81%	64,01%
Rasio Petugas Linmas	2,43%	4%	4%	3,50%	4,50%

Sumber: Satpol PP Kota Balikpapan, 2021

Kurangnya upaya peningkatan perlindungan masyarakat ini terlihat dari belum optimalnya dua indikator yaitu Cakupan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan Cakupan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. Untuk indikator pertama yaitu cakupan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2016, realisasi indikator ini sebesar 65,38. Angka ini kembali mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 64,1, sedangkan tahun 2018 dan 2019 juga mengalami penurunan menjadi 62,82 dan 61,54, hingga tahun 2020, realisasi indikator ini kembali menurun menjadi 60,26. Halini menunjukan indikasi penurunan tingkat ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, karena perbandingan jumlah personil Satpol PP yang lebih sedikit dibandingkan laju pertambahan penduduk Kota.

Sedangkan indikator selanjutnya yaitu Cakupan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat mengukur tingkat keaktifan Satuan Perlindungan Masyarakat dan Poskamling. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, perkembangan penguatan poskamling masih terkendala dari keterbatasan jumlah SDM yang ada. Hal ini berpengaruh terjadinya stagnasi pada realisasi indikator cakupan penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Realisasi indikator ini sebesar 5,26 dari tahun 2016 hingga tahun 2019, dan mengalami peningkatan menjadi 6,57 pada tahun 2020. Kenaikan ini menunjukan indikasi

aktifnya personil Linmas dan masyarakat berpartisipsi membentuk Satgas-satgas penanggulangan Covid-19.

Tabel 2.41 Cakupan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	65,38	64,1	62,82	61,54	60,26
Cakupan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat	5,26	5,26	5,26	5,26	6,57

Sumber: Satpol PP Kota Balikpapan, 2021

Untuk indikator cakupan penegakan perda dan perkada menghitung penyelesaian kasus pelanggaran Perda dan Perkada yang terjadi dalam 1 (satu) tahun baik yang diselesaikan secara yustisi maupun non yustisi, penyelesaian secara yustisi dilakukan melalui pelaksanaan Sidang Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) sedang penyelesaian secara non yustisi melalui penandatanganan surat pernyataan dan tidak disidangkan. Jika dilihat dari datanya, terjadi tren peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2016, cakupan penegakan perda dan perkada berada pada angka 78,43%, angka ini terus mengalami peningkatan setiap tahun hingga menyentuh 85,11% pada tahun 2020.

Beberapa kendala yang dihadapi untuk penegakan perda dan perkada ini diantaranya belum optimalnya penegakan regulasi daerah karena kondisi pandemi. Penegakan aturan daerah menjadi lebih terbatas pada penegakan perwali tentang covid. Hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang mana varian penegakan perdanya jauh lebih banyak. Saat kondisi pandemi difokuskan pada dua aturan yaitu perda ketertiban umum dan perwali penegakan hukum terkait covid. Perilaku masyarakat dalam menaati aturan juga masih rendah. Satpol PP masih kesulitan dalam upayanya menegakkan perda terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum yang mengatur tentang pedagang kaki lima dan mengenai anak jalanan, pengemis, dan-lain-lain. Tingkat kehadiran masyarakat yang melanggar perda saat sidang juga cukup rendah. Hal ini juga disebabkan karena sidang hanya dilakukan 1 kali sebulan sehingga masyarakat terkadang tidak datang. Perlu penambahan frekuensi persidangan agar tingkat kehadiran masyarakat pun menjadi lebih tinggi.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan sesuai perannya dalam penyelenggaraan Penegakan Peraturan perundangan Daerah, ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan Kota Balikpapan dalam kondisi kondusif, berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban akibat pelanggaran Peraturan Daerah sehingga roda pemerintahan berjalan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan indeks persentase Cakupan Penegakan Perda dan Perkada serta Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan sebagaimana tabel di Bawah berikut.

Tabel 2.42 Cakupan Penegakan Perda dan Perkada dan Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan Di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Penegakan Perda dan Perkada	78,43	80	81,63	83,33	85,11
Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	84,4	85,6	86,6	87,7	88,8

Sumber: Satpol PP Kota Balikpapan, 2021

Secara keseluruhan upaya penguatan perlindungan masyarakat dan penegakan aturan daerah masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja di Satpol PP. Sarana dan Prasarana Dinas Ketenteraman masih belum sesuai dengan Permendagri Nomor 17 tahun 2019 misalnya terkait dengan luasan kantor. Hal ini berpengaruh pada ruangan dan fasilitas di kantor yang kurang baik. Misalnya ruang kerja, ruang pos jaga, ruang rapat, ruang layanan pengaduan, serta tempat penyimpanan barang dan gudang tidak ada, sekretariat ptns ada tapi tidak maksimal, layanan pengaduan dan pemeriksaan juga kurang optimal.

Keterbatasan jumlah SDM juga menjadi kendala lainnya. Jumlah personil operasional saat ini berjumlah 142 pegawai sedang jumlah penduduk Kota Balikpapan ±700.000 jiwa. Dengan jumlah pegawai tersebut juga kurang ideal dibandingkan dengan luas wilayah Kota Balikpapan yaitu ± 503,3 km². Idealnya Satpol PP Kota Balikpapan memiliki 350 personel. Disamping itu, masih terdapat beberapa pegawai yang belum diangkat pada posisi jabatan fungsional.

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat juga berkaitan dengan mitigasi bencana daerah. Upaya mitigasi ini diwujudkan untuk memastikan bahwa keselamatan masyarakat terjamin dari jenis bencana apapun. Adapun kewenangan terkait bencana ini menjadi tupoksi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dalam melaksanakan tugasnya, BPBD memiliki empat indikator kinerja yaitu Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, serta Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dengan capaian tahun 2016-2020 pada tabel berikut.

Tabel 2.43 Capaian Kinerja Layanan SPM Bidang Urusan TrantibumlinmasKota Balikpapan Tahun 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Realisasi SPM (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	N/A	N/A	92,92	99	80
2	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	90	70	75	81	83,16
3	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	70	100	100	80	95,42
4	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	70	100	100	80	95,42

Sumber : BPBD Kota Balikpapan, 2021

Permasalahan yang dihadapi dalam waktu tanggap serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran disebabkan karena terdapat beberapa daerah yang sulit dijangkau seperti di daerah Kariangau dan Teritip. Berdasarkan dari RSPK (Rencana Sistem Proteksi Kebakaran) terkait dengan

WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran), Standar proteksi wilayah adalah 2,5 km dengan UPT pemadam kebakaran, dan jarak antar UPT tidak boleh lebih dari 5 km. Hal ini dipersulit dengan kondisi geografis wilayah yang sebagian besar perbukitan dan jalanan yang sempit.

Masih belum optimalnya upaya penanganan kebakaran ini memang dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya adalah masih kurangnya jumlah sarana dan prasarana penunjang pemadam kebakaran. Mobil operasional pemadam kebakaran yang ada saat ini masih belum sesuai dengan standar nasional. Mengacu pada ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) bahwa 1 unit Mobil damkar melayani 10.000 jiwa. Kota Balikpapan dengan penduduk sebanyak 667.188 akan tetapi kendaraan operasionalnya hanya 23 unit atau masih sekitar 35% dari ketentuan ideal. Kota Balikpapan idealnya memiliki 67 unit pemadam. Selain itu, mobil operasional untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sempit serta gedung-gedung tinggi juga masih belum optimal. Selama ini, untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sempit sudah terdapat mobil jeep, akan tetapi mobil tersebut belum mampu menjangkau gang-gang sempit.

Lalu terkait dengan tingkat tanggap waktu yang masih fluktuatif capaiannya, berdasarkan identifikasi permasalahan yang sudah dilakukan penyebabnya adalah masih kurangnya respon petugas di lapangan ketika terjadi kebakaran. Penyebab lainnya karena belum ada perhitungan valid terkait waktu respon dari kantor hingga ke lokasi kebakaran. Waktu dihitung hanya berdasarkan asumsi masyarakat. Disisi lain, masih rendahnya capaian tingkat tanggap waktu tersebut terjadi karena laporan masyarakat ketika terjadi kebakaran masih lambat. Belum optimalnya pengembangan aplikasi pelaporan berbasis digital juga menyebabkan respon waktu terhadap bencana kebakaran masih kurang baik.

Untuk menangani permasalahan bencana kebakaran ini, beberapa hal yang perlu dibenahi adalah meningkatkan kualitas SDM. Masih kurangnya pelatihan maupun simulasi untuk petugas di lapangan maupun kepada masyarakat. Salah satu hambatan di lapangan ketika masyarakat belum mengetahui SOP penanganan kebakaran sehingga menyulitkan petugas di lapangan. Merujuk pada Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018, pengembangan kapasitas aparatur penanggulangan bencana mencakup aspek penyusunan dokumen perencanaan, penyusunan anggaran, penguatan kelembagaan, pembinaan personil, dan pelatihan teknis.

2.3.1.6. Sosial

Bidang sosial menjadi salah satu aspek yang memiliki hubungan dengan sumber daya manusia dan penanggulangan berbagai permasalahan sosial di Kota Balikpapan, salah satunya dalam hal rehabilitasi sosial. Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PPKS, keluarga, dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar dapat

melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Pelayanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti mengalami tren penurunan dari tahun 2016 hingga 2020, dimana capaian indikator ini menyentuh angka 100% pada tahun 2016, namun pada tahun 2020 angka ini hanya sebesar 63%. Untuk pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar mengalami capaian yang fluktuatif pada setiap tahunnya. Pada tahun 2016, capaian indikator ini mencapai 100%, namun mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 76,59%. Pada tahun 2018 hingga 2019, pelayanan indikator ini mengalami peningkatan hingga mencapai 98,72% pada tahun 2019. Angka ini kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 88%. Pelayanan rehabilitasi sosial untuk lansia terlantar juga mengalami capaian yang fluktuatif dari tahun 2016 hingga 2020. Pada tahun 2016, capaiannya hanya sebesar 26,49%, angka ini terus meningkat hingga mencapai 98,12% pada tahun 2018. Meskipun sempat mengalami penurunan menjadi 83,24% pada tahun 2019, angka ini kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 90%. Untuk capaian pelayanan rehabilitasi tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis pada tahun 2016 hanya sebesar 49%, hingga pada tahun 2020, angka ini mencapai 100%.

Selain itu, pelayanan yang dilaksanakan adalah pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar diberikan kepada korban bencana dalam bentuk: (a) penampungan sementara; (b) bantuan Pangan; (c) sandang; (d) air bersih dan sanitasi; dan pelayanan kesehatan. Pada tahun 2020, Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat sebesar 86,66%. Pada indikator berikutnyacakupan PMKS yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar mengalami kenaikan tertinggi pada tahun 2018 dengan 120,65% yang menerima bantuan. Selanjutnya, pada capaian tahun 2020 persentase PMKS yang menerima bantuan sosial sebesar 75,33%. Capaian kinerja Kota Balikpapan bidang urusan sosial pada tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.44 Capaian Kinerja Layanan SPM Bidang Urusan SosialTahun 2016 - 2020

NO	Program / Kegiatan	Tingkat Capaian SPM / Realisasi Program (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	100	99,83	93,68	93,33	63
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	100	76,59	89,15	98,72	88
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	46,49	90,72	98,12	83,24	90
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	49	54,74	93,96	58,06	100
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	37,25	84,37	85,14	67,84	100
6	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Dampak Bencana	N/A	84,37	85,14	68,00	86,66
7	Persentase PMKS yang Menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	N/A	84,07	120,65	74,26	75,33
8	Persentase PSKS yang telah dibina	N/A	61,06	85,12	78,60	23,92
9	Persentase PMKS Miskin yang Terlayani	N/A	23,65	100	49	165,42

NO	Program / Kegiatan	Tingkat Capaian SPM / Realisasi Program (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
10	Persentase PMKS Miskin penerima Bantuan Sosial Pangan yang terlayani	N/A	90,00	41,63	83,72	121,90
11	Persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS	N/A	56,68	107,75	146,46	154,20
12	Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Logistik bagi Korban Bencana	N/A	31,25	33,75	33,47	12,75

Sumber: Dinas Sosial Kota Balikpapan, 2021

Upaya pemenuhan kebutuhan sosial di Kota Balikpapan memang masih pada tahap pengembangan dan peningkatan institusi sosial yang ada. Dinas Sosial sebagai OPD yang mengemban tugas untuk mendistribusikan dan memastikan logistik serta penanganan sosial tentu membutuhkan bantuan dari pihak lainnya. Salah satunya adalah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. Perkembangan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 tidak mengalami perkembangan yaitu sebanyak 6 orang. Sedangkan untuk Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) juga tidak mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 yaitu sebanyak 34 orang.

Jumlah lembaga/organisasi sosial mengalami peningkatan dari 32 lembaga pada tahun 2017, menjadi 37 lembaga pada tahun 2018, namun hingga tahun 2020 angka ini tidak mengalami peningkatan. Hal yang sama juga terjadi pada yayasan sosial. Jumlahnya mengalami penurunan cukup signifikan yang mana pada tahun 2020 tercatat hanya 8 yayasan sosial.

Tabel 2.45 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	6	6	6	6	6
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	34	34	34	34	34
3	Taruna Siaga Bencana	95	95	95	95	84
4	Karang Taruna	34	34	34	34	34
5	Lembaga/Organisasi Sosial	32	32	37	37	37
6	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	-	-	-	-	-
7	Kelompok Usaha Bersama Produktif (KUBE)	20	20	20	20	20
8	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	30	30	35	35	35
9	Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSU)	2	2	2	2	2
10	Yayasan Sosial	19	19	8	8	8
11	Lembaga Sumbangan Sosial	10	10	10	15	15
12	CSR Perusahaan Lingkungan	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Sosial, 2021

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.3.2.1. Tenaga Kerja

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kota Balikpapan berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan pada tahun 2020 sebanyak 4.312 pencaker, dan telah ditempatkan sesuai klasifikasi kebutuhan sebanyak 937 pencaker. Dengan kondisi tersebut maka masih terdapat 3.999 pencaker di Kota Balikpapan yang belum ditempat atau bekerja. Proporsi terbesar dari pencari kerja terdaftar ini adalah mereka yang berpendidikan SMA/K, sebanyak 59,14 %, atau sebanyak 2.550 orang. Urutan nomor dua pencari kerja terdaftar terbesar

adalah dari kalangan yang berpendidikan strata-1 (S1) dengan proporsi 28,87 %, atau sebanyak 1.245 orang.

Tabel 2.46 Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar dan Belum DitempatkanMenurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2020

Pendidikan	Pencari Kerja Tahun 2019 yang belum di tempatkan		Pencari Kerja Tahun 2020		Ditempatkan		Belum Ditempatkan	
	L	P	L	P	L	P	L	P
SD	64	0	81	3	5	0	97	1
SMP	124	17	75	6	4	0	133	12
SMA/K	1.851	954	1.852	698	385	125	1.167	831
Diploma	280	500	191	149	57	32	141	387
S1	663	573	622	623	213	114	538	605
S2	67	48	5	7	0	2	51	36
Jumlah Total	3.049	2.092	2.826	1.486	664	273	2.127	1.872

Sumber: Disnaker Kota Balikpapan, 2021

Dengan kondisi pencari kerja yang terus meningkat, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 juga meningkat. Pada tahun 2017, TPAK Kota Balikpapan sebesar 63,38%. Angka ini meningkat pada tahun 2018 menjadi 64,33%. Hingga tahun 2019, TPAK Kota Balikpapan sebesar 65,14%. Pada tahun yang sama, terjadi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Balikpapan yang semula 10,39% pada tahun 2017, menjadi 7,29% pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020, TPAK Kota Balikpapan mengalami penurunan sebesar 2,24% menjadi 62,9%. Sama halnya dengan TPT Kota Balikpapan yang juga mengalami kenaikan menjadi 9,00% pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh dampak Pandemi Covid-19 terhadap tenaga kerja dan lapangan pekerjaan di Kota Balikpapan.

Terbatasnya lapangan pekerjaan, kapasitas dan ketrampilan SDM mengakibatkan banyak pencari kerja tidak tertampung. Jumlah ketersediaan lapangan kerja yang tidak memadai atau dapat diasumsikan adanya penyempitan ruang penyerapan tenaga kerja dan hal ini berdampak pada permintaan tenaga kerja menjadi lebih sedikit. Peningkatan Angka Partisipasi Kerja ini mendukung tujuan 8 sasaran 3 pada SDGs yaitu menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.

Jika dilihat berdasarkan capaian indikator kinerja terkait dengan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terus menunjukkan peningkatan meskipun di tahun 2019 mengalami penurunan namun persentasenya sudah di atas 100%. Namun angka ini mengalami penurunan signifikan menjadi 57,80% pada tahun 2020 karena dampak pandemi covid-19. Adapun perhitungan indikator ini berdasarkan jumlah pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja dibagi dengan jumlah pencari kerja yang menjadi target pelatihan.

Meskipun demikian, pelaksanaan pelatihan kerja masih memiliki beberapa kendala yaitu jenis pelatihan yang biasanya dilaksanakan belum sepenuhnya dapat mengakomodir kebutuhan industri dalam mencari tenaga kerja. Selain itu, terbatasnya pelatihan kejuruan pada LPK yang sesuai dengan kebutuhan industri di Kota Balikpapan serta masih kurangnya kerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta dalam melaksanakan pelatihan kompetensi kejuruan mengakibatkan pelatihan yang dilakukan belum sepenuhnya optimal untuk memenuhi pasar tenaga kerja.

Sementara itu, Dinas Ketenagakerjaan melalui program magang yang telah dilaksanakan mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 jumlah pencari kerja yang difasilitas magang oleh perusahaan terus menunjukkan peningkatan, meskipun di tahun 2020 mengalami penurunan namun persentasenya sudah di atas 100%. Program ini mendukung tujuan 8 sasaran 5 SDGs yaitu Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi pemuda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.

Diharapkan nantinya calon tenaga kerja yang mengikuti program magang sudah memenuhi standar kompetensi kerja. Belum optimalnya fungsi dari forum komunikasi terkait program magang juga menjadi permasalahan yang mana forum ini idealnya menjadi wadah bagi calon tenaga kerja, pemerintah, dan perusahaan terkait dengan pelaksanaan program magang. Akan tetapi pelaksanaan forum ini belum sepenuhnya berjalan karena kurangnya koordinasi.

Permasalahan tenaga kerja di Kota Balikpapan juga menyangkut ketersediaan dokumen perencanaan maupun regulasi yang menaunginya. Belum tersusunnya masterplan ketenagakerjaan baik skala makro ataupun mikro sangat menyulitkan Dinas Ketenagakerjaan dalam menentukan kebutuhan akan pengembangan kompetensi tenaga kerja. Rencana pengembangan ketenagakerjaan dalam dokumen masterplan ketenagakerjaan nantinya juga perlu mempertimbangkan dampak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial ketenagakerjaan dengan perjanjian bersama tahun 2016-2020 cenderung meningkat meskipun di tahun 2018 sempat menurun. Namun demikian masih terdapat permasalahan terkait hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan sehingga ketidakpahaman atau ketidakpatuhan pengusaha/pelaku usaha terhadap ketentuan normatif sebagaimana peraturan yang berlaku.

Selain itu, tidak semua perusahaan menjalankan operasional bisnisnya di Kota Balikpapan, sehingga ketika dilakukan pembinaan ke lapangan atau pemanggilan dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau fasilitasi permasalahan ketenagakerjaan lainnya menjadi terhambat karena perusahaan tersebut tidak memiliki kantor di Balikpapan. Pada masa pandemi Covid-19, jumlah kasus perselisihan hubungan industrial. Hal ini membutuhkan

upaya penanganan dengan aturan yang lebih kompleks karena merupakan kasus baru yang jarang terjadi. Kurangnya SDM pengawas ketenagakerjaan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam menangani kasus-kasus ketenagakerjaan.

Tabel 2.47 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kota Balikpapan 2016 – 2020

Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,73	10,39	9,52	7,29	9,00
Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	63,28	63,38	64,3	64,7	62,9
Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kerja	%	72,40	74,80	334,20	122,70	57,80
Persentase Pencari Kerja yang difasilitasi Magang di perusahaan	%	27,40	158	190,48	443,64	129,60
Persentase Calon Wirausaha yang mendapatkan Pembinaan	%	20	0	0	541,66	0
Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	6,08	28,76	19,27	3,98	62,47
Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan dengan Perjanjian Bersama	%	52,99	70,42	66,19	79,36	96,58

Sumber: BPS Kota Balikpapan dan Disnaker Tahun 2021

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Salah satu rujukan dalam menilai kinerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan menggunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks pembangunan gender adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.

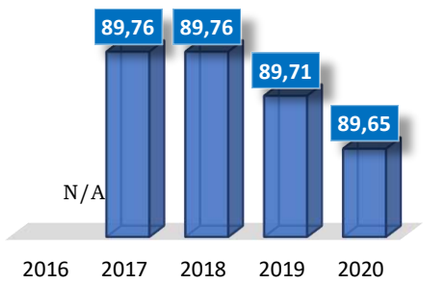

Gambar 2.67 Indeks Pembangunan Gender Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2020
Sumber: DP3AKB Kota Balikpapan, 2021

Berdasarkan grafik capaian indeks pembangunan gender Kota Balikpapan, IPG Kota Balikpapan mengalami penurunan pada tahun 2018 sampai tahun 2020. Pada tahun 2018, IPG Kota Balikpapan berada pada angka 89,76, dimana angka ini sama dengan IPG pada tahun 2017. Pada tahun 2019, IPG Kota Balikpapan menyentuh angka 89,71 dan terus mengalami penurunan menjadi 89,65 pada tahun 2020. IPG Kota Balikpapan mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan pada dua komposit yaitu: AHH dan pengeluaran per kapita perempuan.

Namun, capaian tersebut masih belum memenuhi target akhir RPJMD Kota Balikpapan untuk IPG sebesar 92. Beberapa hal yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Gender di Kota Balikpapan, yaitu: 1. Hak sipil kebebasan, sejauh

mana anak mendapat akta Kelahiran 2. Pengasuhan keluarga, tingkat pemahaman orang tua terhadap pengasuhan anak 3. Klaster kesehatan dasar, angka kematian ibu bayi, stunting, pemenuhan air bersih 4. Klaster pendidikan, sejauh mana tingkat putus sekolah 5. Perlindungan khusus, berupa penanganan korban kekerasan, bencana, dll.

IPG di Kota Balikpapan memiliki angka yang melampaui capaian IPG Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2017 dan 2018, IPG Kota Balikpapan sebesar 89,76. IPG Kota Balikpapan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 89,71 dan menjadi 89,65 pada tahun 2020. Pelaksanaan pembangunan gender di Kota Balikpapan telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa setiap proses perencanaan kebijakan, program, hingga kegiatan harus mempertimbangkan terkait pengarutamaan gender. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan demi terciptanya kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Tabel 2.48 Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kota Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur

No.	Provinsi/Kabupaten	IPG				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kalimantan Timur	85,61	85,61	85,63	85,98	85,70
2.	Kota Balikpapan	N/A	89,74	89,76	89,71	89,65

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2020

Salah satu hal yang perlu didorong dalam peningkatan indeks pembangunan gender (IPG) di Kota Balikpapan adalah melakukan evaluasi terhadap capaian nilai indeks pembangunan gender di Kota Balikpapan. Belum adanya kajian evaluasi terhadap capaian IPG di Kota Balikpapan mengingat capaian IPG bukan merupakan kinerja DP3AKB saja, namun merupakan kerja bersama seluruh perangkat daerah.

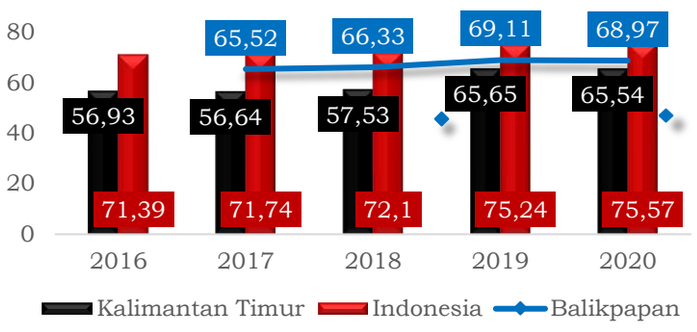

Selain Indeks Pembangunan Gender, indikator dalam pemberdayaan perempuan adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Capaian IDG menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Adapun capaian IDG di Kota Balikpapan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 berada di atas angka Provinsi Kalimantan Timur, namun masih berada dibawah angka Nasional sebagaimana tertera pada grafik berikut.

Gambar 2.68 Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dan Indonesia Tahun 2016 – 2020
Sumber: BPS diolah, 2021

IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan. Hal ini dilihat dari beberapa indikator antara lain keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Capaian indikator keterlibatan perempuan dalam parlemen mengalami peningkatan dari 17,78% pada tahun 2017 menjadi 20% pada tahun 2019, dan angka ini tidak mengalami perubahan hingga 2020. Sama halnya dengan capaian sumbangan pendapatan perempuan yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga 2020. Pada tahun 2017, sumbangan pendapatan perempuan hanya sebesar 25,71%, angka ini terus meningkat hingga mencapai 26,75% pada tahun 2020. Sedangkan untuk capaian indikator perempuan sebagai tenaga profesional mengalami peningkatan pada tahun 2017 hingga 2019 mencapai 42,39%, namun mengalami penurunan menjadi 41,76% pada tahun 2020.

Tabel 2.49 Indikator IDG Kota Balikpapan tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	%	N/A	17,78	17,78	20	20
2	Perempuan sebagai Tenaga Profesional	%	N/A	40,39	41,84	42,39	41,76
3	Sumbangan Pendapatan Perempuan	%	N/A	25,71	26,09	26,61	26,75

Sumber : BPS diolah, 2021

Capaian persentase penyelesaian penanganan korban kekerasan terhadap perempuan di Kota Balikpapan mengalami laju yang fluktuatif, dimana terjadi penurunan pada tahun 2017 sampai dengan 2019, dengan persentase penyelesaian sebesar 84,29% pada tahun 2017 menjadi 62,16% pada tahun 2019. Kemudian kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 72,86%.. Target akhir pada tahun 2021 untuk persentase penyelesaian penanganan korban kekerasan terhadap perempuan di Kota Balikpapan adalah sebesar 75,01%. Artinya, merujuk capaian terakhir pada tahun 2020, target tersebut masih belum berhasil dicapai oleh Pemerintah Kota Balikpapan.

Tabel 2.50 Jumlah Kasus Penyelesaian Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan

No	Tahun	Jumlah Korban	Penanganan Selesai	Proses	% Penyelesaian
1	2016	87	54	33	62,07
2	2017	140	118	22	84,29
3	2018	69	54	15	78,26
4	2019	74	46	28	62,16
5	2020	70	51	19	72,86

Sumber: DP3AKBKotaBalikpapan, 2021

Pada tahun 2019, penanganan korban kekerasan terhadap anak sebesar 52,54% dengan jumlah korban sebanyak 59 anak. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 65 korban dengan tingkat penanganan 72,31%. Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa pandemi

justru meningkat, karena pengawasan orang tua yang sangat minim. Anak lebih sering menggunakan smart phone, sehingga pergaulan anak melalui sosial media mengalami penyimpangan.

Terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam penyelesaian penanganan korban kekerasan terhadap perempuan. Salah satu kendala utama dalam menangani kasus ini adalah pembagian tugas pokok dan fungsi antar dinas. Kasus korban kekerasan terhadap perempuan terdiri dari kasus kekerasan perempuan anak dan perempuan dewasa. Kasus perempuan dewasa (KDRT) diperoleh berdasarkan aduan, kemudian pihak-pihak terkait melakukan mediasi, sehingga penyelesaian untuk permasalahan KDRT tinggi. Sedangkan untuk kasus penanganan korban anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian harus di selesaikan di tingkat pengadilan. Permasalahannya adalah jika sudah berurusan dengan aparat, maka tidak bisa cepat selesai, karena harus ada alat bukti minimal dua alat bukti. Kasus kekerasan seksual di Kota Balikpapan sebanyak 42 dari 59 kasus. Penanganannya relatif panjang karna memerlukan pembuktian yang cukup rumit. Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani korban kekerasan anak dan perempuan sangat tergantung dengan penegak hukum. Penyelesaian kasus korban kekerasan anak dan perempuan bisa selesai kurang lebih 1-3 tahun. Dalam penyelesaian kasus kekerasan pada anak dan perempuan dipengaruhi oleh 5 klaster, yaitu klaster 1-4 berupa pencegahan melalui sosialisasi dan klaster 5.

Berdasarkan grafik capaian persentase penyelesaian penanganan korban kekerasan terhadap anak, sejak tahun 2017 – 2019 mengalami penurunan dari 72,16% menjadi 52,54%, namun mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 72,31%. Adapun capaian tersebut sudah mencapai target akhir RPJMD Kota Balikpapan pada tahun 2021 yaitu sebesar 65,15%.

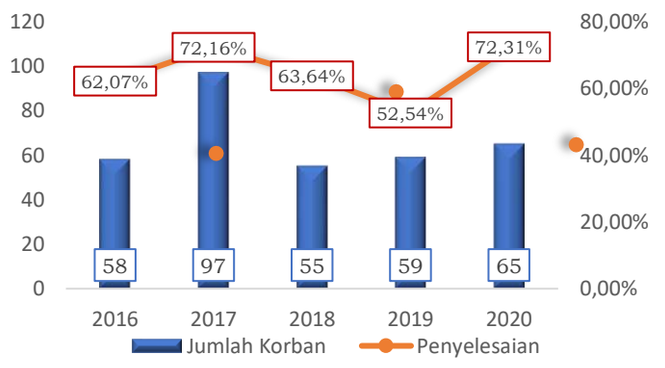

Gambar 2.69 Capaian Persentase Penyelesaian Penanganan Korban Kekerasan terhadap Anak
Sumber: DP3AKBKota Balikpapan, 2020

Adapun jumlah kasus yang terjadi di Kota Balikpapan sebanyak 65 kasus pada tahun 2020. Angka ini sebenarnya telah mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019. Peningkatan ini bisa dilihat dua sisi, yang pertama adanya peningkatan ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap kekerasan anak semakin baik ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kasus. Disisi lain peningkatan ini juga mengindikasikan kekerasan terhadap anak semakin banyak terjadi di masyarakat.

Tabel 2.51 Laporan Jenis Kasus Kekerasan Terhadap Anak

No.	Kategori Kasus	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	KDRT	0	39	13	-	14
2	Kekerasan Seksual	38	35	30	46	31
3	Penelantaran	15	15	1	1	0
4	Kekerasan Fisik	7	24	21	34	10
5	Kekerasan Psikis	36	34	13	5	9
6	Eksploitasi	0	0	0	2	0
7	Perdagangan Orang (TPPO)	0	0	1	0	0
8	Lainnya	25	53	1	3	2
Jumlah		121	200	80	91	66

Sumber: DP3AKBKota Balikpapan, 2021

Sedangkan untuk mengukur capaian perlindungan anak digunakan indikator Kota Layak Anak. Kota Layak Anak adalah indikator yang menjadi tolok ukur penilaian terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhinya 13 (tiga belas) hak-hak anak untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kota Balikpapan selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir yaitu 2017 dan 2018 telah mencapai tingkat madya dan untuk tahun 2019 Kota Balikpapan strata kota layak layak anak meningkat satu level yaitu di tingkat nindya. Belum optimalnya Kota Balikpapan sebagai kota layak anak karena belum adanya dukungan komitmen dari berbagai pihak. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa indikator kota layak anak sangat memerlukan dukungan pendanaan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*).

2.3.2.3 Pangan

Ketersediaan pangan diukur melalui presentase cadangan pangan masyarakat yang ada di Kota Balikpapan, baik yang bersumber dari kota maupun dukungan provinsi. Cadangan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah saat ini masih terbatas pada bahan pokok beras yang bekerja sama dengan Bulog. Selain diukur dari ketersediaan pangan utama, ketahanan pangan diukur juga dengan menggunakan skor Pola Pangan Harapan (PPH). PPH adalah indikator untuk mengukur pola konsumsi pangan masyarakat berdasarkan gizi yang cukup dan seimbang. Semakin tinggi skor pola pangan menunjukkan satuan pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya. Pola Pangan Harapan (PPH) masyarakat Kota Balikpapan pada tahun 2017 hingga 2019 mengalami tren kenaikan. Namun, pada tahun 2020 PPH masyarakat Kota Balikpapan menurun menjadi 86,2, hal ini dikarenakan ada pergeseran pola konsumsi pangan dari yang semula mengutamakan sumber energi karbohidrat (padi-padian dan umbi-umbian) menjadi sumber protein. Selain itu, terdapat perubahan perilaku masyarakat Kota Balikpapan dalam beradaptasi menghadapi pandemi covid-19. Sementara untuk indikator kinerja Persentase Pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan menunjukkan tren perbaikan dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Indikator kinerja urusan pangan digambarkan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.52 Capaian Kinerja Layanan SPM Bidang Urusan PanganKota Balikpapan Tahun 2016 - 2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Cadangan Pangan Masyrakat	*Belum Ada Bidang Ketahanan Pangan*	*Belum dilakukan Pengukuran*	62%	58%	38%
2	Persentase Daerah Rentan rawan Pangan	*Belum Ada Bidang Ketahanan Pangan*	NA	NA	NA	NA
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	*Belum Ada Bidang Ketahanan Pangan*	81.5 (AKE 2150) 83,8 (AKE 2000)	86,2 (AKE 2150) 89,0 (AKE 2000)	87,7 (AKE 2150) 90,2 (AKE 2000)	86,2 (AKE 2100)
4	Persentase Pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	*Belum Ada Bidang Ketahanan Pangan*	*Belum Ada Kegiatan Pengujian Sampel Pangan*	92,74	98	100

Sumber : DP3 Kota Balikpapan, 2021

2.3.2.4 Pertanahan

Capaian kinerja sektor pertanahan dapat terlihat dari pelayanan kepada masyarakat terkait pengurusan dokumen pertanahan dan kinerja pengadaan lahan untuk pembangunan penyediaan dan pengolahan air baku (pembangunan waduk Teritip dan embung Aji Raden) serta pengadaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana umum (pembangunan Institut Teknologi Kalimantan).

Untuk pelayanan kepada masyarakat terkait pengurusan dokumen pertanahan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) dari tahun 2016 hingga tahun 2019 terus menunjukkan kinerja yang baik meskipun di tahun 2017 sempat mengalami penurunan. Namun, pada tahun 2020 persentase tanah yang memiliki IMTN di Kota Balikpapan mengalami penurunan dari 88% pada tahun 2019 menjadi 76,95%.

Capaian indikator kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang selanjutnya adalah persentase penanganan kasus/sengketa pertanahan, pada indikator kinerja ini dalam kurun waktu 5 tahun memiliki rata-rata capaian sebesar 71,39%, dengan rincian persentase penanganan sengketa sebagaimana terlihat pada tabel 2.47.

Angka persentase periode 2016-2020 berfluktuasi tergantung dari banyaknya jumlah pengaduan yang masuk terhadap jumlah pengaduan yang difasilitasi. Adapun penanganan kasus/sengketa pertanahan yang difasilitasi mayoritas disebabkan masih banyaknya tumpang tindih kepemilikan lahan dan pemanfaatan lahan ynag tidak sesuai dengan peruntukannya dalam RTRW. Oleh karena itu, kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang oleh OPD teknis terkait Pemerintah Kota perlu lebih ditingkatkan. Adapun isu peruntukan lahan ini memiliki keterkaitan dengan tujuan pertama pada sasaran ketiga SDGs yang mencanangkan bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terkait dengan kepemilikan dan kontrol atas tanah. Kurangnya pengawasan terhadap

peruntukan lahan dapat berakibat pada berkurangnya akses bagi masyarakat dalam hal kepemilikan tanah.

Tabel 2.53 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2020

Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase tanah yang memiliki IMTN	%	70	43	79	88	76,95
Persentase penanganan kasus/sengketa pertanahan	%	76	82,86	57	74	85
Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	KK	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah bidang tanah yang diredistribusi	Hektar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya	Hektar	121,94	25,28	30,26	8,07	0

Sumber: DPPR Tahun 2020

Untuk kinerja pengadaan lahan pembangunan penyediaan dan pengolahan air baku, kegiatan prioritas Kota Balikpapan yaitu pembangunan waduk Teritip di kelurahan Teritip dan pembangunan Embung Aji Raden di Kelurahan Lamaru. Untuk waduk Teritip yang memiliki luas sesuai Penetapan lokasi 330 Ha,walaupun waduk telah terbangun dan telah operasional, masih ada sisa lahan yang belum bebas sekitar 35 Ha untuk area spil way dan sebagian area genangan. Adapun kendala yang dihadapi adalah permasalahan tumpang tindih lahan dan perbedaan luasan antara sertipikat dengan hasil ukur fisik dilapangan sehingga sampai saat ini belum dapat dilakukan proses konsinyasi.

Untuk pembangunan Embung Aji Raden, dari Kebutuhan lahan sesuai penetapan lokasi Tahun 2020 seluas 150,34 Ha, sampai dengan Tahun 2019 telah dibebaskan seluas 8,23 Ha yang telah digunakan untuk pembangunan tubuh bendung, spill way, intake dan sistem perpipaan intake. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kota mengupayakan pembebasan lahan untuk sebagian area genangan seluas 21,3 Ha. Adapun kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Balikpapan untuk pembebasan lahan pembangunan Embung Aji Raden ini adalah banyaknya permasalahan tumpang tindih lahan, rasionalisasi anggaran untuk penanganan covid-19, adanya penambahan luasan pada penetapan lokasi Tahun 2020 menyesuaikan revisi dokumen perencanaan serta keterbatasan anggaran APBD Kota, dimana dibutuhkan anggaran sebesar kurang lebih Rp. 181 Miliar untuk pembebasan sisa lahan seluas 120,81 Ha. Untuk itu Pemerintah Kota Balikpapan berupaya agar pembiayaannya juga dapat dibantu oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Terkait dengan pembangunan Institut Teknologi Kalimantan (ITK), hingga tahun 2019, dari total kebutuhan lahan sesuai penetapan lokasi seluas 310 Ha telah dibebaskan seluas 142,93 Ha. Adapun kendala yang dihadapi antara lain adanya keberatan oleh beberapa pemilik tanah yang masuk dalam penetapan lokasi dan diperlukan revisi penyusunan dokumen perencanaan menyesuaikan dengan Masterplan yang disusun oleh tim ITK. Untuk proses pembebasan lahan selanjutnya, pemerintah Kota fokus pada bidang tanah yang diperuntukkan sebagai akses utama dan pintu gerbang melalui jalan Soekarno Hatta KM 14.

Tabel 2.54 Kebutuhan Lahan Pembangunan Waduk Teritib, Embung Aji Raden dan ITK

Lokasi	Total Kebutuhan Lahan sesuai Penetapan lokasi (Ha)	Telah dibebaskan (Ha)	Belum dibebaskan (Ha)
Waduk Teritip	330	294,39	35,61
Embung Aji Raden	150,34	8,23 (on progress 2021: 21,3)	120,81
Institut Teknologi kalimantan	310	142,93	167,07

Sumber : DPPR, 2021

2.3.2.5 Lingkungan Hidup

Dalam mengukur kualitas lingkungan hidup, digunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang terdiri atas 3 parameter, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Hutan/Lahan (ITH). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Adapun klasifikasi IKLH adalah Sangat Baik IKLH > 80; Baik 70 < IKLH ≤ 80; Cukup baik 60 < IKLH ≤ 70; Kurang baik 50 < IKLH ≤ 60; Sangat kurang baik 40 < IKLH ≤ 50 dan Waspada 30 < IKLH ≤ 40. IKLH Kota Balikpapan mengalami fluktuasi capaian mulai tahun 2016 hingga mencapai angka 63,52 pada tahun 2020. Pada tahun 2018, terjadi penurunan nilai IKLH yaitu 59,58 karena berkurangnya indeks Kualitas Udara dari 97,9 di tahun 2017 menjadi 84,9 yang dipicu oleh meningkatnya kadar NO2 dan SO2 di udara. Rata rata capaian IKLH kota Balikpapan periode 2016-2020 ada pada klasifikasi cukup baik

Untuk parameter Indeks KualitasAir (IKA) terjadi fluktuasi capaian dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Capaian IKA Kota Balikpapan sempat meningkat signifikan menjadi 49,5 di tahun 2018, akan tetapi kembali menurun pada tahun 2019 menjadi 47,9. Hingga tahun 2020 IKA Kota Balikpapan berada diangka 40,9. Beberapa hal yang menyebabkan pencemaran ini adalah pertambahan jumlah penduduk yang mana berdampak pada bertambah besarnya limbah domestik.

Volume air limbah domestik yang dihasilkan berpotensi menambah beban pencemaran air permukaan yang disebabkan belum terkelolanya air limbah secara komunal. Selain itu masih terdapat praktik usaha ilegal di Daerah Aliran Sungai (DAS).Berdasarkan hasil kajian inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar pada DAS Kladasan Kecil dan Kladasan II tahun 2016, dari 23 UKM yang diperkirakan limbahnya masuk ke Sungai Klandasan Kecil menunjukkan bahwa beban TSS yang tertinggi dari kegiatan pabrik tahu sebesar 131.985,6 gr/hari, beban pencemar organik BOD sebesar 42.579,3 gr/hari dan beban COD dari pabrik tahu sebesar 70.851,8 gr/hari. Kenyataan ini menggambarkan masih adanya usaha ilegal yang limbah kegiatannya secara langsung mencemari sungai Klandasan Kecil. Di sepanjang dua sungai menunjukkan bahwa masih banyak usaha yang tidak mengendalikan air limbahnya dengan baik. Kenyataan ini

ditunjukkan dengan hasil pengukuran air limbah dari usaha kegiatan tersebut yang dari beberapa parameternya melebihi baku mutu air limbah.

Permasalahan berikutnya adalah penanganan limbah cair juga masih belum optimal sehingga berdampak banyak terhadap pencemaran air. Berdasarkan Kajian Identifikasi dan Inventarisasi Sumber Pencemar pada DAS Klandasan Kecil dan Klandasan II pada tahun 2016 disimpulkan bahwa sumber pencemar yang berkontribusi paling besar terhadap pencemaran adalah limbah cair domestik dimana beban dari kegiatan domestik mencapai 3340,04 kg BOD/hari, 6405,01 kg COD/hari dan 1430,71 Kg TSS/hari sementara kegiatan lain 5,85 kg BOD/hari, 12,89 kg COD/hari dan 6,12 Kg TSS/hari. Aktivitas rumah tangga juga berkontribusi banyak terhadap limbah cair. Sumber air limbah dari kegiatan rumah tangga adalah aktivitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK), sebagian besar mempunyai tangki septik yang mengolah air limbah dari black water (toilet), sedangkan dari *grey water* (non toilet berupa aktivitas mandi, mencuci, memasak) belum dilakukan pengolahan dan dibuang langsung ke saluran penerima.

Secara keseluruhan, pencemaran air di Kota Balikpapan didominasi oleh pencemaran akibat air limbah domestik dan non domestik, serta limpasan air hujan yang membawa kikisan tanah. Selain itu meningkatnya pencemaran air, khususnya di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berlokasi di tengah kota, yaitu DAS Klandasan Besar dan DAS Klandasan Kecil, disebabkan pula oleh semakin padatnya penduduk dan tingginya pertumbuhan kegiatan komersil di sekitarnya. Meskipun berada di tengah Kota, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kualitas air masih sangat kurang. Banyaknya kegiatan komersil, terutama usaha skala kecil seperti rumah makan, bengkel, dan kos-kosan mengolah air limbah dengan sarana dan prasarana yang sangat minim. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan pelaku usaha skala kecil terhadap kewajiban untuk mengelola air limbah kegiatan/usahanya. Selain itu, biaya untuk mengolah air limbah dianggap relatif besar oleh sebagian pelaku usaha.

Indeks selanjutnya adalah Indeks Kualitas Udara (IKU). IKU adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kualitas udara berupa gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) polusi udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat awam. Capaian realisasi IKU Kota Balikpapan mengalami fluktuasi angka. Pada tahun 2017 angkanya berada di 97,9, lalu mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 84,93. Capaian realisasi ini kembali meningkat menjadi 88,42 di tahun 2019, hingga tahun 2020 realisasi IKU kembali meningkat menjadi 88,92.

Beberapa hal yang mempengaruhi pencemaran udara salah satunya adalah sektor industri. Pertumbuhan pembangunan sektor industri perdagangan dan jasa relatif cepat. Kota Balikpapan sendiri masuk dalam kategori kota yang tingkat pertumbuhan dan pembangunannya relatif cepat. Selain itu penambahan

penduduk dan industri menghasilkan gas rumah kaca yang lama kelamaan akan merusak ozon dan meningkatkan suhu serta anomali cuaca. Curah hujan yang ekstrem serta peningkatan suhu mengakibatkan munculnya bencana seperti kebakaran hutan dan lahan, banjir dan tanah longsor.

Besarnya produksi gas emisi juga berpengaruh terhadap pencemaran udara. Penyumbang emisi terbesar adalah bidang manufaktur sebesar 68,7%, kemudian transportasi sebesar 11,7% dan permukiman serta usaha dan kelembagaan sebesar 8%. Aktivitas pengilangan minyak dari Pertamina Refinery Unit IV juga menyumbangkan emisi yang cukup besar. Jumlah emisi GRK dari aktivitas tersebut mencapai 1.976.220 ton CO2e pada tahun 2010, atau menempati 69,30% dari jumlah emisi di sektor Energi dan Transportasi, dan 66,85% terhadap total emisi Kota Balikpapan pada tahun 2010. Besarnya Emisi dari Pertamina RU V ini menyebabkan sektor Energi dan Transportasi menjadi sangat dominan di antara dua sektor penyumbang emisi yang lain di Kota Balikpapan.

Faktor lainnya adalah meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2019 sebanyak 616.626 kendaraan. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 4,71%. Pada tahun 2010, bidang Transportasi menyumbang 347.136 ton CO2e atau 11,74% dari total emisi kota pada tahun yang sama. Lalu pada tahun 2020 dengan proyeksi BAU menyumbang sebesar 1.214.975 ton CO2e atau dengan persentase sebesar 20,77% terhadap total emisi kota.

Indeks selanjutnya adalah Indeks Tutupan Hutan/Lahan (ITH). ITH adalah suatu nilai yang digunakan untuk menghitung tutupan lahan/ hutan dibandingkan dengan Luas Wilayah. ITH Kota Balikpapan sendiri menunjukkan grafik peningkatan pada periode tahun 2016-2020. Angka ITH sempat mengalami stagnasi dari tahun 2016 hingga tahun 2017 sebesar 48,12. Barulah pada tahun 2018 angka ITH mengalami kenaikan menjadi 48,15. Pada tahun 2019 hingga tahun 2020 angkanya terus mengalami peningkatan mencapai 55,4.

Salah satu dampak dari belum optimalnya penanganan pengupasan lahan adalah terjadinya perubahan iklim. Pengupasan lahan secara langsung mengakibatkan berkurangnya vegetasi tanaman setempat yang sebelumnya berfungsi sebagai penyerap gas karbon dioksida (CO2) dan tempat peresapan air ke tanah, dengan berkurangnya vegetasi maka gas CO2 menjadi tidak terserap serta tanah menjadi mudah terkena erosi saat hujan lebat. Hal tersebut mengakibatkan munculnya dampak lingkungan seperti terjadinya peningkatan suhu udara, sedimentasi, banjir, tanah longsor dan kebakaran hutan dan lahan di beberapa titik lokasi. Pada tahun 2019, jumlah kegiatan yang melakukan pengupasan lahan menurun 60,77% dari jumlah pengupasan lahan pada tahun 2018. Namun, luasan yang dilakukan pengupasan lahannya seluas 1.943.125 m^2.

Tingginya angka pengupasan lahan ini disebabkan oleh pelaku usaha dan masyarakat perseorangan yang tidak mempertimbangkan aspek pembangunan atau aturan yang sesuai. Pelaku usaha lebih memilih Pembukaan dan pengupasan lahan dilakukan sekaligus, dibandingkan secara bertahap. Masalah lainnya adalah masih terjadinya kerusakan mangrove. Kerusakan mangrove terjadi akibat dari beralih fungsinya lahan melalui pembukaan lahan. Hal ini dapat dilihat dari cenderung menurunnya lahan untuk peruntukan tertentu yang berdampak pula pada berkurangnya areal mangrove. Keadaan ini diperkuat dengan hasil studi komprehensif kondisi eksisting dan *monitoring* lingkungan pesisir Kota Balikpapan yang dilakukan pada tahun 2016, dimana dalam kurun waktu 15 tahun terakhir telah terjadi berkurangnya areal mangrove seluas 95,06 ha. Dari besaran luasan ini terdiri dari 85 ha berada di area yang sesuai dengan RTRW yang ditetapkan sebagai area mangrove, sedangkan sisanya merupakan areal di luar ketetapan RTRW. Masalah kerusakan mangrove lain yang mendapat perhatian publik secara besar, adalah saat terjadinya tumpahan minyak (*oil spill*) pada tanggal 30 Maret 2019 di teluk Balikpapan.

Bencana ini terjadi akibat kebocoran (patahnya) pipa distribusi minyak mentah bawah laut berdiameter 20 inci yang berlokasi di Terminal Lawe-Lawe ke Terminal Balikpapan milik PT. Pertamina RU V Balikpapan. Lokasi patah pipa terletak pada koordinat S 01^{o}14’42.1” dan 116^{o}47’16.2” sekitar 500 meter dari Terminal Lawe-Lawe ke arah Penajam. Sebaran tumpahan minyak mentah tersebut berdampak terhadap ekosistem dan biota laut di Teluk Balikpapan. Dari hasil survei lapangan ditemukan real mangrove yang rusak akibat dari tumpahan minyak adalah seluas 29,52 Ha. Selain sedikitnya lahan peruntukan untuk mangrove, masalah lain yang muncul dari berkurangnya tutupan lahan ini adalah terjadinya bencana tanah longsor. Sepanjang tahun 2017 telah terjadi tanah longsor di Kota Balikpapan sebanyak 63 kali yang disebabkan oleh curah hujan tinggi. Sementara itu di tahun 2016 terjadi tanah longsor sebanyak 24 kali, hal ini menunjukkan peningkatan tanah longsor yang terjadi di Kota Balikpapan. Hampir 85% wilayah Kota Balikpapan konturnya berbukit dan 15% relatif datar yang berada di sepanjang pesisir pantai. Adapun kontur yang berbukit memiliki tingkat kelerengan sebesar 15% sampai dengan 40% termasuk klasifikasi kelerengan curam dengan luas 39.955,57 m2, sehingga dengan kondisi tersebut menyebabkan rawan terjadinya longsor.

Pemanfaatan lahan di kontur berbukit didominasi oleh pembangunan rumah swadaya dan perumahan formal oleh pengembang. Hal ini menyebabkan kondisi lahan akan terbuka dan memerlukan drainase untuk mengalirkan limpasan air hujan agar tidak meresap ke tanah. Drainase yang ada belum sepenuhnya mengalir ke drainase kota, sehingga masih banyak aliran air yang masuk ke tanah karena tidak dilengkapi dengan drainase yang memenuhi standar untuk mengalir ke drainase kota. Aktivitas pembangunan perumahan juga turut

menambah kerusakan ini. Pelaku usaha/kegiatan pembangunan perumahan dalam melakukan kegiatan konstruksi kurang memperhatikan kondisi lahan yang berbukit yang terakomodir dalam dokumen kajian lingkungan, namun masih banyak yang belum menerapkannya.

Adapun upaya terkait pembebasan hutan lindung dan hutan kota juga masih belum sepenuhnya terlaksana. Hutan lindung manggar dari 5.999 ha masih terdapat 1.000 ha yang belum dibebaskan sehingga banyak aktivitas masyarakat yang dapat mengancam kelestarian hutan lindung. Kemudian 20 hutan kota baru 5 yang menjadi milik pemerintah kota, sementara itu tanaman yang ada belum tertata masih hutan belukar yang mana seharusnya dapat dimanfaatkan untuk rekreasi dengan penataan kawasan dan tanaman yang baik.

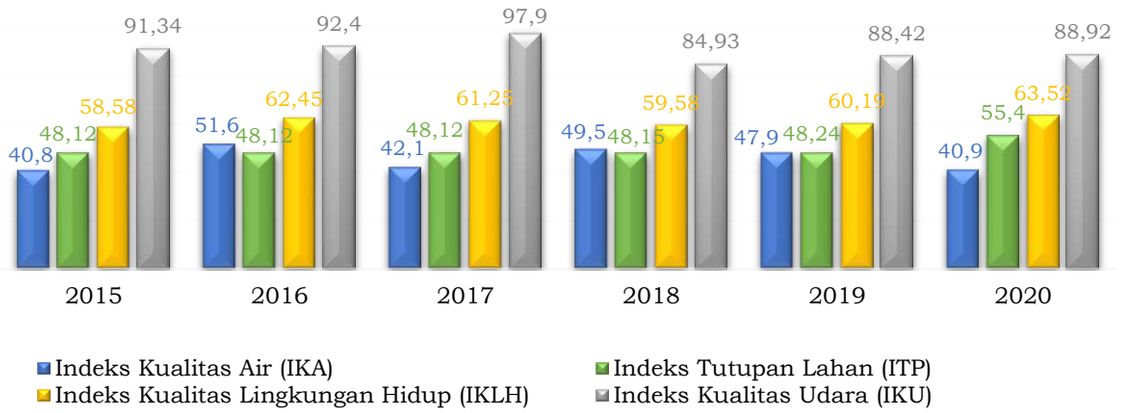

Gambar 2.70 Indeks IKA, IKLH, ITH dan IKU Tahun 2016-2020
Sumber: DLH Kota Balikpapan Tahun 2020

Permasalahan lainnya terkait urusan lingkungan hidup adalah pengelolaan sampah. Untuk mengukur capaian kinerja penanganan permasalahan sampah digunakan dua indikator yaitu Persentase pengangkutan sampah ke TPA dan Persentase pengelolaan sampah di sumbernya. Untuk persentase pengangkutan sampah ke TPA persentasenya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan persentase pengelolaan sampah. Capaian realisasi untuk pengangkutan sampah pada tahun 2016 adalah 63,02%. Angka ini terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga 2019 menjadi 77,86%. Namun pada tahun 2020, angka ini kembali mengalami penurunan menjadi 75,45%.

Permasalahan pengelolaan sampah disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah masih kurangnya kesadaran dan minat masyarakat dalam melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah. Pemilahan dan pengolahan sampah di sumber belum mencapai hasil yang diharapkan. Indikasi dari belum berhasilnya pemilahan dan pengolahan sampah adalah masih tingginya volume sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Manggar, belum optimalnya pemilahan sampah di *Material Recovery Facility* (MRF), serta banyaknya bank sampah yang tidak aktif. Khusus untuk masyarakat di wilayah pesisir dan sungai masih menjadi wilayah yang kurang dalam mengelola sampahnya. Diperkirakan timbunan sampah yang dihasilkan melalui kegiatan

permukiman sepanjang daerah aliran sungai sebanyak 411,32 ton/hari. Kota Balikpapan sendiri diperkirakan menghasilkan sampah sebesar 488,25 ton/hari. Berdasarkan hasil *sampling* sampah dari aliran air Sungai Pandan Sari, diperkirakan berat sampah sebesar 182,88 ton dengan komposisi sampah organik sebesar 63,03%, plastik 34,03 %, sampah inert lainnya (konstruksi bangunan, bebatuan, dsb. Sampah jenis ini tidak dapat didaur ulang, namun bisa digunakan ulang) 2,19%, kaca 0,22% dan logam 0,57%.

Berdasarkan hasil *sampling* tersebut dinilai berpotensi menjadi timbulan sampah di laut. Kecenderungan yang terjadi, Permukiman penduduk daerah pesisir terutama di Kecamatan Balikpapan Timur, Selatan, Kota dan Barat yang terbuat dari kayu dan terapung di atas air mengakibatkan rentan terjadi kebakaran, sehingga di beberapa daerah dibuat ruang kosong diantara rumah penduduk sebagai partisi dan sumber air jika terjadi kebakaran. Akibatnya ruang kosong tersebut selain sebagai jalur apI juga digunakan untuk membuang sampah terutama sampah kecil seperti bungkus plastik, kantong plastik dll.

Program pemilahan sampah dari sumber dan pengelolaan sampah dengan konsep 3R telah dilaksanakan di kelurahan Gunung Bahagia sejak tahun 2014 sebagai pilot project yang didukung dengan fasilitas seperti MRF, ITF, halte sampah, pengangkutan sampah terjadwal dan sosialisasi serta pembinaan. Namun demikian hingga tahun 2019 program tersebut masih belum optimal untuk mewujudkan *zero waste to landfill* yang terlihat dari data MRF dan ITF yang berfluktuatif dan belum mencapai kapasitas maksimal. ITF hanya sebesar 25,98% - 31.31% yang dapat dimanfaatkan menjadi kompos, sisanya residu yang dikirim ke TPAS Manggar. Sementara itu, sampah MRF di tahun 2019 menurun sebesar 51,14 dari tahun 2018.

Ketersediaan pusat daur ulang sampah juga masih minim. Pemerintah Kota Balikpapan belum memiliki Pusat Daur Ulang (PDU) guna mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA dan mengontrol harga pasar di bank sampah. Adanya PDU dapat menarik minat masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah karena masyarakat dapat secara langsung melihat dan merasakan manfaat dari sampah yang didaur ulang, sehingga perekonomian masyarakat dapat berputar. Selain PDU, program lainnya yang perlu ditingkatkan adalah pengelolaan sampah melalui bank sampah. Ketersediaan bank sampah saat ini masih belum cukup ideal.

Terdapat 126 bank sampah di Kota Balikpapan yang tersebar di seluruh kecamatan. Namun jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi 107 unit berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada tahun 2020. Selain jumlah, sebaran bank sampah juga dirasa kurang merata untuk menjangkau seluruh masyarakat di Kota Balikpapan. Jumlah bank sampah di Balikpapan Timur sebanyak 39 unit, Balikpapan Utara 15 unit, Balikpapan Selatan 27 unit,

Balikpapan Kota 19 unit, Balikpapan Tengah 12 unit, dan Balikpapan Barat 14 unit.

Hal lain yang perlu diperhitungkan adalah ledakan jumlah penduduk yang berdampak pada meningkatnya jumlah sampah. Pertumbuhan penduduk di Balikpapan mempengaruhi bertambahnya volume limbah, termasuk jenis limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Untuk pengendalian terhadap limbah B3 yang dihasilkan pelaku usaha dan/atau kegiatan dapat dilakukan pengawasan terhadap pemegang izin usaha. Namun, untuk limbah B3 skala rumah tangga yang mempunyai potensi cukup besar terhadap pencemaran lingkungan belum ada pengelolaan yang memadai.

Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan jumlah sampah yang dihasilkan juga semakin banyak, demikian juga dengan sampah yang termasuk dalam kategori sampah B3 yang dihasilkan. Saat ini, tempat pemilahan/pewadahan untuk sampah B3 di Kota Balikpapan belum tersedia, data persentase sampah B3 juga belum terdata dengan baik. Pengelolaan di TPA pun belum maksimal yakni masih tercampur dengan limbah domestik rumah tangga. aktivitas rumah tangga memang mengindikasikan banyak menghasilkan sampah B3. Pilihan produk rumah tangga untuk kemudahan aktivitas sehari-hari dan umumnya mengandung bahan berbahaya dan beracun, dan menambah produksi sampah domestik non berbahaya dan beracun yang dihasilkan dari rumah tangga. Hasil kajian sarana dan prasarana limbah B3 diketahui bahwa rata-rata sampah rumah tangga yang dihasilkan sebanyak 0,0188 per orang/hari. Sampah B3 berpotensi meningkat dan apabila tidak ada penanganan khusus, sehingga akan menimbulkan bahaya yang serius bagi lingkungan dan kesehatan manusia, seperti sampah atau limbah B3 dari elektronik yang mengandung Timbal, Merkuri, Arsenik, Kadmium yang dapat mengganggu sistem metabolisme tubuh, karsinogenik.

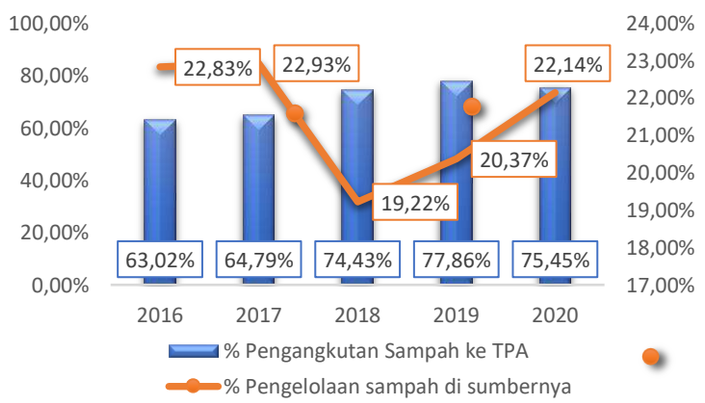

Gambar 2.71 Persentase Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020
Sumber: DLH Kota Balikpapan Tahun 2021

Pengelolaan sampah B3 rumah tangga ini juga masih terhambat karena belum adanya regulasi daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun belum secara jelas mengatur pengelolaan sampah B3 untuk skala rumah tangga. Hal ini tentu

berpengaruh pada kesulitan bagi *stakeholder* untuk merumuskan peraturan teknis di daerah.

2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Salah satu urusan strategis yang menjadi urusan daerah adalah terkait dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Urusan ini diampu oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Salah satu indikator yang digunakan adalah jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga. Kartu Keluarga merupakan salah satu dari beberapa dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh keluarga. Kartu keluarga menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya. Pada tahun 2020, jumlah keluarga yang memiliki Kartu Keluarga sebanyak 236.293 KK, atau 100 persen seluruh keluarga di Kota Balikpapan sudah mempunyai Kartu Keluarga SIAK.

Tabel 2.55 Persentase Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	% Keluarga Yang Memiliki KK				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Balikpapan Timur	100%	100%	100%	100%	100%
2	Balikpapan Barat	100%	100%	100%	100%	100%
3	Balikpapan Utara	100%	100%	100%	100%	100%
4	Balikpapan Tengah	100%	100%	100%	100%	100%
5	Balikpapan Selatan	100%	100%	100%	100%	100%
6	Balikpapan Kota	100%	100%	100%	100%	100%
T O T A L		100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Database SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2020

Sedangkan indikator lainnya adalah Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. Dengan memiliki KTP, penduduk dapat dengan mudah mengurus semua yang berkaitan dengan legalitas serta memperoleh pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya; misalnya urusan perbankan, mengurus sertifikat tanah, mengurus perkawinan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Terjadi peningkatan jumlah penduduk wajib KTP dari 467.587 pada tahun 2018 menjadi 484.041 pada tahun 2019. Jumlah penduduk yang memiliki KTP elektronik juga meningkat persentasenya. Dari 59,44% pada tahun 2018 menjadi 97,08% pada tahun 2019.

Tabel 2.56 Jumlah Penduduk Wajib KTP dan Memiliki e-KTP Tahun 2016 – 2020

No	Kecamatan	Jml Pendudk Wajib KTP					Jml Pddk yang Memiliki KTP-el				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Balikpapan Timur	49.503	52.771	57.353	59.487	61.121	37.798	39.569	54.620	57.668	60.140
2	Balikpapan Barat	62.279	63.936	67.116	67.544	67.141	55.715	57.035	65.084	65.578	67.136
3	Balikpapan Utara	98.520	104.446	110.818	114.713	117.508	92.306	117.751	107.388	111.442	116.034
4	Balikpapan Tengah	74.727	76.028	77.701	78.187	77.175	69.623	60.927	75.986	76.124	77.145
5	Balikpapan Selatan	86.849	92.653	97.964	100.744	101.963	91.632	87.307	93.503	97.524	101.148
6	Balikpapan Kota	59.359	61.277	62.166	63.366	62.484	18.572	54.065	60.723	61.557	62.479
TOTAL		431.237	451.111	473.118	484.041	487.392	416.107	365.646	416.654	457.304	469.893

Sumber: Database SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2020

Jika merujuk pada data historis kepemilikan KTP Elektronik, grafiknya menunjukkan angka yang masih fluktuatif. Pada tahun 2015 persentase kepemilikan E-KTP sebesar 83,46%. Sempat mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2016 menjadi 96,49%, lalu kemudian menurun di tahun

2017 menjadi 93,05%. Hingga tahun 2019 realisasi kepemilikan E-KTP menjadi sebesar 97,69%.

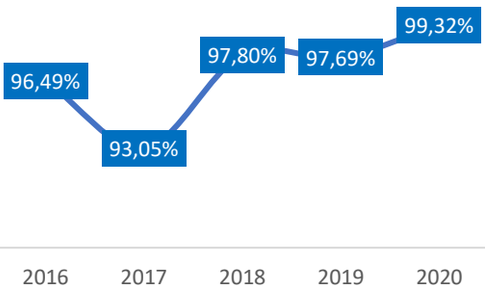

Gambar 2.72 Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Masih naik turunnya cakupan kepemilikan E-KTP disebabkan karena masih adanya kendala yang dihadapi ketika pelaksanaannya di lapangan. Salah satunya adalah belum optimalnya sosialisasi administrasi kependudukan khususnya perubahan kebijakan pelayanan kependudukan. Terdapat perubahan aturan terkait kependudukan yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Sebagai contoh diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 sehingga pembuatan KTP Elektronik tidak perlu surat pengantar dari RT/RW. Lalu aturan lainnya misalnya dalam Permendagri 119 tahun 2019 yang saat ini tidak lagi menggunakan kertas security printing tetapi dicetak diatas kertas HVS putih 80 gram serta dapat dicetak secara mandiri oleh masyarakat. Hal ini masih belum banyak dipahami oleh masyarakat. Sehingga terkadang membuat pelaksanaannya yang seharusnya menjadi lebih mudah menjadi terhambat karena belum pahamnya masyarakat terkait aturan baru tersebut.

Disamping itu, dalam merespon kondisi pandemi covid-19 yang terjadi, pemerintah juga melakukan perubahan pelayanan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan perubahan signifikan terkait dengan prosedur pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Jika sebelumnya dilakukan melalui tatap muka, saat ini pelayanan dilakukan secara daring/online. Masyarakat yang belum terbiasa melakukan pelayanan secara daring mengalami kesulitan dalam mengajukan permohonan pelayanan yang disebabkan belum memahami prosedur. Hambatan lainnya adalah terbatasnya gadget yang digunakan masyarakat untuk menggunakan layanan online tersebut.

Adapun dalam hal kepemilikan akta kelahiran, berdasarkan laporan kepemilikan akta kelahiran anak umur 0 – 18 tahun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa pada kurun waktu 2016 sampai dengan 2020 terjadi peningkatan cakupan kepemilikan akte kelahiran anak sebesar 9,91%. Hal tersebut menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepemilikan akta kelahiran bagi anak-anak dalam rangka pemenuhan hak sipil mereka dan untuk kemudahan dalam segala urusan terutama pendidikan, kesehatan dan sosial.

Tabel 2.57 Data Kepemilikan Akta Kelahiran Untuk Penduduk Usia Anak Tahun 2016 – 2020

No	Kecamatan	Jml Penduduk Usia 0 – 18 Tahun					Jml Penduduk usia 0 – 18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran s/d tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Balikpapan Timur	25.580	25.704	26.228	27.065	31.257	22.019	21.527	22.451	24.487	28.387
2	Balikpapan Barat	29.716	30.345	28.593	28.791	31.853	26.576	26.192	26.477	28.171	30.359
3	Balikpapan Utara	49.400	47.933	49.546	50.804	56.885	41.694	41.288	42.502	46.678	53.591
4	Balikpapan Tengah	32.986	32.103	31.396	30.778	33.151	29.182	28.129	27.917	29.454	31.636
5	Balikpapan Selatan	43.606	42.028	43.456	43.984	48.985	36.282	35.330	35.938	38.300	44.300
6	Balikpapan Kota	25.861	24.737	24.977	24.030	26.043	22.315	21.439	21.311	21.997	24.172
Jumlah		207.149	202.850	204.196	205.452	228.174	178.068	173.905	176.596	189.087	212.445

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2020

Jika merujuk pada data historis dari tahun 2016 hingga tahun 2020, cakupan kepemilikan akta kelahiran menunjukkan tren peningkatan yang cukup baik setiap tahunnya. Pada tahun 2016 cakupan kepemilikan akta kelahiran masih berada diangka 82,96%. Lalu meningkat menjadi 85,74% pada tahun 2017. Hingga tahun 2020 angkanya sudah mencapai 92,87%. Realisasi tahun 2020 ini sudah melampaui target akhir RPJMD pada tahun 2021 yaitu 90%.

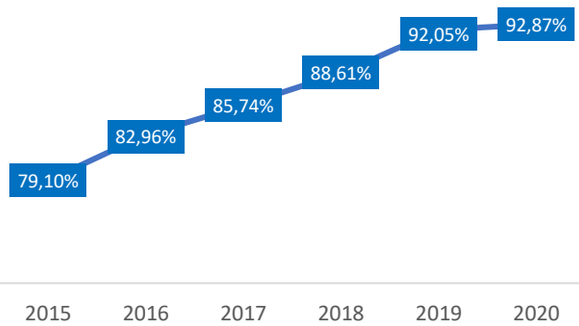

Gambar 2.73 Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selain penerbitan akta kelahiran dan KTP Elektronik, indikator lainnya yang digunakan untuk melihat kinerja administrasi kependudukan dan catatan sipil adalah penerbitan akta kematian dan kartu identitas anak. Untuk penerbitan akta kematian menunjukkan grafik fluktuatif. Pada tahun 2017 angka masih sebesar 95,11%. Angka ini kemudian meningkat signifikan menjadi 99,31% di tahun 2018. Akan tetapi terjadi penurunan pada tahun 2019 menjadi 97,04%. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 88,90%. Hal ini terjadi disebabkan masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang manfaat kepemilikan akte kematian dalam pengurusan surat-surat penting lainnya terkait dengan urusan kepegawaian, perwarisan dan perbankan. Sedangkan untuk cakupan kepemilikan kartu identitas anak mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 2.58 Cakupan Penerbitan Akta Kematian dan Kartu Identitas Anakdi Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Penerbitan Akta Kematian	-	95,11%	99,31%	97,04%	88,90%
Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak	30,86%	-	32,71%	56,13%	63,22%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pada tahun 2016 capaiannya sebesar 30,86%, angka ini terus mengalami peningkatan hingga mencapai 63,22% pada tahun 2020. Terkait dengan capaian kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) yang masih rendah , hal ini disebabkan

karena program KIA baru diluncurkan pada tahun 2016. Dan Kota Balikpapan mulai melaksanakan program pencetakan KIA pada tahun 2018 melalui inovasi 3 in I dan pencetakan massal bagi siswa SD pada tahun 2019 dan 2020.

2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Kota Balikpapan memiliki 4 (empat) lembaga pemberdayaan masyarakat, baik yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan program pembangunan dari kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Keempat lembaga tersebut antara lain:Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM). Dimana pada setiap Kelurahan dan Kecamatan di Kota Balikpapan memiliki masing-masing 1 (satu) lembaga dari ke-empat lembaga pemberdayaan masyarakat tersebut, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.59 Data Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Balikpapan Tahun 2020

No	Nama Lembaga	Jumlah	
		Kecamatan	Kelurahan (lembaga)
1	LPM	6	34
2	PKK	6	34
3	Karang Taruna	6	34
4	LKM	6	34

Sumber: DP3AKB Kota Balikpapan

Selain kelembagaan pemberdayaan masyarakat, indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembinaan pemberdayaan masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, dan infrastruktur di wilayah permukiman. Hal ini terlihat dari kenaikan yang cukup signifikan swadaya masyarakat dalam kegiatan sosial, budaya, keagamaan, kebersihan lingkungan dan pembangunan infrastruktur permukiman berupa barang dan jasa maupun dana selama kurun waktu 2016 – 2020, sebagaimana tabel dibawah ini berikut ini

Tabel 2.60 Dana Swadaya Masyarakat Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

No	Tahun	Dana Swadaya Masyarakat
1	2016	Rp 93.971.882.000
2	2017	Rp 88.615.487.049
3	2018	Rp 93.338.387.000
4	2019	Rp100.738.092.285
5	2020	Rp 83.875.636.859
Jumlah		Rp 460.539.485.193

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kota Balikpapan, 2021
*) dari 27 kelurahan.

2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jumlah penduduk di Kota Balikpapan berdasarkan usia yang dominan adalah pada usia produktif, yaitu sebesar 88% dari total penduduk pada tahun 2020, sedangkan untuk kelompok usia balita hanya 8% dan 4% untuk lansia. Hal ini berarti Kota Balikpapan berada dalam fase bonus demografi, dimana jumlah penduduk produktif atau angkatan kerja (usia 15-64 tahun) lebih besar

dibandingkan penduduk yang tidak produktif (di bawah 5 tahun dan di atas 64 tahun). Penduduk merupakan komponen atau aspek yang strategis dalam mendorong dinamika kemajuan daerah dan bangsa, sehingga keberadaannya merupakan modal dasar pembangunan. Oleh karena itu pembangunan yang dirancang haruslah pembangunan yang "*population-responsive*", atau ada yang menyebut "*people centered development*" yaitu pembangunan yang senantiasa mengacu atau merujuk kepada dinamika dan tren perkembangan kependudukan Kependudukan. Strategisnya masalah kependudukan diakui oleh seluruh negara termasuk Indonesia, sehingga pada akhirnya dalam sidang Persatuan bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 1989 disepakati sebagai hari kependudukan.

Pembangunan kependudukan yaitu upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan. Secara garis besar pembangunan kependudukan meliputi 5 (lima) pilar pokok yaitu: 1) Pengendalian kuantitas penduduk, 2) Peningkatan Kualitas Penduduk, 3) Pembangunan Keluarga, 4) Pengarahan Mobilitas, 5) Pengembangan sistem informasi kependudukan.

Persentase pemakai alat kontrasepsi selalu mengalami kenaikan sejak tahun 2016 – 2020, dimana pada tahun 2020, 70,61% telah menggunakan alat kontraspesi. Namun, terdapat beberapa kendala terkait pemakaian alat kontrasepsi ini di masyarakat, seperti masih adanya kelompok masyarakat (PUS kategori *unmet need*) yang beranggapan bahwa menggunakan alat kontrasepsi KB itu bertentangan dengan pemahaman agama yang dimiliki, khususnya di wilayah Balikpapan Utara dan Balikpapan Timur.

Tabel 2.61 Jumlah Akseptor KB Aktif Menurut Kecamatan di Kota BalikpapanTahun 2016-2020

Jenis Kontrasepsi	Tahun	Kecamatan						Jumlah
		Timur	Barat	Utara	Tengah	Selatan	Kota	
IUD	2016	564	1.378	3.864	2.045	1.585	1.719	12.155
	2017	621	1.449	3.442	2.195	1.629	1.029	10.365
	2018	678	1.170	4.149	2.323	1.801	1.156	11.277
	2019	760	1.228	3.950	2.476	1.902	1.414	11.730
	2020	821	1.195	3.426	2.545	1.931	1.211	11.129
MOW	2016	247	261	1.135	593	425	391	3.052
	2017	246	276	727	589	525	428	2.791
	2018	259	240	890	587	599	443	3.018
	2019	292	242	957	597	652	446	3.186
	2020	320	242	720	572	655	447	2.956
MOP	2016	14	15	85	57	17	10	198
	2017	16	17	20	57	19	13	142
	2018	16	16	20	54	19	13	138
	2019	16	16	21	57	20	13	143
	2020	14	14	20	47	20	15	130
Kondom	2016	276	259	1.159	626	781	174	3.275

Jenis Kontrasepsi	Tahun	Kecamatan						Jumlah
		Timur	Barat	Utara	Tengah	Selatan	Kota	
	2017	267	243	1.443	600	748	417	3.718
	2018	263	255	1.596	586	806	433	3.939
	2019	281	260	1.714	616	898	435	4.204
	2020	290	247	1.416	463	926	468	3.810
IMPT	2016	644	426	1.365	875	617	665	4.592
	2017	719	469	943	1.081	748	328	4.288
	2018	778	463	1.110	1.217	915	394	4.877
	2019	751	498	1.170	1.232	1.437	446	5.534
	2020	816	520	984	1.112	1.085	418	4.935
STK	2016	3.613	5.890	6.091	4.799	5.829	2.735	28.957
	2017	3.734	6.179	6.266	4.604	5.393	3.321	29.497
	2018	3.835	5.428	6.652	4.600	5.695	3.474	29.684
	2019	4.041	5.384	7.556	5.175	5.891	3.597	31.644
	2020	4.102	5.406	8.470	4.947	5.991	3.810	32.726
PIL	2016	2.216	3.414	3.557	2.590	4.430	1.842	18.049
	2017	2.224	3.594	4.529	2.442	3.090	1.401	17.280
	2018	2.203	3.322	4.334	2.756	3.188	1.410	17.213
	2019	2.209	3.246	4.522	2.444	3.273	1.440	17.134
	2020	2.154	3.043	4.612	2.550	3.321	1.477	17.157

Sumber: DP3AKB Kota Balikpapan, 2020

Sementara itu berdasarkan jumlah akseptor yang digunakan, pada tahun 2020, jenis kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh akseptor KB aktif adalah suntik (STK) yaitu sebanyak 32.726 orang. Penggunaan suntik dianggap dapat lebih efektif dan lebih mudah digunakan oleh penduduk yang sedang mengikuti program keluarga berencana.

Tabel 2.62 Persentase Pasangan Usia Subur dan Akseptor Keluarga Berencana Tahun 2016 - 2020

No.	Kecamatan	% PUS yang berKB aktif				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Balikpapan Utara	65,64%	65,47%	70,63%	74,39%	74%
2.	Balikpapan Selatan	67,77%	63,01%	65,36%	68,36%	69%
3.	Balikpapan Kota	69,56%	63,57%	65,82%	67,49%	69%
4.	Balikpapan Timur	69,53%	70,30%	70,23%	69,44%	70%
5.	Balikpapan Barat	66,81%	68,48%	67,92%	68,98%	69%
6.	Balikpapan Tengah	71,86%	68,82%	70,15%	68,37%	70%
Jumlah		68,05%	66,32%	68,35%	70,02%	71%

Sumber: DP3AKB Kota Balikpapan, 2020

Jumlah Pasangan Usia Subur di Kota Balikpapan menurun dari tahun 2019 sebanyak 105.081 menjadi 103.169 pada tahun 2020. Sama halnya dengan jumlah akseptor aktif yang mengalami penurunan pada tahun 2020 sebanyak 72.843 dibandingkan pada tahun 2019 sebanyak 73.575. jumlah akseptor aktif terbanyak di Kecamatan Balikpapan Utara. Peningkatan akseptor aktif seiring dengan peningkatan persentase PUS yang ber KB aktif yaitu pada tahun 2019

sebesar 70,02% meningkat menjadi 71% pada tahun 2020. Persentase tertinggi di Kecamatan Balikpapan Utara.

Tingkat kepesertaan KB usia subur didominasi oleh suntik, pil KB, dan IUD. Namun, IUD justru jarang dipakai karena ada ketakutan dalam diri masyarakat, sehingga yang paling diminati adalah KB suntik. Oleh karena itu, perlu peran dari mitra terkait dalam rangka membudayakan MKJP bukan hanya peran Pil KB namun juga Fasilitas Kesehatan untuk mengedukasi guna mengarahkan pasangan usia subur menggunakan MKJP. MKJP lebih aman dan dapat dipakai hingga jangka panjang, sedangkan suntik hanya satu bulan dan tiga bulan.

Capaian proporsi wanita usia subur yang tidak menggunakan alat KB mengindikasikan jumlah wanita usia subur yang sudah berstatus kawin tetapi tidak menggunakan alat KB. Pada tahun 2020 terdapat 14,04% proporsi wanita usia subur dalam status kawin yang tidak menggunakan KB.

Namun, terdapat beberapa catatan permasalahan antara lain masih adanya kelompok masyarakat (PUS kategori *unmet need*) yang belum bisa secara optimal/ intensif dilakukan penyuluhan KB oleh Penyuluh KB, khususnya di wilayah permukiman elite (kalangan menengah keatas) dan beberapa pondok pesantren di wilayah Kecamatan Balikpapan Timur maupun Balikpapan Utara.

Persentase peningkatan kelompok kegiatan yang mendukung program KKBPK menunjukkan kenaikan sejak tahun 2016 – 2020, dimana dari 4,52% pada tahun 2017 menjadi 8,50% pada tahun 2020. Sebaliknya, terkait dengan kelompok pemuda yang mendukung kegiatan KKBPK, jumlahnya mengalami tingkat yang fluktuatif, dimana pada tahun 2020 terdapat 1,04% kelompok pemuda yang mendukung kegiatan KKBPK. Angka ini mengalami penuruanan jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 1,59%.

Persentase jumlah keluarga yang telah terpapar program pemahaman terhadap fungsi keluarga terus mengalami peningkatan sejak tahun 2017-2019. Pada tahun 2019, capaian keluarga yang terpapar terkait program fungsi keluarga sebesar 8%. Namun angka ini mengalami penurunan menjadi 4,07% pada tahun 2020.

Persentase remaja yang terpapar program keluarga berencana mengalami jumlah yang fluktuatif, dimana pada tahun 2018 naik menjadi 4,72% dari tahun 2017 sebesar 1,51%, sebelum terus mengalami penurunan hingga tahun 2020 menjadi 1,13%.

Selain itu, terkait program pengendalian penduduk dan keluarga berencana ke depan, terdapat beberapa catatan permasalahan, seperti masih terdapat perkawinan pada usia anak/remaja di bawah 21 tahun. Hal ini berbahaya dikarenakan aspek kesehatan reproduksi seorang perempuan layak melahirkan pertama kali usia 20 tahun ke atas dan menikah pada umur 20. Meskipun ada UU perkawinan, bahwa perempuan maupun laki-laki dapat

menikah usia 19 tahun, minimnya dana untuk sarpras pendukung, seperti kendaraan operasional yang serba terbatas dan alat peraga penyuluhan yang sangat minim da hanya tergantung pada penyediaan dana dari DAK. Tahun 2021, DAK tidak dialokasikan untuk alat peraga penyuluhan namun untuk pengadaan pelayanan KB di Faskes, selain itu sarana Kartu Identitas Anak (KIA) juga sangat minim, laju pertumbuhan penduduk cenderung meningkat yang dominan disebabkan faktor migrasi, dan perlunya pengadaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK).

Tabel 2.63 Capaian Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (*Contraceptive Prevalence Rate* / CPR)	68,05%	66.32%	68.53%	70,02%	70,61%
Proporsi / Persentase Wanita Usia Subur dalam status kawin yang tidak menggunakan alat kontrasepsi KB (*Unmet Need*)	16,35%	18,10%	15,64%	14,49%	14,04%
Persentase Keluarga terpapar pemahaman tentang fungsi keluarga	-	4,52%	5,32%	8.00%	4,07%
Persentase remaja terpapar tentang Program Generasi Berencana	-	1,51%	4,72%	1,59%	1,13%
Peningkatan Persentase Kelompok Kegiatan (POKTAN) dan Pendukung Program KKBPK	-	4,52%	5,32%	8.00%	8,5%
Peningkatan Jumlah Kelompok Remaja Pendukung KKBPK (PIK R/M)	-	1,51%	4,72%	1,59%	1,04%

Sumber: DP3AKB Kota Balikpapan, 2020

2.3.2.9 Perhubungan

Sebagai pintu gerbang Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan merupakan simpul transportasi dengan adanya Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, Pelabuhan Internasional Semayang dan Pelabuhan Internasional Peti Kemas Kariangau, sedangkan untuk transportasi darat dihubungkan melalui jalan baik jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kota. Panjang ruas jalan Kota Balikpapan berdasarkan Surat Keputusan Kota Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-415/2016 tanggal 27 September 2016 Tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kota Balikpapan adalah sepanjang 501,180 KM. Sementara Jalan Provinsi yang melalui Kota Balikpapan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 622/K.295/2018 Tanggal 25 Juni 2018 Tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi adalah Jalan KM 5,5 Balikpapan-Kariangau sepanjang 10,51 KM dan Jalan Mulawarman sepanjang 16,21 KM. Sementara menurut Kep.Men PUPR Nomor.290/KPTS/M/2015 Jalan Nasional yang berada di Kota Balikpapan antara lain: Jalan Sudirman sepanjang 8,07 KM, Jalan Iswahyudi sepanjang 4,06 KM, Syarifuddin Yoes (JL. Ke Airport) 5,69 KM, JLN. MT. Haryono / Ring Road 2,75 KM, dan JLN. Soekarno-Hatta sepanjang 25,09 KM.

Dalam hal penyelenggaran transportasi darat, jumlah kendaraan di Kota Balikpapan terus mengalami pertumbuhan seiring dengan peningkatan aktivitas perekonomian Kota Balikpapan. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota

Balikpapan, kendaraan di Kota Balikpapan masih kendaraan pribadi masih mendominasi jika dibandingkan dengan kendaraan umum.

Tabel 2.64 Banyaknya Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (Unit) Di Kota Balikpapan Tahun 2020

Jenis Kendaraan	Bukan Umum	Umum	Dinas	Jumlah
Sedan	86	2836	1823	13259
Station Wagon	28576	5299	2658	36533
Mini Bus	2419	2549	1266	6234
Jeep	10458	2419	2749	15626
Lain-lain	426	131	125	682
Mobil Penumpang	41965	13234	8621	72334
Bus	866	503	212	1581
Micro Bus	12169	401	473	13043
Bus Bertingkat	-	-	-	-
Lain-lain	23	120	19	162
Mobil Bus	13058	1024	704	14786
Pick Up	1463	1405	1789	17824
Deliver Van	2078	1002	712	3792
Truck	9727	4019	1825	15571
Tangki	5451	1318	804	7573
Double Cabin	3245	1369	1122	5736
Lain-lain	253	32	52	337
Mobil Barang	22217	9145	6304	50833
Sepeda Motor Solo	38987	12563	1126	413693
Sepeda Motor dgn Kereta Samping	993	554	497	2044
Sepeda Motor Roda Tiga	-	-	-	-
Scooter	12847	9769	6525	29141
Trail	3641	9817	639	52617
Lain-lain	386	199	276	861
Sepeda Motor	56854	32902	9063	498356
Mobil Pemadam Kebakaran	155	137	141	433
Mobil Ambulance	211	97	97	405
Mobil Jenazah	99	99	48	246
Fork Lift	45	50	43	138
Lain-lain	0	-	-	-
Kendaraan Khusus	510	383	329	1222
JUMLAH	134604	56688	25021	637531

Sumber: Dishub Kota Balikpapan, 2021

Adapun mengenai penyelenggaraan angkutan, jumlah angkutan kota di Kota Balikpapan mengalami penurunan dari 1.807 unit pada tahun 2016 menjadi 782 unit, hal ini seiring dengan rencana peremajaan angkutan kota dan penyelenggaraan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM) yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Balikpapan meskipun jumlah koridor SAUM dari tahun 2016 hingga tahun 2020 belum mengalami penambahan yaitu berjumlah 1 koridor yang melayani jalur Pelabuhan Ferry Kariangau – Terminal Batu Ampar. Berkurangnya jumlah angkutan kota dan belum tersedianya SAUM yang belum optimal mengakibatkan rasio angkutan kota terhadap jumlah kendaraan semakin menurun dari 0,33% pada tahun 2016 menjadi 0,12% pada tahun 2020.

Tabel 2.65 Perbandingan Angkutan Kota terhadap Jumlah Kendaraan

	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Angkutan Kota	1.807	1.755	1.754	1.215	782
Jumlah Kendaraan	553.528	572.976	588.911	610.819	637.531
Rasio Angkutan Kota terhadap Jumlah Kendaraan	0,33%	0,31%	0,30%	0,20%	0,12%

Sumber: Dishub Kota Balikpapan, 2021

Pengembangan SAUM ini berfungsi untuk mendukung tujuan 11 sasaran 2 SDGs yaitu menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan

keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua. Perencanaan Koridor SAUM masih bersinggungan dengan rute angkutan kota yang menyebabkan akan terjadinya konflik kepentingan dan kondisi jalan di Kota Balikpapan yang curam dan kurang lebar juga menyebabkan sulitnya pengembangan moda transportasi publik.

Sama halnya dengan penyelenggaraan angkutan, penyelenggarana perlengkapan dan prasaran jalan juga tidak mengalami penambahan yang signifikan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 seperti jumlah ATCS dan panjang jalur sepeda. Hal ini perlu diperkuat untuk beberapa tahun ke depan untuk mengantisipasi kepadatan lalu-lintas di Kota Balikpapan dan mewujudkan Kota Balikpapan Nyaman Dihuni dan sebagai *Smart City*.

Tabel 2.66 Jumlah Fasilitas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Angkutan Kota	1.807	1.755	1.754	1.215	782
Jumlah Koridor SAUM	1 (Pelabuhan Ferry Kariangau – Terminal Batu Ampar)	1 (Pelabuhan Ferry Kariangau – Terminal Batu Ampar)	1 (Pelabuhan Ferry Kariangau – Terminal Batu Ampar)	1 (Pelabuhan Ferry Kariangau – Terminal Batu Ampar)	1 (Pelabuhan Ferry Kariangau – Terminal Batu Ampar)
Jumlah Halte SAUM	14	14	14	14	14
Jumlah Rambu	2.191	2.306	2.447	3.229	3.848
Jumlah ATCS	15	15	15	15	15
Panjang Jalur Sepeda	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Sumber: Dishub Kota Balikpapan, 2021

Sementara data kecelakaan tidak ditampilkan mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi kejadian kecelakaan, seperti kondisi kendaraan, kondisi jalan, perilaku dan kondisi pengendara sehingga tidak dapat dijustifikasi menjadi kinerja urusan perhubungan.

2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari sub urusan informasi dan komunikasi publik serta aplikasi infomatika.

Untuk penyelenggaraan sub urusan informasi dan komunikasi public dapat digambarkan melalui kinerja penyelenggaraan saluran informasi Pemerintah Kota Balikpapan sebagai alat deseminasi konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemerintah Daerah. Saat ini sudah memiliki saluran informasi yang resmi yaitu melalui portal http://balikpapan.go.id. Selain itu berbagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan juga mempunyai berbagai

saluran informasi melalui website instansi masing-masing. Selain portal resmi, Pemerintah Kota Balikpapan juga memiliki beberapa saluran informasi lainnya berupa media sosial untuk membangun interaksi bersama warganya. Media sosial tersebut yaitu, Fanpage Facebook http://www.facebook.com/pemkotbpn, instagram pemkot_balikpapan, twitter @PemkotBPN, layanan SMS dan Whatsapp 08115440542 dan Aplikasi berbasis andorid *Digital Government* Info Balikpapan.

Tabel 2.67 Data Menara Telekomunikasi Kota Balikpapan Tahun 2017-2020

No	Penyedia Menara	Jumlah Menara Telekomunikasi			
		2017	2018	2019	2020
1	PT. Telkomsel	54	54	112	112
2	PT. Indosat	46	46	46	46
3	PT. Xl Axiata	15	14	19	14
4	PT. Protelindo	82	82	82	82
5	PT. Centratama Menara Indonesia	6	11	13	13
6	PT. Dayamitra Telekomunikasi	40	42	51	51
7	PT. Hutcison 3 Indonesia	17	17	18	18
8	PT. Inti Bangun Sejahtera	1	1	7	7
9	PT. Solusi Tunas Pratama	24	24	33	33
10	PT. Tower Bersama Grup	59	59	73	73
11	PT. Anugrah Comunication	-	3	4	4
12	PT. Komet Infra Nusantara	-	6	6	6
13	PT. Persada Sokka Tama		1	1	1
JUMLAH		344	360	465	460

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021

Selain media sosial, Pemerintah Kota Balikpapan juga memiliki Balikpapan 112, yaitu sebuah nomor tunggal panggilan darurat yang dapat dimanfaatkan oleh warga saat terjadi keadaan darurat, seperti kebakaran, bantuan evakuasi medis, dan tindakan kejahatan. Adanya saluran informasi ini berpengaruh pada meningkatnya respon pemerintah Kota Balikpapan atas pengaduan masyakat dari 80% pada tahun 2017 menjadi 94% pada tahun 2020.

Tabel 2.68 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase cakupan Pengawasan Infrastruktur telekomunikasi	%	-	80%	85%	90%	83%
Persentase Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah	%	-	90%	90%	90%	84%
Persentase Tanggapan atas Pengaduan Masyarakat	%	-	80%	80%	80%	94%

Sumber: Dinas Kominfo Tahun 2021

Terkait dengan pengawasan infrastruktur telekomunikasi, persentase cakupan pengawasan infrastruktur menunjukkan peningkatan dari 80% pada tahun 2017 menjadi 83% pada tahun 2020. Jumlah menara telekomunikasi di Kota Balikpapan pada tahun 2017 sebanyak 344 menara dari 10 perusahaan penyedia menjadi menjadi 460 menara pada tahun 2020 dari 13 perusahaan penyedia. Meskipun jumlahnya terus meningkat namun masih belum diketahui berapa kebutuhan ideal menara di Kota Balikpapan dikarenakan belum adanya kajian.

Untuk penyelenggaraan sub urusan aplikasi informatika dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan pemerintah Kota Balikpapan. Hingga saat ini 90% OPD telah memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah. Selain itu 80% layanan publik dan internal yang diselenggarakan secara online dan/atau terintegrasi. Hal ini perlu terus ditingkatkan mengingat kebutuhan sebagai *Smart City* untuk peningkatan pelayanan serta perkembangan informasi teknologi yang kian pesat. Pembangunan berbasis *Smart City* menyediakan ruang inovasi yang luas untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, masyarakat, pelaku bisnis, dunia pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) lain.

2.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tabel 2.69 Jumlah Koperasi Aktif Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

Uraian	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Koperasi	Unit	440	436	435	438	478

Sumber: DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2021

Koperasi aktif di Kota Balikpapan pada tahun 2016 sebanyak 440 unit, mengalami penurunan di tahun 2017 dan 2018 masing-masing menjadi 436 unit dan 435 unit. Kemudian mengalami peningkatan kembali di tahun 2019 menjadi 438 unit dan 478 unit di tahun 2020, sebagaimana tergambar pada tabel di atas.Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Balikpapan mengalami trend kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 hanya berjumlah 1.035 usaha, meningkat pesat menjadi 4.689 usaha di tahun 2020. Kecamatan Balikpapan Utara menjadi kecamatan dengan jumlah UMKM terbanyak yaitu 2.194 usaha. Kemudian Kecamatan Balikpapan Selatan dengan 1.337 usaha. Lalu disusul oleh Kecamatan Tengah dengan 563 usaha.

Tabel 2.70 Jumlah UMKM di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

Kecamatan	UMKM				
	2016	2017	2018	2019	2020
Balikpapan Selatan	N/A	230	373	407	1337
Balikpapan Kota	N/A	63	125	162	68
Balikpapan Timur	N/A	36	247	206	386
Balikpapan Utara	N/A	362	169	206	2194
Balikpapan Tengah	N/A	273	223	271	563
Balikpapan Barat	N/A	71	80	195	141
TOTAL	N/A	1.035	1.217	1.447	4.689

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2021, BPS Kota Balikpapan

Jumlah unit usaha yang mengalami trend kenaikan, sejalan dengan jumlah tenaga kerja yang terserap dan jumlah omsetnya. Pada tahun 2016 jumlah tenaga kerja UMKM sebanyak 1.936 orang, sempat mengalami penurunan

menjadi 1.897 orang, jumlahnya kembali meningkat menjadi 2.840 orang pada tahun 2019.

Tabel 2.71 Perkembangan UMKM Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Unit Usaha					
Mikro	957	803	900	1.398	19.812
Kecil	11	232	174	22	2961
Menengah	0	0	0	0	272
Jumlah	968	1.035	1.074	1.420	23.045
Tenaga Kerja (orang)					
Mikro	1.914	1.405	2.148	2.746	N/A
Kecil	22	492	0	44	N/A
Menengah	0	0	0	0	N/A
Jumlah	1.936	1.897	2.148	2.840	N/A
Omzet (Rp Juta)					
Mikro	38.303	8.106	0	60.064	N/A
Kecil	238.011	24.026	0	13.774	N/A
Menengah	0	0	0	0	N/A
Jumlah	276.314	32.132	0	73.838	N/A

Sumber: DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2021

Upaya promosi produk UMKM melalui kerja sama dengan perusahaan, toko swalayan, ataupun retail modern lainnya mengalami trend kenaikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Dimana pada tahun 2016 hanya sebanyak 100 UMKM yang bermitra, naik menjadi 170 UMKM pada tahun 2020.Dari sisi akses pinjaman permodalan bagi UMKM di Kota Balikpapan, presentase kredit di perbankan mengalami trend kenaikan pada tahun 2016, 2017 hingga 2018, kemudian mengalami penurunan di tahun 2019 dan 2020. Berikut merupakan tabel capaian kinerja urusan Koperasi UMKM tahun 2016-2020.

Tabel 2.72 Capaian Kinerja Urusan Koperasi UMKM 2016-2020

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah UMKM yang bermitra dengan perusahaan	UMKM	100	125	135	150	170
Persentase Jumlah Koperasi aktif	Persen	80	80	80	84,19	87,86
Persentase kredit UMKM di Bank	Persen	36	36,41	37,80	36,74	36,50
Jumlah Pengurus/pengawas/pengelola Koperasi bersertifikat	Orang	90	66	100	60	60

Sumber: Dinas Perindustrian Koperasi UMKM Tahun 2021

Adapun upaya peningkatan kualitas KUMKM ini sejalan dengan tujuan SDGs. Dalam SDGs tujuan ke 8 yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua, terdapat sasaran menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.

2.3.2.12 Penanaman Modal

Pesatnya pembangunan dan pengembangan infrastruktur berdampak pada semakin luasnya lingkup pelayanan jasa Kota Balikpapan kedepannya. Selain itu, insensitas yang tinggi dari berbagai pertemuan, pameran dan konferensi baik skala regional, nasional maupun internasional menjadikan Kota

Balikpapan dikenal sebagai Kota MICE (*Meeting, Incentive, Conference and Exhibition*) yang memperkuat peran dan fungsi Kota Balikpapan sebagai kota terkemuka. Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap iklim investasi di Kota Balikpapan.

Oleh karenanya diperlukan penguatan daya saing investasi daerah yang didukung oleh faktor-faktor kunci daya saing investasi yaitu sumber daya manusia yang berdaya saing dengan makna ketersediaan tenaga kerja baik dari sisi kuantitas maupun kualitas tenaga kerja, infrastruktur yang berkualitas dan didukung oleh teknologi yang mampu mengurangi biaya faktor-faktor produksi.

Jika melihat realisasi investasi di Kota Balikpapan hingga sejauh ini sudah cukup baik. Investasi dari modal dalam negeri dan modal asing walaupun setiap tahunnya mengalami fluktuasi angka, akan tetapi jumlahnya cukup banyak dengan penyerapan tenaga yang juga cukup besar. Pada tahun 2016, investasi dari modal dalam negeri hanya sebesar Rp255,04 Miliar. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi Rp16,03 Miliar, kemudian terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2018 hingga mencapai Rp13,85 Triliun pada tahun 2020. Sementara investasi dari modal asing juga tidak kalah dengan modal dalam negeri. Pada tahun 2016, jumlah penanaman modal asing sebanyak Rp5,59 Triliun. Akan tetapi pada tahun-tahun berikutnya angka ini mengalami penurunan. Hingga tahun 2020, jumlah investasi modal asing sebesar Rp519,75 Miliar.

Tabel 2.73 Realisasi Investasi Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Penanaman Modal Dalam Negeri (juta rupiah)	255,04	16,03	26,71	2.500,51	13.849,41
Penanaman Modal Asing (juta rupiah)	5.585,14	2.284,44	865, 60	374,61	519,75
Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia	2.058	538	760	2.469	7.023
Penyerapan Tenaga Kerja Asing	41	29	21	31	56

Sumber: DPMPT Kota Balikpapan Tahun 2021

Jika dijabarkan menurut sektor usahanya, sektor kontruksi menjadi yang paling berkontribusi terhadap investasi di Kota Balikpapan. Selama periode tahun 2016-2020, realisasi investasi sektor kontruksi mencapai Rp8,057 Triliun. Lalu selanjutnya adalah sektor industri kimia dan farmasi yang berkontribusi sebanyak Rp6,963 Triliun, dibawah sektor ini terdapat sektor pertambangan dengan realisasi investasi sebesar Rp6,887 Triliun. Berikut adalah tabel rincian realisasi investasi dari setiap sektor usaha periode tahun 2016-2020:

Tabel 2.74 Realisasi Investasi Menurut Sektor Usaha Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 (juta rupiah)

Sektor Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	Total (2016-2020*)
Pertambangan	3.933.213,46	2.068.797,86	2.196,26	430.117,50	452.393,38	6.886.718,46
Listrik, Gas dan Air	-	-	-	107.930,00	6.032,72	113.962,72
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	23.328,33	14.389,40	7.211,84	132.795,20	19.225,30	196.950,07
Perdagangan dan Reparasi	77.723,89	38.112,46	32.796,04	190.848,80	186.669,30	526.150,49

Sektor Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	Total (2016-2020*)
Industri Makanan	560.346,53	1.242,18	472.546,98	29.337,00	193.597,26	1.257.069,95
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	542,10	-	75,04	-	-	617,14
Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya	1.790,32	783,90	-	-	-	2.574,22
Hotel dan Restoran	4.085,21	3.350,70	672,94	24.318,80	6.379,56	38.807,21
Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik	1.044.775,43	48.343,18	302,84	28.191,00	-	1.121.612,45
Jasa Lainnya	9.058,63	273,36	2.211,64	406.680,40	356.010,38	774.234,41
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	185.313,24	505,06	64.160,42	192.267,50	398.252,78	840.499,00
Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi	-	127.840,02	-	135.704,90	-	263.544,92
Peternakan	-	14.000,32	-	-	-	14.000,32
Konstruksi	-	-	1.216.254,84	1.170.531,50	5.669.960,30	8.056.746,64
Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	-	-	3.392,88	11.500,50	51.130,08	66.023,46
Industri Kayu	-	-	7.801,20	14.000,00	56.933,50	78.734,7
Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	-	-	-	657,00	-	657,00
Industri Lainnya	-	-	-	177,00	-	177,00
Listrik, Gas dan Air	-	-	-	63,00	-	63,00
Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	-	-	-	-	8.980,16	8.980,16
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	-	-	-	-	324,00	324,00
Industri Kimia dan Farmasi	-	-	-	-	6.963.271,80	6.963.271,80

Sumber: DPMPT Kota Balikpapan Tahun 2021

Fluktuasi realisasi investasi di Kota Balikpapan saling berkorelasi dengan pengelolaan perizinan yang diterapkan. Semakin baik pengelolaan perizinan tentu saja akan berkorelasi positif dengan peningkatan investasi. Beberapa indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana pengelolaan perizinan dilakukan seperti jumlah tingkat kepatuhan perizinan penanaman modal, persentase jumlah pelayanan perizinan yang terintegrasi secara online, persentase peningkatan jumlah LKPM PMA dan PMDN yang diterima, dan persentase penyelesaian masalah penanaman modal dan perizinan.

Untuk indikator jumlah tingkat kepatuhan perizinan penanaman modal dihitung melalui jumlah unit usaha yang melaporkan kegiatan usahanya melalui *platform* lkpmonline.go.id. Pada tahun 2016, jumlah unit usaha yang melaporkan kegiatan usahanya sebanyak 143 usaha. Angka ini mengalami peningkatan di tahun 2017 menjadi 175 usaha. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 151 usaha, namun pada tahun selanjutnya angka ini terus meningkat hingga mencapai 1.241 usaha pada tahun 2020. Grafik peningkatan

ini menunjukkan tingkat kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan usahanya semakin meningkat setiap tahunnya.

Selain itu upaya untuk melakukan reformasi perizinan melalui digitalisasi perizinan secara online salah satu indikator yang digunakan adalah persentase jumlah pelayanan perizinan yang terintegrasi secara online. Pada tahun 2016, realisasi indikator ini masih berada diangka 12%. Angka ini meningkat menjadi 19% pada tahun 2017. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2020 mencapai 41,25%. Tren peningkatan realisasi indikator ini menunjukkan bahwa upaya reformasi perizinan sudah semakin baik.

Indikator lainnya yang menunjukkan realisasi yang cukup baik adalah persentase penyelesaian masalah penanaman modal dan perizinan. Indikator ini memiliki realisasi yang konsisten di angka 100% yang berarti seluruh laporan terkait penanaman modal dan perizinan sudah ditindaklanjuti oleh *stakeholder* terkait.

Tabel 2.75 Capaian Kinerja Pengelolaan Perizinan Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Tingkat Kepatuhan Perizinan Penanaman Modal	143	175	151	315	1241
Persentase Jumlah Pelayanan Perizinan yang terintegrasi secara online	12%	19%	41,25%	41,25%	41.25%
Persentase Peningkatan Jumlah LKPM PMA dan PMDN yang diterima	43,00%	22,38%	-13,71%	108,61%	192.7%
Persentase Penyelesaian Masalah Penanaman Modal dan Perizinan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Tahun 2021

Walaupun dari segi pengelolaan perizinan sudah menunjukkan tren peningkatan yang cukup baik, akan tetapi tingkat kepuasan masyarakat masih mengalami fluktuasi angka. Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), pada tahun 2016 mencapai sebesar 91,78. Indikator SKM ini mengalami penurunan terendah di tahun 2017 menjadi 82,79 namun kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 89,00.

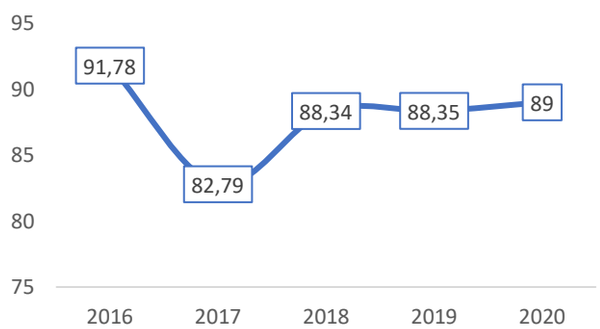

Gambar 2.74 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Urusan Penanaman Modal di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

2.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Capaian kinerja urusan kepemudaan dan olah raga dari tahun 2016 hingga 2020 berdasarkan indikator jumlah pemuda berprestasi seperti Paskibraka, Pemuda Pelopor jumlahnya terus meningkat, namun peningkatannya masih belum signifikan setiap tahunnya. Salah satunya diakibatkan modernisasi yang merubah perilaku sehingga cenderung menghambat prestasi pemuda. Oleh karena itu, perlu adanya arahan pemanfaatan teknologi informasi ke arah yang

positif dengan mengangkat kearifan lokal Kota Balikpapan melalui berbagai aplikasi.

Di Kota Balikpapan belum tersedia regulasi turunan UU No 40 tahun 2009 tentang kepemudaan. Disisi lain, implementasi Perpres No 66 Tahun 2017 tentang koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan masih belum efektif. Adanya pandemi covid-19 mengakibatkan pengangguran pemuda di Kota Balikpapan meningkat. Sektor ekonomi kreatif yang dominan diisi oleh pemuda menjadi terkendala sehingga berjalan lambat, oleh karena itu banyak pemuda beralih usaha ke sektor lainnya yang lebih diminati di masa pandemi covid-19.

Berdasarkan tujuan ke 8 SDGs tentang meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua, terdapat sasaran pada tahun 2030 yakni mencapai pekerjaan tetap dan produktif serta layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menciptakan kesempatan kerja terutama bagi pemuda untuk mengatasi tingkat pengangguran pemuda yang masih tinggi. Di tengah keterbatasan tersebut, pemuda Balikpapan masih menunjukkan prestasi dalam berbagai event dan bidang.

Di samping itu, jumlah atlet berprestasi terus mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2018 jumlahnya sebanyak 668 orang, angka ini terus mengalami penurunan hingga hanya 25 orang pada tahun 2020 seiring menurunnya event olahraga di masa pandemi covid-19. Prestasi atlet lokal diharapkan dapat mencapai level nasional atau internasional, yang perlu diimbangi pula dengan ketersediaan pelatih dari segi kualitas maupun kuantitas. Presentase ketersediaan sarana prasarana olahraga mengalami trend kenaikan dari tahun ke tahun hingga mencapai 91,12% di tahun 2020. Capaian kinerja urusan kepemudaan dan olah raga pada tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.76 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga 2016-2020

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Peningkatan jumlah pemuda berprestasi	Orang	-	48	53	57	31
Jumlah atlet berprestasi	Orang	0	0	668	566	25
Peningkatan prestasi olahraga	Medali	24	55	516	1.643	25
Presentasi ketersediaan sarana dan prasarana olah raga	Persen	-	91,02	91,07	91,04	91,12

Sumber: DPOP Kota Balikpapan, Tahun 2021

2.3.2.14 Statistik

Statistik berkualitas dan dapat diandalkan merupakan bagian yang sangat penting dalam proses perumusan suatu kebijakan. Data statistik tersebut harus terdokumentasi secara memadai yang selanjutnya dapat diolah menjadi informasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk perencanaan, pelaksanaan

dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Informasi yang dihasilkan dari pengolahan data tersebut harus memenuhi kriteria antara lain akurat, dapat dipercaya, lengkap, dapat diakses, tersedia tepat waktu dan mudah dimengerti. Dokumen-dokumen statistik ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan, diantaranya PDRB, IPM, Suseda, KBDA, Indeks Gini Rasio, Input Output, IKM dan IHK. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai ketersediaan dokumen statistik di Kota Balikpapan selama kurun waktu tahun 2016-2020.

Tabel 2.77 Ketersediaan Dokumen Statistik di Kota Balikpapan 2016 – 2020

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
1	PDRB	√		√		√		√		√	
2	IPM	√		√		√		√		√	
3	Suseda	√		√		√		√		√	
4	KBDA	√		√		√		√		√	
5	Indeks Gini Rasio	√		√		√		√		√	
6	Input Output		√		√		√		√		√
7	IKM	√		√		√		√		√	

Sumber: Bappedalitbang Kota Balikpapan Tahun 2021

Pada tujuan 17 SDGs tentang penguatan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan terdapat sasaran yang berkaitan dengan urusan statistik yaitu pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional. Sasaran RPJMN terkait dengan sasaran tersebut yaitu meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas.

2.3.2.15 Persandian

Pengelolaan persandian di pemerintah daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pengamanan data dan membantu fungsi pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan publik, terhadap ancaman berupa interupsi, intersepsi, modifikasi, serta fabrikasi data dan informasi. Pada tahun 2019 melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Kota Balikpapan menerapkan sertifikat elektronik bekerja sama dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi (BSSN) untuk menyelenggarakan tanda tangan digital sebagai pengaman kerawanan dalam transaksi elektronik untuk aplikasi e-office serta pada pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selain sertifikat elektronik juga dilakukan pengelolaan dan perlakukan terhadap informasi yang dikecualikan milik Perangkat Daerah yang bekerjasama dengan BSSN.

Tabel 2.78 Capaian Kinerja Urusan Persandian Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase OPD yang melakukan pengamanan informasi	%	-	-	25	50	61
Jumlah OPD yang telah dilakukan sistem pengamanan informasi	OPD	-	-	10	15	22

Sumber: Dinas Kominfo Tahun 2021

Hal ini ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Keputusan Walikota Nomor 188.45-39/2019 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Kota Balikpapan, terdapat 59 jenis informasi yang dikecualikan Pemerintah Kota Balikpapan. Selain itu kegiatan persandian di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dilakukan melalui kontra penginderaan yang bertujuan untuk pengamanan sinyal pada beberapa kegiatan penting atau bersifat terbatas.

Sampai dengan tahun 2020, OPD yang melakukan pengamanan informasi baru 61% meskipun meningkat dari tahun 2018 sebesar 25%. Pada tahun 2020 baru 19 OPD termasuk seluruh kecamatan yang sudah melakukan pengaman informasi yaitu:

1. Seluruh Kecamatan
2. Bagian Administrasi Pembangunan Setdakot, Bagian Perekonomian Setdakot, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Umum dan Perlengkapan, Bagian Organisasi, Bagian Hukum
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Bappeda Litbang
5. Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah
7. Dinas Perhubungan
8. Dinas Ketenagakerjaan
9. Dinas Kesehatan
10. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
11. Dinas Komunikasi dan Informatika
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
13. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
14. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
15. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
16. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
17. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
18. Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu
19. RSUD Beriman

2.3.2.16 Kebudayaan

Balikpapan adalah sebuah kota di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Sebagai pusat bisnis dan industri, kota ini memiliki perekonomian terbesar di

seluruh Kalimantan, Balikpapan berawal dari sebuah perkampungan nelayan di tepi Selat Makassar pada abad ke-19. Pengeboran pertama sumur minyak di kota ini dimulai pada 10 Februari 1897. Pada tahun 1907, Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) mendirikan kantor di kota ini, yang kemudian diikuti oleh masuknya investasi dari berbagai perusahaan multinasional. Perekonomian kota yang tumbuh sangat pesat memancing banyak pendatang dan ekspatriat ke Kota Balikpapan. Saat ini, Balikpapan telah menjadi kota besar yang multi-etnis, sampai dengan saat ini terdapat 188 paguyuban berada di Kota Balikpapan,

Pengelolaan urusan kebudayaan dapat diukur melalui dua indikator yaitu Peningkatan prestasi di bidang seni, budaya, dan keagamaan, serta Cagar budaya yang dilindungi. Adapun realisasi indikator prestasi di bidang seni, budaya, dan keagamaan pada 6 kegiatan pada tahun 2017-2019. Realisasi indikator prestasi tersebut mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi hanya 2 kegiatan saja yang dapat dilaksanakan karena kondisi pandemic covid-19.

Tabel 2.79 Prestasi di Bidang Seni, Budaya, dan Keagamaan

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Peningkatan prestasi di bidang seni, budaya, dan keagamaan	Kegiatan	1	6	6	6	2

Sumber:Disdikbud Kota Balikpapan, 2021

Indikator selanjutnya adalah cagar budaya yang dilindungi. Realisasi indikator ini menunjukkan adanya tren peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 terdapat 71 lokasi cagar budaya yang dilindungi. Realisasi ini meningkat menjadi 100 lokasi pada tahun 2017. Hingga tahun 2020 sudah terdapat 144 lokasi cagar budaya yang dilindungi.

Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah tidak semua cagar budaya lokasinya berada di lahan pemerintah, terdapat lokasi cagar budaya yang masuk kewenangan perusahaan, TNI/Polri, serta Pertamina sehingga sulit melakukan elaborasi dan promosi. Masalah lainnya yang dihadapi adalah anggaran kegiatan promosi cagar budaya belum maksimal karena terkendala wabah Covid-19. Upaya pelestarian cagar budaya telah dilakukan, namun pada tahun 2020 pandemi Covid-19 telah menimbulkan kendala untuk memaksimalkan pembangunan sarana dan prasarana cagar budaya pada tahun 2021.

Tabel 2.80 Jumlah Cagar Budaya yang Dilindungi

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Cagar budaya yang dilindungi	Lokasi	71	100	119	129	144

Sumber: Disdikbud Kota Balikpapan, 2021

2.3.2.17 Perpustakaan

Indikator efektivitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan. Berbagai upaya dan inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan adalah peningkatan jumlah koleksi buku, baik manual maupun elektronik,

penyediaan permainan edukatif, penyediaan sarana prasarana yang nyaman bagi pengunjung, mobil perpustakaan keliling dan planning gallery. Jumlah pengunjung perpustakaan mengalami tren penurunan sejak tahun 2018. Pada tahun 2016 jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 148.447 orang. Angka ini meningkat menjadi 202.263 orang pada tahun 2017. Sejak tahun 2018 sampai tahun 2020, terjadi penurunan jumlah kunjungan perpustakaan hingga menjadi 19.818 orang pada tahun 2020.

Penurunan drastis jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2019 disebabkan karena perpustakaan pernah 1 bulan penuh tidak beroperasi karena sedang melakukan pengelolaan buku. Selain itu kondisi pandemi covid yang terjadi pada tahun 2020 juga semakin mengurangi jumlah kunjungan ke perpustakaan. Terkait dengan hal tersebut perlu dilakukan upaya dan inovasi dalam meningkatkan kembali jumlah kunjungan baik secara langsung maupun online.

Selain penurunan jumlah kunjungan perpustakaan, penambahan jumlah anggota perpustakaan juga mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 penambahan jumlah anggota sebanyak 6.190 orang. Lalu pada tahun 2017 jumlah menurun menjadi 5.819 orang. Hingga tahun 2020 penambahan jumlah anggota hanya sebanyak 1.349 orang.

Semakin berkurangnya penambahan jumlah anggota ini disebabkan karena pengembangan fasilitas maupun sarana prasarana perpustakaan masih belum optimal. Hal ini menurunkan minat masyarakat untuk datang langsung ke perpustakaan. Ketersediaan ruang untuk pendayagunaan perpustakaan masih belum sesuai kebutuhan.

Indikator lainnya yaitu penambahan jumlah judul koleksi bahan pustaka juga menunjukkan terjadi penurunan yang signifikan. Pada tahun 2016, penambahan jumlah koleksi bahan pustaka mencapai 8.277. penambahan koleksi ini mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 2.243. walaupun sempat terjadi kenaikan penambahan koleksi menjadi 3.772 di tahun 2018, realisasi indikator ini kembali mengalami penurunan menjadi 442 tambahan koleksi bahan pustaka. Pada tahun 2020, angka ini kembali meningkat menjadi 1.075 penambahan judul koleksi bahan pustaka.

Adapun terkait dengan pembinaan, Dinas Perpustakaan dan Arsip juga memiliki program pembinaan terhadap perpustakaan dan taman baca yang ada di Kota Balikpapan. Pada tahun 2016, jumlah perpustakaan/taman baca yang telah dibina sebanyak 224. Realisasi indikator ini mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 241. Sempat terjadi penurunan pada tahun 2018 menjadi 196, akan tetapi indikator ini kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 254 binaan perpustakaan dan menjadi 264 pada tahun 2020.

Secara keseluruhan, kinerja urusan perpustakaan mengalami tren penurunan capaian kinerja, walaupun di beberapa aspek seperti jumlah binaan

perpustakaan mengalami peningkatan. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM perpustakaan berpengaruh terhadap keseluruhan urusan perpustakaan. Merujuk pada standar nasional yaitu Peraturan Kepala Perpustakaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota, per 75 ribu penduduk membutuhkan minimal 1 pustakawan. Dan saat ini jumlah pustakawan hanya 2 orang. Idealnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Balikpapan memiliki 10 pustakawan.

Dengan kondisi keterbatasan SDM ini menyulitkan untuk melaksanakan beberapa program yang telah direncanakan. Selain terkait kuantitas, kualitas pustakawan juga masih perlu untuk ditingkatkan. Bimbingan teknis kepada pustakawan maupun pengelola perpustakaan lainnya belum pernah dilaksanakan selama tahun 2016-2020. Hal ini bisa dilihat dari capaian pelaksanaan bimtek yang masih belum ada hingga saat ini. Capaian kinerja urusan perpustakaan pada tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.81 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kunjungan Perpustakaan	Orang	148.447	202.263	134.566	98.192	19.818
Jumlah Penambahan Anggota Perpustakaan	Orang	6.190	5.819	3.440	3.310	1.349
Penambahan Jumlah Judul Koleksi Bahan Pustaka	Judul	8.277	2.243	3.772	442	1.075
Jumlah Perpustakaan/Taman Baca yang Telah Dibina	Unit	224	229	239	254	264

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip

2.3.2.18 Kearsipan

Selain mengelola urusan arsip daerah, fungsi lainnya dari urusan kearsipan adalah menguatkan tata kelola arsip untuk semua OPD yang ada. Oleh karenanya fungsi kearsipan yang melekat pada Dinas Perpustakaan dan Arsip juga mengemban tugas untuk meningkatkan pengelolaan arsip bagi semua OPD. Untuk mengukur sejauh mana penguatan tata kelola terdapat dua indikator kinerja yaitu Persentase Perangkat Daerah yang telah mengimplementasikan SIKD dan Persentase Perangkat Daerah yang arsipnya telah terdata dan tertata.

Adapun di Kota Balikpapan, implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dimulai sejak tahun 2018. pada tahun 2018 jumlah OPD yang mengimplementasikan SIKD sebanyak 7 OPD dari total 36 OPD. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2019 semua OPD telah mengimplementasikan SIKD. Sedangkan untuk indikator persentase perangkat daerah yang arsipnya telah terdata dan tertata mengalami fluktuasi angka. Pada tahun 2017, realisasi indikator ini sebesar 14,35%. Lalu menurun menjadi 10% pada tahun 2018. Hingga tahun 2020 realisasi indikator ini kemudian meningkat lagi menjadi 25%.

Tabel 2.82 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Perangkat Daerah yang telah mengimplementasikan SIKD	-	-	19,44%	100%	100%

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Perangkat Daerah yang arsipnya telah terdata dan tertata	-	14,35%	10%	25%	25%

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip

Walaupun kedua indikator telah menunjukkan peningkatan yang cukup baik akan tetapi masih terdapat kendala yang dihadapi. Salah satunya adalah belum optimalnya SDM pengelola arsip, terbatasnya SDM menyebabkan struktur, dan kelembagaan arsip yang belum memadai. Selain terkait dengan SDM, kendala lainnya adalah kurang memadainya fasilitas penunjang untuk pengembangan arsip. Gudang yang ada saat ini untuk penyimpanan arsip inaktif dan statis masih belum sesuai standar penyimpanan arsip. Upaya digitalisasi arsip juga masih belum dapat diterapkan dengan baik. Dalam peraturan Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Tahun 2020-2024, dicanangkan untuk melakukan pengembangan E-Arsip dan Big Data Kearsipan. Pengembangan aplikasi arsip sendiri belum menunjukkan ke arah yang baik karena penataan dan pendataan arsip belum memanfaatkan aplikasi. Fenomena kerja dari rumah bagi para pegawai karena pandemi virus covid-19 menjadi satu momentum penting agar semua OPD bekerja dengan pola virtual. Namun momentum ini belum dapat dimanfaatkan secara maksimal, karena sistem informasi kearsipan yang dibangun masih bersifat parsial.

2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

2.3.3.1. Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Merujuk Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra-produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.

Capaian Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2016–2020 dapat terlihat pada tabel berikut. Capaian produksi perikanan tertinggi dicapai pada tahun 2019, yaitu sebesar 6.384,52 ton. Sementara capaian produksi perikanan terendah terjadi pada tahun 2017, yaitu sebesar 4.242,54 ton. Dari sisi peningkatan produksi perikanan, pada tahun 2017 terjadi penurunan yang signifikan, tingkat produksi perikanan Kota Balikpapan sebesar –1.450,63 Ton. Selanjutnya, pada tahun 2018, jumlah produksi perikanan mengalami kenaikan menjadi 293,41 ton serta mengalami kenaikan cukup signifikan pada tahun 2019

yaitu sebesar 1.849 ton. Namun angka ini kembali mengalami penurunan menjadi -1.700,86 pada tahun 2020

Tabel 2.83 Capaian Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 – 2020

Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah produksi perikanan	5.693,51	4.242,54	4.536,3	6.384,52	4.684,7
Jumlah produksi perikanan budidaya	1.010,51	411,54	391,3	266,92	275,50
Jumlah produksi perikanan tangkap	4.683,00	3.831,00	4.145,0	6.117,60	4,409,20
Jumlah peningkatan produksi perikanan (kenaikan)	-	-1450,63	293,41	1.849,27	-1.700,86

Sumber: Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan, 2021

2.3.3.2. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kota Balikpapan memiliki 57 objek wisata pada tahun 2019. Merujuk Surat Keputusan MENPARPOSTEL No 98/PW.102/MPPT-87, objek wisata adalah semua tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan. Dari 57 Objek wisata di Kota Balikpapan, 14 diantaranya adalah objek wisata buatan, 12 objek wisata belanja/kuliner, 9 objek wisata religi, 8 objek wisata alam dan wisata bahari, serta 6 objek wisata sejarah. Berikut daftar objek wisata di Kota Balikpapan.

Gambar 2.75 Jumlah Objek Wisata di Kota Balikpapan Menurut Jenisnya Tahun 2020

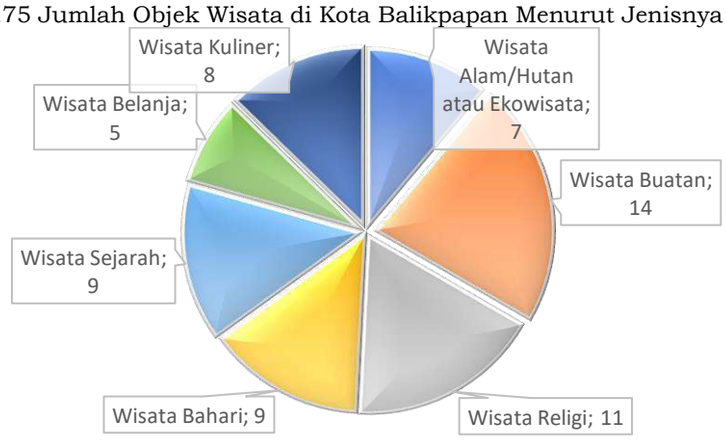

Sumber: BPS, Kota Balikpapan Dalam Angka, 2021

Tabel 2.84 Objek dan Nama Tempat Wisata di Kota Balikpapan

No	Objek Wisata		Nama Tempat Wisata
1	Wisata Alam/Hutan atau Ekowisata	1.	2. Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW) 3. Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH) 4. Kawasan Wisata Mangrove Center 5. Kawasan Kebun Raya Balikpapan (KBB) 6. Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH) 7. Kawasan Wisata Mangrove Center 8. Kawasan Kebun Raya Balikpapan (KBB) 9. Kawasan Ekowisata Teluk Balikpapan
2	Wisata Buatan	1.	2. Penangkaran Buaya Teritip 3. Carribean Island Waterpark Regency 4. Waterpark Griya Permata Asri Ringroad 5. Jembatan Ulin Kariangau 6. Kampung Atas Air Magasari 7. Kampung Warna-Warni Teluk Seribu 8. Aqua Boom 9. Taman Bekapai 10. Taman Tiga Generasi 11. Kilang Minyak Balikpapan 12. Waduk Manggar 13. Kampung Kenangan Lamaru 14. Kampung Pinisi 15. Kampung Kangkung
3	Wisata Religi	1.	2. Islamic Center 3. Mahavihara Budha Manggala Balikpapan 4. Masjid Jami' Al Ula 5. Masjid Agung At-Taqwa 6. Masjid Istiqomah

No	Objek Wisata		Nama Tempat Wisata
			7. Klenteng Guang De Miao 8. Pondok Pesantren Hidayatullah 9. Wisata Religius Vihara Eka Dharma Manggala 10. Wisata Religius Vihara Budha Maitreya
4	Wisata Bahari	1.	2. Pantai Manggar Segara Sari 3. Pantai Lamaru 4. Pantai Monpera 5. Pantai Kemala Polda 6. Pantai Kilang Minyak Pertamina 7. Pantai Seraya 8. Pantai Banua Patra 9. Pantai Nirmala Lamaru
5	Wisata Bersejarah	1.	2. Tugu Jepang dan Makam Jepang Lamaru 3. Tugu Australia Lapangan Merdeka 4. Museum Kodam VI Mulawarman 5. Monumen Mathilda 6. Meriam Jepang 7. Rumah Dahor Herritage
6	Wisata Belanja/Kuliner	1.	2. Pasar Inpres Kebun Sayur 3. Melawai 4. Plaza Balikpapan 5. Ruko Bandar 6. Balikpapan Super Block 7. Living Plaza 8. Mall Fantasi Komp Balikpapan Baru 9. Ramayana Plaza 10. Pasar Segar 11. Taman Tiga Generasi 12. Taman Bekapai 13. Lapangan Merdeka

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka, 2020

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan daerah Kota Balikpapan tahun 2016 – 2026 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Balikpapan No 7 Tahun 2016, bahwa rencana induk pembangunan kepariwisataan Kota Balikpapan yang selanjutnya disebut Rippda Kota adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan terhitung mulai tahun 2016 sampai dengan 2026. Pembangunan kepariwisataan daerah meliputi: Destinasi pariwisata; Pemasaran pariwisata; Industri pariwisata; dan kelembagaan kepariwisataan. Visi pembangunan kepariwisataan daerah yaitu "Terwujudnya Daerah sebagai Tujuan Pariwisata Internasional dengan mengedepankan ekowisata, ekokultural, *MICE*, dan wisata transit bagi kesejahteraan masyarakat".

Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Balikpapan cenderung mengalami kenaikan sejak tahun 2017–2019, pada tahun 2017 jumlah kunjungan ke Kota Balikpapan mengalami kenaikan 2.554.423 orang dan terus meningkat menjadi 2.802.058 pada tahun 2018 dan 2.917.514 pada tahun 2019. Pada tahun 2020, karena dampak pandemi covid, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Balikpapan mengalami penurunan yang signifikan menjadi 1.082.273 orang.

Jumlah *event* pariwisata dan budaya Kota Balikpapan tahun 2016 – 2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 dan 2020, jumlah *event* yang dapat diselenggarakan sebanyak 7 *event*. Sementara pada tahun 2017 1 *event* dan 5 *event* pada tahun 2018. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2019 yang dapat menyelenggarakan 8 *event*.

Upaya pengembangan destinasi pariwisata selain bertujuan untuk menarik jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Balikpapan juga menjadi sarana penyediaan ruang publik bagi penduduk Kota Balikpapan. Berdasarkan grafik

pengembangan destinasi pariwisata di Kota Balikpapan, bahwa pengembangan destinasi pariwisata di Kota Balikpapan cenderung mengalami fluktuasi, hingga pada tahun 2020 terdapat 41 destinasi pariwisata yang dikembangkan.

Pengembangan destinasi pariwisata di Kota Balikpapan, bahwa pengembangan destinasi pariwisata di Kota Balikpapan cenderung mengalami fluktuasi, pada tahun 2016 terdapat 28 destinasi pariwisata yang dikembangkan, kemudian pada tahun 2017 dan 2018 terdapat 1 destinasi yang dikembangkan. Pengembangan destinasi pariwisata terus mengalami peningkatan hingga mencapai 41 destinasi pada tahun 2020.

Merujuk tujuan 8 SDG's pengembangan destinasi pariwisata mendukung menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal pada tahun 2030. Selain itu, berdasarkan dokumen Roadmap Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, secara spesifik terdapat 2 tujuan pembangunan berkelanjutan, yang menjadikan urusan pariwisata sebagai bagian dari strateginya. Pertama, tujuan 7 Energi Bersih dan Terbarukan. Kedua, Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.

Tabel 2.85 Arah Strategi Pengembangan Pariwisata Berdasarkan SDG's

Tujuan	Arah Kebijakan	Strategi Tahun 2020-2024
Energi Bersih dan Terbarukan	Mendorong pemanfaatan tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan energi final sektor transportasi, rumah tangga dan industri	Pengembangan klaster industri, kawasan ekonomi khusus dan kawasan pariwisata
Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Percepatan transformasi struktural melalui modernisasi pertanian, reindustrialisasi, dan pemanfaatan sumber-sumber pertumbuhan baru	Meningkatkan konektivitas destinasi pariwisata dengan fokus pada MICE, pariwisata minat khusus, dan lintas batas pariwisata

Sumber: *Roadmap* SDG's Nasional, 2017

Terkait pengembangan destinasi objek wisata unggulan Kota Balikpapan pada tahun 2016 – 2020, terdapat 2 destinasi yang dikembangkan menjadi destinasi objek wisata unggulan pada tahun 2016 dan 2017. Selanjutnya menjadi 1 objek destinasi unggulan pada 2018. Kemudian mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2019 menjadi 10 objek destinasi wisata, hingga kembali mengalami penurunan menjadi 6 objek destinasi wisata pada tahun 2020.

Jumlah asosiasi yang bermitra adalah banyaknya asosiasi pengusaha pariwisata yang bermitra dengan Pemerintah Kota Balikpapan. Jumlah asosiasi pengusaha pariwisata yang bermitra dengan Pemerintah Kota Balikpapan mengalami kenaikan cukup signifikan pada tahun 2020, terdapat 9 asosiasi perusahaan yang bermitra dari sebelumnya 1 asosiasi pada tahun 2018.

Tabel 2.86 Capaian Kinerja Sektor Pariwisata Tahun 2016 – 2020

Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kunjungan wisatawan	1.065.610	2.554.423	2.802.058	2.917.514	1.082.273*
Peningkatan event Pariwisata dan Budaya	7	1	5	8	7
Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan	28	1	1	30	41
Meningkatnya potensi objek wisata unggulan di kota Balikpapan	2	2	1	10	6
Jumlah asosiasi yang bermitra	5	0	1	8	9

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Balikpapan, 2021

Ekonomi Kreatif sebagai konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama mulai masuk di Kota Balikpapan ditandai dengan berdirinya Forum Ekonomi Kreatif (BCF) ada tahun 2016. Yang dilanjutkan dengan aktivasi 6 sub sektor ekonomi kreatif dan kolaborasi pentahelix aktor ABCGM pada tahun 2017 dan 2018. Eksistensi ekonomi kreatif ini dikukuhkan kembali dengan ditandatanganinya MoU antara Bekraf dan Pemerintah Kota Balikpapan serta BCF pada tahun 2019. Dan di tahun yang sama dilakukan peresmian Balikpapan Creative Center (BCC) di Gedung Parkir Klandasan sebagai wadah pelaku ekonomi kreatif untuk dapat berkreasi. Pada tahun 2019 Kota Balikpapan juga ditetapkan oleh Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menjadi 10 kota kreatif dari 55 kabupaten kota dalam bidang aplikasi dan gim.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan bersama relawan ekonomi kreatif. Sub sektor ekonomi kreatif yang mendominasi responden di Kota Balikpapan antara lain: Kuliner, Seni Pertunjukan, dan Aplikasi yang tergambar sebagaimana grafik dibawah ini.

Gambar 2.76 Sub Sektor Ekonomi Kreatif Kota Balikpapan

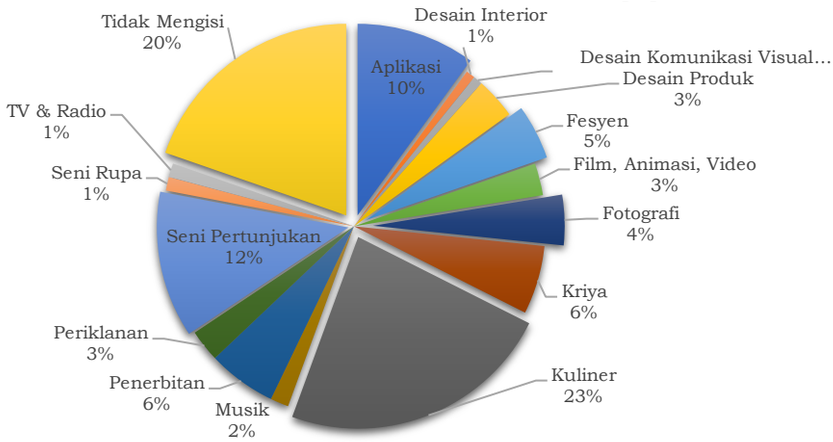

Sumber: Bappeda Litbang (diolah, 2021)

Adapun terkait dengan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Balikpapan, mengalami tren peningkatan. kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Balikpapan selalu mengalami peningkatan dari tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp11,001 juta menjadi sebesar Rp14,123 juta di tahun 2019. Namun angka ini mengalami penurunan menjadi Rp 12,077 juta pada tahun 2020. Hal ini ditunjang oleh peningkatan dari sub sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum serta kenaikan tarif retribusi.

Tabel 2.87 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB

Tahun	Kontribusi terhadap PDRB (juta rupiah)
2016	11.001.445,3
2017	12.597.911,4
2018	13.531.136,5
2019	14.123.397,7
2020	12.077.471,3

Sumber : BPS, diolah, 2021

2.3.3.3. Pertanian

Lahan pertanian di Kota Balikpapan relatif terbatas luas dan sebarannya. Selain itu, pertanian di Kota Balikpapan umumnya dilakukan dalam skala kecil. Kawasan yang masih mengusahakan pertanian cenderung terpusat di Kecamatan Balikpapan Timur, utamanya kelurahan Manggar, Lamaru, dan Teritip.

Berdasarkan tabel luas panen padi dan palawija di Kota Balikpapan tahun 2016–2020. Pada tahun 2020, luas lahan panen ubi kayu merupakan lahan yang terluas diantara komoditas lainnya, terdapat 324 hektare luas lahan untuk panen ubi kayu. Terkait dengan luas lahan panen padi ladang, sejak tahun 2017–2020 mengalami trend penurunan. Pada tahun 2017, terdapat 40 hektare lahan untuk panen padi ladang, tetapi turun menjadi 3 pada tahun 2018, hingga 0 hektare pada tahun 2020. Hal serupa juga terjadi bagi luas lahan panen padi sawah, luas tersebut mengalami penurunan menjadi 38 hektare pada tahun 2019 dari 60 hektare pada tahun 2018. Namun, pada tahun 2020 luas lahan panen padi sawah mengalami peningkatan kembali menjadi 66 hektar.

Tabel 2.88 Luas Panen Padi dan Palawija (Ha) di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

Tahun	Padi Sawah	Padi Ladang	Padi	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kacang Tanah	Kedelai	Kacang Hijau *Green Bean*
2016	63	121	184	139	292	30	33	-	-
2017	97	40	137	190	217	23	22	-	-
2018	60	3	63	80	232	24	20	-	-
2019	38	1	39	96	257	-	-	-	-
2020	66	-	66	247	324	17,5	21	-	-

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2021, BPS Kota Balikpapan

Berdasarkan tabel produksi panen padi dan palawija Kota Balikpapan tahun 2016 – 2020, pada tahun 2020 jumlah panen terbanyak adalah ubi kayu dengan 15.186,8 ton, sedangkan kacang tanah menjadi komoditas dengan jumlah paling sedikit yaitu 42 ton. Terdapat, temuan menarik bahwa luas lahan panen yang meningkat pada tanaman padi memiliki hubungan yang positif dengan jumlah produksi panen, tetapi pada lahan kacang tanah justru mengalami penurunan. Hal ini dapat menjadi catatan, bahwa jenis tanah di Kota Balikpapan lebih tepat bagi komoditas ubi kayu.

Tabel 2.89 Produksi Panen Padi dan Palawija (Ton) di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

Tahun	Padi Sawah	Padi Ladang	Padi	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kacang Tanah	Kedelai	Kacang Hijau *Green Bean*
2016	NA	NA	NA	440	12.248	444	495	-	-
2017	NA	NA	NA	448	8.834	360	315	-	-
2018	362,1	6	368	492	10.332	360	94	-	-
2019	222,4	3	225,4	672	12.032	717	138	-	-
2020	358,5	-	358,5	1358	15.187	262,5	42	-	-

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2021, BPS Kota Balikpapan

Sementara dari perkembangan luas tanam sawah maupun ladang Kota Balikpapan dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pada tahun 2020 menunjukkan penurunan luas tanam padi sawah dari 31 Ha menjadi 2 Ha. Sedangkan perkembangan luas tanam sawah ladang di Kota

Balikpapan pada tahun 2020 menunjukkan penurunan dari 1 Ha menjadi 0, sebagaimana tergambar pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.90 Luas Tanam, Panen dan Produksi Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Padi Sawah			Padi Ladang		
		Tanam dan Tanaman (Ha)	Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Tanam dan Tanaman (Ha)	Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	2016	116	63	266	156	121	273
2	2017	66	89	376	5	34	70
3	2018	45	60	362	3	3	6
4	2019	31	45	245,6	1	1	3
5	2020	2	3	358.5	0	0	0

Sumber: DP3Kota Balikpapan, 2021

Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura dihitung dari realisasi produksi bidang pertanian untuk komoditi padi, palawija, sayuran dataran rendah dan buah-buahan tahun berjalan. Komoditas hortikultura yang dikembangkan antara lain meliputi kangkung, sawi, ketimun, terung, bayam, salak, pepaya, dan pisang. Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura mengalami penurunan pada tahun 2017 hingga 2018. Pada tahun 2019, jumlah produksi meningkat menjadi sebesar 138.525 ton, dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 142.524 ton pada tahun 2020.

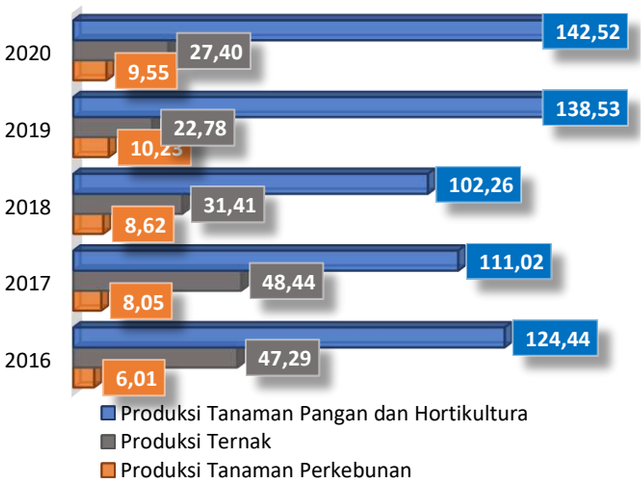

Gambar 2.77 Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Tanaman Perkebunan dan Ternak (Ribu Ton) di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020
Sumber: DP3 Kota Balikpapan, 2021

Jumlah produksi tanaman perkebunan dihitung dari realisasi produksi bidang perkebunan untuk komoditi karet, kelapa dan lada tahun berjalan. Berdasarkan grafik kenaikan produksi tanaman perkebunan, terjadi peningkatan produksi tanaman perkebunan pada tahun 2017 hingga 2019. Namun, terjadi penurunan menjadi 9.547,99 ton pada tahun 2020, jika dibandingkan dengan jumlah produksi tahun 2019 yang menyentuh angka 10.229,77 ton.

Jumlah produksi ternak diperoleh dari realisasi produksi bidang peternakan untuk komoditi daging sapi, daging ayam dan telur tahun berjalan. Berdasarkan grafik jumlah produksi ternak Kota Balikpapan sejak tahun 2016 – 2020 menunjukkan jumlah yang fluktuatif. Pada tahun 2016jumlah produksi ternak adalah 47.285,74 ton, selanjutnya mengalami peningkatan menjadi 48.439,32 ton pada tahun 2017. Pada tahun 2018 hingga tahun 2019 angka ini mengalami penurunan hingga mencapai 22.783,56 ton pada tahun 2019. Jumlah produksi ternak kembali mengalami peningkatan menjadi 27.4040,56 ton pada tahun 2020.

Merujuk capaian kinerja urusan pertanian Kota Balikpapan, terdapat tiga indikator yang dijadikan acuan antara lain: kenaikan produksi tanaman pangan

dan hortikultura, kenaikan produksi tanaman perkebunan, dan kenaikan produksi ternak sebagai berikut.

Tabel 2.91 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2016 – 2020

Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
Kenaikan produksi tanaman pangan dan hortikultura (ton)	-	-13.420,4	-8.751,14	36.264,60	3,809,40
Kenaikan produksi tanaman perkebunan (ton)	-	2.064,3	565,62	1.609,36	-688,76
Kenaikan produksi ternak (ton)	-	1.153,58	-17.028,18	-8.628,91	4.621,00

Sumber : DP3Kota Balikpapan, 2021

2.3.3.4. Perdagangan

Sarana perdagangan di Kota Balikpapan berkembang pesat cukup. Pada tahun 2017 jumlah toko mencapai 209. Jumlahnya meningkat pada tahun 2018 menjadi 220 toko. Hingga akhir tahun 2019 jumlah toko mencapai 264. Namun, pada tahun 2020 jumlah toko mengalami penurunan menjadi 230 toko. Sementara untuk pasar rakyat perubahan jumlahnya tidak signifikan seperti minimarket. Tercatat hingga tahun 2020 jumlah pasar rakyat di Kota Balikpapan sebanyak 19 pasar. Adapun sarana perdagangan lainnya seperti Supermarket, Hypermarket, Toko Grosir, dan Department Store jumlahnya tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.92 Sarana Perdagangan di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

Sarana Perdagangan	2016	2017	2018	2019	2020
Pasar	18	16	13	17	19
Toko/Minimarket	-	209	220	264	230
Supermarket	-	7	9	9	11
Hypermarket	-	2	-	-	-
Grosir	-	1	1	1	1
Department Store	-	5	5	5	4

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2021, BPS Kota Balikpapan

Jumlah kios di 11 pasar rakyat yang ada di Kota Balikpapan sejumlah 4.259 kios. Dimana jumlah kios terbanyak terdapat di Pasar Pandansari, yaitu sebanyak 781 kios. Sementara jumlah kios terendah di Pasar Rakyat KM.12 Karang Joang yaitu sebanyak 56 kios.

Tabel 2.93 Jumlah Kios dan Pedagang Kaki Lima di Kota Balikpapan Tahun 2020

Wilayah Pasar	Jumlah Kios	Jumlah PKL
Inpres Kebun Sayur	223	50
Penampungan A	265	-
Kampung Baru Tengah	332	-
Laok Besi dan Warung	72	-
Pasar Rakyat Km.12	56	-
Pandansari	781	108
Klandasan I	578	80
Klandasan II	579	-
Damai	294	20
Sepinggan	883	100
Tertip	234	-
Total	4.259	358

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2021, BPS Kota Balikpapan

Pada tahun 2020, mini market dan toko tradisional di Kota Balikpapan yang belum memiliki izin paling banyak tersebar di Kecamatan Balikpapan Selatan yaitu sebanyak 50 mini market/toko tradisional. Sementara itu, Kecamatan Balikpapan Timur menjadi daerah dengan mini market/toko yang tidak berizin paling sedikit, yaitu sebanyak 8 mini market/toko tradisional.

Gambar 2.78 Mini Market dan Toko Tradisional yang Belum Memiliki Izin Tahun 2020
Sumber: Dinas Perdagangan Tahun 2020

Adapun terkait dengan ekspor impor, realisasi ekspor yang melalui Kota Balikpapan tahun 2020 mencapai $2.934.541.516,32. Hal ini mengalami penurunan apabila dibandingkan pada tahun 2019 yang mencapai $3.103.163.031,62. Sementara itu, realisasi impor yang masuk ke Kota Balikpapan tahun 2020 mencapai $2.780.828.826,45 sedangkan pada tahun 2019 hanya sebesar $7.395.368,84. Perkembangan realisasi nilai produk ekspor dan impor di Kota Balikpapan Pada Tahun 2016-2020 tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.94 Realisasi Ekspor dan Impor Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi Ekspor ($)	Realisasi Impor ($)
2016	2.219.042.847,11	203.364.870,53
2017	2.510.019.355,83	84.874.061,78
2018	2.780.087.611,87	5.342.734,65
2019	3.103.163.031,62	7.395.368,84
2020	2.934.541.516,32	2.780.828.826,45

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Balikpapan 2021

Persentase pelaku usaha yang menjual produk sesuai standar di tahun 2016 sebesar 57% meningkat di tahun 2017 menjadi 79%. Kemudian di tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 66% dan 64,96%. Hingga tahun 2020, angka ini mengalami penurunan menjadi 64,25%. Hasil tersebut diperoleh berdasarkan jumlah pelaku usaha yang menjual produk sesuai standar dibagi dengan jumlah pelaku usaha yang diawasi.

Untuk pelaku usaha wajib tera yang melakukan tera/ tera ulang capaiannya mengalami trend kenaikan pada tahun 2017 hingga 2019. Namun mengalami penurunan yang signifikan menjadi 36,09% di tahun 2020.

Terdapat 4 pasar yang sudah berklasifikasi A yaitu: Pasar Pandasan I, Pandasan II, Pandansari dan Pasar Inpres Kebun Sayur. Di tahun 2020 capaian indikator kinerja Persentase pasar berklasifikasi A menurun menjadi 33,3% di tahun 2020 dari sebelumnya mencapai 36%.

Nilai pasar terhadap penilaian adipura pada kurun waktu 2017 hingga 2020 masih stagnan di 72,15.

Tabel 2.95 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kota Balikpapan 2016 – 2020

Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan unit usaha dagang	Unit usaha	-	248	248	248	230
Persentase pelaku usaha yang menjual produk sesuai standar	%	-	79	66	64,96	64,25
Persentase wajib tera yang melakukan tera/tera ulang	%	-	66,12	66,56	70,73	36,09
Persentase pasar berklasifikasi A	%	-	36	36	36	33,3
Nilai ekspor bersih (US$ Juta)	US$ Juta	-	2.510,10	2.780,12	3103,16	2937,12
Nilai pasar terhadap penilaian adipura	Nilai	-	72,15	72,15	72,15	72,15

Sumber: Dinas Perdagangan Tahun 2021

2.3.3.5. Perindustrian

Jumlah usaha yang mendapat sertifikasi kompetensi di Kota Balikpapan menjadi penting untuk melihat sejauh mana kualitas iklim usaha yang telah terbentuk. Untuk usaha kecil, jumlah usaha yang telah mendapatkan sertifikasi mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017, total usaha kecil yang mendapatkan sertifikasi sebanyak 169 usaha. Angka ini mengalami penurunan hingga tahun 2019, hanya 119 usaha kecil yang tersertifikasi. Namun, pada tahun 2020 angka ini kembali meningkat menjadi 138 usaha kecil yang tersertifikasi. Jenis usaha terbanyak yang mendapatkan sertifikasi kompetensi adalah CV Limited Partnership yaitu sebanyak 77 usaha pada tahun 2020.

Tabel 2.96 Jumlah Usaha Kecil yang Mendapat Sertifikasi Kompetensi di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

Jenis Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
CV *Limited Partnership*	97	99	86	73	77
Koperasi	-	-	-	-	-
Perseroan Terbatas	56	69	62	44	59
Toko	-	-	1	1	1
Usaha Dagang	2	1	1	1	1
Firma	-	-	-	-	-
Jumlah	155	169	150	119	138

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2021, BPS Kota Balikpapan

Sementara itu untuk usaha non-kecil, jumlahnya relatif lebih banyak dibandingkan dengan usaha kecil. Walaupun mengalami fluktuasi angka setiap tahunnya, akan tetapi penurunannya tidak sebanyak dengan usaha kecil. Pada tahun 2017, usaha non-kecil yang mendapatkan sertifikasi kompetensi sebanyak 158 usaha. Jumlah ini menurun pada tahun 2018 menjadi 143 usaha, dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 144 usaha. Hingga tahun 2020, hanya tersisa 122 usaha yang memiliki sertifikasi kompetensi. Jenis usaha yang memiliki sertifikasi kompetensi terbanyak adalah perseroan terbatas yang memiliki sebanyak 107 usaha pada tahun 2020.

Tabel 2.97 Jumlah Usaha Non-Kecil yang Mendapat Sertifikasi Kompetensi di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

Jenis Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
CV *Limited Partnership*	7	6	14	6	11
Koperasi	4	4	4	4	4
Perseroan Terbatas	158	148	125	134	107
Toko	-	-	-	-	-
Usaha Dagang	-	-	-	-	-
Firma	-	-	-	-	-
Jumlah	169	158	143	144	122

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2021, BPS Kota Balikpapan

Jika dilihat lebih lanjut, perkembangan sektor perindustrian Kota Balikpapan dari tahun 2016 sampai dengan 2020 tidak mengalami perubahan yang signifikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.98 Perkembangan Sektor Perindustrian Kota Balikpapan

Tahun 2016 – 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Unit Usaha					
Industri Kecil	618	621	622	628	628
Industri menengah	137	139	144	146	146
Industri Besar	128	128	128	128	128
Jumlah	883	883	894	902	902
Tenaga Kerja (orang)					
Industri Kecil	3.991	4.008	4.013	4035	4035
Industri Menengah	2.373	2.459	2.594	2667	2667
Industri Besar	6.887	6.887	6.887	6887	6887
Jumlah	13.251	13.354	13.494	13.589	13.589
Investasi (juta Rp.-)					
Industri Kecil	74,926	75.915	76.578	77691	77691
Industri Menengah	62,147	85.130	151.643	169025	169025
Industri Besar	588.667	588,667	588.667	588667	588667

Sumber: DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2021

Pembangunan industri Kota Balikpapan diarahkan pada pembangunan industri pengolahan bukan migas, hingga saat ini pembangunan industri bukan migas di Indonesia mengalami pertumbuhan dan berkembang signifikan. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan, telah mengatur terkait kawasan peruntukan industri. Sesuai arah kebijakan pemerintah Kota Balikpapan akan membangun dan mengembangkan industri Prioritas, Industri Pendukung dan Industri potensial masa depan pada kawasan peruntukan industri sesuai dengan RTRW Kota Balikpapan.

Kawasan rencana peruntukan industri di Kota Balikpapan, terbagi atas:

- Kawasan Industri Kariangau (KIK)

  KIK berlokasi di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, merupakan kawasan strategis yang dapat dijangkau melalui darat dan laut. Pembangunan keseluruhan memiliki total luasan sekitar 2.117 Ha. Industri yang sudah eksisting sampai dengan tahun 2020 sebanyak 15 perusahaan, kawasan ini juga dilengkapi dengan sarana terminal peti kemas yang beroperasi pada tahun 2012.

- Koridor Perwilayahan Industri di Batakan dan Mulawarman

  Klaster Batakan merupakan wilayah peruntukan kategori industri sedang. Kawasan industri Batakan tersebar di sepanjang Jalan Mulawarman.

- Kawasan Industri Kecil Somber

  Kawasan Industri Kecil di Kawasan Industri Kecil Somber (KIKS). KIKS seluas 9 Ha yang telah dimanfaatkan seluas 3 Ha. Di KIKS telah terdapat 60 industri tahu tempe dari total 118 industri tahu tempe di Kota Balikpapan. Kawasan Industri Kecil Somber (KIKS) telah dilengkapi infrastruktur seperti jalan, gudang, drainase, jaringan listrik, pengolahan air limbah dan air bersih.

- Kawasan Industri Kecil Teritip

Kawasan Industri Kecil Teritip berada di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur meliputi lahan seluas 6,4 ha. Industri Kecil Teritip meliputi: Industri Pengelolaan Hasil Pertanian dan Industri Pengelolaan Hasil Perikanan. Saat ini telah terdapat 24 rumah produksi dari total perencanaan sebanyak 48 rumah produksi.

- Kawasan Industri Perikanan Manggar

  Kawasan Industri Perikanan Manggar terletak di Kelurahan Manggar dan Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur. Kawasan Industri Perikanan Manggar termasuk dalam kawasan minapolitan Manggar, dimana terdapat 6 blok dalam kawasan minapolitan tersebut.

Pertumbuhan IKM mengalami trend kenaikan walupun tidak terlalu signifikan. Capaian kinerja pertumbuhan IKM pada tahun 2016 sebesar 0,46% meningkat menjadi 0,80%pada tahun 2020. Pertumbuhan ini hanya disumbang oleh kelompok industri Agro, Logam Mesin dan Perekayasaan, serta Aneka dalam 3 tahun terakhir (2017-2019), sedangkan kelompok industri Hasil Hutan, Pulp dan Kertas, Kimia, Alat Angkut, dan Tekstil jumlahnya tidak berkembang dan cenderung tidak bertambah.

Tabel 2.99 Perkembangan Kelompok Industri Kota Balikpapan Tahun2016-2020

No	Kelompok Industri	2016	2017	2018	2019	2020
1	Hasil Hutan	78	78	78	78	78
2	Pulp dan Kertas	108	108	108	108	108
3	Kimia	107	109	109	109	109
4	Agro	195	195	197	201	201
5	Logam Mesin dan Perekayasaan	145	147	152	153	153
6	Alat Angkut	128	128	128	128	128
7	Tekstil	93	93	93	93	93
8	Aneka	29	30	30	32	32
Total		883	888	895	902	902
% Pertumbuhan Industri		0,46	0,57	0,79	0,78	0

Sumber: Dinas Perindustrian Koperasi UMKM Tahun 2021

Untuk persentase IKM menerapkan teknologi industri juga mengalami trend kenaikan. Dimana capaian ada tahun 2016 sebesar 15% menjadi 38,81% pada tahun 2020. Persentase industri yang menggunakan bahan baku lokal dihitung berdasarkan Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan menggunakan bahan baku lokal, namun demikian capaian setiap tahunnya cenderung berfluktuatif. Bahan baku lokal yang kerap digunakan yaitu salak, buah naga, ikan, nanas, pisang, rumput laut, kepiting, pepaya, dan singkong. Jumlah IKM yang ikut pelatihan pada setiap jenis bahan baku rata-rata hanya 20 IKM. Capaian pada tahun 2018 sebesar 11,11% dan di tahun 2019 hingga 2020 sebesar 11,10%.

Tabel 2.100 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian 2016-2020

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan IKM	%	0.46	0,57	0,79	0,78	0,80
Persentase IKM menerapkan teknologi industri	%	15	16	19	36,23	38,81
Persentase industri eksisting terhadap perizinan industri di KIK	%	19	37,13	28,7	30	27
Persentase industri *eksisting* terhadap *siteplan* SIKS	%	50	51,35	60,89	58,71	58,71
Persentase industri *eksisting* terhadap *siteplan* SIKT	%	0	7.19	7.51	10,34	10,34

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase industri yang menggunakan bahan baku lokal	%	5	5,3	11,11	11,1	0

Sumber: Dinas Perindustrian Koperasi UMKM Tahun 2021

Selain mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, penyediaan infrastruktur industri juga menjadi aspek penting yang terus diupayakan sesuai dengan standar nasional. Infrastruktur industri dalam hal ini meliputi lahan industri, energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, sumber daya air, fasilitas sanitasi, serta fasilitas jaringan transportasi. Terkait dengan kebutuhan lahan industri, berdasarkan data dari RPIK Kota Balikpapan, pada tahun 2020-2024 dibutuhkan lahan seluas 3.590 Ha. Kebutuhan terhadap lahan ini akan meningkat pada tahun 2025-2035 menjadi 3.600 Ha. Upaya pemenuhan lahan ini memang membutuhkan koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat. Perlu adanya penyesuaian perencanaan agar pembangunan industri berjalan secara integratif serta mendukung pembangunan nasional.

Tabel 2.101 Proyeksi Kebutuhan Lahan dan Jumlah Kawasan Industri Baru Tahun 2015-2035

Uraian	Tahun		
	2015-2019	2020-2024	2025-2035
Kebutuhan Lahan Kawasan Industri (Ha)	3.580	3.590	3.600
Jumlah Kawasan Industri yang Akan Dibangun (Unit)	1	1	1

Sumber: RPIK 2015-2035 Kota Balikpapan

Pada SDGs tujuan 8 yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua, terdapat sasaran mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya yang dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran serta IKM di Kota Balikpapan. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya kompetensi SDM yang sesuai dan memiliki kompetensi yang memadai.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah terkait dengan daya saing daerah adalah kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah berada didalam dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan nilai tambah bagi peningkatan daya saing daerah.Beberapa indikator yang dianalisis dalam melihat kemampuan ekonomi daerah seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita rasio pengeluaran konsumsi rumah tangga non – pangan lebih tinggi sebesar 0,15 poin apabila dibandingkan dengan rasio pengeluaran konsumsi rumah tangga pangan. Keseluruhan indikator tersebut tersebut menggambarkan total pengeluaran serta kemampuan daya beli masyarakat. Berikut adalah indikator total pengeluaran Kota Balikpapan:

Tabel 2.102 Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Total Pengeluaran		1.493.493	1.843.111	2.085.477	1.877.211	1.999.470
1	Total Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Non – Pangan	879.267	1.072.510	1.204.028	1.079.842	1.164.430
2	Rasio	0,59	0,58	0,57	0,57	0,58
3	Total Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Pangan	-	-	881.449	797.369,83	835.040
4	Rasio	-	-	0,42	0,42	0,42

Sumber: BPS, Balikpapan Dalam Angka 2021

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Semakin pesatnya arus modernisasi dan pembangunan, tentu saja akan berdampak pada kebutuhan akan pengembangan infrastruktur wilayah di Kota Balikpapan. Oleh karenanya pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk Menyediakan infrastruktur untuk semua baik pengguna infrastruktur maupun pemerataan kewilayahan yang mendukung pengembangan wilayah dan aksesibilitas Kota Balikpapan melalui pembangunan jalan dan infrastruktur transportasi berkelanjutan dengan mendorong penggunaan transportasi bukan kendaraan bermotor (*non motorized vehicle*) yaitu jalur pejalan kaki dan jalur sepeda serta mendorong penggunaan transportasi massal. pengelolaan Kota Balikpapan harus berkesinambungan dengan sistem ekologi dan kenyamanan hidup bagi masyarakat Kota Balikpapan. Upaya menaikkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di kota Balikpapan terkait dengan kemampuan mereka untuk mengakses infrastruktur (transportasi, komunikasi, air bersih, dan sanitasi), makanan, udara bersih, perumahan yang terjangkau, lapangan kerja dan ruang terbuka hijau. Konsepsi *liveable city* sesungguhnya merupakan representasi *sustainable city*, yang merupakan kemampuan untuk mempertahankan (dan meningkatkan) kualitas hidup yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Balikpapan.

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu fasilitas yang sangat diperlukan dalam meningkatkan daya saing daerah. Sarana dan prasarana wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk melangsungkan kegiatan.

1) Aksesibilitas Daerah

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan.

Tabel 2.103 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang Jalan	501,18	453,635	501,18	501,18	501,18
2	Jumlah Kendaraan	553.528	572.976	588.911	610.819	637.531
3	Rasio	0,000905	0,000792	0,000851	0,00082	0,00079

Sumber: DPU dan Dishub, Tahun 2021

Kota Balikpapan berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Primer dan sebagai pintu gerbang Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Bandar Udara Sepinggan yang berdasarkan Tatanan Kebandaraudaraan Nasional berperan sebagai pusat pengumpul primer saat ini melayani penerbangan domestik dan internasional. Meskipun pada beberapa tahun terakhir pertumbuhan penumpang di Bandara Udara SAMS Sepinggan mengalami pertumbuhan yang tidak signifikan yang dipengaruhi oleh melemahnya perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.104 Pertumbuhan Penumpang Bandara SAMS Sepinggan BalikpapanTahun 2016-2020

Penerbangan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Internasional	76.595	45.320	56.802	59.002	8.870
Domestik	7.433.595	7.254.136	7.441.334	5.370.714	2.730.924

Sumber: BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2021

Pada tahun 2020, jumlah penumpang di Bandar Udara Sepinggan turun menjadi 2.739.794 penumpang. Hal ini dikarenakan telah beroperasinya Bandar Udara APT Pranoto Samarinda sejak ahir tahun 2018 serta dampak dari Pandemi Covid-19. Sedangkan pada angkutan laut, jumlah penumpang mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan harga tiket pesawat sejak tahun 2018. Jumlah penumpang angkatan laut di pelabuhan juga mengalami penurunan pada tahun 2020 karena terdampak pandemi Covid-19. Adapun data arus penumpang di Pelabuhan Balikpapan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.105 Arus Penumpang Turun dan Naik Angkutan Laut di Pelabuhan Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

Tahun	Penumpang turun (Jiwa)	Penumpang naik (Jiwa)
2016	169.393	149.077
2017	148.998	162.852
2018	251.304	206.026
2019	251.304	206.026
2020	93.038	86.606

Sumber: BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2021

2) Ketaatan Terhadap Tata Ruang

Berdasarkan hasil Review RTRW Kota Balikpapan Tahun 2016, secara keseluruhan rencana pola ruang Kota Balikpapan saat ini masih terbilang baik, yaitu dengan penilaian pengkajian kesesuaian sekitar 85% artinya masih terdapat bentuk simpangan pola ruang yang perlu disesuaikan mengikuti perkembangan kota saat ini. Adapun penjelasan rincinya antara lain:

- Terjadi perubahan guna lahan antara Rencana Pola Ruang RTRW dengan Guna Lahan Eksisting Tahun 2016 sebesar 12% dari total luas Kota Balikpapan atau sekitar 6.285,56 Ha;
- Kesesuaian guna lahan eksisting Tahun 2016 dengan Rencana Pola Ruang RTRW seluas 46.032,06 Ha atau sekitar 85% dari total luas Kota Balikpapan;

- Terdapat guna lahan tanah kosong yang belum diolah sesuai dengan program rencana pola ruang seluas 2.090,91 Ha atau seluas 4% dari total luas Kota Balikpapan; Penilaian kesesuaian rencana pola ruang dan tutupan lahan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.106 Penilaian Kesesuaian Rencana Pola Ruang dan Tutupan Lahan

Penilaian Kesesuaian	Kawasan Lindung		Kawasan Budidaya		Total Rencana Pola Ruang	
	Luas	%	Luas	%	Luas	%
Tidak sesuai	2.617,86	9,67	3.667,70	13,42	6.285,56	12
Sesuai	24.242,60	89,52	21.789,46	79,73	46.032,06	85
Belum dilaksanakan	218,80	0,81	1.872,11	6,85	2.090,91	4

Sumber: Bappeda Kota Balikpapan-Hasil Analisa Tahun 2016

3) Infrastruktur

Pengembangan infrastruktur di Kota Balikpapan mengalami peningkatan pembangunan. Pengembangan infrastruktur seperti air minum, restoran, hotel, kelistrikan, dan telekomunikasi diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.107 Infrastruktur Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

No	Infrastruktur	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Cakupan Layanan Air Minum	76,50%	76,56%	79,05%	77,29%	81,37%
2.	Jumlah Bank	187	187	187	187	187
3.	Jumlah Hotel	67	67	67	67	45
4.	Masyarakat yang menggunakan listrik	-	203.420	214.570	214.570	235.140

Sumber: DPU, tahun 2021

4) Ketersediaan Air Bersih dan Listrik

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang terus meningkat membuat layanan kota akan semakin tidak efektif, kecuali kota dapat memberikan fasilitas layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara keseluruhan yang tinggal di kota. Oleh karena itu, Kota Balikpapan harus dapat mewujudkan diri sebagai kota yang mampu melayani penduduknya dengan fasilitas yang memadai dan berkualitas. Salah satu fasilitas dasar yang wajib dipenuhi adalah kebutuhan akan air bersih dan listrik.

Jumlah konsumen air bersih di Kota Balikpapan pada tahun 2020 mencapai 108.418 pelanggan. Dari total pelanggan tersebut didominasi dari pelanggan rumah tangga sebanyak 102.410 pelanggan dan niaga sebanyak 3.727 pelanggan. Total air yang disalurkan mencapai 25.879.931m³ dengan total nilai yang dihasilkan sebesar Rp 244.118.115.629.

Tabel 2.108 Konsumen Air Bersih di Kota Balikpapan Tahun 2020

Jenis Pelanggan	Jumlah Pelanggan	Air yang Disalurkan (m³)	Nilai (Rp)
Sosial	1.457	1.138.936	3.065.759.323
Rumah Tangga	102.410	22.665.569	221.578.288.711
Instansi Pemerintah	262	415.004	1.681.345.028
Niaga	3.727	1.389.057	17.646.112.119
Industri	12	7.435	146.610.448
Khusus	551	263.930	4. 635.849.637

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2021, BPS Kota Balikpapan

Sebagai salah satu fasilitas pelayanan publik, ketersediaan listrik menjadi hal yang sangat penting dalam menunjang aktivitas masyarakat, industri, hingga fasilitas publik yang ada. Kota Balikpapan sebagai salah satu kota dengan aktivitas perekonomian yang cukup maju di Pulau Kalimantan memang memiliki kebutuhan listrik yang cukup besar. Hal ini bisa dilihat dari jumlah pelanggan yang terus meningkat setiap tahunnya.

Untuk pelanggan rumah tangga sendiri sudah mencapai 213.850 pelanggan hingga tahun 2020. Jumlah ini meningkat cukup banyak jika dibandingkan dengan tahun 2016, pelanggan listrik rumah tangga saat itu sebanyak 172.164. hal yang sama juga terjadi pada fasilitas publik. Hingga tahun 2020, jumlah pelanggan yang masuk dalam kategori publik mencapai 1.113, angka ini juga meningkat cukup tajam, pada tahun 2016 jumlahnya baru mencapai 778 pelanggan. Peningkatan jumlah pelanggan juga terjadi pada sektor bisnis dengan total sebanyak 16.859 pelanggan. Padahal pada tahun 2016 jumlahnya hanya sebanyak 14.705. pada sektor bisnis memang mengalami peningkatan jumlah pelanggan yang konsisten setiap tahunnya, yang mana rata-rata meningkat sebanyak 1.000an pelanggan. Adapun untuk sektor industri, jumlahnya menjadi yang paling sedikit dibandingkan sektor lainnya karena hanya memiliki 85 pelanggan. Meningkat sedikit jika dibandingkan pada tahun 2016 yang baru memiliki 83 pelanggan.

Tabel 2.109 Jumlah Pelanggan Listrik Berdasarkan Kelompok Tarif Tahun 2016-2020

Kelompok Tarif	2016	2017	2018	2019	2020
Sosial	2.608	2.781	2.953	3.041	3.233
Rumah Tangga	172.164	184.167	194.396	204.281	213.850
Bisnis	14.705	15.592	16.183	16.388	16.859
Industri	83	87	91	86	85
Publik	778	793	947	1.089	1.113
Jumlah	190.338	203.420	214.570	224.885	235.140

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2021, BPS Kota Balikpapan

Meningkatnya jumlah pelanggan pengguna listrik setiap tahunnya, tentu saja berpengaruh pada kebutuhan listrik di Kota Balikpapan. Produksi listrik terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017, produksi listrik mencapai 948.278.941 KWh. Secara perlahan-lahan meningkat setiap tahunnya, hingga akhir tahun 2020, produksi listrik sudah mencapai 1.088.423.119 KWh. Adapun listrik terjual juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017, jumlah listrik yang terjual di Kota Balikpapan sebanyak 902.556.690 KWh. Jumlahnya pun juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, hingga tahun 2020, jumlah listrik terjual sebanyak 1.046.308.251 KWh.

Tabel 2.110 Kondisi Penyediaan Listrik di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Daya Terpasang (KW)	477.478.872	516.162.322	563.062.959	516.477.000	613.764.772
Produksi Listrik (KWh)	962.222.729	948.278.941	981.711.526	1.096.861.192	1.088.423.119
Listrik Terjual (KWh)	904.321.463	902.556.690	938.862.796	1.051.811.715	1.046.308.251
Susut/Hilang (KWh)	57.900.578	45.722.251	41.763.730	45.049.747	42.114.868

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2020, BPS Kota Balikpapan

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

1) Realisasi investasi

Realisasi investasi di Kota Balikpapan hingga sejauh ini sudah cukup baik. Investasi dari modal dalam negeri dan modal asing walaupun setiap tahunnya mengalami fluktuasi angka, akan tetapi jumlahnya cukup banyak dengan penyerapan tenaga yang juga cukup besar.

Tabel 2.111 Realisasi Investasi Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
anaman Modal Dalam Negeri (miliar rupiah)	255,04	16,03	26,71	2.500,51	13.849,41
Penanaman Modal Asing (miliar rupiah)	5.585,14	2.284,44	865,60	374,61	519,75
Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia	2.058	538	760	2.469	7.023
Penyerapan Tenaga Kerja Asing	41	29	21	31	56

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2021, BPS Kota Balikpapan

2) Angka Kriminalitas

Secara umum kondisi keamanan dan ketertiban pada tahun 2020 relatif kondusif baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dunia usaha. Berbagai tindakan kriminalitas, unjuk rasa serta mogok kerja yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap oleh aparatur keamanan. Hal ini dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.112 Banyaknya Peristiwa Kejahatan dan Pelanggaran yang Dilaporkan Menurut Jenisnya Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2020

No.	Jenis Kejahatan/Pelanggaran	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Narkoba	369	276	319	371	233
2	Kebakaran	13	12	5	5	2
3	Pemalsuan Surat	1	3	2	3	2
4	Perzinahan	9	9	5	8	2
5	Melanggar Kesopanan/Cabul	45	34	37	36	23
6	Perjudian	23	27	15	7	5
7	Pembunuhan	4	5	9	2	2
8	Penganiayaan Berat	131	124	-	58	46
9	Penganiayaan Ringan	47	45	-	25	6
10	Pencurian dengan pemberatan	229	226	-	114	106
11	Pencurian Biasa	90	85	80	50	54
12	Pencurian dengan Kekerasan	11	48	42	22	17
13	Pemerasan	1	-	1	-	3
14	Penggelapan	84	54	62	39	45
15	Penipuan	68	65	51	35	20
16	Perusakan	23	14	16	6	4
17	Curanmor R2	229	271	137	100	81
18	Curanmor R4	13	12	6	-	2
19	Lain-lain	791	796	1.000	230	88
Jumlah		2.181	2.106	1.787	1.111	741

Sumber: Polresta Balikpapan Tahun 2021

3) Jumlah Demo

Aktivitas investasi perlu didukung dengan kondusifitas kota. Salah satu indikator kondusifitas kota dapat dilihat dari kemampuan Pemerintah Kota dalam mengatasi penyampaian aspirasi masyarakat yang disampaikan secara terbuka

melalui kegiatan demonstrasi massa. Apabila tidak dikelola dengan baik, kegiatan demonstrasi tersebut menjadi faktor penghambat iklim investasi. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, terdapat aktivitas demonstrasi massa yang bersifat damai, sehingga tetap terjaga kondusifitas Kota. Tahun 2020 terjadi sebanyak 11 kali kegiatan demonstrasi. Terjaganya kondusifitas di Kota Balikpapan didukung pula oleh adanya Markas Kodam VI Tanjung Pura dan Markas Kepolisian Daerah Kalimantan Timur yang juga sebagai faktor kompetitif untuk menarik minat investasi, dilihat dari keamanan berinvestasi. Berkenaan dengan indikator iklim berinvestasi salah satunya yaitu proses perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.

4) Usaha Kemudahan Perizinan

Kemudahan perizinan menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan jumlah investasi. Apalagi dengan begitu banyaknya potensi baik di sektor perdagangan maupun industri di Kota Balikpapan yang dapat digarap oleh para investor. Oleh karenanya penting untuk kemudian melihat sejauh mana kemudahan investasi di Kota Balikpapan.

Berdasarkan dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kota Balikpapan yang dirilis oleh BPS, pengurusan izin di Kota Balikpapan cukup banyak. Dari grafiknya, memang masih terjadi fluktuasi angka setiap tahunnya. Pada tahun 2017, sebanyak 9.060 pengajuan izin yang dilakukan. Angka ini menurun pada tahun 2018 menjadi 6.666 izin. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, angka ini kembali mengalami peningkatan hingga 15.987 pengajuan izin yang dilakukan pada tahun 2020.

Jika diuraikan lebih lanjut, walaupun terjadi penurunan dalam beberapa tahun terakhir, akan tetapi pengajuan izin untuk tempat usaha mengalami lonjakan yang cukup tinggi dari tahun 2017 sampai 2019. Pada tahun 2017, jumlah pengajuan izin tempat usaha hanya 1.799 izin. Lalu meningkat pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 hingga 3.514 izin. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah pengajuan izin tempat usaha menjadi 1.982 izin. Sementara untuk izin tempat tinggal jumlahnya cenderung menurun. Pada tahun 2017, pengajuan izin tempat tinggal mencapai 895 izin. Sempat kembali meningkat tajam pada tahun 2018 menjadi 1.202 izin. Jumlahnya kembali merosot pada tahun 2019 dan tahun 2020 hingga menjadi hanya sebanyak 599 izin.

Tabel 2.113 Jumlah Tempat Usaha, Tempat Tinggal, dan Lain-lain yang Mengurus Izin di DPMPT Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

Izin Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
Tempat Usaha	3.545	1.799	2.042	3.514	1.982
Tempat Tinggal	587	895	1.202	701	599
Lainnya	6.934	6.366	3.422	1.164	13.406
Jumlah	11.066	9.060	6.666	5.379	15.987

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2021, BPS Kota Balikpapan

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Salah satu penunjang keberhasilan dari pelaksanaan pelayanan publik dan pengelolaan urusan daerah adalah kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Semakin baik tingkat kualitas dan kompetensi ASN tentu saja berkorelasi positif dengan tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karenanya penting dilakukan upaya peningkatan kualitas ASN sebagai wujud menciptakan tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Fungsi tersebut menjadi ranah dari urusan kepegawaian yang diemban oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Untuk mengukur sejauh mana tingkat pengembangan ASN terdapat 4 indikator yang digunakan yaitu Indeks Profesionalitas ASN, Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai syarat jabatan, Persentase Penurunan Pelanggaran disiplin PNS, dan Skor nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat.Untuk indikator yang pertama yaitu indeks profesionalitas ASN. Kriteria Pengukuran tingkat Profesionalitas ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin. Merujuk pada data historis yang ada, indeks profesionalitas ASN mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 realisasi indikator ini sebesar 83,43, angka ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai 93,3 pada tahun 2020.

Terkait dengan perbedaan data tersebut, proses integrasi data kepegawaian yang dilakukan saat ini memang masih belum optimal. Proses integrasi sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2019. Koordinasi dengan BKN juga telah dilakukan sehingga saat ini masih berproses untuk integrasi daerah. Sifatnya bisa dilihat dari dari SKPK agar bisa diintegrasikan dengan SIMPEG di BKPSDM. Pada tahun 2020 proses integrasi data kepegawaian terkendala karena keterbatasan SDM sehingga belum sampai pada integrasi satu arah. Sehingga akan tetap dilakukan proses integrasi 2 arah pada tahun 2021.

Selain itu kendala lainnya adalah tingkat kedisiplinan pegawai yang masih perlu untuk ditingkatkan. Dari data historis terkait persentase penurunan pelanggaran disiplin PNS, penurunan persentase pelanggaran disiplin PNS meningkatkan adanya tren yang semakin baik karena angka realisasinya semakin tinggi. Pada tahun 2016, realisasi indikator ini masih berada diangka 0,32%. Lalu meningkat menjadi 19,05% di tahun 2017. Hingga tahun 2019, persentase penurunannya sudah mencapai 35,71%. Walaupun persentase penurunannya semakin meningkat akan tetapi upaya untuk peningkatan disiplin terhadap PNS harus tetap dimaksimalkan. Namun, pada tahun 2020, realisasi indikator ini kembali mengalami penurunan menjadi 11,11%.

Berdasarkan data yang sudah direkap, terdapat 99 pelanggaran disiplin ASN sejak tahun 2015 hingga tahun 2020. Upaya untuk meminimalisir pelanggar disiplin ini belum dilakukan secara kolektif oleh semua OPD. Hal ini dikarenakan sistem pengukuran kedisiplinan belum dilakukan secara integratif masih melalui OPD masing-masing. Terkait dengan absensi pun juga belum dilaksanakan secara

integratif masih melalui OPD masing-masing. Fungsi pengawasan dari inspektorat sudah dilakukan dengan baik akan tetapi belum didukung dengan fungsi pengawasan dari setiap OPD. Sejauh ini upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai adalah pembentukan satgas pedis (Satuan Tugas Peningkatan Disiplin), pemberian *reward* kepada PNS teladan masih belum optimal untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai.

Indikator selanjutnya adalah pengukuran tingkat ketepatan posisi aparatur dengan kompetensi sesuai syarat jabatan. Pengukuran indikator ini menjadi penting untuk mendapatkan gambaran seluruh jabatan yang tersedia dijabat oleh ASN yang memiliki kompetensi yang baik sehingga pelaksanaan kinerja juga akan semakin meningkat. Pada tahun 2016 realisasi indikator ini sebesar 82,45%. Peningkatan terus terjadi hingga tahun 2018 mencapai 92,9%. Akan tetapi pada tahun 2019 sampai tahun 2020 terjadi penurunan, hingga menjadi 80,44%.

Ketercapaian indikator ini sangat ditentukan dari penerapan sistem merit ASN. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem tersebut adalah nilai indeks yang ada saat ini belum tervalidasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Telah dilakukan penilaian mandiri penerapan sistem merit melalui Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit https://sipinter. kasn.go.id/. Total Akhir Penilaian Instansi sebelum diverifikasi KASN : 259 namun belum divalidasi. Secara keseluruhan dari hasil identifikasi penilaian yang dilakukan masih terdapat 8 unsur yang menjadi titik lemah.

Untuk melihat mana tingkat keberhasilan upaya peningkatan ASN yang telah dilaksanakan, salah satu indikator yang digunakan adalah skor dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Adapun realisasi skor SKM menunjukkan tren meningkat setiap tahunnya dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Pada tahun 2016, skor dari hasil SKM sebesar 75,95, angka ini terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 80,37 pada tahun 2020.

Perkembangan teknologi dalam revolusi industri 4.0 menuntut pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*) dan pembangunan SDM yang menguasai IT. Kebijakan dari pusat, pada tahun 2024 diarahkan menuju smart ASN yaitu seluruh ASN sudah menguasai IT. Upaya yang dilakukan saat ini adalah pemberian pelatihan terhadap guru-guru yang masih kurang melek IT. Adapun terkait pelayanan akan melakukan sistem kepegawaian secara online. Tahun 2021 sudah dianggarkan untuk aplikasi SIMPEG terkait dengan kepegawaian dan penyediaan SDM berbasis IT.

Selain itu BKPSDM juga terus mengupayakan pembuatan aplikasi diklat secara daring. Hal ini untuk menyiasati keterbatasan ruang gerak karena kondisi pandemic yang terjadi. Untuk aplikasi yang dibuat baru proyek awal dan

kemudian ada evaluasi pembelajaran sifatnya CBT yang akan digunakan untuk kenaikan pangkat. Akan tetapi aplikasinya saat ini masih bermasalah sehingga belum bisa ditunjukkan secara fisik.

Tabel 2.114 Capaian Tingkat Pengembangan ASN Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Profesionalitas ASN	83,43	89	92,58	93,04	93,3
Penurunan Pelanggaran disiplin PNS (%)	0,32	19,05	17,65	35,71	11,11
Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Syarat Jabatan (%)	82,45	83,85	92,9	89,39	80,44
Skor Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	75,95	78,69	78,78	79,96	80,37

Sumber : BKPSDM, 2021

Tabel 2.115 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi DaerahTerhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Balikpapan

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun					Standar	Perkiraan capaian Target akhir RPJMD (2021)	Sumber
	2016	2017	2018	2019	2020			
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
Laju Inflasi (%)	4,13	2,45	3,13	1,88	0,65	5(+ - 1)	Tercapai	BPS Balikpapan, 2021
Indeks Gini	0,28	0,32	0,32	0,302	0,311	0,3	Tidak Tercapai	BPS Balikpapan, 2021
Tingkat Kemiskinan (%)	2,81	2,82	2,64	2,42	2,57	2,3	Tidak Tercapai	BPS Balikpapan, 2021
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,73	10,39	9,52	7,29	9,00	4,55	Tidak Tercapai	BPS Balikpapan, 2021
PDRB Perkapita ADHB (juta rupiah)	128,12	137,92	151,3	159,91	155,98	Rp. 126,64 (Juta)	Tercapai	BPS Balikpapan, 2021
PDRB Non Migas (ADHK) (Rp/Triliun)	46,06	42,28	67,5	40,6	40,61	Rp. 38,62 (Triliun)	Tercapai	BPS Balikpapan, 2021
Fokus Kesejahteraan Sosial								
Pendidikan								
Angka Melek Huruf	99,01	99,38	99,33	99,38	99,2	99,91%	Tidak Tercapai	BPS Balikpapan, 2021
Jumlah Kunjungan Perpustakaan	148.447	202.263	134.566	98.192	19.818	190.000	Tidak Tercapai	Dispustakar, 2021
Rata-Rata Lama Sekolah	10,54	10,55	10,65	10,67	10,68	10,53	Tercapai	BPS Balikpapan, 2021
Angka Harapan Lama Sekolah	13,59	13,75	14,12	14,13	14,14	15,73	Tidak Tercapai	BPS Balikpapan, 2021
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,02	0,02	0,01	0,03	0,03	0,02	Tidak Tercapai	Disdikbud, 2021
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,2	0,08	0,08	0,03	0,11	0,05	Tidak Tercapai	Disdikbud, 2021
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100	100	Tercapai	Disdikbud, 2021
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	100	100	100	Tercapai	Disdikbud, 2021
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	N/A	56	98,11	107,33	103,85	107,36	Tercapai	Disdikbud, 2021
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	N/A	84,54	115,3	115,3	100,56	101,81	Tercapai	Disdikbud, 2021
Kesehatan								
Usia Harapan Hidup	73,96	73,97	74,18	74,41	74,49	74,04	Tercapai	BPS Balikpapan, 2021
Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	63	65	66	96,5	83,65	70	Tercapai	Dinkes, 2021
Fokus Budaya dan Olahraga								
Peningkatan jumlah pemuda berprestasi	-	48	53	57	31	50	Tidak Tercapai	DPOP, 2021
Peningkatan prestasi olahraga	24	55	516	1.643	25	40 Provinsi, 41 Nasional	Tidak Tercapai	DPOP, 2021
Presentasi ketersediaan sarana dan prasarana olah raga	-	91,02	91,07	91,04	91,12	91,07	Tercapai	DPOP, 2021

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun					Standar	Perkiraan capaian Target akhir RPJMD (2021)	Sumber
	2016	2017	2018	2019	2020			
Peningkatan prestasi di bidang seni, budaya, dan keagamaan	1	6	6	6	2	6	Tidak Tercapai	http://esakip.balikpapan.go.id
Cagar budaya yang dilindungi	71	100	119	129	144	141	Tercapai	http://esakip.balikpapan.go.id
ASPEK PELAYANAN UMUM								
Fokus Layanan Urusan Wajib								
Pendidikan								
APK PAUD/TK/Sederajat	N/A	76	86	22,85	65,68	77	Tidak Tercapai	BPS Balikpapan, 2021
APK SD/MI/Sederajat	104,92	108,21	107,35	107,35	105,52	93,25	Tercapai	BPS Balikpapan, 2021
APK SMP/MTs/Sederajat	99,66	85,23	92,78	92,78	96,81	84,25	Tercapai	BPS Balikpapan, 2021
APM SD/MI/Sederajat	98,68	98,19	99,98	99,98	99,52	98,72	Tercapai	BPS Balikpapan, 2021
APM SMP/MTs/Sederajat	80,52	81,51	82,93	82,93	83,24	91,23	Tidak Tercapai	BPS Balikpapan, 2021
APS SD/MI/Sederajat	111,8	88,21	107,35	103,01	79,8	98,37	Tercapai	Disdikbud, 2021
APS SMP/MTs/Sederajat	102,4	108,34	91,62	75,65	93,36	89,29	Tercapai	Disdikbud, 2021
Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah PAUD/TK	N/A	40,5	40,5	40,5	N/A	41,8	Tercapai	Disdikbud, 2021
Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah SD/MI/Sederajat	N/A	100,54	26,81	68,5	30,18	26,81	Tercapai	Disdikbud, 2021
Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah SMP/MTs/Sederajat	N/A	55,96	55,96	89,06	28,49	20,57	Tercapai	Disdikbud, 2021
Persentase bangunan SD/MI kondisi bangunan baik	N/A	68,81	11,15	85,27	57,75	11.21	Tercapai	Disdikbud, 2021
Persentase bangunan SMP/MTs kondisi bangunan baik	N/A	81,59	57,13	83,37	77,11	38.4	Tercapai	Disdikbud, 2021
Kesehatan								
Proporsi Kelahiran yang dibantu tenaga kesehatan terlatih	95,13%	97%	98%	99,56%	128,56%	99%	Tercapai	Dinkes, 2021
AKB	6/100.000 KH	6/1.000 KH	7/1000 KH	7/1000 KH	7/1000 KH	1/1,000 KH	Tidak Tercapai	Dinkes, 2021
AKABA	7/100.000 KH	6/1.000 KH	8/1000 KH	7/1000 KH	7/1000 KH	2/1.000 KH	Tidak Tercapai	Dinkes, 2021
AKI	72/100.000 KH	78/100.000 KH	72/100.000 KH	64/100.000 KH	73,43 / 100.000 KH	60/100.000 KH	Tidak Tercapai	Dinkes, 2021
Angka Kesakitan	98,11%	103,26%	103,26%	74,64%	98,23%	98,35%	Tercapai	Dinkes, 2021
Prevelensi HIV dan AIDS	0,03	0,05	0,05	2,26	0,43	< 1	Tercapai	Dinkes, 2021

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun					Standar	Perkiraan capaian Target akhir RPJMD (2021)	Sumber
	2016	2017	2018	2019	2020			
Angka Kejadian DBD per 100.000 penduduk	657,06/100.000 penduduk	78,3 / 100.000 penduduk	78,3 / 100.000 penduduk	240,65/100.000 penduduk	112,46/100.000 penduduk	250/100.000 penduduk	Tercapai	Dinkes, 2021
Prevelensi TBC	300,00/100.000 penduduk	199,5/100.000 penduduk	199,50/100.000 penduduk	272,29/100.000 penduduk	123,90/100.000 penduduk	140/100.000 penduduk	Tercapai	Dinkes, 2021
Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Nasional	51, 85 %	81,81%	96,30%	96,30%	96,30%	90%	Tercapai	Dinkes, 2021
Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	60%	65%	70%	98,00%	98,15%	90%	Tercapai	Dinkes, 2021
Persentase Pemenuhan SDM RS	70,00%	70,00%	70,00%	52,00%	97,32%	90%	Tercapai	Dinkes, 2021
Pekerjaan Umum								
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar		78,1	80,4	77,8	82,03	79	Tercapai	Bappedalitbang, 2021
Perda Tata Ruang (1 RTRW, 1 RDTR, 1 Insentif & Disentif)		0,06	0,1	2	2	Perda Tata Ruang (1 RTRW, 1 RDTR, 1 insentif&Disentif)	Tercapai	DPPR, 2021
Kapasitas Air Baku	1.265	1.265	1.615	1.525	1.570	1.686	Tidak Tercapai	PDAM Kota Balikpapan
Cakupan Layanan Air Minum	76,5	76,56	79,05	79,6	81,37	80,8	Tercapai	PDAM Kota Balikpapan
Cakupan Layanan Air Limbah			81,74	95	94,25	97	Tercapai	DPU, 2021
Menurunnya Titik Banjir	36	35	34	30	88	35	Tidak Tercapai	DPU, 2021
Persentase penertiban pemanfaatan ruang		0	0	98,3	98,58	98,5	Tercapai	DPPR, 2021
Indeks Aksesibilitas Kawasan Perkotaan		1,45	1,427	1,43	1,475	1,49	Tidak Tercapai	DPU, 2021
Persentase panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik		44,97	46,43	48,88	50,09	47,86	Tercapai	DPU, 2021
Kantor pemerintah dalam kondisi baik		72,58	78,08	84,8	85	90,32	Tidak tercapai	DPU, 2021
Persentase panjang trotoar yang telah memenuhi standar		10,58	12,73	14,98	14,98	10,04	Tercapai	DPU, 2021
Persentase kemantapan jalan		96,86	83,76	84,06	86,79	81,14	Tercapai	DPU, 2021
Perumahan								
Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	282,2 Ha	224,86Ha	58,58 Ha	0 Ha	153,3 Ha	257 Ha	Tercapai	Disperkim, 2021
Menurunnya *Backlog* Perumahan	33.849	49.806	49.806	87.782	92.556	56.299	Tidak Tercapai	Disperkim, 2021
Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat								

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun					Standar	Perkiraan capaian Target akhir RPJMD (2021)	Sumber
	2016	2017	2018	2019	2020			
Livable City Indeks	N/A	80,81	81,3	77,58	81,69	74,5	Tercapai	Bappedalitbang, 2021
Tingkat waktu tanggap	80,86	90	90	89,86	92,63	98,63	Tidak Tercapai	BPBD, 2021
Cakupan pelayanan bencana kebakaran	90	70	75	81	83,16	100	Tidak Tercapai	BPBD, 2021
Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	70	100	100	80	95,42	100	Tidak Tercapai	BPBD, 2021
Persentase pos kampling aktif	63,21%	63,41%	63,61%	63,81%	64,01%	64,21	Tidak Tercapai	Satpol PP, 2021
Penurunan angka kriminalitas	21%	18%	20%	18,50%	18%	16	Tercapai	Satpol PP, 2021
Rasio Petugas Linmas	2,43%	4%	4%	3,50%	4,50%	5,5	Tidak Tercapai	Satpol PP, 2021
Angka Partisipasi dalam pemilihan umum		60%	60%	82%	65%	65%	Tercapai	Kesbangpol, 2021
Penurunan prevelensi penyalahgunaan narkoba		3.0	3,1	1,8	3,8	2,9	Tercapai	Kesbangpol, 2021
Perhubungan								
Persentase penyediaan terminal angkutan penumpang barang	17	17	17	17	17	67	Tidak Tercapai	Dishub, 2021
Persentase pembangunan koridor SAUM	16	16	16	16	16	33,33	Tidak Tercapai	Dishub, 2021
Persentase penyediaan rambu jalan	27,3	32,3	34,8	37,3	31,73	47,3	Tercapai	Dishub, 2021
Persentase penyediaan ATCS	60	60	76	76	46,82	100	Tidak Tercapai	Dishub, 2021
Rasio penyediaan jalur sepeda	85	85	85	85	85	90	Tidak Tercapai	Dishub, 2021
Persentase zebra cross dan pita penggaduh untuk zona aman sekolah	10	35	35	35	12,5	100	Tidak Tercapai	Dishub, 2021
Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang tersedia		1	0			2		DPU, 2021
Persentase pengujian kendaraan bermotor	-	68	70,3	80	92,83	80	Tercapai	Dishub, 2021
Pembangunan PJU	12.239	0	13.139	13.439	14.091	13.439	Tercapai	Dishub, 2021
Peningkatan Kualitas PJU (Lampu LED)	10	11	53	69	99,41	80	Tercapai	Dishub, 2021
Lingkungan Hidup								
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,45%	61,25%	59,58%	60,19%	63,52%	60,46	Tercapai	DLH, 2021
Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai	DLH, 2021
Informasi Lingkungan yang mudah diakses	100%	100%	70%	70%	100%	100%	Tercapai	DLH, 2021
Persentase Sekolah Adiwiyata	45,45%	73,93%	74%	76%	81%	80%	Tercapai	DLH, 2021
Indeks tutupan lahan	48,12	48,12	48,15	48,24	55,4	48,32	Tercapai	DLH, 2021
Penurunan Indeks Pencemaran Udara	92,4	97,9	84,93	88,42	88,92	93,84	Tidak Tercapai	DLH, 2021
Penurunan Indeks Pencemaran Air	51,6	42,1	49,5	47,9	40,9	43,3	Tidak Tercapai	DLH, 2021
Persentase jumlah DAS yang dipantau kualitas mutunya (total DAS 42)	28,60%	31,00%	45,42%	78,50%		100%	Tercapai	DLH, 2021
Persentase pengangkutan sampah ke TPA	63,02%	64,79%	74,43%	77,86%	75,45%	60,91%	Tercapai (dengan mengacu	DLH, 2021

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun					Standar	Perkiraan capaian Target akhir RPJMD (2021)	Sumber
	2016	2017	2018	2019	2020			
							pada perhitungan Jakstrada sesuai Perwali 38 Tahun 2018)	
Persentase pengelolaan sampah di sumbernya	22,83%	22,93%	19,22%	20,37%	22,14%	25,80%	Tercapai (dengan mengacu pada perhitungan Jakstrada sesuai Perwali 38 Tahun 2018)	DLH, 2021
Kependudukan dan Catatan Sipil								
Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai	Disdukcapil, 2021
Cakupan Penerbitan KTP-el	96,49%	93,05%	97,80%	97,69%	99,32%	95.00%	Tercapai	Disdukcapil, 2021
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	82,96%	85,74%	88,61%	92,05%	92,87%	90.00%	Tercapai	Disdukcapil, 2021
Cakupan Penerbitan Akta Kematian	-	95.11%	99.31%	97,04%	88,90%	95.00%	Tidak Tercapai	Disdukcapil, 2021
Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak	30,86%	-	32,71%	56,13%	63,22%	85.00%	Tidak Tercapai	Disdukcapil, 2021
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
Persentase Pemakian Alat Kontrasepsi (CPR)	68,05%	66,32%	68,53%	70,02%	70,61%	67,50%	Tercapai	DP3AKB , 2021
Proporsi Wanita Usia Subur dalam Status Kawin yang Tidak Menggunakan KB	16,35%	18,10%	15,64%	14,48%	14,04%	14,51%	Tidak Tercapai	DP3AKB , 2021
Peningkatan Persentase Kelompok Kegiatan (POKTAN) dan Pendukung Program KKBPK	7,92%	4,52%	5,32%	8,00%	8,50%	4,63%	Tercapai	DP3AKB, 2021
Peningkatan Jumlah Kelompok Remaja Pendukung KKBPK (PIK R/M)	0,60%	1,51%	4,72%	1,59%	1,04%	1,52%	Tidak Tercapai	DP3AKB, 2021
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
Indeks Pembangunan Gender	N/A	90,11	89,74	89,76	89,65	92	Tidak tercapai	BPS Balikpapan, 2021
Persentase Penyelesaian Penanganan Korban Kekerasan terhadap Anak	62,07%	72,16%	63,64%	52,54%	72,31%	65.15%	Tercapai	DP3AKB, 2021
Peningkatan dan Penguatan Gugus Tuga KLA (Strata KLA)	Pratama	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Madya	Tercapai	DP3AKB, 2021
Sosial								
Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Dampak Bencana	N/A	84.37	85.14	68.00	86.66	100	Tidak Tercapai	Dinsos, 2021
Cakupan Pemulihan Perumahan Rusak Berat dan Roboh		60%	64%	80,07%	82%	80%	Tercapai	Dinsos, 2021

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun					Standar	Perkiraan capaian Target akhir RPJMD (2021)	Sumber
	2016	2017	2018	2019	2020			
Persentase Peserta Didik Keluarga Miskin Penerima Beasiswa		100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai, konsisten realisasi setiap tahunnya	Dinsos, 2021
Persentase PMKS Miskin yang Terlayani		23.65	100	49	165.42	100	Tercapai	Dinsos, 2021
Rumah Tidak Layak Huni				749		975	Tidak Tercapai	Disperkim, 2021
Ketenagakerjaan								
Angka Partisipasi Angkatan Kerja	63,28	63,38	64,33	65,14	62,9	64,92	Tidak Tercapai	BPS Balikpapan, 2021
Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kerja	72,40%	74,80%	334,20%	122,70%	57,80%	100%	Tidak Tercapai	Disnaker, 2021
Persentase Pencari Kerja yang difasilitasi Magang di perusahaan	27,40%	158%	190,48%	443,64%	129,60%	100%	Tercapai	Disnaker, 2021
Persentase Calon Wirausaha yang mendapatkan Pembinaan	20%	0,00%	0,00%	541,66%	0,00%	40%	Tidak Tercapai	Disnaker, 2021
Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	6,08%	28,76%	19,27%	3,98%	62,47%	22,35%	Tercapai	Disnaker, 2021
Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan dengan Perjanjian Bersama	52,99	70,42	66,19	79,36	96,58%	50	Tercapai	Disnaker, 2021
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah								
Jumlah UMKM yang bermitra dengan perusahaan	100	125	135	150	170	180	Tidak Tercapai	DKUMKMP, 2021
Persentase Jumlah Koperasi aktif	80,00%	80%	80%	84,19%	87,86%	80.90%	Tercapai	DKUMKMP, 2021
Persentase kredit UMKM di Bank	36,00%	36,41%	37,80%	36,74%	36,50%	36,6	Tidak Tercapai	DKUMKMP, 2021
Jumlah Pengurus/pengawas/pengelola Koperasi bersertifikat	90	66	100	60	60	300	Tidak Tercapai	DKUMKMP, 2021
Penanaman Modal								
Rencana investasi (Triliun)	3,29	3,49	2,24	3,75		6,50%	3,994 T (Tidak Tercapai)	DPMPT, 2021
Jumlah Tingkat Kepatuhan Perizinan penanaman modal	143	175	151	315	1241	145	Tercapai	DPMPT, 2021
Persentase rencana investor PMA terhadap PMDN swasta nasional	8,05%	37,07%	66,45%	0		25%	Tidak tercapai	DPMPT, 2021
IKM pelayanan perizinan	91,78	82,79	88,34	88,35	89	88,9	Tercapai	DPMPT, 2021
Persentase Pelayanan Perizinan yang terintegrasi secara online	12%	19%	41,25%	41,25%	41,25%	40%	Tercapai	DPMPT, 2021
Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah								

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun					Standar	Perkiraan capaian Target akhir RPJMD (2021)	Sumber
	2016	2017	2018	2019	2020			
Indeks Persepsi Korupsi	6,62	6,64	6,87	6,89	6,92	6,8	Tercapai	Bappedalitbang, 2021
Survei Kepuasan Masyarakat	69,38	78,69	78,8	81,7	80,37	80,36	Tercapai	Setdakot, 2021
Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Tercapai	BPKD, 2021
Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD yang dinilai Cukup/Baik					83,00	83,33		Setdakot, 2021
Pangan								
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Belum ada Kegiatan	81.5 (AKE 2150) 83,8 (AKE 2000)	86,2 (AKE 2150) 89,0 (AKE 2000)	87,7 (AKE 2150) 90,2 (AKE 2000)	86,2 (AKE 2100)	85	Tercapai	DP3, 2021
Persentase Pelayanan Masyarakat miskin penerima RASKIN		100%	100%	100%	85,22	100%	Tercapai	DP3, 2021
Pemberdayaan Masyarakat								
Persentase potensi peningkatan nilai Swadaya Masyarakat Dalam kegiatan Pembangunan di Kelurahan		6%	6%	7,92	10,67	7.50%	Tercapai	Setdakot, 2021
Kearsipan								
Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan SIKD	-	-	19,44%	100%	100%	75%	Tercapai	Dispustakar, 2021
Persentase SKPD yang nya telah terdata dan tertata	-	14,35%	10%	25%	25%	35%	Tercapai	Dispustakar, 2021
Informasi dan Komunikasi								
Aplikasi yang terintegrasi dengan SIPKD	-	0	1	1	1	1 Aplikasi	Tercapai	Diskominfo, 2021
Fokus Layanan Urusan Pilihan								
Pertanian								
Jumlah peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura (ton)	-	-13.420,40	-8.751,14	36.264,60	3.809,40	79.667	Tidak Tercapai	DP3, 2021
Jumlah peningkatan produksi tanaman perkebunan (ton)	-	2.064,30	565,62	1.609,36	-688,76	1.561	Tidak Tercapai	DP3, 2021
Jumlah peningkatan produksi ternak (ton)	-	1.153,58	-17.028,18	-8.628,91	4.621,00	2.901,09	Tercapai	DP3, 2021
Pariwisata								
Jumlah kunjungan wisatawan	1.065.610	2.554.423	2.802.058	2.917.514	1.082.273*	2.488.535	Tercapai	DPOP, 2021
Peningkatan event Pariwisata dan Budaya	7	1	5	8	7	14 Event (Luar 4, Dalam 10)	Tidak Tercapai	DPOP, 2021

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun					Standar	Perkiraan capaian Target akhir RPJMD (2021)	Sumber
	2016	2017	2018	2019	2020			
Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan	28	1	1	31	41	38	Tercapai	DPOP, 2021
Meningkatnya potensi objek wisata unggulan di kota Balikpapan	2	2	1	10	41	11	Tercapai	DPOP, 2021
Jumlah asosiasi yang bermitra	5	0	1	8	9	10	Tidak Tercapai	DPOP, 2021
Kelautan dan Perikanan								
Jumlah peningkatan produksi perikanan (ton)	-	-1.450,63	293,41	1.849,27	-1.700,86	6.859,40	Tidak Tercapai	DP3, 2021
Perdagangan								
Cakupan unit usaha dagang (unit usaha)		248	248	248	230	140	Tercapai	Disdag, 2021
Persentase pelaku usaha yang menjual produk sesuai standar	-	79%	66%	64,96%	64,25%	39%	Tercapai	Disdag, 2021
Persentase Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) ulang	-	66,12%	66,56%	70,73%	36,09%	80.06%	Tidak tercapai	Disdag, 2021
Persentase pasar berklasifikasi A	-	36%	36%	36%	33,30%	22%	Tercapai	Disdag, 2021
Nilai ekspor bersih (US$ Juta)	-	2.510,10	2.780,12	3.103,16	2.937,12	2.946,60	Tercapai	Disdag, 2021
Nilai pasar terhadap penilaian adipura	-	72,15	72,15	72,15	72,15	73,5	Tidak tercapai	Disdag, 2021
Perindustrian								
Pertumbuhan IKM	0,46	0,57	0,79	0,78	0,8	0.9%	Tidak Tercapai	DKUMKMP, 2021
Persentase IKM menerapkan teknologi industri	15,00%	16,00%	19,00%	36,23%	38,81%	25,00%	Tercapai	DKUMKMP, 2021
Persentase pembentukan kawasan dan sentra industri yang berwawasan lingkungan (KIK, SIKS & SIKT)								
Persentase industri eksisting terhadap perizinan industri di KIK	19,00%	37,13%	28,70%	30,00%	27,00%	28,00%	Tidak tercapai	DKUMKMP, 2021
Persentase industri eksisting terhadap siteplan SIKS	50,00%	51,35%	60,89%	58,71%	58,71%	85,00%	Tidak Tercapai	DKUMKMP, 2021
Persentase industri eksisting terhadap siteplan SIKT	0,00%	7%	8%	10,34%	10,34%	20,00%	Tidak Tercapai	DKUMKMP, 2021
Persentase industri yang menggunakan bahan baku lokal	5,00%	5,30%	11,11%	11,10%	0,00%	15,00%	Tidak Tercapai	DKUMKMP, 2021
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
Kemampuan Ekonomi Daerah								
Fasilitas Wilayah/Infrastruktur								
Fokus Iklim Berinvestasi								
Sumber Daya Manusia								
Indeks Pembangunan Manusia	78,57	79,01	79,81	80,11	80,01	79,53	Tercapai	BPS Balikpapan, 2021

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun					Standar	Perkiraan capaian Target akhir RPJMD (2021)	Sumber
	2016	2017	2018	2019	2020			
Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV								
SD/MI/ Sederajat	86,70%	94%	95%	92,45%	94,08%	86,64%	Tercapai	Disdikbud, 2021
SMP/MTs/Sederajat	90,20%	100,00%	97%	308,63%	109,26%	94,49%	Tercapai	Disdikbud, 2021
Rasio guru/murid per kelas rata-rata								
PAUD/TK	N/A	01:11	01:11	01:10	01:11	01:10	Tercapai	Disdikbud, 2021
SD/MI/Sederajat	01:26	01:22	01:26	01:23	01:23	01:20	Tidak Tercapai	Disdikbud, 2021
SMP/MTs/Sederajat	01:24	01:21	01:24	01:21	01:20	01:18	Tidak Tercapai	Disdikbud, 2021
Perencanaan								
Persentase keterisian data pembangunan dalam SIPD				131,75		85	Tercapai	Bappedalitbang, 2021
Tingkat kehadiran masyarakat dalam acara Musrenbang				114		75	Tercapai	Bappedalitbang, 2021
Persentase keselarasan dokumen RKPD dengan RPJMD Kota Balikpapan		100%	100%	100		95	Tercapai	Bappedalitbang, 2021
Persentase capaian kinerja RKPD		92.00%	96.23%	118,77		98	Tercapai	Bappedalitbang, 2021
Keuangan								
Total Pendapatan Daerah (Triliun Rupiah)	1,99	1,87	2,09	2,25	2,34	1,90 Triliun	Tercapai	BPKD, 2021
Persentase pendapatan daerah dengan realisasi anggaran di atas 85%		61.11%	69%	93,96%	93,97%	94.44%	Tidak Tercapai	BPKD, 2021
Persentase Jumlah bidang tanah pemerintah yang bersertifikat		39.72%	39.72%	47,5%		40.77%	Tercapai	BPKD, 2021
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan								
Indeks Profesionalitas ASN	83,43	89	92,58	93,04	93,3	87	Tercapai	BKPSDM, 2021
Persentase aparatur yang memperoleh pengembangan karir		26%	27%	56,91%	65,55%	100%	Tidak Tercapai	BKPSDM, 2021
Persentase penyelesaian penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS		100%	100%	60%	81,43%	100%	Tidak Tercapai	BKPSDM, 2021
Persentase fasilitasi pelayanan kesejahteraan aparatur		0%	40%	40%	66,60%	100%	Tidak Tercapai	BKPSDM, 2021
Penelitian dan Pengembangan								
Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti dalam perencanaan Pembangunan daerah		94,74%	100%	100%	100%	100%	Tercapai	Bappedalitbang, 2021

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pembangunan daerah merupakan proses perwujudan otonomi daerah yang memiliki rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Pada perencanaan pembangunan daerah, berbagai kebijakan yang akan disusun memerlukan dukungan dari perencanaan pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut dikarenakan keuangan daerah merupakan faktor strategis dan faktor penentu yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pembangunan oleh pemerintahan daerah yang mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
2. Undang– undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, yang mengatur perubahan pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, maka manajemen pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan akuntabel telah mengalami perubahan fundamental yang signifikan pada berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi:
    - Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
    - Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;
    - Penerimaan Daerah;
    - Pengeluaran Daerah;
    - Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;
    - Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah akan dikatakan baik jika berhasil dalam merealisasi program-program yang dicanangkan.

Pengelolaan keuangan menyangkut pengelolaan sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja dan sumber-sumber pembiayaan. Dan upaya untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah dapat dilakukan dengan menganalisis kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu (2016-2020)

Kinerja keuangan Kota Balikpapan periode tahun 2016-2020 menjadi gambaran kapasitas keuangan Kota Balikpapan dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah terkait erat dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Penyusunan APBD bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan Pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Dalam penyusunan APBD, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran yaitu penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*), dengan penganggaran (*budgeting*) antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

Kinerja keuangan pada periode pembangunan sebelumnya, terlihat pada kemampuan keuangan daerah yang ditunjukkan oleh Derajat Desentralisasi Fiskal melalui perbandingan kontribusi realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah APBD. Tujuan dari Derajat Desentralisasi Fiskal adalah untuk melihat persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah sehingga mengetahui kemampuan daerah dalam kemandirian keuangan yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
PENDAPATAN	1,993,392,905,725	1,873,966,991,358	2,230,736,621,233	2,469,528,492,671	2,515,508,487,764
Pendapatan Asli Daerah	560,365,008,676	612,250,040,990	646,868,407,485	764,087,241,241	609,057,640,903
Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (%)	28.11%	32.67%	29.00%	30.94%	24.21%

Sumber : BPKD Kota Balikpapan 2016-2020 (Diolah, 2021)

Derajat Desentralisasi Keuangan dimana secara rata-rata pada periode pembangunan 2016-2020 pada klasifikasi Cukup”24,21%”. Artinya kebutuhan biaya pembangunan untuk percepatan pembangunan di Kota Balikpapan lebih dominan bertumpu pada dana pusat/fiskal pusat sebesar 75,79%.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi belanja (belanja langsung dan belanja tidak langsung) maupun pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah). Struktur APBD Kota Balikpapan terdiri atas 3 (tiga) komponen utama yaitu (1) Pendapatan, (2) Belanja, dan (3) Pembiayaan. Masing-masing komponen diuraikan sebagai berikut:

A. Pendapatan

Kinerja Pendapatan Kota Balikpapan menunjukkan grafik perkembangan yang cukup baik dengan rata-rata pertumbuhan 6.40%. Dalam kurun waktu 2016 hingga 2020, pendapatan tertinggi dicapai pada tahun 2019 dan terendah pada tahun 2017. Pada tahun 2017 sempat terjadi realisasi penurunan pendapatan apabila dibandingkan dengan tahun 2016. Akan tetapi angka tersebut kembali meningkat pada tahun 2018 dan 2019. Di tahun 2020 mengalami sedikit penurunan kembali apabila dibandingkan dengan tahun 2019 sebagaimana yang dialami kabupaten/kota di Indonesia bahkan global, namun tidak lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun 2018, 2017, dan 2016.

Gambar 3.1 Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

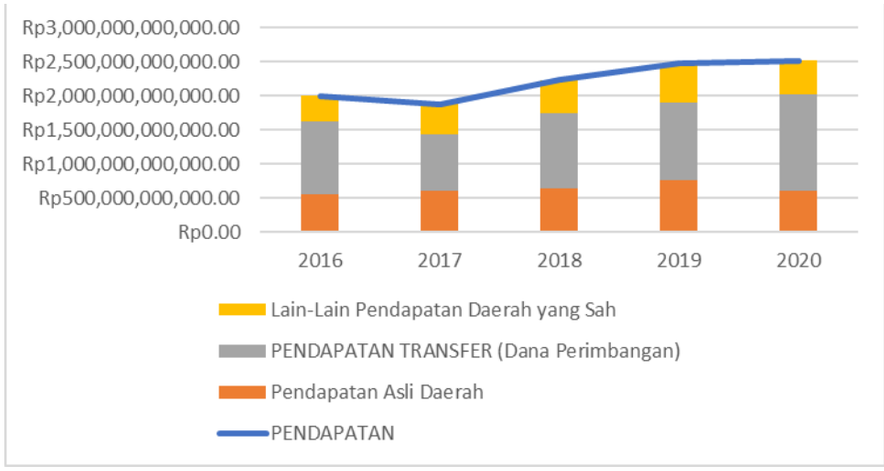

Sumber: BPKD Kota Balikpapan 2016-2020 (Diolah, 2021)

Jika dilakukan perbandingan antara target dengan realisasi pendapatan, rata-rata realisasi pendapatan daerah Kota Balikpapan tahun 2016-2020 sebesar 99,18%. Dengan realisasi pendapatan tertinggi dicapai pada tahun 2020 sebesar 120,67%. Sementara persentase realisasi terendah terjadi pada tahun 2016 dan 2019 sebesar 89,20%.

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

Tahun	Pendapatan Daerah			
	Target APBDP	Realisasi	%	Kelebihan / Kekurangan
2016	2.234.750.897.296,11	1.993.392.905.725.29	89,20%	(241.357.991.570,82)
2017	1.938.309.743.312,00	1.873.966.991.358,01	96,68%	(64.342.751.953,99)
2018	2.227.832.853.277,00	2.230.736.621.233,10	100,13%	2.903.767.956,10
2019	2.527.027.291.918,00	2.469.525.394.871,23	89,20%	(57.501.897.046,77)
2020	2.084.616.352.502,00	2.515.508.487.764,14	120,67%	430.892.135.262,14
TOTAL	11.012.537.138.305,10	11.083.133.498.752,40	99,18%	70.593.262.646,66

Sumber: BPKD Kota Balikpapan (Diolah, 2021)

Pendapatan dikelompokkan atas:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang terdiri atas: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan Periode 2016-2020 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,19%. Dimana komponen Lain-lain PAD yang Sah tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,38%. Diikuti Komponen Pajak Daerah memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 2.81%. Sementara untuk rata-rata pertumbuhan Retribusi Daerah tumbuh sebesar 1.83% dalam kurun waktu 2016 hingga 2020. Dan komponen rata-rata pertumbuhan Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan tumbuh sebesar 2,20%.

Pajak daerah memiliki kontribusi cukup signifikan bagi PAD sehingga turut mempengaruhi pola pergerakan tren pendapatan daerah. Dari 11 komponen Pajak Daerah, Pajak Penerangan Jalan memiliki kontribusi terbesar Pajak Daerah, disusul Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Berikut Tabel Realisasi Pajak Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2020.

Tabel 3.3 Realisasi Pajak Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

Pendapatan Pajak Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Hotel	39.393.467.912,95	41.789.257.635,00	44.215.141.346,00	46.406.391.626,59	23.285.718.207
Pajak Restoran	59.523.017.719,28	65.995.675.877,00	83.249.949.477,00	103.761.411.404,00	70.968.260.536
Pajak Hiburan	19.877.898.518,00	21.255.244.544,00	24.237.334.052,00	25.849.329.228,00	8.374.806.060
Pajak Reklame	8.628.558.268,48	8.444.763.528,67	9.223.028.948,00	9.722.192.805,00	8.511.349.681
Pajak Penerangan Jalan	94.427.087.967,74	103.528.130.820,00	114.417.353.678,00	122.487.731.418,00	121.046.456.795
Pajak Parkir	14.592.708.349,00	17.524.710.030,00	19.930.159.455,00	19.617.542.148,00	12.688.363.949
Pajak Air Tanah	2.204.629.208,20	2.435.810.067,60	2.512.142.075,60	2.668.658.971,60	2.007.864.693,6
Pajak Sarang Burung Walet	24.740.551,00	46.517.000,00	43.765.000,00	57.647.000,00	19.130.500
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.232.672.150,00	5.531.850.000,00	849.201.125,00	4.581.201.450,00	954.790.700
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	79.128.220.150,00	89.241.768.743,00	90.186.192.508,00	101.045.077.109,00	99.773.768.952
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	82.657.046.914,00	94.420.011.987,25	85.591.587.052,70	129.039.009.318,88	77.499.263.615
Total	403.690.047.708,65	450.213.740.232,52	474.455.854.717,30	565.238.192.479,07	425.129.773.688,6

Sumber: *Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan & BPKD, (Diolah,2021)*

Realisasi retribusi di Kota Balikpapan dari tahun 2016-2019 mengalami tren peningkatan, namun di tahun 2020 mengalami kontraksiatau penurunan pendapatan retribusi yang disebabkan adanya pandemi Covid-19. Jika dilihat berdasarkan jenis retribusinya, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan menjadi yang terbesar realisasinya. Gencarnya pembangunan di Kota Balikpapan menjadi faktor pengungkit tingginya realisasi pada jenis retribusi ini. Lain halnya dengan retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang menjadi jenis retribusi dengan realisasi terendah. Retribusi ini dalam lima tahun terakhir baru ada di tahun 2018, 2019, dan 2020. Rincian realisasi retribusi daerah Kota Balikpapan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Realisasi Retribusi Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

Jenis Retribusi	2016	2017	2018	2019	2020
Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.184.686.504,79	3.741.121.727,31	1.452.805.575,00	1.564.679.301,00	441.467.000
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	8.489.984.116,00	10.037.380.091,00	13.121.193.433,00	13.814.485.083,00	14.605.817.739
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.198.639.000,00	1.149.475.000,00	2.731.115.600,00	2.363.973.000,00	1.634.866.500
Retribusi Pelayanan Pasar	3.417.337.618,00	4.772.017.913,00	5.245.859.204,00	5.509.391.220,00	3.813.415.202
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.984.155.000,00	1.821.010.000,00	2.732.760.000,00	2.604.825.000,00	1.568.605.002
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	545.949.368,50	1.066.162.235,21	1.137.769.117,45	1.721.343.833,33	1.061.944.176,50

Retribusi Pengolahan Limbah Cair	178.591.250,00	133.758.750,00	0	0	0
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	37.048.250,00	139.171.575,00	195.353.400,00	198.032.200,00	206.228.200
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	187.937.080,00	406.531.200,00	1.004.371.200,00	693.494.400,00	890.781.600
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.434.093.703,00	4.152.604.069,00	6.414.262.837,94	6.626.130.771,54	3.822.562.268,83
Retribusi Tempat Pelelangan	0	24.450.000,00	140.380.500,00	0	0
Retribusi Terminal	62.292.000,00	28.986.000,00	22.724.500,00	10.500.000,00	24.650.000
Retribusi Tempat Khusus Parkir	0	0	126.903.000,00	238.125.000,00	111.193.000
Retribusi Rumah Potong Hewan	363.076.000,00	337.215.350,00	376.486.250,00	315.139.500,00	301.300.000
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	69.768.000,00	101.198.500,00	527.212.000,00	468.932.500,00	263.344.500
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	1.456.950.000,00	2.133.215.000,00	3.155.300.000,00	3.636.600.000,00	2.990.669.500
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0	0	6.295.000,00	7.830.000,00	10.459.875
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	13.973.184.605,50	11.230.805.350,00	16.123.603.555,00	15.360.893.661,00	17.119.153.658
Retribusi Izin Gangguan	6.694.974.345,00	5.878.032.900,00	0	0	0
Retribusi Izin Trayek	47.372.500,00	44.965.000,00	140.750.000,00	95.280.000,00	38.640.000
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	119.805.000,00	273.923.800,00	221.985.600,00	244.881.600,00	227.447.000
Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan	178.848.100,00	135.040.000,00	177.620.000,00	179.260.000,00	139.995.000
Total	**46.624.692.440,79**	**47.563.009.260,52**	**55.054.750.772,39**	**55.680.497.069,87**	**49.272.540.221,33**

Sumber: *Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan & BPKD, (Diolah, 2021)*

b. Dana Perimbangan;

Dana Perimbangan Daerah Kota Balikpapan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 9,80%. Besarnya Dana Perimbangan yang diterima, ditentukan oleh Pemerintah setiap tahunnya dengan memperhitungkan potensi objek pendapatan yang belum tergali. Sub Komponen pertama dari Dana Perimbangan adalah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan (Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak). Sub Komponen ini mampu tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan 17.42%, Realisasi terbesar terjadi pada tahun 2020, sementara realisasi terendah terjadi di tahun 2017.

Sub Komponen Dana Perimbangan kedua adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dengan rata-rata pertumbuhan pada periode 2016-2020 sebesar 2,37%. Alokasi pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Daerah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah. Sub Komponen Dana Perimbangan selanjutnya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK merupakan usulan kegiatan dari daerah ke Pemerintah Pusat sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah, dimana selama periode 2016-2020 rata-rata pertumbuhan mencapai 28,47%.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah,

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari beberapa Sub Komponen, yaitu Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya. Pendapatan Daerah yang berasal dari Lain-

lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 8,38% selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

B. Belanja

Selain melihat komponen pendapatan dari Kota Balikpapan, aspek lain yang juga dipertimbangkan adalah belanja daerah. Kapasitas belanja daerah tentu saja harus melihat kapasitas pendapatan dan kebutuhan pembangunan daerah. Efektivitas penggunaan anggaran akan tercapai apabila antara belanja dan pendapatan seimbang dan dampak dari belanja daerah mempengaruhi indikator pembangunan. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah menjadi pertimbangan bagi para *stakeholders* dalam menilai efektivitas dan efisiensi proses pembangunan daerah. Sehingga menjadi hal yang wajar apabila banyak daerah kemudian menjadi lebih bijak dalam merumuskan belanja daerah yang tepat sasaran.

Belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. Sementara itu belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Kota Balikpapan sendiri dalam hal belanja daerah, memiliki grafik yang cukup fluktuatif.

Jika dilakukan perbandingan antara target dengan realisasi belanja, rata-rata realisasi belanja daerah Kota Balikpapan tahun 2016-2020 sebesar 87%. Dengan realisasi belanja tertinggi dicapai pada tahun 2018 sebesar 88.10%. Sementara persentase realisasi terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 86,01%.

Gambar 3.2 Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

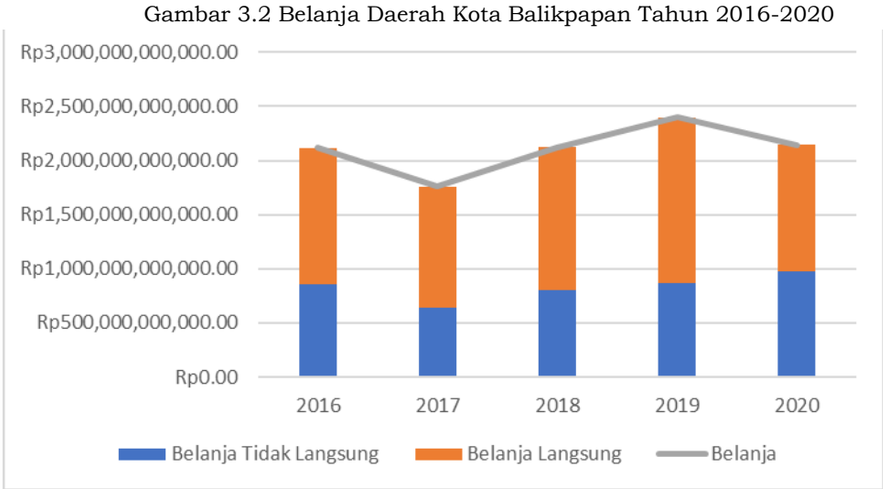

Sumber: BPKD Kota Balikpapan 2016-2020 (Diolah, 2021)

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

Tahun	Belanja Daerah			
	Target APBDP	Realisasi	%	Kelebihan / Kekurangan
2016	2.459.642.377.868,20	2.115.528.754.788,83	86,01%	(342.113.623.079,37)
2017	2.022.018.424.820,00	1.760.680.756.755,85	87,08%	(286.597.122.269,25)
2018	2.407.567.298.809,00	2.120.970.176.539,75	88,10%	(286.597.122.269,25)

2019	2.789.437.578.346,00	2.401.163.498.671,13	86,08%	(380.975.604.156,67)
2020	2.440.084.440.033,91	2.145.207.734.777,38	87,92%	(248.478.974.762,53)
TOTAL	12.069.996.168.783,10	10.549.824.661.451,10	87,00%	(1.520.171.507.331,97)

Sumber: BPKD Kota Balikpapan (Diolah, 2021)

Analisis terhadap realisasi belanja daerah selama tahun anggaran 2016-2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

- Realisasi Belanja Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp2.401.163.498.671,00. Sementara Realisasi Belanja Daerah terendah terjadi pada tahun 2017, yaitu sebesar Rp1.760.680.756.755,85. Selama periode 2016 hingga 2020 rata-rata pertumbuhan belanja sebesar 1,56%. Dari komponen belanja daerah yang membentuknya, rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung lebih tinggi dibandingkan belanja langsung. Rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung daerah pada tahun 2016-2020 mampu tumbuh sebesar 5,17%, sedangkan rata-rata pertumbuhan belanja langsung tumbuh sebesar -0,24%.

Gambar 3.3 Proporsi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

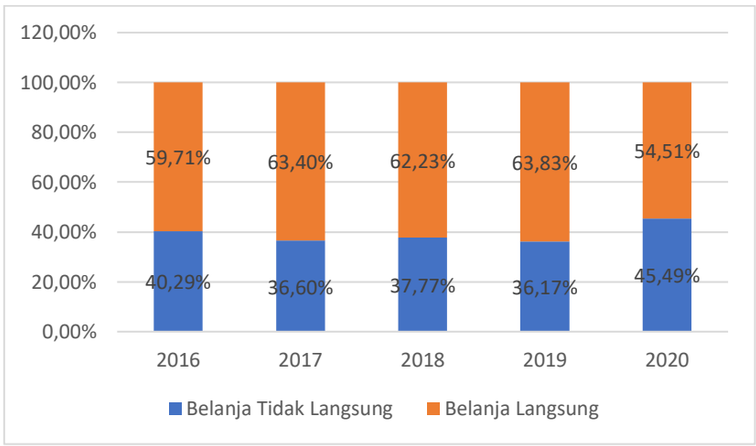

Sumber: BPKD Kota Balikpapan 2016-2020 (Diolah, 2021)

- Selama periode 2016-2020 rata-rata pertumbuhan pada komponen belanja langsung tumbuh sebesar -0,24%, yang terdiri dari sub komponen belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Sementara apabila dicermati dari proporsi belanjanya, belanja langsung Kota Balikpapan memiliki proporsi lebih yaitu dengan rata-rata sebesar 60,74% dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Sedangkan rata-rata proporsi belanja tidak langsung hanya sebesar 39,26%.

C. Pembiayaan

Pembiayaan Daerah merupakan semua pos penerimaan yang harus dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan dan perjanjian yang disepakati. Pembiayaan Daerah yang dianggarkan merupakan seluruh transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Selain juga dapat berasal dari

pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Adapun untuk pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Realisasi pembiayaan di Kota Balikpapan menunjukkan pola yang fluktuatif. Pembiayaan tertinggi terjadi di tahun 2020 sebesar Rp309.171.718.088,00. Hal ini dikarenakan besarnya penerimaan pembiayaan yang mencapai Rp323.831.718.088,00 sedangkan pengeluaran pembiayaan hanya Rp14.660.000.000,00. Sementara pada tahun 2017 terjadi penurunan yang cukup signifikan dengan pembiayaan sebesar Rp85.007.745.930,00. Menurunnya angka pembiayaan ini dikarenakan penerimaan yang menurun cukup drastis menjadi Rp102.568.681.508,00 sedangkan pengeluaran meningkat tajam menjadi Rp17.560.935.578,00. Jika dilihat rata-rata pertumbuhan pembiayaan dalam kurun waktu 2016-2020 adalah sebesar 24,17%.

Untuk dapat menghitung proyeksi pendapatan daerah di masa mendatang maka perlu menghitung terlebih dahulu pertumbuhan realisasi pendapatan daerah selama 5 (lima) tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Kota Balikpapan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp) - (AUDITED)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN	1,993,392,905,725.29	1,873,966,991,358.01	2,230,736,621,233.10	2,469,525,394,871.23	2,515,508,487,764.14	6.40
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	560,365,008,676.29	612,250,040,990.01	646,868,407,485.10	764,084,143,441.05	609,057,640,903.42	3.19
1.1.1.	Pajak daerah	403,690,047,708.65	450,213,740,232.52	474,455,854,717.30	565,236,192,479.07	425,129,773,688.60	2.81
1.1.2.	Retribusi daerah	46,624,692,440.79	47,563,009,260.52	55,054,750,772.39	55,650,699,269.87	49,231,471,921.33	1.83
1.1.3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	15,051,835,627.69	15,163,120,190.93	14,360,001,940.84	16,870,674,739.20	16,174,599,738.41	2.20
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	94,998,432,899.16	99,310,171,306.04	102,997,800,054.57	126,326,576,952.91	118,521,795,555.08	6.18
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER (Dana Perimbangan)	1,066,561,649,134.00	817,394,319,468.00	1,096,230,492,809.00	1,136,041,501,529.00	1,418,154,115,889.00	9.80
1.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan (Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak)	600,652,277,913.00	363,155,405,606.00	593,423,843,898.00	524,878,519,044.00	825,893,543,747.00	17.42
1.2.1.01	Bagi Hasil Pajak						
1.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam						
1.2.1.03	Dana alokasi umum	391,898,857,000.00	392,621,094,000.00	410,543,293,000.00	439,818,664,000.00	429,199,860,000.00	2.37
1.2.1.04	Dana alokasi khusus	74,010,514,221.00	61,617,819,862.00	92,263,355,911.00	171,344,318,485.00	163,060,712,142.00	28.47
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	366,466,247,915.00	444,322,630,900.00	487,637,720,939.00	569,399,749,901.18	488,296,730,971.72	8.38
1.3.1	Hibah	5,070,000,000.00	2,394,000,000.00	3,300,000,000.00	67,556,501,863.18	76,254,706,805.72	486.28
1.3.2	Dana darurat			-	-		
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)	181,980,819,000.00	237,077,189,000.00	266,019,978,000.00	298,759,062,038.00	230,943,325,166.00	8.02
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)	76,374,378,915.00	152,578,941,900.00	167,488,330,939.00	46,534,186,000.00	71,303,699,000.00	22.64
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	103,041,050,000.00	52,272,500,000.00	50,829,412,000.00	156,550,000,000.00	109,795,000,000.00	31.52
2	Belanja	2,115,528,754,788.83	1,760,680,756,755.85	2,120,970,176,539.75	2,401,163,498,671.13	2,145,207,734,777.38	1.56
2.1	Belanja Tidak Langsung	852,431,100,615.53	644,341,492,853.75	801,071,613,902.85	868,514,656,220.34	975,790,625,486.21	5.17
2.1.1	Belanja Pegawai	706,693,499,418.53	574,721,273,231.75	726,387,818,545.85	745,557,517,225.34	695,107,777,957.31	0.90
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-		
2.1.3	Belanja Subsidi	800,000,000.00	1,000,000,000.00	800,000,000.00	1,000,000,000.00	-	10.00
2.1.4	Belanja Hibah	142,574,661,901.00	67,248,807,434.00	68,336,760,377.00	114,721,353,514.00	119,747,002,459.22	5.26
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	433,522,400.00	117,323,700.00	1,092,093,800.00	2,228,826,800.00	39,228,690,000.00	630.51
2.1.6	Belanja Bagi Hasil		-				
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	998,806,796.00	1,076,238,488.00	998,806,796.00	3,141,232,527.00	1,271,220,600.00	38.88
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	930,610,100.00	177,850,000.00	3,456,134,384.00	1,865,726,154.00	120,435,934,469.68	2017.89
2.2	Belanja Langsung	1,263,284,604,173.30	1,116,339,263,902.10	1,319,898,562,636.90	1,532,648,842,450.79	1,169,417,109,291.17	(0.24)
2.2.1	Belanja Pegawai	255,376,484,043.01	239,413,283,024.16	212,923,025,231.30	230,111,913,445.35	238,320,374,705.34	(1.42)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	443,648,282,758.75	425,034,424,786.52	498,634,959,485.02	614,766,247,648.42	502,404,048,891.32	4.53
2.2.3	Belanja Modal	564,072,887,371.54	451,891,556,091.42	608,340,577,920.58	687,770,681,357.02	428,692,685,694.51	(2.47)
3	Pembiayaan	224,891,480,572.09	85,007,745,930.00	181,868,841,735.20	262,765,199,606.15	309,171,718,088.05	28.47
3.1	Penerimaan Pembiayaan	227,891,480,572.09	102,568,681,508.00	199,228,175,213.20	291,631,786,428.55	323,831,718,088.05	24.17
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	3,000,000,000.00	17,560,935,578.00	17,359,333,478.00	28,866,586,822.40	14,660,000,000.00	125.32

Sumber: BPKD Kota Balikpapan 2016-2020

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi aset Pemerintah Kota Balikpapan, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia. Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Balikpapan tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.7 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Balikpapan

No.	Uraian	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	ASET	11,074,760,685,563.60	11,649,591,539,644.30	12,101,350,613,568.10	4.53
1.1.	ASET LANCAR	1,022,384,964,902.88	1,078,601,521,802.35	1,523,078,463,474.06	23.35
1.1.1.	Kas	291,635,286,428.55	323,831,718,088.05	679,559,534,547.81	60.44
1.1.2.	Piutang	172,113,338,238.93	161,018,692,338.31	173,826,475,092.98	0.75
1.1.3.	Belanja dibayar di muka	1,666,805,720.55	1,402,101,498.58	1,710,200,253.23	3.05
1.1.4.	Persediaan	21,208,079,020.23	23,673,183,332.62	83,245,738,228.80	131.63
1.1.5.	Investasi Jangka Panjang	535,761,455,494.62	568,675,826,544.79	584,736,515,351.24	4.48
1.2.	ASET TETAP	9,744,998,239,549.85	10,296,946,525,667.20	10,313,106,847,790.60	2.91
1.2.1.	Tanah	5,163,128,337,258.57	5,368,469,568,154.30	5,368,852,714,404.30	1.99
1.2.2.	Peralatan dan mesin	695,493,307,846.49	831,332,096,723.39	909,928,319,765.36	14.49
1.2.3.	Gedung dan bangunan	3,725,704,272,838.92	3,831,427,649,556.19	3,880,708,672,740.14	2.06
1.2.4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	2,525,044,403,333.93	2,911,177,693,181.36	3,186,760,130,538.47	12.38
1.2.5.	Aset tetap lainnya	63,058,816,574.24	62,747,452,185.24	70,399,499,845.85	5.85
1.2.6.	Konstruksi dalam pengerjaan	97,562,940,928.03	166,700,636,271.94	133,261,868,724.28	25.40
1.2.7.	Akumulasi Penyusutan	-2,524,993,839,230.33	-2,874,908,570,405.23	-3,236,804,358,227.80	13.22
1.3.	ASET LAINNYA	307,377,481,110.89	274,043,492,174.79	265,165,302,303.40	(7.04)
1.3.1.	Tagihan penjualan angsuran	3,053,493,809.13	9,177,191,503.32	7,887,790,795.22	93.25
1.3.2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	467,056,640.25	186,208,829.16	239,829,543.96	(15.67)
1.3.3.	Kemitraan dengan pihak kedua	145,500,096,000.00	145,500,096,000.00	145,500,096,000.00	0.00
1.3.4.	Aset tak berwujud	79,723,544,905.42	42,484,119,604.45	36,734,631,578.96	(30.12)
1.3.5.	Aset lain-lain	78,633,289,756.09	76,695,876,237.86	74,802,954,385.26	(2.47)
	JUMLAH ASET DAERAH	11,074,760,685,563.60	11,649,591,539,644.30	12,101,350,613,568.10	(4.53)
2	KEWAJIBAN	47,292,783,335.17	44,064,166,848.37	42,076,815,264.52	(5.67)
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	47,292,783,335.17	44,064,166,848.37	42,076,815,264.52	(5.67)
2.1.1.	Utang perhitungan pihak ketiga (PFK)	-	121,908,417.00	88,776,565.00	(27.18)
2.1.2.	Utang Belanja	38,755,732,114.57	38,348,654,034.38	31,080,244,102.57	(10.00)
2.1.3.	Pendapatan diterima dimuka	2,957,168,584.95	2,992,871,389.34	2,284,620,928.97	(11.23)
2.1.4.	Utang Jangka Pendek Lainnya	5,579,882,635.65	2,600,733,007.65	8,623,173,667.98	89.09
3	EKUITAS DANA	11,027,467,902,228.40	11,605,527,372,796.00	12,059,273,798,303.50	4.58
3.1.	EKUITAS DANA LANCAR	439,330,726,073.09	465,861,528,409.19	896,265,132,858.30	49.21
3.1.1.	SILPA	291,635,286,428.55	323,831,718,088.05	679,559,534,547.81	60.44
3.1.2.	Cadangan piutang	173,780,143,959.48	162,420,793,836.89	175,536,675,346.21	0.77
3.1.3.	Cadangan persediaan	21,208,079,020.23	23,673,183,332.62	83,245,738,228.80	131.63
3.1.4.	Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	-47,292,783,335.17	-44,064,166,848.37	-42,076,815,264.52	-5.67
3.2.	EKUITAS DANA INVESTASI	10,588,137,176,155.40	11,139,665,844,386.80	11,163,008,665,445.20	2.71
3.2.1.	Diinvestasikan dalam aset tetap	9,744,998,239,549.85	10,296,946,525,667.20	10,313,106,847,790.60	2.91
3.2.2.	Diinvestasikan dalam aset lainnya	307,377,481,110.89	274,043,492,174.79	265,165,302,303.40	(7.04)
3.2.3.	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	535,761,455,494.62	568,675,826,544.79	584,736,515,351.24	4.48
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		11,074,760,685,563.60	11,649,591,539,644.30	12,101,350,613,568.10	4.53

Sumber: BPKD Kota Balikpapan 2018-2020

Aset Pemerintah Kota Balikpapan dari kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami pertumbuhan yang meningkat dengan rata-rata sebesar 4,53%. Aset daerah akan memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai Pemerintah Kota Balikpapan yang mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun 2018 memiliki aset total sebesar Rp11.074.760.685.563,60 dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp12.101.350.613.568,10.

Kewajiban menggambarkan tentang kondisi utang Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga. Kewajiban daerah sendiri dapat dibagi menjadi 2, yakni kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Pertumbuhan kewajiban dari tahun 2018-2020 rata-rata sebesar -5.67%.

Ekuitas dana adalah selisih antara aset dengan kewajiban Pemerintah Daerah. Dimana rata-rata pertumbuhan ekuitas dana Kota Balikpapan dari tahun 2018-2020 adalah sebesar 4,58%.

Gambaran kondisi neraca daerah pada tabel di atas dapat digunakan sebagai bahan analisis kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio, dimana terdapat 2 jenis rasio yang digunakan, yakni rasio likuiditas dan solvabilitas sebagaimana sebagai berikut:

1) Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar lainnya dari sebuah entitas dengan kewajiban lancarnya untuk melihat kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Data rasio likuiditas tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8 Analisis Rasio Likuiditas Kota Balikpapan Tahun 2020

Ratio	Rumus		2020
Ratio Lancar	Aset Lancar	1,523,078,463,474.06	n/a
	Kewajiban Jangka Pendek	0	
Rasio Quick *(Quick Ratio)*	Aset Lancar - Persediaan	(1523078463474,06-83245738228,8)	34.22
	Kewajiban Jangka Pendek	42,076,815,264.52	

Sumber : BPKD Kota Balikpapan 2020 (Diolah,2021)

Hasil analisis di atas menunjukan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan memiliki kondisi pendanaan yang cukup kuat (likuid) dilihat dari hasil analisis ratio lancar, quick ratio dan rasio total hutang terhadap total asset juga bernilai sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan Pemerintah Kota Balikpapan cukup kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajiban daerahnya.

2) Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas atau disebut juga *Leverage Ratio* yaitu mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh suatu entitas dengan dana yang dipinjam dari kreditur entitas tersebut. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas tahun 2020 dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 3.9 Rasio Solvabilitas Kota Balikpapan Tahun 2020

Ratio	Rumus		2020 (%)
Rasio Kewajiban terhadap Aset	Kewajiban / Aset	42,076,815,264.52 / 12,101,350,613,568.10	0.35%
Rasio Kewajiban terhadap Ekuitas	Kewajiban / Ekuitas	42,076,815,264.52 / 12,059,273,798,303.50	0.35%

Sumber : BPKD Kota Balikpapan 2020 (Diolah,2021)

Rasio kewajiban terhadap asset di Kota Balikpapan pada tahun 2020 sangat rendah hanya 0,35% Kecilnya nilai rasio ini menunjukkan bahwa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terkait anggaran oleh Pemerintah Kota Balikpapan masih cukup jauh di bawah nilai total aset yang dimiliki. Sedangkan pada rasio kewajiban terhadap ekuitas (modal) juga sangat rendah yaitu 035%. Rasio kewajiban terhadap modal yang tertera di atas menunjukkan bahwa nilai total hutang masih jauh dibawah nilai modal yang dimiliki Pemerintah Kota Balikpapan.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang dijelaskan bahwa kebijakan masa lalu terkait dengan pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Balikpapan merupakan analisis lebih lanjut atas hasil kinerja pelaksanaan APBD selama 5 tahun terakhir dan perkembangan Neraca Daerah. Pemahaman terhadap kinerja belanja daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa mendatang. dengan pola kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah secara bertahap akan mampu keluar dari berbagai persoalan yang selama ini dihadapi. Kebijakan keuangan daerah erat kaitan dengan keberhasilan program pembangunan daerah. Oleh karena itu kebijakan keuangan daerah harus sesuai dengan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan itu sendiri. Ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pemerintah pusat, dan APBD Provinsi, maka kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penerimaan daerah, dan penajaman alokasi belanja.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran yang dimaksud adalah terkait dengan realisasi dan proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Analisis Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan anggaran untuk operasional aparatur dan kebijakan apa yang perlu dilakukan untuk melakukan efisiensi dan efektivitas kerja aparatur. Berikut adalah data realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kota Balikpapan selama 3 tahun terakhir. Tabel berikut akan menyajikan proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran Daerah untuk menentukan seberapa efisien alokasi anggaran belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama ini. Tabel berikut akan menyatakan proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran Daerah untuk menentukan seberapa efisien alokasi anggaran belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama ini dan bagaimana kebijakan di masa mendatang terkait dengan belanja aparatur ini.

Tabel 3.10 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Balikpapan

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	TA 2018	726,387,818,545.85	2,138,329,510,017.75	33.97%
2	TA 2019	745.557.517.225	2.437.328.561.011,73	30,59
3	TA 2020	698.670.023.957	2.158.596.514.177,38	32,37

Sumber : BPKD Kota Balikpapan 2020 (Diolah,2021)

Proporsi belanja pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran dari tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi dimana persentase terendah terdapat pada tahun 2019 sebesar 30,68%. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2020 mengalami kenaikan sebesar 0.15% dari tahun 2019, tetapi secara besaran nominal belanja untuk aparatur tersebut cenderung menurun. Peningkatan tersebut lebih disebabkan oleh jumlah aparatur yang jumlahnya terus bertambah. Proporsi selama periode tahun 2016 - 2020 menunjukkan bahwa belanja untuk pembangunan lebih besar proporsinya terhadap APBD dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, hal ini menunjukkan bahwa ada upaya kebijakan dan pelaksanaan anggaran yang lebih memprioritaskan keberhasilan program prioritas pembangunan daerah.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan daerah Kota Balikpapan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan kembali investasi pemerintah daerah. sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan daerah Kota Balikpapan adalah hanya pembentukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Daerah Air Minum dan Bank Pembangunan Daerah.

Pada sub bab ini akan dibahas lebih mendalam pada komponen dalam pembiayaan, yaitu analisis Penutup Defisit Anggaran, analisis SiLPA, dan analisis Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran. Analisis ini dilakukan untuk memberikan gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah yang dilakukan.

1. Analisa Sumber Defisit Rill

Analisis ini dilakukan untuk memberikan gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit atau menjadi surplus anggaran. Tabel 3.9 berikut menyajikan gambaran realisasi defisit atau surplus riil anggaran Kota Balikpapan Tahun 2016 - 2020.

Tabel 3.11 Defisit Riil Anggaran Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	1,993,392,905,725.29	1,873,966,991,358.01	2,230,736,621,233.10	2,469,525,394,871.23	2,515,508,487,767.14

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Dikurangi realisasi:					
2.	Belanja Daerah	2,115,528,754,788.83	1,760,680,756,755.85	2,120,970,176,539.75	2,401,163,498,671.13	2,145,207,734,777.38
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3,000,000,000.00	17,560,935,578.00	17,359,333,478.00	28,866,586,822.40	14,660,000,000.00
	Defisit riil	(125,135,849,063.54)	95,725,299,024.16	92,407,111,215.35	39,495,309,377.70	355,640,752,989.76

Sumber : BPKD Kota Balikpapan 2020 (Diolah,2021)

Dalam kurun waktu tahun 2017 - 2020 terjadi surplus dimana realisasi pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan sehingga tidak ada defisit anggaran. Pada tahun 2016 Kota Balikpapan pernah mengalami defisit riil yaitu sebesar Rp125,135,849,063.54, maka diperlukan penutupan defisit. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Dalam hal ini Pemerintah Kota Balikpapan untuk menutup realisasi defisit riil anggaran hanya bersumber dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana digambarkan pada Tabel 3.12

Tabel 3.12 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Balikpapan Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Defisit/ Surplus Riil	(125,135,849,063.5)	95,725,299,024.16	92,407,111,215.35	39,495,309,377.70	355,640,752,989.76
2	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	227.891.480.572,09	102.568.631.508,00	199.228.175.213,20	291.631.786.428,55	323.831.718.088,05
3	Pencairan Dana Cadangan					
4	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di pisahkan					
5	Penerimaan Pinjaman Daerah					
6	Penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah					
7	Penerimaan Piutang Daerah					

Sumber : BPKD Kota Balikpapan 2020 (Diolah,2021)

2. Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya dipergunakan sebagai sumber penerimaan pembiayaan pada APBD tahun berikutnya dan rata - rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten. Analisa SiLPA digunakan untuk melihat sumber perolehan SiLPA dan proporsi kontribusi yang diberikan.

Tabel 3.13 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	102,568,681,508.00	100	199,228,175,213.20	100	291,631,786,428.55	100	323,831,718,088.05	100	679,472,471,074.81	100
2	Pelampauan penerimaan PAD	4,394,017,263.29	4.28	43,674,757,204.01	21.92	(31,631,592,514.90)	-10.85	75,659,694,741.05	23.36	137,538,287,290.42	20.24
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	(609,218,256,749.11)	-593.96	(105,566,282,058.00)	-52.99	60,799,011,532.00	20.85	(111,743,301,824.00)	-34.51	296,070,441,166.00	43.57
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	2,070,000,000.00	2.02	(2,451,227,100.00)	-1.23	(26,263,651,061.00)	-9.01	(21,418,289,963.82)	-6.61	7,706,861,971.72	1.13
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	344,113,623,079.37	335.50	261,337,668,064.15	131.18	286,597,122,269.25	98.27	388,274,079,674.87	119.90	294,876,705,256.53	43.40

No.	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-		-		-		-		-	
7	Kegiatan lanjutan	-		-		-		-		-	

Sumber : BPKD Kota Balikpapan 2020 (Diolah,2021)

Dari Tabel 3.13 terlihat bahwa selama 3 tahun terakhir (2016-2020), terdapat kecenderungan peningkatan SiLPA (Sisa Lebih Hasil Perhitungan Anggaran) yang sebagian besar terdiri dari pelampauan pendapatan dan penghematan belanja. Pada pelampauan pendapatan banyak dipengaruhi adanya optimalisasi pendapatan daerah sedangkan penghematan belanja banyak dipengaruhi oleh sisa belanja atas pengadaan barang dan jasa mengalami penurunan namun mengalami kenaikan kembali pada tahun 2019 sebesar 119.90% dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 sebesar 43.40%, dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :

a. Terdapat penghematan/optimalisasi tender sebesar Rp62.970.000.000
b. Beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar tidak terealisasi yaitu:
   - Kegiatan pembebasan lahan Embung Aji Raden sebesar Rp30.290.408.500 dikarenakan perubahan luas rencana pembangunan dari luas ±55Ha menjadi ±57Ha.
   - Kegiatan pembebasan lahan ITK sebesar Rp9.169.573.500 dikarenakan perbedaan gambar teknis penetapan lokasi dengan gambar teknis kantor BPN Balikpapan serta adanya keberatan dari pihak-pihak di sekitar lokasi penetapan.

Hal tersebut mengidentifikasikan dua hal yaitu efektivitas dalam penghematan anggaran atau belum optimalnya penganggaran belanja daerah.

3.3. Kerangka Pendanaan

Kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Balikpapan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan untuk membiayai pembangunan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara optimal, dirumuskan dengan mempertimbangkan data realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun sebelumnya, serta data-data yang mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah, antara lain :

1) Indikator ekonomi makro, mencakup:
   - Rata-rata inflasi tahun 2016-2020 mampu terjaga pada 2,4% per tahun dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 3.4 Rata-Rata Inflasi Kota Balikpapan tahun 2016-2020

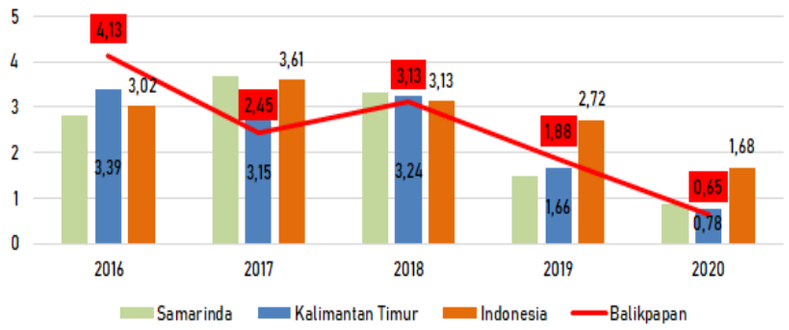

Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan 2016-2020 (Diolah,2021)

- Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan pada tahun 2016-2020 mampu tumbuh positif pada kisaran 3,5% per tahun, meskipun pada tahun 2020 terkontraksi cukup dalam pada -0,69% akibat pandemi Covid-19.

Gambar 3.5 Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan 2016-2020

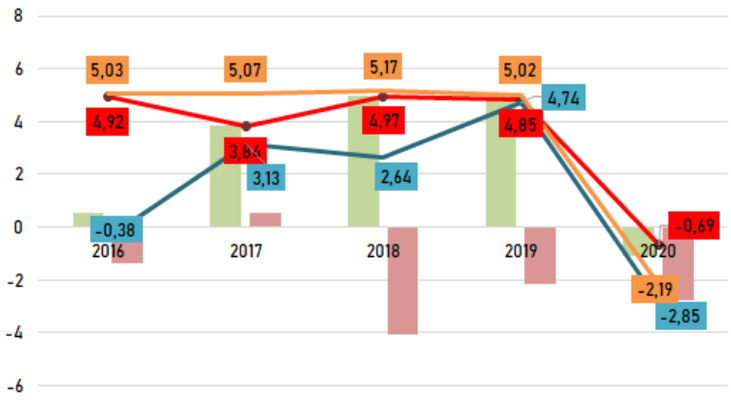

Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan 2016-2020 (Diolah,2021)

2) Kebijakan di bidang keuangan negara

Proyeksi penerimaan pendapatan daerah Kota Balikpapan tahun 2021-2026 dirumuskan dengan mendasarkan pada evaluasi penerimaan pendapatan daerah tahun 2016-2020 baik penerimaan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah maupun dana transfer dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

A. Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi sementara rata-rata pertumbuhan penerimaan pendapatan daerah Kota Balikpapan tahun 2021 sampai dengan 2026 diproyeksi mampu tumbuh optimis realistis pada kisaran 8.77%. Pendapatan Asli daerah diproyeksi akan tumbuh pada 18,68% yang didorong oleh sub komponen pajak daerah, retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Lain lain PAD yang Sah. Derajat desentralisasi fiskal daerah diproyeksikan mengalami tren kenaikan menjadi rata-rata 41,33% dalam kurun waktu 2021-2026 dibandingkan dengan rata-rata periode sebelumnya yang sebesar 28,99%. Hal ini didorong oleh optimisme pencapaian target pajak dan retribusi daerah berdasarkan hasil Kajian Potensi Pajak dan Retribusi Kota Balikpapan yang dilakukan pada tahun 2020, terutama

sumber pajak daerah unggulan seperti: Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penerangan Jalan.

Sementara Pendapatan Transfer selama periode 2021-2026 diproyeksi memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 3.54% yang didorong oleh pertumbuhan pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antara daerah, namun dengan asumsi tidak termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan (Bankeu). Sejalan dengan kebijakan Kementerian Keuangan terkait dengan DAU, maka proyeksi DAU yang ditetapkan dalam RPJMD ini bersifat dinamis atau tidak final, serta mengikuti kebijakan dari Pemerintah Pusat yang penyalurannya akan mengikuti dinamisasi perkembangan penerimaan dalam negeri neto.

Adapun Sumber Pendapatan lainnya dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah antara lain yang bersumber dari diasumsikan sesuai dengan alokasi pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.14 Sumber Pendapatan Daerah Lainnya Sementara

TAHUN	2023	2024	2025	2026
JUMLAH	517.484.190.785	574.273.054.534	857.202.105.880	934.364.707.547

Sumber : Bappedalitbang, Diolah 2021

B. Proyeksi Belanja Daerah

Analisa proyeksi belanja daerah perlu dilakukan guna mendapatkan gambaran mengenai kondisi belanja daerah Kota Balikpapan dalam kurun waktu (5) lima tahun ke depan guna membiayai belanja langsung atau belanja program untuk RPJMD.

Proyeksi Belanja dirumuskan berdasarkan tren pertumbuhan historis realisasi belanja tahun 2016-2020, prioritas pembangunan serta proporsi belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Berikut kebijakan terkait dengan Belanja daerah Kota Balikpapan:

1. Belanja daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 diproyeksikan tetap memenuhi *mandatory spending*yakni:
    - alokasi fungsi pendidikan minimal sejumlah 20% dari jumlah belanja daerah;
    - alokasi fungsi kesehatan minimal sejumlah 10% dari jumlah belanja daerah;
    - alokasi fungsi pengawasan sejumlah paling sedikit0,50% dari jumlah belanja daerah;
    - alokasi pengembangan kompetensi ASN sejumlah 0,16% dari jumlah belanja daerah.
2. Proyeksi Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 rata-rata pertumbuhannya sebesar 9,53% yang terdiri dari sub komponen:
    - Belanja Operasi diproyeksikan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,50%. Komponen Belanja Operasi terdiri dari sub komponen:

- Belanja Pegawai diproyeksikan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,84%.
- Belanja Barang dan Jasa diproyeksikan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,64%.
- Belanja Subsidi diproyeksikan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,41%.
- Belanja Hibah diproyeksikan rata-rata pertumbuhan sebesar -0.16%.
- Belanja Bantuan Sosial diproyeksikan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,72%.
- Belanja Modal diproyeksikan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,11% yang digunakan untuk belanja pembangunan daerah yang bersifat prioritas dan strategis kota.
- Belanja Tidak Terduga diproyeksikan rata-rata pertumbuhannya mengalami penurunan menjadi sebesar -5,61% seiring dengan menurunnya kasus pandemi covid-19. Namun demikian Pemerintah Kota Balikpapan tetap memprioritaskan Belanja Tidak Terduga tersebut dalam rangka penanganan pandemi covid-19 apabila di kemudian hari terjadi lonjakan kasus pandemi covid-19.

3. Belanja difokuskan untuk mendanai program terkait dengan pelaksanaan visi dan misi Walikota (Janji Walikota) di luar program prioritas untuk pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar;
4. Prioritas berikutnya untuk mendanai belanja program-program urusan pemerintahan lainnya serta penunjang tugas dan fungsi OPD.

Proyeksi pendapatan dan belanja di atas dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Hasil analisis dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan. Analisis dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat mempengaruhi besarnya sisa lebih riil perhitungan anggaran dimasa yang akan datang, yakni:

- Asumsi indikator makro ekonomi:
- Rata-Rata Inflasi Kota Balikpapan tahun 2021-2026 diharapkan terkendali pada 3,5 + 1% per tahun.
- Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan tahun 2021-2026 diproyeksi tumbuh sebesar 5,5%. Kontribusi PDRB Kota Balikpapan ke Provinsi Kalimantan Timur yang selama periode tahun 2016-2020 Kota Balikpapan menempati posisi ketiga setelah Kutai Kartanegara dan Kutai Timur. Diharapkan ke depan, Kota Balikpapan akan menempatkan posisinya menjadi penyumbang PDRB ke Kaltim urutan kedua setelah Kutai Kartanegara.

Pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan didorong oleh beberapa faktorberikut:

1. Berlanjutnya proyek RDMP Balikpapan pada tahun 2022 yang diikuti dengan penambahan kapasitas industri pengolahan (kilang minyak Pertamina) pada tahun 2023 dan 2024;

2. Pembangunan akses IKN yang diproyeksi dimulai pada tahun 2022 dan kemudian diikuti dengan pembangunan kawasan inti IKN mulai tahun 2023;
3. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kariangau yang didukung dengan pengembangan Kaltim Kariangau Terminal yang akan mendukung IKN;
4. Menguatnya permintaan domestik seiring pemulihan pasca covid-19;
5. Penguatan infrastruktur lintas Kalimantan;
6. Potensi jaringan gas rumah tangga yang mencapai 141.000 SR menjadi Proyek Strategis Nasional.

Namun terdapat beberapa tantangan yang perlu diwaspadai kedepannya seperti:

1. Proyeksi harga komoditas batubara yang relatif rendah;
2. *Natural declining hulu migas existing;*
3. Berakhirnya proyek strategis utama pada tahun 2023 dan berakhirnya proyek pembangunan RDMP pada tahun 2024;
4. Belum adanya kepastian berakhirnya pandemi covid-19.

Berdasarkan peluang dan tantangan diatas strategi yang bisa dilakukan Kota Balikpapan dalam meningkatkan perekonomian adalah sebagai berikut.

1. Tata ruang perekonomian dalam hal ini area dimana kegiatan usaha, industri dan pembangunan diletakkan yang tepat dan strategis dalam rencana IKN.
2. Membangun infrastruktur untuk keperluan perdagangan dan melakukankerjasama antar daerah dalam bidang perdagangan.
3. Menciptakan dan mengembangkan produk unggulan daerah dimana Kalimantan Timur akan menjadi IKN.
4. Memanfaatkan dan mempersiapkan potensi gas rumah tangga untuk menjadi proyek strategis nasional.

Berdasarkan asumsi di atas maka, proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi	±3,00%	±4,1%	±4,45%	±4,8%	±5,15%	±5,5%

Sumber : Bappeda Litbang Kota Balikpapan (Diolah,2021)

- Kebijakan penyelesaian kewajiban daerah;
- Kebijakan efisiensi belanja daerah dan peningkatan potensi penerimaan pendapatan.

C. Proyeksi Pembiayaan

Analisa proyeksi pembiayaan disesuaikan dengan upaya untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Sumber penerimaan

pembiayaan dimaksud melalui sisa lebih perhitunan anggaran sebelumnya dengan prioritas meningkatkan pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari pendapatan asli daerah dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diprioritaskan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan layanan infrastruktur Kota Balikpapan. Hal ini sebagaimana Perda No. 03 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Kota Balikpapan dan Perda No 9 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan.

Berdasarkan asumsi dan kebijakan di atas, maka perhitungan proyeksi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021 - 2026 Kota Balikpapan

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Rata-Rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
4	PENDAPATAN	2,179,152,180,000	2,033,633,850,200	2,389,461,809,265	2,746,136,735,207	3,035,624,773,028	3,380,370,553,259	9.53
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	692,000,000,000	750,000,000,000	989,697,571,645	1,213,096,073,825	1,358,180,045,508	1,500,831,881,593	17.08
4.1.01.	Pajak daerah	515,000,000,000	564,793,951,000	786,149,873,872	983,902,405,332	1,110,049,022,807	1,236,195,640,284	19.64
4.1.02.	Retribusi daerah	63,503,000,000	60,359,349,000	66,216,327,773	78,129,161,493	81,960,065,001	85,775,968,509	6.46
4.1.03.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	16,400,000,000	18,040,000,000	19,844,000,000	21,828,400,000	24,011,240,000	25,815,240,000	9.50
4.1.04.	Lain-lain PAD yang sah	97,097,000,000	106,806,700,000	117,487,370,000	129,236,107,000	142,159,717,700	153,045,032,800	9.53
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,482,652,180,000	1,277,633,850,200	1,392,764,237,620	1,524,040,661,382	1,668,444,727,520	1,870,538,671,666	5.24
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,085,206,990,000	982,234,141,200	1,067,824,557,720	1,166,607,013,492	1,275,267,714,841	1,394,794,486,325	5.43
4.2.01.01.	Dana Perimbangan	1,085,206,990,000	982,234,141,200	1,067,824,557,720	1,166,607,013,492	1,275,267,714,841	1,394,794,486,325	5.43
4.2.01.01.01.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	816,383,932,000	898,022,325,200	987,824,557,720	1,086,607,013,492	1,195,267,714,841	1,314,794,486,325	
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)							10.00
4.2.01.01.02.	Dana Transfer Khusus	184,611,242,000	-	-	-	-	-	
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik							
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik							
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	84,211,816,000	84,211,816,000	80,000,000,000	80,000,000,000	80,000,000,000	80,000,000,000	-1.00
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	397,445,190,000	295,399,709,000	324,939,679,900	357,433,647,890	393,177,012,679	475,744,185,341	5.06
4.2.02.01.	Pendapatan Bagi Hasil	268,545,190,000	295,399,709,000	324,939,679,900	357,433,647,890	393,177,012,679	475,744,185,341	12.20
4.2.02.02.	Bantuan Keuangan	128,900,000,000	-	-	-	-	-	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4,500,000,000	6,000,000,000	7,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000	15.71
4,3,01	Pendapatan Hibah	4,500,000,000	6,000,000,000	7,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000	15.71
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	4,500,000,000	6,000,000,000	7,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000	15.71
5	BELANJA DAERAH	2,284,285,370,623	2,445,988,110,400	2,532,829,517,821	2,910,904,939,319	3,217,302,039,741	3,584,243,770,893	9.50
5.1.	BELANJA OPERASI	1,828,074,312,467	1,964,642,385,900	2,002,829,517,821	2,242,904,939,319	2,427,302,039,741	2,701,243,770,893	8.19
5.1.01	Belanja Pegawai	808,480,943,400	869,117,014,155	875,000,000,000	910,000,000,000	950,000,000,000	975,000,000,000	3.84
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	885,776,348,467	952,209,574,600	995,829,517,821	1,200,904,939,319	1,345,302,039,741	1,594,243,770,893	12.64
5.1.04	Belanja Subsidi	1,500,000,000	1,075,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	9.41
5.1.05	Belanja Hibah	131,857,020,600	141,746,297,145	130,000,000,000	130,000,000,000	130,000,000,000	130,000,000,000	-0.16
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	460,000,000	494,500,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	1.72
5.2.	BELANJA MODAL	433,219,356,113	468,345,724,500	515,000,000,000	653,000,000,000	775,000,000,000	868,000,000,000	15.11
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	22,991,702,043	13,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	-5.61
5.3.1.	Belanja Tidak Terduga	22,991,702,043	13,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	-5.61
5.4.	BELANJA TRANFER	-	-	-	-	-	-	
5.4.1	Belanha Bagi Hasil							
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-	
6	PEMBIAYAAN	121,633,190,623	464,354,260,200	200,567,708,556	224,768,204,112	251,677,266,713	283,873,217,634	52.36
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	113,133,190,623	438,354,260,200	171,967,708,556	194,768,204,112	216,677,266,713	243,873,217,634	52.75
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8,500,000,000	26,000,000,000	28,600,000,000	30,000,000,000	35,000,000,000	40,000,000,000	50.35

Sumber : *BPKD dan BP2DRD Kota Balikpapan (Diolah,2021)*

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Dalam kerangka pendanaan ini bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja atau pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan yang berakhir tahun 2026, serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah adalah menghitung proyeksi pendapatan daerah sebagaimana pada tabel 3.14 di atas ditambah dengan Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran seperti pada tabel 3.13 diatas, sehingga menghasilkan angka proyeksi total penerimaan riil kas daerah. Proyeksi total penerima riil kas daerah dikurangi dengan proyeksi total belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama sehingga akan menghasilkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Berikut perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk pembangunan daerah Kota Balikpapan tahun 2022 s.d tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.17 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Balikpapan

No.	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2026 (Rp)
1.	Pendapatan	2.033.633.850.200	2.389.461.809.265	2.746.136.735.207	3.035.624.773.028	3.380.370.553.259
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)					
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	438.354.260.200	171.967.708.556	194.768.204.112	216.677.266.713	243.873.217.634
	Total penerimaan	2.471.988.110.400	2.561.429.517.821	2.940.904.939.319	3.252.302.039.741	3.624.243.770.893
	Dikurangi:					
4.	Belanja Mengikat	1.420.555.299.100	1.510.829.517.821	1.853.904.939.319	2.120.302.039.741	2.462.243.770.893
5.	Pengeluaran Pembiayaan	26.000.000.000	28.600.000.000	30.000.000.000	35.000.000.000	40.000.000.000
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.025.432.811.300	1.022.000.000.000	1.057.000.000.000	1.097.000.000.000	1.122.000.000.000

Sumber : *BPKD dan BP2DRD Kota Balikpapan (Diolah,2021)*

Belanja Mengikat adalah Belanja Gaji Pegawai, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, operasional wajib/Unit Pelaksana Teknis Daerah, serta hibah wajib. Hasil perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan di atas akan menjadi dasar dalam menentukan kerangka pendanaan program-program yang akan direncanakan dalam 5 (lima) tahun mendatang yang akan dirumuskan dalam RPJMD.

Tabel 3.18 Rencana Pembangunan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

NO	URAIAN	PROYEKSI				
		TAHUN 2022 (RP)	TAHUN 2023 (RP)	TAHUN 2024 (RP)	TAHUN 2025 (RP)	TAHUN 2026 (RP)
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	2.471.988.110.400,00	2.561.429.517.821,00	2.940.904.939.319,00	3.252.302.039.740,68	3.624.243.770.893,04
1	Prioritas I (Belanja Mengikat)	1.446.555.299.100,00	1.539.429.517.821,00	1.883.904.939.319,00	2.155.302.039.740,68	2.502.243.770.893,04
2	Prioritas II (Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih)	602.634.098.510,00	784.355.371.100,00	659.020.539.655,00	685.671.588.839,00	734.242.702.410,00
3	Prioritas III (Prioritas Perangkat Daerah lainnya)	422.798.712.790,00	237.644.628.900,00	397.979.460.345,00	411.328.411.161,00	387.757.297.590,00

Sumber : *BPKD dan BP2DRD Kota Balikpapan (Diolah,2021)*

Berdasarkan Tabel 3.18 diketahui bahwa rencana penggunaan kapasitas rill kemampuan keuangan daerah dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah selama (lima) 5 tahun ke depan.

Proritas Satu (I) merupakan Belanja Mengikat yang mengikat terdiri dari Belanja Gaji Pegawai, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, operasional wajib/Unit Pelaksana Teknis Daerah, serta hibah wajib

Prioritas Dua (II) merupakan program pembangunan daerah atau program unggulan *(dedicated)*Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh darah pada tahun rencana yakni:

Tabel 3.19 program pembangunan daerah atau program unggulan (dedicated) Kepala Daerah

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2026 (Rp)
	Multi years: SD SMP terpadu (Program Pengelolaan Pendidikan)	17.716.000.000,00	23.000.000.000,00	-	-	-
	Multi years: SMP Balikpapan Barat (Program Pengelolaan Pendidikan)	40.106.000.000,00	-	-	-	
	Multi years: RS Balikpapan Barat (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan)	60.000.000.000,00	102.000.000.000,00	-	-	-
	Janji Wali Kota : Seragam (Program Pengelolaan Pendidikan)	22.162.500.000,00	23.270.625.000,00	24.434.156.250,00	25.655.864.263,00	26.938.657.266,00
	Janji Wali Kota : Subsidi SPP (Program Pengelolaan Pendidikan)	57.309.282.000,00	60.174.746.100,00	63.183.483.405,00	66.342.657.576,00	69.659.790.454,00
	Janji Wali Kota : BPJS (Program Pengelolaan Jaminan Kesehatan)	69.000.000.000,00	73.830.000.000,00	78.998.100.000,00	84.527.967.000,00	90.444.924.690,00
	Multi years: Pengendalian banjir (Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan)	45.000.000.000,00	85.000.000.000,00	-	-	-
	Janji Wali Kota : Air minum	47.591.199.700,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00
	Janji Wali Kota : Balikpapan Kota MICE (1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, minus subkegiatan UPT ; 2. Program Pemasaran Pariwisata)	10.400.000.000,00	11.000.000.000,00	12.644.000.000,00	14.060.000.000,00	15.748.000.000,00
	Janji Wali Kota : Balikpapan Kreatif (1. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; 2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif)	1.100.000.000,00	1.700.000.000,00	1.950.800.000,00	2.175.000.000,00	2.420.000.000,00

Sumber : Bappedalitbang, Diolah 2021

Sedangkan untuk Program Prioritas Tiga (III) adalah program prioritas di tingkat perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan yang akan tercantum pada Bab 7 RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026 ini.

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 Permasalahan Pembangunan

4.1.1 Permasalahan Daerah

Permasalahan pembangunan merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Perumusan permasalahan pembangunan daerah merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah di masa mendatang. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Identifikasi permasalahan pembangunan didasarkan pada: (1) evaluasi capaian kinerja RPJMD tahun 2016-2021; (2) evaluasi capaian kinerja bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan (3) analisis hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Perangkat Daerah. Selain itu, identifikasi permasalahan daerah mempertimbangkan beberapa kriteria, yaitu: (1) cakupan masalah yang luas, sangat mendesak dan berpengaruh signifikan; (2) permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang akan datang dan berdampak negatif; dan (3) memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak. Adapun Kerangka Logis Permasalahan Daerah dan Perangkat Daerah ditunjukkan Gambar 4.1.

Gambar 4.1 Kerangka Logis Permasalahan Daerah dan Perangkat Daerah

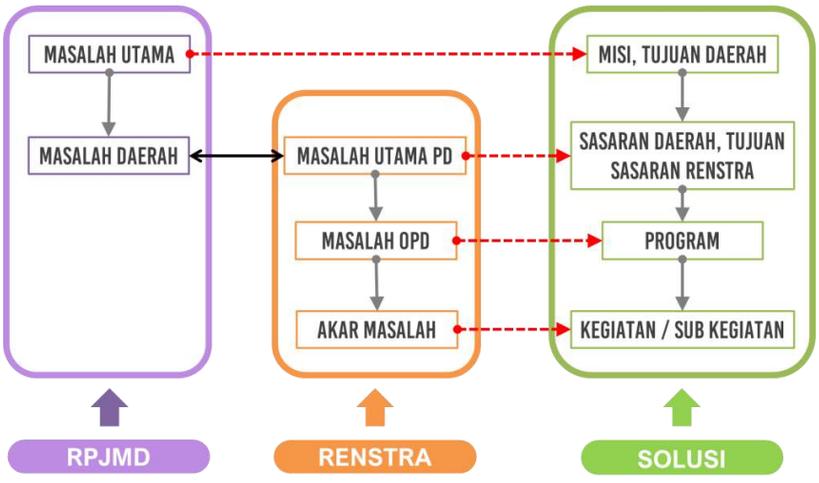

Sumber : Bappedalitbang, Diolah 2021

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab II tentang kondisi kinerja pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 berdasarkan capaian kinerja pelayanan

pemerintahan di seluruh urusan pemerintahan baik urusan wajib, urusan pilihan, maupun urusan penunjang Tahun2016-2021, dapat diketahui bahwa masih terdapat permasalahan pembangunan yang harus diberikan solusi di periode pembangunan Tahun 2021-2026. Untuk itu, dari hasil analisis pada Bab II akan dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah Kota Balikpapan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Kota Balikpapan
(Tabel T-B. 36)

	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pendidikan			
1.1.	Perhitungan jumlah kebutuhan guru yang ideal	Kondisi sampai dengan saat ini rasio guru ASN terhadap jumlah Murid adalah sebagai berikut: 1. SD : 1:54 , idealnya 1:28 2. SMP : 1:46, idealnya 1:32	Keterbatasan formasi penerimaan ASN khususnya tenaga pendidik.	Pemerintah Kota Balikpapan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memenuhi kebutuhan guru
1.2.	Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik	Masih terdapat guru yang belum tersertifikasi baik pada jenjang TK/PAUD, SD dan SMP	Masih terdapat guru yang belum bersertifikasi pada jenjang pendidikan PAUD/TK, SD/MI/Sederajad dan SMP/MTs/Sederajat	Pemerintah Kota Balikpapan mengalokasikan pendanaan sertifikasi guru semua jenjang pendidikan
		Terdapatnya guru yang belum paham IT dalam pembelajaran	Masih rendahnya kompetensi guru khususnya dibidang Teknologi Informatika	Selalu dilakukan pelatihan IT
1.3.	APK dan APM penduduk usia sekolah belum optimal	Daya tampung Sekolah tidak berbanding dengan kebutuhan sekolah dan pertumbuhan penduduk	Cakupan Ketersediaan Sarana Pendidikan	Keberadaan sekolah swasta yang berkualitas
		1. SD : 1:54 , idealnya 1:28 2. SMP : 1:46, idealnya 1:32	Belum sesuainya Rasio Jumlah Guru ASN dengan Jumlah Siswa	Pemerintah Kota Balikpapan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memenuhi kebutuhan guru
1.4.	Belum terpenuhinya Rasio ketersediaan sekolah bagi penduduk usia sekolah	Daya tampung Sekolah tidak berbanding dengan kebutuhan sekolah dan pertumbuhan penduduk	Cakupan ketersediaan sekolah SD/MI/Sederajat	Keberadaan sekolah swasta yang berkualitas
		Daya tampung Sekolah tidak berbanding dengan kebutuhan sekolah dan pertumbuhan penduduk	Cakupan ketersediaan sekolah SMP/MTs/Sederajat	Keberadaan sekolah swasta yang berkualitas
		Penambahan RKB menyesuaikan dengan kondisi luas lahan sekolah dengan mengedepankan estetika bangunan sekolah	Peningkatan daya tampung sekolah eksisting, melalui penambahan jumlah RKB	Pemerintah Kota Balikpapan mengalokasikan penambahan RKB di sekolah yang memenuhi persyaratan
		Berdasarkan hasil kajian dan perhitungan jumlah kekurangan RKB/USB oleh DISDIKBUD untuk jenjang SD sejumlah 64 RKB atau 6 USB, sedangkan untuk jenjang SMP kekurangan	Pemenuhan Daya Tampung Sekolah Negeri 75% dan Sekolah Swasta 25%	Terdapat lahan di kawasan pengembang perumahan yang dimanfaatkan untuk pembangunan USB

	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		70 RKB atau 6 USB.		
		Harus dilakukan monitoring dan evaluasi oleh DISDIKBUD setiap triwulan	Masih rendahnya tingkat aktivitas sekolah untuk melakukan update data pada sistem DAPODIK.	Sarana dan jaringan di setiap sekolah
1.5.	Orang tua siswa masih cenderung memilih sekolah negeri daripada swasta	Menurunnya pendapatan orang tua di masa pandemi covid-19	Kondisi Pancemi sangat berpengaruh pada pendapatan orang tua, sehingga orang tua lebih memilih pendidikan negeri	Memberi dukungan kepada siswa baru di sekolah swasta
		Berdasarkan hasil kajian dan perhitungan jumlah kekurangan RKB/USB untuk jenjang SD sejumlah 64 RKB atau 6 USB, sedangkan untuk jenjang SMP kekurangan 70 RKB atau 6 USB.	Keterbatasan daya tampung sekolah negeri.	Menambah RKB dan membangun USB serta dukungan pendanaan ke sekolah swasta
2.	Kesehatan			
2.1.	Masih Adanya Angka Kematian Ibu (AKI)	Perlu dilakukan upaya preventif kepada Ibu Hamil terkait dengan Informasi dan pengatuhuan pada masa kehamilan.	Belum Meratanya Akses terhadap Pengetahuan dan Informasi terkait Penanganan Ibu Hamil	Puskesmas dan tenaga pendamping di setiap kelurahan
			Masih terhambatnya Upaya Penanganan Medis terhadap Ibu Hamil	Terdapat rumah sakit khusus Ibu Anak dan program khusus ibu hamil di Puskesmas
2.2.	Masih Adanya Angka Kematian Bayi (AKB)	AKB : 7/1.000 KH	Belum Optimalnya Upaya Pengurangan Angka Kematian Bayi	Terdapat rumah sakit khusus Ibu Anak
			Belum Meratanya Akses terhadap Pengetahuan dan Informasi terkait Penanganan Bayi	Terdapat rumah sakit khusus Ibu Anak
2.3.	Kebutuhan SDM Kesehatan sesuai dengan Peningkatan Kebutuhan Layanan	Ketersedian tenaga kesehatan di rumah sakit : 97,32%	Masih Kurangnya jumlah SDM Kesehatan di Fasilitas Kesehatan	Keberadaan sekolah kejuruaan kesehatan
			Belum Meratanya Penyebaran SDM Kesehatan di Fasilitas Kesehatan	Aksesibilitas kota yang terjangkau
2.4.	Pengembangan Kualitas SDM Kesehatan Belum Optimal	Beberapa Puskesmas hahnya memiliki 2 bidan. Belum semua Puskesmas memiliki apoteker	Belum Optimalnya Upaya Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan	Keberadaan sekolah kejuruaan kesehatan
2.5.	Mutu Sarana dan Prasarana Fasilitas Masih Kurang Optimal	Terdapat puskesmas yang IPAL nya belum memenuhi standar	Kualitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Belum Sesuai dengan Standar Aturan yang Berlaku	Sumber pendanaan APBN,dan APBD Provinsi
2.6.	Ketersediaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Kesehatan Belum Optimal		Terbatasnya sarana prasarana kesehatan	Sumber pendanaan APBN,dan APBD Provinsi
2.9.	Masih Belum Optimalnya Penanganan Penyakit Tidak Menular (PTM)	Masih tingginya penderita PTM	Masih Rendahnya Penerapan Pola Hidup Sehat di Masyarakat	Karakteristik penduduk yang fokus pada hidup sehat
2.10.	Masih Tingginya Penyakit Menular yang Menjangkiti Masyarakat	Masih tingginya penderita PM	Masih Tingginya Angka Penyakit Menular	Tenaga masyarakat yang membantu
			Belum Optimalnya Upaya Penanganan Penyakit Menular	Sumber pendanaan APBN,dan APBD Provinsi
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
3.1.	Pekerjaan Umum			

	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tingkat Pemeliharaan Jalan masih belum optimal	Tingkat Kemantapan Jalan 86,79%	Belum Optimalnya Pengelolaan Data Jalan dan Belum Tersusunnya Rencana Pemeliharaan Jalan	Meningkatnya Tingkat Kemantapan Jalan melalui Pemeliharaan Rutin Jalan
	Tingkat Aksesibilitas Jalan belum optimal	Tingkat Aksesibilitas Kawasan Perkotaan 1,475	Belum terhubungnya Pusat Kawasan Perkotaan dan Kawasan Strategis Kota dengan Jaringan Jalan seperti Kawasan Industri Kariangau dan Kawasan Perkotaan Balikpapan Timur	Terbangunnya jalan akses ke Kawasan Industri Kariangau dan Kawasan Balikpapan Timur
	Terjadinya Peningkatan Titik Banjir	50 Titik Banjir pada tahun 2016 menjadi 88 Titik Banjir pada tahun 2020	Belum optimalnya kapasitas saluran drainase dan belum terbangunnya bendungan Pengendali Banjir sesuai dengan Masterplan Drainase	Berkurangnya titik banjir khususnya yang berada di DAS Ampal, DAS Klandasan Kecil, DAS Sepinggan dan DAS Batakan
	Belum tercukupinya kapasitas air baku untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat	Total penyediaan air baku 1.570 liter/detik dari total kebutuhan air minum sebesar 2.248 liter/detik	Belum selesainya pembebasan lahan dan pembangunan Embung Aji Raden dan terbatasnya sumber air baku di Kota Balikpapan	Termanfaatkannya air baku dari Embung Aji Raden dan Tersusunnya Rencana Pemenuhan Air Baku Regional
	Belum Optimalnya akses air minum aman melalui layanan air minum perpipaan untuk mencapai target SPM dan SDGs	Tingkat layanan air minum perpipaan melalui PDAM sebesar 81,37%	Keterbatasan air baku dan masih tingginya tingkat kebocoran	Menigkatnya layanan air minum perpipaan melalui PDAM dan berkurangnya tingkat kebocoran
	Masih rendahnya akses sanitasi aman untuk mencapai target SPM dan SDGs	Akses sanitasi aman pada tahun 2020 sebesar 10%	Masih terbatasnya sarana pengolahan air limbah terpusat serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah yang aman	Meningkatnya akses air limbah aman
	Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Persampahan untuk mendukung Zero Waste to Landfill	Masih Tingginya Volume Sampah yang masuk ke TPA yaitu sebesar 308,56 ton/hari pada tahun 2020	Terbatasnya lahan TPA Sampah Manggar, TPS 3R belum beroperasi secara optimal, Pengelolaan Sampah di TPA masih belum menggunakan teknologi yang mampu mereduksi volume sampah	Berkurangnya volume sampah yang masuk ke TPA Sampah Manggar dan meningkatkan kualitas pengelolaan TPA Sampah Manggar secara berkelanjutan
3.2.	Penataan Ruang			
3.2.2001.	Belum Adanya Perda Tata Ruang yang Disahkan	Penetapan Perda dalam proses	Masih belum selesainya penyusunan tiga perda yang saat ini sedang diproses	Pendampingan teknis dari Kementerian ATR/BPN untuk proses revisi RTRW Kota dan untuk RDTR Kota Balikpapan ditargetkan ditetapkan melalui Perkada sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
3.2.2002.	Pembaruan Data Peta yang Belum Optimal	Legalitas RDTR dalam proses penetapan	Belum adanya pembaruan data peta sesuai dengan perubahan terbaru	Adanya Pendampingan teknis dari Kementerian ATR/BPN untuk proses revisi RTRW Kota 2017-2037

	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.2.2003.	Belum sinkronnya antara perencanaan Tata Ruang dan pelaksanaannya	Masih terdapat pelanggaran tata ruang	Masih adanya pelaksanaan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan dokumen perencanaan	koordinasi,pendampingan teknis dan pengendalian pada proses perizinan pemanfaatan ruang
3.2.2004.	Masih Terjadinya Alih Fungsi Lahan	Fungsi lahan tidak sesuai peruntukkannya	Masih adanya alih fungsi lahan yang dilakukan oleh masyarakat	Optimalisasi upaya pengawasan dan penindakan lintas OPD terhadap setiap perizinan pemanfaatan ruang
			Belum Adanya Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Koordinasi,pendampingan teknis dan pengendalian lintas OPD pada setiap permohonan izin pemanfaatan ruang
			Pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) turut mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan	Optimalisasi upaya pengawasan dan penindakan lintas OPD terhadap setiap perizinan pemanfaatan ruang
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
	Belum optimalnya pencapaian SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Belum ada data yang menunjang SPM Bidang Perumahan dan Permukiman	Penyelenggaraan SPM Bidang Perumahan dan Permukiman belum dipahami secara optimal oleh OPD Pengampu	Tersusunnya basis data SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Tersusunnya Rencana Aksi Penyelenggaraan SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Masih adanya rumah tidak layak huni	Jumlah rumah tidak layak huni 5.580 unit	Masih terbatasnya data by name by address Rumah Tidak Layak Huni dan tidak lengkapnya readiness criteria terutama mengenai permasalahan legalitas lahan	Tersusunnya data by name by address Rumah Tidak Layak Huni dan berkurangnya rumah tidak layak huni
	Penyediaan Perumahan / Backlog Hunian Perumahan sudah tercukupi namun backlog kepemilikan rumah masih tinggi	Backlog Hunian 24.931, sedangkan Backlog Kepemilikan -92.556 unit	Hunian yang tersedia belum menjangkau secara merata baik dari sisi persebaran maupun kemampuan masyarakat untuk membeli	Berkurangnya backlog kepemilikan
	Masih adanya kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Luas kawasan kumuh 153,3 Ha	Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang mengindikasikan kawasan kumuh (jalan dan drainase lingkungan, air minum, air limbah, keteraturan bangunan, dll)	Berkurangnya luas kawasan kumuh
	Belum optimalnya pengelolaan PSU Perumahan	Hingga saat ini baru 3 Perumahan yang telah melalukan penyerahan pengelolaan PSU	Sebagian besar kondisi PSU tidak layak untuk dilakukan serah terima pengelolaan selain banyak perumahan yang sudah tidak ada lagi developer selaku pengelola PSU	Bertambahnya Perumahan yang menyerahkan pengelolaan PSU
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			
5.1.	Pengampu Satpol PP			
5.1.2001.	Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang	Penyediaan gedung kantor Satpol PP yang belum memenuhi	Belum idealnya sarana dan prasarana yang sesuai dengan Permendagri	ketersediaan lahan

	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kerja di Satpol PP	standar	Nomor 17 Tahun 2019	
5.1.2002.	Masih adanya Kendala terkait dengan Penegakan Regulasi Daerah	Cakupan penegakan Perda dan Perwali baru 85,11%	Belum optimalnya penegakan regulasi daerah karena kondisi pandemi	Mensosialisasikan Perundang-undangan Daerah yang berlaku
			Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati regulasi daerah	Mensosialisasikan Perundang-undangan Daerah yang berlaku
			Terbatasnya kewenangan Satpol PP dalam penegakan regulasi daerah	Mensosialisasikan Perundang-undangan Daerah yang berlaku
5.1.2003.	Terbatasnya Jumlah SDM Satpol PP	Jumlah SDM Satpol 142 (seharusnya 350)	Belum idealnya jumlah personel Satpol PP jika dibandingkan dengan jumlah penduduk	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang baik dengan mengikuti jenjang Diklat yang dibutuhkan
			Bertambahnya beban terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang baik dengan mengikuti jenjang Diklat yang dibutuhkan
5.1.2004.	Masih Kurangnya Jumlah Petugas Linmas	Petugas linmas terbatas	Masih kurangnya jumlah petugas Linmas sehingga mempengaruhi fungi Linmas.	Terpenuhinya jumlah Petugas Linmas sesuai dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, peningkatan kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas
5.2.	Pengampu BPBD			
5.2.2001.	Masih Kurangnya Jumlah Sarana dan Prasarana	Jumlah sarpras baru 23 dari kebutuhan 67 unit	Kurangnya jumlah mobil operasional kebakaran sesuai dengan Standar Nasional	Penambahan sarana/prasarana dan pemeliharaannya (Sesuai SNI 1 unit damkar untuk 10.000 jiwa jadi idelanya Balikpapan mempunyai 67 unit Damkar)
5.2.2002.	Masih Belum Optimalnya Kapasitas SDM terkait Penanganan Kebakaran	Tingkat tanggap masih lebih dari 30 menit	Belum optimalnya tingkat tanggap waktu kebakaran	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang baik dengan mengikuti jenjang Diklat yang dibutuhkan agar lebih responsive terhadap penanggulangan bencana dan kebakaran dan pengembangan aplikasi pelaporan berbasis digital
			Belum optimalnya upaya peningkatan SDM	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang baik dengan mengikuti jenjang Diklat yang dibutuhkan agar lebih responsive terhadap penanggulangan bencana dan kebakaran dan pengembangan aplikasi pelaporan berbasis digital
5.2.2003.	Belum Optimalnya Area Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	Jumlah sarpras baru 23 dari kebutuhan 67 unit	Masih rendahnya area cakupan pelayanan kebakaran	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sebagai salah satu

	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				rencana pembangunan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana, Peningkatan sapraslog dan penambahan UPT maka tingkat waktu tanggap semakin cepat
			Proyek pemindahan IKN berpotensi akan menambah jumlah cakupan pelayanan kebakaran	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sebagai salah satu rencana pembangunan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana, Peningkatan sapraslog dan penambahan UPT maka tingkat waktu tanggap semakin cepat
5.2.2004.	Masih Seringnya Terjadi Kebakaran di Daerah Kumuh	Jumlah kebakaran di daerah permukiman masih banyak	Kasus kebakaran masih banyak terjadi di wilayah kumuh	Peningkatan sapraslog dan penambahan UPT
6.	Sosial			
6.1.	Belum Optimalnya Capaian kinerja Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	Capaian kinerja layanan SPM masih rendah hanya 63 %	Belum optimalnya penanganan penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	Peningkatan kualitas Pendataan penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial
6.2.	Masih Rendahnya Capaian Kinerja Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Capaian Kinerja layanan SPM masih rendah hanya 23,92%	Belum optimalnya pembinaan terhadap potensi sumber Kesehjaraan sosial (PSKS)	Peningkatan pembinaan terhadap Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
6.4.	Belum Tersedianya Sarana Rehabilitasi Sosial Terpadu untuk Memberikan Pelayanan Kepada PPKS	Rehabilitasi sosial PPKS masih menggunakan sarana seadanya	Belum tersedianya rumah/tempat yang representatif untuk melaksanakan rehabilitasi sosial	Penyusunan perencanaan pembangunan pusat rehabilitasi sosial terpadu
6.5.	Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Belum Optimal	PPKS yang terlayani baru 75,33%	kurangnya minat pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) untuk mendapatkan peningkatan keterampilan	Pendampingan sosial kepada PPKS dalam rangka merubah pola pikir untuk lebih mandiri
6.6.	Pengelolaan Data PPKS Belum optimal	Data PPKS sangat tergantung data Kemensos	Kurangnya SDM untuk melakukan pendataan, verifikasi,dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Optimalisasi Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS)
			Belum adanya regulasi terkait proses pendataan dan verivali DTKS	SOP Verifikasi dan Validasi DTKS
6.7.	Kerja sama Pemerintah Kota Balikpapan dengan Stakeholders Bidang Sosial dalam Memberdayakan PPKS Masih Rendah	Peran masyarakat dalam pemberdayaan PPKS masih rendah	Masih belum optimalnya integrasi program penanggulangan kemiskinan antar-OPD	Peraturan Daerah Kota Balikpapan No.5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan

	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.8.	Belum Maksimalnya Fungsi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	SLRT belum siap siaga dalam penyediaan data	Belum adanya regulasi yang mengatur kelembagaan dan Fungsi SLRT	Perwali tentang SLRT
7.	Tenaga Kerja			
7.1.	Masih Rendahnya Angka Partisipasi Angkatan Kerja	APK : 62,9%	Keterbatasan lapangan kerja disertai dengan meningkatnya pencari kerja	Keberadaan RDMP dan isu IKN
7.2.	Belum Optimalnya Pelaksanaan Pelatihan Kerja terhadap Calon Tenaga Kerja	Pelaksanaan pelatihan kerja 57,80	Belum Optimalnya Pelaksanaan Pelatihan Kerja terhadap Calon Tenaga Kerja	Keberadaan perusahaan
7.3.	Belum optimalnya program magang untuk calon tenaga kerja	Program magang 129,60% (turun dari 400%)	Belum optimalnya program magang untuk calon tenaga kerja	Keberadaan perusahaan
			Kurangnya Pembinaan terhadap Calon Tenaga Kerja yang Ingin Berwirausaha	Perkembangan UMKM
7.4.	Belum optimalnya perencanaan terpadu terkait ketenagakerjaan	Belum adanya dokumen MP Ketenagakerjaan	Belum Tersusunnya Masterplan Ketenagakerjaan	sedang dilaksanakan di tahun 2021
			Belum adanya kajian terkait dampak pemindahan IKN	
7.5.	Belum Optimalnya Regulasi (Perwal) dan Pemanfaatan Sistem terkait Ketenagakerjaan	masih terdapat pelanggaran perda yang dilakukan perusahaan	Belum Adanya Regulasi (Perwal) Terkait dengan Pemberian Sanksi Kepada Perusahaan yang Melanggar Perda	penguatan koordinasi dengan provinsi
			Belum Optimalnya Pemanfaatan Sistem Pemetaan Angkatan Kerja	
7.6.	Pemahaman terkait dengan Syarat Kerja Belum Sepenuhnya Dipahami Baik Oleh Pekerja Maupun Perusahaan	masih terdapat pelanggaran perda yang dilakukan perusahaan	Penanganan kasus hubungan industrial masih kurang sesuai dengan prosedur yang berlaku	penguatan koordinasi dengan provinsi
7.7.	Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial Masih Belum Optimal	keterbatasan tenaga	Penanganan kasus hubungan industrial masih kurang sesuai dengan prosedur yang berlaku	penguatan koordinasi dengan provinsi
			Kurangnya SDM Pengawas Ketenagakerjaan	penguatan koordinasi dengan provinsi
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak			
8.1.	Belum optimalnya capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG)	IPG Tahun 2020 : 89,65 di bawah angka nasional 91,06	Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran Perkapita Laki-laki lebih baik dibandingkan perempuan	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak
				Peningkatan potensi perempuan
8.2	Masih rendahnya pemberdayaan perempuan dalam berbagai sektor	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2020 :68,97 di bawah angka nasional 75,57	Keterwakilan perempuan dalam lembaga eksekutif masih rendah	Keterlibatan perempuan dalam bidang politik semakin meningkat

	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	pembangunan			
			Masih rendahnya sumbangan pendapatan perempuan	Perempuan sebagai tenaga profesional mengalami peningkatan
8.3.	Belum optimalnya pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender (PUG) dalam pembangunan daerah	Kota Balikpapan belum pernah mendapatkan penilaian Anugerah Prahita Ekapraya	Pemahaman OPD terhadap PUG masih rendah	Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
			Belum adanya data terpilah	Pedoman Penyusunan Data Terpilah telah disusun
			Peran kelembagaan PUG baik tingkat kota maupun OPD belum maksimal	Telah terbentuk Kelompok Kerja PUG yang akan menjadi penggerak Pelaksanaan PUG sampai tingkat staf Pelaksana di masing-masing OPD
8.3.	Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak belum diimbangi dengan penyelesaian kasus secara paripurna	Penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak : 72,86%	Belum maksimalnya penyelesaian penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Telah terbentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang didukung SDM yang mendapatkan pelatihan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak
8.4.	Penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak membutuhkan waktu lama	Tingkat penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 72,86%	Kinerja OPD yang sangat berkaitan dengan peran lintas sektor OPD lain, dan atau para lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan)	Sinergi antara lembaga penegak hukum dengan OPD terkait dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak
8.5.	Belum optimalnya peran masyarakat, dunia usaha dan media masa dalam mewujudkan Balikpapan Layak Anak	Balikpapan masih dalam kategori Nindya	OPD belum optimal melibatkan masyarakat, dunia usaha dan media massa serta stakeholder lainnya dalam hal pemenuhan hak anak	Telah terbentuk seksi Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat RT
				Telah terbentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kota Balikpapan
9.	Pangan			
9.1.	Belum Optimalnya pola konsumsi pangan masyarakat	Capaian Skor PPH tahun 2020 sebesar 86,2 masuk dalam kategori sedang	Belum optimalnya upaya penguatan pola konsumsi masyarakat yang berimbang/beragam	Pola konsumsi masyarakat yang berimbang/beragam
9.2.	Minimnya regulasi penunjang kegiatan pengawasan keamanan pangan	Capaian tahun 2020 sebesar 38%	Persentase cadangan pangan masyarakat mengalami trend penurunan	Meningkatnya cadangan pangan masyarakat yang bersumber dari provinsi dan pusat
		N/A	Belum adanya Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan Daerah	Tersusunnya Regulasi Cadangan Pangan Daerah
		N/A	Belum adanya pemetaan daerah	Tersedianya peta daerah

	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			rawan pangan di Kota Balikpapan	rawan pangan melalui inventarisasi data sektoral sebagai pendukung penentuan daerah rawan pangan di Kota Balikpapan
10.	Pertanahan			
10.1.	Terjadinya Tumpang Tindih Kepemilikan Tanah terkait dengan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)	Lahan ber IMTN 76,95%	Masih banyaknya IMTN yang bermasalah dan persyaratan yang belum lengkap	Optimalisasi pelayanan melalui aplikasi sistem informasi pertanahan
			Permintaan IMTN melonjak akibat pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)	Optimalisasi pelayanan melalui aplikasi sistem informasi pertanahan
10.2.	Terhambatnya Proses Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Publik	permasalahan tumpang tindih lahan milik warga	Masih belum rampungnya pengadaan lahan untuk Pembangunan Bendungan Teritip	Upaya untuk mendorong pendanaan pembebasan lahan melalui APBN
		kebutuhan total lahan adalah 310 Ha, belum dibebaskan 167,07 Ha	Masih terhambatnya pengadaan tanah untuk pembangunan Institut Teknologi Kalimantan (ITK)	Upaya untuk mengusulkan ITK sebagai proyek strategis nasional
		Tidak lengkapnya dokumen kepemilikan lahan oleh warga dan terbatasnya anggaran pembebasan lahan	Belum optimalnya pengerjaan proyek pelebaran Jalan Letjend Suprapto	Alokasi anggaran pembebasan lahan pada program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
		kebutuhan total lahan adalah 150,3 Ha, belum dibebaskan 142,07 Ha, kendala karena permasalahan tumpang tindih lahan milik warga,penambahan luasan Penetapan Lokasi dan keterbatasan anggaran	Belum berlanjutnya pengadaan tanah untuk Embung Aji Raden	Upaya untuk mendorong pendanaan pembebasan lahan melalui APBN
10.3.	Belum Optimalnya Upaya Penanganan Sengketa Lahan	Capaian penyelesaian sengketa lahan 85%	Capaian penanganan sengketa pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017	Peningkatan layanan mediasi
10.4.	Belum Optimalnya Upaya Pengawasan Peruntukan Lahan	Masih terdapat alih fungsi lahan	Dokumen perencanaan berupa RTRW masih belum sepenuhnya dipatuhi	Optimalisasi dan Sinkronisasi Pengendalian dan penertiban serta Penegakan Hukum
11.	Lingkungan Hidup			
11.1.	Terbatasnya ketersediaan air baku	Defisit air baku : 1.570 lt/dt dari kebutuhan 2.000 lt/dt	Kurangnya sumber air	Melakukan pembangunan bendungan Teritip,Embung Aji Raden dan upaya kerjasama pemanfaatan air baku dari bendungan Sepaku-Semoi
			Permintaan air bersih meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk, investasi usaha, dan kegiatan yang membutuhkan air bersih	Optimalisasi pengelolaan air baku oleh PDAM
11.2.	Terjadinya bencana banjir	peningkatan jumlah titik banjir dari 35 menjadi 88	Pengupasan lahan yang tidak terkendali, baik yang berizin maupun tidak berizin	koordinasi,pendampingan teknis dan pengendalian lintas OPD pada setiap permohonan izin investasi yang didahului dengan

	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				pekerjaan pengupasan lahan
			Curah hujan yang tinggi	Melakukan upaya mitigasi perubahan iklim
			Berkurangnya kapasitas drainase	Kegiatan normalisasi saluran drainase Kota dan Pengendalian sedimentasi melalui upaya pendampingan teknis pada permohonan izin investasi
11.3.	Degradasi di wilayah Kota Balikpapan	indeks tutupan lahan : 55,4%	Dampak Lingkungan Balikpapan sebagai Kota Penyangga IKN	penyesuaian dan sinkronisasi rencana tata ruang dan pembangunan di Kota Balikpapan dengan rencana pemindahan ibukota negara untuk meminimalisir dampak lingkungan
			Sedimentasi	Arahan teknis pada kegiatan investasi untuk membuat kolam detensi sebelum pekerjaan pengupasan lahan
11.4.	Tercemarnya air permukaan	Peningkatan pencemaran sungai	Tekanan jumlah penduduk	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke saluran drainase
			Usaha ilegal di daerah aliran sungai	Optimalisasi upaya pengawasan dan penindakan lintas OPD terhadap usaha ilegal pada DAS
			Limbah cair domestik	Penerapan program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) dan Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal (L2T3)
11.5.	Pengupasan lahan yang tidak terkendali	indeks tutupan lahan 55,4%	Pembukaan lahan dan pengupasan lahan yang dilakukan pengembang tidak sesuai dengan aturan	koordinasi,pendampingan teknis dan pengendalian lintas OPD pada setiap permohonan izin pengembang perumahan
			Terjadinya Bencana Tanah Longsor	Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan dan menyusun sistem mitigasi bencana tanah longsor
			Kerusakan mangrove	Melakukan konservasi mangrove dan menetapkan kawasan mangrove di pesisir Kota sebagai Kawsan Ekosistem Esensial (KEE)
			Masih belum optimalnya pembebasan hutan lindung dan hutan kota yang	Alokasi anggaran untuk penyusunan dokumen

	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			ada di wilayah Kota Balikpapan.	perencanaan dan belanja modal pada program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
11.6.	Belum berhasilnya pemilahan dan pengelolaan sampah dari sumber	Masih Tingginya Volume Sampah yang masuk ke TPA yaitu sebesar 308,56 ton/hari pada tahun 2020	Kurangnya kesadaran dan minat masyarakat dalam pemilahan dan pengelolaan sampah	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah sesuai ketentuan tata cara pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah
			Belum tersedianya pusat daur ulang	telah ada 2 unit rumah daur ulang dan 3 bank sampah yang telah melakukan kegiatan pendauran ulang sampah
			Kurangnya sebaran dan jumlah bank sampah	Mendorong peran aktif kelompok masyarakat untuk membentuk bank sampah dan kemudahan pelayanan Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah Terintegrasi secara Elektronik
			Kurangnya fasilitas pemerintah untuk angkutan sampah terpilah	Pengalokasian anggaran sarana angkutan sampah terpilah pada program Pengelolaan Persampahan
11.7.	Belum terkelolanya sampah B3 rumah tangga	Masih terjadi pencampuran limbah B3 dengan domestik	Pertumbuhan penduduk mengakibatkan sampah B3 Rumah Tangga meningkat	Meningkatkan peran aktif masyarakat dan usaha kecil dalam mengelola Limbah B3 rumah tangga dari produk yang digunakan sehari-hari
			Belum ada regulasi untuk pengelolaan sampah B3 rumah tangga	Upaya penyusunan draf Perkada Pengelolaan sampah B3 Rumah Tangga
			Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah B3 rumah tangga	Kegiatan edukasi masyarakat dan usaha kecil mengenai Limbah B3 rumah tangga dan bagaimana pengendaliannya
			Belum tersedianya fasilitas pemerintah kota untuk pengelolaan sampah B3 rumah tangga	Pengalokasian anggaran untuk gudang limbah B3 di TPAS Manggar berdasarkan kajian limbah B3 tahun 2019
11.8.	Timbulan sampah di pesisir/laut	Penumpukan sampah di pesisir	Kurangnya kesadaran masyarakat di wilayah pesisir dan sungai	Penguatan sosialisasi dan peningkatan peran serta Masyarakat di wilayah pesisir dalam pengelolaan sampah
			Kurangya sarana untuk pengambilan sampah dari aliran air	pengalokasian anggaran pengadaan sarana jaring

	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				sampah/kubus apung pada muara sungai
			Beralihnya kewenangan pengaturan wilayah pesisir dan perairan	Optimalisasi koordinasi dan usulan kegiatan pada dinas terkait Pemerintah Provinsi
11.9.	Perubahan iklim	peningkatan suhu	Pengupasan lahan tidak terkendali	koordinasi,pendampingan teknis dan pengendalian lintas OPD pada setiap permohonan izin investasi yang didahului dengan pekerjaan pengupasan lahan
			Peningkatan emisi kegiatan industri	Penyusunan rencana aksi mitigasi penurunan emisi dari sektor industri terutama kegiatan manufacturing migas
			Meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor	Optimalisasi SAUM dan mendorong penggunaan BBG untuk kendaraan bermotor
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
12.1.	Belum Optimalnya Sosialisasi Administrasi Kependudukan Khususnya Perubahan Kebijakan Pelayanan Kependudukan	Cakupan Kepemilikan E KTP : 99,32%	Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib Administrasi Kependudukan	Pemanfaatan website, media sosial dalam mensosialisasikan pentingnya kepemilikan E KTP
		Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran untuk anak usia 0 - 18 Tahun : 92,87	Kurangnya Pemahaman Sebagian Masyarakat dalam Memanfaatkan/Menggunakan Pelayanan Daring	Optimalisasi program 3 in 1
		Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak : 63,22%	Adanya perubahan aturan terkait administrasi kependudukan yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat	Koordinasi dan membangun jejaring dengan institusi pendidikan
		Cakupan Penerbitan Akta Kematian : 88,90%	masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang manfaat kepemilikan akte kematian dalam pengurusan dokumen penting	Semakin tingginya permintaan terhadap akte kematian sebagai prasyarat pengurusan dokumen oleh Instansi/Perbankan/Jasa Keuangan lainnya
13.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
13.1.	Masih adanya Pasangan Usia Subur yang belum menjadi peserta KB Aktif	Peserta KB Aktif hanya 71%	Penolakan pemakaian alat KB yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama	Optimalisasi Peran Penyuluh Keluarga Berencana dengan melibatkan penyuluh agama dari Kementerian Agama dalam mengedukasi masyarakat pentingnya Program Keluarga

	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Berencana dalam meningkatkan kualitas keluarga
		proporsi wanita usia subur dalam status kawin yang tidak menggunakan KB 14,04%	Kurangnya pemahaman wanita usia subur dalam status kawin akan pentingnya pengaturan jarak kelahiran dalam siklus kehidupan perempuan	Edukasi terhadap calon pasangan pengantin tentang pentingnya program KB
13.2.	Rendahnya persentase peserta KB aktif MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)	Peserta KB aktif pengguna MKJP hanya sebesar 26,29%	Adanya biaya tindakan layanan kesehatan yang dibebankan kepada Peserta KB bukan peserta BPJS Kesehatan	Penyusunan regulasi yg mengatur terkait pelayanan KB di balikpapan yg gratis (krn masih adanya tarif retribusi pelayanan KB di faskes bagi PUS yg tidak memiliki BPJS)
				Optimalisasi Komunikasi, Informasi, Edukasi kepada masyarakat terkait pentingx ber KB (khususx KB MKJP)
13.3.	Masih terdapatnya perkawinan pada usia anak/remaja di bawah 21 tahun	Tahun 2020 terdapat 178 perkawinan pada usia anak/remaja di bawah 21 tahun	Masih Rendahnya pemahaman orang tua akan pentingnya pendewasaan usia perkawinan	Regulasi terkait Pendewasaan Usia Perkawinan
13.4.	Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat	pertumbuhan sebesar 3,96%	Laju pertumbuhan penduduk cenderung meningkat yang dominan disebabkan faktor Migrasi	Implementasi Grand Desain Pembangunan Kependudukan Kota Balikpapan 2015 - 2035
14.	Perhubungan			
	Belum optimalnya angkutan umum dan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM)	Rasio Angkutan Umum terhadap jumlah kendaraan semakin menurun dari 0,3% pada tahun 2016 menjadi 0,12% pada tahun 2020	Belum optimalnya pengembangan koridor sarana angkutan umum	Terbangunnya koridor baru SAUM yang terhubungan dengan angkutan perkotaan
	Menurunnya kinerja jalan kota	Rata-Rata Volume per Capacity Ratio 0,64	Belum optimalnya pengembangan SAUM, manajemen rekayasa lalu lintas, serta pengembangan jaringan jalan kota	Meningkatnya kinerja jalan kota
	Belum optimalnya pengelolaan parkir	Masih tingginya on street parking yang mengurangi kapasitas jalan dan masih rendahnya realiasi retribusi parkir terhadap potensi yang ada	Kurangnya sarana dan prasarana parkir dan belum adanya peraturan pengelolaan parkir	Meningkatnya realisasi retribusi parkir terhadap potensi yang ada
	Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan perlengkapan jalan	Belum terpenuhinya kebutuhan perlengkapan jalan (rambu, APILL, jalur sepeda, PJU, dll)	Terbatasnya anggaran penyediaan perlengkapan jalan	Meningkatnya persentase penyediaan perlengkapan jalan
15.	Komunikasi dan Informatika			
	Belum optimalnya pengembangan integrasi dan pengembangan aplikasi di Organisasi Perangkat Daerah	80% layanan publik dan internal yang diselenggarakan secara online dan/atau terintegrasi	Pengembangan aplikasi belum terintegrasinya secara menyeluruh	Meningkatnya persentase aplikasi yang terintegrasi

	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Terbatasnya pengelolaan aduan masyarakat	Persentase Tanggapan atas Pengaduan Masyarakat 94%	Sistem pengelolaan aduan publik masih belum terpadu satu pintu	Meningkatnya persentase tanggapan atas pengaduan masyarakat yang terintegrasi terpadu satu pintu
16.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah			
16.1.	Kualitas Produk Koperasi dan UMKM yang Masih Rendah	Persentase kredit UMKM di Bank hanya sebesar 36,50%	Belum optimalnya akses pinjaman permodalan bagi pelaku UMKM	Terbukanya akses permodalan UMKM dengan perbankan dengan mengoptimalkan peran UCCB untuk membuka
16.2.	Belum Optimalnya Upaya untuk Mempromosikan Koperasi dan UMKM	Jumlah UMKM yang bermitra dengan perusahaan hanya sebanyak 170	Belum optimalnya kerjasama KUMKM dengan toko swalayan untuk promosi produk	Terjalinnya kerjasama UMKM dengan mitra dalam memperluas sasaran promosi
16.3.	Pengembangan Kapasitas Bagi Pelaku Koperasi UMKM yang Belum Optimal	Jumlah Pengurus/pengawas/pengelola Koperasi bersertifikat hanya 60 orang	Terbatasnya pengurus/pengawas/pengelola koperasi yang memiliki sertifikat	Tersertifikasinya pengurus/pengawas/pengelola koperasi dengan bekerjasama dengan stakeholder terkait
16.4.	Belum Tersusunnya Data Terpadu Koperasi dan UMKM	Data UMKM cenderung sangat dinamis	Updating data koperasi dan UMKM yang belum rutin dilakukan	Data Koperasi dan UMKM yang tervalidasi melalui updating data rutin
17.	Penanaman Modal			
17.1.	Menurunnya Perekonomian khususnya di Sektor Migas dan Pertambangan	Realisasi investasi sektor usaha pertambangan mengalami penurunan menjadi 452.393,38 juta rupiah dari 3.933.213,46 juta rupiah di awal periode	Masih tingginya ketergantungan terhadap sektor migas dan pertambangan	Meningkatnya investasi penanaman modal di sektor non migas dan pertambagan
17.2.	Belum Optimalnya Akses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	SKM tertinggi dicapai di tahun 2016 sebesar 91,78 dan terendah di tahun 2017 sebesar 82,79	Fluktuasi hasil penilaian Survei Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan baik secara offline maupun online
		Persentase Jumlah Pelayanan Perizinan yang terintegrasi secara online 41.25%	Belum seluruh pelayanan perizinan terintegrasi secara online	Integrasi pelayanan perizinan secara online
18.	Kepemudaan dan Olah Raga			
18.1.	Belum efektifnya implementasi regulasi tentang kepemudaan	N/A	Belum tersedianya peraturan serta belum efektifnya implementasi regulasi tentang kepemudaan	Implementasi pelaksanaan regulasi kepemudaan secara masif
18.2.	Penyimpangan pergaulan serta pengaruh teknologi informasi yang memberikan dampak negatif kepada pemuda	Peningkatan jumlah pemuda berprestasi tahun 2020 sebanyak 31 orang	Minimnya jumlah pemuda berprestasi	Meningkatnyanya jumlah pemuda berprestasi
18.3.	Terbatasnya sarana prasarana olahraga	N/A	Belum adanya arah kebijakan pengembangan keolahragaan	Tersusunnya masterplan keolahragaan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan
18.4.	Kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan yang terbatas	Jumlah atlet berprestasi sebanyak 25 orang, Peningkatan prestasi olahraga sebanyak 25 medali pada tahun 2020	Belum optimalnya prestasi atlet lokal	Meningkatnya prestasi atlet melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan keolahrgaaan dengan

	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				melibatkan seluruh stakeholders
19.	Statistik			
	Belum optimalnya pengelolaan data statistik sektoral	Belum ada OPD yang melaksanakan pengelolaan data sesuai dengan Perwali Satu Data	Belum tersusunya daftar data dan pemantapan kelembagaan satu data di tingkat OPD	Terlaksananya pengelolaan data sesuai dengan Perwali Satu Data
20.	Persandian			
	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Persandian Pengamanan Informasi	OPD yang menyelenggarakan pengamanan informasi sebanyak 61% pada tahun 2020	Belum adanya regulasi tentang tata kelola persandian	Meningkatnya persentase OPD yang menyelenggarakan pengamanan informasi
21.	Kebudayaan			
21.1.	Belum optimalnya kegiatan festival seni dan budaya yang dilaksanakan sebagai ajang promosi Daerah	terbatasnya jumlah event seni budaya	Sinergisitas antar OPD masih belum maksimal dalam pelaksanaan event	didukung sarana prasarana nasional dan internasional
			Belum optimalnya pembinaan dan pendataan terhadap Paguyuban yang ada	jumlah paguyuban mewakili suku warga
			Anggaran yang terbatas	
21.2.	Belum optimalnya pengelolaan dan promosi cagar budaya yang ada di Kota Balikpapan	Maish rendahnya pemahaman masyarakat akan cagar budaya	Lokasi cagar budaya yang berjauhan	akses kota Balikpapan yang mudah
			Pelimpahan kewenangan urusan kebudayaan ke Dinas Pendidikan di tahun 2018 mengakibatkan kinerjanya belum optimal	dukungan paguyuban
			Pandemi Covid-19 yang menghambat pengelolaan cagar budaya	optimisme percepatan pemulihan pasca covid
22.	Perpustakaan			
22.1.	Belum Optimalnya Kualitas dan Kuantias SDM Perpustakaan	terbatasnya jumlah pustakawan	Jumlah pustakawan belum sesuai dengan standar nasional.	pelatihan dan pengembangan SDM
			Kompetensi Pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan perlu ditingkatkan	pelatihan dan pengembangan SDM
22.2.	Belum Optimalnya Pembinaan terhadap Perpustakaan dan Taman Baca	terbatasnya jumah pembinaan	Keterbatasan data dan SDM dalam melakukan pembinaan	kerjasaman dengan pusat dan provinsi
22.3.	Belum Optimalnya Ketersediaan Fasilitas dan Buku Perpustakaan	masih terbatasnya koleksi	Masih kurangnya fasilitas pendukung perpustakaan	kerjasaman dengan pusat dan provinsi
			Keterbatasan jumlah buku di perpustakaan	kerjasaman dengan pusat dan provinsi
22.4.	Terjadinya Penurunan Jumlah Pengunjung dan anggota Perpustakaan	Penurunan jumlah kunjungan 202.263 menjadi 19.818	Menurunnya tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan	pengembangan perpustakaan digital
			Menurunnya jumlah anggota perpustakaan	Jumlah siswa SD dan SMP yang semakin meningkat
22.5.	Masih Kurangnya Kegiatan untuk	Penurunan jumlah kunjungan	Pelaksanaan kegiatan peningkatan minat baca pada tahun 2020 masih	buku digital

	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatkan Minat Baca Masyarakat		belum optimal	
			Belum optimalnya koordinasi dengan OPD lain untuk meningkatkan minat baca masyarakat	buku digital
23.	Kearsipan			
23.1.	Belum Optimalnya SDM Pengelola Arsip	Keterbatasan arsiparis	Keterbatasan SDM dalam Pengelolaan Arsip	Pelatihan dan pembinaan, kerjasama dengan pusat dan provins
			Belum Dilaksanakannya Peningkatan Kompetensi SDM	Pelatihan dan pembinaan, kerjasama dengan pusat dan provins
23.2.	Masih rendahnya Komitmen OPD dalam Hal Pengelolaan Arsip	OPD dengan arsip terdata : 25%	Masih kurangnya jumlah OPD yang tertib terhadap pengelolaan arsip	Komitmen OPD pentingnya arsip
23.3.	Fasilitas Penunjang untuk Pengembangan Arsip Kurang Memadai	Standar teknis penyimpanan arsip (terutama suhu)	Gedung penyimpanan arsip belum memadai	Sudah memiliki gedung tersendiri
			Belum optimalnya upaya pengembangan digitalisasi arsip	pengembangan digitalisasi arsip
23.4.	Keterbatasan Anggaran dalam Menyediakan Fasilitas Pengelolaan Arsip		Masih kurangnya anggaran untuk pengembangan pengelolaan kearsipan	kerjasama pusat dan provinsi
	URUSAN PEMERINTAH PILIHAN			
24.	Perikanan			
24.1.	Rendahnya produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 4.684,7 ton dari 6.384,52 ton pada tahun 2019	Faktor cuaca yang tidak menentu mempengaruhi tangkapan nelayan, tingginya biaya melaut, meningkatnya harga ikan, kualitas armada nelayan belum memadai	Meningkatnya produksi perikanan tangkap melalui pemanfaatan teknologi dalam peningkatan produksi perikanan tangkap dengan menggandeng seluruh stakeholders
24.2.	Belum optimalnya aktivitas perikanan budidaya		Belum optimalnya aktivitas budidaya perikanan	Meningkatnya produksi perikanan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas pelaku budidaya perikanan
			Sarana prasarana tambak dan ketersediaan benih ikan yang tidak memadai	Meningkatnya produksi perikanan melalui revitalisasi sarana prasarana tambak dan penyediaan variasi benih
25.	Pariwisata & Ekonomi Kreatif			
25.1.	Masih Minimnya Promosi dan Penurunan kunjungan wisatawan	Penurunan jumlah kunjungan wisatwan dari 2.917.514 pada tahun 2019 menjadi 1.082.273 pada tahun 2020	Penurunan jumlah kunjungan wisatawan selama pandemi covid-19	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan promosi pariwisata
			Belum optimalnya pengembangan teknologi informasi sebagai sarana promosi dan informasi pariwisata	
25.2.	Belum Optimalnya	Meningkatnya potensi objek	Belum optimal kualitas sarana dan	Optimalisasi kualitas

	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kualitas Destinasi Pariwisata	wisata unggulan baik yang dikelola pemerintah maupun masyarakat	prasarana di tempat pariwisata	sapras pariwisata dengan melibatkan seluruh stakeholders
25.3	Belum adanya arah kebijakan pengembangan ekonomi kreatif	Berdasarkan hasil uji petik Bekraf, aplikasi dan games menjadi sub sektor unggulan	Belum adanya arah kebijakan pengembangan ekonomi kreatif	Tersedianya pemetaan potensi ekonomi kreatif masing-masing wilayah, pemantapan road map pengembangan ekonomi kreatif
26.	Pertanian			
26.1.	Status kepemilikan lahan pertanian dan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian	Terdapat alih fungsi Lahan Baku Sawah tahun 2019 seluas 99,81 Ha	Status kepemilikan lahan pertanian yang bukan milik sendiri Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian	Tersedianya regulasi (Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan) LP2B
26.2.	Produksi dan Produktivitas tanaman sulit untuk ditingkatkan	Produksi padi ladang tahun 2020 : 0 ton Luas Tanam dan Tanaman Padi Sawah 2 Ha, Padi Ladang 0 Ha pada tahun 2020	Produksi padi ladang dan padi sawah mengalami penurunan Luas tanam dan tanaman padi sawah dan padi ladang terus berkurang	Meningkatnya produksi melalui pemanfaatan teknologi tepat guna dengan terbatasnya lahan
26.3.	Produksi dan Produktivitas tanaman perkebunan belum optimal	Kenaikan produksi tanaman perkebunan mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020 sebesar -688,76	Fluktuasi produksi tanaman perkebunan	Meningkatnya produksi tanaman perkebunan melalui intensifikasi lahan perkebunan dengan tanaman sela tumpang sari, tidak mengandalkan kesuburan tanah secara alami.
26.4.	Ketersediaan/jumlah populasi ternak terutama sapi betina belum memadai	Kenaikan produksi ternak mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2018 dan 2019	Fluktuasi produksi peternakan	Meningkatnya produksi peternakan melalui perubahan pola peternakan yang tidak hanya fokus pada penggemukan hewan ternak, Penyediaan lahan sumber pakan hijauan ternak, Pemeriksaan kesehatan hewan secara berkala
27.	Perdagangan			
27.1.	Belum semua pelaku usaha memiliki izin usaha	Persentase pelaku usaha yang menjual produk sesuai standar pada tahun 2020 sebesar 64,25%	Penurunan persentase pelaku usaha menjual produk sesuai dengan standar	Meningkatnya pelaku usaha ynag menjual produk sesuai standar dengan terus melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dengan melibatkan seluruh stakeholders
27.2.	Belum maksimalnya kerja sama perdagangan dengan daerah pemasok	Ketergantungan dengan daerah lain mencapai 90%	Ketergantungan kebutuhan barang pokok dengan daerah pemasok luar Balikpapan	Menjalin kerjasama dengan daerah pemasok
27.3.	Belum tercapainya target UTTP	Capaian tahun 2020 hanya sebesar 36,09%, sementara pada tahun 2019 mampu mencapai 70,73%	Menurunnya persentase wajib tera yang melakukan tera/tera ulang di masa pandemi covid-19	Meningkatnya wajib tera yang melakukan tera ulang dengan sosialisasi dan pendekatan secara persuasif kepada wajib tera
27.4.	Belum optimalnya pembangunan dan	Presentase pasar berklasifikasi A pada tahun 2020 sebesar 33,3%	Jumlah Pasar Berklasifikasi A masih rendah	Meningkatnya pasar berklasifikasi A

	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	pemeliharaan sarana distribusi perdagangan			
27.5.	Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan kurang optimal	Nilai ekspor bersih pada tahun 2020 sebesar 2.937,12 juta US$	Penurunan nilai ekspor selama pandemi covid-19	Meningkatnya nilai ekspor melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk promosi dagang, penganekaragaman komiditas ekspor
28.	Perindustrian			
28.1.	Masih Rendahnya Kualitas Produk dari Industri Kecil dan Menengah	Persentase industri yang menggunakan bahan baku lokal pada tahun 2020 : 0%	Bahan baku sulit untuk didapatkan	Meningkatnya industri yang menggunakan bahan baku lokal
28.2.	Belum Optimalnya Pengembangan Industri	Perkembangan sektor industri tahun 2019 dan 2020 sebesar 902 unit	Perkembangan sektor perindustrian cenderung stagnan selama pandemi covid-19	Meningkatnya perkembangan sektor industri yang adaptif dengan kebutuhan pasar
	URUSAN PENUNJANG			
29.	Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan			
29.1.	Belum optimalnya pendapatan daerah	Derajat Desentralisasi Keuangan pada klasifikasi Cukup yaitu 28,72%	Masih dominannya kebutuhan biaya pembangunan untuk percepatan pembangunan di Kota Balikpapan yang bertumpu pada dana pusat/fiskal pusat sebesar 71,28%	Meningkatnya derajat desentralisasi keuangan daerah dengan mengoptimalkan penerimaan PAD
			Menurunnya penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam masa pandemi Covid-19 (masalah khusus yang terjadi pada tahun 2020)	Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah sebagai upaya pemulihan ekonomi daerah
30.	Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian dan Pendidikan & Pelatihan			
30.1.	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Masih rendah	IP ASN : 93,3%	Adanya perbedaan aturan terkait penghitungan Indeks Profesionalitas ASN	Pelatihan, pembinaan dan tugas belajar
			Masih terdapatnya Pegawai yang melakukan pelanggaran kedisiplinan	Pemberian Reward kepada PNS teladan
			Masih Kurangnya Perencanaan Kebutuhan ASN	Pelatihan dan pembinaan
30.2.	Nilai Indeks Sistem Merit Masih belum tervalidasi	Indeks merit belum tervalidasi	Masih belum optimalnya sistem merit dilihat dari unsur penilaiannya	Komitmen penerapan sistem merit
30.3.	Perkembangan Teknologi Menuntut Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	masih terdapat ASN yang belum optimal dalam penggunaan sistem berbasis IT	Upaya pengembangan SDM berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) belum sepenuhnya mampu diterapkan oleh ASN	Tercapainya pembangunan SDM yang menguasai IT (Smart ASN)
			Pengembangan aplikasi daring untuk diklat masih dalam tahap proses pengembangan	Aplikasi Diklat secara daring dan pembelajaran berbasis Computer Based Test (CBT)
30.4.	Integrasi Data	Pegawai masih disibukkan	Proses integrasi data masih dalam	SAKP KemenPAN

	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kepegawaian Belum Optimal	dengan arsip ketika proses terkait kepegawaian	tahap proses	
			Belum optimalnya SDM yang ada terkait integrasi data	SAKP KemenPAN
31.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			
31.1.	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap OPD Belum Optimal	Masih terdapat temuan di beberapa OPD	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap OPD Belum Optimal	Peningkatan kualitas dan intensitas binwas kepada OPD dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
			Capaian kapabilitas Aparat Pengawasan Intern (APIP) saat ini sudah berada di level 3	Pelatihan dan pembinaan
			Penggunaan teknologi informasi dalam hal pengawasan belum sepenuhnya dilakukan secara efektif	Pengembangan aplikasi TI yang lebih mudah dioperasikan/diterapkan dan melakukan pemutakhiran/updating fitur (menu) menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan pengguna (user)
			Capaian OPD pada penilaian SAKIP yang masih perlu ditingkatkan	Pelatihan dan pembinaan
31.2.	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Belum Optimal	belum optimalnya tindak lanjut hasil pemerikasaan oleh OPD	Belum optimalnya proses audit kepada OPD	Penguatan SDM
			Fasilitas dan Sarana Prasarana belum sepenuhnya mendukung proses audit	Penambahan sarana/prasarana dan pemeliharaannya agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung kelancaran proses audit
31.3.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang Konsisten, Terintegrasi dan Fokus pada Akar Masalah Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal	Bekum selarasnya dokumen RB OPD dengan dok.RB Kota	Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih terkendala pada aspek tertentu	Pembinaan
		Terbatasnya OPD yang masuk dalam ona ZI	Masih kurangnya komitmen OPD dalam mewujudkan unit kerja yang masuk dalam Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Pembinaan
		Masih terdapat pegawai yang melanggar disiplin kepegawaian	Masih rendahnya implementasi budaya integritas	Pembinaan

4.1.2. Permasalahan Pembangunan Kota Balikpapan

Berdasarkan identifikasi permasalahan daerah, maka permasalahan pembangunan di kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1 Permasalahan Pembangunan Kota Balikpapan

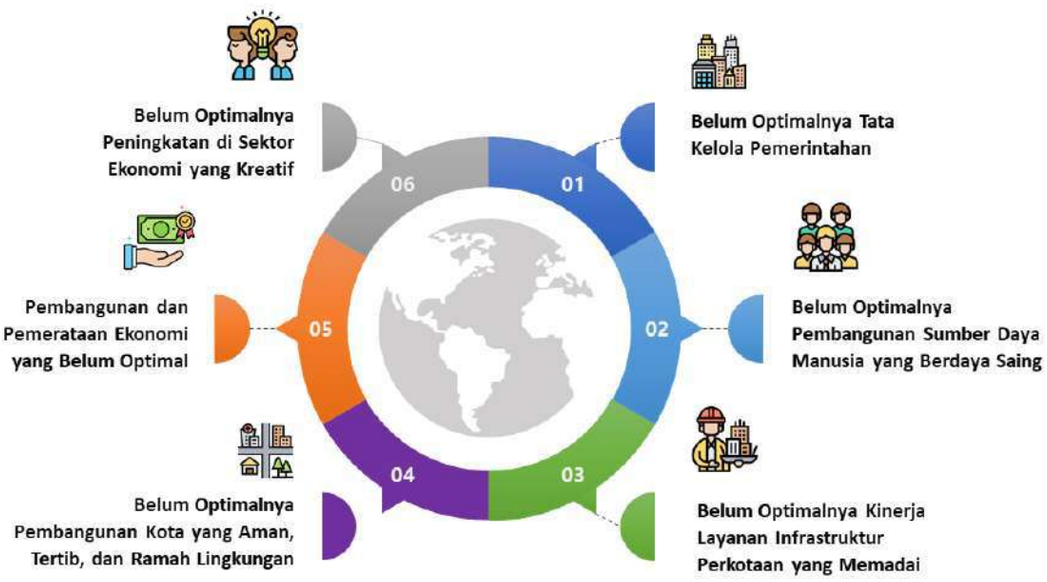

Sumber : Bappedalitbang, Diolah 2021

4 Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan

Tujuan pemerintah Indonesia untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia *(world class bureaucracy)*membuar setiap organisasi pemerintahan baik pusat maupun daerah dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan Kota Balikpapan sendiri masih belum optimal dan terus ditingkatkan beberpa permasalahan yang ada adalah Nilai akuntabilitas kinerja SKPD yang dinilai cukup/baik belum tercapai, dan penggunaan teknologi informasi dalam hal pengawasan dan maupun untuk publik masih belum efektif. Selain itu akuntabilitas kineja juga menjadi salah satu indikator terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.Akuntabilitas kinerja menunjukkan keselarasan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja. Perlu upaya lebih terutama dalam penyusunan dokumen perencanaan baik tingkat kota maupun OPD sehingga seluruh program prioritas pemerintah kota dapat dilaksanakan di setiap OPD dengan indikator terukur dan berkualitas.

Dari sisi akuntabilitas keuangan yang diukur dengan Opini Laporan Keuangan (OLK) menunjukkan Kota Balikpapan sudah sangat baik karena selama ini telah memperoleh predikat WTP. Perbaikan pengelolaan aset daerah akan sangat mendukung mempertahankan opini BPK ini Namun demikian dari sisi akuntabilitas kinerja masih perlu dioptimalkan, karena berdasarkan Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Balikpapan pada tahun 2019 yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi, dinyatakan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan mendapatkan nilai 68,68 (B). Namun demikian, angka ini tidak mencapai target IKU tahun 2019 sebesar 71,00 (BB) dan target akhir RPJMD sebesar 75,00. Menurut KemenPAN RB hal-hal masih memerlukan perbaikan lebih lanjut sebagai berikut:

1) Pemerintah Kota Balikpapan telah mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja dengan baik, namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya terbangun budaya kinerja sampai pada level unit terkecil.
2) Penjabaran kinerja dari tingkat Kota sampai ke individu sudah diimplementasikan melalui perjanjian kinerja berjenjang. Namun penjabaran kinerja tersebut belum seluruhnya berdasarkan kerangka keterkaitan hasil proses antar-level jabatan, sehingga belum dapat tergambarkan hubungan kausalitas kinerja antar level organisasi.
3) Pemerintah Kota Balikpapan telah membangun sistem pengendalian dan evaluasi kinerja, namun pelaksanaannya perlu dioptimalkan terutama dalam mengawal target RPJMD agar memastikan bahwa perencanaan program dan kegiatan relevan dengan sasaran strategis dalam mewujudkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat.
4) Capaian Kinerja individu telah dijadikan ukuran dalam pemberian tunjangan kinerja pegawai, namun masih terdapat ketidaksesuaian antara indikator kinerja individu dengan ukuran kinerja yang dituangkan dalam sasaran kerja pegawai SKP, ukuran kinerja dalam belum seluruhnya menggambarkan tolok ukur keberhasilan kinerja dari masing-masing individu pegawai.
5) Laporan kinerja yang telah disusun oleh seluruh perangkat daerah perlu disempurnakan terutama pada kedalaman analisis atas capaian kinerja dan agar dijadikan sebagai dasar dalam peningkatan kinerja. Selain itu, mekanisme pengumpulan data kinerja dalam rangka pelaporannya juga perlu ditingkatkan keandalannya.
6) Evaluasi atas program yang dilakukan belum optimal dan baru sebatas mengevaluasi pelaksanaan program dan penyerapan anggaran, belum kepada hasil dari implementasi program tersebut, sehingga masih terdapat ketidakselarasan antara kegiatan, hasil program, serta sasaran strategis setiap perangkat daerah.
7) Pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui Inspektorat. Hasil evaluasi secara internal ini masih memerlukan penyempurnaan terkait dengan simpulan hasil evaluasi yang belum sepenuhnya menggambarkan kondisi penerapan SAKIP di perangkat daerah.

5 Belum Optimalnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Pembangunan manusiadapat dinilai dari berbagai aspek, yaitu aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang secara umum memberikan kontribusi dalam peningkatan produktivitas dan daya saing. Salah satu indikator yang banyak digunakan dalam mengukur pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) yang merupakan indeks komposit yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, dan aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli.

Tabel 4.2 Indeks Pembangunan Manusia

Komponen	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
UHH saat lahir	tahun	73,96	73,97	74,18	74,41	74,49
HLS	tahun	13,59	13,75	14,12	14,13	14,14
RLS	tahun	10,54	10,55	10,65	10,67	10,68
Pengeluaran per kapita disesuaikan	ribu rupiah	13.883	14.254	14.557	14.791	14.549
IPM		78,57	79,01	79,81	80,11	80,01
Selisih IPM		0,39	0,44	0,8	0,3	-0,1

Sumber : BPS, Balikpapan Dalam Angka, 2021

Capaian IPM Kota Balikpapan mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan kondisi tahun 2019 sebesar 80,11 poin, meningkat sebesar 0,38 poin dibandingkan kondisi tahun 2018. Angka IPM Kota Balikpapan secara konsisten melampaui rata-rata secara nasional, hingga tahun 2019 terdapat selisih sebesar 3,50 poin. Untuk IPM kota Balikpapan tahun 2020 sebesar 80,01 turun 0,1 poin. Penurunan terdapat dalam komponen pendapatan per kapita.

Indeks Pembangunan Manusia Kota Balikpapan meskipun menunjukkan peningkatan sepanjang 5 (lima) tahun terakhir namun masih dibawah Kota Samarinda dan Kota Bontang. Belum optimalnya angka IPM Kota Balikpapan terutama dipengaruhi rendahnya angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah. RLS merupakan indikator kualitas penduduk dalam mengenyam pendidikan formal, sedangkan HLS menjadi indikator untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Dengan nilai RLS dan HLS lebih rendah dibandingkan dengan kota di Kalimantan Timur maka kualitas penduduk dalam memperoleh pendidikan formal harus dioptimalkan dan dilakukan perbaikan pembangunan sistem pendidikan. Komponen pengeluaran perkapita Kota Balikpapan juga lebih rendah dibanding Kota Bontang. Artinya kemampuan atau daya beli masyarakat Kota Balikpapan masih dibawah Kota Bontang.

Angka IPM yang dicapai saat ini perlu terus ditingkatkan mengingat komponen pembentuk IPM merupakan indikator kinerja strategis pembangunan suatu daerah, yang meliputi Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah (indikator pengungkit dimensi pendidikan), Angka Harapan Hidup (indikator pengungkit dimensi

kesehatan), dan Pengeluaran per Kapita (indikator pengungkit dimensi ekonomi). Selain itu, optimalisasi pencapaian IPM perlu dilakukan guna mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs), terutama pencapaian tujuan ke-3 "Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia", dan tujuan ke-4 "Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua". Sejalan dengan hal tersebut, arahan RPJMN 2020-2024 pada wilayah untuk pulau Kalimantan menetapkan bahwa IPM wilayah Kalimantan yaitu sebesar 71,22-79,25 di tahun 2024.

6 Belum Optimalnya Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan yang Memadai

Kinerja layanan infrastruktur perkotaan dapat dilihat dari hasil Indeks Kepuasan Iinfrastruktur Dasar (IKLI). Dari Hasil survei Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (IKLI) dapat diketahui bagaimana layanan infrastruktur di Kota Balikpapan telah memadai dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Berikut hasil Indeks Kepuasan Infrastruktur Dasar (IKLI) tahun 2017 sampai 2020 kota Balikpapan dari pendapat warga Kota Balikpapan tentang kepuasan layanan infrastruktur dari berbagai aspek seperti infrastruktur jalan, jembatan, moda transportasi, jaringan air bersih, irigasi dan perumahan.

Gambar 4.2 Indeks Kepuasan Infrastruktur Dasar (IKLI) tahun 2016 – 2020

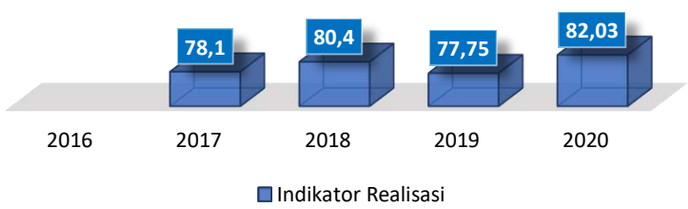

Sumber: Bappeda Litbang, 2021

Berdasarkan hasil IKLI dari tahun 2017 sampai dengan 2020 mengalami fluktuasi dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 4.28% dari 2019. Berdasarkan capaian IKLI tersebut menunjukan adanya kepuasan dari sejumlah responden yang disurvei berkaitan layanan infrastruktur yang disiapkan pemerintah untuk masyarakat Kota Balikpapan. Terkait dengan kepuasan responden terhadap layanan infrastruktur, dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan infrastuktur dinilai cukup baik. Namun hasil IKLI mengalami peningkatan, Pemerintah Kota Balikpapan masih terus meningkatkan kualitas layanan infrastruktur seiring adanya pembangunan IKN di Kalimantan Timur nantinya.

Secara umum terdapat ketidakpuasan layanan infrastruktur berdasarkan hasil IKLI di Kota Balikpapan terjadi karena masyarakat Kota Balikpapan belum dapat mengakses seutuhnya sarana sanitasi yang baik. Bahkan, di beberapa daerah di Kota Balikpapan muncul hunian kumuh yang rawan terhadap permasalahan

sosial. Selain itu, terbatasnya akses hunian menyebabkan masyarakat berpenghasilan rendah sulit untuk menjangkau pelayanan tersebut. Permasalahan lain di bidang ini adalah terkait dengan perhubungan atau konektivitas Kota Balikpapan dengan daerah lain. Luas wilayah Kota Balikpapan juga belum sepenuhnya didukung dengan ketersediaan jumlah transportasi umum massal dan sarana jalan untuk menunjang lalu lintas arus barang manusia. Jalan yang sudah dibangun di beberapa daerah juga belum sepenuhnya memperoleh dukungan pemeliharaan yang memadai.

Banjir masih menjadi masalah utama selama 5 (lima) tahun terakhir. Terjadi peningkatan jumlah titik banjir dari 35 titik pada tahun 2016 menjadi 88 titik pada tahun 2020. Penyebab banjir sangat kompleks terutama disebabkan pengupasan lahan akibat alih fungsi lahan sehingga meningkatkan sedimentasi pada saluran drainase. Selain itu, tumpukan sampah di drainase juga mengurangi daya tampung drainase sehingga menyebabkan genangan di beberapa titik di Kota Balikpapan. Para pengembangan yang kurang kurang bertanggungjawab dalam pemenuhan sarana penahan air juga menjadi penyumbang meningkatnya titik banjir.

4. Belum Optimalnya Pembangunan Kota yang Aman, Tertib, dan Ramah Lingkungan

Konsepsi *liveable city* atau kota layak huni merupakan representasi dari *sustainable city.* Untuk mencapai tersebut pemerintah Kota Balikpapan terus mempertahankan dan meningkatkan kulitas hidup yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Balikpapan. Untuk mencapai *liveable city* Kota Balikpapan perlu meningkatkan keamanan, ketertiban dan lebih peduli atau ramah terhadap lingkungan. Keamanan pada Kota Balikpapan masih kurang salah satunya disebabkan masih belum optimalnya dalam menurunkan angaka kriminalitas. Hal ini disebabkan fungsi perlindungan masyarakat yang kurang, seperti jumlah poskamling yang masih kurang, rasio petugas linmas yang masih kurang. Ketertiban di Kota Balikpapan sendiri masih mengalami kendala dan perlu ditingkatkan baik regulasi maupun kesadaran masyarakat. Terakhir, terkait ramah lingkungan Kota Balikpapan cukup abik dibuktikan pada rata-rata Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada periode 2016 – 2020 yang masuk pada kualifikasi cukup baik. IKLH didapatkan dari 3 parameter yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Hutan/Lahan (ITH). Permasalahan yang masih menjadi kendala adalah 1) untuk kualitas air disebabkan pencemaran air di Kota Balikpapan didominasi oleh pencemaran akibat air limbah domestik dan non domestik, serta limpasan air hujan yang membawa kikisan tanah. Selain itu meningkatnya pencemaran air, khususnya di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berlokasi di tengah kota, yaitu DAS Klandasan Besar dan DAS Klandasan Kecil,

disebabkan pula oleh semakin padatnya penduduk dan tingginya pertumbuhan kegiatan komersil di sekitarnya. Meskipun berada di tengah Kota, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kualitas air masih sangat kurang. 2) untuk kualitas udara dipengaruhi pencemaran udara dari sektor industri, efek rumah kaca akibat bertambahnya penduduk, dan gas emisi dengan penyumbang terbesar adalah bidang manufaktur. 3) untuk Indeks Tutupan Hutan/Lahan (ITH) adalah belum optimalnya penanganan pengupasan lahan yang menyebabkan perubahan iklim. Hal ini dikarenakkan pelaku usaha dan masyarakat perseorangan yang tidak mempertimbanhkan aspek pembangunan atau aturan yang sesuai.

5. Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi yang Belum Optimal

UMKM memiliki peran dalam pembangunan dan pemerataan ekonomi di Kota Balikpapan. Pertumbuhan UMKM di Balikpapan terus meningkat dimana dari 2019 sebanyak 1.447 UMKM menjadi 4.0689 UMKM. Pertumbuhan UMKM sejalan dengan penyerapan tenaga kerja, dimanapada tahun 2019 UMKM telah menyerap 2.840 orang. Meskipun jumlah unit usaha mengalami trend kenaikan. UMKM masih mengalami beberapa permasalahandalam segi permodalan, promosi dengan kerjasama dengan toko swalayan.

Bertambahnya penduduk juga tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah penduduk usia kerja (tenaga kerja) dari tahun ke tahun semakin meningkat. Mengingat jumlah penduduk Kota Balikpapan didominasi oleh penduduk usia produktif, maka ketersediaan lapangan kerja menjadi indikator yang penting, di samping mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat usia produktif.

Tingkat pengangguran terbuka Kota Balikpapan masing cukup tinggi hingga mencapai 7,29 persen di tahun 2019 dan di tahun 2020 sebesar 9 persen, sedangkan target akhir RPJMD tahun 2021 yaitu sebesar 4,55 persen. Gap pencapaian ini diperkirakan akan semakin melebar di tahun 2021 dikarenakan adanya kasus pandemi Covid-19. Beberapa faktor yang menyebabkan semakin tingginya tingkat pengangguran di Kota Balikpapan antara lain :

a. Faktor kependudukan yang terdiri dari jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi disertai tingkat urbanisasi yang tinggi yang tidak diimbangi dengan luasnya lapangan kerja yang tersedia.
b. Belum optimalnya program magang untuk calon tenaga kerja.
c. Masih ketatnya peraturan terkait ketenagakerjaan seperti kenaikan UMK setiap tahun atau pemberian pesangon membuat pelaku usaha lebihberorientasi melakukukan investasi padat modal dibandingkan dengan padat karya.

Sama halnya dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kalimantan Timur pada Bulan Februari tahun 2020 yang mencapai angka 6,88

persen atau sekitar 137.189 orang. Angka ini mengalami kenaikan yang cukup tajam jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 6,66 persen atau 126.529 orang. Rincian jumlah TPT untuk Pendidikan SMP ke bawah sebanyak 7,43 persen atau 72.322 orang, mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 6,40 persen atau 58.515 orang, sedangkan TPT untuk Pendidikan sekolah menengah ke atas yaitu SMA sebesar 7,40 persen atau 55.452 orang, relatif sama dengan TPT tahun sebelumnya yang sebesar 7,38 persen atau 55.446 orang.

Dari data tersebut terungkap jika diukur berdasarkan jenjang pendidikan, tingkat pengangguran terbanyak berasal dari kalangan masyarakat yang berpendidikan terakhir di jenjang SMA. Jumlah pengangguran tersebut bisa mengalami lonjakan yang semakin tinggi seiring kondisi ekonomi global yang kelimpungan akibat pandemi Covid-19. Bahkan, berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Timur, jumlah pekerja yang terpaksa harus kehilangan mata pencahariannya imbas Covid-19 mencapai 9.475 orang. Sementara itu, merujuk publikasi BPS Kalimantan Timur Agustus 2020, pengangguran karena terdampak Covid-19 berjumlah 30,99 ribu orang, tidak bekerja karena Covid-19 berjumlah 21,20 ribu orang, dan penduduk yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 berjumlah 344,85 ribu orang.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Balikpapan pada tahun 2020 sebesar 9% dan menempati urutan tertinggi kedua setelah Kota Bontang. Menjadi tantangan berat untuk menurunkan TPT, namun dengan adanya kegiatan RDMP dan isu IKN diharapkan akan berdampak pada peningkatan lapangan pekerjaan. Pemerintah Kota harus mengoptimakan kualitas tenaga kerja sehingga kesempatan kerja meningkat.

Berdasarkan kondisi ini, tingkat pengggangguran terbuka kota Balikpapan perlu ditangani secara optimal. Hal ini sejalan pencapaian TPB/SDGs terutama pencapaian pada tujuan 8 sasaran 3 “menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan” dan pencapaian tujuan 8 sasaran 5 yaitu “mengurangi proporsi pemuda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan”. Adapun target TPT yang dicantumkan dalam RPJMN yaitu 3,6-4,3 persen pada tahun 2024.

Selain Penganguran, angka Kemiskinan di Kota Balikpapan juga mempengaruhi pembangunan dan pemerataan ekonomi. Angka kemiskinan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir memang mengalami kecenderungan penurunan. Pada tahun 2015 terdapat 2,91 persen atau sebanyak 17,89 ribu jiwa penduduk miskin, dan hingga tahun 2018 menjadi 17.008 jiwa dengan tingkat kemiskinan sebesar 2,64 persen. Kemudian pada puncaknya di tahun 2019 jumlah penduduk miskin menurun menjadi 15,78 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan sebesar 2,42 persen.

Sejalan adanya pandemi Covid-19 yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tingkat kemiskinan di Kota Balikpapan menyebabkan tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang meningkat akibat adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat mendorong meningkatnya persentase penduduk miskin di Kota Balikpapan yang menyebabkan angka kemiskinan di Kota Balikpapan meningkat 2,57 persen yaitu 17,02 ribu jiwa. Kondisi ini berpengaruh pada IPM Kota Balikpapan khususnya pada komponen pengeluaran perkapita penduduk (Rp. 14.549) yang lebih rendah dibandingkan Kota Bontang (Rp.16.278). Masih terdapat 17,02 ribu jiwa yang harus diupayakan untuk bisa keluar dari kemiskinan.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, terdapat berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi, meliputi:

1) Angka migrasi penduduk ke Kota Balikpapan pada tahun 2019 sebanyak 19.044 orang, dan diperkirakan di tahun mendatang akan semakin meningkat dengan adanya pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Hal ini jika tidak di antisipasi secara seksama akan menimbulkan meningkatnya persoalan sosial, diantaranya kemiskinan.
2) Penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Kota Balikpapan yang tidak sekolah/tidak tamat SD sebesar 15,57%, tamat SD/SLTP sebesar 69,66%, dan tamat SLTA ke atas sebesar 14,77%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan penduduk miskin Kota Balikpapan hanya tamat SD/SLTP.
3) Permasalahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Program Keluarga Harapan (PKH).
4) Pemberdayaan masyarakat miskin belum dilakukan secara tuntas, misalnya terjadi pada program pelatihan tenaga kerja bagi masyarakat miskin.
5) Penanganan kemiskinan belum dilakukan secara terintegrasi
6) Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pihak terkait terhadap bantuan yang telah disalurkan

Penanggulangan kemiskinan secara optimal perlu terus dilakukan, karena angka kemiskinan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan suatu daerah, dan hal ini perlu dilakukan guna mendukung tercapainya TPB/SDGs terutama pencapaian tujuan ke-1 “Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun”, dan pencapaian tujuan ke-2 “Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan”. Selain itu, terkait pemindahan ibu kota negara (IKN) maka Kota Balikpapan sebagai penyangga IKN perlu melakukan antisipasi munculnya kantong-kantong kemiskinan baru di Balikpapan seiring meningkatnya jumlah penduduk di daerah ini.

6. Belum Optimalnya Peningkatan di Sektor Ekonomi yang Kreatif

PDRB Kota Balikpapan sepanjang 5 (lima) tahun terakhir meningkat dengan struktur perekonomian masih didominasi sektor industri pengolahan yaitu sebesar 47,28%. Sektor ini didominasi oleh industri pengolahan migas. Secara perlahan, Pemerintah Kota Balikpapan terus mengembangkan upaya peningkatan daya dukung sektor non migas selaras dengan arah kebijakan nasional dan provinsi dalam transformasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam fosil. Pemerintah Kota Balikpapan terus mendorong pengembangan ekonomi kreatif yang dalam struktur perekonomian dicerminkan peran sektor transportasi dan pergudangan serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Diharapkan terjadi peningkatan kontribusi dua sektor tersebut dalam struktur PDRB Kota Balikpapan.Sektor ini menjadi hal yang serius untuk dikembangkan karena untuk mencapai visi pembangunan kepariwisataan daerah dan telah ditetapkan melalui Rencana Induk Kepariwisataan Daerah Kota Balikpapan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan No 7 Tahun 2016. Sektor ini sudah berkembang namun masih perlu dioptimalkan. Masih terdapat beberapa permasalahaan diantarannya sarana promosi dan informasi promosi yang belum optimal, kualitas sarana dan prasarana di pariwisata juga masih belum optimal, dan terkahir belum adanya kebijakan pengembangan ekonomi kreatif. Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 tentu memiliki dampak yang signifikan pada sektor ini dengan menurunnya jumlah wisatawan. Agenda event pariwisata dan budaya Kota Balikpapan juga masih belum konsisten. Selain itu perhatian untuk pertumbuhan ekonomi juga bisa dilakukan melalui berbagai sektor dan bidang seperti investasi, perdagangan, dan juga invesatasi.

4.2 Isu-Isu Strategis

4.2.1 Isu Strategis Internasional

4.2.1.1 Sustainable Development Goals (SDGs)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan disebutkan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030, yang mencakup 17 aspek kehidupan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015. Adapun indikator TPB berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018, meliputi:

1) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun.
2) Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.

3) Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
4) Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
6) Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan.
7) Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua.
8) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9) Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10) Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.
11) Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
12) Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13) Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14) Konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim.
15) Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16) Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17) Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan dihimpun melalui masukan dan pemangku kepentingan melalui konsultasi publik untuk mengkaji capaian indikator TPB di kota/kabupaten. Pengkajian pembangunan berkelanjutan melalui identifikasi dan analisis:

1) Kondisi umum daerah (DDDT, geografis, demografis, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah dan keuangan daerah).
2) Analisis capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan.

3) Analisis kontribusi pembagian peran antara pemerintah, pemerintah daerah, ormas,filantropi, pelaku usaha, serta akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengkajian pembangunan berkelanjutan menghasilkan gambaran kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar untuk merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

4.2.1.2 Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Semangat senasib untuk membangun wilayah ASEAN yang aman, tingkat dinamika pembangunan yang terintegrasi dan maju, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) dibentuk untuk mewujudkan hal tersebut, karakteristik utama yang diusung, yaitu: (a) pasar tunggal dan basis produksi; (b) kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi; (c) kawasan pengembangan ekonomi yang merata; dan (d) kawasan yang secara penuh terintegrasi ke dalam perekonomian global.

Tantangan menghadapi MEA 2015 tersebut dapat dilihat dari bentuk keseriusan Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa kebijakan yang bersifat lintas sektoral dan memberi perhatian khusus dalam meningkatkan daya saing, antara lain: a) Inpres Nomor 5/2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 – 2009, b) Inpres Nomor 11/2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru masyarakat Ekonomi ASEAN, c) Keppres Nomor 23/2012 tentang Susunan Keanggotaan Setnas ASEAN, d) Program Pembangunan seperti MP3EI, e) Program Sislognas, f) Penyusunan *Roadmap* dan Inpres Daya saing, g) *Policy Paper* mengenai kesiapan Indonesia menghadapi AEC, h) pembentukan Komite Nasional AEC 2015, dan i) Unit Kerja Presiden di bidang Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Monitoring Langkah Pemerintah.

Kesiapan memasuki era MEA, tentu menuntut kesiapan dari pemerintah Indonesia dan secara khusus Pemerintah Kota Balikpapan. Melalui peran aktif dan mampu membaca peluang untuk tidak saja menjadi konsumen namun menjadi produsen. Dalam kajian yang sudah dilaksanakan terkait kesiapan Kota Balikpapan menghadapi MEA 2015, catatan penting sebagai upaya peningkatan tersebut dilihat dari beberapa sektor, seperti; dalam sektor UMKM yang memerlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan, pengembangan kewirausahaan, pengembangan tenaga kerja industri, pembina industri serta peningkatan akses ke pelatihan; Peningkatan akses dan transfer teknologi untuk meningkatkan kualitas dan diversifikasi produk berbasis rantai

nilai dan keunggulan lokal, serta peningkatan penerapan standardisasi produk (SNI), mutu (ISO), HaKI, dan sertifikasi (halal, keamanan pangan dan obat) dan Pengembangan jaringan usaha, dan jangkauan pemasaran melalui fasilitasi pemasaran, yang didukung sistem informasi pasar, dan pengembangan *trading house* untuk produk-produk UMKM/IKM dan koperasi.

4.2.1.3 *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP)

Indonesia resmi menandatangani perjanjian perdagangan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) bersama 15 negara Asia-Pasifik terdiri dari 10 negara ASEAN dan 5 mitra ASEAN yaitu Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. RCEP merupakan kemitraan ekonomi komprehensif regional Asia yang digagas Indonesia saat memegang kepemimpinan ASEAN pada 2011. Kerjasama ini bertujuan untuk mengonsolidasikan lima perjanjian perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang sudah dimiliki ASEAN dengan enam mitra dagangnya.

Tercapainya perundingan RCEP tersebut juga menandai komitmen negara-negara terhadap prinsip perdagangan multilateral yang terbuka, adil, dan menguntungkan semua pihak. Lebih penting lagi, hal ini memberikan harapan dan optimisme baru bagi pemulihan ekonomi pasca pandemi di kawasan. RCEP merupakan simbol komitmen pemimpin negara di kawasan terhadap paradigma win-win yang mengutamakan kepentingan bersama. Komitmen atas perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan tersebut akan menjadi bagian penting bagi komitmen kawasan terhadap sentralitas ASEAN di kawasan Indo-Pasifik.

Secara khusus, RCEP diharapkan dapat membantu mengurangi biaya dan waktu bagi perusahaan dengan memungkinkan mereka mengekspor produk ke mana pun di dalam blok tanpa memenuhi persyaratan terpisah untuk setiap negara. Perjanjian RCEP ini juga menyentuh kekayaan intelektual, tetapi tidak akan mencakup perlindungan lingkungan dan hak tenaga kerja. Negara-negara yang tergabung dalam RCEP ini juga berjuang untuk sepenuhnya menyetujui beberapa ketentuan tentang perdagangan digital. Area prioritas utama untuk negosiasi RCEP lebih lanjut kemungkinan adalah e-commerce. Perjanjian dagang RCEP penting karena menetapkan aturan perdagangan baru untuk kawasan itu, dan juga akan mendapat dukungan China tetapi tidak termasuk Amerika Serikat.

4.2.1.4 Pandemi Covid-19

Munculnya Virus Covid-19 telah memicu terjadinya krisis tata kelola dan kebijakan yang menjangkiti seluruh dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri kasus Covid-19 telah menyebar ke seluruh daerah di Indonesia. Tata kelola pemerintah daerah berubah secara drastis dimana suasana krisis menjangkiti

hampir seluruh sektor pemerintahan. Selain pola kerja birokrasi yang berubah, pola perilaku masyarakat juga dipastikan akan mengalami perubahan mengikuti anjuran hidup New Normal yang mulai diwacanakan. Signifikansi dari merebaknya Virus Covid-19 tentu saja akan menjadi efek domino yang menyentuh seluruh aspek kehidupan, tak terkecuali perencanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan proyeksi dari Bappenas, intervensi dari kasus Covid-19 berpengaruh signifikan terhadap indikator utama pembangunan nasional seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, dan indeks pembangunan nasional. Tingkat pertumbuhan ekonomi misalnya diprediksi mengalami penurunan drastis di kisaran angka -0,4 – 2,3%. Tentu saja angka ini sangat berat untuk mengejar target pertumbuhan di tahun 2021 yaitu 5,4 – 5,7%. Hal yang sama juga terjadi pada tingkat kemiskinan yang melonjak karena banyaknya masyarakat yang mengalami penurunan atau bahkan kehilangan kemiskinan. Berdasarkan hasil proyeksi, tingkat kemiskinan pasca terjadinya Covid-19 sebesar 9,7-10,2%.

Jika melihat realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia, dampak dari terjadinya pandemi Covid-19 sudah mulai terasa saat periode triwulan I tahun 2020. Hal ini bisa dilihat dengan penurunan drastis pertumbuhan ekonomi menjadi 2,97%. Ekonomi Indonesia semester I-2020 dibanding semester I-2019 (c-to-c) mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,26 persen. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan diantaranya Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,07 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,13 persen; dan Jasa Perusahaan sebesar 3,48 persen. Sebaliknya beberapa lapangan usaha masih mengalami pertumbuhan positif, diantaranya Informasi dan Komunikasi sebesar 10,35 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,01 persen; dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 5,87 persen. Ekonomi Indonesia triwulan II-2020 dibanding triwulan II-2019 (y-on-y) mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,32 persen.

Kontraksi pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 30,84 persen; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 22,02 persen. Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan juga mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 6,19 persen. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II-2020 (y-on-y), sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 0,58 persen; diikuti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,29 persen; dan Real Estat sebesar 0,07 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia dari lapangan usaha lainnya terkontraksi sebesar 6,26 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan II-2020 terhadap triwulan I-2020 (q-to-q) mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 4,19 persen. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan diantaranya Transportasi dan Pergudangan sebesar 29,22 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 22,31 persen; dan Jasa Lainnya sebesar 15,12 persen. Di sisi lain, beberapa lapangan usaha masih mengalami pertumbuhan positif, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 16,24 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 3,44 persen; dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 1,28 persen.

Sementara itu berdasarkan hasil proyeksi dari beberapa lembaga, diprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia terkoreksi hingga diangka kurang dari 3%. World Bank misalnya memprediksi kemungkinan terburuk terjadi resesi di Indonesia atau dengan kata lain pertumbuhan perekonomian Indonesia minus diangka 3,5%. Sementara International Monetary Fund (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada angka 0,5%. Sementara beberapa lembaga dalam negeri seperti Bappenas, Kemenkeu, dan Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih diatas 2%.

Pemerintah pusat telah mengalokasikan sebesar Rp669,7 Triliun untuk melaksanakan mitigasi dampak Covid-19. Dana tersebut dialokasikan untuk bidang kesehatan sebesar Rp87,55 Triliun, UMKM Rp123,46 Triliun, Perlindungan Sosial Rp203,9 Triliun, Pembiayaan Korporasi Rp37,07 Triliun, Insentif Usaha Rp179,48 Triliun, dan Sektoral dan Pemda sebesar Rp38,24 Triliun. Selain memfokuskan anggaran untuk pemulihan kondisi, kebijakan lainnya adalah dengan melakukan realokasi anggaran terhadap pemerintah daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2020. Total APBD yang telah direalokasi untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp56,57 triliun.

Akselerasi investasi dilakukan melalui perluasan positive lists investasi,percepatan integrasi OSS, relaksasi aturan upah minimum, serta deregulasi perijinan. Percepatan ini diharapkan sedikit banyak dapat menggerakkan perekonomian masyarakat. Kebijakan lainnya yaitu pemulihan industri dan perdagangan. Beberapa strategi yang ditempuh seperti akselerasi pengembangan produk subsitusi impor khususnya makanan, minuman dan farmasi. Hal lainnya yang dilakukan adalah perluasan ekspor melalui optimalisasi PTA/FTA/CEPA.

Adapun untuk kebijakan perlindungan sosial, pemerintah pusat telah melaksanakan beberapa program seperti pemberian sembako kepada 20 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp200 ribu/bulan, bantuan listrik

kepada31,1 juta pelanggan 450 VA dan 900 VA, serta Bantuan Langsung Tunai Dana Desakepada 12 Juta KK sebesar Rp600 ribu/bulan/KK.

Selain dengan menjalankan beberapa paket kebijakan ekonomi, langkah lainnya yang diambil adalah dengan kebijakan pemberian stimulus ekonomi untuk beberapa sektor industri. Beberapa stimulus itu seperti pembebasan cukai alkohol untuk penanganan Covid-19, relaksasi fasilitas impor, relaksasi pph impor untuk perusahaan Kite berupa pengurangan pph ps 25 impor sebesar 30%, percepatan layanan online untuk penanganan covid-19, relaksasi pelunasan cukai & produksi rokok, relaksasi penjualan lokal dari perusahaan KB/KITE, serta percepatan logistiksistem NLE.

Secara keseluruhan respon kebijakan yang diambil pemerintah tetap mengutamakan keselamatan masyarakat melalui penguatan fasilitas kesehatan serta perlindungan terhadap kelompok rentan dan dunia usaha. Untuk tahap pertama beberapa upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kapasitas infrastruktur kesehatan untuk melakukan penanganan terhadap pasien penderita Covid-19 serta alat perlindungan untuk tenaga medis. Pada tahap kedua, pemerintah berupa untuk memperluas bantuan sosial seperti listrik gratis, pemberian insentif kepada karyawan swasta untuk penghasilan tertentu serta keringanan pajak. Tahap ketiga, upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan relaksasi terhadap sektor keuangan yang mengalami dampak langsung. Beberapa kebijakan dikeluarkan untuk memberikan stimulus moneter dan keuangan, bantuan likuiditas, serta penurunan suku bunga. Pada tahap terakhir, pemerintah pusat melakukan program pemulihan ekonomi. Hal ini kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 untuk memberikan arah pemulihan ekonomi untuk mengejar target dalam RPJMN.

4.2.2 Isu Strategis Nasional

4.2.2.1. RPJMN 2020-2024

Selain isu internasional, beberapa isu nasional juga perlu diperhatikan untuk dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Penelaahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yaitu pada arahan presiden dan agenda pembangunan nasional. Visi Presiden yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 adalah:

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misinya adalah:

a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan

d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Visi misi pembangunan nasional tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam lima arahan presiden yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan penyederhanaan birokrasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Berikut penjelasan terkait lima arahan presiden tersebut adalah:

1. Pembangunan SDM

   Manusia merupakan modal utama dalam pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan data saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat, dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Dalam mendukung arahan tersebut Pemerintah Kota Balikpapan membuat strategi untuk meningkatkan kemudahan akses layanan pendidikan, meningkatkan tingkat derajat kesehatan masyarakat melalui penguatan sistem kesehatan, mengembangkan kapasitas daya saing kepemudaan dan keolahragaan, meningkatkan budaya membaca masyarakat, mengembangkan nilai budaya Kota Balikpapan, dan meningkatkan Pembangunan yang Berkeadilan untuk Semua (perempuan, pemuda, lansia, anak, difabel).

2. Pembangunan infrastruktur

   Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui: 1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah, 2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan, 3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK, 4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien, 5) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur. Pemerintah Kota Balikpapan dalam mendukung arahan tersebut membuat arah kebijakan untuk meningkatkan Konektivitas Kawasan Perkotaan yang Terintegrasi, mengembangkan layanan air minum dan air limbah, meningkatkan

infrastruktur pengendali banjir, dan Meningkatkan penyediaan infrastruktur kawasan permukiman dan perumahan.

3. Penyederhanaan regulasi dan penyederhanaan birokrasi

   Penyederhanaan regulasi dan penyederhanaan birokrasi masuk dalam agenda pembangunan untuk memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Dimana setiap negara berkewajiban untuk melindungi, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas. Pemerintah Kota Balikpapan berupaya dalam menentukan strategi untuk menerapkan pelayanan publik yang cepat, tanggap, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat secara terintegrasi dan terpadu melalui membangun sistem *e-goverment,* mendorong pengembangan pelayanan publik yang inovatif, meningkatkan keselarasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, memperkuat pengawasan dan tata kelola keuangan yang akuntabel, menguatkan akuntabilitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, serta pemantapan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan.

4. Transformasi ekonomi

   Transformasi ekonomi menjadi salah satu kunci memperkuat ketahan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Untuk mendukung transformasi ekonomi Pemerintah Kota Balikpapan membuat strategi dengan meningkatkan produk unggulan daerah, memperluas kesempatan kerja, penanggulangan kemiskinan terpadu, meningkatkan kemudahan berinvestasi, meningkatan pemasaran pariwisata, meningkatkan pengelolaan industri kreatif serta meningkatkan jaringan distribusi perdagangan sektor barang dan jasa.

4.2.2.2. Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur

DKI Jakarta telah menjadi Ibu Kota Negara Indonesia sejak kemerdekaan. Beban yang dipikul oleh wilayah ini cukup besar. Bukan hanya berperan sebagai pusat pemerintahan, DKI Jakarta berperan sebagai pusat aktivitas bisnis dan perekonomian di seluruh Indonesia. Implikasinya adalah ledakan jumlah penduduk di DKI Jakarta menjadi tidak terkendali. Ledakan penduduk inilah yang kemudian menurunkan masalah-masalah baru di DKI Jakarta seperti kemacetan, banjir, kemiskinan, dan lain-lain. Wacana pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari DKI Jakarta ini Berangkat dari sebuah kondisi permasalahan DKI Jakarta yang tampaknya sudah semakin kronis dan kompleks. Permasalahan seperti kemacetan, banjir, kepadatan penduduk yang sudah tidak wajar, serta keterbatasan wilayah menjadi beberapa hal yang kemudian menyebabkan wacana pemindahan Ibu Kota

Negara perlu untuk direalisasikan. Jika kemudian dijabarkan lebih lanjut, permasalahan- permasalahan tersebut merupakan hanya beberapa bagian yang menjadi kajian pemerintah pusat melakukan pemindahan. Beban DKI Jakarta sudah terlampau berat untuk berperan sebagai pusat administrasi pemerintahan dan pusat aktivitas bisnis yang harus mengakomodasi ratusan juta penduduk di Indonesia.

Disamping itu, wacana pemindahan Ibu Kota ini sebenarnya juga harus dilihat sebagai upaya pemerintah untuk `mengendurkan` ketergantungannya terhadap Jawa. Selama ini tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan memang terlalu dititikberatkan ke Pulau Jawa. Memang bukan tanpa alasan, penumpukan penduduk yang begitu besar di Pulau Jawa (mencapai 56,56% atau 147.828.100 jiwa) tentu saja membuat pemerintah juga harus melaksanakan berbagai pembangunan. Jika dibandingkan dengan Pulau-pulau lainnya seperti Sumatera yang jumlah penduduknya sekitar 21,78% atau 56.932.400 jiwa, Sulawesi dengan jumlah penduduk 19.149.100 atau 7,33%, tentu saja memperlihatkan bahwa konsentrasi pembangunan di Indonesia memang terfokus di Pulau Jawa.

Selain itu konsentrasi perekonomian di Indonesia juga terpusat di Pulau Jawa. Dari data yang dirilis oleh Bappenas menunjukkan kegiatan perekonomian sangat didominasi di Pulau Jawa. PDRB Pulau jawa sebesar 58,49%. Jika dispesifikkan lagi sebesar 20,85% disumbangkan oleh Jabodetabek. Dibandingkan dengan pulau- pulau lainnya seperti Sumatera yang memiliki nilai PDRB sebesar 21,66%, atau Kalimantan sebesar 8,2% dan Sulawesi sebesar 6,11%, tentu saja memperlihatkan Indonesia memang sangat bergantung dengan Pulau Jawa.

Oleh karenanya wacana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ini dapat dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembangunan wilayah di luar jawa. Khusus untuk wilayah di luar jawa, terdapat 26 wilayah yang akan dilakukan pengembangan strategis. Di Pulau Sumatera terdapat 6 titik seperti di wilayah Sabang-Banda Aceh-Langsa, Medang-Tebing-Dumai-Pekanbaru, dan Sibolga- Padang-Bengkulu. Sementara di Pulau Kalimantan terdapat 4 titik pengembangan strategis yaitu Temajuk-Sebatik, Balikpapan-Samarinda-Maloy, Palangkaraya- Banjarmasin-Batulicin, dan Ketapang-Pontianak-Singkawang-Sambas. Sedangkan di Pulau Sulawesi terdapat 5 titik pengembangan strategis, Bali dan Nusa Tenggara 5 titik, serta Papua dan Maluku sebanyak 6 titik. Beberapa sasaran pembangunan yang dikhususkan untuk wilayah di luar jawa sendiri memang dikhususkan untuk mengurangi ketimpangan yang ada. Adapun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bertugas untuk melakukan pengembangan tersebut menggunakan konsep Wilayah Pengembangan Strategis untuk mendukung program tersebut.

Adapun pemilihan Ibu Kota Negara sudah ditetapkan berada di Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara. Bappenas selaku pihak yang bertanggungjawab dalam menyiapkan kajian pemindahan Ibu Kota Negara dan menetapkan Ibu Kota yang baru sudah menyiapkan beberapa indikator yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah rancangan zonasi kawasan Ibu Kota Negara. Kawasan Ibu Kota Negara terdiri dari 4 kawasan yaitu Kawasan Inti Pusat Pemerintahan. Kawasan ini membutuhkan lahan seluas 2.000 Ha yang diperuntukkan untuk aktivitas pemerintahan dan beberapa fasilitas pendukung. Kawasan ini terdiri dari Istana Presidan dan Wakil Presiden, Kantor Lembaga Negara (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif), Taman Budaya, dan Botanical Garden.

Dipilihnya Provinsi Kalimantan Timur, karena Provinsi ini relatif lebih baik dalam hal fasilitas infrastruktur. Beberapa kelebihan dari provinsi Kalimantan Timur adalah dekat dengan 2 bandara besar di Balikpapan dan Samarinda, akses tol antara Balikpapan dan Samarinda, dekat dengan pelabuhan Semayang Balikpapan, ketersediaan infrastruktur jaringan energi dan air bersih, struktur demografi yang relatif heterogen karena sebagian besar merupakan pendatang, lokasi delineasi oleh ALKI II di sekitar Selat Makassar, bebas dari bencana alam seperti gempa bumi dan kebakaran hutan, tidak berbatasan langsung dengan batas negara, serta ketersediaan lahan dengan status APL. Adapun kelemahan dari Provinsi Kalimantan Timur adalah rawan terhadap bencana banjir karena dekat dengan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) serta ketersediaan sumber daya air tanah yang rendah.

Terkait dengan pembiayaan pemindahan Ibu Kota Negara, Bappenas menyebut terdapat 4 skema pembiayaan yaitu APBN, Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), BUMN, dan sektor swasta. Adapun total biaya yang dibutuhkan untuk proses pemindahan Ibu Kota Negara adalah sebesar 466 Triliun yang terdiri dari 4 komponen. Komponen pertama adalah fungsi utama yang terdiri dari pembangunan gedung legislatif, eksekutif, dan yudikatif sebesar 32,7 Triliun. Komponen kedua adalah fungsi pendukung yang terdiri dari pembangunan rumah dinas (bertingkat dan rumah tapak ASN dan TNI/POLRI), pembangunan sarana pendidikan (SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi), pembangunan sarana kesehatan, dan lembaga pemasyarakatan sebesar 265,1 Triliun. Komponen ketiga adalah fungsi penunjang yang terdiri sarana dan prasarana seperti jalan, listrik, jaringan telekomunikasi, air minum, drainase, dan pengolahan limbah serta ruang terbuka hijau sebesar 160,2 Triliun. Komponen terakhir adalah pengadaan lahan dengan biaya sebesar 8 Triliun. Dari total biaya 466 Triliun tersebut sumber pembiayaan yang ditanggung oleh APBN sebesar 30,6 Triliun, skema KPBU sebesar 340,6 Triliun, dan swasta sebesar 95 triliun.

Pemerintah sendiri telah menyiapkan dua skenario pemindahan Ibu Kota. Skenario pertama adalah dengan total biaya Rp466 Triliun diasumsikan penduduk yang akan tinggal di kota tersebut sebanyak 1,5 juta jiwa. Pemerintahan akan membutuhkan 5% lahan, ekonomi 15%, sirkulasi infrastruktur 20%, pemukiman 40% dan ruang terbuka hijau 20%, diperkirakan dibutuhkan lahan sampai atau minimal 40.000 hektare. Sedangkan skenario kedua adalah apabila ketika pemindahan ada resizing dari ASN, di mana ASNnya yang pindah itu 111 ribuan, ditambah Polri/TNI, anggota keluarganya menyesuaikan dengan 4 anggota keluarga, pelaku ekonominya 184.000, jumlah penduduk di bawah satu juta, tepatnya 870.000 dibutuhkan kira-kira lahan dengan peruntukan persentase pemakaian yang sama, maka diperlukan lahan lebih sedikit yaitu 30.000 hektar. Untuk skenario kedua ini membutuhkan biaya yang lebih sedikit yaitu sekitar 323 Triliun.

Pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Jawa diarahkan untuk mendorong pemerataan dan percepatan pengurangan kesenjangan serta peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di luar Jawa terutama wilayah timur. Major project Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) pada 2021 difokuskan untuk pembangunan akses dan infrastruktur dasar kawasan inti pusat pemerintahan serta sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Kalimantan dengan RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN) IKN yang telah disusun.

4.2.2.3. Bonus Demografi

Pertumbuhan penduduk dapat dipandang sebagai faktor pendukung pembangunan karena dengan pertambahan penduduk karena dapat membantu pembangunan. Selain sebagai faktor pendukung kemajuan suatu negara, pertumbuhan penduduk juga dapat menjadi faktor penghambat kemajuan suatu negara jika tidak didukung oleh kemampuan dan keterampilan yang baik.

Saat ini Indonesia diprediksi akan akan mengalami masa bonus demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Pada periode ini, penduduk usia produktif mencapai 64 persen dari totak penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa.

Pada dasarnya, bonus demografi merupakan suatu fenomena dimana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan, karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sementara usia muda sudah semakin mengecil dan proporsi usia lanjut belum banyak. Kondisi ini adalah potensi besar engine of growth bagi suatu daerah untuk melompat menjadi daerah maju dari segi pembangunan ekonomi akibat kecilnya beban yang ditanggung. Namun untuk

bisa mendapatkan bonus itu dibutuhkan sumber daya manusia yang baik serta terbukanya lapangan kerja berkualitas. Namun di sisi lain, fenomena bonus demografi ini merupakan suatu tantangan bagi suatu daerah untuk menyiapkan kondisi yang layak untuk menghadapi fenomena tersebut, seperti penyediaan peningkatan kualitas SDM serta penyediaan lapangan pekerjaan. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka terjadinya pengangguran akan menjadi beban negara.

Dengan melihat komposisi pertumbuhan penduduk di Kota Balikpapan, fenomena bonus demografi akan mempengaruhi geliat peningkatan pembangunan daerah di berbagai sektor. Berdasarkan data proyeksi pertumbuhan penduduk tahun 2015-2024, pertumbuhan penduduk usia produktif Kota Balikpapan tiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Dari data ketenagakerjaan Kota Balikpapan selama lima tahun ini, jumlah penduduk produktif Kota Balikpapan selalu berada pada nilai di atas 60 persen.

Meskipun demikian dengan adanya bonus demografi pada Kota Balikpapan, akan menimbulkan tantangan tersendiri dalam pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat usia produktif yang lebih besar. Dengan semakin tingginya jumlah penduduk usia produktif, maka kebutuhan akan lapangan pekerjaan tentunya semakin besar. Oleh karena hal tersebut, peningkatan kualitas SDM khususnya penduduk usia produktif harus semakin ditingkatkan. Hal ini agar kesempatan kerja penduduk khususnya yang tergolong dalam usia produktif dapat semakin ditingkatkan.

Peningkatan kualitas SDM merupakan hal utama yang perlu ditingkatkan sebelum selanjutnya meningkatkan lapangan pekerjaan bagi penduduk. Hal ini dibutuhkan agar spesifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan dapat disesuaikan dengan SDM yang tersedia, sehingga angka pengangguran penduduk di Kota Balikpapan dapat ditekan.

4.2.3 Isu Strategis Provinsi Kalimantan Timur

Selain mengacu pada dokumen perencanaan nasional, RPJMD Kota Balikpapan juga harus mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini juga berkaitan dengan tingkat hierarki pemerintahan, dimana Kota Balikpapan terintegrasi dengan pembangunan dalam Provinsi Kalimantan Timur. RPJMD Kota Balikpapan. Integrasi antara dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan kota adalah wujud dari upaya untuk menciptakan keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Adapun isu strategis dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 fokus yaitu:

1) Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) dan tenaga kerja;
2) Percepatan Transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan secara vertikal maupun horizontal
3) Peningkatan aksesibilitas dan penguatan konektivitas infrastruktur wilayah
4) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
5) Pemerintahan yang profesional dan akuntabel
6) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018

Sedangkan visi pembangunan yang diangkat oleh Provinsi Kalimantan Timur adalah "Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat". Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut adalah dengan melaksanakan beberapa misi yang telah dirumuskan. Berikut adalah penjabaran misi-misi tersebut:

1) Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
2) Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3) Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan
4) Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
5) Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Kota Balikpapan sendiri juga diarahkan untuk mendukung tumbuhnya iklim usaha yang semakin baik. Hal ini diwujudkan melalui pengembangan kawasan industri. Kota Balikpapan memiliki komoditas produk unggulan berupa kayu lapis (plywood), udang beku, pengolahan kayu, galangan kapal, moulding, pengolahan rotan, kulit buaya dan garmen. Banyaknya keunggulan komoditi yang dimiliki Kota Balikpapan menjadikannya sebagai salah satu wilayah penopang utama perekonomian Provinsi Kalimantan Timur. Kemajuan pembangunan di kawasan pesisir terutama Balikpapan, Samarinda dan Bontang relatif lebih cepat dibanding wilayah lainnya, sementara sebagian masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang tinggal di kawasan perbatasan, perdesaan, daerah pedalaman, daerah tertinggal, dan pulau terdepan, masih menghadapi permasalahan dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat termasuk pangan dan gizi, layanan kesehatan dan pendidikan, kemiskinan, air bersih dan sanitasi, keterbatasan akses terhadap pengelolaan sumber daya alam, kerusakan lingkungan, dan keterbatasan infrastruktur.

Kota Balikpapan diarahkan untuk menjadi penopang dalam beberapa kawasan industri yang berpotensi untuk mengakselerasi perekonomian. Penguatan Kawasan Strategis Provinsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah perlu dilakukan melalui peningkatan akses dan konektivitas antar kawasan untuk mendukung percepatan realisasi investasi industri pengolahan produk unggulan daerah pada masing-masing kawasan.

Adapun Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah kabupaten/kota dengamempertimbangkan sinkronisasi dan sinergi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah RPJPD Provinsi Kalimantan Timur, serta pencapaian target makro ekonomi Kota Balikappan adalah sebagai dirangkum pada Tabel berikut :

Tabel 4.3 Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Kewilayahan Kota Balikpapan

NO	KAB/KOTA	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan Kewilayahan
	BALIKPAPAN	Peningkatan produktivitas pertanian hortikultura	Intensifikasi dan pengamanan kawasan pertanian hortikultura
		Peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya	Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya
		Pengembangan Kawasan peternakan	Pengembangan Mini Ranch melalui pola kemitraan dan penyediaan sarana pendukungnya
		Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar hutan	Pengembangan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS)
		eningkatan pelayanan infrastruktur di kawasan pusat kegiatan ekonomi	Pengembangan jaringan jalan provinsi, Peningkatan Upaya pengendalian banjir,Pengembangan Direct Call Pelabuhan Kariangau, Perluasan infrastruktur air bersih, Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh
		Pengembangan Kawasan industri	Pengembangan Kawasan Industri Kariangau sebagai Kawasan industri pengolahan multi produk
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Peningkatan akreditasi puskesmas

Sumber : Bappedalitbang, Diolah 2021

4.2.4 Isu Strategis Kabupaten/Kota Berbatasan

4.2.4.1 Kabupaten Kutai Kartanegara

Penyusunan RPJMD Kota Balikpapan selain memperhatikan vertikalitas dokumen perencanaan pemerintahan diatasnya, perlu untuk memperhatikan arah pembangunan dari daerah yang berbatasan dengannya Oleh karenanya, Kota Balikpapan perlu untuk meninjau arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kutai Kertanegara. Hal ini dimaksudkan agar terjadi keselarasan pembangunan antar

kedua daerah dalam menggarap sektor-sektor potensial. Dalam proses perencanaan pembangunannya, Kabupaten Kutai Kartanegara merumuskan beberapa isu strategis, berikut adalah penjabarannya:

1) Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup menuju tata kelola yang lebih baik;
2) Pendayagunaan dan pembangunan infrastruktur dalam rangka menuju daya saing daerah;
3) Perwujudan pemerintah yang bersih, tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusifitas daerah;
4) Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat
5) Peningkatan Ekonomi dan Pertanian Dalam Arti Luas (Ketahanan Pangan dan Kelautan Perikanan);

Berdasarkan isu strategis tersebut maka disusunlah visi pembangunan daerah sebagai acuan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Adapun visi daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 adalah "Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan". Untuk mewujudkan visi daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka disusun beberapa misi untuk mencapai visi tersebut. Berikut adalah penjabaran misi tersebut:

1) Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat;
2) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten;
3) Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah;
4) Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah;
5) Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah;
6) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
7) Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak.

Berdasarkan telaah RPJMD Kabupaten Kutai Kertanegara beberapa potensi yang dapat dilakukan kerjasama dengan Kota Balikpapan dengan adanya sumber air baku di Kabupaten Kutai Kertanegara sendiri bersumber dari Sungai Mahakam. Hal ini Kabupaten Kutai Kertanegara dapat menjadi penyediaa air bersih/ air baku untuk kebutuhan masyarakat Kota Balikpapan. yang mana Kota Balikpapan sendiri memiliki keterbatasan ketersediaan air baku. Di Kota Balikpapan sendiri saat ini masih dalam pembangunan bendungan Teritip, Embung Air Raden, namun dikarenakan kurangnya sumber air dan permintaan air bersih yang terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk, investasi usaha, dan kegiatan lain yang

membutuhkan air bersih kersjasama antar daerah masih diperlukan. Selain itu, Kota Balikpapan dapat bekerjasama dengan daerah lain dalam hal untuk meningkatkan produk unggulan daerah melalui kerjasama perdagangan antar daerah.

4.2.4.2 Kabupaten Penajam Paser Utara

Selain Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan juga berbatasan langsung dengan Kabupaten Penajam Paser Utara. Dalam proses perencanaan pembangunannya, Kabupaten Penajam Paser Utara merumuskan beberapa isu strategis, berikut adalah penjabarannya:

1) Peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan;
2) Pemenuhan layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat dan peningkatan kesadaran kesehatan lingkungan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
3) Penanggulangan kemiskinan, permasalahan sosial dan pengangguran;
4) Peningkatan kualitas infrastruktur dan jangkauan aksesibilitas layanan infrastruktur;
5) Penyediaan utilitas permukiman seperti air bersih, drainase, persampahan maupun air limbah;
6) Penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi;
7) Peningkatan perekonomian dengan memperhatikan potensi lokal melalui pemberdayaan masyarakat serta lembaga-lembaga ekonomi setempat;
8) Pengembangan industri khususnya sektor sekunder dan tersier yang berdasarkan peningkatan nilai tambah pengolahan hasil pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan;
9) Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas SDM aparatur dengan didukung pengembangan teknologi informasi
10) Optimalisasi peningkatan PAD dengan memperhatikan prinsip-prinsip perekonomian berkeadilan;
11) Penciptaan iklim investasi melalui penyediaan infrastruktur dan regulasi;
12) Penguatan UKM dan Koperasi secara menyeluruh;
13) Peningkatan kapasitas aparatur dalam rangka perwujudan good governance.

Berdasarkan isu strategis tersebut maka disusunlah visi pembangunan daerah sebagai acuan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Adapun visi daerah dalam RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023 adalah “Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara yang Maju, Modern, dan Religius”. Adapun strategi untuk mewujudkan visi daerah Kabupaten Penajam

Paser Utara, maka disusun beberapa misi untuk mencapai visi tersebut. Berikut adalah penjabaran misi tersebut:

1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran;
2) Pembangunan infrastruktur & konektivitas kawasan serta industri terpadu;
3) Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan;
4) Meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas;
5) Mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi Agribisnis, Agroindustri, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan;
6) Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis perdesaan dan kelurahan serta kelompok masyarakat minoritas, terpencil dan terpinggirkan, melalui pembangunan desa dan kelurahan serta pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan;
7) Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan serta permukiman;
8) Peningkatan penerimaan daerah dan pengembangan sumber pendapatan non migas;
9) Menguatkan kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas;
10) Pengembangan sistem informasi yang handal dan modern dalam upaya peningkatan dan pengembangan layanan pemerintahan dan ekonomi daerah;

Berdasarkan visi misi RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023 diatas. Diketahui Kabupaten Penajam Paser Utara pada misi lima yaitu ”Mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi Agribisnis, Agroindustri, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan”. Dalam hal ini strategi yang ingin ditempu Kabupaten Penajam Paser Utara adalah untuk meningkatkan produksi pertumbuhan ekonomi dalam bidang agribisnis, agroindustri, pariwisata, perdagangan dan jasa serta kerjasama lokal, regional, maju, dan berkelanjutan. Dengan arah kebijakan yaitu meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kerjasama perekonomian.

Kabupaten Penajam Paser Utara sendiri pada sektor pertanian, peternakan terus meningkat, bahkan pada sektor pertanian menjadi penyumbang PDRB nomor dua setelah sektor pertambangan. Hal ini mampu menjadi peluang kerjasama dengan Kota Balikpapan yang mana dalam bidang pertanian terdapat beberapa

permasalahan diantaranya produksi dan produktivitas tanaman dan perkebunan sulit ditingkatkan pertanian dan ketahanan yang masih belum optimal dan ketersediaan / jumlah ppopulasi ternak yang masih belum memadai. Sesuai dengan strategi dan arah kebijakan untuk meningkatkan ketersediaan dan akses pangan berkelanjutan bagi masyarakat. Selain itu, Kota Balikpapan dapat bekerjasama dengan daerah lain dalam hal untuk meningkatkan produk unggulan daerah melalui kerjasama perdagangan antar daerah.

4.2.5 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

Dokumen KLHS RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026 merupakan dokumen analisis terkait kondisi lingkungan dan juga integrasu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD kota Balikpapan Tahun 2021-2026. Isu strategis pembangunan KLHS RPJMD kota Balikpapan didapatkan dari mempertimbangkan indikator TPB yang belum tercapai, yaitu indikator TPB yang sudah dilaksankaan tetapi belum mencapai target nasioanal (SB), indikator TPB belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (BB). Penyusunan isu strategis juga melibatkan dengan pendapat masyarakat pada uji publik 1. Selain itu, juga terdapat indikator-indikator perlu dilakukan upaya tambahan agar mencapai target sesuai dengan Perpres No. 59 Tahun 2017 dan berkontribusi kepada isu strategis. Berikut isu-isu strategis pada KLHS RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026 yang dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

Pilar Pembangunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Isu Strategis	Indikator yang perlu Upaya Tambahan
Pilar Pembangunan Sosial	Goal 1: Tanpa Kemiskinan	Masih terdapat masyarakat Kota Balikpapan yang hidup di bawah garis kemiskinan	1) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana 2) Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah
	Goal 2: Tanpa Kelaparan	Masih terdapat masyarakat penyandang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) 2) Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan 3) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari 4) Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)
	Goal 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Perlunya peningkatan SDM dan Fasilitas bidang Kesehatan,	Kasus Tubercolosis (TBC), Malaria, Narkoba dan Merokok

Pilar Pembangunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Isu Strategis	Indikator yang perlu Upaya Tambahan
		peningkatan jumlah peserta BPJS Mandiri dan Pekerja	
	Goal 4: Pendidikan Berkualitas	Masih terdapat anak putus sekolah, nilai IPM yang belum optimal dan perlunya peningkatan sarana dan prasaran kegiatan pembelajaran	APK SD/MI Sederajat
	Goal 5: Kesetaraan Gender	Belum optimalnya penyelesaian permasalahan dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	1) Kekerasan seksual 2) keluarga berencana tidak terpenuhi 3) Prevelensi kekerasan terhadap anak perempuan 4) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun 5) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) 6) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern
Pilar Pembangunan Ekonomi	Goal 7: Energi Bersih dan Terjangkau	Masih tingginya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan energi dengan sumber bahan baku energi yang tidak terbarukan Belum maksimalnya pengelolaan sumberdaya energi terbarukan	1) Bauran energi terbarukan 2) Intensitas energi primer
	Goal 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Masih terdapat penduduk yang belum memiliki pekerjaan dan mengalami pemutusan hubungan kerjaTerpuruknya bidang pekerjaan sektor infomal selama pandemi COVID 19	1) Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin 2) Tingkat setengah pengangguran 3) Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB
	Goal 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur	Masih diperlukannya peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha dan Kualitas Produk serta perlunya peningkatan akses pasar bagi pelaku usaha	1) Nilai tambah industri manufaktur 2) Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri 3) Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit
	Goal 10: Berkurangnya Kesenjangan	Masih terdapatnya kesenjangan ekonomi jika dilihat dari Rasio Gini Kota Balikpapan	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

Pilar Pembangunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Isu Strategis	Indikator yang perlu Upaya Tambahan
	Goal 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	Masih perlunya peningkatan kerjasama antar pihak dalam pemenuhan kelengkapan data untuk pengukuran capaian pembangunan daerah	1) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB 2) Anggaran didanai pajak domestic 3) Data BPS sebagai rujukan utama 4) Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintahan dan Badan Usaha (KPBU) 5) Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
Pilar Pembangunan Lingkungan	Goal 6: Air Bersih dan Sanitasi layak	Masih terdapat warga kota yang belum memperoleh layanan air bersih Masih terbatasnya kapasitas sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan air baku	1) Akses layanan sumber air minum layak 2) Akses layanan air minum aman dan berkelanjutan 3) Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan system terpusat skala kota, kawasan dan komunal. 4) Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri 5) Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
	Goal 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	Masih terdapat permukiman kumuh dan warga yang tidak memiliki rumahMasih terjadinya banjir di wilayah Kota Balikpapan Adanya pembukaan/pengupasan lahan yang tidak terpantau	1) Akses hunian layak terjangkau 2) Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil 3) Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan
	Goal 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	Masih tingginya produksi timbulan sampah domestik warga	1) Pengguna transportasi umum 2) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 3) Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister 4) Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister
	Goal 13: Penangan dan Perubahan Iklim	Masih perlunya peningkatan koordinasi dan perencanaan penanganan bencana akibat perubahan iklim terutama di bidang Kesehatan	
	Goal 14:	Adanya pencemaran laut	

Pilar Pembangunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Isu Strategis	Indikator yang perlu Upaya Tambahan
	Ekosistem Lautan	akibat peristiwa tumpahan minyak dan aktivitas lalu lintas laut. Adanya ancaman terhadap keragaman hayati laut akibat aktivitas lalu lintas laut. Perlunya konservasi kawasan pesisir dan keterbukaan akses bagi masyarakat umum	
	Goal 15: Ekosistem Daratan	Masih adanya aktivitas pembangunan yang tidak mempertimbangkan DDTLH Kota Balikpapan	1) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan 2) Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati
Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	Goal 16: Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	Masih perlunya peningkatan sarana dan prasarana untuk penegakan hukum	

Sumber: KLHS RPJMD Kota Balikpapan 2020-2024

Melalui analisis capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dari 4 Pilar yaitu, Pilar Sosial, Pilar Lingkungan, Pilar Ekonomi, dan Pilar Hukum diatas. Serta rencana upaya tambahan dan penyesuaiannya terkait dampak terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, maka didapatkan point isu strategis dari 4 pilar tersebut dari rumusan KLHS RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

a) Menyediakan Pelayanan Dasar Dalam Bidang Kesehatan dan Pendidikan

Penyediaan pelayanan dalam bidang kesehatan dan pendidikan dalam melayani segala kegiatan masyarakat khususnya pada masyarakat yang kurang mampu. Berdasarkan data yang ada pada Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tahun 2016 hingga 2020 di sekolah dasar dan juga menengah mengalami naik dan turun yaitu pada tahun 2016 untuk Sekolah Dasar yaitu sebesar 111,8 sedangkan pada tahun 2020 sebesar 79,8 dari penurunan data APS tersebut dapat dilihat bahwa salah satu faktornya adalah tingkat urbanisasi penduduk yang semakin meningkat di setiap tahunnya yang mencapai ±4% sehingga membuat jumlah sekolah yang tersedia kurang menampung jumlah penduduk yang ada, sehingga perlunya penyediaan baik kuantitas sebagai bentuk pemerataan pelayanan di segala lapisan masyarakat serta kualitas yang baik dalam memberikan layanannya sesuai dengan OPD atau instansi terkait dalam penyediaan nya. Pada penyediaan maupun peningkatan layanan pendidikan yang mana diharapkan dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengetahuan serta keahlian yang didapatkan

juga menghasilkan SDM yang berkualitas, ataupun dapat mengurangi jumlah anak putus sekolah, meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam pengetahuan secara optimal serta dapat terlayani nya masyarakat terhadap sarana dan prasarana pada kegiatan pembelajaran, yaitu dengan adanya akses infrastruktur yang memadai seperti listrik, fasilitas sanitasi yang baik, air bersih, dan fasilitas penunjang pembelajaran lainnya ialah internet dan juga komputer.

Selain pada layanan pendidikan, berdasarkan data yang ada ketersediaan sarana dan prasarana Kesehatan di Kota Balikpapan mengalami peningkatan di setiap tahunnya dari tahun 2017 hingga tahun 2020, tetapi terdapat kendala yaitu masih terdapat alat kesehatan maupun kendaraan operasional sebagai fasilitas kesehatan yang masih belum memadai atau terpenuhi dan kendala lainnya yaitu pada SDM pada bidang kesehatan yang terbatas akan pengetahuan salah satunya pada penggunaan aplikasi teknologi yang menjadi pemanfaatan IT tidak merata di beberapa pelayanan kesehatan yang ada, ketersediaan tenaga Kesehatan sendiri di Kota Balikpapan pada tahun 2017 hingga 2020, tenaga Kesehatan di puskesmas sendiri mengalami peningkatan yaitu tahun 2017 sebesar 60,00% dan pada tahun 2020 sebesar 82,72% sedangkan tenaga Kesehatan di rumah sakit mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 52,00% dan di tahun 2020 sebesar 97,32%, dimana secara keseluruhan tenaga Kesehatan telah memiliki jumlah yang cukup baik namun diharapkan adanya peningkatan lagi terutama pada SDM bidang Kesehatan di rumah sakit. Sehingga berdasarkan data tersebut maka penyediaan dalam bidang kesehatan juga menjadi isu strategis dalam pembangunan diperlukan penyediaan serta peningkatan layanan fasilitas kesehatan di seluruh lapisan masyarakat agar pelayanan yang diberikan merata dan dapat meningkatkan potensi atau daya saing SDM ataupun partisipasi masyarakat dalam pembangunan pelayanan di bidang kesehatan tersebut sebagai tenaga kesehatan. Penyediaan layanan kesehatan dapat berupa peningkatan jumlah dan kualitas dari infrastruktur yang memadai baik sarana maupun prasarana serta fasilitas-fasilitas lainnya seperti ketersediaan obat dan vaksin maupun imunisasi agar masyarakat memiliki jaminan pada kesehatan.

b) Penyediaan Kebutuhan Dasar Sarana dan Prasarana.

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang terus meningkat membuat layanan kota akan semakin tidak efektif, kecuali kota dapat memberikan fasilitas layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara keseluruhan yang tinggal di kota. Oleh karena itu, Kota Balikpapan harus dapat mewujudkan diri sebagai kota yang mampu melayani penduduknya dengan fasilitas yang memadai dan berkualitas. Salah satu fasilitas dasar yang wajib dipenuhi adalah kebutuhan akan air bersih dan listrik. Penyediaan air baku saat ini menjadi salah satu permasalahan utama di Kota Balikpapan, berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan air minum pada dokumen Rencana Induk Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kota Balikpapan, total penyediaan

air baku Kota Balikpapan pada tahun 2020 adalah sebesar 1.570 liter/detik dari total kebutuhan sebesar 2.248 liter/detik sehingga masih terdapat kekurangan air baku sebesar 678 liter/detik.

Masalah yang kerap dihadapi terkait peningkatan kualitas RTLH adalah kian meningkatnya jumlah populasi penduduk dan kemampuan masyarakat untuk membangun dan menjangkau rumah yang layak huni. Selain itu, rumah tidak layak huni tidak dapat diintervensi karena tidak masuk dalam kriteria RTLH yang salah satu penyebabnya adalah masalah legalitas kepemilikan tanah, sesuai dengan Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-326/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Balikpapan, terdapat perumahan dan permukiman kumuh di Kota Balikpapan seluas 153,3 Ha. Adapun mengenai penyelenggaraan angkutan, jumlah angkutan kota di Kota Balikpapan mengalami penurunan dari 1.807 unit pada tahun 2016 menjadi 782 unit, hal ini seiring dengan rencana peremajaan angkutan kota dan penyelenggaraan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM) yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Balikpapan meskipun jumlah koridor SAUM dari tahun 2016 hingga tahun 2020 belum mengalami penambahan yaitu berjumlah 1 koridor yang melayani jalur Pelabuhan Ferry Kariangau – Terminal Batu Ampar. Berkurangnya jumlah angkutan kota dan belum tersedianya SAUM yang belum optimal mengakibatkan rasio angkutan kota terhadap jumlah kendaraan semakin menurun dari 0,33% pada tahun 2016 menjadi 0,12% pada tahun 2020. Untuk jumlah penduduk miskin di Kota Balikpapan Pada tahun 2016 mencapai 17,55 ribu jiwa dengan persentase 2,81%, angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 17,86 ribu jiwa dengan persentase 2,82%. Pada tahun 2018 hingga 2019, jumlah penduduk miskin Kota Balikpapan mengalami penurunan menjadi 15,78 ribu jiwa dengan persentase 2,42%. Namun pada tahun 2020, angka ini kembali mengalami peningkatan menjadi 17,02 ribu jiwa dengan persentase 2,57%.

Dalam Pembangunan sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas masyarakat dari segi sosial, perekonomian dan lingkungan. Selain itu, dukungan sarana dan prasarana juga diwujudkan dalam peran sumber daya air, listrik, serta perumahan dan pemukiman yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Terdapat beberapa isu strategis pada Kota Balikpapan terkait penyediaan kebutuhan dasar sarana dan prasarana, yaitu: Masih terdapat warga kota yang belum memperoleh layanan air bersih yang terbatas kapasitas sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan air baku nya, Masih terdapat masyarakat Kota Balikpapan yang hidup di bawah garis kemiskinan, Masih terdapat permukiman kumuh dan warga yang tidak memiliki rumah serta terjadinya banjir di wilayah Kota Balikpapan karena adanya pembukaan atau pengupasan lahan yang tidak terpantau, Masih adanya aktivitas pembangunan

yang tidak mempertimbangkan DDTLH Kota Balikpapan, Peningkatan layanan pemerintah untuk penyediaan akses ke (air bersih, pengolahan limbah, penghematan air) pada usaha berbasis lahan dan industri serta integrasi pengelolaan sumberdaya air antar sektor, dan kebutuhan peningkatan (sarana hunian, transportasi umum dan pengelolaan sampah) perlu direncanakan dengan cermat dan dilaksanakan dengan hati-hati serta diawasi dengan seksama.

Melihat isu strategis yang sudah dijelaskan adapun upaya yang dapat dilakukan yaitu, untuk memenuhi kebutuhan akses masyarakat akan sumber air minum yang (layak, aman dan berkelanjutan) menjadi tugas terbesar pemerintah dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber air bakunya dapat dilakukan dengan Tren pengurangan luas hutan di Hutan Lindung Sungai Wain dan Hutan Lindung DAS Manggar perlu sangat diperhatikan dan ditangani oleh Pemerintah Kota, Provinsi dan KLHK. Kemudian, penyediaan akses terhadap layanan (sumber air minum, sanitasi layak dan berkelanjutan) sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN seluruh lapisan masyarakat, khususnya rumah tangga yang kurang mampu. Untuk aktivitas pembangunan sarana dan prasarana harus mempertimbangkan DDTLH Kota Balikpapan dengan melihat Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan dan tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.

Selanjutnya, untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi jaringan informasi dan kelembagaan pengelolaan sumberdaya air hal tersebut tidak akan memberikan dampak yang negatif terhadap kemampuan penyediaan jasa lingkungan hidup terkait: energi, siklus hara, biomasa, biodiversitas, iklim, pencegahan bencana hingga pemurnian air. Untuk meningkatkan capaian terkait (sarana hunian, transportasi dan sampah) di wilayah perkotaan sangat berpengaruh terhadap jasa lingkungan, maka setiap upaya percepatan pembangunan harus selalu dilakukan melalui perencanaan yang cermat, pelaksanaan yang hati-hati dan pengawasan yang ketat dari segi lingkungan.

Kemudian, dengan adanya penyediaan kebutuhan dasar sarana dan prasarana maka diharapkan masyarakat, untuk dapat melakukan kegiatannya dalam mengembangkan potensi SDM, penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana tersebut harus tetap memperhatikan kondisi eksisting lingkungan sekitar, serta melihat daya dukung dan daya tampung nya agar tidak adanya kerusakan lingkungan.

c) Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pengendalian Pencemaran.

Permasalahan pengelolaan sampah disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah masih kurangnya kesadaran dan minat masyarakat dalam melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah, pemilahan dan pengolahan sampah

belum mencapai hasil yang diharapkan, Indikasi dari belum berhasilnya pemilahan dan pengolahan sampah adalah masih tingginya volume sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Manggar, belum optimal nya pemilahan sampah di Material Recovery Facility (MRF), serta banyaknya bank sampah yang tidak aktif. Diperkirakan timbunan sampah yang dihasilkan melalui kegiatan permukiman sepanjang daerah aliran sungai sebanyak 411,32 ton/hari. Terdapat 126 bank sampah di Kota Balikpapan yang tersebar di seluruh kecamatan, namun jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi 107 unit berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada tahun 2020. Selain jumlah, sebaran bank sampah juga dirasa kurang merata untuk menjangkau seluruh masyarakat di Kota Balikpapan, bank sampah di Balikpapan Timur sebanyak 39 unit, Balikpapan Utara 15 unit, Balikpapan Selatan 27 unit, Balikpapan Kota 19 unit, Balikpapan Tengah 12 unit, dan Balikpapan Barat 14 unit. Hal lain yang perlu diperhitungkan adalah ledakan jumlah penduduk yang berdampak pada meningkatnya jumlah sampah dan pertumbuhan penduduk di Balikpapan mempengaruhi bertambahnya volume limbah

Secara keseluruhan, pencemaran air di Kota Balikpapan didominasi oleh pencemaran akibat air limbah domestik dan non domestik, serta limpahan air hujan yang membawa kikisan tanah. Selain itu meningkatnya pencemaran air, khususnya di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berlokasi di tengah kota, yaitu DAS Klandasan Besar dan DAS Klandasan Kecil, disebabkan pula oleh semakin padatnya penduduk dan tingginya pertumbuhan kegiatan komersil di sekitarnya.

Salah satu dampak dari belum optimalnya penanganan pengupasan lahan adalah terjadinya perubahan iklim, hal tersebut mengakibatkan munculnya dampak lingkungan seperti terjadinya peningkatan suhu udara, sedimentasi, banjir, tanah longsor dan kebakaran hutan dan lahan di beberapa titik lokasi. Kemudian, pada tahun 2019, jumlah kegiatan yang melakukan pengupasan lahan menurun 60,77% dari jumlah pengupasan lahan pada tahun 2018. Namun, luasan yang dilakukan pengupasan lahan nya seluas 1.943.125 m^2. Tingginya angka pengupasan lahan ini disebabkan oleh pelaku usaha dan masyarakat perseorangan yang tidak mempertimbangkan aspek pembangunan atau aturan yang sesuai. Selanjutnya, masalah lain yang mendapat perhatian publik secara besar, adalah saat terjadinya tumpahan minyak (oil spill) pada tanggal 30 Maret 2019 di teluk Balikpapan. Bencana ini terjadi akibat kebocoran patah nya pipa distribusi minyak mentah bawah laut berdiameter 20 inci yang berlokasi di Terminal Lawe-Lawe ke Terminal Balikpapan milik PT Pertamina RU V Balikpapan. Sebaran tumpahan minyak mentah tersebut berdampak terhadap ekosistem dan biota laut di Teluk Balikpapan

Adapun beberapa isu strategis di Kota Balikpapan terkait pengelolaan sampah, limbah dan pengendalian pencemaran, yaitu: adanya pencemaran laut akibat peristiwa tumpahan minyak dan adanya ancaman terhadap keragaman hayati

laut akibat aktivitas lalu lintas laut, masih tingginya produksi timbunan sampah domestik warga, kebutuhan mendesak untuk memastikan tidak ada pembukaan hutan di wilayah Hutan Lindung dan rehabilitasi lahan kritis di Kota Balikpapan. Beberapa upaya untuk mengakselerasi capaian dalam mewujudkan kualitas lingkungan hidup adalah perlunya konservasi kawasan pesisir dan keterbukaan akses bagi masyarakat umum, jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri), Pengelolaan timbunan sampah yang dapat didaur ulang, dan upaya perlindungan hutan dapat dilakukan bersama Pemerintah Provinsi lewat KPHL DAS Manggar dan Sungai Wain. Kemudian, pengelolaan sampah, limbah dan pengendalian pencemaran perlu ditingkatkan karena isu pengelolaan ini tetap dipandang untuk menjadi perhatian dalam merumuskan kebijakan pembangunan Kota Balikpapan.

d) Mitigasi dan Penanggulangan Bencana

Tahun 2019 menjadi tahun tertinggi angka bencana di Kota Balikpapan, yang paling sering terjadi adalah kebakaran hutan yaitu sebanyak 125 kali. Angka ini melonjak drastis jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya terjadi 70 kali. Tingginya angka bencana kebakaran hutan ini tentu saja mengancam produktivitas lahan di Kota Balikpapan. Jenis bencana lainnya yang juga kerap terjadi adalah kebakaran pemukiman/gedung. Dari data BPBD, kejadian kebakaran pemukiman terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. pada tahun 2015 tercatat sebanyak 39 kali terjadi kebakaran pemukiman, lalu meningkat tahun 2016 menjadi 44 kali. Hingga tahun 2019, kebakaran pemukiman di Kota Balikpapan sebanyak 51 kali.

Berdasarkan dokumen DIKPLHD Kota Balikpapan 2019, Kota Balikpapan memiliki rentang indeks bahaya banjir berkisar 0,23–0,76. Adapun daerah dengan indeks bahaya banjir yang relatif tinggi adalah kawasan yang berada pada wilayah pesisir dan daerah aliran sungai serta tingkat okupansi lahan cukup tinggi yaitu daerah Balikpapan Tengah, Balikpapan Kota, Balikpapan Selatan dan Balikpapan Timur. Kemudian untuk curah hujan yang tinggi akan mengakibatkan tanah tersebut merosot dan terkikis karena erosi, dengan kondisi ini wilayah Balikpapan sangat rawan terhadap terjadinya longsor.

Adapun isu strategis terkait Mitigasi dan Penanggulangan Bencana di Kota Balikpapan, yaitu: Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, dan masih perlunya peningkatan koordinasi dan perencanaan penanganan bencana akibat perubahan iklim terutama di bidang kesehatan. Beberapa upaya untuk pencegahan, penanggulangan, dan pengendalian mitigasi bencana, yaitu dengan memastikan kualitas hidup masyarakat dari beberapa faktor yaitu pada lingkungan hidup, pengendalian tata ruang, rencana dalam pencegahan dan penanggulangan bencana yang mana harus dapat ditingkatkan baik secara kualitas dan kuantitas, serta upaya

lainnya ialah masyarakat mendapatkan pendidikan atau pengetahuan terkait dengan kesiapan masyarakat dalam menghadapi sebuah bencana. Serta, perlu disusun nya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Pengurangan Risiko Bencana (PRB), karena dapat dilihat bahwa kegiatan terkait penanggulangan bencana masih perlu diperhatikan diantaranya upaya-upaya tambahan untuk mengurangi kerugian ekonomi langsung akibat bencana yang menjadi tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Balikpapan.

e) Menyediakan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat

Terdapat peraturan terkait jaminan sosial bagi masyarakat, yaitu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kemudian, terdapat peraturan terkait pemberdayaan pada perempuan dan perlindungan anak yaitu Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Pada Peraturan Menteri yang telah disebutkan berisikan pelayanan terpadu untuk perempuan dan juga terhadap anak korban kekerasan seperti dapat memberikan layanan penanganan pengaduan atau laporan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial bagi korban kekerasan pada perempuan dan anak. Kemudian berdasarkan data yang ada pada pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melakukan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai bantuan sosial di tahun 2018 mengalami kenaikan yaitu sekitar 120,65%, kemudian pada tahun 2020 sekitar 75,33%, lalu pada jumlah lembaga atau organisasi sosial mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2017 terdapat 32 lembaga, pada tahun 2018 menjadi 37 lembaga tetapi pada tahun 2020 tidak mengalami peningkatan yang mana hanya terdapat 8 yayasan sosial. Sehingga, dengan adanya aturan serta data yang ada tersebut, maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan agar masyarakat mendapatkan jaminan sosial atas hidupnya yang aman, nyaman dan layak.

f) Peningkatan Ekonomi Bagi SDA dan SDM di Kota Balikpapan

Kota Balikpapan masih belum dapat memaksimalkan pengelolaan terhadap sumber daya alam tidak terbarukan, seperti minyak bumi dan juga gas alam. Dimana masih tingginya kebutuhan masyarakat akan sumber energi tidak terbarukan dan masih minimnya penggunaan sumber daya terbarukan yang dapat di kelola atau di gunakan oleh masyarakat. Hal ini diketahui dari tingginya angka distribusi PDRB sektor industri pengelolaan dengan presentasi 47,28% pada tahun 2020. Maka hal ini dapat menjadi isu strategis baru yang muncul akibat belum maksimal nya pengelolaan sumber daya terbarukan sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pengelolaan sumber daya terbarukan ini dapat menjadi transformasi atau perubahan sektor ekonomi dimana sumber daya alternatif ini dapat menjadi opsi pemenuhan

kebutuhan masyarakat serta dapat menimbulkan lapangan pekerjaan baru yang layak yang saat ini masih sangat diperlukan untuk sebagian besar masyarakat Kota Balikpapan. Upaya untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan (seperti Tenaga Angin, Surya, dan Biogas) secara langsung tidak akan mengurangi kemampuan ekosistem untuk menyediakan jasa lingkungan hidup penyedia air, energi dan juga pembentukan tanah.

Isu strategis selanjutnya dalam bidang ekonomi yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang pertama yaitu perlunya optimalisasi untuk menggerakkan ekonomi kreatif bagi pelaku usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) yang ada di kota Balikpapan. Dimana masih diperlukannya pembinaan peningkatan kapasitas pelaku usaha dan kualitas produk UMKM serta perlunya akses pasar bagi pelaku UMKM agar dapat memasarkan produk secara lebih luas dan merata. Ekonomi Kreatif menjadi salah satu bagian dalam perekonomian Kota Balikpapan yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi Kota Balikpapan serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru yang layak bagi masyarakat. Selain itu, peningkatan terhadap pengembangan sektor pariwisata Kota Balikpapan juga menjadi potensi besar dalam memberikan kontribusi perekonomian makro dan kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan. Dengan Adanya Pelaku UMKM dan juga industri pariwisata di Kota Balikpapan diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru yang layak untuk sebagian masyarakat yang masih belum mendapatkan pekerjaan ataupun yang mengalami pemutusan hubungan pekerjaan yang diakibatkan karena terpuruk nya sektor ekonomi internal pada saat pandemic Covid-19.Maka dari isu-isu strategis dalam bidang ekonomi ini perlu adanya peningkatan kerja sama antar pihak dalam pemenuhan kelengkapan data yang nantinya dipergunakan untuk mengukur hasil capaian pembangunan daerah.

Tabel 4.5 Keterkaitan KHLS RPJMD Kota Balikpapan dan RPJMD Kota Balikpapan

Indikator TPB		Target Perpres 59/2017	Isu Strategis KLHS	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis Pembangunan Daerah	Misi Pembangunan Daerah	Tujuan Pembangunan Daerah	Strategi Pembangunan Daerah	Program	Indikator Program	OPD Pengampu
No. Indikator	Indikator										
3.2.2*	AngkaKematianNeonatal(AKN)per1000kelahiranhidup.	Menurun	Perlunya peningkatan SDM dan Fasilitas bidang Kesehatan, peningkatan jumlah peserta BPJS Mandiri dan Pekerja	- Belum Optimalnya Upaya Pengurangan Angka Kematian Bayi - Belum Meratanya Akses terhadap Pengetahuan dan Informasi terkait Penanganan Bayi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Meningkatkan tingkat derajat kesehatan masyarakat melalui penguatan sistem kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Bayi	Dinas Kesehatan
3.3.2.(a)	InsidenTuberkulosis(ITB)per 100.000penduduk.	Menurun menjadi 245	Perlunya peningkatan SDM dan Fasilitas bidang Kesehatan, peningkatan jumlah peserta BPJS Mandiri dan Pekerja	- Masih Tingginya Angka Penyakit Menular - Belum Optimalnya Upaya Penanganan Penyakit Menular	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Meningkatkan tingkat derajat kesehatan masyarakat melalui penguatan sistem kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Penurunan Kematian Akibat Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan
3.3.3*	KejadianMalaria per 1000 orang.	Menurun	Perlunya peningkatan SDM dan Fasilitas bidang Kesehatan, peningkatan jumlah peserta BPJS Mandiri dan Pekerja	- Masih Tingginya Angka Penyakit Menular - Belum Optimalnya Upaya Penanganan Penyakit Menular	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Meningkatkan tingkat derajat kesehatan masyarakat melalui penguatan sistem kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Penurunan Kematian Akibat Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan
3.a.1*	Persentase merokok pada pendudukumur≥15tahun.	Menurun	Perlunya peningkatan SDM dan Fasilitas	Masih Rendahnya Penerapan Pola	Peningkatan Kualitas	Mewujudkan sumber daya	Meningkatkan Sumber	Meningkatkan tingkat	Pemberdayaan Masyarakat di	Persentase UKBM Aktif	Dinas Kesehatan

Indikator TPB		Target Perpres 59/2017	Isu Strategis KLHS	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis Pembangunan Daerah	Misi Pembangunan Daerah	Tujuan Pembangunan Daerah	Strategi Pembangunan Daerah	Program	Indikator Program	OPD Pengampu
No. Indikator	Indikator										
			bidang Kesehatan, peningkatan jumlah peserta BPJS Mandiri dan Pekerja	Hidup Sehat di Masyarakat	Sumber Daya Manusia	manusia yang berkualitas tinggi	Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	derajat kesehatan masyarakat melalui penguatan sistem kesehatan	Bidang Kesehatan (1.02.05)		
4.1.1.(d)	AngkaPartisipasiKasar(APK)SD/MI/sederajat.	Meningkat menjadi 114,09%	Masih terdapat anak putus sekolah, nilai IPM yang belum optimal dan perlunya peningkatan sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran	- Cakupan ketersediaan sekolah SD/MI/Sederajat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Meningkatkan Kemudahan Akses Layanan Pendidikan Seluruh Masyarakat	Pengelolaan Pendidikan (1.01.02)	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP dan PAUD)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.1.1.(e)	AngkaPartisipasiKasar(APK) SMP/MTs/sederajat.	Meningkat menjadi 106,94%	Masih terdapat anak putus sekolah, nilai IPM yang belum optimal dan perlunya peningkatan sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran	- Cakupan ketersediaan sekolah SMP/MTs/Sederajat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Meningkatkan Kemudahan Akses Layanan Pendidikan Seluruh Masyarakat	Pengelolaan Pendidikan (1.01.02)	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP dan PAUD)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadapanakperempuan.	Menurun menjadi kurang dari 20,48%	Belum optimalnya penyelesaian permasalahan dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	- Belum maksimalnya penyelesaian penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Meningkatkan Pembangunan yang Berkeadilan untuk Semua (perempuan, pemuda,	Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO Per 100.000 Penduduk Perempuan	DPPPAKB

Indikator TPB		Target Perpres 59/2017	Isu Strategis KLHS	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis Pembangunan Daerah	Misi Pembangunan Daerah	Tujuan Pembangunan Daerah	Strategi Pembangunan Daerah	Program	Indikator Program	OPD Pengampu
No. Indikator	Indikator										
								lansia, anak, difabel)			
5.2.2*	Proporsiperempuandewasadananakperempuan(umur15-64tahun)mengalamikekerasanseksualolehoranglainselainpasangandalam 12bulanterakhir.	Menurun	Belum optimalnya penyelesaian permasalahan dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	- Belum maksimalnya penyelesaian penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Meningkatkan Pembangunan yang Berkeadilan untuk Semua (perempuan, pemuda, lansia, anak, difabel)	Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO Per 100.000 Penduduk Perempuan	DPPPAKB
5.6.1.(a)	UnmetneedKB(KebutuhanKeluargaBerencana/KByang tidakterpenuhi).	Menurun menjadi 9,9%	Belum optimalnya penyelesaian permasalahan dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	- Penolakan pemakaian alat KB yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama - Adanya biaya tindakan layanan kesehatan yang dibebankan kepada Peserta KB bukan peserta BPJS Kesehatan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Meningkatkan Pembangunan yang Berkeadilan untuk Semua (perempuan, pemuda, lansia, anak, difabel)	Pembinaan Keluarga Berencana	Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	DPPPAKB
6.1.1.(a)	Persentaserumahtangga yang memilikiakses terhadaplayanansumberairminumlayak.	Meningkat menjadi 100%	Masih terdapat warga kota yang belum memperoleh layanan air bersih Masih terbatasnya kapasitas sarana dan prasarana	Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang mengindikasikan kawasan kumuh	Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas	Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai	Meningkatkan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan	Meningkatkan Infrastruktur Dasar Yang Memadai	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air	Dinas Pekerjaan Umum

Indikator TPB		Target Perpres 59/2017	Isu Strategis KLHS	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis Pembangunan Daerah	Misi Pembangunan Daerah	Tujuan Pembangunan Daerah	Strategi Pembangunan Daerah	Program	Indikator Program	OPD Pengampu
No. Indikator	Indikator										
			Pemenuhan kebutuhan air baku	(jalan dan drainase lingkungan, air minum, air limbah, keteraturan bangunan, dll) Terbatasnya ketersediaan air baku dikarenakan Kurangnya sumber air dan Permintaan air bersih meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk, investasi usaha, dan kegiatan yang membutuhkan air bersih						Minum Perpipaan dan Non Perpipaan	
6.1.1.(c)	Proporsipopulasiyangmemilikiakseslayanansumber air minum aman danberkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	Masih terdapat warga kota yang belum memperoleh layanan air bersih Masih terbatasnya kapasitas sarana dan prasarana Pemenuhan kebutuhan air baku	Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang mengindikasikan kawasan kumuh (jalan dan drainase lingkungan, air minum, air	Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas	Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai	Meningkatkan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan	Meningkatkan Infrastruktur Dasar Yang Memadai	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan	Dinas Pekerjaan Umum

Indikator TPB		Target Perpres 59/2017	Isu Strategis KLHS	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis Pembangunan Daerah	Misi Pembangunan Daerah	Tujuan Pembangunan Daerah	Strategi Pembangunan Daerah	Program	Indikator Program	OPD Pengampu
No. Indikator	Indikator										
				limbah, keteraturan bangunan, dll) Terbatasnya ketersediaan air baku dikarenakan Kurangnya sumber air dan Permintaan air bersih meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk, investasi usaha, dan kegiatan yang membutuhkan air bersih							
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Meningkat	Masih diperlukannya peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha dan Kualitas Produk serta perlunya peningkatan akses pasar bagi pelaku usaha	- Masih Rendahnya Kualitas Produk dari Industri Kecil dan Menengah - Belum Optimalnya Pengembangan Industri	Peningkatan Sektor Ekonomi yang Kreatif	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif	Meningkatkan Pemerataan Ekonomi Lokal dan Pendapatan Masyarakat Melalui Pembangunan Ekonomi Inklusif	Meningkatkan Produk Unggulan Daerah	Perencanaan dan Pembangunan Industri (3.31.02)	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi. UMKM dan Perindustrian
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan	Meningk	Masih terdapat permukiman kumuh	Masih adanya kawasan	Penyediaan Infrastruktu	Menyediakan Infrastruktur	Meningkatkan Kinerja	Meningkatkan kualitas	Kawasan Permukiman	Luasan Kawasan	Dinas Perumahan

Indikator TPB		Target Perpres 59/2017	Isu Strategis KLHS	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis Pembangunan Daerah	Misi Pembangunan Daerah	Tujuan Pembangunan Daerah	Strategi Pembangunan Daerah	Program	Indikator Program	OPD Pengampu
No. Indikator	Indikator										
	terjangkau.	at 3,7 juta rumah tangga	dan warga yang tidak memiliki rumah Masih terjadinya banjir di wilayah Kota Balikpapan Adanya pembukaan/pengupasan lahan yang tidak terpantau	perumahan kumuh dan permukiman kumuh	r yang Berkualitas	Kota yang Memadai.	Layanan Infrastruktur Perkotaan	kawasan permukiman dan perumahan	(1.04.03)	Kumuh	dan Permukiman
11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Meningkat menjadi 32%	Masih terdapat permukiman kumuh dan warga yang tidak memiliki rumah Masih terjadinya banjir di wilayah Kota Balikpapan Adanya pembukaan/pengupasan lahan yang tidak terpantau	Belum optimalnya angkutan umum dan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM)	Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas	Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai.	Meningkatkan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan	Meningkatkan Infrastruktur Dasar Yang Memadai	Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (2.15.02)	Persentase sarana dan prasarana jalan layak fungsi.	Dinas Perhubungan
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	5,5 juta ha (skala nasional)	Masihadanya aktivitas pembangunan yang tidakmempertimbangkan DDTLH Kota Balikpapan	Tercemarnya air permukaan	Mewujudkan Kota yang Aman, Tertib, dan Ramah Lingkungan	Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni yang Berwawasan Lingkungan	Mewujudkan Lingkungan yang Inklusif dan Berkelanjutan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup (2.11.03)	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang Dilaksanakan	Dinas Lingkungan Hidup

Indikator TPB		Target Perpres 59/2017	Isu Strategis KLHS	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis Pembangunan Daerah	Misi Pembangunan Daerah	Tujuan Pembangunan Daerah	Strategi Pembangunan Daerah	Program	Indikator Program	OPD Pengampu
No. Indikator	Indikator										
15.9.1. (a)	Dokumen rencana pemanfaatanKeanekaragaman hayati.	Meningkat	Masihadanya aktivitas pembangunan yang tidakmempertimbangkan DDTLH Kota Balikpapan	Pengupasan lahan yang tidak terkendali	Mewujudkan Kota yang Aman, Tertib, dan Ramah Lingkungan	Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni yang Berwawasan Lingkungan	Mewujudkan Lingkungan yang Inklusif dan Berkelanjutan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (2.11.04)	Persentase Pengelolaan KEHATI	Dinas Lingkungan Hidup
17.1.1. (a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Di atas 12%	Masih perlunya peningkatan kerjasama antar pihak dalamMasih perlunya peningkatan kerjasama antar pihak dalamPemenuhan kelengkapan data untuk pengukuran capaian pembangunan daerah	Belum optimalnya pendapatan daerah	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, dan Profesional	Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Profesionalitas dan Transparasi Birokrasi	Intensifikasi potensi penerimaan pendapatan asli daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah (5.02.04)	Cakupan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang Bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
17.1.2*	Proporsi Anggaran Domestik yang Didanai oleh Pajak Domestik	Meningkat	Masih perlunya peningkatan kerjasama antar pihak dalamMasih perlunya peningkatan kerjasama antar pihak dalamPemenuhan kelengkapan data untuk pengukuran capaian pembangunan daerah	Belum optimalnya pendapatan daerah	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, dan Profesional	Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Profesionalitas dan Transparasi Birokrasi	Intensifikasi potensi penerimaan pendapatan asli daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah (5.02.04)	Cakupan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang Bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
17.18.1. (d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Meningkat	Masih perlunya peningkatan kerjasama antar pihak dalamMasih perlunya	Belum optimalnya pengelolaan data statistik sektoral	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan yang	Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	Meningkatkan Profesionalitas dan	Menerapkan pelayanan publik yang cepat,	Penyelenggaraan Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Indikator TPB		Target Perpres 59/2017	Isu Strategis KLHS	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis Pembangunan Daerah	Misi Pembangunan Daerah	Tujuan Pembangunan Daerah	Strategi Pembangunan Daerah	Program	Indikator Program	OPD Pengampu
No. Indikator	Indikator										
			peningkatan kerjasama antar pihak dalamPemenuhan kelengkapan data untuk pengukuran capaian pembangunan daerah		Bersih, Kapabel, dan Profesional	yang Baik	Transparasi Birokrasi	tanggap, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat secara terintegrasi dan terpadu	Sektoral (2.20.02)	Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	Penelitian dan Pengembangan

Sumber : Bappedalitbang, Diolah 2021

4.3 Perumusan Isu Strategis

Berdasarkan hasil telaah capaian kinerja RPJMD tahun lalu, prediksi permasalahan yang akan data, isu global, isu nasional, isu regional, diidentifikasi terdapat 6 isu strategis jangka menengah Kota Balikpapan. Isu-isu tersebut pada beberapa hal saling berkaitan atau mempengaruhi satu dengan lainnya. Karena itu upaya-upaya penanganan isu tersebut, akan membutuhkan koordinasi dan kolaborasi.

Gambar 4.3 Isu Strategis Kota Balikpapan

Sumber : Bappedalitbang, Diolah 2021

1. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, dan Profesional

Muara dari semua permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah tata kelola pemerintahannya. Tata kelola ini merupakan bagian yang fundamental dalam menjawab berbagai tantangan tersebut. Dari tata kelola yang baik maka akan dapat dilihat bagaimana pemerintah merespon maupun menangani tuntutan masyarakat. Dalam road map reformasi birokrasi secara jelas pemerintah sudah merancang untuk menyiapkan pemerintahan kelas dunia, birokrasi yang adaptif serta responsif terhadap perubahan dinamika lingkungan yang bergerak begitu cepat. Beberapa catatan terkait kualitas, kecepatan, dan ketepatan layanan masih perlu ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi diperlukan guna meneguhkan bahwa Kota Balikpapan sebagai Kota Cerdas (*Smart City*). Terkait tata kelola, kinerja Kota Balikpapan dapat dilihat dari pencapaian yang tertuang dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja pemerintah Kota Balikpapan melalui Laporan Instansi Pemerintah (LKIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Opini BPK juga menjadi salah satu indikator tingkat ketaatan terhadap pengelolaan keuangan dan asset sesuai standar yang berlaku.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat erat kaitannya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Janji Negara terkait pendidikan yang dituangkan dalam Amanah Undang-undang Dasar 1945, “pendidikan itu Hak segenap Anak Bangsa dan Sekaligus Menjadi Kewajiban Negara (Pemerintah) menjadi amanah penting bagi negara untuk menjamin hak masyarakat untuk mendapat pendidikan

yang baik. Berdasarkan kewenangannya, Kota Balikpapan menjalankan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai pendidikan menengah pertama.

Pendidikan menjadi isu penting yang ada di Kota Balikpapan karena ada beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu karena belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar yang memadai. Berdasarkan data, jumlah SD yang ada di Kota Balikpapan saat ini sebanyak 137 SD. Namun, kondisi ini masih terdapat kekurangan Ruang Kelas Baru (RKB) sebanyak 64 ruang, dan kekurangan Unit Sekolah Baru (USB) sebanyak 16 unit. Kondisi ini belum mampu menampung semua siswa berdasarkan kriteria ideal. Sedangkan pada jenjang pendidikan SMP sebanyak 25 SMP. Sama halnya dengan pendidikan SD, masih terdapat kekurangan Ruang Kelas Baru (RKB) sebanyak 70 ruang, dan kekurangan Unit Sekolah Baru (USB) sebanyak 6 unit. Kondisi ini belum mampu menampung semua siswa berdasarkan kriteria ideal. Selain itu, permasalahan lain yang muncul dan menjadi isu dalam bidang pendidikan yaitu belum optimalnya pemenuhan kualitas dan kuantitas guru yang sesuai dengan standar/kebutuhan dan belum optimalnya IPM dari indikator pendidikan. Kualitas pendidikan sebagai arti penting dalam membangun kualitas Sumber Daya manusia di Indonesia dan Kota Balikpapan pada khususnya harus dilaksanakan secara komprehensif dan kolaborasi antar pihak sehingga permasalahan pendidikan tidak berdiri sendiri. Pemenuhan akan pendidikan diharapkan dapat merubah kehidupan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Dalam konteks kesehatan masyarakat, pemenuhan akan derajat kesehatan bagi masyarakat merupakan bagian utama dalam membangun masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan secara komprehensif dengan terminologi kesehatan yang holistik, tidak hanya sehat secara fisik tetapi mental dan rohani juga harus sehat. Pendekatan kesehatan ini dilakukan dengan cara preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Peningkatan derajat kesehatan di Kota Balikpapan menjadi penting, berangkat dari kesadaran bahwa Kesehatan Ibu dan Bayi masih ditemukan kematian ibu yang terekam dalam data bahwa pada tahun 2019 Angka Kematian Ibu (AKI) yang terjadi di Kota Balikpapan sebanyak 64/100.000 KH. Walaupun sudah ada penurunan pada tahun 2018 tetapi angka ini belum optimal untuk mencapai target akhir RPJMD. Selain itu, kematian bayi juga menjadi sorotan serius karena capaian yang ada saat ini masih di bawah target yang ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2019 sebesar 7/1.000 KH, capaian ini masih jauh dari target akhir yang ditetapkan yaitu 1/1.000 KH. Layanan kesehatan yang ditandai dengan tersedianya fasilitas kesehatan dan ketersediaan obat menjadi penting di Kota Balikpapan. Belum memadainya alat kesehatan di fasilitas kesehatan dapat dilihat dari Persentase ASPAK (Aplikasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan) yang masih dibawah 60% di setiap puskesmas. Beberapa permasalahan yang mengerucut lainnya adalah terkait penguatan akan Sumber Daya Manusia bidang kesehatan serta Promosi Kesehatan Masyarakat yang harus lebih dioptimalkan guna membangun pembangunan kesehatan yang holistik.

3. Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas

Bertumbuhnya sebuah kota membawa konsekuensi logis akan kebutuhan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur yang diharapkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemindahan Ibukota Negara memberikan sebuah tantangan bagi Kota Balikpapan, selain sebagai wilayah yang sudah tumbuh dan memiliki infrastruktur yang lengkap di kawasan sekitar IKN, Kota Balikpapan juga harus mampu menjawab persoalan kebutuhan infrastruktur tersebut meliputi penyediaan infrastruktur jalan, sumber daya air, transportasi, energi listrik, dan jaringan komunikasi. Penyediaan infrastruktur juga harus selaras dengan konsep yang menyeluruh dan terintegrasi antara infrastruktur Sumber Daya Air dan jalan dengan pembangunan kereta api dan bandara, serta pembangunan energi listrik dan jaringan komunikasi. Kota Balikpapan saat ini menghadapi persoalan belum memiliki master plan seperti master plan terkait perencanaan jalan lingkungan dan drainase, beberapa hal serius yang harus menjadi perhatian, yaitu: Indeks Aksesibilitas Kawasan Perkotaan masih belum sesuai, tahun 2019 realisasinya sebesar 1,451 sedangkan target akhirnya adalah 1,49, Cakupan layanan air minum pada tahun 2019 realisasinya sebesar 79,6%, dan Jumlah titik banjir yang cenderung meningkat akibat kegiatan pembukaan lahan. Mengikuti perkembangan IKN yang akan dimulai dalam beberapa tahun kedepan maka Kota Balikpapan harus dapat menyelaraskan penyediaan infrastruktur secara komprehensif dimulai dari penyiapan rencana induk (master plan) infrastruktur yang terintegrasi mencakup infrastruktur jalan, sumber daya air, transportasi, energi listrik, dan jaringan komunikasi.

4. Mewujudkan Kota yang Aman, Tertib, dan Ramah Lingkungan

Pembangunan nasional seyogyanya dibangun secara terencana, komprehenshif, terpadu, terarah, bertahap, dan berkelanjutan. Kunci dari berjalannya sistem tersebut dapat dilihat bagaimana sebuah wilayah dikembangkan dengan mengedepankan tata lingkungan yang dinamis serta tetap memelihara kelestarian lingkungan hidup. Penataan ruang diharapkan dapat memadupadankan keinginan dari masyarakat yang terus bertumbuh dengan ketersediaan lahan yang terbatas, kebutuhan lahan tidak serta merta mengorbankan lingkungan. Kebutuhan yang dinamis saat ini terjadi juga di Kota Balikpapan, pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur mengharuskan Kota Balikpapan untuk bersiap menjawab perubahan tersebut, apalagi Kota Balikpapan merupakan gerbang ke Kalimantan Timur dan beberapa wilayah lain di sekitarnya.

Selain itu, penataan ruang ini menjadi penting karena masih ada permasalahan yang dihadapi oleh Kota Balikpapan terkait tata ruang dan yang paling krusial adalah belum adanya payung hukum (Perda) tata ruang. Hal ini harus menjadi perhatian karena diperlukannya kepastian hukum. Penyusunan tiga Perda tata ruang saat ini sudah sampai 86,3%, dalam perencanaan diharapkan pada tahun 2020 dan 2021 penyusunan perda Revisi RTRW dan Perda RDTR dapat diselesaikan. Kondisi lainnya terkait penataan ruang adalah belum sinkronnya antara perencanaan

Tata Ruang dan pelaksanaannya, di lapangan masih ditemukan bahwa adanya aktivitas pembangunan yang tidak sesuai peruntukannya. Seperti yang banyak ditemui fungsi dominan kawasan komersil/kawasan perdagangan dan jasa/pertokoan tetapi di RTRW sebelumnya masih peruntukannya kawasan permukiman, tentu hal ini akan menghambat pembangunan di Kota Balikpapan. Alih fungsi lahan yang tidak berpijak pada pembangunan berkelanjutan akan menyebabkan rusaknya kondisi lingkungan sehingga dibutuhkannya langkah akseleratif untuk menjawab tantangan tersebut di Kota Balikpapan agar dapat mewujudkan penataan ruang yang adil dan tepat, agar dapat mewujudkan kenyamanan dan keharmonisan dalam masyarakat.

Lingkungan yang komprehensif bukan sebagai pilihan dalam membangun kawasan perkotaan tetapi sebuah kewajiban yang tidak dapat diabaikan. Perkembangan kota yang baik tentu disertai lingkungan yang sehat, nyaman dan bertumbuh dalam keselarasan. Dalam banyak contoh yang terjadi malah sebaliknya, kota yang tumbuh mengesampingkan pengelolaan lingkungan yang baik. Isu ini menjadi bagian penting untuk diangkat karena berangkat dari permasalahan yang terjadi, tidak terkecuali di Kota Balikpapan. Persoalan krusial yang dihadapi Kota Balikpapan adalah air baku mengalami defisit sebanyak 464 liter/detik. Bersumber hanya dari Waduk Manggar dengan kapasitas hanya 900 liter/detik dan ditambah dengan aliran sungai aji raden masih belum mencukupi untuk pemenuhan air baku. Persoalan ini tentu tidak berdiri sendiri, banyak faktor yang menjadi pemicu dari fenomena ini, jika dilihat ada beberapa hal yang dapat diidentifikasi bahwa pembangunan yang ada saat ini masih belum optimal mengacu dalam pengelolaan lingkungan yang baik. Banjir yang terjadi di Kota Balikpapan juga menjadi isyarat terkait pengelolaan lingkungan di kota ini membutuhkan perhatian serius, beberapa hal yang dapat dilihat terkait banjir ini, yaitu Pengupasan lahan yang tidak terkendali, curah hujan yang tinggi dan berkurangnya kapasitas drainase Kesadaran masyarakat dan kebijakan pemerintah yang terintegrasi merupakan jawaban untuk menjawab tantangan ini bagi Kota Balikpapan, kebijakan terkait perlindungan, pengelolaan, kebijakan lingkungan harus segera dirumuskan dan diimplementasikan agar degradasi wilayah yang terjadi segera berhenti.

5. Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Merata

Pertumbuhan ekonomi dijadikan sebagai indikator untuk melihat peningkatan kemampuan perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa, maka pertumbuhan ekonomi menjadi isu yang tidak bisa dilepaskan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan merata.Berlandaskan dasar pemikiran tersebut maka penguatan terhadap sektor ekonomi di Kota Balikpapan dibutuhkan pemikiran yang serius. Pandemi Covid-19 saat ini perlu disiasati untuk dapat menjaga iklim ekonomi yang mampu beradaptasi dengan kondisi tersebut. Kota Balikpapan mencatat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sebesar 4,78%. Perlambatan ekonomi tentu terjadi saat ini, sebagaimana diketahui akibat pandemi Covid-19, perlambatan terjadi pada beberapa lapangan usaha lainnya seperti konstruksi,

perdagangan serta akomodasi, makanan dan minum. Jika melihat pertumbuhan ekonomi dari sektor perdagangan, permasalahan yang dihadapi di Kota Balikpapan salah satunya adalah kinerja ekspor yang masih perlu ditingkatkan. Merujuk data, pada tahun 2015 nilai ekspor sebesar 1.513.326.496,08 USD, sedangkan di tahun 2019 sebesar 3.103.163.031,62 USD. Terjadi perlambatan dalam kinerja ekspor, khususnya pada tahun 2017-2019 pertumbuhannya cenderung melambat dari 13% di tahun 2017 menjadi 11% di tahun 2018 dan 12% di tahun 2019. Selain itu, penguatan UMKM sebagai pilar ekonomi masyarakat diharapkanmampu juga digerakkan sehingga tidak hanya terkait pertumbuhan ekonomi tetapi menjaga agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi di Kota Balikpapan.

Pembangunan ekonomi yang inkusif dan merata harapanya memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya menjadi spirit untuk menjawab tantangan terkait permasalahan kemiskinan masyarakat perkotaan. Kemiskinan sebagai isu global menjadi perhatian masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Perhatian serius tersebut tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Permasalahan terkait kemiskinan ini juga dirasakan oleh Kota Balikpapan, jika merujuk data dari Dinas Sosial maka jumlah penduduk miskinnya sebanyak 46.660 jiwa atau 6,15%.

Penanggulangan kemiskinan yang ada di Kota Balikpapan saat ini masih mengalami beberapa kendala, diantaranya masih ditemukannya ketidaksinkronan data kemiskinan antar-OPD, permasalahan data ini berimbas terhadap ketepatan penanganan dan penanggulangan kemiskinan yang ada di Kota Balikpapan, dimana perlunya memilah data PPKS terkait dengan kebutuhannya masing-masing untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. Pemilahan data menjadi penting karena nantinya dapat berfungsi untuk menentukan skala prioritas masyarakat yang harus didahulukan karena memang kondisinya sudah mendesak untuk mendapatkan pertolongan.

6. Peningkatan Sektor Ekonomi yang Kreatif

Sektor ekonomi kreatif dan pariwisata menjadi hal yang serius ditingkatkan oleh Pemerintahan Kota Balikpapan. Melalui Peraturan Daerah Kota Balikpapan No 7 Tahun 2016, bahwa rencana induk pembangunan kepariwisataan Kota Balikpapan yang selanjutnya disebut Rippda Kota adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan terhitung mulai tahun 2016 sampai dengan 2026. Selain itu, untuk mencapai visi pembangunan kepariwisataan daerah yaitu “Terwujudnya Daerah sebagai Tujuan Pariwisata Internasional dengan mengedepankan ekowisata, ekokultural, *MICE*, dan wisata transit bagi kesejahteraan masyarakat”. MICE merupakan salah satu industri bergerak bagi pengembangan destinasi pariwisata yang berdaya saing untuk memberikan dampak dalam meningkatkan pendapatan, memperluas lapangan dan kesempatan kerja serta mendorong investasi. MICE melibatkan berbagai sektor untuk mendukungnya seperti transportasi, perjalanan, rekreasi, akomodasi, makanan dan minuman, tempat penyelenggarakan acara,

teknologi informasi, perdagangan, keuangan. Oleh karena itu, peningkatan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata menjadi salah satu isu strategis yang terus ditingkatkan dan menjadi salah satu prioritas daerah.Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah yang tidak terlepas dari perputaran roda ekonomi. Dalam hal meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kota Balikpapan akan terus mendorong sektor perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, investasi, dan ketahanan pangan daerah untuk tumbuh cepat dan kuat demi menopang ekonomi Kota Balikpapan.

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Balikpapan. Pernyataan visi Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 Kota Balikpapan merupakan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah dengan Tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2016 adalah:

"Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman"

Pernyataan visi Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 memiliki makna sebagai berikut:

Kota Balikpapan sebagai Kota Terkemuka dapat diartikan bahwa dalam lima tahun ke depan, Kota Balikpapan diharapkan berkembang menjadi kota yang Unggul di Bidang Industri, Perdagangan, Jasa, Pariwisata, Pendidikan dan Budaya baik dalam Skala Regional, Nasional maupun Global dengan ditunjang oleh fasilitas penunjang perkotaan yang memadai. Kondisi kota juga semakin berkembang dengan keberadaan beragam infrastruktur moda perhubungan (darat, laut, dan udara). Rencana pengembangan pusat perekonomian baru dalam kawasan *Coastal Area*, pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kariangau sebagai pusat industri dan investasi daerah, pengembangan objek wisata dan ekonomi kreatif masyarakat, pengembangan pusat pendidikan teknologi se-Kalimantan dan pengembangan infrastruktur strategis lainnya, ditunjang dengan posisi strategis sebagai pintu gerbang utama Kalimantan Timur dan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru diharapkan secara langsung berdampak pada perkembangan perekonomian Kota Balikpapan bahkan Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagai Kota yang Nyaman Dihuni, Kota Balikpapan akan terus memperbaiki kuantitas dan kualitas infrastruktur perkotaan yang memadai serta berwawasan lingkungan agar Kota Balikpapan semakin nyaman dijadikan sebagai tempat tinggal dan tempat beraktifitas bagi warganya.

Sedangkan Modern dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman adalah memiliki arti kota yang berperadaban tinggi, nyaman dihuni dengan spiritualitas yang mewarnai seluruh aktivitas warga kota. Kota yang masyarakatnya berperadaban maju, dengan tingkat kesejahteraan dan pendidikan yang umumnya tinggi serta hidup harmonis dalam kondisi masyarakat yang majemuk, yang didukung kepemerintahan yang baik, dan menjadikan iman sesuai keyakinan masing-masing agama sebagai landasan dalam seluruh gerak pembangunan.

5.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi dalam dokumen RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal yang mempengaruhi, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

maka ditetapkan Misi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah:

Gambar 5.1 Misi RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026

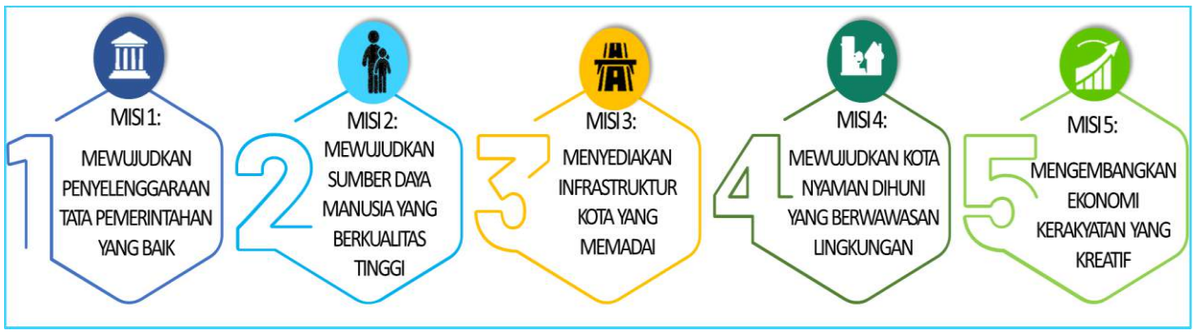

Sumber: Bappedalitbang, diolah 2021

1. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik;

   Pada hakikatnya pemerintahan yang baik mencakup beberapa prinsip utama yakni: partisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, responsivitas, berorientasi pada kepentingan masyarakat, kesempatan yang sama, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas dan visi yang strategis.

   Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik memerlukan berbagai upaya dari seluruh pemangku kepentingan khususnya sektor pemerintah itu sendiri. Dalam konteks ini tidak hanya pemerintah, namun meliputi tiga domain yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.

   Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah daerah, peningkatan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM.

   Mewujudkan daerah yang kondusif, aman, tertib dan tentram dengan tetap memprioritaskan perbaikan yang signifikan dalam sistem kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah dan berjalannya reformasi birokrasi;

2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi;

Pembangunan diarahkan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, dimulai sejak individu berada pada usia dini sampai dengan usia produktif. Pembangunan pendidikan yang berkualitas dan merata perlu diupayakan guna melahirkan dan menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mandiri, berdaya saing dan mengembangan ekonomi lokal melalui kewirausahaan.

3. Menyediakan infrastruktur kota yang memadai;

   Infrastruktur adalah kelengkapan dasar fisik kota. Infrastruktur perkotaan meliputi, antara lain, sistem drainase atau pengendalian banjir, air bersih atau air minum, persampahan, sanitasi atau limbah, jaringan jalan dan transportasi umum, listrik, gas, dan telekomunikasi. Pembangunan infrastruktur perkotaan penting bagi masyarakat luas, kondisi kuantitas dan kualitas infrastruktur amat diperlukan untuk mendukung aktivitas warga sehari-hari dan karenanya sangat penting bagi ekonomi perkotaan.

4. Mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan;

   Nyaman dihuni adalah kondisi lingkungan dan suasana kota yang nyaman menandakan kota ini dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai serta berwawasan lingkungan.

   Mewujudkan kota yang nyaman dihuni dan berwawasan lingkungan dengan memantapkan penyediaan berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik, sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik, fasilitas ibadah, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan) yang memadai, berkualitas dan berkelanjutan yang antisipatif terhadap perubahan iklim dan bencana (*green city*) dengan mengedepankan pengolahan sampah terpadu (*zero waste*) serta ketersediaan Ruang Terbuka Hijau minimal 30% dari luas kota, serta meningkatkan partisipasi masyarakat (komunitas hijau).

5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

   Pengembangan ekonomi kerakyatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas pembangunan khususnya di bidang ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu mengolah sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan guna meningkatkan pandapatan dan kesejahteraan.

   Ekonomi kreatif adalah sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia yang diperlukan untuk mencapai target pembangunan jangka panjang. Industri kreatif ini dapat menjadi pilar utama dalam pembentukan ekonomi kreatif dan ekonomi kreatif ini sangatlah penting bagi Indonesia karena diyakini ekonomi kreatif akan memberikan dampak positif bagi kehidupan dan bernegara.

   Industri kreatif perlu dikembangkan karena industri kreatif dapat memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan dan menciptakan iklim bisnis yang

positif. Pengembangan ekonomi kreatif sejalan dengan tujuan dari ekonomi kerakyatan yang selama ini telah ada yaitu antara lain:

1. Membangun Indonesia yang berdikari secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian yang berkebudayaan
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan
3. Mendorong pemerataan pendapatan rakyat
4. Meningkatkan efisiensi perekonomian secara nasional

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan dan sasaran pembangunan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi pemerintah.

Berdasarkan pemahaman dasarnya, tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Penentuan tujuan ini sekurangnya harus mencakup empat kriteria berikut:

1) Tujuan harus sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah dan berlaku pada periode jangka menengah;
2) Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode jangka menengah;
3) Tujuan harus dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki pemerintah daerah; dan
4) Tujuan harus dapat mengarahkan perumusan sasaran strategis, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi pemerintah daerah.

Sedangkan, sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Lebih jauh, kriteria penentuan target kinerja sasaran strategis tersebut harus mempertimbangkan sejumlah aspek penting berikut:

1) *Specific*; sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;
2) *Measurable*; target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur;
3) *Achievable*: target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumberdaya yang ada;
4) *Relevant*: mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target *outcome* dalam rangka mencapai target *impact* yang ditetapkan; dan
5) *Time Bond*: waktu atau periode pencapaian kinerja ditetapkan.

Berpijak pada pemahaman dasar tersebut, maka penjabaran visi dan misi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 terdiri dari 6 (enam) tujuan dan 18 (delapan belas) sasaran. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur. Indikator kinerja tersebut merupakan tolok ukur keberhasilan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan. Pencapaian indikator kinerja Kepala Daerah selanjutnya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah yang didukung oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Dengan demikian, target pencapaian pembangunan lima tahun ke depan jelas dan terukur.

Untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka menengah digunakan indikator makro pembangunan sebagai indikator tujuan yang terdiri dari Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur, Indeks Kota Layak Huni dan Indeks Gini. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (*Impact*) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional dan nasional sehingga diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Balikpapan.

Penjelasan singkat tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

5.3.1. Tujuan 1: Meningkatkan Profesionalitas dan Transparansi Birokrasi

Salah satu prasyarat terwujudnya pembangunan daerah yang baik adalah dengan menguatkan tata kelola pemerintahan khususnya dari sisi profesionalitas dan transparansi. Unsur Birokrasi yang menjadi tumpuan utama tata kelola pemerintahan memerlukan banyak sumber daya serta kemampuan yang mumpuni.

Sebagai respon dari isu strategis tersebut, maka proses perencanaan pembangunan Kota Balikpapan menetapkan tujuan yaitu “Meningkatkan Profesionalitas dan Transparansi Birokrasi”. Tujuan ini adalah dalam rangka meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan secara umum yang secara langsung akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat secara luas. Peningkatan kinerja profesionalitass dan transparansi birokrasi pemerintahan ini juga perlu didukung dengan perbaikan atau penyempurnaan dari sisi kelembagaan, manajemen sumber daya manusia, sistem dan prosedur pelayanan umum sehingga menjadi lebih responsif dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Tujuan Meningkatkan Profesionalitas dan Transparansi Birokrasi ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi adalah hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Indeks reformasi birokrasi menggambarkan kemajuan instansi pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, profesional, dan melayani. Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga

dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program Reformasi Birokrasi. Untuk mendukung tujuan tersebut diperlukan upaya untuk meningkatkan sasaran yang menopangnya seperti yang disajikan dalam gambar di bawah ini:

Gambar 5.2 Tujuan dan Sasaran Misi 1

Sumber: Bappedalitbang, diolah 2021

5.3.2. Tujuan 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berdaya Saing

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu isu strategis dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan perekonomian daerah. Oleh karenanya, untuk merespon dan menindaklanjuti isu tersebut maka pembangunan Kota Balikpapan harus didorong dan diarahkan pada pencapaian tujuan yaitu "Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing" dalam rentang waktu lima tahun mendatang. Pencapaian tujuan itu sangat ditentukan oleh sejauh mana pemerintah Kota Balikpapan mampu memenuhi derajat kualitas "Indeks Pembangunan Manusia (IPM)".

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Dalam penghitungan IPM , indikator yang digunakan adalah :

a. Dimensi Kesehatan diukur menggunakan Angka Harapan Hidup (AHH)
b. Dimensi Pengetahuan diukur menggunakan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
c. Dimensi standar hidup layak diukur menggunakan Pengeluaran per Kapita disesuaikan

Efektivitas pencapaian tujuan itu akan terjadi jika kinerja lintas OPD pemerintah Kota Balikpapan bisa tersinergikan dan terkonsolidasikan dengan baik. Pencapaian tujuan ini diukur dengan meningkatkan indeks kepuasan layanan infrastruktur. Untuk mendukung peningkatan IPM ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan sasaran yang menopangnya seperti yang disajikan dalam gambar di bawah ini :

Gambar 5.3 Tujuan dan Sasaran Misi 2

Sumber: Bappedalitbang, diolah 2021

5.3.3. Tujuan 3: Meningkatkan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan

Indikator kemakmuran dan kemajuan kualitas hidup manusia tidak hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, akan tetapi sejauh mana komitmen dan usaha pemerintah suatu daerah dalam menyediakan fasilitas dan meningkatkan layanan infrastruktur secara merata. Pembangunan dan peningkatan layanan infrastruktur secara merata merupakan faktor yang penting untuk mendorong konektivitas yang merupakan kunci perkembangan suatu wilayah dan menjadi salah satu faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Penyediaan layanan infrastrukur yang berkualitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, mempercepat gerak ekonomi, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

Pengukuran keberhasilan dari tujuan tersebut adalah dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah. Selain mengukur kepuasan masyarakat juga akan diinvetarisasi keinginan serta harapan dari masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur. Sektor infrastruktur yang dinilai dalam Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur adalah:

a. Penyediaan jalan dan jembatan yang berkualitas
b. Penyediaan transportasi (Darat dan ASDP, Laut dan Udara)
c. Penyediaan infrastruktur air bersih
d. Penyediaan infrastruktur irigasi
e. Penyediaan infrastruktur perumahan

Untuk mendukung peningkatan indeks layanan infrastruktur ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan sasaran yang menopangnya seperti yang disajikan dalam gambar di bawah ini:

Gambar 5.4 Tujuan dan Sasaran Misi 3

Sumber: Bappedalitbang, diolah 2021

5.3.4. Tujuan 4: Mewujudkan Lingkungan Yang Inklusif dan Berkelanjutan

Proses pembangunan di Kota Balikpapan diarahkan untuk mempertimbangkan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Paradigma pembangunan tersebut bertujuan agar proses pembangunan berjalan beriringan dengan upaya pelestarian lingkungan. Hal ini sesuai dengan dua isu strategis Kota Balikpapan yaitu Penyediaan Infrastruktur yang andal dan berwawasan lingkungan serta pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Untuk merespon isu strategis tersebut maka tujuan yang ditetapkan adalah Terwujudnya Kota Layak Huni yang Berwawasan Lingkungan. Untuk mendukung tujuan tersebut, satu indikator tujuan yang dijadikan target bersama oleh program lintas OPD Pemerintah Kota Balikpapan adalah "Indeks *Liveable City*". Indeks *Liveable City* atau Indeks Kota Layak Huni merupakan sebuah indeks tahunan yang menunjukkan tingkat kenyamanan warga kota untuk tinggal, menetap dan beraktivitas di suatu kota yang ditinjau dari berbagai aspek perkotaan. Prinsip-prinsip Kota Layak Huni adalah:

1. Ketersediaan sarana kebutuhan dasar (perumahan, air, listrik)
2. Ketersediaan fasilitas publik (transportasi, taman-taman kota, fasilitas beribadah, kesehatan, pendidikan)
3. Ketersediaan ruang publik dan tempat berinteraksi bagi masyarakat
4. Keamanan
5. Dukungan fungsi ekonomi, sosial, dan budaya di kota
6. Sanitasi

Upaya pencapaian tujuan ini didukung oleh sasaran meningkatkan kualitas lingkungan hidup diperlukan upaya untuk meningkatkan sasaran yang menopangnya seperti yang disajikan dalam gambar di bawah ini:

Gambar 5.5 Tujuan dan Sasaran Misi 4

Sumber: Bappedalitbang, diolah 2021

5.3.5. Tujuan 5: Meningkatkan Pemerataan Ekonomi Lokal dan Pendapatan Masyarakat Melalui Pembangunan Ekonomi Inklusif

Upaya untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif diarahkan agar terjadi pertumbuhan ekonomi serta mengurangi dampak dari permasalahan kemiskinan. Inklusivitas dalam upaya pembangunan ekonomi menjadi kunci untuk mengejar pemerataan sehingga diharapkan pendapatan per kapita, kesejahteraan, dan daya beli masyarakat semakin membaik ke depannya.

Untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan ini, maka digunakan 1 indikator tujuan yaitu Indeks Gini. Indeks Gini merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah. Distribusi pendapatan semakin merata jika nilai Koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan semakin tidak merata jika nilai Koefisien Gini makin mendekati satu (1).Adapun upaya untuk memperbaiki indeks gini dapat dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan UMKM, mengurangi tingkat pengangguran dan menurunnya angka kemiskinan.

5.3.6. Tujuan 6: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah tidak terlepas dari perputaran roda ekonomi pada wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi menjadi faktor penting untuk terus digerakkan demi menopang hajat hidup masyarakat. Untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan ini maka digunakan 1 indikator yakni Pertumbuhan Ekonomi. Adapun upaya untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan mengintervensi berbagai sektor dan bidang mulai dari pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, investasi, dan ketahanan pangan daerah.Upaya untuk

meningkatkan sasaran yang menopangnya seperti yang disajikan dalam gambar di bawah ini:

Gambar 5.6 Tujuan dan Sasaran Misi 5

Sumber: Bappedalitbang, diolah 2021

Diperlukan indikasi operasional dalam penilaian kinerja untuk capaian Tujuan dan Sasaran RPJMD. Adapun keterkaitan Isu Strategis, tujuan sasaran dan Indikator kinerja yang ingin dicapai dalam 5 tahun kedepan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1 Keterkaitan Isu Strategis, Tujuan, Sasaran dan Indikator

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
MISI 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik					
Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, dan Profesional	Meningkatkan Profesionalitas dan Transparasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP
					Maturitas SPIP
					Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
					Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah
					Indeks SPBE
				Menciptakan aparatur Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Merit
				Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat
MISI 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Tinggi					
Belum Optimalnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	IPM	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan
				Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan
				Meningkatnya kualitas literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
				Meningkatnya kualitas pemuda	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan
				Meningkatnya kelestarian warisan budaya daerah	Indeks Warisan Budaya
				Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarustamaan Gender	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
MISI 3 : Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai.					
Belum Optimalnya Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan yang Memadai	Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas	Meningkatkan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur
					Persentase permukiman layak huni
MISI 4 : Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni yang Berwawasan Lingkungan					
Belum Optimalnya Pembangunan Kota yang Aman, Tertib, dan Ramah Lingkungan	Mewujudkan Kota yang Aman, Tertib, dan Ramah Lingkungan	Mewujudkan Lingkungan yang Inklusif dan Berkelanjutan	*Livable City Index*	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
					Presentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukkan
				Meningkatnya kapasitas ketahanan bencana dan ketertiban kota	Indeks Resiko Bencana
					Indeks Ketentraman dan Ketertiban
MISI 5 : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif.					
Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi yang Belum Optimal	Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Merata	Meningkatkan Pemerataan Ekonomi Lokal dan Pendapatan Masyarakat Melalui Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks Gini	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah , Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan	Presentase Pertumbuhan UMKM
					Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
					Tingkat Kemiskinan
Belum Optimalnya Peningkatan di Sektor Ekonomi yang Kreatif	Peningkatan Sektor Ekonomi yang Kreatif	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Angka Investasi	Nilai Realisasi Investasi
				Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan
				Meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dan internasional	Angka kunjungan wisatawan
				Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif
				Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan

Sumber : Bappedalitbang, Diolah 2021

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan serta sasaran sebagaimana yang telah kami sampaikan tersebut, maka diperlukan strategi-strategi yang selanjutnya akan menjadi prioritas pembangunan Kota Balikpapan selama lima tahun kedepan. Berdasarkan hasil dari tahapan penyusunan Raperda RPJMD Kota Balikpapan yang dimulai dari konsultasi publik hingga Musrenbang RPJMD, maka dirumuskan 9 (sembilan) prioritas pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yakni:

Gambar 5.7 (Sembilan) prioritas pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

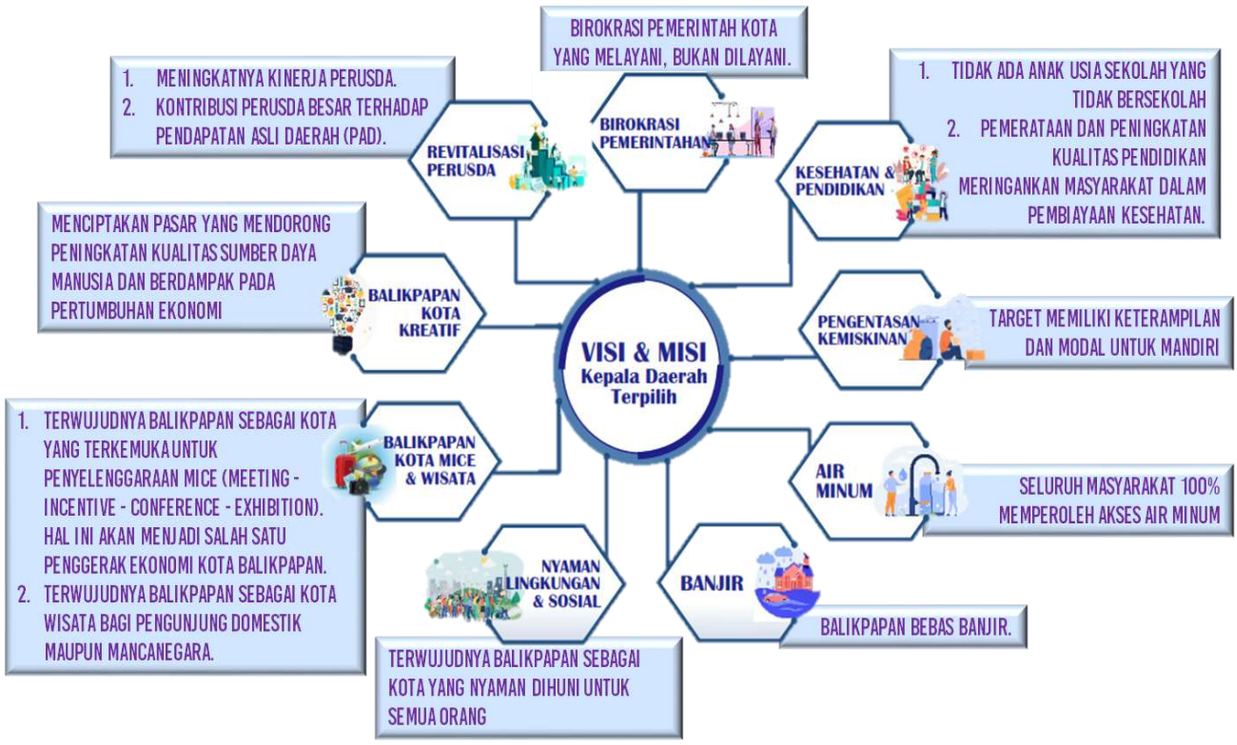

Sumber: Bappedalitbang, diolah 2021

1. PENGUATAN BIROKRASI PEMERINTAHAN:
   a. Penguatan tekad birokrasi yang profesional, transparan, dan bebas korupsi.
   b. Menumbuhkan "*trust*" yang tinggi dari masyarakat melalui:
      1) lnspirasi "*trust*" di lingkungan Pemerintah Kota.
      2) Klarifikasi tentang tujuan organisasi.
      3) Penyelarasan sistem dan prosedur.
      4) Penempatan orang yang tepat di posisi yang tepat.
2. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN PENDIDIKAN:

   Bidang Kesehatan:
   a. Subsidi iuran BPJS bagi peserta PBPU kelas 3;
   b. Pembangunan Rumah Sakit di wilayah yang membutuhkan.

   Bidang Pendidikan:
   a. Bantuan subsidi SPP untuk sekolah swasta SD/Ml dan SMP/MTs;
   b. Peningkatan lnsentif Guru dari PAUD, TK, SD dan SMP;
   c. Pembangunan dan pengembangan sekolah-sekolah nyaman dihuni (baik sarprasnya, kualitas gurunya dan kualitas proses belajar mengajar);
   d. Optimalisasi SKB (Sanggar Kegiatan Belajar).

3. PENGENTASAN KEMISIKINAN:
   a. Optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) dan
   b. Bantuan Permodalan untuk UMKM
4. PENYEDIAAN AIR MINUM YANG SEHAT DAN MERATA:
   a. Akselerasi percepatan peningkatan penyediaan air baku dan mempermudah akses masyarakat dalam pemasangan air minum.
   b. Peningkatan ketersediaan air baku yang saat ini di-supply dari waduk Manggar dan Teritip +/- 1200 liter/detik, sedangkan total kebutuhan adalah 2200 liter/detik. Kekurangan tersebut akan dipenuhi dari pembangunan embung aji raden dan *supply* dengan pipanisasi dari waduk Sepaku Semoi sebesar 2000 liter/detik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan air baku Kota Balikpapan hingga beberapa tahun kedepan.
5. PENGENDALIAN BANJIR:
   a. Percepatan penanganan DAS Sungai Ampal.
   b. Percepatan pembangunan drainase di Balikpapan Timur.
   c. Percepatan revitalisasi drainase di seluruh kota Balikpapan.
   d. Percepatan pembangunan Bendali/ Bozem di lingkungan kawasan perumahan.
6. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KONDISI SOSIAL YANG NYAMAN:
   a. Mewujudkan Kota Layak Anak, Layak Difabel dan Layak Lansia.
   b. Mewujudkan Kota Sehat, bebas Narkoba dan HIV/AIDS.
   c. Menghidupkan ritual keagamaan di seluruh lapisan masyarakat.
7. PENGEMBANGAN BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA MICE DAN WISATA:
   a. Pembangunan pusat perdagangan dan perekonomian.
   b. Penguatan *City Branding* Balikpapan.
   c. Pusat Forum Pertemuan Wilayah, Nasional dan lnternasional.
   d. Kerjasama dengan seluruh organisasi profesi dan bisnis untuk penyelenggaraan MICE.
   e. Pengembangan objek wisata.
   f. Pengembangan wisata bahari di sepanjang pantai Balikpapan.
   g. Pembangunan Kampung Budaya.
   h. Penyediaan transportasi khusus ke daerah wisata, dan
   i. Peningkatan kualitas hotel dan restoran.
8. PENGEMBANGAN BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA KREATIF:
   a. Penyelenggaraan Pekan Ekonomi Kreatif setiap tahun sebagai ajang promosi dan pemasaran produk-produk kreatif.
   b. Mendorong pemuda-pemuda Balikpapan masuk ke pengembangan ekonomi kreatif melalui pendidikan, pelatihan dan aksi-aksi yang kreatif.
   c. Membentuk Rumah Kreatif di tiap kecamatan se Kota Balikpapan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan bagi pelaku industri kreatif dan UMKM.
   d. Mengikuti *event-event* kreatif di luar daerah dan luar negeri.

9. REVITALISASI PERUSDA:

Restrukturisasi organisasi dan aktivitas Perusda, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan asli daerah.

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Kota balikpapan, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah *(goal)* yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kota secara umum. Sementara sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan *(goal)* yang telah ditetapkan. Tabel berikut menggambarkan Target Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan RPJMD Kota balikpapan Tahun 2021-2026.

Tabel 5.2 Target Indikator Tujuan dan Sasaran Kinerja RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2020 (BASELINE)	2022	2023	2024	2025	2026
MISI 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik									
Meningkatkan Profesionalitas dan Transparasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi			67,33	68,17	68,7	69,06	69,7	70,04
Meningkatkan Profesionalitas dan Transparasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	68,99	75,50	75,52	75,54	75,56	75,58
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	N/A	79	80	81	82	83
			Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	24,21%	36,88%	41,42%	44,17%	44,74%	44,40%
			Indeks SPBE	N/A	3.1	3.3	3.6	3.7	4.0
			Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4
		Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Merit	0,62	0,69	0,73	0,76	0,8	0,84
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	82,25	82,85	83,66	84,38	85,05
MISI 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Tinggi									
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berdaya Saing	IPM			80,01	80,11	80,31	80,51	80,71	80,91
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berdaya Saing	IPM	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,7487	0,7500	0,7506	0,7512	0,7518	0,7524
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,8383	0,8385	0,8388	0,8391	0,8394	0,8397
		Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	N/A	10,5	11	11,5	12	12,5
		Meningkatnya Kualitas Pemuda	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	0,020	0,021	0,022	0,023	0,024	0,025
		Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya	0,492	0,496	0,4962	0,4964	0,4965	0,4975

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2020 (BASELINE)	2022	2023	2024	2025	2026
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarustamaan Gender	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	14,43%	17%	25%	35%	45%	60%
MISI 3 : Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai.									
Meningkatkan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur			82,03	82	82,5	83	83,5	84
Meningkatkan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	77,8	78,2	78,78	79,12	79,55	80,02
			Persentase Permukiman Layak Huni	98,59%	99,05%	99,32%	99,55%	99,78%	100%
MISI 4 : Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni yang Berwawasan Lingkungan									
Mewujudkan Lingkungan yang Inklusif dan Berkelanjutan	Livable City Index			81,69	81,69	82,19	82,69	83,19	83,69
Mewujudkan Lingkungan yang Inklusif dan Berkelanjutan	*Livable City Index*	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,07	68,15	68,23	68,31	68,41	68,51
			Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Peruntukan	89%	89,20%	89,40%	89,60%	89,80%	90%
		Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	Indeks Resiko Bencana	108	107	105	103	101	99
			Indeks Ketentraman dan Ketertiban	0,5601	0,8000	0,8267	0,8575	0,8675	0,8794
MISI 5 : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif.									
Meningkatkan Pemerataan Ekonomi Lokal dan Pendapatan Masyarakat Melalui Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks Gini			0,311	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2020 (BASELINE)	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Pemerataan Ekonomi Lokal dan Pendapatan Masyarakat Melalui Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks Gini	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah , Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan	Presentase Pertumbuhan UMKM	3,09%	3,14%	3,17%	3,19%	3,33%	3,45%
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9	9	8,46	8,22	7,98	7,74
			Tingkat Kemiskinan	2,57	2,42	2,39	2,38	2,37	2,36
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi			-0,69%	4,10%	4,45%	4,80%	5,15%	5,50%
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	3,018	3,330	3,530	3,780	4,080	4,440
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	87	87	87	88	89	90
		Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	1,08	1,2	1,5	1,9	2,5	3,4
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	N/A	2,20%	2,42%	2,66%	2,93%	3,22%
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	-0,56%	3,50%	3,97%	4,00%	4,25%	5,00%

Sumber : Bappedalitbang, Diolah 2021

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Setelah menjabarkan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran pada Bab V maka selanjutnya penentuan strategi pembangunan daerah dan arah kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Setelah tujuan dan sasaran serta indikator kinerja RPJMD dirumuskan, dibutuhkan metodologi (rumusan strategi) dalam menentukan program prioritas terhadap target kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif bagaimana Pemerintah Kota Balikpapan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD secara efektif dan efisien. Strategi juga digunakan sebagai sarana melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

Untuk mengetahui seberapa jauh strategis menciptakan nilai tambah diperlukan parameter utama, sehingga dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus menciptakan budaya “berpikir strategik” untuk menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, oleh sebab itu strategi harus dikendalikan dan dievaluasi.

Untuk mengetahui langkah-langkah atau upaya-upaya yang dilakukan salah satunya dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan *(strengths)*, kelemahan *(weaknesses)*, peluang *(opportunities)* dan ancaman atau hambatan *(threats)*. Dalam hal ini kekuatan dan

kelemahan merupakan aspek penilaian terhadap faktor internal, sedangkan peluang dan ancaman merupakan aspek penilaian dari faktor eksternal.

Gambar 6.1 Analisa Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal Kota Balikpapan

Sumber : Bappedalitbang, diolah 2021

Berdasarkan analisa SWOT diatas, rumusan strategi pembangunan pada tahun 2021-2026 dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Keselarasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan merupakan strategi pertama yang perlu ditempuh agar hasil pembangunan berkualitas dapat dirasakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu maka diperlukan upaya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah berbasis kinerja dengan memperhatikan kesesuaian program dan target RPJMD dengan RKPD tahunan serta meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan kualitas laporan kinerja pemerintah daerah.

2. Memperkuat Pengawasan dan Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel

Mengingat keterbatasan sumber daya keuangan serta tingginya kebutuhan pendanaan untuk pembangunan maka untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien maka diperlukan penguatan terhadap pengawasan dan tata kelola keuangan yang akuntabel. Oleh karena itu, arah kebijakan untuk hal ini adalah melakukan optimalisasi transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pelaksanaan hal ini diharapkan juga mampu mendorong *creative financing* untuk pendanaan pembangunan.

3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Modern

Strategi meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan modern diarahkan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur serta mendorong pengembangan pelayanan publik yang inovatif dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini dilakukan untuk mencapai birokrasi yang

profesional, transparan dan bebas korupsi. Selain itu untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat serta dunia usaha terhadap layanan pemerintah.

4. Menyediakan Sarana Prasarana Pembelajaran dan Pemanfaatan Teknologi dalam Penyelenggaraan Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting sebagai dasar pembangunan berkelanjutan melalui penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan maka diperlukan pemenuhan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana serta mengoptimalkan pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi terutama untuk menghadapi kondisi pandemi covid-19 karena diperlukannya pengendalian aktivitas masyarakat dan pasca pandemi Covid-19 sebagai upaya adaptasi terhadap tatanan kehidupan baru. Pemanfaatan teknologi harus diimbangi dengan kualitas dan kapasitas pendidik melalui program literasi digital.

5. Menyediakan Sarana Prasarana dalam Penyelenggaraan Layanan Kesehatan

Kesehatan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui kebijakan yang memberikan kemudahan akses layanan kesehatan seluruh masyarakat antara lain berupa pembangunan rumah sakit umum daerah untuk meningkatkan layanan kesehatan primer dan rujukan, bantuan iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu dan peserta bukan penerima upah kelas 3, peningkatan kesehatan ibu dan bayi, reproduksi remaja, dan keluarga, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular.

6. Meningkatkan Infrastruktur Dasar yang Memadai

Infrastruktur merupakan salah satu layanan dasar yang dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, mendukung kegiatan dan aktivitas masyarakat serta penciptaan ruang kota yang berkualitas, aman, nyaman dan sehat. Untuk meningkatkan infrastruktur dasar yang memadai dilakukan dengan meningkatkan konektivitas kawasan perkotaan yang terintegrasi serta layanan infrastruktur permukiman sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yaitu air minum, sanitasi dan penyediaan rumah tidak layak huni.

7. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup melalui Penataan Ruang yang Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Ruang Kota

Strategi ini dilakukan dalam kerangka mendukung pembangunan berkelanjutan yaitu melestarikan fungsi lingkungan hidup untuk generasi selanjutnya. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan sumber daya ruang kota yang dituangkan dalam rencana tata ruang yang berkualitas serta pengelolaan lingkungan hidup dengan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakkan hukum.

8. Meningkatkan Pembangunan yang Berkeadilan untuk Semua

Salah satu prinsip kota layak dihuni adalah pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat atau inklusif. Kota inklusif adalah kota dimana semua masyarakat mampu hidup bersama-sama dengan aman dan nyaman, serta mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi penuh dalam dimensi spasial,sosial dan ekonomi tanpa adanya diskriminasi. Untuk mewujudkan hal tersebut maka kebijakan pembangunan diarahkan melalui optimalisasi perencanaan anggaran yang responsif gender, optimalisasi sarana dan prasarana layanan lansia dan difabel serta optimalisasi pembangunan kota layak anak. Selain itu kebijakan juga diarahkan pada pembangunan berbasis masyarakat melalui penggunaaan teknologi tepat guna dan pembangunan menuju Kota Sehat, Bebas Narkoba dan HIV/AIDS.

9. Mengoptimalkan Upaya Mitigasi dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

Dampak perubahan iklim yang terjadi saat ini telah dirasakan oleh seluruh masyarakat di dunia antara lain dengan terjadinya cuaca hujan dan kekeringan ekstrim. Untuk mengurangi dampak terhadap perubahan iklim tersebut maka diperlukan upaya melalui mitgasi dan adaptasi dengan memperkuat pencegahan dan pengendalian kebencanaan.

10. Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi

Kemudahan berinvestasi didorong untuk mendorong peran swasta berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan. Investasi yang masuk ke Kota Balikpapan diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* yang bukan hanya pada pembukaan lapangan pekerjaan tetapi juga meningkatkan posisi Kota Balikpapan di skala regional, nasional maupun internasional. Cakupan peningkatan kemudahan berinvestasi dilakukan melalui upaya-upaya penyederhanaan prosedur berinvestasi, promosi investasi, dan penataan jaringan usaha dan informasi investasi. Peningkatan kemudahan berinvestasi diselaraskan dengan kebijakan yang tertuang pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

11. Meningkatkan Jaringan Distribusi Perdagangan Sektor Barang dan Jasa

Peningkatan jaringan distribusi Perdagangan Sektor Barang dan Jasa merupakan upaya menjamin aksesbilitas masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan barang/produk terutama kebutuhan pokok. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan jaringan distribusi produk melalui kebijakan peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif.

12. Meningkatkan Pengelolaan Pariwisata dan Industri Kreatif

Pengelolaan Pariwisata dan Industri Kreatif merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan yang berkelanjutan terlepas dari ketergantungan pada sektor Migas dan Batu Bara. Kebijakan pembangunan diarahkan pada revitalisasi sarana prasarana pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif. Sarana dan prasarana pariwisata ditujukan pada objek wisata yang saat ini sudah eksis dan pengembangan objek wisata melalui

pengembangan wisata bahari dan pembangunan kampung budaya. Sedangkan pengembangan ekonomi kreatif diarahkan pada pengembangan ekosistem yang kondusif bagi produk yang dihasilkan sub sektor ekonomi kreatif yang potensial seperti fashion, film-animasi-video, fotografi periklanan, kerajinan (kriya), kuliner, musik, aplikasi, dan pengembangan permainan.

13. Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah dilaksanakan dengan arah kebijakan pembangunan melalui peningkatan ketersediaan dan akses pangan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Sebagai daerah dengan karakteristik dominasi kawasan perkotaaan, maka didorong partisipasi penyediaan pangan mandiri masyarakat melalui *urban farming*.

14. Meningkatkan Produk Unggulan Daerah

Peningkatan produk unggulan daerah selain untuk meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat juga sebagai upaya untuk menciptakan daya saing terhadap daerah lainnya. Peningkatan produk unggulan daerah dilaksanakan dengan arah kebijakan mengembangkan sentra-sentra industri dan produk ekonomi lokal serta menguatkan dan mengembangkan koperasi & UMKM.

15. Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

Kebijakan pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan diarahkan pada meningkatkan kemandirian masyarakat melalui keterpaduan program untuk peningkatan keterampilan dan perluasan akses modal serta memperluas perlindungan dan jaminan sosial.

16. Memperluas Kesempatan Kerja

Kurangnya kesempatan kerja merupakan penyebab utama pengangguran di setiap negara. Pengangguran menyebabkan kemiskinan dan berkurangnya taraf hidup masyarakat. Perluasan kesempatan kerja diarahkan untuk meningkatkan kompetensi serta produktivitas angkatan kerja serta meningkatkan kewirausahaan. Wirausaha selain diharapkan mampu membawa manfaat bagi individu pelaku usaha juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, dan kreatifitas untuk meningkatan pertumbuhan ekonomi selain penciptaan lapangan pekerjaan itu sendiri.

Untuk kesinambungan pembangunan setiap tahun dalam jangka 5 (lima) tahun disusun tema Pembangunan sebagai strategi tahapan dan penekanan fokus perhatian berupa kebijakan/rencana/program pembangunan tiap tahunnya sebagai berikut:

Gambar 6.2 Tahap Tema Pembangunan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026

Sumber : Bappedalitbang, diolah 2021

Pentahapan Tema Pembangunan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026 adalah:

a. Tema Tahun I (2022): Pemulihan Ekonomi Masyarakat Melalui Penguatan Sistem Kesehatan, Reformasi Birokrasi Dan Infrastruktur

Tema pembangunan ini merupakan cakupan seluruh Pencapaian Misi Pembangunan untuk lima tahun kedepan dikarenakan di tahun 2022 merupakan tahun pertama untuk Kota Balikpapan bangkit dari Pemulihan Pasca Covid-19.

Pada tahap ini, Pembangunan difokuskan pada Penguatan Ke seluruh sektor Pembangunan Daerah yang terdampak Covid-19, terutama pada sistem kesehatan seperti peningkatan kualitas dan jaminan kepastian pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Balikpapan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi pasca Covid-19.

b. Tema Tahun II (2023): Peningkatan Kualitas SDM dan Pemerataan Akses Layanan Dasar Berkualitas Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi

Tema pembangunan tahap ini masih diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Misi II yaitu “Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Tinggi” dan Misi III yaitu “Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai.” Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan membangun pendidikan yang mudah diakses seluruh masyarakat Kota Balikpapan dengan menekankan pendidikan karakter, mewujudkan insan terdidik yang cerdas, trampil, mandiri, dan berwawasan kebangsaan.

Pada sektor Percepatan ekonomi, pembangunan diarahkan pada pengembangan ekonomi kreatif untuk semua lapisan masyarakat (aktor pentahelix). Pembangunan yang menggunakan aktor pentahelix adalah yang melibatkan unsur dari ekonomi kreatif yaitu adanya akademisi, sektor bisnis, komunitas, pemerintah dan media yang terlibat di percepatan sektor ekonomi. Untuk Sektor pembangunan infrastruktur diarahkan pada pembangunan yang mendukung pencegahan banjir,

sanitasi yang baik dan pengadaan air bersih agar menciptakan kota yang bebas banjir serta layak huni. Penyelenggaraan jaminan perlindungan sosial dan peningkatan keberdayaan masyarakat Kota Balikpapan melalui penguatan akses layanan dasar yang berkualitas untuk mendukung pengembangan transformasi ekonomi.

c. Tema Tahun III (2024): Mempertahankan Kondusifitas untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Inklusif dan Lingkungan yang Berkelanjutan

Pada tahun ini difokuskan untuk Misi IV yaitu "Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni yang Berwawasan Lingkungan" dan Misi V "Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif". Pada tahap ini Pembangunan difokuskan pada pada pengelolaan lingkungan yang adaptif terhadap perubahan iklim dan berketahanan bencana melalui pelestarian serta pemanfaatan ekosistem yang berkelanjutan demi mewujudkan Kota yang nyaman dihuni dan berwawasan lingkungan.

d. Tema Tahun IV (2025): Pengembangan Seluruh Sektor untuk Pemantapan Ekonomi Inklusif dan berkelanjutan

Tema pembangunan ini diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Misi V yaitu "Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif." Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada kemudahan investasi dan optimalisasi potensi investasi serta Pariwisata yang ada di Kota Balikpapan. Peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan pasar tradisional dan UMKM, optimalisasi peran koperasi, serta pengembangan sentra-sentra ekonomi kreatif. Pembangunan juga difokuskan pada pengembangan dan peningkatan promosi sektor pariwisata unggulan yang ada di Kota Balikpapan.

Pada tahap ini Pembangunan juga difokuskan pada peningkatan sektor pertanian, perindutrian dan perdagangan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Menciptakan kesempatan dan lapangan kerja bagi masyarakat yang bermuara pada penurunan angka pengangguran dan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan

e. Tema Tahun V (2026): Pemantapan Seluruh Sektor Pembangunan Untuk Menuju Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Modern

Tema pembangunan ini merupakan akhir Periode RPJMD, maka harapannya Tahun ini, Kota Balikpapan dapat melakukan Pemantapan di seluruh Sektor Pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan sejahtera dan modern. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2021-2026 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan Kota Balikpapan, adapun strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kota Balikpapan

VISI : TERWUJUDNYA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG NYAMAN DIHUNI, MODERN, DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI MADINATUL IMAN

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2020 (Baseline)	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Arah Kebijakan
MISI 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik											
Meningkatkan Profesionalitas dan Transparasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	68,99	75,5	75,52	75,54	75,56	75,58	Meningkatkan keselarasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah berbasis kinerja
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	N/A	79	80	81	82	83	Memperkuat pengawasan dan tata kelola keuangan yang akuntabel	Mengoptimalkan Transparasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	24,21%	36,88%	41,42%	44,17%	44,74%	44,40%	Intensifikasi potensi penerimaan pendapatan asli daerah	Optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah
			Indeks SPBE	N/A	3.1	3.3	3.6	3.7	4.0	Menerapkan pelayanan publik yang cepat, tanggap, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat secara terintegrasi dan terpadu	Membangun sistem *e-government* untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
			Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Menguatkan akuntabilitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah	Mendorong pelaksanaaan pengendalian intern dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
		Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Merit	0,62	0,69	0,73	0,76	0,80	0,84	Pemantapan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2020 (Baseline)	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	82,25	82,85	83,66	84,38	85,05	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Modern	Mendorong Pengembangan Pelayanan Publik yang Inovatif
MISI 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Tinggi											
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berdaya Saing	IPM	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,7487	0,7500	0,7506	0,7512	0,7518	0,7524	Meningkatkan Kemudahan Akses Layanan Pendidikan Seluruh Masyarakat	Menyediakan Sarana Prasarana Pembelajaran yang berkualitas dalam Penyelenggaraan Pendidikan
											Menyediakan SDM yang berkualitas dalam Penyelenggaraan Pendidikan
											Perluasan bantuan biaya pendidikan
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,8383	0,8385	0,8388	0,8391	0,8394	0,8397	Meningkatkan tingkat derajat kesehatan masyarakat melalui penguatan sistem kesehatan	Menyediakan sarana prasarana yang berkualitas dalam penyelenggaraan layanan kesehatan
											Menyediakan SDM yang berkualitas dalam penyelenggaraan layanan kesehatan
											Perluasan bantuan biaya kesehatan
		Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	N/A	10,5	11	11,5	12	12,5	Meningkatkan budaya membaca masyarakat	Mengembakan sistem *E-Library*
		Meningkatnya Kualitas Pemuda	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	0,020	0,021	0,022	0,023	0,024	0,025	Mengembangkan kapasitas daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Mengembangkan potensi dan prestasi kepemudaan dan keolahragaan
		Meningkatnya Kelestarian		0,4920	0,4960	0,4962	0,4964	0,4965	0,4975		Meningkatkan kualitas SDM

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2020 (Baseline)	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Arah Kebijakan
		Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya							Mengembangkan nilai budaya Kota Balikpapan	pengelola kebudayaan
											Memperluas akses warisan budaya kepada masyarakat
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarustamaan Gender	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	14,43%	17%	25%	35%	45%	60%	Meningkatkan Pembangunan yang Berkeadilan untuk Semua (perempuan, pemuda, lansia, anak, difabel)	Mengoptimalkan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender
											Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana Layanan Lansia dan Difabel
											Mengoptimalkan Pembangunan Kota yang Layak Anak
MISI 3 : Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai.											
Meningkatkan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	77,8	78,2	78,78	79,12	79,55	80,02	Meningkatkan Infrastruktur Dasar Yang Memadai	Meningkatkan Konektivitas Kawasan Perkotaan yang Terintegrasi
											Mengembangkan layanan air minum dan air limbah
											Meningkatkan infrastruktur pengendali banjir
			Persentase Permukiman Layak Huni	98,59%	99,05%	99,32%	99,55%	99,78%	100%	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan perumahan	Meningkatkan penyediaan infrastruktur kawasan permukiman dan perumahan
MISI 4 : Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni yang Berwawasan Lingkungan											
Mewujudkan Lingkungan yang Inklusif dan Berkelanjutan	*Livable City Index*	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,07	68,15	68,23	68,31	68,41	68,51	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup
											Mengoptimalkan Upaya Mitigasi dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2020 (Baseline)	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Arah Kebijakan
			Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Peruntukkan	89%	89,2%	89,4%	89,6%	89,8%	90%	Meningkatkan kualitas ruang kota	Mendorong pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukan
											Meningkatkan nilai estetika ruang kota
		Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	Indeks Resiko Bencana	108	107	105	103	101	99	Menguatkan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penanggulangan bencana
											Membangun sarana prasarana penanggulangan bencana yang berkualitas
											Menyusun dokumen perencanaan mitigasi dan penanggulangan bencana
			Indeks Ketentraman dan Ketertiban	0,5601	0,8000	0,8267	0,8575	0,8675	0,8794	Optimalisasi koordinasi lintas sektor dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban	Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur penegak perda
											Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kerukunan dan toleransi
											Penyelenggaraan penegakkan perda yang humanis
MISI 5 : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif.											
Meningkatkan Pemerataan Ekonomi Lokal dan	Indeks Gini	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah ,	Persentase Pertumbuhan UMKM	3,09%	3,14%	3,17%	3,19%	3,33%	3,45%	Meningkatkan Produk Unggulan Daerah	Mengembangkan Sentra-Sentra Industri/Produk Ekonomi Lokal

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2020 (Baseline)	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Arah Kebijakan
Pendapatan Masyarakat Melalui Pembangunan Ekonomi Inklusif		Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan									Menguatkan dan Mengembangkan Koperasi & UMKM
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9	9	8,46	8,22	7,98	7,74	Memperluas Kesempatan Kerja	Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Angkatan Kerja
			Tingkat Kemiskinan	2,57	2,42	2,39	2,38	2,37	2,36	Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Memperluas Perlindungan dan Jaminan Sosial
											Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Melalui Peningkatan Keterampilan dan Perluasan Akses Modal
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	3,018	3,330	3,530	3,780	4,080	4,440	Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi	Menyediakan Regulasi dan Kebijakan yang Mempermudah Investasi
											Meningkatkan Perluasan Lapangan kerja
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	87	87	87	88	89	90	Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Meningkatkan Ketersediaan dan Akses Pangan Berkelanjutan Bagi Masyarakat
		Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	1,08	1,20	1,50	1,90	2,50	3,40	Meningkatan pemasaran pariwisata	Peningkatan promosi dan event pariwisata
											Meningkatkan kualitas sarana prasarana pariwisata
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	N/A	2,20%	2,42%	2,66%	2,93%	3,22%	Meningkatkan Pengelolaan Industri Kreatif	Mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2020 (Baseline)	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	-0,56%	3,50%	3,97%	4,00%	4,25%	5,00%	Meningkatkan jaringan distribusi perdagangan sektor barang dan jasa	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Representatif

Sumber : Bappedalitbang, diolah 2021

6.2. Arah Kebijakan Kewilayahan

Gambar 6.3 Peta Rencana Kawasan Strategis Kota Balikpapan

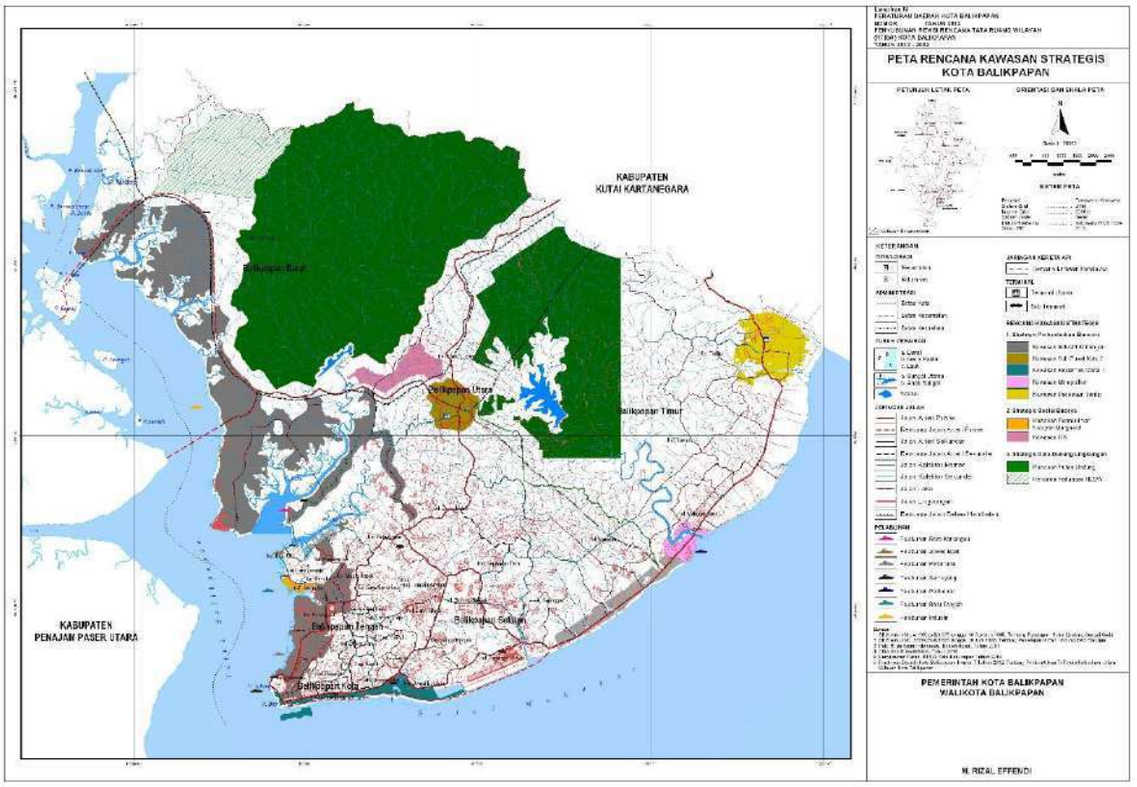

Sumber : RTRW Kota Balikpapan 2012-2032

Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 harus dengan sejalan arah pembangunan kewilayahan kawasan strategis yang telah dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032. Kawasan strategis wilayah kota merupakan bagian wilayah kota yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis kota lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kota akan ditetapkan lebih lanjut di dalam rencana tata ruang kawasan strategis. Berdasarkan kepentingan pengembangan kota, telah ditetapkan 3 (tiga) jenis Kawasan Strategis Kota (KSK), sebagai berikut:

a. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi

Kawasan strategis kota dari sudut pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan adalah Kawasan Kota Baru Karang Joang, Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Kariangau, Kawasan Minapolitan Manggar dan Manggar Baru, Kawasan Reklamasi Pantai dan Kawasan Kota Baru Teritip. Pembangunan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi diselaraskan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah maka diprioritaskan pada pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kariangau sebagai kawasan pengembangan industri terpadu dengan jangkauan produksi skala nasional dan regional.

Kawasan Kota Baru Karang Joang diarahkan menjadi kawasan pusat kota kedua sebagai pusat pertumbuhan dengan kegiatan perdagangan, jasa dan

pemerintahan di Bagian Utara Balikpapan yang menjadi pendukung bagi pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kariangau dan menjadi pintu aksesibilitas Kota Balikpapan dengan Rencana Ibu Kota Negara di Kabupaten Penajam Paser Utara. Adapun Kawasan Kota Baru Teritip diarahkan sebagai pusat pertumbuhan di bagian timur Balikpapan yang dirancang menjadi pusat perdagangan, pariwisata, jasa dan pendidikan.

Indikasi program prioritas untuk Kota Baru Teritip pada jangka 5 (lima) tahun ke depan diarahkan untuk mendukung pengembangan layanan air minum Kota Balikpapan melalui pengembangan SPAM Teritip dengan mendorong percepatan pembebasan lahan dan penyelesaian Embung Aji Raden, Pembangunan IPA Teritip Tahap II serta pembangunan jaringan distribusi hingga ke sambungan rumah.

b. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya di Kota Balikpapan adalah kawasan Permukiman Nelayan Margasari di Balikpapan Barat yang merupakan kampung atas air di Kota Balikpapan dan Kawasan Pendidikan Skala Regional Institut Teknologi Kalimantan (ITK). Arahan program dan kegiatan pada kawasan strategis ini adalah pengembangan infrastruktur permukiman dan penyediaan infrastruktur untuk mendukung fungsi kawasan pendidikan. Indikasi program prioritas untuk kawasan strategis ini adalah percepatan pembebasan lahan dan pembangunan ITK, pembangunan sarana dan prasarana permukiman khususnya dalam rangka penanganan dan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta mendukung program prioritas Kepala Daerah untuk perluasan akses fasilitas pendidikan dan kesehatan di Balikpapan Barat.

c. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan

Kawasan Strategis untuk Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan di Kota Balikpapan Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain dan Kawasan Hutan Lindung DAS Manggar.Kawasan ini memiliki peranan penting untuk menjaga kelestarian lingkungan, keanekaragaman hayati, dan kestabilan ekosistem di Kota Balikpapan. Selain itu juga berfungsi menjaga sumber air baku yang memasok lebih dari ±80% kebutuhan air masyarakat Kota Balikpapan. Arahan program dan kegiatan pada kawasan strategis ini adalah konservasi sumber daya alam dan pengembangan pariwisata berbasis ekowisata.

Kebijakan kewilayahan juga menjadi arahan 5 (lima) tahun yang akan datang untuk mewujudkan keterpaduan program pembangunan daerah sesuai pendekatan holistik, integratif, tematik dan spasial untuk mewujudkan hasil pembangunan yang berkualitas efektif dan efisien guna mendukung program prioritas Wali Kota dan Wakil Walikota khususnya pada upaya pengendalian banjir.

Berdasarkan uraian permasalahan, arahan kewilayahan untuk pengendalian banjir diarahkan pada kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal yang memiliki

titik banjir terbanyak jika dibandingkan dengan DAS lainnya. Selain itu, pada DAS Ampal juga terdapat aktivitas ekonomi dan permukiman masyarakat sehingga kejadian banjir sangat berdampak bagi masyarakat. Oleh karena itu, arahan indikasi keterpaduan program pengendalian banjir DAS Ampal adalah sebagai berikut:

Gambar 6.4 Rencana Keterpaduan Program DAS Ampal

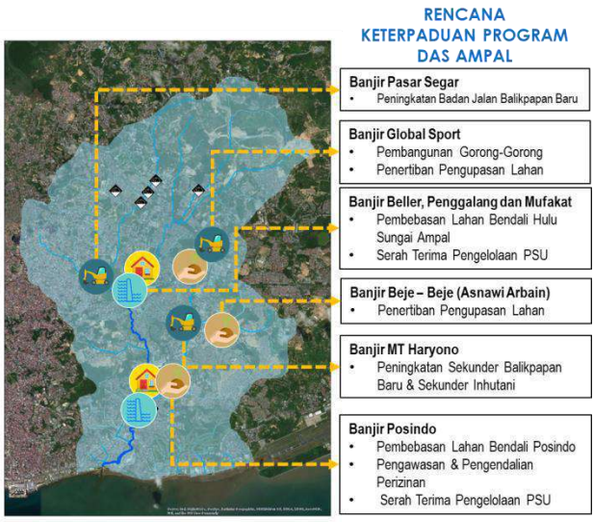

Sumber : Bappedalitbang, diolah 2021

Selain pengendalian banjir, dukungan program prioritas Wali Kota dan Wakil Walikota adalah dalam hal pengembangan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Seiring berjalannya waktu, perkembangan ekonomi sampai pada taraf ekonomi kreatif setelah beberapa waktu sebelumnya, dunia dihadapi dengan konsep ekonomi informasi yang mana informasi menjadi hal yang utama dalam pengembangan ekonomi.

Gelombang Revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental pada berbagai tatanan kehidupan global, ditandai dengan semakin berkembangnya kreativitas dan inovasi dengan pemanfaatan teknologi informasi, yang mendisrupsi berbagai sendi kehidupan global, termasuk persaingan dalam bidang ekonomi. Pengembangan ekonomi kreatif juga mendorong ekonomi Kota Balikpapan untuk tumbuh berkelanjutan sebagai wujud mendukung transformasi ekonomi dalam skala regional di Provinsi Kalimantan Timur.

Terdapat 17 subsektor ekonomi kreatif yaitu Arsitektur, Fashion, Desain interior, Film-animasi-video, Desain-komunikasi-visual (DKV), Fotografi periklanan, Desain produk, Kerajinan (kriya), Kuliner, Periklanan, Musik, Aplikasi, TV, Radio, Pengembangan permainan, Seni pertunjukkan, dan Penerbitan. Untuk pengembangan ekonomi kreatif bukan hanya dilihat dari potensi pelaku yang ada masing-masing wilayah di Kota Balikpapan tetapi juga potensi ruang serta kegiatan sebagai pasar pengembangan ekonomi kreatif. Oleh karena itu arahan

pengembangan sub sektor dan kewilayahan untuk pengembangan ekonomi kreatif adalah sebagai berikut:

Gambar 6. 5 Arahan Pengembangan Sub Sektor dan Kewilayahan Ekonomi Kreatif Balikpapan

Sumber : Bappedalitbang, diolah 2021

6.3. Program Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

Program Pembangunan di Kota Balikpapan yang merupakan Program Prioritas RPJMD Tahun 2021-2026 agar lebih jelasnya diuraikan dengan mencantumkan bidang penanggungjawab terhadap 1 (satu) program atau *outcome* setiap Perangkat Daerah yang secara langsung bertanggungjawab terhadap Pencapaian Target Kinerja Visi dan Misi Wali Kota Terpilih, secara lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 6. 2 Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif di Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	MISI 1: MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK															
	TUJUAN: MENINGKATKAN PROFESIONALITAS DAN TRANSPARANSI BIROKRASI	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	67,33	68,17		68,70		69,06		69,70		70,04		70,04		
	SASARAN: MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL	NILAI SAKIP	68,99	75,5		75,52		75,54		75,56		75,58		75,58		
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Kerjasama	N/A	97,73%	30.195.754.400	100%	31.134.403.284	100%	41.924.809.057	100%	44.075.427.643	100%	53.414.644.598	100%	200.745.038.982	Sekretariat Daerah
2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan	N/A	100%	2.584.146.500	100%	2.584.146.500	100%	2.822.561.150	100%	3.278.937.940	100%	4.236.565.558	100%	15.506.357.648	Sekretariat Daerah
3	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	29.830	32.760	3.065.614.000	32.769	2.867.000.000	32.778	3.650.000.000	32.787	4.200.000.000	32.796	4.800.000.000	32.796	18.582.614.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
4	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	21.510	23.460	0	23.466	70.000.000	23.472	70.000.000	23.478	70.000.000	23.484	70.000.000	23.484	280.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
5	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	2.900.000.000	100%	2.656.800.000	100%	3.325.000.000	100%	3.695.000.000	100%	4.130.000.000	100%	16.706.800.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	SASARAN: MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL	INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	N/A	79		80		81		82		83		83		
6	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Tahapan Penyusunan Perda dan Perwal tentang APBD, P-APBD, dan LKPD serta Realisasi APBD yang Tepat Waktu	N/A	100%	20.725.000.000	100%	18.937.726.000	100%	24.840.192.000	100%	28.517.345.000	100%	33.732.833.000	100%	126.753.096.000	Badan Pengelola Keuangan Daerah

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Peningkatan BMD yang terkelola	N/A	100%	19.000.000.000	100%	20.690.550.000	100%	22.990.000.000	100%	25.289.000.000	100%	27.817.900.000	100%	115.787.450.000	Badan Pengelola Keuangan Daerah
	SASARAN: MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL	DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DAERAH	24,21%	36,88%		41,42%		44,17%		44,74%		44,40%		44,40%		
8	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)	474,4 Milyar	780,71 Milyar	3.953.540.690	852,37 Milyar	6.114.076.097	1.062,03 Milyar	6.297.498.380	1.192,01 Milyar	12.594.996.760	1.321,97 Milyar	17.003.245.625	1.321,97 Milyar	45.963.357.552	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	SASARAN: MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL	INDEKS SPBE	N/A	3.1		3.3		3.6		3.7		4.0		4.0		
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	N/A	80%	272.000.000	80%	283.955.119	85%	326.341.095	90%	360.691.225	90%	401.829.005	90%	1.644.816.444	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase sistem elektronik atau aset informasi yang diaudit dengan resiko kategori rendah	80%	80%	500.000.000	80%	491.976.321	80%	549.891.718	80%	613.035.341	80%	688.656.259	80%	2.843.559.639	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase perangkat Daerah yang terhubung dengan jaringan komunikasi sandi	80%	80%	0	80%	30.000.000	80%	50.000.000	80%	50.000.000	80%	50.000.000	80%	180.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
11	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	N/A	80%	2.724.000.000	80%	2.634.936.468	80%	3.028.253.393	80%	3.347.002.400	80%	3.728.736.796	80%	15.462.929.057	Dinas Komunikasi dan Informatika
12	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi layanan publik secara daring yang memanfaatkan domain/sub domain instansi penyelenggaraan negara	80%	80%	4.211.000.000	80%	4.261.000.000	80%	4.516.000.000	80%	4.816.500.000	80%	5.221.500.000	80%	23.026.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase layanan publik dan internal yang diselenggarakan secara online dan atau terintegerasi	80%	80%	2.052.000.000	80%	2.277.275.397	80%	2.998.243.661	80%	3.488.680.678	80%	4.030.908.304	80%	14.847.108.040	Dinas Komunikasi dan Informatika
	SASARAN: MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL	MATURITAS SPIP	Level 3	Level 3		Level 3		Level 3		Level 4		Level 4		Level 4		
13	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	81,33%	83,33%	687.377.000	85,33%	717.589.035	87,33%	824.703.539	89,33%	911.510.487	91,33%	1.015.470.647	91,33%	4.156.650.708	Inspektorat
14	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN	Persentase Hasil Capaian Kinerja Tata Laksana Pengawasan	50%	51,67%	779.103.000	63,33%	813.346.635	75%	934.754.874	86,67%	1.033.145.646	98,33%	1.150.978.615	98,33%	4.711.328.770	Inspektorat

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI															
	SASARAN: MENCIPTAKAN APARATUR BIROKRASI YANG KAPABEL	INDEKS SISTEM MERIT	0,62	0,69		0,73		0,76		0,80		0,84		0,84		
15	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja	N/A	88%	1.033.944.000	88,80%	620.559.000	88,91%	711.876.500	89,16%	790.250.500	90,81%	790.250.500	90,81%	4.019.183.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
16	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Memperoleh Pengembangan Kompetensi Sesuai Rencana Pengembangan Kompetensi	40%	17,39%	6.965.093.609	14,91%	7.020.468.750	24,64%	8.161.940.250	18,95%	9.041.542.700	24,10%	10.101.956.250	100%	41.291.001.559	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	SASARAN: MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT ATAS LAYANAN PEMERINTAHAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	N/A	82,25		82,85		83,66		84,38		85,05		85,05		
17	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk	87,51%	88,11%	0	89,78%	500.000.000	91,45%	574.634.992	93,12%	635.120.133	94,79%	707.557.249	94,79%	2.417.312.374	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
18	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil	91,01%	96,50%	0	96,53%	300.000.000	96,55%	344.780.995	96,58	381.072.041	96,60%	424.534.306	96,60%	1.450.387.343	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
19	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan data administrasi kependudukan secara elektronik	100%	100%	724.500.000	100%	906.343.689	100%	1.024.097.062	100%	1.139.784.262	100%	1.278.335.819	100%	5.073.060.832	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
20	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Dokumen Profil Kependudukan yang Tersusun	100%	100%	0	100%	50.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	275.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
21	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Funsgi DPRD yang terfasilitasi	100%	100%	17.991.120.000	100%	33.676.868.279	100%	38.703.813.867	100%	42.777.714.112	100%	47.656.624.540	100%	180.806.140.798	Sekretariat DPRD
22	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	2.028.175.500	100%	877.230.000	100%	1.008.176.000	100%	1.114.300.000	100%	1.241.400.000	100%	6.269.281.500	Kecamatan Balikpapan Barat
23	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	N/A	16%	4.101.604.978	17%	4.281.845.000	18%	4.921.020.000	19%	5.438.950.000	20%	6.059.345.000	20%	24.802.764.978	Kecamatan Balikpapan Barat

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	100%	100%	270.000.000	100%	281.800.000	100%	323.900.000	100%	358.000.000	100%	398.850.000	100%	1.632.550.000	Kecamatan Balikpapan Barat
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	938.000.000	100%	629.000.000	100%	1.125.396.863	100%	1.243.854.299	100%	1.385.719.143	100%	5.321.970.305	Kecamatan Balikpapan Selatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	7,99%	8,00%	5.788.383.885	8,25%	6.393.026.228	8,50%	6.944.807.107	8,75%	7.675.806.163	9%	8.551.251.976	9%	35.353.275.359	Kecamatan Balikpapan Selatan
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	100%	100%	351.000.000	100%	366.427.377	100%	421.123.986	100%	465.450.809	100%	518.536.694	100%	2.122.538.866	Kecamatan Balikpapan Selatan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	835.000.000	100%	1.035.750.000	100%	1.106.522.500	100%	1.177.318.175	100%	1.248.137.720	100%	5.402.728.395	Kecamatan Balikpapan Kota
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	N/A	10,00%	3.827.298.350	10,20%	3.995.518.224	10,40%	4.591.929.166	10,60%	5.075.268.131	10,80%	5.654.115.765	10,80%	23.144.129.636	Kecamatan Balikpapan Kota
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	N/A	100%	188.000.000	100%	196.263.097	100%	225.559.286	100%	249.301.288	100%	277.734.754	100%	1.136.858.425	Kecamatan Balikpapan Kota
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100%	100%	824.957.000	100%	306.000.000	100%	486.000.000	100%	1.075.000.000	100%	1.350.000.000	100%	4.041.957.000	Kecamatan Balikpapan Timur
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16,25%	16,35%	3.860.794.050	16,45%	4.592.825.850	16,55%	5.458.866.753	16,65%	5.870.000.000	16,75%	6.078.000.000	16,75%	25.860.486.653	Kecamatan Balikpapan Timur
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	20%	100%	304.880.000	100%	305.000.000	100%	665.789.974	100%	665.789.974	100%	700.000.000	100%	2.641.459.948	Kecamatan Balikpapan Timur
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	1.055.639.000	100%	1.102.037.123	100%	1.266.538.187	100%	1.399.851.928	100%	1.559.508.710	81,45	6.383.574.948	Kecamatan Balikpapan Utara

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	DAN PELAYANAN PUBLIK															
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	N/A	15%	5.542.200.700	16%	5.785.795.063	17%	6.649.440.600	18%	7.349.349.859	19%	8.187.562.475	19%	33.514.348.697	Kecamatan Balikpapan Utara
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	100%	100%	361.675.000	100%	377.571.572	100%	433.931.674	100,00%	479.606.614	100%	534.307.005	100%	2.187.091.865	Kecamatan Balikpapan Utara
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	754.603.595	100%	848.919.058	100%	985.019.344	100%	1.050.178.894	100%	1.161.159.470	100%	4.799.880.361	Kecamatan Balikpapan Tengah
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	N/A	12,75%	4.353.146.150	12,75%	4.753.766.916	12,75%	5.466.831.954	12,75%	6.081.270.023	12,75%	6.754.564.019	12,75%	27.409.579.062	Kecamatan Balikpapan Tengah
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	N/A	100%	191.905.000	100%	246.015.010	100%	304.917.261	100%	341.208.575	100%	390.237.559	100%	1.474.283.405	Kecamatan Balikpapan Tengah
25	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan	66,0%	67,0%	900.000.000	68%	900.000.000	69%	1.215.000.000	70%	1.640.250.000	71%	2.214.337.500	71%	6.869.587.500	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
	MISI 2: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS TINGGI															
	TUJUAN: MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL SEHAT DAN BERDAYA SAING	IPM	80,01	80,11		80,31		80,51		80,71		80,91		80,91		
	SASARAN: MENINGKATNYA KUALITAS DAN AKSESIBILITAS PENDIDIKAN	INDEKS PENDIDIKAN	0,7487	0,7500		0,7506		0,7512		0,7518		0,7524		0,7524		
26	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)	86,73	86,93	254.941.541.801	87,03	307.074.699.100	87,13	352.911.734.554	87,23	390.058.647.430	87,33	432.545.858.631	87,33	1.737.532.481.516	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
27	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	54,55%	66,67%	423.500.000	77,78%	424.384.137	88,89%	487.731.951	94,44%	539.069.819	100%	600.552.145	100%	2.475.238.052	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualifikasi Minimal D-IV / S1	45,83%	90,95%	1.469.500.000	91,45%	1.018.624.347	91,95%	1.170.674.387	92,45%	1.293.897.661	92,95%	3.441.470.081	92,95%	8.394.166.476	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
29	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin (PAUD/SD/SMP)	93,73%	98,98%	200.000.000	99,03%	208.030.680	99,08%	239.083.416	99,13%	264.248.946	99,18%	294.387.231	99,18%	1.205.750.273	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	SASARAN: MENINGKATNYA KUALITAS DAN AKSESIBILITAS KESEHATAN	INDEKS KESEHATAN	0,8383	0,8385		0,8388		0,8391		0,8394		0,8397		0,8397		
30	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,70%	80%	246.809.000.000	81%	217.318.763.508	82%	249.757.931.850	84%	276.047.043.904	85%	307.530.932.864	85%	1.297.463.672.126	Dinas Kesehatan
31	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi dan berijin	80%	82%	1.210.000.000	84%	1.263.182.697	86%	1.451.737.958	88%	1.604.545.525	90%	1.787.548.148	90%	7.317.014.328	Dinas Kesehatan
32	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Ijin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan Minum yang Diterbitkan	70%	100%	1.235.000.000	100%	1.289.281.513	100%	1.481.732.544	100%	1.637.697.292	100%	1.824.480.961	100%	7.468.192.310	Dinas Kesehatan
33	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	80%	82%	4.750.000.000	84%	4.958.775.050	86%	5.698.971.322	88%	6.298.835.737	90%	7.017.234.464	90%	28.723.816.573	Dinas Kesehatan
	SASARAN: MENINGKATNYA KUALITAS LITERASI MASYARAKAT	INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT	N/A	10,5		11		11,5		12		12,5		12,5		
34	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang Memenuhi Standar Nasional	3%	4%	1.055.000.000	5%	1.101.370.037	6%	1.265.771.525	7%	1.399.004.569	8%	1.558.564.707	8%	6.379.710.838	Dinas Perpustakaan dan Arsip
35	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Arsip yang dikelola	57%	60%	320.000.000	70%	334.064.845	80%	383.930.700	90%	424.342.618	100%	472.740.006	100%	1.935.078.169	Dinas Perpustakaan dan Arsip
36	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip yang dilindungi dan terselamatkan	46%	55%	160.000.000	65%	167.032.423	75%	191.965.350	85%	212.171.309	100%	236.370.003	100%	967.539.085	Dinas Perpustakaan dan Arsip
37	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Perizinan Penggunaan Arsip	0%	0%	40.000.000	0%	41.758.106	100%	47.991.337	100%	53.042.827	100%	59.092.501	100%	241.884.771	Dinas Perpustakaan dan Arsip

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	SASARAN: MENINGKATNYA KUALITAS PEMUDA	INDEKS DAYA SAING KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN	0,020	0,021		0,022		0,023		0,024		0,025		0,025		
38	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang Kreatif, Inovatif, dan Mandiri	0.02%	2.30%	6.400.000.000	2,40%	7.000.000.000	2,50%	8.045.000.000	2,60%	8.900.000.000	2,70%	9.915.000.000	2,70%	40.260.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
39	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet yang Berprestasi	5.9%	25,00%	29.016.000.000	7,00%	19.000.000.000	6.2%	21.800.000.000	7,40%	24.000.000.000	26.2%	26.737.000.000	26.2%	120.553.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
40	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan Aktif	N/A	100%	1.150.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.150.000.000	100%	1.270.000.000	100%	1.415.000.000	100%	5.985.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
	SASARAN: MENINGKATNYA KELESTARIAN WARISAN BUDAYA DAERAH	INDEKS WARISAN BUDAYA	0,4920	0,4960		0,4962		0,4964		0,4965		0,4975		0,4975		
41	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Peningkatan Karya, Bahasa dan Sastra yang Bercirikan Kearifan Lokal Balikpapan	N/A	0%	0	11,11%	254.042.809	33,33%	278.780.352	55,56%	336.878.721	77,78%	375.300.622	77,78%	1.245.002.504	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
42	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Kebudayaan	N/A	34,90%	1.497.545.000	45,00%	1.175.217.243	55,10%	1.250.641.902	67,98%	1.492.808.263	78,08%	1.631.033.039	78,08%	7.047.245.447	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
43	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kelompok Sanggar Seni yang Terlibat dalam Festival Seni	19,90%	24,88%	425.000.000	27,36%	260.988.161	34,83%	313.129.272	37,31%	346.088.748	39,80%	385.561.077	39,80%	1.730.767.258	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
44	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang dilibatkan dalam pengembangan sejarah lokal	N/A	26,67%	175.000.000	33,33%	175.093.224	46,67%	201.229.387	60,00%	222.410.463	80,00%	247.776.959	80,00%	1.021.510.033	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
45	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	87,50%	94,12%	1.100.000.000	95,59%	1.123.019.611	97,06%	1.190.652.730	98,53%	1.397.750.325	100,00%	1.589.201.333	100,00%	6.400.623.999	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
46	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase SDM Pengelola Permuseuman yang tersertifikasi	N/A	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	55,56%	200.000.000	55,56%	200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	SASARAN: MENINGKATNYA KUALITAS PEMBANGUNAN BERBASIS PENGARUSUTAMAAN GENDER	PERSENTASE ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG)	14,43%	17%		25%		35%		45%		60%		60%		
47	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Jumlah OPD yang Telah Melakukan Penyusunan Anggaran yang Responsif Gender	27.80%	82,40%	375.000.000	88,24%	879.901.935	97,06%	1.108.735.639	100%	1.255.050.209	100%	1.480.008.488	100%	5.098.696.271	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																Keluarga Berencana
48	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO Per 100.000 Penduduk Perempuan	11,46	9,08	250.000.000	8,50	671.111.407	8,36	868.778.956	8,19	989.836.074	8,01	1.184.545.991	8,01	3.964.272.428	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
49	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kecamatan yang Memiliki Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	57.14%	71.43%	600.000.000	71.43%	1.036.494.831	71.43%	1.288.703.155	85.71%	1.453.960.811	100,00%	1.701.605.368	100,00%	6.080.764.165	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
50	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang Memiliki Data Terpilah	11,76%	14,71%	75.000.000	33,33%	332.635.384	36,11%	348.317.091	38,89%	348.676.354	41,67%	369.131.772	41,67%	1.473.760.601	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
51	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Gugus Tugas KLA	0,00%	25,00%	595.000.000	32,00%	899.457.142	40,00%	972.204.478	45,00%	1.038.233.108	50,00%	1.137.334.282	50,00%	4.642.229.010	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
52	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Penyelesaian Penanganan klien pada UPTD PPA	72.31%	65,00%	860.000.000	67,00%	1.331.888.902	68,00%	1.600.646.848	70,00%	1.798.739.188	71,50%	2.085.706.623	71,50%	7.676.981.561	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
53	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi	N/A	5,88%	750.000.000	11,76%	1.037.303.418	29,41%	1.158.170.910	44,12%	1.243.774.064	58,82%	1.366.317.722	58,82%	5.555.566.114	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
54	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Nilai Swadaya Masyarakat dalam pembangunan di kelurahan	83.875.636.859	83.900.000.000	7.154.345.900	83.950.000.000	4.000.000.000	84.050.000	4.500.000.000	84.150.000000	5.000.000.000	84.550.000.000	5.500.000.000	420.600.000.000.000	26.154.345.900	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
55	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase tindak lanjut Rekomendasi Kebijakan Terkait Pengendalian Penduduk	60,00%	62,00%	180.000.000	64,00%	880.710.521	66,00%	978.203.395	68,00%	1.044.863.462	70,00%	1.144.720.844	70,00%	4.228.498.222	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																Keluarga Berencana
56	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) (Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani / Jumlah Pasangan Usia Subur x 100%)	14.04%	13,75%	580.000.000	13,40%	859.831.468	13,10%	954.207.726	11,25%	1.127.689.410	11,20%	1.115.174.594	11,20%	4.636.903.198	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
57	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan/ poktan	8,51%	10,74%	1.000.000.000	12,75%	1.298.291.578	15,80%	1.458.116.769	18,35%	1.575.291.734	20,35%	1.735.645.852	20,35%	7.067.345.933	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	MISI 3: MENYEDIAKAN INFRASTRUKTUR KOTA YANG MEMADAI															
	TUJUAN: MENINGKATKAN KINERJA LAYANAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN	INDEKS KEPUASAN LAYANAN INFRASTRUKTUR	82,03	82		82,5		83		83,5		84		84		
	SASARAN: MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR YANG TERPADU DAN BERKUALITAS	INDEKS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR	77,80	78,20		78,78		79,12		79,55		80,02		80,02		
58	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan	55,88%	58,82%	60.750.000.000	61,76%	185.000.000.000	64,71%	203.500.000.000	67,65%	223.850.000.000	70,59%	246.235.000.000	70,59%	919.335.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
59	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	96,79%	96,95%	500.000.000	97,10%	2.500.000.000	97,25%	4.300.000.000	97,39%	5.500.000.000	97,53%	6.800.000.000	97,53%	19.600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
60	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan	97,98%	98,49%	10.000.000.000	98,54%	15.000.000.000	98,80%	20.000.000.000	99,05%	285.000.000.000	99,29%	330.000.000.000	99,29%	660.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
61	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Penyediaan Sarana Persampahan	97,82%	97,82%	2.000.000.000	97,82%	5.000.000.000	98%	7.500.000.000	98%	10.000.000.000	98,36%	17.400.000.000	98,36%	41.900.000.000	Dinas Pekerjaan Umum

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
62	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	85,11%	85,36%	45.480.622.000	87,36%	164.350.000.000	89,12%	174.183.000.000	91,47%	180.993.000.000	93,42%	182.962.000.000	93,42%	747.968.622.000	Dinas Pekerjaan Umum
63	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Pelayanan Jalan Lingkungan	80%	81%	41.000.000.000	76,36%	28.000.000.000	78,18%	30.800.000.000	80%	33.880.000.000	81,82%	37.268.000.000	81,82%	170.948.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
64	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan yang Memiliki Izin	92,38%	92,89%	37.650.000.000	93,39%	60.000.000.000	93,90%	66.000.000.000	94,41%	72.600.000.000	94,91%	79.860.000.000	94,91%	316.110.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
65	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Presentase Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi	100%	100%	750.000.000	100%	1.450.000.000	100%	1.950.000.000	100%	1.950.000.000	100%	1.950.000.000	100%	8.050.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
66	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	52,15%	52,75%	112.000.000.000	53,09%	318.827.500.000	53,46%	350.000.000.000	53,85%	400.000.000.000	54,26%	450.000.000.000	54,26%	1.630.827.500.000	Dinas Pekerjaan Umum
67	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase sarana dan prasarana jalan layak fungsi.	83%	85%	43.726.100.000	87%	44.314.560.000	89%	44.029.660.000	91%	47.160.884.620	93%	44.482.360.000	93%	223.713.564.620	Dinas Perhubungan
	0	Persentase load faktor angkutan orang umum.	42%	42%	0	47%	10.736.673.028	52%	11.610.000.000	57%	19.705.000.000	62%	16.405.000.000	62%	58.456.673.028	Dinas Perhubungan
68	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pelayanan kepelabuhanan	55%	62%	865.000.000	64%	2.150.000.000	66%	3.425.000.000	68%	5.425.000.000	70%	925.000.000	70%	12.790.000.000	Dinas Perhubungan
	SASARAN: MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR YANG TERPADU DAN BERKUALITAS	PERSENTASE PERMUKIMAN LAYAK HUNI	98,59%	99,05%		99,32%		99,55%		99,78%		100%		100%		
69	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	N/A	0%	10.185.450.210	0,71%	10.200.000.000	1,42%	11.220.000.000	2,13%	12.342.000.000	2,84%	13.576.200.000	2,84%	57.523.650.210	Dinas Perumahan dan Permukiman
70	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luasan Kawasan Kumuh (Ha)	153,30 Ha	103,39 Ha	1.600.000.000	74,40 Ha	5.250.000.000	49,40 Ha	4.915.000.000	24,40 Ha	6.077.500.000	0 Ha	9.105.000.000	0 Ha	26.947.500.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
71	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Tangga di Luar SK Kumuh yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	0,01%	0,01%	700.000.000	0,01%	40.000.000	0,04%	1.662.000.000	0,08%	2.592.600.000	0,12%	2.623.630.000	0,12%	7.618.230.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
72	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan PSU pada Lingkungan Perumahan	1,04%	1,39%	1.400.000.000	1,74%	1.500.000.000	2,08%	1.650.000.000	2,43%	1.815.000.000	2,78%	1.996.500.000	2,78%	8.361.500.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
73	PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	78,00%	79,00%	195.000.000	80,00%	441.570.765	82,00%	633.957.770	85,00%	680.583.763	87,00%	608.076.941	87,00%	2.559.189.239	Dinas Sosial

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TAMAN MAKAM PAHLAWAN															
	MISI 4: MEWUJUDKAN KOTA NYAMAN DIHUNI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN															
	TUJUAN: MEWUJUDKAN LINGKUNGAN YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN	LIVEABLE CITY INDEX	81,69	81,69		82,19		82,69		83,19		83,69		83,69		
	SASARAN: MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	68,07	68,15		68,23		68,31		68,41		68,51		68,51		
74	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan Data Dokumen Perencanaan	31,25%	37,50%	100.000.000	50,00%	130.000.000	75,00%	980.000.000	87,50%	210.000.000	100%	190.000.000	100%	1.610.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
75	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang Dilaksanakan	100%	100%	1.070.000.000	100%	1.560.000.000	100%	2.925.000.000	100%	3.100.000.000	100%	3.475.000.000	100%	12.130.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
76	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang dikelola	10,57%	10,57%	27.050.000.000	10,59%	29.200.000.000	10,61%	63.400.000.000	10,63%	33.925.000.000	10,65%	38.950.000.000	10,65%	192.525.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
77	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah B3 Yang Melaporkan Limbahnya	26,32%	34,21%	50.000.000	44,74%	580.000.000	55,26%	650.000.000	65,79%	400.000.000	76,32%	350.000.000	76,32%	2.030.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
78	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Usaha atau Kegiatan yang Memiliki Izin Lingkungan	18,29%	26,83%	105.000.000	29,27%	225.000.000	31,71%	475.000.000	32,93%	525.000.000	34,15%	575.000.000	34,15%	1.905.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
79	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	persentase peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan LH	100%	100%	300.000.000	100%	370.000.000	100%	1.075.000.000	100%	1.075.000.000	100%	1.075.000.000	100%	3.895.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
80	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat yang terselenggara	100%	100%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	1.650.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
81	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan yang tertangani	100%	100%	125.000.000	100%	150.000.000	100%	250.000.000	100%	300.000.000	100%	350.000.000	100%	1.175.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
82	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan persampahan	97,66%	99%	63.233.044.600	99%	67.575.000.000	99%	79.725.000.000	100%	87.675.000.000	100%	93.875.000.000	100%	392.083.044.600	Dinas Lingkungan Hidup
	SASARAN: MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PEMANFAATAN RUANG YANG SESUAI DENGAN PERUNTUKKAN	89%	89,2%		89,4%%		89,6%		89,8%		90%		90%		
83	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	0%	14%	4.500.000.000	22%	19.200.000.000	27%	19.180.000.000	31%	22.850.000.000	33%	13.550.000.000	33%	79.280.000.000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
84	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	N/A	0,14	1.900.000.000	0,15	2.000.000.000	0,21	2.500.000.000	0,22	3.000.000.000	0,27	3.500.000.000	1	12.900.000.000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
85	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase luas pemanfaatan ijin lokasi yang diterbitkan	N/A	70,00%	0	72,00%	100.000.000	74,00%	150.000.000	76,00%	150.000.000	78,00%	150.000.000	78,00%	550.000.000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
86	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Fasilitasi Penanganan Sengketa Tanah Garapan Melalui Mediasi	N/A	41,70%	30.000.000	40,00%	30.000.000	39,00%	30.000.000	38,00%	30.000.000	37,50%	30.000.000	37,50%	150.000.000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
87	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Luas Tanah yang diberikan Ganti Rugi yang dilaksanakan oleh DPPR	62,16%	66,33%	64.073.760.000	69,49%	47.950.000.000	72,65%	50.000.000.000	76,44%	60.000.000.000	80,24%	70.000.000.000	80,24%	292.023.760.000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
88	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Luas tanah yang Sudah Dimanfaatkan	88,00%	88,00%	250.000.000	89,00%	300.000.000	90,00%	350.000.000	91,00%	400.000.000	92,00%	450.000.000	92,00%	1.750.000.000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	SASARAN: MENINGKATNYA KAPASITAS KETAHANAN BENCANA DAN KETERTIBAN KOTA	INDEKS RESIKO BENCANA	108	107		105		103		101		99				

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
89	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	14%	14%	2.850.000.000	13,5%	3.788.007.600	13%	5.439.407.660	12,5%	7.738.709.192	12%	9.645.000.000	12%	29.461.124.452	Satuan Polisi Pamong Praja
90	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	83,20%	85%	1.110.000.000	87,50%	1.720.000.000	90%	2.405.000.000	92%	3.685.000.000	94%	7.660.000.000	94%	16.580.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
91	PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	83,20%	85%	5.820.000.000	87,50%	6.840.000.000	90%	7.360.000.000	92,50%	7.860.000.000	95%	7.240.000.000	95%	35.120.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	SASARAN: MENINGKATNYA KAPASITAS KETAHANAN BENCANA DAN KETERTIBAN KOTA	INDEKS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	0,5601	0,8000		0,8267		0,8575		0,8675		0,8794		0,8794		
92	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional	N/A	60%	745.000.000	62%	777.744.718	64%	893.838.660	66%	987.922.658	68%	1.100.597.826	68%	4.505.103.862	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
93	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik	N/A	66,60%	1.554.997.960	100%	1.623.344.229	100%	1.865.660.796	100%	2.062.037.204	100%	2.297.217.953	100%	9.403.258.142	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
95	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Yang Telah Melapor Pada Pemerintah Kota Balikpapan	N/A	83%	970.000.000	84%	1.012.634.063	85%	1.163.789.933	89%	1.286.288.561	89%	1.432.993.143	89%	5.865.705.700	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
95	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase Pemuda yang Mengikuti Sosialisasi Konsep P4GN	N/A	80%	600.000.000	86%	626.371.585	92%	719.870.062	95%	795.642.409	98%	886.387.511	98%	3.628.271.567	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
96	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN	Persentase Potensi Konflik yang telah dilakukan monitoring	64%	80%	1.250.000.000	83%	1.304.940.803	88%	1.499.729.295	88%	1.657.588.352	89%	1.846.640.648	89%	7.558.899.098	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL															
	MISI 5: MENGEMBANGKAN EKONOMI KERAKYATAN YANG KREATIF															
	TUJUAN: MENINGKATKAN PEMERATAAN EKONOMI LOKAL DAN PENDAPATAN MASYARAKAT MELALUI EKONOMI INKLUSIF	INDEKS GINI	0,311	0,300		0,300		0,300		0,300		0,300		0,300		
	SASARAN: MENINGKATNYA PERTUMBUHAN USAHA MIKRO DAERAH PENURUNAN TINGAKT PENGANGGURAN DAN PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN	PERSENTASE PERTUMBUHAN UMKM	3,09%	3,14%		3,17%		3,19%		3,33%		3,45%		3,45%		
97	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi yang Telah Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	5,23%	5,44%	0	5,65%	50.000.000	5,86%	100.000.000	6,07%	100.000.000	6,28%	100.000.000	6,28%	350.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
98	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT	18,20%	19,87%	268.125.700	20,92%	268.125.700	21,97%	350.000.000	23,01%	350.000.000	24,06%	350.000.000	24,06%	1.586.251.400	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
99	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang Meningkat Status Kesehatannya	N/A	50,00%	0	51,85%	50.000.000	53,57%	100.000.000	55,17%	150.000.000	56,67%	150.000.000	56,67%	450.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
100	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Pengelola Koperasi yang meningkat kapasitasnya	19,67%	25,10%	0	30,68%	100.000.000	37,66%	150.000.000	46,03%	250.000.000	55,09%	250.000.000	55,09%	750.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
	0	Persentase SDM Pengelola Koperasi yang meningkat kapasitasnya (sumber dana : DAK non fisik)	0	0	0	32,78% %	1.000.000.000	41,35%	1.000.000.000	50,07%	1.000.000.000	59,34%	1.000.000.000	59,34%	4.000.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
101	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Koperasi Sehat	N/A	3,35%	0	5,02%	50.000.000	7,53%	100.000.000	10,88%	250.000.000	15,06%	250.000.000	15,06%	650.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro,

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															Kecil, Menengah dan Perindustrian
102	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	34,75%	81,68%	1.330.200.000	83,32%	1.330.200.000	84,98%	1.450.000.000	86,68%	1.450.000.000	88,41%	1.450.000.000	88,41%	7.010.400.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
103	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang Meningkat Omsetnya	5,17%	5,21%	2.125.400.000	5,25%	2.136.326.051	5,28%	2.800.000.000	5,32%	3.200.000.000	5,36%	3.200.000.000	5,36%	13.461.726.051	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
104	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	0	1,10%	3.477.570.900	1,31%	3.127.570.900	1,62%	4.111.597.136	2,12%	4.942.846.057	2,60%	6.710.699.926	2,60%	22.370.284.919	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
	0	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (Sumber Dana : DAK/Bankeu)	0	0,00%	0	1,31%	22.100.000.000	1,62%	22.100.000.000	2,12%	22.100.000.000	2,60%	22.100.000.000	2,60%	88.400.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
105	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Hasil Pemantauan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait	2,88%	12,01%	115.000.000	12,96%	115.000.000	13,89%	115.000.000	14,80%	120.750.000	15,69%	200.000.000	15,69%	665.750.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
106	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Penyediaan Informasi Industri yang Lengkap dan Terkini	22,06%	45,45%	210.000.000	58,33%	210.000.000	61,54%	210.000.000	64,29%	220.500.000	66,67%	300.000.000	66,67%	1.150.500.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
	SASARAN: MENINGKATNYA PERTUMBUHAN USAHA MIKRO DAERAH PENURUNAN TINGAKT PENGANGGURAN DAN PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)	9	9		8,46		8,22		7,98		7,74		7,74		
107	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun	N/A	3,2%	400.000.000	3,3%	115.000.000	3,4%	135.440.100	3,5%	143.088.836	3,6%	160.120.272	3,6%	953.649.208	Dinas Ketenagakerjaan
108	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan yang tersalur	54%	54,00%	1.150.000.000	55,00%	1.094.000.000	56,00%	1.257.334.200	57,00%	1.389.731.491	58,00%	1.548.299.854	58,00%	6.439.365.545	Dinas Ketenagakerjaan

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
109	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	23%	23,00%	490.000.000	23,50%	500.731.000	23,60%	572.219.538	23,70%	632.735.756	23,80%	704.225.905	23,80%	2.899.912.199	Dinas Ketenagakerjaan
110	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan perjanjian bersama	68,10%	69,00%	515.000.000	70,40%	537.608.500	72,00%	617.873.449	73,00%	682.935.523	75,00%	760.858.466	75,00%	3.114.275.938	Dinas Ketenagakerjaan
	SASARAN: MENINGKATNYA PERTUMBUHAN USAHA MIKRO DAERAH PENURUNAN TINGAKT PENGANGGURAN DAN PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN	TINGKAT KEMISKINAN	2,57	2,42		2,39		2,38		2,37		2,36		2,36		
111	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pembinaan	60%	80%	875.000.000	86,66%	1.361.260.930	90%	1.589.821.335	93,33%	1.794.008.312	96,66%	1.872.357.238	96,66%	7.492.447.815	Dinas Sosial
112	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi	75.06%	77.77%	1.183.000.000	78.94%	1.460.489.746	80.00%	1.678.497.027	80.95%	1.855.172.882	81.81%	2.066.760.213	81.81%	8.243.919.868	Dinas Sosial
113	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	80.77%	82.92%	1.469.000.000	85,36%	1.533.566.431	87.80%	1.762.481.868	90.24%	1.947.997.831	92.68%	2.170.172.090	92.68%	8.883.218.220	Dinas Sosial
114	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	80,00%	81,00%	650.000.000	82,00%	1.032.000.000	83,00%	1.101.000.000	85,00%	1.240.000.000	85,00%	1.030.000.161	85,00%	5.053.000.161	Dinas Sosial
	TUJUAN: MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI	PERTUMBUHAN EKONOMI	-0,69%	4,10%		4,45%		4,80%		5,15%		5,5,%		5,5,%		
	SASARAN: MENINGKATNYA NILAI REALISASI INVESTASI DAERAH	NILAI REALISASI INVESTASI (DALAM TRILIUN RUPIAH)	3,018	3,330		3,530		3,780		4,080		4,440		4,440		
115	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Mendapat Manfaat Insentif Bidang Penanaman Modal	N/A	5,0%	300.000.000	5%	315.000.000	5%	425.250.000	5%	574.087.500	5%	775.018.000	25%	2.389.355.500	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
116	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Presentase Minat Investasi dalam Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	30,0%	80,0%	650.000.000	85%	662.676.000	90%	915.409.000	95%	1.024.416.000	100%	1.096.987.000	100%	4.349.488.000	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
117	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan (debottlenecking) yang difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya	N/A	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	540.000.000	100%	729.000.000	100%	984.150.000	100%	3.053.150.000	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
118	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Berlaku Efektif	83,45%	84,0%	500.000.000	85%	525.000.000	86%	708.750.000	87%	956.812.500	88%	1.291.696.000	88%	3.982.258.500	Dinas Penananam Modal dan Perijinan Terpadu
	SASARAN: MENINGKATNYA KETAHANAN PANGAN	SKOR POLA PANGAN HARAPAN	87	87		87		88		89		90		90		
119	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Infrastruktur yang Tersedia	N/A	20%	0	25%	50.000.000	30%	60.000.000	35%	150.000.000	40%	200.000.000	40%	460.000.000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
120	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	N/A	0.024%	325.000.000	0.053%	341.250.000	0.081%	450.000.000	0.110%	605.000.000	0.143%	815.000.000	0.143%	2.536.250.000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
121	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	N/A	50%	0	55%	45.000.000	60%	50.000.000	65%	65.000.000	70%	75.000.000	70%	235.000.000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
122	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang aman	100%	88%	250.000.000	89%	250.000.000	89%	275.000.000	90%	300.000.000	90%	350.000.000	90%	1.425.000.000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
123	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	4000	4200	475.000.000	4300	375.000.000	4400	550.000.000	4500	825.000.000	4600	1.000.000.000	22000	3.225.000.000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
124	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	275	289	1.125.000.000	297	1.325.000.000	304	1.430.000.000	312	1.645.000.000	319	1.375.000.000	1,521	6.900.000.000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
125	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	34,50%	40%	375.000.000	45%	400.000.000	50%	450.000.000	55%	480.000.000	60%	650.000.000	60%	2.355.000.000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
126	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Sarana Pertanian yang tersedia	10%	15%	700.000.000	20%	950.000.000	25%	1.000.000.000	30%	1.200.000.000	35%	1.350.000.000	35%	5.200.000.000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
127	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia	75%	75%	485.000.000	75%	1.200.000.000	85%	1.130.000.000	85%	1.200.000.000	90%	1.500.000.000	90%	5.515.000.000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
128	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN	Persentase Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terlayani	60%	65%	570.000.000	70%	600.000.000	75%	700.000.000	80%	750.000.000	85%	900.000.000	85%	3.520.000.000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	MASYARAKAT VETERINER															
129	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Lahan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (%)	40%	40%	0	45%	30.000.000	50%	50.000.000	55%	75.000.000	60%	100.000.000	60%	255.000.000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
130	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Rekomendasi yang Diterbitkan (persen)	50%	50%	0	55%	25.000.000	60%	35.000.000	65%	45.000.000	70%	60.000.000	70%	165.000.000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
	SASARAN: MENINGKATNYA KUNJUNGAN WISATAWAN LOKAL DAN INTERNASIONAL	ANGKA KUNJUNGAN WISATAWAN (DALAM JUTA ORANG)	1,08	1,20		1,50		1,90		2,50		3,40		3,40		
131	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	10,00%	3,00%	6.100.000.000	3,00%	8.000.000.000	4,00%	9.194.000.000	6,00%	10.200.000.000	6,00%	11.363.000.000	6,00%	44.857.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
132	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Prosentase Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Pariwisata	N/A	17,00%	4.750.000.000	20,00%	5.000.000.000	21,00%	5.750.000.000	24,00%	6.360.000.000	26,00%	7.085.000.000	26,00%	28.945.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
	SASARAN: MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI KREATIF	PERSENTASE PERTUMBUHAN PELAKU EKONOMI KREATIF	N/A	2,20%		2,42%		2,66%		2,93%		3,22%		3,22%		
133	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Sub sektor ekraf yang terfasilitasi dalam pendaftaran kekayaan intelektualnya	N/A	12%	300.000.000	18%	850.000.000	24%	974.000.000	29%	1.095.000.000	35%	1.217.000.000	35,00%	4.436.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
134	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	N/A	8%	800.000.000	10%	850.000.000	12%	976.800.000	14%	1.080.000.000	16%	1.203.000.000	16,00%	4.909.800.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
	SASARAN: MENINGKATNYA PERTUMBUHAN SEKTOR UNGGULAN DAERAH	PERSENTASE PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR PERDAGANGAN	-0,56%	3,50%		3,97%		4%		4,25%		5,00%		5,00%		
135	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Telah Diverifikasi dan Memperoleh Rekomendasi	50%	50%	355.000.000	60,00%	372.750.000	65,00%	300.000.000	70,00%	300.000.000	75,00%	300.000.000	75,00%	1.627.750.000	Dinas Perdagangan
136	PROGRAM PENINGKATAN SARANA	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola	80%	80%	11.499.996.400	80,00%	12.649.996.040	87,00%	15.812.495.050	87,00%	19.716.653.210	93,00%	21.499.056.151	93,00%	81.178.196.851	Dinas Perdagangan

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	DISTRIBUSI PERDAGANGAN															
137	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Penurunan Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	6%	5,80%	570.000.000	5,60%	598.500.000	5,40%	748.125.000	5,20%	860.343.750	5,00%	903.360.000	5,00%	3.680.328.750	Dinas Perdagangan
138	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Bersih Non Migas	1020 juta dollar	1175 juta dollar	680.000.000	1350 juta dollar	113.877.000	1550 juta dollar	232.809.000	1785 juta dollar	363.168.000	2050 juta dollar	407.693.000	2050 juta dollar	1.797.547.000	Dinas Perdagangan
139	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	32%	70%	520.000.000	71,00%	546.000.000	73,00%	682.500.000	74,00%	750.750.000	76,00%	788.287.500	76,00%	3.287.537.500	Dinas Perdagangan
140	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pelaku Binaan yang Meningkat Omsetnya	50%	60%	120.000.000	60,00%	150.000.000	70,00%	275.000.000	70,00%	300.000.000	80,00%	325.000.000	80,00%	1.170.000.000	Dinas Perdagangan

Sumber : Bappedalitbang, diolah 2021

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan arah kebijakan dan kebijakan umum pembangunan, maka disusun program-program pembangunan perangkat daerah yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan, berdasarkan janji politik Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan terpilih untuk periode 2021-2026.

Selain itu, untuk penyusunan program pembangunan Kota Balikpapan juga memperhatikan kapasitas riil Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana disajikan di Bab 3 Tabel 3.16 dengan juga memanfaatkan peluang pembiayaan pembangunan alternatif (Non APBD). Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap perencana program, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Rencara Strategis Perangkat Daerah.

Melalui penyajian Program dan Anggaran indikatif yang disusun berdasarkan aspek-aspek pembangunan dan urusan diharapkan dapat menjelaskan program apa saja yang direncanakan dalam RPJMD guna untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) berdasarkan tiap urusan yang diampu. Penyajian secara detail program-program RPJMD yang selaras dengan Program Perangkat Daerah sebagaimana disajikan dalam tabel 7.1 di bawah ini.

Tabel 7.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Balikpapan

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Balikpapan																
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16	(17)
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**															
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN **(Prioritas II)**	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)	86,73	86,93	254.941.541.801	87,03	307.074.699.100	87,13	352.911.734.554	87,23	390.058.647.430	87,33	432.545.858.631	87,33	1.737.532.481.516	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	54,55%	66,67%	423.500.000	77,78%	424.384.137	88,89%	487.731.951	94,44%	539.069.819	100%	600.552.145	100%	2.475.238.052	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualifikasi Minimal D-IV / S1	45,83%	90,95%	1.469.500.000	91,45%	1.018.624.347	91,95%	1.170.674.387	92,45%	1.293.897.661	92,95%	3.441.470.081	92,95%	8.394.166.476	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin (PAUD/SD/SMP)	93,73%	98,98%	200.000.000	99,03%	208.030.680	99,08%	239.083.416	99,13%	264.248.946	99,18%	294.387.231	99,18%	1.205.750.273	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Peningkatan Karya, Bahasa dan Sastra yang Bercirikan Kearifan Lokal Balikpapan	N/A	0%	0	11,11%	254.042.809	33,33%	278.780.352	55,56%	336.878.721	77,78%	375.300.622	77,78%	1.245.002.504	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**															
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT **(Prioritas II)**	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,70%	80%	246.809.000.000	81%	217.318.763.508	82%	249.757.931.850	84%	276.047.043.904	85%	307.530.932.864	85%	1.297.463.672.126	Dinas Kesehatan
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi dan berijin	80%	82%	1.210.000.000	84%	1.263.182.697	86%	1.451.737.958	88%	1.604.545.525	90%	1.787.548.148	90%	7.317.014.328	Dinas Kesehatan

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Balikpapan																
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16	(17)
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Ijin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan Minum yang Diterbitkan	70%	100%	1.235.000.000	100%	1.289.281.513	100%	1.481.732.544	100%	1.637.697.292	100%	1.824.480.961	100%	7.468.192.310	Dinas Kesehatan
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	80%	82%	4.750.000.000	84%	4.958.775.050	86%	5.698.971.322	88%	6.298.835.737	90%	7.017.234.464	90%	28.723.816.573	Dinas Kesehatan
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**															
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan	55,88%	58,82%	60.750.000.000	61,76%	185.000.000.000	64,71%	203.500.000.000	67,65%	223.850.000.000	70,59%	246.235.000.000	70,59%	919.335.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE **(Prioritas V)**	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota **Sumber Pembiayaan Lainnya (DAK, BANKEU dan Lain-lain)**	52,15%	52,75%	112.000.000.000	53,09%	318.827.500.000	53,46%	350.000.000.000	53,85%	400.000.000.000	54,26%	450.000.000.000	54,26%	1.630.827.500.000	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	96,79%	96,95%	500.000.000	97,10%	2.500.000.000	97,25%	4.300.000.000	97,39%	5.500.000.000	97,53%	6.800.000.000	97,53%	19.600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM **(Prioritas IV)**	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan **Sumber Pembiayaan Lainnya (DAK, BANKEU dan Lain-lain)**	97,98%	98,49%	10.000.000.000	98,54%	15.000.000.000	98,80%	20.000.000.000	99,05%	285.000.000.000	99,29%	330.000.000.000	99,29%	660.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Balikpapan																
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16	(17)
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL **(Prioritas V)**	Persentase Penyediaan Sarana Persampahan	97,82%	97,82%	2.000.000.000	97,82%	5.000.000.000	98%	7.500.000.000	98%	10.000.000.000	98,36%	17.400.000.000	98,36%	41.900.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN **(Prioritas V)**	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab **Sumber Pembiayaan Lainnya (DAK, BANKEU dan Lain-lain)**	85,11%	85,36%	45.480.622.000	87,36%	164.350.000.000	89,12%	174.183.000.000	91,47%	180.993.000.000	93,42%	182.962.000.000	93,42%	747.968.622.000	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN **(Prioritas V)**	Persentase Pelayanan Jalan Lingkungan	80%	81%	41.000.000.000	76,36%	28.000.000.000	78,18%	30.800.000.000	80%	33.880.000.000	81,82%	37.268.000.000	81,82%	170.948.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG **(Prioritas V)**	Persentase Bangunan yang Memiliki Izin	92,38%	92,89%	37.650.000.000	93,39%	60.000.000.000	93,90%	66.000.000.000	94,41%	72.600.000.000	94,91%	79.860.000.000	94,91%	316.110.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Presentase Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi	100%	100%	750.000.000	100%	1.450.000.000	100%	1.950.000.000	100%	1.950.000.000	100%	1.950.000.000	100%	8.050.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	0%	14%	4.500.000.000	22%	19.200.000.000	27%	19.180.000.000	31%	22.850.000.000	33%	13.550.000.000	33%	79.280.000.000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	N/A	0,14	1.900.000.000	0,15	2.000.000.000	0,21	2.500.000.000	0,22	3.000.000.000	0,27	3.500.000.000	1	12.900.000.000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**															

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Balikpapan																
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16	(17)
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN **(Prioritas VI)**	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	N/A	0%	10.185.450.210	0,71%	10.200.000.000	1,42%	11.220.000.000	2,13%	12.342.000.000	2,84%	13.576.200.000	2,84%	57.523.650.210	Dinas Perumahan dan Permukiman
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN **(Prioritas VI)**	Luasan Kawasan Kumuh (Ha) **Sumber Pembiayaan Lainnya (DAK, BANKEU dan Lain-lain)**	153,30 Ha	103,39 Ha	1.600.000.000	74,40 Ha	5.250.000.000	49,40 Ha	4.915.000.000	24,40 Ha	6.077.500.000	0 Ha	9.105.000.000	0 Ha	26.947.500.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1.4.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH **(Prioritas VI)**	Persentase Rumah Tangga di Luar SK Kumuh yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	0,01%	0,01%	700.000.000	0,01%	40.000.000	0,04%	1.662.000.000	0,08%	2.592.600.000	0,12%	2.623.630.000	0,12%	7.618.230.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1.4.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) **(Prioritas VI)**	Persentase Peningkatan PSU pada Lingkungan Perumahan	1,04%	1,39%	1.400.000.000	1,74%	1.500.000.000	2,08%	1.650.000.000	2,43%	1.815.000.000	2,78%	1.996.500.000	2,78%	8.361.500.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**															
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	14%	14%	2.850.000.000	13,5%	3.788.007.600	13%	5.439.407.660	12,5%	7.738.709.192	12%	9.645.000.000	12%	29.461.124.452	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	83,20%	85%	1.110.000.000	87,50%	1.720.000.000	90%	2.405.000.000	92%	3.685.000.000	94%	7.660.000.000	94%	16.580.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Balikpapan																
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16	(17)
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	83,20%	85%	5.820.000.000	87,50%	6.840.000.000	90%	7.360.000.000	92,50%	7.860.000.000	95%	7.240.000.000	95%	35.120.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**															
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL **(Prioritas III)**	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pembinaan	60%	80%	875.000.000	86,66%	1.361.260.930	90%	1.589.821.335	93,33%	1.794.008.312	96,66%	1.872.357.238	96,66%	7.492.447.815	Dinas Sosial
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL **(Prioritas III)**	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi	75.06%	77.77%	1.183.000.000	78.94%	1.460.489.746	80.00%	1.678.497.027	80.95%	1.855.172.882	81.81%	2.066.760.213	81.81%	8.243.919.868	Dinas Sosial
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL **(Prioritas III)**	Persentase Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	80.77%	82.92%	1.469.000.000	85,36%	1.533.566.431	87.80%	1.762.481.868	90.24%	1.947.997.831	92.68%	2.170.172.090	92.68%	8.883.218.220	Dinas Sosial
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA **(Prioritas III)**	Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten / Kota	80,00%	81,00%	650.000.000	82,00%	1.032.000.000	83,00%	1.101.000.000	85,00%	1.240.000.000	85,00%	1.030.000.161	85,00%	5.053.000.161	Dinas Sosial
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	78,00%	79,00%	195.000.000	80,00%	441.570.765	82,00%	633.957.770	85,00%	680.583.763	87,00%	608.076.941	87,00%	2.559.189.239	Dinas Sosial
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**															

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Balikpapan																
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16	(17)
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA **(Prioritas III)**	Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun	N/A	3,2%	400.000.000	3,3%	115.000.000	3,4%	135.440.100	3,5%	143.088.836	3,6%	160.120.272	3,6%	953.649.208	Dinas Ketenagakerjaan
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA **(Prioritas III)**	persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan yang tersalur	54%	54,00%	1.150.000.000	55,00%	1.094.000.000	56,00%	1.257.334.200	57,00%	1.389.731.491	58,00%	1.548.299.854	58,00%	6.439.365.545	Dinas Ketenagakerjaan
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA **(Prioritas III)**	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	23%	23,00%	490.000.000	23,50%	500.731.000	23,60%	572.219.538	23,70%	632.735.756	23,80%	704.225.905	23,80%	2.899.912.199	Dinas Ketenagakerjaan
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL **(Prioritas III)**	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan perjanjian bersama	68,10%	69,00%	515.000.000	70,40%	537.608.500	72,00%	617.873.449	73,00%	682.935.523	75,00%	760.858.466	75,00%	3.114.275.938	Dinas Ketenagakerjaan
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**															
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Jumlah OPD yang Telah Melakukan Penyusunan Anggaran yang Responsif Gender	27.80%	82,40%	375.000.000	88,24%	879.901.935	97,06%	1.108.735.639	100%	1.255.050.209	100%	1.480.008.488	100%	5.098.696.271	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2.8.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO Per 100.000 Penduduk Perempuan	11,46	9,08	250.000.000	8,50	671.111.407	8,36	868.778.956	8,19	989.836.074	8,01	1.184.545.991	8,01	3.964.272.428	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2.8.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kecamatan yang Memiliki Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	57.14%	71.43%	600.000.000	71.43%	1.036.494.831	71.43%	1.288.703.155	85.71%	1.453.960.811	100,00%	1.701.605.368	100,00%	6.080.764.165	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Balikpapan																
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16	(17)
2.8.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang Memiliki Data Terpilah	11,76%	14,71%	75.000.000	33,33%	332.635.384	36,11%	348.317.091	38,89%	348.676.354	41,67%	369.131.772	41,67%	1.473.760.601	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2.8.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Gugus Tugas KLA	0,00%	25,00%	595.000.000	32,00%	899.457.142	40,00%	972.204.478	45,00%	1.038.233.108	50,00%	1.137.334.282	50,00%	4.642.229.010	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2.8.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Penyelesaian Penanganan klien pada UPTD PPA	72.31%	65,00%	860.000.000	67,00%	1.331.888.902	68,00%	1.600.646.848	70,00%	1.798.739.188	71,50%	2.085.706.623	71,50%	7.676.981.561	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**															
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Infrastruktur yang Tersedia	N/A	20%	0	25%	50.000.000	30%	60.000.000	35%	150.000.000	40%	200.000.000	40%	460.000.000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	N/A	0.024%	325.000.000	0.053%	341.250.000	0.081%	450.000.000	0.110%	605.000.000	0.143%	815.000.000	0.143%	2.536.250.000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	N/A	50%	0	55%	45.000.000	60%	50.000.000	65%	65.000.000	70%	75.000.000	70%	235.000.000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang aman	100%	88%	250.000.000	89%	250.000.000	89%	275.000.000	90%	300.000.000	90%	350.000.000	90%	1.425.000.000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**															

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Balikpapan																
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16	(17)
2.10.02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase luas pemanfaatan ijin lokasi yang diterbitkan	N/A	70,00%	0	72,00%	100.000.000	74,00%	150.000.000	76,00%	150.000.000	78,00%	150.000.000	78,00%	550.000.000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Fasilitasi Penanganan Sengketa Tanah Garapan Melalui Mediasi	N/A	41,70%	30.000.000	40,00%	30.000.000	39,00%	30.000.000	38,00%	30.000.000	37,50%	30.000.000	37,50%	150.000.000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Luas Tanah yang diberikan Ganti Rugi yang dilaksanakan oleh DPPR	62,16%	66,33%	64.073.760.000	69,49%	47.950.000.000	72,65%	50.000.000.000	76,44%	60.000.000.000	80,24%	70.000.000.000	80,24%	292.023.760.000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Luas tanah yang Sudah Dimanfaatkan	88,00%	88,00%	250.000.000	89,00%	300.000.000	90,00%	350.000.000	91,00%	400.000.000	92,00%	450.000.000	92,00%	1.750.000.000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**															
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP **(Prioritas VI)**	Persentase Ketersediaan Data Dokumen Perencanaan	31,25%	37,50%	100.000.000	50,00%	130.000.000	75,00%	980.000.000	87,50%	210.000.000	100%	190.000.000	100%	1.610.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP **(Prioritas VI)**	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang Dilaksanakan	100%	100%	1.070.000.000	100%	1.560.000.000	100%	2.925.000.000	100%	3.100.000.000	100%	3.475.000.000	100%	12.130.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) **(Prioritas VI)**	Persentase RTH yang dikelola	10,57%	10,57%	27.050.000.000	10,59%	29.200.000.000	10,61%	63.400.000.000	10,63%	33.925.000.000	10,65%	38.950.000.000	10,65%	192.525.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) **(Prioritas VI)**	Persentase Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah B3 Yang Melaporkan Limbahnya	26,32%	34,21%	50.000.000	44,74%	580.000.000	55,26%	650.000.000	65,79%	400.000.000	76,32%	350.000.000	76,32%	2.030.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Balikpapan																
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16	(17)
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) **(Prioritas VI)**	Persentase Usaha atau Kegiatan yang Memiliki Izin Lingkungan	18,29%	26,83%	105.000.000	29,27%	225.000.000	31,71%	475.000.000	32,93%	525.000.000	34,15%	575.000.000	34,15%	1.905.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT **(Prioritas VI)**	persentase peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan LH	100%	100%	300.000.000	100%	370.000.000	100%	1.075.000.000	100%	1.075.000.000	100%	1.075.000.000	100%	3.895.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT **(Prioritas VI)**	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat yang terselenggara	100%	100%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	1.650.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP **(Prioritas VI)**	Persentase Penanganan Pengaduan yang tertangani	100%	100%	125.000.000	100%	150.000.000	100%	250.000.000	100%	300.000.000	100%	350.000.000	100%	1.175.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN **(Prioritas VI)**	Persentase pengelolaan persampahan	97,66%	99%	63.233.044.600	99%	67.575.000.000	99%	79.725.000.000	100%	87.675.000.000	100%	93.875.000.000	100%	392.083.044.600	Dinas Lingkungan Hidup
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**															
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK **(Prioritas I)**	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk	87,51%	88,11%	0	89,78%	500.000.000	91,45%	574.634.992	93,12%	635.120.133	94,79%	707.557.249	94,79%	2.417.312.374	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL **(Prioritas I)**	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil	91,01%	96,50%	0	96,53%	300.000.000	96,55%	344.780.995	96,58	381.072.041	96,60%	424.534.306	96,60%	1.450.387.343	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Balikpapan																
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16	(17)
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN **(Prioritas I)**	Persentase pengelolaan data administrasi kependudukan secara elektronik	100%	100%	724.500.000	100%	906.343.689	100%	1.024.097.062	100%	1.139.784.262	100%	1.278.335.819	100%	5.073.060.832	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN **(Prioritas I)**	Persentase Dokumen Profil Kependudukan yang Tersusun	100%	100%		100%	50.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	275.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**															
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi	N/A	5,88%	750.000.000	11,76%	1.037.303.418	29,41%	1.158.170.910	44,12%	1.243.774.064	58,82%	1.366.317.722	58,82%	5.555.566.114	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Nilai Swadaya Masyarakat dalam pembangunan di kelurahan	838756 36859	83.900. 000.000	7.154.345.900	83.950.0 00.000	4.000.000.000	84.050.000.0 00	4.500.000.000	84.150.0 00.000	5.000.000.000	84.550.0 00.000	5.500.000.000	420.600. 000.000	26.154.345.900	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**															
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase tindak lanjut Rekomendasi Kebijakan Terkait Pengendalian Penduduk	60,00%	62,00%	180.000.000	64,00%	880.710.521	66,00%	978.203.395	68,00%	1.044.863.462	70,00%	1.144.720.844	70,00%	4.228.498.222	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) (Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani / Jumlah	14.04%	13,75%	580.000.000	13,40%	859.831.468	13,10%	954.207.726	11,25%	1.127.689.410	11,20%	1.115.174.594	11,20%	4.636.903.198	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Balikpapan																
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16	(17)
		Pasangan Usia Subur x 100%)														
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan/ poktan	8,51%	10,74%	1.000.000.000	12,75%	1.298.291.578	15,80%	1.458.116.769	18,35%	1.575.291.734	20,35%	1.735.645.852	20,35%	7.067.345.933	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**															
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase sarana dan prasarana jalan layak fungsi.	83%	85%	43.726.100.000	87%	44.314.560.000	89%	44.029.660.000	91%	47.160.884.620	93%	44.482.360.000	93%	223.713.564.620	Dinas Perhubungan
		Persentase load faktor angkutan orang umum.	42%	42%		47%	10.736.673.028	52%	11.610.000.000	57%	19.705.000.000	62%	16.405.000.000	62%	58.456.673.028	Dinas Perhubungan
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pelayanan kepelabuhanan	55%	62%	865.000.000	64%	2.150.000.000	66%	3.425.000.000	68%	5.425.000.000	70%	925.000.000	70%	12.790.000.000	Dinas Perhubungan
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**															
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	N/A	80%	2.724.000.000	80%	2.634.936.468	80%	3.028.253.393	80%	3.347.002.400	80%	3.728.736.796	80%	15.462.929.057	Dinas Komunikasi dan Informatika

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Balikpapan																
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16	(17)
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi layanan publik secara daring yang memanfaatkan domain/sub domain instansi penyelenggaraan negara	80%	80%	4.211.000.000	80%	4.261.000.000	80%	4.516.000.000	80%	4.816.500.000	80%	5.221.500.000	80%	23.026.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase layanan publik dan internal yang diselenggarakan secara online dan atau terintegerasi	80%	80%	2.052.000.000	80%	2.277.275.397	80%	2.998.243.661	80%	3.488.680.678	80%	4.030.908.304	80%	14.847.108.040	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**															
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi yang Telah Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	5,23%	5,44%	0	5,65%	50.000.000	5,86%	100.000.000	6,07%	100.000.000	6,28%	100.000.000	6,28%	350.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT	18,20%	19,87%	268.125.700	20,92%	268.125.700	21,97%	350.000.000	23,01%	350.000.000	24,06%	350.000.000	24,06%	1.586.251.400	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang Meningkat Status Kesehatannya	N/A	50,00%	0	51,85%	50.000.000	53,57%	100.000.000	55,17%	150.000.000	56,67%	150.000.000	56,67%	450.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Pengelola Koperasi yang meningkat kapasitasnya	19,67%	25,10%	0	30,68%	100.000.000	37,66%	150.000.000	46,03%	250.000.000	55,09%	250.000.000	55,09%	750.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
		Persentase SDM Pengelola Koperasi yang meningkat kapasitasnya (sumber dana : DAK non fisik)			0	32,78% %	1.000.000.000	41,35%	1.000.000.000	50,07%	1.000.000.000	59,34%	1.000.000.000	59,34%	4.000.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	N/A	3,35%	0	5,02%	50.000.000	7,53%	100.000.000	10,88%	250.000.000	15,06%	250.000.000	15,06%	650.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Balikpapan																
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16	(17)
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) **(Prioritas III)**	Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	34,75%	81,68%	1.330.200.000	83,32%	1.330.200.000	84,98%	1.450.000.000	86,68%	1.450.000.000	88,41%	1.450.000.000	88,41%	7.010.400.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM **(Prioritas III)**	Persentase Usaha Mikro yang Meningkat Omsetnya	5,17%	5,21%	2.125.400.000	5,25%	2.136.326.051	5,28%	2.800.000.000	5,32%	3.200.000.000	5,36%	3.200.000.000	5,36%	13.461.726.051	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**															
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Mendapat Manfaat Insentif Bidang Penanaman Modal	N/A	5,0%	300.000.000	5%	315.000.000	5%	425.250.000	5%	574.087.500	5%	775.018.000	25%	2.389.355.500	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Presentase Minat Investasi dalam Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	30,0%	80,0%	650.000.000	85%	662.676.000	90%	915.409.000	95%	1.024.416.000	100%	1.096.987.000	100%	4.349.488.000	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan	66,0%	67,0%	900.000.000	68%	900.000.000	69%	1.215.000.000	70%	1.640.250.000	71%	2.214.337.500	71%	6.869.587.500	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan (debottlenecking) yang difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya	N/A	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	540.000.000	100%	729.000.000	100%	984.150.000	100%	3.053.150.000	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Berlaku Efektif	83,45%	84,0%	500.000.000	85%	525.000.000	86%	708.750.000	87%	956.812.500	88%	1.291.696.000	88%	3.982.258.500	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**															

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Balikpapan																
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16	(17)
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang Kreatif, Inovatif, dan Mandiri	0.02%	2.30%	6.400.000.000	2,40%	7.000.000.000	2,50%	8.045.000.000	2,60%	8.900.000.000	2,70%	9.915.000.000	2,70%	40.260.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet yang Berprestasi	5.9%	25,00%	29.016.000.000	7,00%	19.000.000.000	6.2%	21.800.000.000	7,40%	24.000.000.000	26.2%	26.737.000.000	26.2%	120.553.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan Aktif	N/A	100%	1.150.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.150.000.000	100%	1.270.000.000	100%	1.415.000.000	100%	5.985.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**															
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	N/A	80%	272.000.000	80%	283.955.119	85%	326.341.095	90%	360.691.225	90%	401.829.005	90%	1.644.816.444	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**															
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase sistem elektronik atau aset informasi yang diaudit dengan resiko kategori rendah	80%	80%	500.000.000	80%	491.976.321	80%	549.891.718	80%	613.035.341	80%	688.656.259	80%	2.843.559.639	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase perangkat Daerah yang terhubung dengan jaringan komunikasi sandi	80%	80%	0	80%	30.000.000	80%	50.000.000	80%	50.000.000	80%	50.000.000	80%	180.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**															
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Kebudayaan	N/A	34,90%	1.497.545.000	45,00%	1.175.217.243	55,10%	1.250.641.902	67,98%	1.492.808.263	78,08%	1.631.033.039	78,08%	7.047.245.447	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Balikpapan																
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16	(17)
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kelompok Sanggar Seni yang Terlibat dalam Festival Seni	19,90%	24,88%	425.000.000	27,36%	260.988.161	34,83%	313.129.272	37,31%	346.088.748	39,80%	385.561.077	39,80%	1.730.767.258	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang dilibatkan dalam pengembangan sejarah lokal	N/A	26,67%	175.000.000	33,33%	175.093.224	46,67%	201.229.387	60,00%	222.410.463	80,00%	247.776.959	80,00%	1.021.510.033	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.2.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	87,50%	94,12%	1.100.000.000	95,59%	1.123.019.611	97,06%	1.190.652.730	98,53%	1.397.750.325	100,00%	1.589.201.333	100,00%	6.400.623.999	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.2.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase SDM Pengelola Permuseuman yang tersertifikasi	N/A	0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	55,56%	200.000.000	55,56%	200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**															
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang Memenuhi Standar Nasional	3%	4%	1.055.000.000	5%	1.101.370.037	6%	1.265.771.525	7%	1.399.004.569	8%	1.558.564.707	8%	6.379.710.838	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**															
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Arsip yang dikelola	57%	60%	320.000.000	70%	334.064.845	80%	383.930.700	90%	424.342.618	100%	472.740.006	100%	1.935.078.169	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip yang dilindungi dan terselamatkan	46%	55%	160.000.000	65%	167.032.423	75%	191.965.350	85%	212.171.309	100%	236.370.003	100%	967.539.085	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Perizinan Penggunaan Arsip	0%	0%	40.000.000	0%	41.758.106	100%	47.991.337	100%	53.042.827	100%	59.092.501	100%	241.884.771	Dinas Perpustakaan dan Arsip
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**															
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	4000	4200	475.000.000	4300	375.000.000	4400	550.000.000	4500	825.000.000	4600	1.000.000.000	22000	3.225.000.000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Balikpapan																
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16	(17)
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	275	289	1.125.000.000	297	1.325.000.000	304	1.430.000.000	312	1.645.000.000	319	1.375.000.000	1,521	6.900.000.000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**															
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA **(Prioritas VII)**	Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	10,00%	3,00%	6.100.000.000	3,00%	8.000.000.000	4,00%	9.194.000.000	6,00%	10.200.000.000	6,00%	11.363.000.000	6,00%	44.857.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA **(Prioritas VI)**	Prosentase Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Pariwisata	N/A	17,00%	4.750.000.000	20,00%	5.000.000.000	21,00%	5.750.000.000	24,00%	6.360.000.000	26,00%	7.085.000.000	26,00%	28.945.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL **(Prioritas VIII)**	Persentase Sub sektor ekraf yang terfasilitasi dalam pendaftaran kekayaan intelektualnya	N/A	12%	300.000.000	18%	850.000.000	24%	974.000.000	29%	1.095.000.000	35%	1.217.000.000	35,00%	4.436.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF **(Prioritas VIII)**	Persentase peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	N/A	8%	800.000.000	10%	850.000.000	12%	976.800.000	14%	1.080.000.000	16%	1.203.000.000	16,00%	4.909.800.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**															
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	34,50%	40%	375.000.000	45%	400.000.000	50%	450.000.000	55%	480.000.000	60%	650.000.000	60%	2.355.000.000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Sarana Pertanian yang tersedia	10%	15%	700.000.000	20%	950.000.000	25%	1.000.000.000	30%	1.200.000.000	35%	1.350.000.000	35%	5.200.000.000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia	75%	75%	485.000.000	75%	1.200.000.000	85%	1.130.000.000	85%	1.200.000.000	90%	1.500.000.000	90%	5.515.000.000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Balikpapan																
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16	(17)
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terlayani	60%	65%	570.000.000	70%	600.000.000	75%	700.000.000	80%	750.000.000	85%	900.000.000	85%	3.520.000.000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Lahan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (%)	40%	40%	0	45%	30.000.000	50%	50.000.000	55%	75.000.000	60%	100.000.000	60%	255.000.000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Rekomendasi yang Diterbitkan (persen)	50%	50%	0	55%	25.000.000	60%	35.000.000	65%	45.000.000	70%	60.000.000	70%	165.000.000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**															
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Telah Diverifikasi dan Memperoleh Rekomendasi	50%	50%	355.000.000	60,00%	372.750.000	65,00%	300.000.000	70,00%	300.000.000	75,00%	300.000.000	75,00%	1.627.750.000	Dinas Perdagangan
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola	80%	80%	11.499.996.400	80,00%	12.649.996.040	87,00%	15.812.495.050	87,00%	19.716.653.210	93,00%	21.499.056.151	93,00%	81.178.196.851	Dinas Perdagangan
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Penurunan Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	6%	5,80%	570.000.000	5,60%	598.500.000	5,40%	748.125.000	5,20%	860.343.750	5,00%	903.360.000	5,00%	3.680.328.750	Dinas Perdagangan
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Bersih Non Migas	1020 juta dollar	1175 juta dollar	680.000.000	1350 juta dollar	113.877.000	1550 juta dollar	232.809.000	1785 juta dollar	363.168.000	2050 juta dollar	407.693.000	2050 juta dollar	1.797.547.000	Dinas Perdagangan
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapanny a (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	32%	70%	520.000.000	71,00%	546.000.000	73,00%	682.500.000	74,00%	750.750.000	76,00%	788.287.500	76,00%	3.287.537.500	Dinas Perdagangan

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Balikpapan																
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16	(17)
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pelaku Binaan yang Meningkat Omsetnya	50%	60%	120.000.000	60,00%	150.000.000	70,00%	275.000.000	70,00%	300.000.000	80,00%	325.000.000	80,00%	1.170.000.000	Dinas Perdagangan
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**															
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	0	1,10%	3.477.570.900	1,31%	3.127.570.900	1,62%	4.111.597.136	2,12%	4.942.846.057	2,60%	6.710.699.926	2,60%	22.370.284.919	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
		Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (Sumber Dana : DAK/Bankeu)				1,31%	22.100.000.000	1,62%	22.100.000.000	2,12%	22.100.000.000	2,60%	22.100.000.000	2,60%	88.400.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
3.01.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Hasil Pemantauan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait	2,88%	12,01%	115.000.000	12,96%	115.000.000	13,89%	115.000.000	14,80%	120.750.000	15,69%	200.000.000	15,69%	665.750.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Penyediaan Informasi Industri yang Lengkap dan Terkini	22,06%	45,45%	210.000.000	58,33%	210.000.000	61,54%	210.000.000	64,29%	220.500.000	66,67%	300.000.000	66,67%	1.150.500.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**															
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Kerjasama	N/A	97,73%	30.195.754.400	100%	31.134.403.284	100%	41.924.809.057	100%	44.075.427.643	100%	53.414.644.598	100%	200.745.038.982	Sekretariat Daerah
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Perekonomian,	N/A	100%	2.584.146.500	100%	2.584.146.500	100%	2.822.561.150	100%	3.278.937.940	100%	4.236.565.558	100%	15.506.357.648	Sekretariat Daerah

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Balikpapan																
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan														
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**															
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Funsgi DPRD yang terfasilitasi	100%	100%	17.991.120.000	100%	33.676.868.279	100%	38.703.813.867	100%	42.777.714.112	100%	47.656.624.540	100%	180.806.140.798	Sekretariat DPRD
5.01	**PERENCANAAN**															
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH **(Prioritas I)**	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	29.830	32.760	3.065.614.000	32.769	2.867.000.000	32.778	3.650.000.000	32.787	4.200.000.000	32.796	4.800.000.000	32.796	18.582.614.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH **(Prioritas I)**	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	21.510	23.460	0	23.466	70.000.000	23.472	70.000.000	23.478	70.000.000	23.484	70.000.000	23.484	280.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.02	**KEUANGAN**															
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Tahapan Penyusunan Perda dan Perwal tentang APBD, P-APBD, dan LKPD serta Realisasi APBD yang Tepat Waktu	N/A	100%	20.725.000.000	100%	18.937.726.000	100%	24.840.192.000	100%	28.517.345.000	100%	33.732.833.000	100%	126.753.096.000	Badan Pengelola Keuangan Daerah
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Peningkatan BMD yang terkelola	N/A	100%	19.000.000.000	100%	20.690.550.000	100%	22.990.000.000	100%	25.289.000.000	100%	27.817.900.000	100%	115.787.450.000	Badan Pengelola Keuangan Daerah

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Balikpapan																
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16	(17)
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)	474,4 Milyar	780,71 Milyar	3.953.540.690	852,37 Milyar	6.114.076.097	1.062,03 Milyar	6.297.498.380	1.192,01 Milyar	12.594.996.760	1.321,97 Milyar	17.003.245.625	1.321,97 Milyar	45.963.357.552	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.03	**KEPEGAWAIAN**															
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH **(Prioritas I)**	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja	N/A	88%	1.033.944.000	88,80%	620.559.000	88,91%	711.876.500	89,16%	790.250.500	90,81%	790.250.500	90,81%	4.019.183.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase sistem informasi ASN yang terintegrasi	20%	20%	2.893.893.855	40%	3.213.139.650	60%	3.499.198.400	80%	3.643.257.000	100%	3.673.475.900	100%	16.922.964.805	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik	99,85%	97,81%	865.040.700	97,99%	819.672.250	98,17%	1.002.949.900	98,36%	1.194.428.750	98,79%	1.245.747.500	98,79%	5.127.839.100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase peningkatan kualifikasi pendidikan ASN	4,24%	3,93%	2.291.247.250	3,68%	2.492.880.000	2,65%	2.980.053.900	1,91%	3.330.660.000	1,59%	3.558.943.600	13,76%	14.653.784.750	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**															
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA **(Prioritas I)**	Persentase ASN yang Memperoleh Pengembangan Kompetensi Sesuai Rencana Pengembangan Kompetensi	40%	17,39%	6.965.093.609	14,91%	7.020.468.750	24,64%	8.161.940.250	18,95%	9.041.542.700	24,10%	10.101.956.250	100%	41.291.001.559	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**															
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH **(Prioritas I)**	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	2.900.000.000	100%	2.656.800.000	100%	3.325.000.000	100%	3.695.000.000	100%	4.130.000.000	100%	16.706.800.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**															

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Balikpapan																
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16	(17)
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN **(Prioritas I)**	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	81,33%	83,33%	687.377.000	85,33%	717.589.035	87,33%	824.703.539	89,33%	911.510.487	91,33%	1.015.470.647	91,33%	4.156.650.708	Inspektorat
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI **(Prioritas I)**	Persentase Hasil Capaian Kinerja Tata Laksana Pengawasan	50%	51,67%	779.103.000	63,33%	813.346.635	75%	934.754.874	86,67%	1.033.145.646	98,33%	1.150.978.615	98,33%	4.711.328.770	Inspektorat
7.01	**KECAMATAN**															
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	2.028.175.500	100%	877.230.000	100%	1.008.176.000	100%	1.114.300.000	100%	1.241.400.000	100%	6.269.281.500	Kecamatan Balikpapan Barat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	N/A	16%	4.101.604.978	17%	4.281.845.000	18%	4.921.020.000	19%	5.438.950.000	20%	6.059.345.000	20%	24.802.764.978	Kecamatan Balikpapan Barat
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	100%	100%	270.000.000	100%	281.800.000	100%	323.900.000	100%	358.000.000	100%	398.850.000	100%	1.632.550.000	Kecamatan Balikpapan Barat
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	938.000.000	100%	629.000.000	100%	1.125.396.863	100%	1.243.854.299	100%	1.385.719.143	100%	5.321.970.305	Kecamatan Balikpapan Selatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	7,99%	8,00%	5.788.383.885	8,25%	6.393.026.228	8,50%	6.944.807.107	8,75%	7.675.806.163	9%	8.551.251.976	9%	35.353.275.359	Kecamatan Balikpapan Selatan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	100%	100%	351.000.000	100%	366.427.377	100%	421.123.986	100%	465.450.809	100%	518.536.694	100%	2.122.538.866	Kecamatan Balikpapan Selatan

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Balikpapan																
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16	(17)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	835.000.000	100%	1.035.750.000	100%	1.106.522.500	100%	1.177.318.175	100%	1.248.137.720	100%	5.402.728.395	Kecamatan Balikpapan Kota
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	N/A	10,00%	3.827.298.350	10,20%	3.995.518.224	10,40%	4.591.929.166	10,60%	5.075.268.131	10,80%	5.654.115.765	10,80%	23.144.129.636	Kecamatan Balikpapan Kota
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	N/A	100%	188.000.000	100%	196.263.097	100%	225.559.286	100%	249.301.288	100%	277.734.754	100%	1.136.858.425	Kecamatan Balikpapan Kota
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100%	100%	824.957.000	100%	306.000.000	100%	486.000.000	100%	1.075.000.000	100%	1.350.000.000	100%	4.041.957.000	Kecamatan Balikpapan Timur
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16,25%	16,35%	3.860.794.050	16,45%	4.592.825.850	16,55%	5.458.866.753	16,65%	5.870.000.000	16,75%	6.078.000.000	16,75%	25.860.486.653	Kecamatan Balikpapan Timur
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	20%	100%	304.880.000	100%	305.000.000	100%	665.789.974	100%	665.789.974	100%	700.000.000	100%	2.641.459.948	Kecamatan Balikpapan Timur
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	1.055.639.000	100%	1.102.037.123	100%	1.266.538.187	100%	1.399.851.928	100%	1.559.508.710	81,45	6.383.574.948	Kecamatan Balikpapan Utara
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	N/A	15%	5.542.200.700	16%	5.785.795.063	17%	6.649.440.600	18%	7.349.349.859	19%	8.187.562.475	19%	33.514.348.697	Kecamatan Balikpapan Utara

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Balikpapan																
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16	(17)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	100%	100%	361.675.000	100%	377.571.572	100%	433.931.674	100,00%	479.606.614	100%	534.307.005	100%	2.187.091.865	Kecamatan Balikpapan Utara
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	754.603.595	100%	848.919.058	100%	985.019.344	100%	1.050.178.894	100%	1.161.159.470	100%	4.799.880.361	Kecamatan Balikpapan Tengah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	N/A	12,75%	4.353.146.150	12,75%	4.753.766.916	12,75%	5.466.831.954	12,75%	6.081.270.023	12,75%	6.754.564.019	12,75%	27.409.579.062	Kecamatan Balikpapan Tengah
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	N/A	100%	191.905.000	100%	246.015.010	100%	304.917.261	100%	341.208.575	100%	390.237.559	100%	1.474.283.405	Kecamatan Balikpapan Tengah
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**															
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional	N/A	60%	745.000.000	62%	777.744.718	64%	893.838.660	66%	987.922.658	68%	1.100.597.826	68%	4.505.103.862	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik	N/A	66,60%	1.554.997.960	100%	1.623.344.229	100%	1.865.660.796	100%	2.062.037.204	100%	2.297.217.953	100%	9.403.258.142	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Balikpapan																
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16	(17)
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Yang Telah Melapor Pada Pemerintah Kota Balikpapan	N/A	83%	970.000.000	84%	1.012.634.063	85%	1.163.789.933	89%	1.286.288.561	89%	1.432.993.143	89%	5.865.705.700	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase Pemuda yang Mengikuti Sosialisasi Konsep P4GN	N/A	80%	600.000.000	86%	626.371.585	92%	719.870.062	95%	795.642.409	98%	886.387.511	98%	3.628.271.567	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Potensi Konflik yang telah dilakukan monitoring	64%	80%	1.250.000.000	83%	1.304.940.803	88%	1.499.729.295	88%	1.657.588.352	89%	1.846.640.648	89%	7.558.899.098	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Penunjang yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Balikpapan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	N/A	85,18	344.067.913.199	86,18	347.778.677.106	87,18	399.691.594.659	88,18	441.762.479.219	89,18	492.146.647.967	89,18	2.025.447.312.150	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	83,83	83,93	172.246.000.000	84	178.448.827.830	84,05	205.085.881.498	84,10	226.672.886.481	84,15	252.525.523.362	84,15	1.034.979.119.171	Dinas Kesehatan, RSUD, RSIA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	78,00	80	19.869.378.000	82	22.364.165.600	84	22.613.848.900	86	23.184.215.900	88	23.450.300.000	88	111.481.908.400	Dinas Pekerjaan Umum
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	N/A	70	8.914.549.790	75	9.188.351.597	80	9.647.769.177	85	10.130.157.636	90	10.636.665.518	90	48.517.493.718	Dinas Perumahan dan Permukiman
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	N/A	70	25.300.000.000	72	26.680.000.000	74	30.735.000.000	76	33.216.500.000	78	34.966.500.000	78	150.898.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	N/A	77	24.700.000.000	78	24.336.076.517	79	26.882.758.110	80	27.985.634.965	81	30.153.799.253	81	134.058.268.845	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	N/A	70	8.128.000.000	71	9.010.845.619	72	10.214.467.280	73	11.197.144.071	74	13.044.999.114	74	51.595.456.084	Dinas Sosial
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah		85	6.945.000.000	85	7.373.989.037	85	8.474.636.807	85	9.372.907.312	85	10.441.777.003	85	42.608.310.159	Dinas Ketenagakerjaan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	N/A	75	8.580.654.100	76	9.041.841.878	77	10.357.546.698	78	11.411.461.125	79	12.693.656.145	79	52.085.159.946	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	N/A	80	7.621.240.000	81	11.290.250.000	82	11.763.040.000	83	12.116.040.000	84	12.387.040.000	84	55.177.610.000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	76,66	77,16	17.016.955.400	77,66	17.988.342.000	78,16	20.570.000.000	78,66	20.605.000.000	79,16	22.666.000.000	79,16	98.846.297.400	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	78,00	78,50	11.245.500.000	79	12.721.265.262	81	14.620.168.324	83	16.159.063.367	83,5	18.002.046.902	83,5	72.748.043.855	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	75	76	26.658.900.000	77	29.854.189.192	78	40.985.523.698	79	38.290.418.033	80	61.381.030.087	80	197.170.061.010	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	85	85	6.391.000.000	85	6.437.011.991	85	7.397.864.667	85	8.176.551.822	85	9.109.108.990	85	37.511.537.470	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	N/A	67	9.873.703.400	70	9.461.272.606	74	9.934.336.236	78	10.431.053.048	80	10.952.605.700	80	50.652.970.990	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	75,23	78	11.500.000.000	79	11.840.431.000	80	13.024.474.000	81	13.675.697.000	82	14.359.482.000	82	64.400.084.000	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	N/A	78	8.495.000.000	79	8.746.797.273	80	10.052.431.562	81	11.110.534.092	82	12.377.719.629	82	50.782.482.556	Dinas Perpustakaan dan Arsip

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	N/A	71	11.984.000.000	72	12.540.844.000	73	14.442.939.000	74	16.003.784.000	75	17.829.448.000	75	72.801.015.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	70	71	17.895.000.000	72	17.701.000.000	73	20.590.167.919	74	22.247.000.000	75	23.693.000.000	75	102.126.167.919	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	N/A	76	14.755.000.000	78	15.583.509.000	80	16.362.685.000	82	17.180.819.000	84	18.039.860.000	84	81.921.873.000	Dinas Perdagangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	82	13.533.520.000	84	13.871.010.656	86	15.941.536.194	88	17.619.516.261	90	19.629.068.277	90	80.594.651.388	Inspektorat
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	85,47	85,50	10.252.500.000	85,55	11.128.349.000	85,60	12.173.267.000	85,65	13.276.151.000	85,70	14.663.760.000	85,70	61.494.027.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	72,50	74,5	33.275.000.000	76	35.849.500.000	77,5	38.914.150.000	79,5	42.068.565.000	82,5	45.258.961.500	82,5	195.366.176.500	Badan Pengelola Keuangan Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80,00	82	31.546.459.310	83	32.377.221.310	84	37.939.394.373	85	36.298.199.086	86	37.466.347.371	86	175.627.621.450	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	78,72	80	9.700.780.586	81	10.275.743.600	82	11.734.968.500	83	13.047.662.000	84	15.146.207.900	84	59.905.362.586	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	77	78	93.984.099.100	79	96.187.428.075	80	104.549.670.883	81	117.657.438.250	82	126.180.622.451	80	538.559.258.759	Sekretariat Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	N/A	70	78.219.880.000	72	87.470.668.000	74	100.468.700.800	76	104.588.500.000	78	114.904.900.000	78	485.652.648.800	Sekretariat DPRD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	N/A	80	3.380.002.040	82	3.472.996.715	84	3.991.410.879	86	4.411.540.270	88	4.914.688.001	88	20.170.637.905	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	70	70,50	14.400.219.522	71	14.750.663.957	71,50	16.952.461.645	72	18.736.850.648	72,50	20.873.861.144	72,50	85.714.056.916	Kecamatan Balikpapan Barat
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	70	70,50	14.649.701.650	71	16.111.891.982	71,50	18.600.437.737	72	20.604.307.133	72,50	23.017.739.050	72,50	92.984.077.552	Kecamatan Balikpapan Kota
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	N/A	71	17.722.616.115	72	18.180.556.480	73	20.894.367.854	74	23.093.674.894	75	25.727.569.051	75	105.618.784.394	Kecamatan Balikpapan Selatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79,32	79,40	12.209.368.950	79,50	12.524.690.880	79,60	13.764.195.410	79,70	14.908.685.826	79,80	16.959.881.046	79,80	70.366.822.112	Kecamatan Balikpapan Timur
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	70,00	71,00	14.740.485.300	72,00	15.199.534.365	73,00	17.468.368.616	74,00	19.307.060.571	75,00	21.509.081.439	75,00	88.224.530.291	Kecamatan Balikpapan Utara
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	N/A	70	15.700.345.255	70,15	15.800.033.920	70,30	18.123.472.656	70,45	20.026.437.284	70,60	22.329.477.572	70,60	91.979.766.687	Kecamatan Balikpapan Tengah

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penyelenggaran pemerintahan daerah berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan berazaskan pada kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah yaitu untuk daerah Provinsi disebut Gubernur dan Wakil Gubernur, untuk daerah Kabupaten disebut Bupati dan Wakil Bupati serta untuk daerah kota disebut Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Selanjutnya pada pasal 60 dijelaskan, bahwa masa jabatan Kepala Daerah adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesuadahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Kepala Daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka perlu dilaksanakan mekanisme pertanggung-jawaban yang salah satunya melalui mekanisme kewajiban Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) setiap akhir tahun pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 ayat (1) yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Perihal penyampaian laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur pada Pasal 70 ayat (3) yang menjelaskan bahwa Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ayat (4) menyatakan bahwa Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ Kepala Daerah tersebut diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 1 menjelaskan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. Selanjutnya untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 pada ketentuan pasal 14, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 33, dan Pasal 34, Kementerian Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. P Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 ini mengatur mekanisme penyusun laporan yang meliputi LPPD, LKPJ dan RLPPD.

Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 maka Pemerintah Kota Balikpapan perlu menyampaikan dan melaporkan hasil kinerja sebagai pertanggungjawaban dari akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertuang pada seluruh dokumen perencanaan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Adapun kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah dinilai atas capaian akuntabilitas kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan sebagai indikator yang tertuang pada seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Akuntabilitas kinerja pada Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang terkait berhasil atau tidaknya pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dalam hal akuntabilitas kinerja Kota Balikpapan adalah antara Wali Kota Balikpapan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Republik Indonesia. Perwujudan akuntabilitas kinerja tersebut melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturtan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya Laporan tersebut

memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Balikpapan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi. Dasar Perjanjian Kinerja tersebut mengacu pada hasil analisis antara target dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya. Akuntabilitas kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah dapat dinilai berdasarkan hasil capaian dari nilai AKIP yang diukur atas hasil evaluasi dari 5 (lima) komponen yang dinilai yaitu; 1) Komponen Perencanaan Kinerja; 2) Pengukuran Kinerja; 3) Pelaporan Kinerja; 4) Evaluasi Internal; dan 5) Capaian Kinerja

Indikator Kinerja Kunci atau yang lebih dikenal dengan *key performance indicators* (KPI) atau dikenal juga sebagai *key success indicators* (KSI) membantu perangkat pada pemerintah daerah dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Setelah organisasi menganalisis misinya, mengidentifikasi semua pemangku kepentingan, dan menentukan tujuan-tujuan, maka membutuhkan cara untuk mengukur capaian-capaian yang telah dilakukan, dan pengukuran itu adalah KPI. KPI harus dapat diukur baik untuk capaian KPI jangka pendek, jangka menegah dan jangka panjang. Seberapa besar pencapaian KPI tergantung ukuran yang ditentukan. Maka dari itu dalam membuat KPI harus menyatakan kuantitas atau persentase yang hendak dicapai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Berkenaan pada dokumen RPJMD tahun 2021-2026 Kota Balikpapan yang disusun, Pemerintah Kota wajib menetapkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sampai dengan akhir periode masa jabatan. Hal ini memiliki tujuan berupa gambaran tentang ukuran capaian keberhasilan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) terdeskripsi sebagai berikut.

8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Balikpapan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penetapan indikator dituangkan kedalam format tabel T-C.17. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD ini terdeskripsi sebagai berikut:

Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

No	Indikator Tujuan (T) dan Sasaran (S)	Kondisi Awal (*baseline*) Tahun 2020	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir Periode Tahun 2026
			2022	2023	2024	2025	2026	
T.1	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**67,33**	**68,17**	**68,7**	**69,06**	**69,70**	**70,04**	**70,04**
S-1	Nilai SAKIP	68,99	75,5	75,52	75,54	75,56	75,58	75,58
S-2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	N/A	79	80	81	82	83	83
S-3	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	24,21%	36,88%	41,42%	44,17%	44,74%	44,40%	44,40%
S-4	Indeks SPBE	N/A	3.1	3.3	3.6	3.7	4.0	4.0
S-5	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4
S-6	Indeks Sistem Merit	0,62	0,69	0,73	0,76	0,80	0,84	0,84
S-7	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	82,25	82,85	83,66	84,38	85,05	85,05
T.2	**Indeks Pembangunan Manusia**	**80,01**	**80,11**	**80,31**	**80,51**	**80,71**	**80,91**	**80,91**
S-1	Indeks Pendidikan	0,7487	0,7500	0,7506	0,7512	0,7518	0,7524	0,7524
S-2	Indeks Kesehatan	0,8383	0,8385	0,8388	0,8391	0,8394	0,8397	0,8397
S-3	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	N/A	10,50	11,00	11,50	12,00	12,50	12,50
S-4	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	0,020	0,021	0,022	0,023	0,024	0,025	0,025
S-5	Indeks Warisan Budaya	0,4920	0,4960	0,4962	0,4964	0,4965	0,4975	0,4975
S-6	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	14,43	17	25	35	45	60	60
T.3	**Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur**	**82,03**	**82,00**	**82,50**	**83,00**	**83,50**	**84,00**	**84,00**
S-1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	77,80	78,20	78,78	79,12	79,55	80,02	80,02
S-2	Persentase Permukiman Layak Huni	98,59	99,05	99,32	99,55	99,78	100	100
T.4	**Indeks *Liveable City***	**81,69**	**81,69**	**82,19**	**82,69**	**83,19**	**83,69**	**83,69**
S-1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,07	68,15	68,23	68,31	68,41	68,51	68,51
S-2	Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Peruntukkan	89	89,2	89,4	89,6	89,8	90	90
S-3	Indeks Resiko Bencana	108	107	105	103	101	99	99
S-4	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	0,5601	0,8	0,8267	0,8575	0,8675	0,8794	0,8794
T.5	**Indeks Gini**	**0,311**	**0,300**	**0,300**	**0,300**	**0,300**	**0,300**	**0,300**
S-1	Persentase Pertumbuhan UMKM	3,09	3,14	3,17	3,19	3,33	3,45	3,45
S-2	Tingkat Pengangguran Terbuka	9	9	8,46	8,22	7,98	7,74	7,74
S-3	Tingkat Kemiskinan	2,57	2,42	2,39	2,38	2,37	2,36	2,36
T-6	**Pertumbuhan Ekonomi**	**-0,69**	**4,1**	**4,45**	**4,8**	**5,15**	**5,5**	**5,5**
S-1	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	3,018	3,330	3,530	3,780	4,080	4,440	4,440
S-2	Skor Pola Pangan Harapan	87	87	87	88	89	90	90
S-3	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	1,08	1,2	1,5	1,9	2,5	3,4	3,4
S-4	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	N/A	2,20	2,42	2,66	2,93	3,22	3,22
S-5	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	-0,56	3,50	3,97	4,00	4,25	5,00	5,00

8.2. Penetapan Indikator Kinerja Kunci Pemerintah Kota Balikpapan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penetapan indikator dituangkan kedalam format tabel T-C.17. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD ini terdeskripsi sebagai berikut.

Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Kunci Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020)	Target Kinerja					Kondisi Akhir Periode Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	PDRB per kapita	Juta Rupiah	155,98	168,06	175,54	183,96	193,44	204,08	204,08	BAPPEDA LITBANG
2	Inflasi	%	0,65	3,5±1	3,5±1	3,5±1	3,5±1	3,5±1	3,5±1	BAPPEDA LITBANG
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	67,33	68,17	68,7	69,06	69,70	70,04	70,04	
4	Nilai SAKIP	Poin	68,99	75,5	75,52	75,54	75,56	75,58	75,58	INSKOT, SETDAKOT, BAPPEDA
5	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	N/A	79	80	81	82	83	83	BKAD
6	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	%	24,21	36,88	41,42	44,17	44,74	44,40	44,40	BPPDRD
7	Indeks SPBE	Poin	N/A	3.1	3.3	3.6	3.7	4.0	4.0	DISKOMINFO
8	Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4	INSKOT
9	Indeks Sistem Merit	Poin	0,62	0,69	0,73	0,76	0,80	0,84	0,84	BKPSDM
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	N/A	82,25	82,85	83,66	84,38	85,05	85,05	SETDA
11	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	80,01	80,11	80,31	80,51	80,71	80,91	80,91	
12	Indeks Pendidikan	Poin	0,7487	0,75	0,7506	0,7512	0,7518	0,7524	0,7524	DISDIKBUD
13	Indeks Kesehatan	Poin	0,8383	0,8385	0,8388	0,8391	0,8394	0,8397	0,8397	DINKES
14	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	N/A	10,50	11,00	11,50	12,00	12,50	12,50	DISPUSTAKAR
15	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Poin	0,02	0,021	0,022	0,023	0,024	0,025	0,025	DPOP
16	Indeks Warisan Budaya	Poin	0,492	0,496	0,4962	0,4964	0,4965	0,4975	0,4975	DISDIKBUD
17	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	14,43	17,0	25,0	35,0	45,0	60,0	60,0	DP3AKB
18	Indeks Liveable City	Poin	81,69	81,69	82,19	82,69	83,19	83,69	83,69	
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	68,07	68,15	68,23	68,31	68,41	68,51	68,51	DLH
20	Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Peruntukkan	%	89	89,2	89,4	89,6	89,8	90	90	DPPR
21	Indeks Resiko Bencana	Poin	108	107	105	103	101	99	99	BPBD
22	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Poin	0,5601	0,8	0,8267	0,8575	0,8675	0,8794	0,8794	SATPOL PP
23	Indeks Gini	Poin	0,311	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
24	Presentase Pertumbuhan UMKM	%	3,09	3,14	3,17	3,19	3,33	3,45	3,45	DKUMKMP
25	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	9,00	9,00	8,46	8,22	7,98	7,74	7,74	DISNAKER
26	Tingkat Kemiskinan	%	2,57	2,42	2,39	2,38	2,37	2,36	2,36	DINSOS
27	Pertumbuhan Ekonomi	%	-0,69	4,1	4,45	4,8	5,15	5,5	5,5	
28	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	Triliun Rupiah	3,018	3,33	3,53	3,78	4,08	4,44	4,44	DPMPT
29	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	87	87	87	88	89	90	90	DP3
30	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	Juta Orang	1,08	1,2	1,5	1,9	2,5	3,4	3,4	DPOP
31	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	N/A	2,20	2,42	2,66	2,93	3,22	3,22	DPOP
32	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	-0,56	3,50	3,97	4,00	4,25	5,00	5,00	DISDAG
	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Poin	82,03	82,00	82,50	83,00	83,50	84,00	84,00	DPU
2	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Poin	77,8	78,2	78,78	79,12	79,55	80,02	80,02	DPU
3	Persentase Permukiman Layak Huni	%	98,59	99,05	99,32	99,55	99,78	100,00	100,00	DISPERKIM
	ASPEK PELAYANAN UMUM									
I	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
A	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**									

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020)	Target Kinerja					Kondisi Akhir Periode Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Harapan lama sekolah	Tahun	14,14	14,16	14,17	14,18	14,19	14,20	14,20	DISDIKBUD
2	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,68	10,70	10,71	10,72	10,73	10,74	10,74	DISDIKBUD
3	Nilai SAKIP OPD	Poin	76,03	76,37	78,37	80,37	82,37	84,37	84,37	DISDIKBUD
4	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	N/A	27,00	28,75	30,50	32,25	34,00	34,00	DISDIKBUD
5	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)	Tahun	86,73	86,93	87,03	87,13	87,23	87,33	87,33	DISDIKBUD
6	Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	%	54,55	66,67	77,78	88,89	94,44	100,00	100,00	DISDIKBUD
7	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualifikasi Minimal D-IV / S1	%	45,83	90,95	91,45	91,95	92,45	92,95	92,95	DISDIKBUD
8	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin (PAUD/SD/SMP)	%	93,73	98,98	99,03	99,08	99,13	99,18	99,18	DISDIKBUD
9	Persentase Peningkatan Karya, Bahasa dan Sastra yang Bercirikan Kearifan Lokal Balikpapan	%	N/A	0,00	11,11	33,33	55,56	77,78	77,78	DISDIKBUD
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	N/A	85,18	86,18	87,18	88,18	89,18	89,18	DISDIKBUD
B	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**									
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,49	74,5	74,52	74,54	74,56	74,58	74,58	DINKES
2	Nilai SAKIP OPD	Poin	85,17	85,28	85,39	85,50	85,61	85,72	85,72	DINKES
3	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	N/A	27,00	28,75	30,50	32,25	34,00	34,00	DINKES
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	78,70	80,00	81,00	82,00	84,00	85,00	85,00	DINKES
5	Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi dan berijin	%	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00	90,00	DINKES
6	Persentase Ijin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan Minum yang Diterbitkan	%	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINKES
7	Persentase UKBM Aktif	%	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00	90,00	DINKES
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	83,83	83,93	84	84,05	84,10	84,15	84,15	DINKES, RSUD, RSIA
9	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Jiwa	12.643	10.384	10.269	10.152	10.038	9.926	9.926	DINKES
10	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Jiwa	12.248	10.080	9.965	9.848	9.734	9.622	9.622	DINKES
11	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Jiwa	12.127	9.990	9.879	9.803	9.673	9.567	9.567	DINKES
12	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Jiwa	14.481	26.250	27.563	28.941	30.388	31.907	31.907	DINKES
13	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Jiwa	142.028	461.080	484.134	508.341	533.758	560.446	560.446	DINKES
14	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Jiwa	12.988	21.780	25.880	29.880	32.890	35.190	35.190	DINKES
15	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Jiwa	35.138	193.993	203.692	213.877	224.571	235.799	235.799	DINKES
16	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Jiwa	8.223	17.958	14.992	15.741	16.528	17.355	17.355	DINKES
17	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Jiwa	550	742	779	818	859	902	902	DINKES
18	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Jiwa	4.027	14.353	14.315	14.315	14.315	14.315	14.315	DINKES
19	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	75,00	75,00	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINKES
20	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	93,92	93,92	94,00	95,00	96,00	97,00	97,00	DINKES

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020)	Target Kinerja					Kondisi Akhir Periode Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
21	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	93,22	93,92	94,00	95,00	96,00	97,00	97,00	DINKES
22	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	99,09	99,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINKES
23	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	61,39	62,00	65,00	67,00	70,00	75,00	75,00	DINKES
24	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	71,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINKES
25	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	30,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINKES
26	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	27,99	35,00	40,00	45,00	50,00	60,00	60,00	DINKES
27	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	20,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINKES
28	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	51,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINKES
29	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standa	%	75,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINKES
C	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**									
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	Poin	82,03	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00	87,00	DPU
2	Persentase meningkatnya kinerja Sumber daya Air	%	54,02	55,79	57,48	59,18	60,87	62,56	62,56	DPU
3	Persentase Infrastruktur sektor penyehatan lingkungan dalam kondisi baik	%	97,54	97,85	97,93	98,14	98,31	98,53	98,53	DPU
4	Persentase infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	78,92	79,95	81,25	82,55	83,76	84,91	84,91	DPU
5	Jumlah Bangunan yang memiliki SLF	%	6	45	65	85	105	125	125	DPU
6	Persentase pelayanan jasa kontruksi	%	27,32	29,12	30,72	33,11	35,51	37,90	37,90	DPU
7	Nilai SAKIP OPD	Poin	76,65	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	81,00	DPU
8	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	N/A	27,00	28,75	30,50	32,25	34,00	34,00	DPU
9	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan	%	89,00	89,20	89,40	89,60	89,80	90,00	90,00	DPPR
10	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan	%	0,00	14,00	22,00	27,00	31,00	33,00	33,00	DPPR
11	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan	%	55,88	58,82	61,76	64,71	67,65	70,59	70,59	DPU
12	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	%	52,15	52,75	53,09	53,46	53,85	54,26	54,26	DPU
13	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	%	96,79	96,95	97,10	97,25	97,39	97,53	97,53	DPU
14	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan	%	97,98	98,49	98,54	98,80	99,05	99,29	99,29	DPU
15	Persentase Penyediaan Sarana Persampahan	%	97,82	97,82	97,82	98,00	98,00	98,36	98,36	DPU
16	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	%	85,11	85,36	87,36	89,12	91,47	93,42	93,42	DPU
17	Persentase Pelayanan Jalan Lingkungan	%	80,00	81,00	76,36	78,18	80,00	81,82	81,82	DPU
18	Persentase Bangunan yang Memiliki Izin	%	92,38	92,89	93,39	93,90	94,41	94,91	94,91	DPU
19	Presentase Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DPU

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020)	Target Kinerja					Kondisi Akhir Periode Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
20	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	%	0,00	14,00	22,00	27,00	31,00	33,00	33,00	DPPR
21	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks	N/A	0,14	0,15	0,21	0,22	0,27	1	DPPR
22	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	78,00	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	88,00	DPU
23	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	N/A	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	84,00	DPPR
24	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	97,98	98,49	98,54	98,80	99,05	99,29	99,29	DPU
25	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	96,79	96,95	97,10	97,25	97,39	97,53	97,53	DPU
26	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	%	97,98	98,49	98,54	98,8	99,05	99,29	99,29	DPU
27	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Liter/detik	1.570	1.570	1.720	1.720	1.770	2.770	2.770	DPU
28	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	%	78,43	78,47	78,51	78,54	78,57	78,59	78,59	DPU
29	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	%	96,79	96,95	97,1	97,25	97,39	97,53	97,53	DPU
30	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	%	0,75	0,77	0,78	0,79	0,80	0,81	0,81	DPU
31	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	%	3,00	4,20	4,40	4,80	5,20	5,50	5,50	DPU
32	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Kota	0	0	0	1	1	1	1	DPU
33	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan	Institusi/ Lembaga	51	56	61	66	71	76	76	DPU
34	Panjang pembangunan jalan tol	km	33,12	33,12	33,12	33,12	33,12	33,12	33,12	DPU
35	Panjang pembangunan jalan kota (km)	km	511.062,0	511.063,0	511.070,0	511.072,5	511.075,0	511.077,5	511.077,5	DPU
36	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	%	52,15	52,84	53,47	54,10	54,73	55,36	55,36	DPU
37	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	57,59	57,59	73,90	90,21	100,00	-	-	DPU
38	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	91,79	92,05	92,29	92,53	92,76	92,98	92,98	DPU
49	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	92,38	92,89	93,39	93,90	94,41	94,91	94,91	DPU
40	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	3,09	5,49	7,62	10,81	14,01	17,20	17,20	DPU
D	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**									
1	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	%	0,00	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,04	DISPERKIM
2	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	%	16,70	16,75	16,80	16,85	16,90	16,95	16,95	DISPERKIM
3	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	%	0,00	32,56	51,47	67,78	84,08	100,00	100,00	DISPERKIM
4	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	N/A	27,00	28,75	30,50	32,25	34,00	34,00	DISPERKIM
5	Nilai SAKIP OPD	Poin	73,00	74,00	75,00	76,00	78,00	80,00	80,00	DISPERKIM

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020)	Target Kinerja					Kondisi Akhir Periode Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	%	N/A	0,00	0,71	1,42	2,13	2,84	2,84	DISPERKIM
7	Luasan Kawasan Kumuh (Ha)	Ha	153,3	103,39	74,40	49,40	24,40	0,00	0,00	DISPERKIM
8	Persentase Rumah Tangga di Luar SK Kumuh yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	%	0,01	0,01	0,01	0,04	0,08	0,12	0,12	DISPERKIM
9	Persentase Peningkatan PSU pada Lingkungan Perumahan	%	1,04	1,39	1,74	2,08	2,43	2,78	2,78	DISPERKIM
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	N/A	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	DISPERKIM
11	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	N/A	0,00	0,71	1,42	2,13	2,84	2,84	DISPERKIM
12	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DISPERKIM
13	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	%	2,76	2,75	2,57	2,45	2,2	2,01	2,01	DISPERKIM
14	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	%	97,24	97,25	97,43	97,55	97,8	97,99	97,99	DISPERKIM
15	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	N/A	1,18	2,36	3,55	4,73	5,91	5,91	DISPERKIM
16	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	0,00	0,00	9,85	22,46	37,83	55,95	55,95	DISPERKIM
17	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	DISPERKIM
18	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	2,76	2,61	2,41	2,41	2,32	2,21	2,21	DISPERKIM
E	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									
1	Persentase Penurunan Dampak Buruk Yang Diakibatkan Bencana	%	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	BPBD
2	Persentase Penurunan Angka Kebakaran per Tahun	%	2,50	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	BPBD
3	Nilai SAKIP OPD	Poin	69,00	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	78,00	BPBD
4	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	N/A	27,00	28,75	30,50	32,25	34,00	34,00	BPBD
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Satpol PP	Poin	N/A	75,00	77,00	79,00	81,00	83,00	83,00	SATPOL PP
6	Nilai SAKIP OPD	Poin	70,09	70,33	70,57	70,81	71,05	71,29	71,29	SATPOL PP
7	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	N/A	27,00	28,00	29,00	30,00	31,00	31,00	SATPOL PP
8	Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	%	14,00	14,00	13,50	13,00	12,50	12,00	12,00	SATPOL PP
9	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	%	83,20	85,00	87,50	90,00	92,00	94,00	94,00	BPBD
10	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	%	83,20	85,00	87,50	90,00	92,50	95,00	95,00	BPBD
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	N/A	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	78,00	BPBD
12	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	N/A	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	81,00	SATPOL PP
13	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	Layanan	44	72	192	192	192	192	840	SATPOL PP
14	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	93,00	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	94,00	SATPOL PP
15	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	97,55	97,60	97,80	98,00	98,30	98,50	98,50	SATPOL PP
F	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**									
1	Persentase PMKS yang Mendapat Pelayanan Sosial	%	60,00	60,00	62,00	64,00	65,00	67,00	67,00	DINSOS

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020)	Target Kinerja					Kondisi Akhir Periode Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terkelola	%	78,00	79,00	80,00	82,00	85,00	87,00	87,00	DINSOS
3	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	N/A	27,00	28,00	29,00	30,00	31,00	31,00	DINSOS
4	Nilai SAKIP OPD	Poin	61,11	65,00	70,00	75,00	77,00	80,00	80,00	DINSOS
5	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pembinaan	%	60,00	80,00	86,66	90,00	93,33	96,66	96,66	DINSOS
6	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi	%	75,06	77,77	78,94	80	80,95	81,81	81,81	DINSOS
7	Persentase Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	80,77	82,92	85,36	87,8	90,24	92,68	92,68	DINSOS
8	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%	80,00	81,00	82,00	83,00	85,00	85,00	85,00	DINSOS
9	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	78,00	79,00	80,00	82,00	85,00	87,00	87,00	DINSOS
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	N/A	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	74,00	DINSOS
11	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan	RTS	4.909	5.970	5.460	5.350	5.210	5.150	5.150	DINSOS
12	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	%	86,66	87,00	87,30	87,60	87,90	88,00	88,00	DINSOS
13	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	orang	N/A	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00	DINSOS
14	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	%	46,37	45,94	49,37	52,38	55,06	57,44	57,44	DINSOS
15	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	N/A	60,83	61,06	62,03	63,07	64,18	64,18	DINSOS
16	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	80,00	81,00	82,00	83,00	85,00	85,00	85,00	DINSOS
II	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
A	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**									
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	62,90	63,80	64,70	65,60	66,50	67,40	67,40	DISNAKER
2	Nilai SAKIP OPD	Poin	61,48	63,00	65,00	68,00	72,00	75,00	75,00	DISNAKER
3	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	32,69	32,91	33,18	33,45	33,72	34,00	34,00	DISNAKER
4	Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun	%	N/A	3,20	3,30	3,40	3,50	3,60	3,60	DISNAKER
5	persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan yang tersalur	%	54,00	54,00	55,00	56,00	57,00	58,00	58,00	DISNAKER
6	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%	23,00	23,00	23,50	23,60	23,70	23,80	23,80	DISNAKER
7	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan perjanjian bersama	%	68,10	69,00	70,40	72,00	73,00	75,00	75,00	DISNAKER
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	DISNAKER
B	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**									
1	Prosentase RKA Responsif Gender	%	2,34	4,00	8,00	10,00	15,00	25,00	25,00	DP3AKB
2	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	N/A	27,00	27,30	27,75	28,00	28,40	28,40	DP3AKB
3	Persentase Jumlah OPD yang Telah Melakukan Penyusunan Anggaran yang Responsif Gender	%	27,80	82,40	88,24	97,06	100,00	100,00	100,00	DP3AKB

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020)	Target Kinerja					Kondisi Akhir Periode Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO Per 100.000 Penduduk Perempuan	%	11,46	9,08	8,50	8,36	8,19	8,01	8,01	DP3AKB
5	Persentase Kecamatan yang Memiliki Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	%	57,14	71,43	71,43	71,43	85,71	100,00	100,00	DP3AKB
6	Persentase OPD yang Memiliki Data Terpilah	%	11,76	14,71	33,33	36,11	38,89	41,67	41,67	DP3AKB
7	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Gugus Tugas KLA	%	0,00	25,00	32,00	40,00	45,00	50,00	50,00	DP3AKB
8	Persentase Penyelesaian Penanganan klien pada UPTD PPA	%	72,31	65,00	67,00	68,00	70,00	71,50	71,50	DP3AKB
9	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	N/A	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	79,00	DP3AKB
10	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Poin	35,00	36,00	37,00	38,00	39,00	40,00	40,00	DP3AKB
11	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	%	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	21,00	21,00	DP3AKB
12	Presentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	%	0,0029	0,003	0,0031	0,0032	0,0033	0,0034	0,0034	DP3AKB
13	Presentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di Lembaga Eksekutif (eselon II)	%	0,22	0,23	0,25	0,27	0,28	0,29	0,29	DP3AKB
14	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	%	0,028	0,027	0,026	0,025	0,024	0,023	0,023	DP3AKB
15	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan yang mendapat layanan komperehensif	%	84,09	84,09	84,10	84,25	84,35	84,70	84,70	DP3AKB
C	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**									
1	Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah daerah	%	3,00	9,00	10,00	12,00	14,00	16,00	16,00	DP3
2	Tingkat Konsumsi Energi/TKE (AKE 2100 Kkal/kap./hari)	%	94,50	94,50	94,50	94,50	95,00	95,00	95,00	DP3
3	Tingkat Konsumsi Protein/TKP (57 Gram/kap./hari)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DP3
4	Persentase Keamanan Pangan	%	100,00	88,00	89,00	89,00	90,00	90,00	90,00	DP3
5	Nilai SAKIP OPD	Poin	81,00	81,00	81,20	81,50	81,70	82,00	82,00	DP3
6	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	N/A	27,00	28,00	29,00	30,00	31,00	31,00	DP3
7	Persentase Infrastruktur yang Tersedia	%	N/A	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	40,00	DP3
8	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	N/A	0,024	0,053	0,081	0,11	0,143	0,143	DP3
9	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	N/A	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00	DP3
10	Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang aman	%	100,00	88,00	89,00	89,00	90,00	90,00	90,00	DP3
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	75,00	DP3
12	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Poin	87,00	87,00	87,00	88,00	89,00	90,00	90,00	DP3
13	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	NA	0,024	0,053	0,081	0,11	0,143	0,143	DP3
D	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**									
1	Prosentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan (IMTN dan Fasilitasi Sengketa Tanah)	%	88,00	88,00	89,00	90,00	91,00	92,00	92,00	DPPR
2	Prosentase luas tanah yang telah dibebaskan	%	62,16	66,33	69,49	72,65	76,44	80,24	80,24	DPPR
3	Nilai SAKIP OPD	Poin	65,87	65,90	65,95	65,97	65,98	66,00	66,00	DPPR
4	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	N/A	28,00	28,50	29,00	29,50	30,00	30,00	DPPR
5	Persentase luas pemanfaatan ijin lokasi yang diterbitkan	%	N/A	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	78,00	DPPR

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020)	Target Kinerja					Kondisi Akhir Periode Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6	Persentase Fasilitasi Penanganan Sengketa Tanah Garapan Melalui Mediasi	%	N/A	41,70	40,00	39,00	38,00	37,50	37,50	DPPR
7	Persentase Luas Tanah yang diberikan Ganti Rugi yang dilaksanakan oleh DPPR	%	62,16	66,33	69,49	72,65	76,44	80,24	80,24	DPPR
8	Persentase Luas tanah yang Sudah Dimanfaatkan	%	88,00	88,00	89,00	90,00	91,00	92,00	92,00	DPPR
E	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**									
1	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Poin	65,33	65,33	65,33	65,33	65,43	65,53	65,53	DLH
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	88,92	89,02	89,12	89,22	89,32	89,42	89,42	DLH
3	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	47,22	47,32	47,42	47,52	47,62	47,72	47,72	DLH
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Poin	81,12	81,15	81,18	81,2	81,22	81,24	81,24	DLH
5	Nilai SAKIP OPD	Poin	70,96	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	75,00	DLH
6	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	N/A	27,00	28,75	30,50	32,25	34,00	34,00	DLH
7	Persentase Ketersediaan Data Dokumen Perencanaan	%	31,25	37,50	50,00	75,00	87,50	100,00	100,00	DLH
8	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang Dilaksanakan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DLH
9	Persentase RTH yang dikelola	%	10,57	10,57	10,59	10,61	10,63	10,65	10,65	DLH
10	Persentase Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah B3 Yang Melaporkan Limbahnya	%	26,32	34,21	44,74	55,26	65,79	76,32	76,32	DLH
11	Persentase Usaha atau Kegiatan yang Memiliki Izin Lingkungan	%	18,29	26,83	29,27	31,71	32,93	34,15	34,15	DLH
12	persentase peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan LH	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DLH
13	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat yang terselenggara	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DLH
14	Persentase Penanganan Pengaduan yang tertangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DLH
15	Persentase pengelolaan persampahan	%	97,66	99,00	99,00	99,00	100,00	100,00	100,00	DLH
16	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	76,66	77,16	77,66	78,16	78,66	79,16	79,16	DLH
17	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	%	85,00	87,00	88,00	89,00	91,00	92,00	94,00	DLH
18	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Ton	97.521	99.472	101.461	103.490	105.560	107.671	107.671	DLH
19	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Ton	28.207	31.028	34.130	37.544	41.298	45.428	45.428	DLH
20	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dokumen	0	0	1	0	0	1	2	DLH
F	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pendaftaran penduduk	Nilai	80,36	81,16	81,97	82,79	83,62	84,45	84,45	DISDUKCAPIL
2	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pencatatan sipil	Nilai	83,27	84,10	84,94	85,79	86,65	87,51	87,51	DISDUKCAPIL
3	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	Nilai	N/A	75,00	77,25	79,56	81,95	84,41	84,41	DISDUKCAPIL
4	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	35,39	35,3	35,35	35,4	35,45	35,50	35,50	DISDUKCAPIL
5	Nilai SAKIP OPD	Poin	78,07	78,57	79,07	79,57	80,07	80,57	80,57	DISDUKCAPIL
6	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk	%	87,51	88,11	89,78	91,45	93,12	94,79	94,79	DISDUKCAPIL
7	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil	%	91,01	96,5	96,53	96,55	96,58	96,6	96,6	DISDUKCAPIL

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020)	Target Kinerja					Kondisi Akhir Periode Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8	Persentase pengelolaan data administrasi kependudukan secara elektronik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DISDUKCAPIL
9	Persentase Dokumen Profil Kependudukan yang Tersusun	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DISDUKCAPIL
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	78,00	78,50	79,00	81,00	83,00	83,5	83,5	DISDUKCAPIL
11	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	%	93,11	98,00	98,05	98,10	98,15	98,20	98,20	DISDUKCAPIL
12	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Poin	99,10	99,15	99,20	99,25	99,30	99,35	99,35	DISDUKCAPIL
13	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	%	93,11	98,00	98,05	98,10	98,15	98,20	98,20	DISDUKCAPIL
14	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	%	93,11	98,00	98,05	98,10	98,15	98,20	98,20	DISDUKCAPIL
15	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistic Register)	Keterangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DISDUKCAPIL
16	Perekaman KTP elektronik	%	33,32	99,33	99,34	99,35	99,36	99,37	99,37	DISDUKCAPIL
17	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	63,22	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00	DISDUKCAPIL
18	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	26,47	41,18	55,88	70,59	85,29	94,12	94,12	DISDUKCAPIL
G	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**									
1	Persentase Kelurahan Kategori Bekembang	%	N/A	5,88	11,76	29,41	44,12	58,82	58,82	DP3AKB
2	Persentase kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi	%	N/A	5,88	11,76	29,41	44,12	58,82	58,82	DP3AKB
3	Nilai Swadaya Masyarakat dalam pembangunan di kelurahan		83.875.636.859	83.900.000.000	83.950.000.000	84.050.000.000	84.150.000.000	84.550.000.000	420.600.000.000	DP3AKB
H	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**									
1	Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi	%	70,61	70,61	70,63	70,65	70,65	70,65	70,65	DP3AKB
2	Nilai SAKIP OPD	Poin	84,33	84,33	84,4	84,42	84,45	84,49	84,49	DP3AKB
3	Persentase tindak lanjut Rekomendasi Kebijakan Terkait Pengendalian Penduduk	%	60,00	62,00	64,00	66,00	68,00	70,00	70,00	DP3AKB
4	Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) (Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani / Jumlah Pasangan Usia Subur x 100%)	%	14,04	13,75	13,40	13,10	11,25	11,20	11,20	DP3AKB
5	Persentase keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan/ poktan	%	8,51	10,74	12,75	15,8	18,35	20,35	20,35	DP3AKB
I	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**									
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Perhubungan	Poin	77,84	78,08	78,32	78,56	78,8	79,04	79,04	DISHUB
2	VC Ratio di Jalan Kota	Indeks	0,64	0,64	0,63	0,62	0,61	0,60	0,60	DISHUB
3	Persentase sarana dan prasarana kedermagaan yang dikelola	%	57,00	57,00	59,00	63,00	64,00	65,00	65,00	DISHUB
4	Nilai SAKIP OPD	Poin	76,79	76,79	77,25	78,75	79,25	80,00	80,00	DISHUB
5	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	N/A	27,00	28,75	30,50	32,25	34,00	34,00	DISHUB
6	Persentase sarana dan prasarana jalan layak fungsi.	%	83,00	85,00	87,00	89,00	91,00	93,00	93,00	DISHUB
7	Persentase load faktor angkutan orang umum.	%	42,00	42,00	47,00	52,00	57,00	62,00	62,00	DISHUB
8	Persentase pelayanan kepelabuhanan	%	55,00	62,00	64,00	66,00	68,00	70,00	70,00	DISHUB
9	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	80,00	DISHUB

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020)	Target Kinerja					Kondisi Akhir Periode Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
10	Jumlah dermaga penyebrangan	lokasi	1	1	1	1	1	1	1	DISHUB
11	Jumlah pelabuhan strategis	lokasi	4	4	4	4	4	4	4	DISHUB
J	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**									
1	Indeks Domain Kebijakan SPBE	Nilai	N/A	2,45	2,60	2,80	3,00	3,20	3,20	DISKOMINFO
2	Indeks Domain Layanan SPBE	Nilai	N/A	3,50	3,70	3,75	3,80	3,90	3,90	DISKOMINFO
3	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Nilai	N/A	3,10	3,30	3,50	3,70	3,80	3,80	DISKOMINFO
4	Indeks Domain Manajemen SPBE	Nilai	N/A	2,00	2,10	2,30	2,40	2,50	2,50	DISKOMINFO
5	Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	90,00	90,00	DISKOMINFO
6	Nilai SAKIP OPD	Poin	64,30	65,00	65,50	66,00	66,50	67,00	67,00	DISKOMINFO
7	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	30,00	31,00	32,00	33,00	34,00	35,00	35,00	DISKOMINFO
8	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	N/A	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	DISKOMINFO
9	Persentase aplikasi layanan publik secara daring yang memanfaatkan domain/sub domain instansi penyelenggaraan negara	%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	DISKOMINFO
10	Persentase layanan publik dan internal yang diselenggarakan secara online dan atau terintegerasi	%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	DISKOMINFO
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	DISKOMINFO
12	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telpon genggam	%	85,22	87,00	88,00	89,00	90,00	91,00	91,00	DISKOMINFO
13	Proporsi individu yang menggunakan internet	%	70,3	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	75,00	DISKOMINFO
K	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**									
1	Persentase Koperasi Berkualitas	Persen	18,20	19,87	20,92	21,97	23,01	24,06	24,06	DKUMKMP
2	Persentase Pertumbuhan Omset UMK	Persen	5,26	5,27	5,29	5,32	5,36	5,41	5,41	DKUMKMP
3	Nilai SAKIP OPD	Poin	78,76	78,85	78,90	78,95	79,00	80,00	80,00	DKUMKMP
4	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	N/A	27,00	28,75	30,50	32,25	34,00	34,00	DKUMKMP
5	Persentase Koperasi yang Telah Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	%	5,23	5,44	5,65	5,86	6,07	6,28	6,28	DKUMKMP
6	Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT	%	18,20	19,87	20,92	21,97	23,01	24,06	24,06	DKUMKMP
7	Persentase Koperasi yang Meningkat Status Kesehatannya	%	N/A	50,00	51,85	53,57	55,17	56,67	56,67	DKUMKMP
8	Persentase SDM Pengelola Koperasi yang meningkat kapasitasnya	%	19,67	25,1	30,68	37,66	46,03	55,09	55,09	DKUMKMP
9	Persentase SDM Pengelola Koperasi yang meningkat kapasitasnya (sumber dana : DAK non fisik)	%	19,67	25,10	32,78	41,35	50,07	59,34	59,34	DKUMKMP
10	Persentase Koperasi Sehat	%	N/A	3,35	5,02	7,53	10,88	15,06	15,06	DKUMKMP
11	Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	%	34,75	81,68	83,32	84,98	86,68	88,41	88,41	DKUMKMP
12	Persentase Usaha Mikro yang Meningkat Omsetnya	%	5,17	5,21	5,25	5,28	5,32	5,36	5,36	DKUMKMP
13	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	N/A	67,00	70,00	74,00	78,00	80,00	80,00	DKUMKMP
14	Persentase kredit UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) terhadap seluruh jumlah kredit di bank	%	31,56	32,06	32,56	33,06	33,56	34,06	34,06	DKUMKMP
L	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**									
1	Persentase Pencapaian nilai realisasi investasi	%	476,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DPMPT
2	Persentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	%	0,73	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	DPMPT
3	Nilai SAKIP OPD	Poin	77,15	77,20	77,40	77,60	77,80	78,00	78,00	DPMPT

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020)	Target Kinerja					Kondisi Akhir Periode Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	34,11	34,12	34,13	34,14	34,15	34,16	34,16	DPMPT
5	Persentase Pelaku Usaha yang Mendapat Manfaat Insentif Bidang Penanaman Modal	%	N/A	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	DPMPT
6	Presentase Minat Investasi dalam Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	%	30,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	DPMPT
7	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan	%	66,00	67,00	68,00	69,00	70,00	71,00	71,00	DPMPT
8	Persentase Perusahaan (debottlenecking) yang difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DPMPT
9	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Berlaku Efektif	%	83,45	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	88,00	DPMPT
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	75,23	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00	82,00	DPMPT
M	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**									
1	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi, kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	5,00	10,00	12,00	15,00	20,00	25,00	25,00	DPOP
2	Peningkatan prestasi olahraga	%	6,00	10,96	15,96	20,96	25,96	30,96	30,96	DPOP
3	Nilai SAKIP OPD	Poin	73,04	73,08	74,00	74,02	74,06	75,00	75,00	DPOP
4	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	N/A	27,00	28,75	30,50	32,25	34,00	34,00	DPOP
5	Persentase Pemuda yang Kreatif, Inovatif, dan Mandiri	%	0,02	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,70	DPOP
6	Persentase Atlet yang Berprestasi	%	5,90	25,00	7,00	6,20	7,40	26,20	26,20	DPOP
7	Persentase Organisasi Kepramukaan Aktif	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DPOP
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	N/A	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	75,00	DPOP
N	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**									
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	N/A	80,00	80,00	85,00	90,00	90,00	90,00	DISKOMINFO
O	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**									
1	Persentase sistem elektronik atau aset informasi yang diaudit dengan resiko kategori rendah	%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	DISKOMINFO
2	Persentase perangkat Daerah yang terhubung dengan jaringan komunikasi sandi	%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	DISKOMINFO
P	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**									
1	Nilai pemajuan kebudayaan	Nilai	N/A	0,25	0,43	0,75	1,06	1,37	1,37	DISDIKBUD
2	Persentase Pengembangan Kebudayaan	%	N/A	34,90	45,00	55,10	67,98	78,08	78,08	DISDIKBUD
3	Persentase Kelompok Sanggar Seni yang Terlibat dalam Festival Seni	%	19,90	24,88	27,36	34,83	37,31	39,80	39,80	DISDIKBUD
4	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang dilibatkan dalam pengembangan sejarah lokal	%	N/A	26,67	33,33	46,67	60,00	80,00	80,00	DISDIKBUD
5	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	87,50	94,12	95,59	97,06	98,53	100,00	100,00	DISDIKBUD
6	Persentase SDM Pengelola Permuseuman yang tersertifikasi	%	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56	55,56	DISDIKBUD
Q	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**									
1	Persentase Peningkatan layanan Perpustakaan	%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	DISPUSTAKAR
2	Nilai SAKIP OPD	Poin	65,96	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	78,00	DISPUSTAKAR
3	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	N/A	27,00	28,75	30,50	32,25	34,00	34,00	DISPUSTAKAR
4	Persentase Perpustakaan yang Memenuhi Standar Nasional	%	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	8,00	DISPUSTAKAR

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020)	Target Kinerja					Kondisi Akhir Periode Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	N/A	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00	82,00	DISPUSTAKAR
6	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00	DISPUSTAKAR
R	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**									
1	Nilai Pengawasan Kearsipan	Nilai	90,00	90,10	90,20	90,30	90,40	90,50	90,50	DISPUSTAKAR
2	Persentase Arsip yang dikelola	%	57,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00	DISPUSTAKAR
3	Persentase Arsip yang dilindungi dan terselamatkan	%	46,00	55,00	65,00	75,00	85,00	100,00	100,00	DISPUSTAKAR
4	Persentase Perizinan Penggunaan Arsip	%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DISPUSTAKAR
6	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DISPUSTAKAR
III	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**									
A	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**									
1	Total Produksi Sub Sektor Perikanan	Ton	4.275	4.489	4.597	4.704	4.812	4.919	23.521	DP3
2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Ton	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600	22.000	DP3
3	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	Ton	275	289	297	304	312	319	1.521	DP3
B	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**									
1	Tingkat Hunian akomodasi	%	26,00	30,00	36,00	45,00	50,00	53,00	53,00	DPOP
2	Persentase pelaku ekraf yang tersertifikasi	%	N/A	19,23	26,92	34,62	42,31	46,15	46,15	DPOP
3	Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	%	10,00	3,00	3,00	4,00	6,00	6,00	6,00	DPOP
4	Prosentase Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Pariwisata	%	N/A	17,00	20,00	21,00	24,00	26,00	26,00	DPOP
5	Persentase Sub sektor ekraf yang terfasilitasi dalam pendaftaran kekayaan intelektualnya	%	N/A	12,00	18,00	24,00	29,00	35,00	35,00	DPOP
6	Persentase peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	%	N/A	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	16,00	DPOP
7	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DPOP
8	Jumlah wisatawan mancanegara	orang	16.510	18.305	23.235	29.894	39.962	55.231	55.231	DPOP
9	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	orang	1.065.763	1.181.695	1.476.765	1.870.106	2.460.038	3.344.769	3.344.769	DPOP
10	Jumlah kunjungan wisatawan kota Balikpapan	orang	1.082.273	1.200.000	1.500.000	1.900.000	2.500.000	3.400.000	3.400.000	DPOP
11	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	orang	5.939	6.500	6.800	7.000	7.200	7.400	7.400	DPOP
C	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**									
1	Total Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan	Ton	17.474,8	17.500	17.800	18.000	18.000	18.000	89.300	DP3
2	Total Produksi Sub Sektor Hortikultura	Ton	114.873	120.500	126.600	133.000	140.000	147.000	667.100	DP3
3	Total Produksi Sub Sektor Perkebunan	Ton	9.548,5	9.886	10.193	10.501	10.809	11.116	52.505	DP3
4	Total Produksi sub sektor peternakan	Ton	27.403	20.500	20.600	20.700	20.800	20.900	103.500	DP3
5	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	%	34,50	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	60,00	DP3
6	Persentase Sarana Pertanian yang tersedia	%	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	35,00	DP3
7	Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia	%	75,00	75,00	75,00	85,00	85,00	90,00	90,00	DP3
8	Persentase Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terlayani	%	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00	DP3
9	Persentase Luas Lahan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (%)	%	40,00	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	60,00	DP3
10	Persentase Rekomendasi yang Diterbitkan (persen)	%	50,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00	DP3
D	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**									

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020)	Target Kinerja					Kondisi Akhir Periode Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	6,50	6,51	6,52	6,53	6,54	6,55	6,55	DISDAG
2	persentase wajib tera yang melakukan tera / tera ulang	%	36,09	78,00	81,00	84,00	86,00	87,00	87,00	DISDAG
3	inflasi pangan bergejolak	%	3,8	3 - 5	3 - 5	3 - 5	3 - 5	3 - 5	3 - 5	DISDAG
4	persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun / ditingkatkan kapasitasnya / direvitalisasi	%	16,67	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	58,32	DISDAG
5	persentase pertumbuhan pelaku usaha yang telah memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	%	7,50	8,10	8,70	9,40	10,20	11,00	11,00	DISDAG
6	Nilai SAKIP OPD	Poin	66,00	67,00	70,00	73,00	76,00	80,00	80,00	DISDAG
7	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	N/A	27,00	28,75	30,50	32,25	34,00	34,00	DISDAG
8	Persentase Pelaku Usaha yang Telah Diverifikasi dan Memperoleh Rekomendasi	%	50,00	50,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00	DISDAG
9	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola	%	80,00	80,00	80,00	87,00	87,00	93,00	93,00	DISDAG
10	Persentase Penurunan Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	%	6,00	5,80	5,60	5,40	5,20	5,00	5,00	DISDAG
11	Nilai Ekspor Bersih Non Migas	Juta Dollar	1.020	1.175	1.350	1.550	1.785	2.050	2.050	DISDAG
12	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	%	32,00	70,00	71,00	73,00	74,00	76,00	76,00	DISDAG
13	Persentase Pelaku Binaan yang Meningkat Omsetnya	%	50,00	60,00	60,00	70,00	70,00	80,00	80,00	DISDAG
14	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	N/A	76,00	78,00	80,00	82,00	84,00	84,00	DISDAG
15	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	N/A	28,00	28,00	29,00	30,00	31,00	31,00	DISDAG
16	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	32,00	70,00	71,00	73,00	74,00	76,00	76,00	DISDAG
E	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**									
1	Persentase Pertumbuhan Investasi IKM	Persen	N/A	0,02	0,03	0,07	0,12	0,22	0,22	DKUMKMP
2	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	%	0,00	1,10	1,31	1,62	2,12	2,60	2,60	DKUMKMP
3	Persentase Hasil Pemantauan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait	%	2,88	12,01	12,96	13,89	14,80	15,69	15,69	DKUMKMP
4	Persentase Penyediaan Informasi Industri yang Lengkap dan Terkini	%	22,06	45,45	58,33	61,54	64,29	66,67	66,67	DKUMKMP
5	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	%	4,97	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,00	DKUMKMP
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		22,06	45,45	58,33	61,54	64,29	66,67	66,67	DKUMKMP
IV	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**									
A	**SEKRETARIAT DAERAH**									
1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	31,79	31,89	32,00	32,10	32,20	32,30	32,30	SETDA
2	Persentase Kebijakan Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum dan Kerjasama yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	%	-	95,53	98,03	98,25	98,47	98,69	98,69	SETDA
3	Persentase Kebijakan Bagian Perekonomian, adm. Pembangunan, pbj yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	SETDA
4	Nilai SAKIP OPD	Poin	77,67	78,00	78,50	79,00	79,50	80,00	80,00	SETDA
5	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Kerjasama	%	N/A	97,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	SETDA

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020)	Target Kinerja					Kondisi Akhir Periode Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	SETDA
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00	82,00	SETDA
8	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Poin	27.78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	SETDA
9	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	%	N/A	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00	SETDA
B	**SEKRETARIAT DPRD**									
1	Nilai SAKIP OPD	Poin	63,00	66,00	68,00	70,00	72,00	74,00	74,00	SETWAN
2	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	N/A	27,00	28,75	30,50	32,25	34,00	34,00	SETWAN
3	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD	Nilai	N/A	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	78,00	SETWAN
4	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Funsgi DPRD yang terfasilitasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	SETWAN
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	N/A	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	78,00	SETWAN
V	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									
A	**PERENCANAAN**									
1	Nilai SAKIP (Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja)	Poin	51,74	56,22	56,24	56,25	56,27	56,28	56,28	BAPPEDA LITBANG
2	Nilai SAKIP OPD	Poin	82,88	82,98	83,08	83,18	83,28	83,38	83,38	BAPPEDA LITBANG
3	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	31,52	32,50	33,00	34,00	35,00	36,00	36,00	BAPPEDA LITBANG
4	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	Poin	29.830	32.760	32.769	32.778	32.787	32.796	32.796	BAPPEDA LITBANG
5	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Poin	21.510	23.460	23.466	23.472	23.478	23.484	23.484	BAPPEDA LITBANG
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	85,47	85,50	85,55	85,60	85,65	85,70	85,70	BAPPEDA LITBANG
7	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha	Proyek	0	1	1	0	0	0	2	BAPPEDA LITBANG
8	Jumlah Alokasi Pemerintah Menyiapkan Proyek, Transaksi Proyek, dan dukungan Pemerintah Dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha	Rp	53.150.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	500.000.000	BAPPEDA LITBANG
9	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	%	62,00	62,50	63,00	63,50	64,00	64,50	64,50	BAPPEDA LITBANG
10	Laju pertumbuhan PDB per kapita	Nilai	3,26	3,27	3,28	3,29	3,30	3,31	3,31	BAPPEDA LITBANG
11	PDB per kapita	Nilai	156,28	156,29	156,30	156,31	156,32	156,33	156,33	BAPPEDA LITBANG
12	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/ Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Nilai	4,78	4,79	4,80	4,81	4,82	4,83	4,83	BAPPEDA LITBANG
B	**KEUANGAN**									
1	Nilai SAKIP OPD	Poin	51,63	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00	BKAD
2	Opini Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BKAD
3	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	N/A	27,00	28,75	30,50	32,25	34,00	34,00	BKAD
4	Persentase Peningkatan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	%	17,99	26,40	35,57	60,17	72,41	83,31	83,31	BPPDRD
5	Nilai SAKIP OPD	Poin	60,49	65,00	69,00	71,00	73,00	75,00	75,00	BPPDRD

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020)	Target Kinerja					Kondisi Akhir Periode Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	N/A	27,00	28,00	29,00	30,00	32,00	32,00	BPPDRD
7	Persentase Tahapan Penyusunan Perda dan Perwal tentang APBD, P-APBD, dan LKPD serta Realisasi APBD yang Tepat Waktu	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BKAD
8	Persentase Peningkatan BMD yang terkelola	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BKAD
9	Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)	Milyar	474,40	780,71	852,37	1.062,03	1.192,01	1.321,97	1.321,97	BPPDRD
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	72,50	74,50	76,00	77,5	79,5	82,5	82,5	BKAD
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	80,00	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	86,00	BPPDRD
12	Proporsi Pengeluaran Utama Pemerintah Terhadap Anggaran yang Disetujui	%	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	BKAD
13	Persentase Peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BKAD
14	Total Pendapatan Pemerintah Sebagai Proporsi terhadap PDB menurut Sumbernya	%	0,69	0,70	0,71	0,71	0,72	0,73	0,73	BPPDRD
15	Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDB	%	0,41	0,48	0,52	0,49	0,54	0,57	0,57	BPPDRD
C	**KEPEGAWAIAN**									
1	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	47,87	55,00	57,00	59,00	61,00	62,00	62,00	BKPSDM
2	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	32,36	34,03	34,06	34,25	34,42	34,69	34,69	BKPSDM
3	Nilai SAKIP OPD	Poin	89,23	89,50	89,75	90,00	90,25	90,56	90,56	BKPSDM
4	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja	%	N/A	88,00	88,80	88,91	89,16	90,81	90,81	BKPSDM
5	Persentase sistem informasi ASN yang terintegrasi	%	20,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00	BKPSDM
6	Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik	%	99,85	97,81	97,99	98,17	98,36	98,79	98,79	BKPSDM
7	Persentase peningkatan kualifikasi pendidikan ASN	%	4,24	3,93	3,68	2,65	1,91	1,59	13,76	BKPSDM
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	78,72	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	84,00	BKPSDM
9	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	86,40	100,80	110,27	120,65	131,56	144,56	144,56	BKPSDM
10	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	10,29	12,69	14,65	16,45	18,27	20,23	20,23	BKPSDM
11	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	72,25	89,43	93,29	101,94	105,37	111,18	111,18	BKPSDM
12	Indeks NSPK Manajemen ASN	Poin	41,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00	BKPSDM
D	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**									
1	Persentase ASN yang Memperoleh Pengembangan Kompetensi Sesuai Rencana Pengembangan Kompetensi	%	40,00	17,39	14,91	24,64	18,95	24,10	100,00	BKPSDM
E	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**									
1	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	54,00	60,00	62,00	63,00	64,00	65,00	65,00	BAPPEDA LITBANG
2	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BAPPEDA LITBANG
VI	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**									
A	**INSPEKTORAT DAERAH**									
1	Kapabilitas APIP	Level	level 3	level 3	level 3	level 3	level 4	level 4	level 4	INSKOT
2	Nilai SAKIP Kota Komponen Evaluasi	Poin	6,77	7,42	7,42	7,42	7,43	7,43	7,43	INSKOT

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020)	Target Kinerja					Kondisi Akhir Periode Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Nilai SAKIP OPD	Poin	78,01	78,21	78,41	78,61	78,81	79,01	79,01	INSKOT
4	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	N/A	27,00	28,00	29,00	30,00	31,00	31,00	INSKOT
5	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	%	81,33	83,33	85,33	87,33	89,33	91,33	91,33	INSKOT
6	Persentase Hasil Capaian Kinerja Tata Laksana Pengawasan	%	50,00	51,67	63,33	75	86,67	98,33	98,33	INSKOT
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00	90,00	INSKOT
VII	**UNSUR KEWILAYAHAN**									
A	**KECAMATAN**									
1	Nilai SAKIP Kecamatan	Poin	68,15	68,50	69,00	69,50	70,00	70,50	70,50	KEC BALBAR
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	80,16	80,36	80,46	80,51	80,56	80,61	80,61	KEC BALBAR
3	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	N/A	27,00	27,25	27,50	28,00	28,25	28,25	KEC BALBAR
4	Nilai SAKIP Kecamatan	Poin	69,25	69,35	69,45	69,55	69,65	69,75	69,75	KEC BALKOT
5	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	82,39	82,59	82,89	83,29	83,59	83,89	83,89	KEC BALKOT
6	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	N/A	27,00	27,25	27,50	28,00	28,25	28,25	KEC BALKOT
7	Nilai SAKIP Kecamatan	Poin	65,08	70,00	72,00	73,00	74,00	75,00	75,00	KEC BALSEL
8	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	79,56	81,00	81,00	82,00	82,00	83,00	83,00	KEC BALSEL
9	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	N/A	27,00	27,25	27,50	27,75	28,00	28,00	KEC BALSEL
10	Nilai SAKIP Kecamatan	Poin	69,93	70,18	70,43	70,68	70,93	71,18	71,18	KEC BALTENG
11	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	80,70	80,85	81,00	81,15	81,30	81,45	81,45	KEC BALTENG
12	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	N/A	27,00	27,25	27,50	27,75	28,00	28,00	KEC BALTENG
13	Nilai SAKIP Kecamatan	Poin	69,25	69,35	69,45	69,55	69,65	69,75	69,75	KEC BALTIM
14	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	77,86	77,96	78,00	78,10	78,20	78,30	78,30	KEC BALTIM
15	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	N/A	27,00	27,10	27,20	27,30	27,40	27,40	KEC BALTIM
16	Nilai SAKIP Kecamatan	Poin	73,99	74,25	74,50	74,75	75,00	75,25	75,25	KEC BALUT
17	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	81,20	81,25	81,30	81,35	81,40	81,45	81,45	KEC BALUT
18	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	N/A	27,00	27,25	27,50	27,75	28,00	28,00	KEC BALUT
19	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	Poin	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KEC BALBAR
20	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%	N/A	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	20,00	KEC BALBAR
21	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KEC BALBAR
22	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	Poin	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KEC BALSEL
23	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%	7,99	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00	9,00	KEC BALSEL
24	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KEC BALSEL
25	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	Poin	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KEC BALKOT
26	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%	N/A	10,00	10,20	10,40	10,60	10,80	10,80	KEC BALKOT
27	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KEC BALKOT

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020)	Target Kinerja					Kondisi Akhir Periode Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
28	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	Poin	100,0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KEC BALTIM
29	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%	16,25	16,35	16,45	16,55	16,65	16,75	16,75	KEC BALTIM
30	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	%	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KEC BALTIM
31	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	Poin	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KEC BALUT
32	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%	N/A	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	19,00	KEC BALUT
33	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KEC BALUT
34	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	Poin	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KEC BALTENG
35	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%	N/A	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	KEC BALTENG
36	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KEC BALTENG
37	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	70,00	70,50	71,00	71,50	72,00	72,50	72,50	KEC BALBAR
38	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	70,00	70,50	71,00	71,50	72,00	72,50	72,50	KEC BALKOT
39	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	N/A	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	75,00	KEC BALSEL
40	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	79,32	79,40	79,50	79,60	79,70	79,80	79,80	KEC BALTIM
41	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	75,00	KEC BALUT
42	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	N/A	70,00	70,15	70,30	70,45	70,60	70,60	KEC BALTENG
VIII	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**									
A	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**									
1	Nilai SAKIP OPD	Poin	51,05	60,00	63,00	65,00	68,00	70,00	70,00	BADAN KESBANGPOL
2	Persentase partisipasi lembaga politik dalam pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat	%	N/A	67,00	80,00	100,00	67,00	67,00	67,00	BADAN KESBANGPOL
3	Presentase Konflik Sosial yang ditindaklanjuti	%	64,00	80,00	83,00	88,00	88,00	89,00	89,00	BADAN KESBANGPOL
4	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	N/A	27,00	28,00	28,00	29,00	30,00	30,00	BADAN KESBANGPOL
5	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional	%	N/A	60,00	62,00	64,00	66,00	68,00	68,00	BADAN KESBANGPOL
6	Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik	%	N/A	66,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BADAN KESBANGPOL
7	Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Yang Telah Melapor Pada Pemerintah Kota Balikpapan	%	N/A	83,00	84,00	85,00	89,00	89,00	89,00	BADAN KESBANGPOL
8	Persentase Pemuda yang Mengikuti Sosialisasi Konsep P4GN	%	N/A	80,00	86,00	92,00	95,00	98,00	98,00	BADAN KESBANGPOL
9	Persentase Potensi Konflik yang telah dilakukan monitoring	%	64,00	80,00	83,00	88,00	88,00	89,00	89,00	BADAN KESBANGPOL
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	N/A	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	88,00	BADAN KESBANGPOL

BAB IX
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran strategis dalam pembangunan sebuah daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2005-2025.

Dokumen RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya yang dilaksanakan secara konsisten dan akuntabel. Selain itu, perlu diatur juga mengenai pedoman transisi yang akan mengatur proses penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2027.

9.1 Kaidah Pelaksanaan

Dokumen RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi pemerintah kota dalam menyusun RKPD mulai Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026. Selain itu, RPJMD Kota Balikpapan merupakan dokumen yang harus dipedomani oleh seluruh perangkat daerah se - Kota Balikpapan dalam menyusun dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Kota Balikpapan berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta masyarakat termasuk dunia usaha.
2. Wali Kota Balikpapan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
3. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya;
4. Wali Kota Balikpapan berkewajiban menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 kepada masyarakat.
5. Kepala Perangkat Daerah Kota Balikpapan berkewajiban menyempurnakan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

9.2 Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Tahun 2027 yang dilaksanakan pada Tahun 2026. Sebagaimana diketahui, Tahun 2026 adalah tahun terakhir RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dan RPJMD periode berikutnya belum disusun. Untuk itu, penyusunan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2027 berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Balikpapan, RPJMD Provinsi, RPJMN dan RKP Tahun 2027.

Pemerintah Kota Balikpapan akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2027 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Salah satu agenda penyusunan RKPD yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/terselesaikan sampai dengan Tahun 2026, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional dan provinsi dan lain-lain.

Keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Kota Balikpapan mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar mengawal dan saling bersinergi dalam mewujudkan Kota Balikpapan sebagai Kota "Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman".

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L. TORUAN